



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2025-2045 Provinsi DKI Jakarta

TA 2023



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

28 Februari 2024

Nomor : S. 61 / Menteri-Per (1) / KLHS / Pn. 3 / 2 / 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025 – 2045

Yth. Pj. Gubernur DKI Jakarta
di
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa ;

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
 - a. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16**"*
 - b. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi**"*
 - c. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel** dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik"*
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 782/LH.00.00 tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Laporan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045, diterima lengkap tanggal 15 Januari 2024;
 - c. Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023; dan

- d. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan dalam Rangka Asistensi Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor BA.30/PDLKWS/KLHS/11/2023 tanggal 17 November 2023.
3. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
- a. Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:
 - i. Laporan KLHS (termasuk hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - ii. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
 - b. Telaahan terhadap KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Berita Acara Nomor BA.30/PDLKWS/KLHS/11/2023 tanggal 17 November 2023 menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
 - c. Atas dasar demikian, dinyatakan bahwa KLHS untuk RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 diberikan **persetujuan validasi, dengan rincian sebagaimana terlampir**
4. Adapun rekomendasi dan/atau tindak lanjut adalah sebagai berikut :
1. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi DKI Jakarta;
 2. Menindaklanjuti hasil KLHS apabila dalam proses penyusunan KLHS terdapat keterbatasan metode ilmiah, serta situasi sosial dan politik yang dinamis;
 3. Melaksanakan dan memprioritaskan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan namun belum tercapai sejumlah 116 indikator (46%), serta indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sejumlah 4 indikator (2%);
 4. Melakukan pemenuhan data untuk setiap indikator TPB yang tidak ada data, yaitu sejumlah 66 indikator (26%);
 5. Melaksanakan skenario dengan upaya tambahan untuk indikator TPB yang sudah dilakukan tetapi belum tercapai sejumlah 116 indikator (46%), indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sejumlah 4 indikator (2%), serta indikator TPB yang tidak ada data sejumlah 66 indikator (26%);
 6. Memastikan bahwa seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arah kebijakan;
 7. Melakukan proyeksi analisis terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mengantisipasi dinamika perubahan kondisi lingkungan hidup;

8. Menjadikan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 sebagai rujukan dalam proses penyusunan dokumen KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta; dan
 9. Menyampaikan kepada publik tentang KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta dokumen KLHS dan surat validasi KLHS sebagai bentuk akuntabilitas publik.
5. Pemilik KRP wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana tercantum pada poin 4.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;

Lampiran surat

Nomor : S. 161 /menLK-PKTL /pdikw5 /pla.3 /2 /2024
Tanggal : 28 Februari 2024

Rincian Hasil Telaahan:

- a. KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
- b. Sistematika Laporan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 telah sesuai dengan Permendagri No 07 Tahun 2018 dan kaidah-kaidah PP No 46 Tahun 2016;
- c. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan bahwa terdapat 67 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), 116 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 4 indikator dengan kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB), dan 66 indikator dengan kategori tidak atau belum ada data (N/A).
- d. Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 telah dilakukan berdasarkan hasil sintesis isu antara isu-isu strategis Lingkungan hidup, isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan isu-isu strategis kerangka kebijakan terkait yaitu Rancangan RPJPN Tahun 2025 – 2045, RTR Jabodetabekjur, RPD Tahun 2023 – 2026, KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042, RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042, rancangan RPPLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2052, dan RUU DKJ Tahun 2010 – 2030. Berdasarkan hasil sintesa, diperoleh 4 (empat) isu PB Strategis untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
 - Tingginya Risiko Bencana;
 - Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Kesenjangan Sosial-Ekonomi; dan
 - Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*).
- e. Analisis Capaian TPB terhadap Kondisi Lingkungan Hidup telah dilakukan sesuai ketentuan. Dalam melakukan analisis tersebut pada dasarnya telah dilakukan berbagai kajian sebagai berikut:
 - (1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Jumlah ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta adalah 550.116.002,13 m³/tahun, sedangkan kebutuhan air di Provinsi DKI Jakarta baik untuk keperluan domestik maupun lahan adalah 1.036.651.092,35 m³/tahun.

Sehingga, status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah terlampaui;

- b) Wilayah administrasi kabupaten/kota yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta meliputi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sebesar 0,63%, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 18,69%, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 7,20%, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 22,27%, Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 26,83%, dan Kota Administrasi Jakarta Utara 20,36% dari total luas Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Daya dukung daya tampung Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan telah terlampaui sebesar 95,97%.
- (2) Dampak dan risiko lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
- a) Jenis bencana alam di Provinsi DKI Jakarta yang dominan terjadi adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor;
 - b) Indeks risiko bencana Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam kelas sedang dengan nilai indeks 62.58;
 - c) Berdasarkan hasil kajian, indeks kapasitas daerah dalam pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana adalah 0,54 (sedang);
 - d) Timbulan sampah tinggi berada di Kota Jakarta Pusat dengan nilai 10.08 – 13.43 kg/kapita/hari, dan kota potensi timbulan sampah kedua tertinggi berada di wilayah Kota Jakarta Barat dengan nilai 8.34 – 13.4 kg/kapita/hari. Sedangkan, untuk nilai terendah masih berada di Jakarta Utara dengan nilai 2.97 – 8.33 kg/kapita/hari;
 - e) Wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan potensi beban pencemar air sungai tertinggi adalah, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
- (3) Kinerja jasa ekosistem dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
- a) Jasa lingkungan hidup penyedia air di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah sangat rendah, dan sedang;
 - b) Jasa lingkungan hidup pengaturan air di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah seluas 86,17% dari total luas Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah dan tinggi;
 - d) Jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah;
- (4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
- a) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam di Provinsi DKI Jakarta diukur berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), emisi GRK, dan Daya Dukung Air;

- b) Selama tahun 2016 – 2022 terjadi peningkatan secara signifikan pada nilai IKLH dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 36,41 dan untuk tahun 2022 memiliki nilai 54,63;
 - c) Total produksi emisi GRK DKI Jakarta tahun 2020 sebesar 54.056 Gg CO₂e terdiri dari emisi langsung (direct emission) sebesar 25.253 Gg CO₂e dan emisi tidak langsung (indirect emission) dari penggunaan listrik PLN sebesar 28.804 Gg CO₂e. Pada 2020, sektor energi merupakan kontributor terbesar penghasil emisi GRK *direct* (90,5%), diikuti oleh sektor limbah (9,5%) dan sisanya sektor AFOLU (0,03%);
 - d) Berdasarkan hasil analisis, keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta berada dalam posisi yang rentan. Kondisi sumber daya air terutama di wilayah daratan 98% wilayahnya berada pada status telah terlampaui. . Sementara itu, Kepulauan Seribu secara agregat ketersediaan air juga belum mampu mencukupi kebutuhan domestik.
- (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim diperoleh analisis sebagai berikut:
- a) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah *main land* dan Kepulauan Seribu;
 - b) Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan;
 - c) Pada Tahun 2018, wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan mengalami peningkatan suhu tertinggi mencapai 39⁰C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara fluktuatif, yaitu 37⁰C, 35⁰C, dan 36⁰C.
- (6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperoleh analisis sebagai berikut:
- a) Kondisi tutupan karang hidup di 19 pulau dari 114 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu cenderung mengindikasikan kondisi yang memburuk. Hal ini terlihat dari penurunan tutupan karang hidup dari tahun awal yang teridentifikasi hingga tahun terakhir updating data yang tersedia;
 - b) Pulau Panjang memiliki kecenderungan menurun yang paling besar yaitu sekitar 30,2%. Pada tahun 2003, persentase tutupan karang hidup di Pulau Panjang mencapai 60,5% sementara pada tahun 2018 mencapai 30,3%;
 - c) Perairan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Kepulauan Seribu memiliki sebaran padang lamun dengan kategori jarang hingga sedang;
 - d) Padang lamun di Kepulauan Seribu memiliki status miskin dengan kondisi rusak dengan persentase tutupan total lamun kurang dari ≤ 29,9%;
 - e) Dalam kurun waktu 2009 – 2021, terjadi perubahan pada luasan hutan mangrove di Jakarta Utara yang cenderung naik dengan luasan 358,08 Ha

- f) Luas penutup lahan hutan mangrove di wilayah Kepulauan Seribu selama 12 tahun cenderung mengalami penurunan sebesar 19.93 Ha.
- f. Alternatif Skenario dan Rekomendasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
- (1) Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan
- (2) Alternatif Skenario Dengan Upaya Tambahan
- a) Tingginya Risiko Bencana
- Skenario Moderate
 - Penyusunan rencana mitigasi dan adaptasi bencana secara tematik dan terintegrasi, multi pihak, multi sektor, dan lintas wilayah;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan.
 - Skenario Akselerasi
Skenario moderate ditambah:
 - Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana terutama berkaitan dengan sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan bencana.
- b) Tingginya Risiko Bencana
- Skenario Moderate
 - Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi;
 - Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air.
 - Skenario Akselerasi
Skenario moderate ditambah:
 - Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan;
 - Penurunan emisi melalui pengendalian sumber emisi (teknologi bersih, ekonomi hijau, *circular economy*);
 - Peningkatan ketersediaan air baku melalui pemanfaatan teknologi dan kerja sama antar wilayah.
- c) Ketimpangan Sosial Ekonomi
- Skenario Moderate
 - Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan;
 - Peningkatan IPM Kepulauan Seribu;
 - Penurunan tingkat pengangguran terbuka;
 - Penurunan gini rasio;
 - Peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat.
 - Skenario Akselerasi
Skenario moderate ditambah:
 - Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan;
 - Penyediaan rumah layak huni;
 - Pencapaian target RW kumuh 0%;

- Peningkatan PDRB perkapita sehingga berdaya saing global.
 - d) Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik
 - Skenario Moderate
 - Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance*;
 - Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional.
 - Skenario Akselerasi
- Skenario moderate ditambah:
- Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global;
 - Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam tata Kelola;

Jakarta, 28 Februari 2024
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primantoro, S.Hut, MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran surat**Nomor** : S.161/menLHK-PKTL/pdtkw8/pla-3/2/2024**Tanggal** : 28 Februari 2024**Hasil Pelaksanaan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045**

Nama KLHS	KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045
K/L Penanggung Jawab	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Pelaksanaan	2024

Keterangan penilaian:

- TS - Terpenuhi semua
- ST - Sebagian terpenuhi
- TP - Tidak terpenuhi
- N/A - Informasi tidak cukup untuk dilakukan penilaian

Penilaian 1: Kelengkapan dokumen		
Kriteria Penilaian	Penilaian	Keterangan
Surat Permohonan	TS	-
Dokumen KLHS yang telah disusun	TS	-
Hasil penilaian mandiri yang dilampirkan surat pernyataan penjaminan kualitas	TS	-
Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS	TS	-
Dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS	TS	-
Ringkasan Eksekutif	TS	-

Catatan :

Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016.

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Validasi	Ket.
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:		Nilai : 1. Sudah 2. Belum 3. Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Sudah	
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Sudah	

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami:		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	Sudah	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Sudah	
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Sudah	

Catatan :

Hasil penjaminan kualitas agar ditambahkan catatan dan/atau rekomendasi mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan dari KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 yang perlu menjadi pertimbangan.

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Belum	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Belum	Jenis KLHS ini adalah <i>ex-ante</i>

Catatan :

Dokumen KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 belum menjelaskan adanya keterbatasan dan/atau ketidakpastian ilmiah dalam melakukan analisis dan tidak ada informasi kajian lanjutan yang diperlukan.

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Sudah	
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Sudah	

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi			
Pokok-pokok Rekomendasi		Pemenuhan	Ket
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?			
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini
2.	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	Sudah	
3.	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini
4.	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini

Catatan :

Perumusan Alternatif dan Rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 agar dipastikan untuk mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui dan tindaklanjutnya.

Jakarta, 28 Februari 2024
 Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
 Kebijakan Wilayah dan Sektor,

 Erik Teguh Primantoro, S.Hut, MES.
 NIP. 19690114 199603 1 001

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2045

Jakarta, November 2023

PENYUSUN:

Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045
sesuai Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.215 Tahun 2023
tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.

Ketua:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ketua II

Kepala Bappeda

Sekretaris

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan DLH

Anggota merupakan perwakilan lintas perangkat daerah tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait (detil anggota disertakan dalam Lampiran 1. SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 -2030):

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| • BPBD | • Disgulkarmat | • Dishub | • Biro Hukum |
| • BPBUMD | • Distamhut | • Dispora | • Biro Ekonomi |
| • BPKD | • DPPAPP | • Disbud | • Biro Pemerintahan |
| • Bappeda | • Dinsos | • Disparekraf | • Biro Kesos |
| • Walikota dan Bupati administratif | • DSDA | • Diskominfo | • Sekretariat SDGs |
| • DLH | • DCKTaru | • Disdik | • Perguruan Tinggi |
| • Dinkes | • DKPKP | • Disperaperkim | • LM |
| | • Disdukcapil | • Biro PLH | |

TENAGA AHLI

Adi Wiyana | Sri Handayani | Endrawati Fatimah | Triarko Nurlambang | Dwi Nurcahyadi | Haditya Pradana | Agista Hijri | Elida Rizky

TENAGA AHLI PENDUKUNG

Fahmi Nur Amalia | Yasmine Azura Kirana

Disclaimer:

Dokumen KLHS untuk RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 disusun berdasarkan data dan informasi yang didapatkan pada saat kajian ini disusun dari bulan Juni-November 2023. Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkini yang diidentifikasi bersama dengan OPD terkait. Data dan informasi tersebut dapat mengalami perubahan di masa mendatang. Dokumen KLHS ini milik Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 dan dapat diakses secara umum pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>. Untuk keperluan reproduksi atau penggunaan, pemanfaatan oleh pihak lain dipersilahkan menghubungi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selaku Perwakilan Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 dan diwajibkan mencantumkan sumber referensi: *Laporan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045*.



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 dengan baik.

Dokumen KLHS ini disusun untuk mendokumentasikan hasil kajian yang dilakukan melalui serangkaian proses deliberatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045 mengacu pada kaidah penyusunan KLHS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh kebijakan, perencanaan, dan program selaras serta prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Pembuat KLHS dari berbagai perangkat daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan, akademisi, swasta, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain yang telah berkontribusi dalam penyusunan KLHS ini.

Akhir kata, semoga dokumen KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045 dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan terkait, khususnya RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 12 Januari 2024



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Signature]
Heru Budi Hartono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Dasar Hukum	13
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Ruang Lingkup	13
1.5 Metodologi Penyusunan	14
1.6 Sistematika Laporan KLHS RPJPD	19
BAB 2 DASAR TEORI	21
BAB 3 KONDISI UMUM DAERAH	34
3.1 Kondisi Geografis	34
3.1.1 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis)	34
3.1.2 Karakteristik Wilayah	40
3.2 Kondisi Lingkungan Hidup	59
3.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	82
3.2.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	87
3.2.4 Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup	90
3.2.5 Keanekaragaman Hayati	97
3.2.6 Area Bernilai Konservasi Tinggi	107
3.3 Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB	111
3.3.1 Pertumbuhan PDRB	111
3.3.2 Pendapatan Daerah	113
3.4 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB	114
BAB 4 ANALISIS ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	118
4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan	118
4.2 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Teknokratik	119
4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Gambaran Umum Capaian TPB	119
4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Kondisi Lingkungan Hidup	131
4.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Telaah Dokumen Perencanaan Strategis	137
4.2.4 Hasil Analisis Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan secara Teknokratik	143
4.3 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Partisipatif	143
4.3.1 Focus-Group Discussion (FGD) Isu Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan	143



4.3.2	Konsultasi Publik Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	144
4.4	Kerangka Kajian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.....	145
4.4.1	Tingginya Risiko Bencana	145
4.4.2	Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup	155
4.4.3	Ketimpangan Sosial – Ekonomi	165
4.4.4	Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (<i>Good Governance</i>)	173
BAB 5	ANALISIS CAPAIAN TPB PADA OPD	178
BAB 6	ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	188
6.1	Tren, Proyeksi, dan Skenario Indikator.....	188
6.1.1	Tingginya Risiko Bencana	191
6.1.2	Ancaman Keberlanjutan SDA dan Kualitas Lingkungan.....	194
6.1.3	Ketimpangan Sosial Ekonomi Masyarakat	203
6.1.4	Belum Optimalnya Tata Kelola	208
6.2	Alternatif Kebijakan	211
6.2.1	Harmonisasi Kebijakan sebagai Dasar Pertimbangan	211
6.2.2	Alternatif Kebijakan	216
6.3	Rekomendasi Substansi Kebijakan	219
6.4	Usulan Integrasi	226
6.5	Tindak Lanjut	226
BAB 7	KESIMPULAN.....	228
LAMPIRAN	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	15
Gambar 1.2. Tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD	15
Gambar 1.3 Rencana Kerja Pelaksanaan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045.....	16
Gambar 2.1 Struktur Kota Batavia	23
Gambar 2.2 Struktur Kota Batavia	23
Gambar 2.3 Ilustrasi Perkembangan Kota Jakarta	24
Gambar 2.4 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia	26
Gambar 2.5 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi	27
Gambar 2.6 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur	29
Gambar 2.7 Gambaran Jakarta di Masa Depan	31
Gambar 3.1. Administrasi Provinsi DKI Jakarta	35
Gambar 3.2. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan batas Wilayah Sungai.....	37
Gambar 3.3. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan Batas Sistem Hidrologi DAS	38
Gambar 3.4. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan Batas Wilayah Sungai JABODETABEPUNJUR.....	39
Gambar 3.5. Ketinggian lahan wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	40
Gambar 3.6 Ketinggian lahan wilayah Jabodetabek.....	41
Gambar 3.7 Peta Curah Hujan Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta	42
Gambar 3.8. Cekungan Air Tanah Jakarta (Warna Kuning)	44
Gambar 3.9 Skema Sederhana Penampang Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara	44
Gambar 3.10. Peta Potensi Imbuhan Air Tanah Dangkal CAT Jakarta Tahun 1900, 1990, 2014	45
Gambar 3.11. Daerah Aliran Sungai dalam WS Kepulauan Seribu dan WS Ciliwung-Cisadane.....	47
Gambar 3.12. Peta Kawasan Hutan Provinsi DKI Jakarta	50
Gambar 3.13. Peta Kawasan Hutan Wilayah Fungsional.....	51
Gambar 3.14. Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014.....	52
Gambar 3.15. Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	53
Gambar 3.16. Peta Penggunaan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.....	54
Gambar 3.17. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	55
Gambar 3.18. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2022...	56
Gambar 3.19 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	57
Gambar 3.20. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2020	58
Gambar 3.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi DKI Jakarta	59
Gambar 3.22. Ekoregion Wilayah Fungsional DKI Jakarta	61
Gambar 3.23. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta	62
Gambar 3.24. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta	65
Gambar 3.25. Tipe Vegetasi Provinsi DKI Jakarta.....	67
Gambar 3.26 Ekoregion Laut DKI Jakarta.....	68
Gambar 3.27. Distribusi Spasial Jasa Lingkungan Penyedia Air (a), Pengaturan Air (b), Pengaturan Udara (c) dan Mitigasi Banjir (d) Wilayah Fungsional Tahun 2020	71
Gambar 3.28. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Fungsional Tahun 2020.....	71
Gambar 3.29. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	73
Gambar 3.30. Kecenderungan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Fungsional tahun 1996 - 2020	74
Gambar 3.31. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.....	76
Gambar 3.32. Kecenderungan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Fungsional Tahun 1996 - 2020.....	77
Gambar 3.33. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 79	
Gambar 3.34. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	81
Gambar 3.35. Ketersediaan Air di Wilayah Fungsional berkaitan dengan Penyediaan Air Tahun 2020	83

Gambar 3.36. Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Fungsional Tahun 2023	84
Gambar 3.37 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 2023	86
Gambar 3.38 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim DKI Jakarta	88
Gambar 3.39 Kerentanan Terhadap Bencana Kekeringan DKI Jakarta	88
Gambar 3.40 Monitoring Perubahan Suhu Permukaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	89
Gambar 3.41 Distribusi Potensi Timbulan Sampah Tahun 2023	91
Gambar 3.42 Potensi Beban Pencemar Parameter BOD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta	94
Gambar 3.43 Potensi Beban Pencemar Parameter COD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta	95
Gambar 3.44 Potensi Beban Pencemar Parameter TSS Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta	96
Gambar 3.45. Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu	98
Gambar 3.46. Manfaat dan Fungsi Padang Lamun	102
Gambar 3.47. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove 2009 – 2018	105
Gambar 3.48. Nilai – Nilai yang Terkandung Dalam Sebuah Kawasan dan Dianggap Sangat Penting Disebut Nilai Konservasi Tinggi.	107
Gambar 3.49. Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta	109
Gambar 3.50. PDRB ADHK 2012 - 2022	112
Gambar 3.51. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2012 - 2022	112
Gambar 3.52 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta	113
Gambar 4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	119
Gambar 4.2 Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta	120
Gambar 4.3 Capaian Tiap Pilar	120
Gambar 4.4. Persandingan Kategori Status Capaian TPB	121
Gambar 4.5. Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta tahun 2022	122
Gambar 4.6 Target dan Capaian Tingkat Kemiskinan	125
Gambar 4.7 Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	126
Gambar 4.8 Target dan Capaian Pertumbuhan PDRB	126
Gambar 4.9 Target dan Capaian PDB per Kapita	126
Gambar 4.10 Koefisien Gini	127
Gambar 4.11 Status Capaian Indikator TPB – Indikator RPJPN	128
Gambar 4.12 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta	133
Gambar 4.13 Rencana Jaringan Perpipaan DKI Jakarta	134
Gambar 4.14 Lokasi Sumber Air DKI Jakarta	135
Gambar 4. Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pendekatan Teknokratik dan Sintesisnya	143
Gambar 4.16 Visualisasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Keterkaitan antara Isu	144
Gambar 4.17 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Tingginya Risiko Bencana	145
Gambar 4.18. Indeks Risiko Bencana DKI Jakarta 2015 -2022	146
Gambar 4.19 Jumlah RT terdampak dan Perkiraan Kerugian yang dialami akibat Kebakaran Tahun 2020 dan Tahun 2021	151
Gambar 4.20 Sumber Bencana Kebakaran	151
Gambar 4.21 Risiko Bencana Kebakaran Perkotaan 2022	152
Gambar 4.22 Risiko Bencana Kegagalan Teknologi 2022	153
Gambar 4.23 Risiko Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit	154
Gambar 4.24 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Keberlanjutan SDA dan Kualitas LH	155
Gambar 4.25 Profil Emisi GRK dan % Reduksi Emisi 2015 - 2020	157
Gambar 4.26 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 2023	158
Gambar 4.27. Jaringan Perpipaan DKI Jakarta Berdasarkan Rencana Struktur Ruang	159
Gambar 4.28. Peta Zona Bebas Air Tanah	160
Gambar 4.29. Kondisi degradasi Air Tanah 2013 -2017 di CAT Jakarta	160
Gambar 4.30. Pola Ruang 2012 dan Kondisi Zona Konservasi Air Tanah 2017	161
Gambar 4.31. Zona Konservasi Air Tanah	162
Gambar 4.32. Peta Muka Air Tanah (MAT) Akifer 0 – 40 m DKI Jakarta	163
Gambar 4.33. Sebaran Klasifikasi Tanah berdasarkan N – SPT	164
Gambar 4.34. Peta Kerawanan Kualitas Air Tanah Berdasarkan DHL pada Akifer 0 – 40 m dan 40 – 30 m ...	165
Gambar 4.35 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi	165
Gambar 4.36 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta	166

Gambar 4.37 Tren Gini Ratio DKI Jakarta.....	167
Gambar 4.38 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta.....	169
Gambar 4.39 Tren PDRB per Kapita	170
Gambar 4.40 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta.....	171
Gambar 4.41 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta.....	172
Gambar 4.42 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	173
Gambar 5.1 Urusan Pemerintahan	179
Gambar 6.1 Distribusi Penduduk DKI Jakarta Pada Tahun (a) 2023 dan (b) 2045.....	190
Gambar 6.2 Proyeksi IRBI Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi	192
Gambar 6.3 Proyeksi Nilai IKLH Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi	195
Gambar 6.4 Proyeksi Nilai IKAL Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi.....	196
Gambar 6.5 Proyeksi Nilai IKTL Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi	196
Gambar 6.6 Proyeksi Nilai IKA dan IKU Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi ...	197
Gambar 6.7 Proyeksi Pengurangan Sampah Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi	198
Gambar 6.8 Skenario Emisi GRK DKI Jakarta (a) Reduksi emisi (%) & (b) Nilai Emisi GRK (Gg CO2 emission)	199
Gambar 6.9 Grafik Perbandingan Ketersediaan Air DKI Jakarta Tahun 2022 - 2045	200
Gambar 6.10 Proyeksi Kondisi D3TLH Air untuk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2045	202
Gambar 6.11 Analisis Proyeksi dan Skenario IPM	203
Gambar 6.12 Analisis Proyeksi dan Skenario Gini Ratio.....	204
Gambar 6.13 Analisis Proyeksi dan Skenario Pertumbuhan Ekonomi	205
Gambar 6.14 Analisis Proyeksi dan Skenario PDRB per Kapita.....	205
Gambar 6.15 Analisis Proyeksi dan Skenario Tingkat Kemiskinan	206
Gambar 6.16 Analisis Proyeksi dan Skenario Tingkat Pengangguran Terbuka.....	207
Gambar 6.17 Proyeksi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.....	209
Gambar 6.18 Proyeksi Target Capaian Evaluasi AKIP	209
Gambar 6.19 Harmonisasi Kebijakan sebagai Dasar Petimbangan	212
Gambar 6.20 Visi Indonesia Emas 2045	212
Gambar 6.21 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045	213
Gambar 6.22 Proses Perumusan Alternatif KRP	217

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan.....	17
Tabel 3.1. Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta	34
Tabel 3.2. Luas setiap wilayah kabupaten/kota di DKI Jakarta.....	36
Tabel 3.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta Pada Stasiun Pengamatan Kemayoran	42
Tabel 3.4 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020	43
Tabel 3.5. Nama Daerah Aliran Sungai dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta	46
Tabel 3.6. Tiga Belas Sungai Lintas Provinsi Dan Beberapa Saluran Makro Yang Berada Di Wilayah DKI Jakarta	48
Tabel 3.7 Wadiah Parkir Air Eksisting Dan Luasnya.....	49
Tabel 3.8 Kondisi Penutupan Lahan DKI Jakarta Tahun 2022	52
Tabel 3.9. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	55
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022	57
Tabel 3.11. Ekoregion di DKI Jakarta	59
Tabel 3.12. Tipe Vegetasi di DKI Jakarta	66
Tabel 3.13 Jumlah Ketersediaan Air pada wilayah fungsional DKI Jakarta Untuk Tiap WD	82
Tabel 3.14 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	87
Tabel 3.15 Nilai Koefisien Berdasarkan Jumlah Penduduk, Rasio Ekuivalen Wilayah dan Jarak Sungai (Parameter Domestik) Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS	92
Tabel 3.16 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Pertanian Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS.....	92
Tabel 3.17 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Hutan dan Lahan Terbangun Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS.....	92
Tabel 3.18. Kecenderungan Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu	97
Tabel 3.19. Kondisi Tutupan Karang Di Wilayah Kepulauan Seribu	99
Tabel 3.20. Tutupan dan Status Kondisi Padang Lamun di Kepulauan Seribu	102
Tabel 3.21. Update Kondisi Terkini Padang Lamun di Kepulauan Seribu	104
Tabel 3.22. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove di DKI Jakarta 2009 – 2018.	105
Tabel 3.23. Luasan Kategori dan Total Mangrove Kepulauan Seribu 2019	106
Tabel 3.24 Potensi KEHATI DKI Jakarta.....	110
Tabel 3.25 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta.....	111
Tabel 3.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (miliar rupiah).....	113
Tabel 3.27 Kontribusi Mitra Pembangunan	114
Tabel 4.1 Kategori Capaian TPB DKI Jakarta	121
Tabel 4.2 Status Capaian Indikator TPB – Indikator Makro RPJPD.....	127
Tabel 4.3 Status Capaian Indikator TPB – Indikator RPJPN	129
Tabel 4.4 Indikator TPB 1, 3, dan 11 (Perlu Perhatian Khusus)	130
Tabel 4.5 Kondisi Nilai IKLH DKI Jakarta Tahun 2022.....	136
Tabel 4.6 Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan yang Relevan dengan Provinsi DKI Jakarta Bersumber dari Dokumen Perencanaan Strategis.....	140
Tabel 4.7 Rangkuman Masukan dari FGD Pengkayaan dan Penajaman Isu Pembangunan Strategis	143
Tabel 4.8 Kerangka Kajian Isu Risiko Bencana Tinggi.....	146
Tabel 4.9 Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2020 - 2022.....	147
Tabel 4.10 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	149
Tabel 4.11 Kerangka Kajian Isu Keberlanjutan SDA dan Kualitas LH	155
Tabel 4.12 Posisi IKLH Provinsi DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir.....	157
Tabel 4.13 Klasifikasi Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta Tahun 2017.....	161
Tabel 4.14 Klasifikasi Air Berdasarkan Jumlah Garam Terlarut.....	164
Tabel 4.15 Kerangka Kajian Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi	166
Tabel 4.16 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta	166
Tabel 4.17 Tren Gini Ratio DKI Jakarta	167
Tabel 4.18 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta.....	169



Tabel 4.19 Tren PDRB per Kapita	170
Tabel 4.20 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	171
Tabel 4.21 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta	172
Tabel 4.22 Kerangka Kajian Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	173
Tabel 4.23. Indeks Kepuasan Masyarakat	174
Tabel 4.24. Predikat Hasil Evaluasi AKIP	174
Tabel 4.25. Nilai AKIP 2018 - 2021	175
Tabel 4.26. Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting	175
Tabel 5.1. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Urusan Wajib Pemerintahan	183
Tabel 6.1. Jumlah Penduduk dan Hasil Proyeksi Sampai Dengan Tahun 2045	189
Tabel 6.2. Kerangka Kajian Indikator	190
Tabel 6.3. Proyeksi IRBI	192
Tabel 6.4. Baseline 2022 dan Proyeksi Bencana Non Alam 2045	193
Tabel 6.5 Baseline Data IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	194
Tabel 6.6 Target dan Proyeksi IKLH DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2052	195
Tabel 6.7 Skenario Moderate dan Akselerasi	200
Tabel 6.8 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2045	201
Tabel 6.9. Proyeksi IPM	203
Tabel 6.10. Proyeksi Gini Ratio	204
Tabel 6.11. Proyeksi Tingkat Kemiskinan	206
Tabel 6.12. Proyeksi TPT	207
Tabel 6.13. Baseline dan Proyeksi SAKIP AKIP 2045	209
Tabel 6.14. Baseline 2022 dan Target Implementasi Kebijakan dan/atau Dokumen Rencana 2045	210
Tabel 6.15. Target Kerja Sama Antar Daerah	211
Tabel 6.16. Alternatif Substansi Arah Kebijakan	218
Tabel 6.17. Alternatif dan Rekomendasi Substansi Kebijakan	219
Tabel 6.18. Usulan Integrasi	226

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 - 2030	231
Lampiran 2. Kerangka Acuan Kerja Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD DKI Jakarta	236
Lampiran 3. Focus Group Discussion Penjaringan Isu	248
Lampiran 4. Daftar Hadir Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJPD	250
Lampiran 5. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJPD	254
Lampiran 6. Focus Group Discussion Alternatif Skenario	256
Lampiran 7. Konsultasi Publik II Perumusan Skenario KLHS RPJPD	257
Lampiran 8. Kompetensi Tenaga Ahli	262
Lampiran 9. Capaian TPB	297
Lampiran 10. Lembar Kerja Keterkaitan Isu Strategis, Skenario, dan Proyeksi	332
Lampiran 11. Penjaminan Kualitas	336
Lampiran 12. Berita Acara Asistensi Validasi KLHS RPJPD	337
Lampiran 13. Surat Permohonan Validasi KLHS RPJPD	347



EXECUTIVE SUMMARY

KLHS RPJPD DKI JAKARTA 2025 - 2045

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerahnya telah selesai dan akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024. Pergantian kepala daerah wajib diikuti dengan penyusunan RPJMD sebagai rujukan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, periodisasi RPJPD DKI Jakarta juga akan berakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan substansi dan periodisasi RPJPD maupun RPJMD. Periode RPJPD DKI Jakarta yaitu 2025-2045 sementara RPJMD yaitu 2025-2030.

Pada tahun 2023 ini dimulai proses penyusunan RPJPD dan RPJMD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan turunannya (PP No. 46/2016 dan Permen LHK No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis), penyusunan RPJPD dan RPJMD wajib didampingi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya, Pasal 26 Permendagri 7/2018 mengatur bahwa KLHS RPJMD dan RPJPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik. Hal ini diperkuat dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 550/5112/Bangda Tanggal 5 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD yang mengarahkan daerah untuk menganggarkan penyelenggaraan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada tahun anggaran 2023. Penyelenggaraan KLHS ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan dasar dan diintegrasikan ke dalam RPJPD DKI Jakarta 2025-2045.

Penyelenggaraan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dilakukan dengan pendekatan *Ex-Ante*, yaitu KLHS dilakukan sebelum adanya draft akademik ataupun rancangan awal RPJPD. KLHS dilakukan oleh Pokja KLHS yang dibentuk melalui SK Gubernur No. 215 Tahun 2023, dengan melibatkan dan partisipasi berbagai pihak termasuk OPD terkait, tenaga ahli, pemangku kepentingan terkait, dan publik. Dengan kata lain, KLHS ini dilakukan dengan kombinasi pendekatan teknokratik (menganalisis data dan informasi secara ilmiah) dan deliberatif/partisipatif (menggalang dan memanfaatkan masukan-masukan pemangku kepentingan). Selain menganalisis data dan informasi sekunder, Pokja KLHS menyelenggarakan serangkaian pertemuan koordinasi, FGD, dan konsultasi publik baik secara tatap muka maupun virtual.

PENGKAJIAN PENGARUH KRP

1. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan deliberatif/partisipatif yaitu melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk menjamin agar isu-isu Pembangunan strategis yang dihasilkan sudah komprehensif dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Pendekatan teknokratik meliputi tiga jalur penelaahan: (a) status pencapaian target indikator pembangunan berkelanjutan (TPB), (b) dokumen terkait kondisi lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan (c) dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis.

Jalur Telaah Pencapaian Target Indikator TPB

Telaah pencapaian target indikator TPB menunjukkan adanya 23 indikator TPB pada tiga TPB (1, 3, 11) yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena belum mencapai target yang ditentukan. Seluruh 23 indikator tersebut apabila dilihat substansinya dapat dirangkum dalam isu, yaitu:



1. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan penanggulangan bencana (TPB 1: Tanpa Kemiskinan)
2. Kualitas Kesehatan masyarakat belum sesuai target (TPB 3: Kesehatan Masyarakat)
3. Sarana dan prasarana permukiman belum mencapai target TPB Jakarta (TPB 11: Kota berkelanjutan)
4. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana belum mencapai target TPB Jakarta (TPB 11: Kota berkelanjutan)

Jalur Telaah Kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 13 PP No. 46/2016 mengamanatkan bahwa analisis KLHS meliputi enam muatan kajian, yaitu: (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (2) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (3) kinerja layanan atau jasa ekosistem; (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (7) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. telaah kondisi lingkungan hidup dari aspek enam muatan diperoleh enam isu pembangunan berkelanjutan, dan setelah ditelaah lebih lanjut dapat disintesis menjadi empat isu Pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan sumber daya air
2. Pencemaran lingkungan
3. Kerentanan terhadap bencana
4. Degradasi keanekaragaman hayati

Jalur Telaah Dokumen Strategis

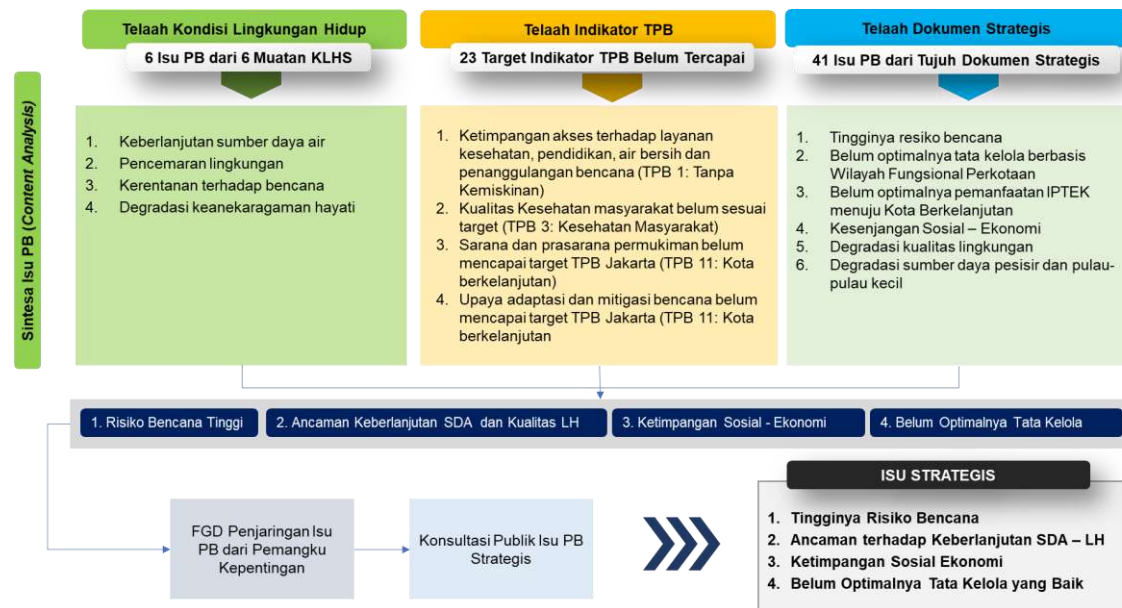
Terdapat tujuh dokumen strategis yang ditelaah untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) RPJPN 2025-2045, (2) RTRW Jabodetabekjur (Perpres 60/2020), (3) Naskah Akademik RUU DKJ, (4) RPPLH DKI 2022-2052, (5) RTRW DKI 2022-2042, (6) KLHS Harmonisasi RTRW-RZWP3K 2022-2042, dan (7) RPD DKI 2023-2026. Dari tujuh dokumen strategis ini dapat diidentifikasi sejumlah 41 (empat puluh satu) isu pembangunan berkelanjutan. Tentunya terdapat banyak irisan kesamaan (*overlap*) antara 41 isu tersebut dan setelah dilakukan *content analysis* 41 isu tersebut dapat disintesis menjadi enam isu pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Tingginya Risiko Bencana
2. Belum Optimalnya Tata Kelola Berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan
3. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan
4. Kesenjangan Sosial – Ekonomi
5. Degradasi Kualitas Lingkungan
6. Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari tiga jalur di atas kemudian disandingkan dan dianalisis kesamaan substansi atau materi muatannya supaya didapat daftar pendek isu pembangunan yang benar-benar bersifat strategis. Hasil dari proses analisis ini adalah daftar empat isu pembangunan strategis sebagai berikut:

1. Risiko Bencana
2. Keberlanjutan SDA dan Kualitas LH
3. Ketimpangan Sosial - Ekonomi
4. Tata Kelola

Rangkuman proses dan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dideskripsikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1 di bawah.

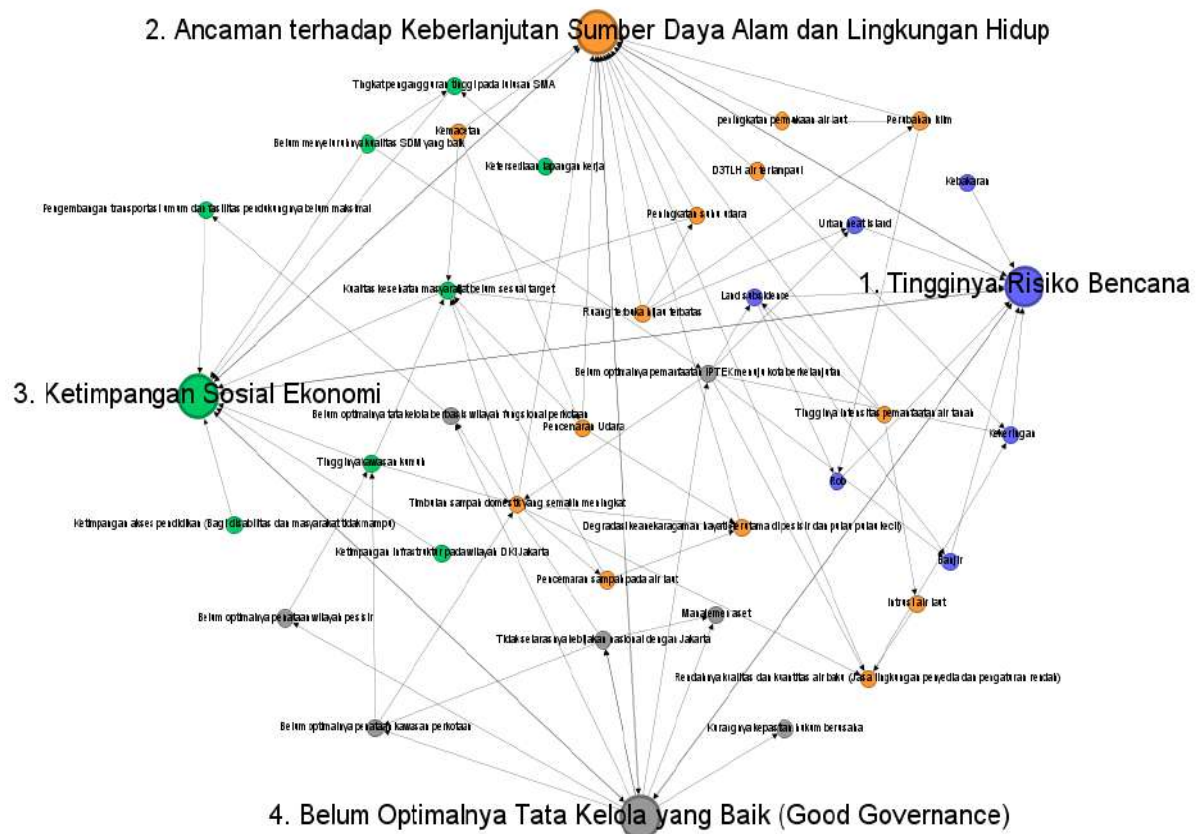


Gambar 1. Rangkuman Proses dan Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 1 di atas menunjukkan pendekatan deliberatif/partisipatif identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Hasil dari identifikasi isu pembangunan berkelanjutan secara teknokratik melalui tiga jalur telaahan kemudian dijadikan bahan untuk FGD dengan para pemangku kepentingan dan hasilnya dibawa ke forum Konsultasi Publik untuk pengayaan dan penajaman. Hasil rumusan isu pembangunan strategis yang dihasilkan setelah melalui proses FGD dan Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Risiko Bencana
2. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Ketimpangan Sosial - Ekonomi
4. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)

Walaupun telah disepakati hanya ada empat isu strategis (kebencanaan, SDA-LH, sosial-ekonomi, tata kelola), tidak berarti bahwa daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan tidak dimanfaatkan atau dibuang karena pada dasarnya setiap isu pembangunan berkelanjutan bersifat multi sektor dan saling terkait. Oleh karena itu, dilakukan analisis keterkaitan sebab-akibat (*mind-mapping*) antar isu untuk memastikan agar setiap isu pembangunan berkelanjutan diupayakan langkah-langkah penyelesaiannya nanti pada tahap identifikasi alternatif penyempurnaan KRP. Hasil analisis keterkaitan antar isu disajikan pada Gambar 2 di bawah.



Gambar 2. Hasil Analisis Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan

2. Penyusunan Kerangka Kajian

Setelah isu pembangunan berkelanjutan disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka kajian. Kerangka kajian merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan harus berupaya untuk mengidentifikasi dan merumuskan alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi semua isu pembangunan secara komprehensif. Kerangka kajian disajikan pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Kerangka Kajian

Tujuan per Isu	Kriteria	Indikator
Mengkaji penurunan risiko bencana melalui upaya penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK	Tingkat bencana	<ul style="list-style-type: none"> IRBI untuk bencana alam Risiko Bencana Alam dan non Alam
	Kerentanan bencana	
	Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana)	
	Pemanfaatan IPTEK (<i>Digital Platform</i>)	
Mengkaji upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup (Air, Lahan, Udara) untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	IKLH (IKA, IKU, IKTL)
	Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA	Indeks Pengelolaan Sampah
		Emisi GRK
		Daya Dukung Air
Mengkaji upaya penurunan ketimpangan sosial ekonomi melalui inklusivitas akses fasilitas sosial ekonomi dan akses peningkatan kesejahteraan	Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan	Infrastruktur Perkotaan (Penyediaan Air Bersih, Persampahan, Sanitasi)
		IPM
		Gini Ratio
		Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi
		Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita
		Tingkat Kemiskinan Kepulauan

Tujuan per Isu	Kriteria	Indikator
Mengkaji kapasitas kelembagaan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam menuju Jakarta sebagai <i>global city</i> yang berkelanjutan	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, dan SAKIP/TPB 16)
		Ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana untuk pengendalian pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan Kebijakan dan rencana
		Jumlah kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional dalam perbaikan pengelolaan SDA

PERUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perumusan Alternatif Kebijakan

Perumusan alternatif kebijakan dilakukan dengan melakukan daya upaya untuk mengidentifikasi berbagai alternatif solusi untuk mengatasi isu pembangunan strategis dengan mengacu pada kriteria kajian yang didukung dengan data seri skenario BAU dan upaya tambahan. Selain itu, perumusan alternatif kebijakan juga mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimuat dalam Pasal 26, Ayat (2) dan Lampiran V PermenLHK No. P.69 Tahun 2017. Dalam KLHS ini, perumusan alternatif kebijakan diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan yang termuat dalam dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis yang sudah ada. Hasil identifikasi dan perumusan alternatif kebijakan disajikan dalam Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Hasil Identifikasi dan Perumusan Alternatif Kebijakan

ISU STRATEGIS	KRITERIA	ALTERNATIF KEBIJAKAN
Tingginya Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat bencana Kerentanan bencana Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana) Pemanfaatan IPTEK (Digital Platform) 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana mitigasi bencana secara tematik dan terintegrasi, multi pihak, multi sektor, dan lintas wilayah Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana terutama berkaitan dengan sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan bencana Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan
Ancaman Keberlanjutan SDA dan kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas lingkungan hidup Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA 	<ol style="list-style-type: none"> Penurunan emisi melalui pengendalian sumber emisi (teknologi bersih, ekonomi hijau, circular economy) Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi Peningkatan ketersediaan air baku melalui pemanfaatan teknologi dan kerja sama antar wilayah Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air
Ketimpangan Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan PDRB perkapita sehingga berdaya saing global Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan Penurunan tingkat pengangguran terbuka Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat Peningkatan IPM Kepulauan Seribu Penurunan gini ratio Penyediaan rumah layak huni Pencapaian target RW kumuh 0%

Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju <i>good governance</i> Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam tata Kelola
--	---	---

2. Rekomendasi Kebijakan

Perlu dipahami bahwa hasil KLHS merupakan hanya salah satu materi yang harus dirujuk dan dimanfaatkan dalam penyusunan rancangan RPJPD. Banyak materi lain yang juga harus dirujuk dan dimanfaatkan dalam penyusunan rancangan RPJPD. Rekomendasi KLHS yang dimuat dalam Sub Bab ini tentunya merupakan arahan untuk dimanfaatkan dalam penyusunan rancangan RPJPD DKI 2025-2045, yang substansi dan perumusannya dapat diselaraskan dengan materi-materi rujukan penyusunan RPJP lainnya.

Rekomendasi Arah Kebijakan Dua Puluh Tahun

Perumusan rekomendasi diawali dari penelaahan hasil identifikasi kebijakan sebagaimana dimuat dalam angka 1 di atas dengan membandingkan alternatif-alternatif, per isu strategis, yang memiliki irisan substansi yang sama untuk kemudian dirumuskan ulang dalam satu rumusan arah kebijakan. Berikut disajikan rekomendasi arah kebijakan 20 tahun untuk diintegrasikan substansinya ke dalam Rancangan RPJPD DKI 2025-2045.

- Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi *stakeholder*
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana
- Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan
- Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau
- Meningkatkan laju pemulihan kualitas lingkungan perkotaan
- Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam
- Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* berskala internasional
- Menciptakan iklim berusaha yang kondusif (*enabling condition*) untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja berdaya saing global
- Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
- Meningkatkan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni
- Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern

13. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*)
14. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*

Rekomendasi Visi dan Misi

Oleh karena belum terdapat draft visi dan misi DKI 2025-2045, maka untuk memberikan rekomendasi visi dan misi tersebut, Pokja KLHS melakukan telaah dokumen kebijakan strategis yang ada, terutama Naskah Akademik RUU Daerah Khusus Jakarta, serta melakukan serangkaian pertemuan dengan para perencana untuk memperoleh gambaran substansi visi dan misi Daerah Khusus Jakarta 2045, yang hasilnya disajikan di bawah.

“Jakarta yang aman-nyaman-sejahtera (*livable*), berdaya saing global, dan berkelanjutan”

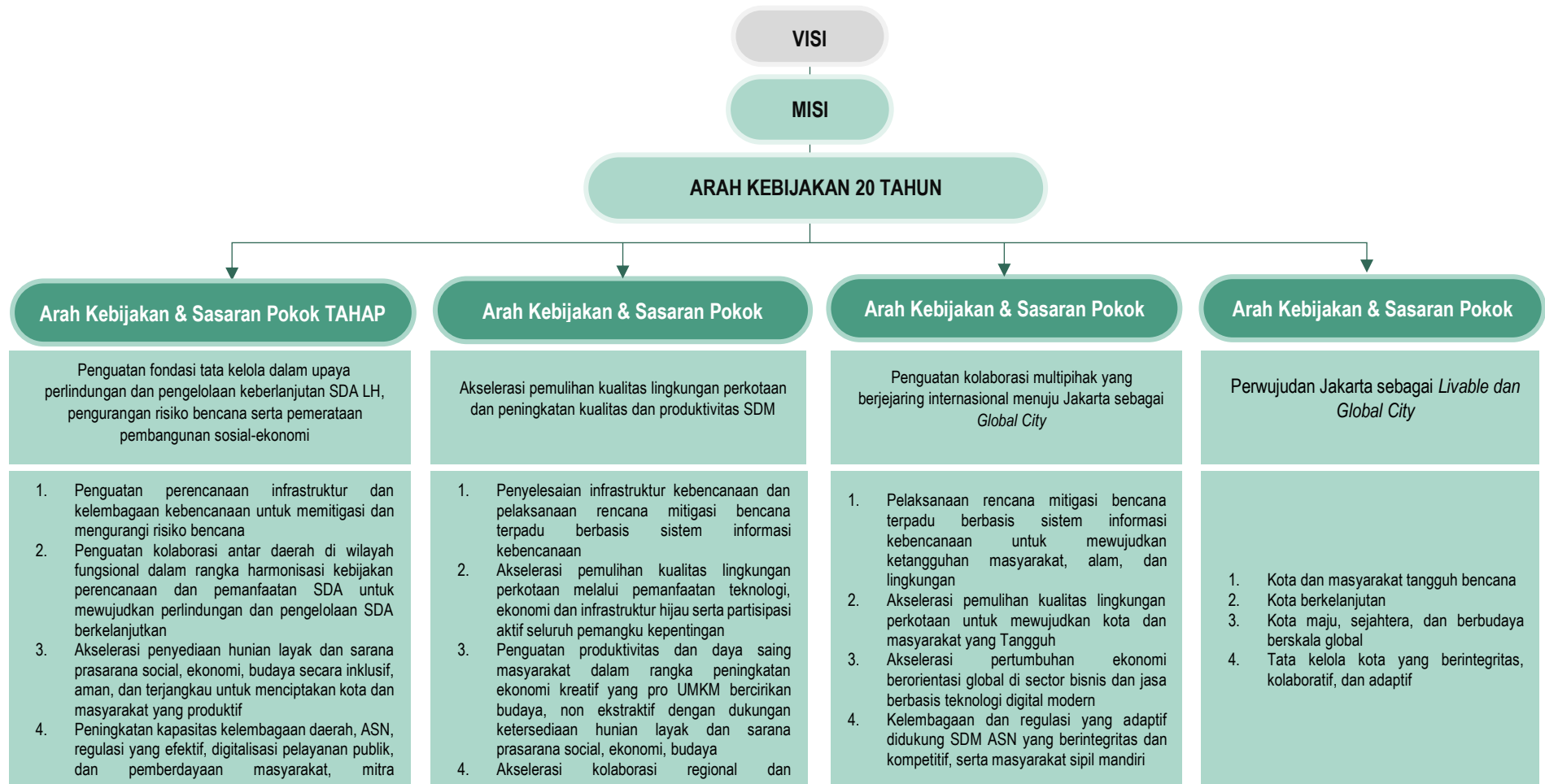
Kemudian untuk dapat meraih visi tersebut dilakukan *backcasting* untuk merumuskan misi-misi yang perlu dilakukan dengan mengaitkannya dengan arah kebijakan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Proses ini menghasilkan rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk menjamin perlindungan SDA dan lingkungan hidup serta pemenuhan hak hidup masyarakat secara inklusif
2. Mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui akselerasi pemulihan kualitas lingkungan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan
3. Mewujudkan transformasi sosial ekonomi menuju masyarakat yang adaptif, inovatif, produktif, berketahanan, berdaya saing global, berbudaya dan madani (*civil society*)
4. Mewujudkan kota bisnis dan jasa yang berdaya saing global dan berbasis teknologi digital modern
5. Mewujudkan kota yang layak huni, sejahtera, aman, dan berkeadilan melalui penyediaan sarana prasarana sosial-budaya dan ekonomi

Rekomendasi Pentahapan RPJPD 2025-2045

Pentahapan RPJPD DKI 2025-2045 wajib bersinergi dengan pentahapan RPJPN dan memperhatikan pentahapan yang ada dalam RPPLH serta RTRW DKI. Dengan menggunakan pola pikir seperti ini, maka pentahapan RPJPD DKI 2025-2045 adalah sebagai berikut.

PENTAHAPAN RJPD DKI JAKARTA 2025 - 2045



USULAN INTEGRASI REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN RPJPD

Oleh karena pada waktu penyelesaian KLHS ini belum ada rancangan RPJPD maka yang dilakukan adalah menyediakan usulan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam rancangan RPJPD DKI 2025-2045. Usulan pengintegrasian ini berisi petunjuk ke mana hasil-hasil KLHS ini hendaknya diintegrasikan ke dalam tubuh atau bab-bab yang ada dalam rancangan RPJPD, sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 di bawah.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KLHS RPJPD



SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJPD*



*Berdasarkan rancangan Perum penyusunan RPJPD Kemendagri 2 November 2023

Gambar 3. Usulan Pengintegrasian Hasil KLHS ke Dalam Rancangan RPJPD DKI 2025-2045

USULAN TINDAK LANJUT

Oleh karena pada waktu penyelesaian KLHS ini belum ada rancangan RPJPD maka perlu diusulkan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dipastikan bahwa hasil KLHS diintegrasikan ke dalam rancangan KRP RPJPD untuk memastikan bahwa semua proses dan hasil KLHS membawa manfaat dalam memperkuat sistem perencanaan pemerintah daerah.
2. Hasil KLHS RPJPD wajib diacu dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD 2025-2030, agar prosesnya efisien waktu dan sumber daya, serta hasilnya harmonis dan sinergis.

KESIMPULAN

1. Penyusunan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dikerjakan dengan upaya optimal, baik dalam upaya memenuhi proses yang utuh maupun dalam upaya memastikan kualitas hasil kajian dan rekomendasi dan keluaran lainnya.

Pertama, Penyelenggaraan KLHS diupayakan sedapat mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan utama penyelenggaraan KLHS RPJPD yaitu Permendagri 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No. 46/2016 beserta dan aturan turunannya yaitu Permen LHK No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kedua, dilakukan daya upaya untuk memastikan bahwa kualitas hasil KLHS dapat terpenuhi secara memadai, termasuk deskripsi kondisi sosial ekonomi berbasis data dan informasi mutakhir, hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan arahan-arahan rekomendasi kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan nasional (RPJPN), diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang internal DKI yang termuat dalam dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan hasil KLHS dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJPD dan memberi manfaat yang nyata.

2. Daya upaya untuk melakukan proses dan hasil sebagaimana dimaksud di atas tentunya tidak mudah, memakan banyak waktu, dan menghadapi kendala. *Pertama*, aturan untuk KLHS RPJPD *mutatis mutandis* Permendagri No. 7/18 yang mengatur penyelenggaraan KLHS RPJMD. Padahal, RPJMD sangat berbeda dengan RPJPD. KLHS RPJMD difokuskan pada pengintegrasian TPB ke dalam program-program pembangunan RPJMD. Sebagian besar indikator TPB bersifat mikro sehingga mudah diintegrasikan ke dalam penyusunan program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utamanya. Sedangkan RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berisikan kebijakan makro, bukan mikro. *Kedua*, KLHS RPJPD diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang berbeda yang terdapat penggunaan nomenklatur yang berbeda untuk hal yang sama; hal ini terkadang menimbulkan kesulitan. *Ketiga*, untuk mendapatkan hasil KLHS yang berkualitas dan bermanfaat diperlukan adanya pertemuan yang cukup intensif antara Pokja KLHS dengan para perencana dan sejumlah pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini agak sulit dilakukan oleh karena kesibukan masing-masing pihak,
3. Dilakukan upaya untuk mendokumentasikan proses dan hasil KLHS RPJPD DKI 2025-2045 dari awal hingga akhir secara cermat ke dalam sebuah Laporan KLHS dengan maksud antara lain agar dapat dijadikan: (a) sebagai tolok ukur dalam menyusun KLHS RPJPD; dan (b) bahan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya peningkatan standar kualitas KLHS RPJPD.
4. Dalam penentuan isu strategis, dilakukan analisis terhadap capaian TPB. Analisis dilakukan terhadap 253 indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang secara otonomi juga memiliki sebagian kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa 26% indikator atau 67 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 46% indikator atau 116 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2% indikator atau 4 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 26% indikator atau 66 indikator tidak tersedia data. Perlu pemenuhan data terhadap indikator TPB yang saat ini belum memiliki data, sehingga dapat melihat capaian Provinsi DKI Jakarta yang sebenarnya.
5. KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 menetapkan 4 (empat) isu strategis yaitu: (1) Tingginya risiko bencana, (2) Ancaman terhadap keberlanjutan SDA dan Lingkungan Hidup, (3) Ketimpangan sosial ekonomi, dan (4) Belum optimalnya tata kelola yang baik.

Empat isu strategis tersebut merupakan hasil sintesis dari 14 isu yang diidentifikasi dari tiga sumber. Dari telaah terhadap kondisi lingkungan hidup, diidentifikasi 6 isu yang disintesis menjadi 4 isu pembangunan berkelanjutan. Dari telaah terhadap indikator TPB, diidentifikasi 23 isu yang disintesis menjadi 4 isu pembangunan berkelanjutan. Serta dari telaah terhadap dokumen strategis, diidentifikasi 41 isu yang disintesis menjadi 6 isu pembangunan berkelanjutan



BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang | Dasar Hukum | Maksud dan Tujuan | Ruang Lingkup |

Metodologi Penyusunan | Sistematika Laporan KLHS |

BAB 1

PENDAHULUAN

“Bab 1 berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi penyusunan, dan sistematika laporan KLHS RPJPD”

1.1 Latar Belakang

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Merujuk pada Pasal 18 dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dan RPJMD mencakup penyusunan KLHS. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Permendagri 7/2018).

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari 101 daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerah telah selesai sehingga akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024. Pergantian kepala daerah diikuti dengan penyusunan RPJMD sebagai rujukan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, periodisasi RPJPD DKI Jakarta juga akan berakhir pada tahun 2025, sehingga penyalarsan substansi dan periodisasi akan dilakukan baik pada RPJPD maupun RPJMD. Periode RPJPD DKI Jakarta yaitu 2025-2045 sementara RPJMD yaitu 2025-2030. Pada Pasal 26 Permendagri 7/2018 disebutkan bahwa KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD. Sementara itu, berdasarkan Pasal 26 Permendagri 7/2018, pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku ***mutatis mutandis*** untuk pelaksanaan KLHS RPJPD. Artinya, secara prinsip, prosedur pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berlaku sama dengan KLHS RPJMD dengan penyesuaian substansi muatan KRP.



Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 550/5112/Bangda Tanggal 5 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, terdapat arahan untuk menganggarkan kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan *environmental safeguard* bagi pelaksanaan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta melalui RPJPD dan RPJMD dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP tersebut sebagai dasar bagi penyusunannya.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.
- Menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam rancangan awal RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
- Memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- j. SK MenLHK Nomor 8/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
- k. SK MenLHK Nomor 1272/2021 tentang Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000
- l. SK MenLHK Nomor 146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000
- m. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja, daftar kebutuhan data, dan persiapan lainnya untuk menginventarisasi regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD.
- b. Melakukan studi terhadap regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RPJPD dan RPJMD.
- c. Melaksanakan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD sampai dengan proses validasi.
- d. Melakukan pengkajian pengaruh yang meliputi identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berdampak terhadap lingkungan hidup, serta analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup.
- e. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP, rekomendasi perbaikan KRP, dan integrasi KRP.
- f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS RPJPD dan RPJMD serta konsultasi publik.
- g. Melakukan pendampingan pada saat proses validasi KLHS RPJPD dan RPJMD.
- h. Mengadakan rapat, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi publik terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan, koordinasi, komunikasi dan pengumpulan data.

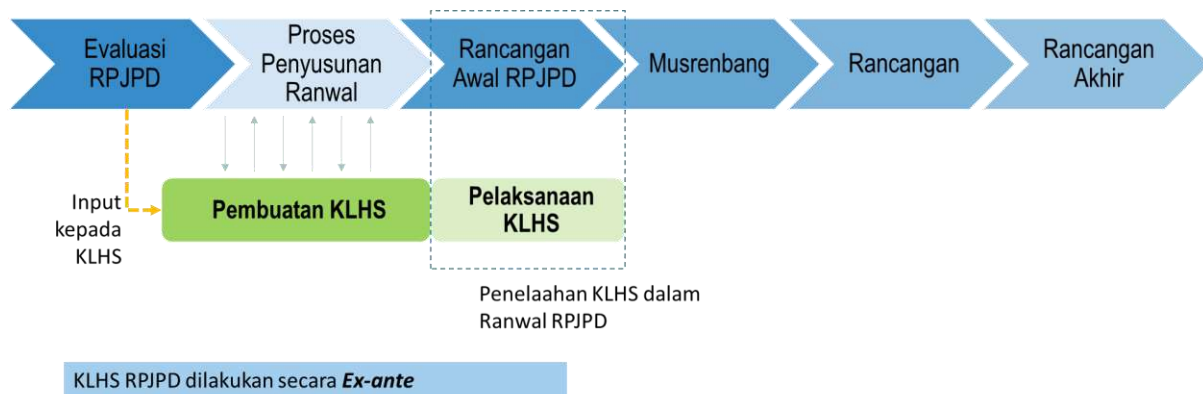
1.5 Metodologi Penyusunan

KLHS penyusunan RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045 dilaksanakan pada mulai bulan Mei sampai dengan bulan November 2023, sementara penyusunan rancangan awal RPJPD 2025-2045 belum dilakukan. Oleh karena itu, penyelenggaraan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dilakukan dengan pendekatan *Ex-Ante*, yaitu KLHS dilakukan sebelum adanya draft akademik ataupun rancangan awal RPJPD. Dengan demikian hasil dan rekomendasi-rekomendasi KLHS merupakan masukan dan dapat diintegrasikan dalam penyusunan rancangan awal RPJPD 2025-2045.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada Pasal 11 ayat (2) secara jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan analisis perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktik terbaik, informasi tersedia yang diakui secara ilmiah, keberadaan hasil penelitian yang akuntabel, dan/atau kesepakatan antar ahli. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan KLHS sangat terbuka pada perkembangan pendekatan dan metode yang akuntabel dan diakui secara ilmiah.

Sementara itu, PermenLHK No. 69 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS wajib mempertimbangkan jenis, tema, hierarki, dan skala informasi KRP serta prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Mengingat KRP yang dikaji adalah rancangan RPJPD yang pada dasarnya berada dalam ranah urusan Kementerian Dalam Negeri, maka keseluruhan tahapan penyelenggaraan KLHS RPJPD mengacu pada teknis pelaksanaan sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2018. Secara umum, tahapan penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta diilustrasikan pada Gambar 1.1 berikut ini.

Permendagri 7/2018



Gambar 1.1 Diagram Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

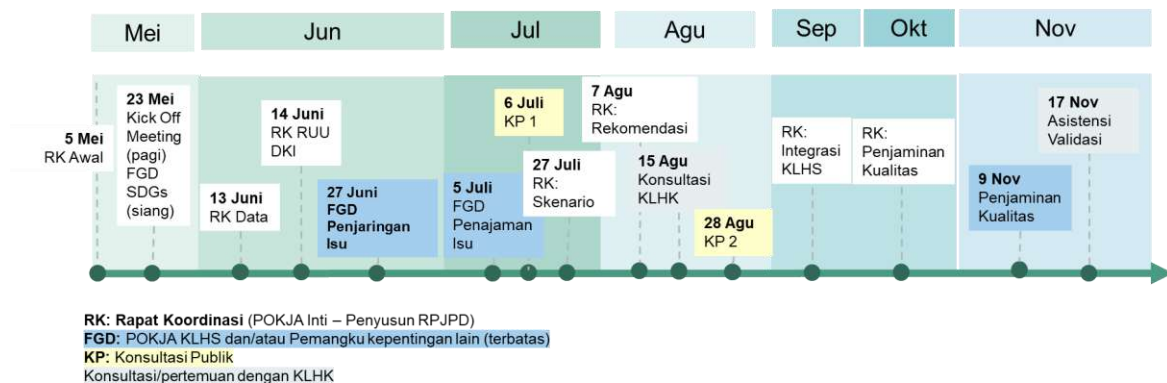
Evaluasi RPJPD dilakukan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD. Selain itu, data dan informasi yang terdapat dalam evaluasi RPJPD dapat menjadi bagian dari analisis dalam KLHS. Penyusunan KLHS terdiri dari tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS. Pembuatan KLHS yang terdiri dari: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS; (2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; (3) perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD. Sementara itu, pelaksanaan KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJPD. Secara umum, tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS ditunjukkan pada Gambar berikut.



Gambar 1.2. Tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD

Sebagian besar tahapan penyelenggaraan KLHS di atas dilaksanakan dengan pertemuan virtual dan/atau *hybrid*. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu dan sumber daya yang ada. Namun demikian, tetap berorientasi pada *output* yang diharapkan. Di samping itu, pengayaan kajian juga secara intensif dilakukan melalui beberapa pertemuan luring seperti pada saat penjaringan isu dan konsultasi publik.

KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sedikitnya melalui 17 (tujuh belas) rangkaian pertemuan yang telah didokumentasikan secara terpisah dalam Laporan Dokumentasi KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai wadah pembahasan dan penyepakatan terhadap beberapa pokok tema sebagai berikut.



Gambar 1.3 Rencana Kerja Pelaksanaan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

1. Pembentukan Tim Penyusun KLHS

Proses pembentukan Tim Penyusun KLHS diawali dengan Rapat Koordinasi Awal (5 Mei 2023) dan *Kick-Off Meeting* (23 Mei 2023). **Kick-Off Meeting** merupakan awal ditandainya penyelenggaraan KLHS RPJPD DKI Jakarta telah dimulai. Pertemuan dilaksanakan dengan melibatkan OPD terkait sebagai POKJA KLHS. Melalui pertemuan ini pula dilakukan identifikasi awal kebutuhan data dan pihak-pihak terkait yang perlu dilibatkan dalam penyusunan KLHS. **POKJA KLHS** dibentuk melalui SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 (lihat Lampiran 1). Tim tersebut bertugas mendampingi proses penyelenggaraan KLHS sebagai institusi kunci untuk terlibat secara intensif dalam setiap pertemuan persiapan, FGD tematik, dan konsultasi publik.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Proses pengkajian pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui 4 (empat) FGD dan Rapat Koordinasi serta 1 (satu) Konsultasi Publik.

Identifikasi dan Pengumpulan Data. Identifikasi dan analisis data TPB dilakukan secara iteratif melalui diskusi intensif dengan Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta dan K/L terkait (Kemendagri, KLHK, Bappenas). Hal tersebut penting dilakukan di awal proses kajian mengingat terdapat berbagai pendekatan dalam menganalisis capaian TPB yang mencakup: penggunaan metadata TPB, penggunaan indikator TPB dalam konteks KLHS RPJPD – jangka panjang dan sinkronisasi data capaian TPB. Serangkaian FGD dalam rangka analisis capaian TPB menyepakati bahwa gambaran capaian TPB menggunakan metadata versi 1 (2018) sesuai dengan Permendagri 7/2018. Sementara itu, pendekatan indikator jangka panjang salah satunya dapat dianalisis melalui indikator RPJPN 2025-2045 dan indikator makro hasil evaluasi RPJPD. Pada tahapan ini juga dilakukan FGD untuk membahas posisi DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara.

Analisis Data. Analisis data dilakukan secara paralel dengan pengumpulan data. Pada tahap awal dilakukan *exercise* metadata versi II, untuk memberikan gambaran TPB apabila digunakan metadata tersebut. Hasil *exercise* dijadikan bahan pembahasan pada FGD dengan Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta dan K/L terkait (Kemendagri, KLHK, Bappenas). Selain data TPB, analisis juga mencakup profil kondisi lingkungan hidup (6 muatan) dan perencanaan strategis yang relevan yang kesemuanya menjadi dasar dalam menyintesis isu strategis. Analisis data dalam KLHS mencakup beberapa hal seperti diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Analisis	Pendekatan
Gambaran Kondisi (6 Muatan) Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup Analisis mengenai daya dukung lingkungan hidup fokus pada pemanfaatan fungsi lingkungan hidup yaitu penyedia air. Tahapan penyusunan DDLH air secara umum telah mengacu pada Keputusan MenLHK SK.146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Pertimbangan nilai indeks jasa ekosistem sebagai penyedia air dan pangan merupakan dasar analisis DDLH. Perhitungan DDLH dilakukan secara spasial, menggunakan asumsi <i>close system</i> dengan memanfaatkan sistem grid sebagai dasar distribusi kebutuhan dan ketersediaan air maupun pangan. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup Dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dianalisis dan diukur melalui dua media lingkungan yaitu sumber daya alam dan ruang/lahan. Beberapa aspek yang dianalisis adalah tekanan penduduk, potensi beban pencemar sungai, dan timbunan sampah Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan Parameter yang digunakan untuk melakukan analisis kinerja jasa lingkungan hidup mencakup bentang alam (morfologi), vegetasi, dan penutup lahan mengacu pada informasi spasial yang tersedia di tingkat provinsi. Hubungan ketiga parameter tersebut divisualisasikan secara spasial berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem. Jasa ekosistem yang dinilai adalah Jasa Ekosistem Penyedia Air, Pengaturan Air, Pengaturan Bencana Banjir, Pengaturan kualitas Udara. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pemanfaatan sumber daya alam dalam kajian ini direpresentasikan dari Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Penyedia Air, Pangan dan Pengaturan Air. Efisiensi dihitung berdasarkan kesesuaian pemanfaatan fungsi lahannya. Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati Potensi keanekaragaman hayati, salah satunya, dapat dinilai dengan mengidentifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi di DKI Jakarta. Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Analisis tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) 2018 yang diterbitkan oleh KLHK. Dari gambaran di atas, selanjutnya isu strategis kondisi lingkungan hidup dapat disintesis.
Analisis Capaian TPB pada OPD	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Capaian TPB Analisis capaian TPB dijadikan dasar untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Indikator TPB yang dianalisis mengacu metadata nasional Bappenas yang diterbitkan pada tahun 2018 dan telah dilakukan <i>cascading</i> kewenangan oleh Kemendagri. Penilaian pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian RAD TPB DKI Jakarta 2018-2022 yang dilakukan setiap tahun. Capaian Indikator TPB dan Indikator Makro Pembangunan – Evaluasi RPJPD Pada analisis ini dilakukan dengan melihat capaian 6 indikator makro pembangunan yang ada di indikator TPB. Capaian Indikator TPB dalam Indikator RPJPN 2025-2045 Capaian Indikator TPB dan pemenuhan SPM Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Analisis ini dilakukan dengan cara penandaan capaian indikator TPB berdasarkan instansi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besaran tanggung jawab OPD terhadap pencapaian pilar-pilar TPB serta besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk pelaksanaannya. <p>Dari analisis di atas, selanjutnya isu strategis capaian TPB DKI Jakarta dapat disintesis.</p>
Perumusan Isu strategis	Perumusan isu strategis dipilih dengan beberapa tahapan proses, yaitu:



Analisis	Pendekatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi isu strategis dari 3 (tiga) pertimbangan, meliputi sintesis masing-masing isu strategis berdasarkan kondisi lingkungan hidup (6 muatan KLHS), capaian TPB, dan kerangka kebijakan terkait. • Analisis Keterkaitan Isu. Analisis keterkaitan isu dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari isu-isu yang telah diidentifikasi. Hal ini penting dilakukan untuk melihat isu-isu yang paling berpengaruh. • Konsultasi Publik 1 (6 Juli 2023). Hasil sintesis penentuan isu strategis dikonsultasikan kepada publik untuk mendapatkan pengayaan, klarifikasi dan kesepakatan dari pemangku kepentingan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Skenario Proyeksi. Analisis proyeksi dilakukan terhadap indikator-indikator TPB prioritas yang menjadi perhatian dalam rangka merumuskan skenario pencapaian target. Skenario perkiraan pencapaian target tiap TPB prioritas tersebut diproyeksikan dengan pendekatan analisis gap pencapaian terhadap target nasional dan provinsi sebagai pertimbangan upaya tambahan.

Rekomendasi. Hasil analisis KLHS secara keseluruhan dan rumusan arahan kebijakan-program selanjutnya dibahas dalam Konsultasi Publik 2. Konsultasi Publik 2 dimaksudkan untuk menyepakati rumusan arahan kebijakan dan program sebagai rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan RPJPD.

4. Integrasi KLHS ke dalam RPJPD, Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi

Penjaminan Kualitas dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Pokja KLHS bersama Penyusun KRP, yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta

Pendokumentasian. Keseluruhan proses penyelenggaraan KLHS dirangkum dalam Laporan Dokumentasi KLHS RPJPD dan RPJMD DKI Jakarta yang terpisah dari laporan KLHS ini.

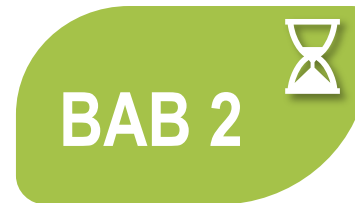
Validasi. Pelaksanaan validasi dilakukan secara sekaligus pada tahap akhir terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS. Validasi KLHS dilakukan dengan mengirimkan permintaan surat permohonan validasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi untuk kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen perbaikan.

1.6 Sistematika Laporan KLHS RPJPD

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD dari Kementerian Dalam Negeri, laporan KLHS mengikuti sistematika penulisan sebagai disajikan di bawah.

Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembuatan KLHS-RPJPD



Dasar Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan pada laporan KLHS-RPJPD, yaitu perkembangan fungsi daerah dan teori perkembangan aktivitas wilayah

Kondisi Umum Daerah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum daerah diantaranya kondisi geografis; D3TLH; kondisi keuangan daerah; dan peran pemangku kepentingan dalam mencapai TPB



Analisis Isu PB

Analisis Capaian TPB pada Organisasi Perangkat Daerah

Dijelaskan mengenai capaian TPB pada OPD berdasarkan urusan pemerintahan .



Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan

Pada bab ini dijelaskan mengenai tren, proyeksi, dan skenario, alternatif dan rekomendasi kebijakan, dan usulan integrasi



Kesimpulan



BAB 2

DASAR TEORI

BAB 2

DASAR TEORI

“Bab ini berisi teori yang digunakan pada laporan KLHS-RPJPD, yaitu perkembangan fungsi daerah dan teori perkembangan aktivitas wilayah”

Periode Pra Kemerdekaan – Tahun 1960

Sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia, Jakarta telah melampaui masa yang sangat panjang sebagai suatu kota pelabuhan. Pada jaman Kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat terdapat suatu kerajaan yang berpusat di Pajajaran dekat Bogor, di teluk Jakarta muara Sungai Ciliwung terdapat suatu kota pelabuhan yang Sunda Kalapa. Masa ini berlangsung kira-kira dari abad ke 12 sampai abad ke 16. Kemudian kota pelabuhan ini direbut oleh kerajaan Demak dan dengan perantara Falatehan, diubah namanya menjadi Jayakarta. Masa ini berlangsung dari bagian pertama abad ke 16 sampai awal abad ke 17, kemudian ketika badan dagang Belanda yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai berdagang di Asia, maka kota pelabuhan ini mereka rebut dan menjadikannya pusat perdagangan VOC dengan nama Batavia. Masa ini berlangsung dari awal abad ke 17 sampai akhir abad ke 18.

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara kerajaan Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta”

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi Gemeente Batavia dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priok sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Dimana Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi).

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

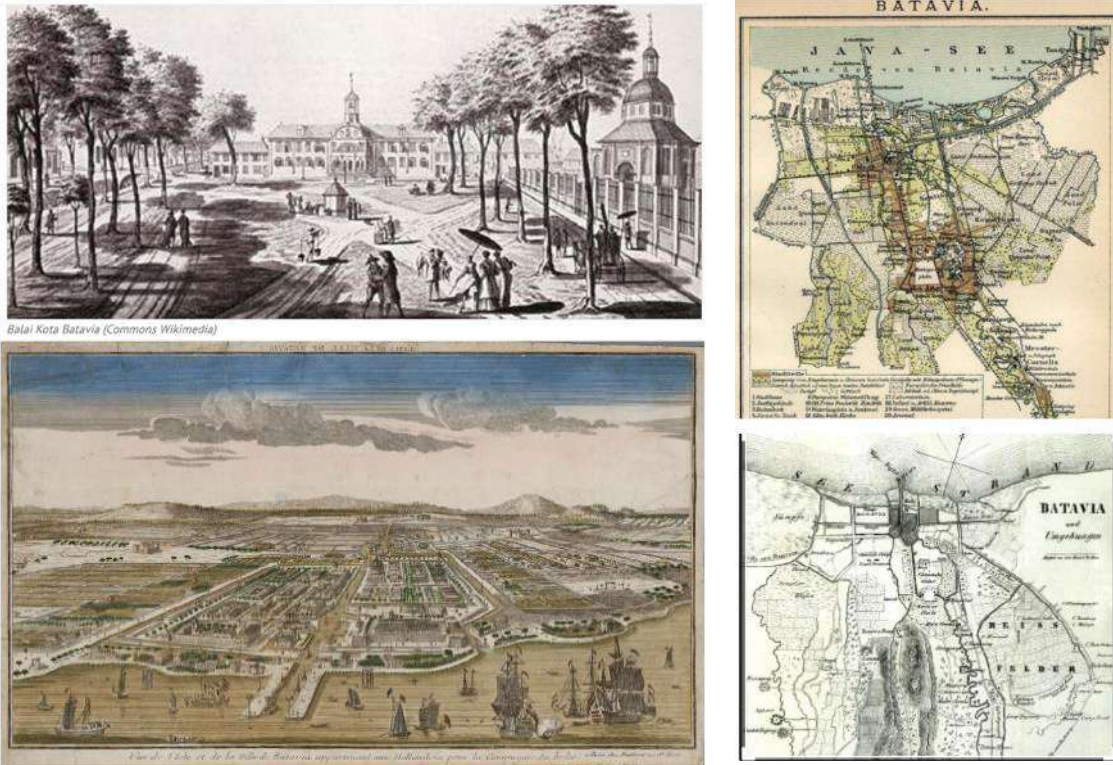


Jakarta, mempunyai riwayat yang amat panjang sebelum tahun 1950. Riwayatnya sebagai tempat hunian manusia secara garis besar dapatlah ditahapkan sebagai berikut:

- a. Tahap pemukiman sederhana di zaman prasejarah;
- b. Tahap pemukiman terkoordinasi di zaman masa kerajaan Tanumanagara;
- c. Tahap pertumbuhan sebagai kota pusat perdagangan, yang dapat diperinci dalam tahap-tahap:
 - Sunda Kelapa di bawah kedaulatan Pajajaran;
 - Jayakarta yang jadi perebutan;
- d. Tahap sebagai kota pusat kekuasaan, yang menurut perkembangan sebagai:
 - Batavia, pusat kekuasaan kolonialis Belanda;
 - Jakarta, ibukota negara Indonesia yang merdeka, sejak tahun 1950

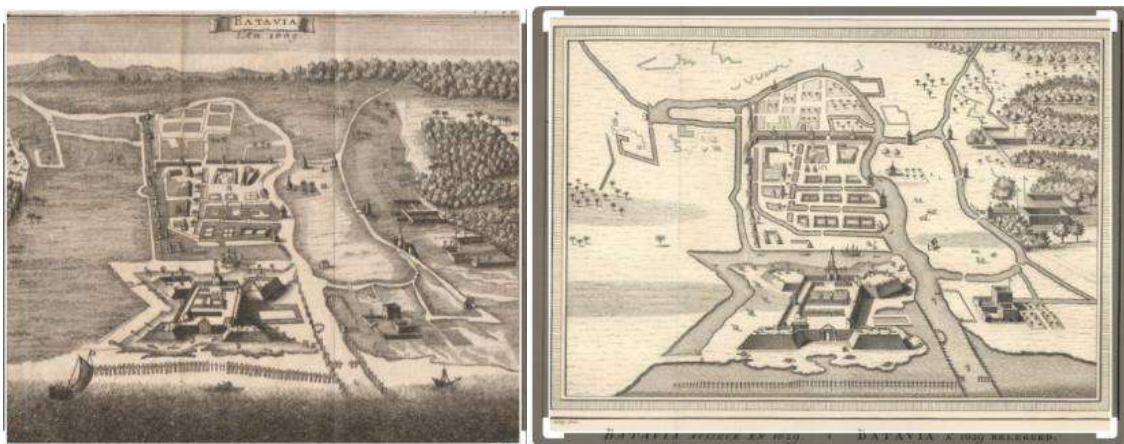
Hasan Djafar (1987) menyatakan sekurang-kurangnya ada enam buah situs kepurbakalaan prasejarah yang telah dapat dinyatakan sebagai bekas tempat hunian manusia pra-sejarah. Situs-situs itu adalah: Pejaten,' Kampungkramat, dan Condet-Balekambang yang ketiganya terletak di daerah aliran sungai Ciliwung; Bu/cit Sangkuriang dan Kelapa dua yang keduanya terletak di sebelah selatan perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bogor; dan situs Buni yang terletak di sebelah timur perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi, di daerah pantai utara dan terletak antara Kali Bekasi dan Kali Cilamaya. H.Th. Verstappen dalam telaah geomorfologisnya mengenai pembentukan garis pantai dan teluk Jakarta, telah memberikan taksiran bahwa dataran "kipas aluvial" yang meliputi wilayah Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) terbentuk sekitar 5000 tahun yang lalu. Jenis temuan di situs ini memberikan petunjuk mengenai tahap' perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Dari kebudayaan perundagian tahap kebudayaan bercocok tanam. Ini semua menunjukkan bahwa wilayah "Jakarta" telah dihuni sekurang- kurangnya sejak 'masa' bercocok tanam, yang diperkirakan berlangsung antara sekitar tahun 3000 dan 1000 Sebelum Masehi (Djafar 1987:14). Dataran aluvial Jabotabek itu telah dihuni manusia tak lama setelah terbentuknya, manusia menempati wilayah karena kesuburan dan kelimpahan aimya.

Munculnya kerajaan Tarumanagara pada paruh kedua abad kelima masehi di wilayah Jabotabek ditandai sejumlah inskripsi yang ditemukan di Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, dan Tugu. Kerajaan ini cakupan wilayahnya bahkan lebih luas daripada wilayah Jabotabek sekarang, terbukti inskripsinya ditemukan juga di Cidanghiang (daerah Lebak, Banten). Inskripsi itu dapat dipastikan mewakili satu era yang sama. Memuat tentang: nagara Taruma, raja Purnawarman, dan pemujaan tapak kaki. Pengertian nagara, yaitu "kota", suatu tempat hunian yang berbatas jelas, biasanya bergerbang dan berpagar, di mana kehidupan lebih canggih, dengan pengkhususan peranan yang lebih kentara, apabila dibandingkan dengan hunian "desa"; dapat diduga, bahwa konsep ini tidak hanya dikenal dan disebut, melainkan juga diwujudkan secara nyata di zaman Taruma. Terdapatnya wujud nagara (kota; 'dibedakan dengan nagara, yaitu "berkenaan dengan dimiliki oleh/ bersifat kota") pada masa Taruma itu menunjuk pada kenyataan yang dapat ditafsirkan di samping nagara yang berkedudukan sebagai pusat (pemerintahan; kebudayaan) terdapat pula sejumlah daerah hunian 'bukan-nagara yang berkedudukan sebagai pinggiran. Inilah "desa-desa", yang dilihat dari sudut perkembangan pemikiran memang bersifat "pinggiran", namun dilihat dari sudut perekonomian merupakan penyangga dari kebutuhan pusat.



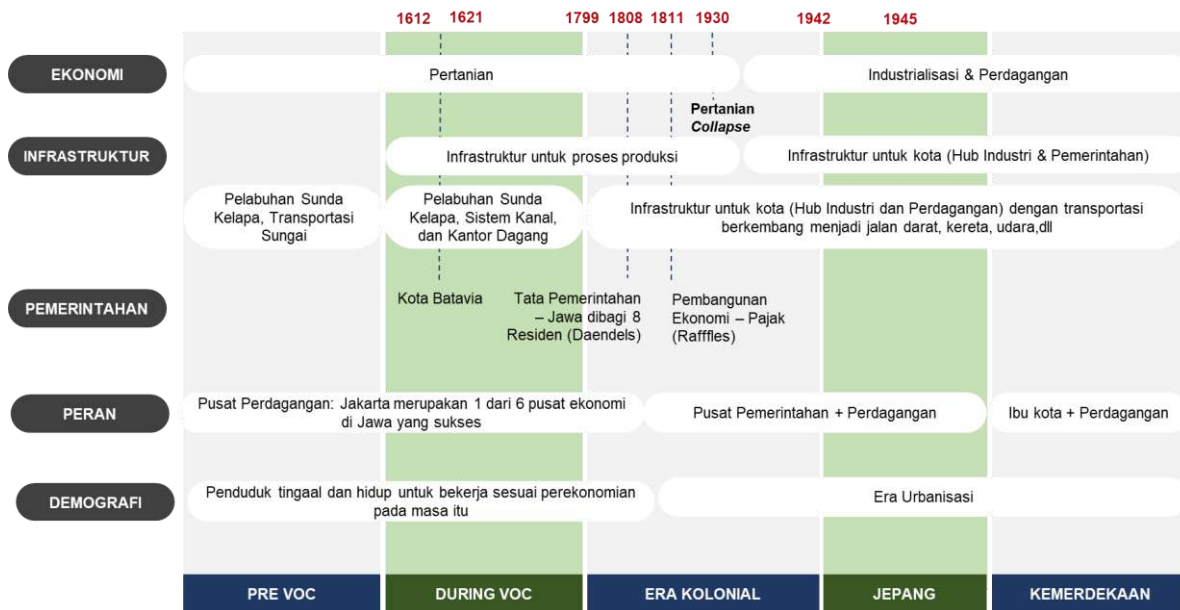
Gambar 2.1 Struktur Kota Batavia

Sumber: <https://jhna.org/articles/dutch-batavia-exposing-hierarchy-dutch-colonial-city/>



Gambar 2.2 Struktur Kota Batavia

Gambar 2.3 menunjukkan ilustrasi perkembangan Kota Jakarta dari masa Pra-VOC hingga masa kemerdekaan. Dapat dilihat bahwa dari segi ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, peran, dan secara demografi, Jakarta terus mengalami perubahan.



Gambar 2.3 Ilustrasi Perkembangan Kota Jakarta

Sumber: Paparan Biro Pemerintahan DKI Jakarta "Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota", 2023

Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota

Meskipun sejak kemerdekaan Jakarta telah menjadi Ibukota Negara, secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga harus memenuhi syarat-syarat minimum sebagai kota internasional sesegera mungkin,

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan "Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya". Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama "Djakarta". Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta merupakan kota pencetus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerdirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo

(2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017), Anies Baswedan (2017-2022) dan Heru Budi Hartono (2022 – sekarang).

Pada masa Gubernur Ali Sadikin, perkembangan DKI Jakarta sudah sangat pesat, kegiatan -kegiatan industri dan perdagangan telah menimbulkan tekanan penduduk yang makin berat serta menimbulkan berbagai masalah perkotaan, sementara sebagai ibukota Negara, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi cerminan peri kehidupan bangsa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1976 tentang pengembangan wilayah Jabodetabek. Kebijakan pembangunan daerah sekeliling Jakarta sebagai kesatuan JABOTABEK antara lain untuk mengembangkan pemukiman serta pengembangan kesempatan kerja yang lebih merata, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan penduduk di Jakarta. Wilayah Jabotabek meliputi wilayah Daerah Khusus Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kotamadya Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi tanpa perubahan dalam status masing-masing daerah dan dalam hak serta kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyerasian pengembangan wilayahnya.

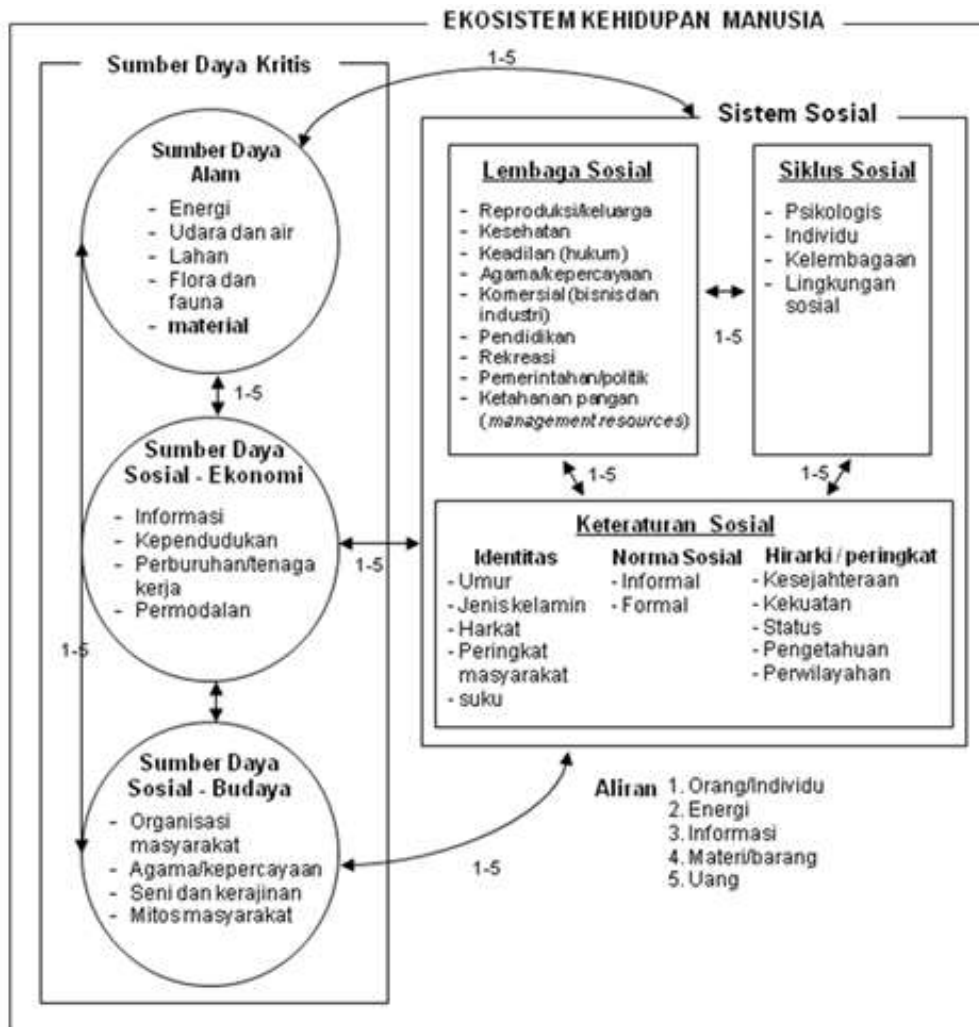
Meskipun keterpaduan arahan pengembangan Jabodetabek sudah dilakukan sejak tahun 1976, Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur baru ditetapkan pada 2008 yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan Presiden 54/2008 ditetapkan setelah adanya Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur adanya PKN Jabodetabek dan KSN Metropolitan Jabodetabekjur. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tersebut kemudian dicabut dan direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020.

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang- undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan ruang wilayah DKI Jakarta 2030 pada prinsipnya akan menggabungkan pendekatan sistem dinamis atau perencanaan komprehensif dengan pendekatan perencanaan strategis sekaligus. Pendekatan sistem dinamis terutama dilakukan untuk tahapan analisis, sehingga tidak ada aspek pertimbangan perencanaan yang tertinggal. Sementara itu, pendekatan strategis terutama dilakukan pada keluaran/output strategi, kebijakan, dan pengembangan indikasi program, sehingga lebih dapat dijaga fokus pembangunan dan penataan ruangnya ke depan. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran atau yang sering dikenal dengan “*mixed approach*”, atau yang dahulu sering disebut sebagai “*mixed scanning*”. Selain itu, pendekatan penyeimbangan (optimasi, sinergi, dan minimasi konflik) juga dilakukan, khususnya penyeimbangan antara aspek fisik/lingkungan/daya dukung lingkungan dengan aspek ekonomi perkotaan, dan aspek sosial-budaya perkotaan, sehingga diperoleh model penataan ruang yang berkelanjutan.

Pendekatan sistem dinamis dilakukan dengan penyederhanaan sistem kota/perkotaan sebagai ekosistem manusia seperti yang dikembangkan Machlis, et al (2002) seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia

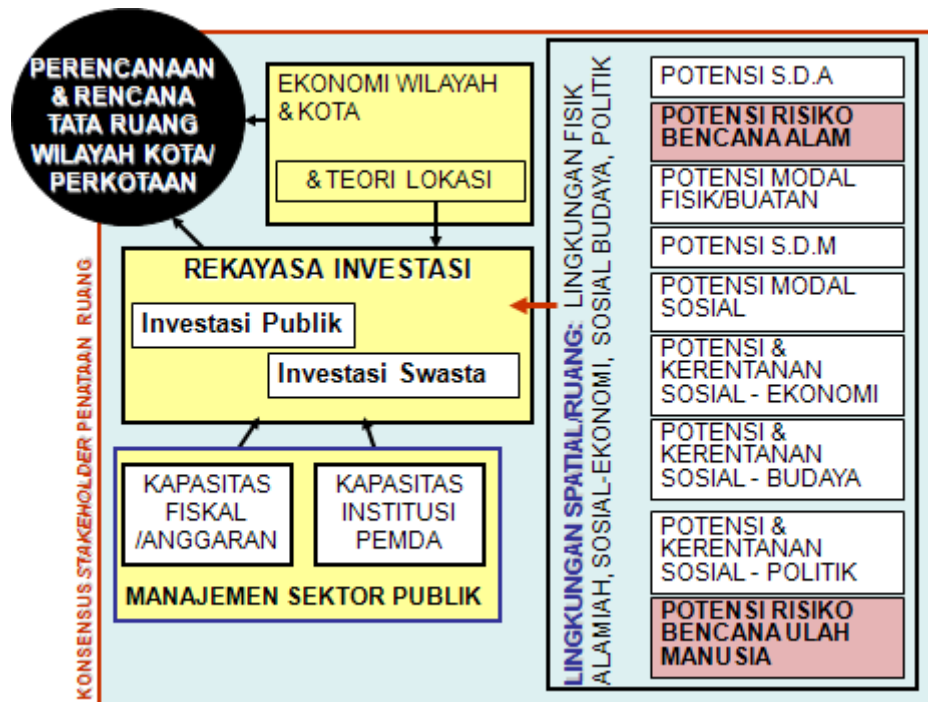
Sumber: The Structure of Human Ecosystems, Machlis et al (2002)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa DKI Jakarta sebagai suatu sistem sosial akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi tiga kelompok utama sumber daya kritis yang dipunyainya, yaitu: sumber daya alam (termasuk ruang), sumber daya sosial-ekonomi, dan sumber daya sosial-budaya. Masing-masing komponen dari ekosistem manusia tersebut satu dengan lainnya berhubungan melalui 5 (lima) macam jenis aliran: individu manusia, energi, informasi, barang/materi, dan uang. Oleh karena itu, menata ruang suatu kota/perkotaan seperti DKI Jakarta pada prinsipnya menata kelima jenis aliran tersebut secara seimbang, selaras, efektif dan efisien khususnya dalam pengaturan alokasi dan distribusi ruangnya secara makro.

Bagaimana sumber daya alam tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan berbagai aspek sistem sosial yang terwujud sebagai lingkungan spasial/ruang yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan utama untuk pengembangan sistem rekayasa investasi kota yang tepat dalam bentuk investasi publik (seperti ruang terbuka hijau, infrastruktur publik, sarana publik, dan lain-lain) maupun dalam bentuk investasi swasta (seperti industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain). Pengembangan Sistem Rekayasa Investasi tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan manajemen sektor publik yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang sehingga diperoleh Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan mudah nantinya.

Dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di DKI Jakarta, maka pendekatan pembangunan konvensional seperti apa adanya sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hal ini mengingat bahwa sumber daya kritis alam sudah tidak tersedia lagi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang harus digunakan ke depan adalah

“manajemen pembangunan” (*Growth Management*). Dalam konteks pengelolaan pembangunan, maka basis perencanaan fungsionalnya harus lebih luas dari sekedar batas administrasi wilayah DKI Jakarta, sehingga untuk kasus DKI Jakarta ini basis perencanaan fungsionalnya adalah Metropolitan Jabodetabekpunjur, dan/atau sampai ke Megalopolitan Jakarta-Bandung.



Gambar 2.5 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi

Beberapa hal berikut ini adalah prinsip utama dalam manajemen pertumbuhan:

- Keinginan untuk secara rasional mengakomodasi dampak dari pertumbuhan
- Merupakan konsep komprehensif/menyeluruh, bukan hanya dampak fisik tetapi juga dampak ekonomi dan sosial
- Pemerintah mengambil peran utama dalam membentuk kerangka kerja yang terpadu
- Sektor dunia usaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu juga mempunyai peran yang penting
- Merujuk kepada teknik pengaturan perundang-undangan
- Fokus pada ‘pembatasan’ pertumbuhan, mengarahkan/ menyalurkannya, atau mengelola dampaknya.

Kemudian dalam konteks manajemen pertumbuhan itu juga, peran penting seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan ruang di DKI Jakarta harus dapat ditingkatkan menjadi pihak-pihak yang berkontribusi positif dalam penataan ruang. Jadi, harus ada pergeseran dari konsep stakeholders (pemangku kepentingan) kepada shareholders (pemegang saham/kontribusi), semua pihak tidak bisa hanya menyatakan punya kepentingan yang harus diakomodasi secara ruang, tetapi juga berkontribusi aktif memenuhi kepentingan masing-masing tersebut secara bersama-sama secara optimal, sinergi, dan meminimalkan konflik. Sehingga bukan hanya ‘hak’-nya yang dituntut, tetapi juga ‘kewajiban’ yang harus ditunaikan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal inilah yang akan menjadi dasar/acuan pada saat dilakukan perekayasaan investasi terhadap seluruh kebutuhan ruang untuk pembangunan, mana yang harus ditanggung oleh sektor publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah lainnya melalui kerja sama), sektor dunia usaha (skala besar, skala menengah, skala kecil atau UMKM), ataupun oleh masyarakat (orang perorangan, kelompok, badan usaha nir-laba).

Potensi Pengembangan Wilayah

Peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia memicu perkembangan kota yang sangat pesat di berbagai sektor. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 mengenai RTR Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Dalam hal ini Jakarta berperan sebagai kawasan perkotaan inti. Jakarta sudah berkembang menjadi kawasan yang matang yang mengemban peran sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat kegiatan bisnis dan perdagangan.

Dalam konstelasi Kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur, DKI Jakarta berfungsi sebagai Kawasan Perkotaan Inti yang menjadi pusat-pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan perkotaan di sekitarnya. Dalam Peraturan Presiden tersebut, ditetapkan bahwa DKI Jakarta berfungsi sebagai

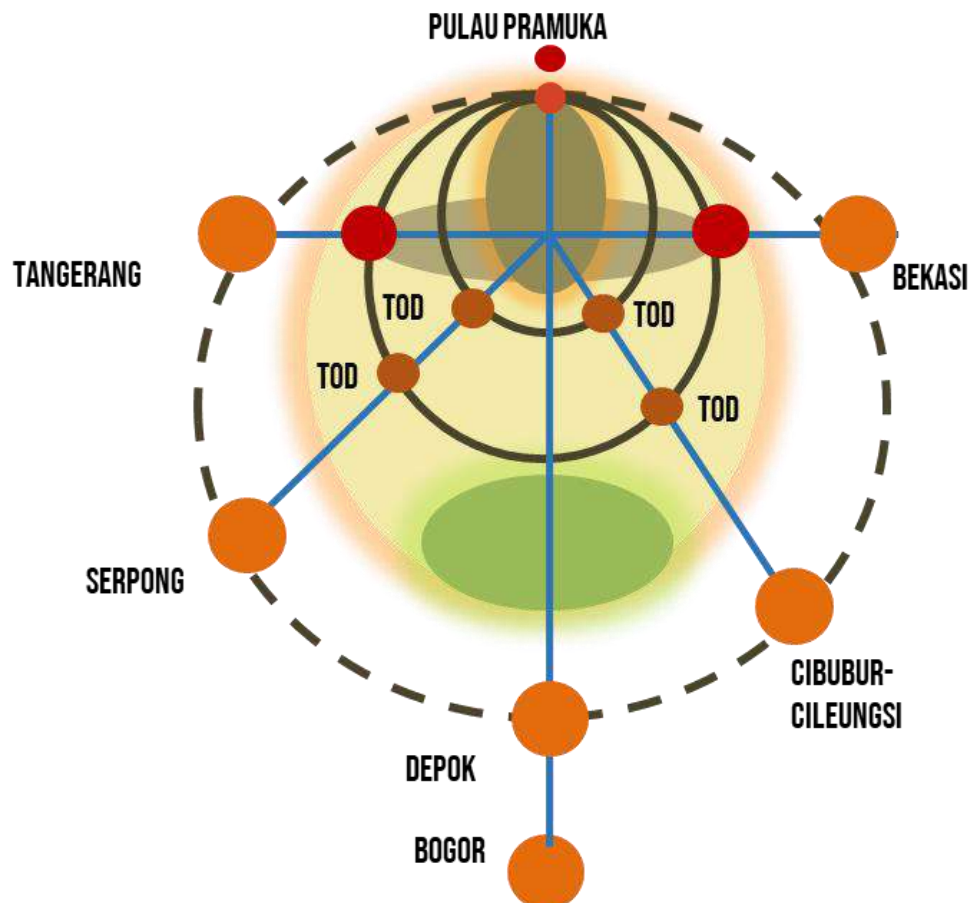
- a. Pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik;
- b. Pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- c. Pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- d. Pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
- e. Pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- f. Pusat kegiatan industri kreatif;
- g. Pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
- h. Pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- i. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- j. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- k. Pusat kegiatan pariwisata; dan
- l. Pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya

Rencana pemindahan ibu kota negara tidak membuat potensi Jakarta memudar. Beberapa fungsi kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020 akan tetap melekat pada DKI Jakarta, termasuk hierarki pelayanan yang mencakup skala internasional. Pada pidato kenegaraan bulan Agustus 2019, Presiden Ir. H. Joko Widodo bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan bahwa Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan dikembangkan sebagai pusat aktivitas bisnis dan keuangan dengan skala regional dan global. Kepala Bappenas RI juga mengatakan bahwa kedepannya akan menempatkan Jakarta sebagai daerah pusat perekonomian yang dapat bersaing dengan kota-kota di ASEAN.

Menjadi IKN sekaligus kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan besarnya kontribusi Provinsi DKI Jakarta bagi perekonomian Indonesia sebesar berturut-turut dari tahun 2018 – 2022 sebesar 17.3%, 17,6%, 17,6% 17,2% dan 16,6% (BPS, 2023). Jakarta merupakan destinasi investasi utama Indonesia dengan menarik Rp. 95.6 T investasi (15.9% total nasional) dari dalam dan luar negeri hingga triwulan III tahun 2019 (BKPM, 2019). Di tahun 2018, sebesar US\$ 4.85 miliar dari total US\$ 29 miliar penanaman modal asing ke Indonesia, atau sekitar 16.6% dari nilai nasional mengalir ke Jakarta, menempatkan Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar kedua di Indonesia. Capaian ini diperkirakan akan tetap berkembang meskipun sudah tidak berfungsi sebagai IKN.

Selain aktivitas bisnis berskala nasional dan internasional, usaha mikro dan kecil juga memiliki peran yang besar yang mendominasi jumlah kegiatan ekonomi di Jakarta. UMKM membuka peluang penyerapan tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2016 tercatat sebesar 93,46%.

Aktivitas perekonomian yang tinggi tersebut didukung oleh usaha penyediaan sarana dan prasarana perkotaan serta jaringan utilitas dan konektivitas di dalam wilayah dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Selain berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga di dalam Jakarta, pengembangan tata ruang juga memiliki titik berat keterpaduan pembangunan dengan kawasan di sekitarnya. Mempertimbangkan pola pergerakan dan aktivitas perkotaan, pengembangan wilayah Jakarta kedepannya akan berorientasi pada penggunaan transportasi umum massal.



Gambar 2.6 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur

Transportasi umum akan menjadi tulang punggung bagi ruang kota Jakarta. Pembangunan kota Jakarta 2030 akan berpihak pada kemudahan perpindahan setiap warganya. BRT Transjakarta serta KRL loopline dan Jabodetabek akan didukung oleh berbagai moda transportasi baru. Jaringan MRT membentang dari utara-selatan menghubungkan daerah pesisir Jakarta dengan perbatasan Tangerang Selatan, dan koridor barat-timur menghubungkan penduduk Jakarta menuju Tangerang sampai Bekasi. Jaringan LRT dibangun untuk membantu pergerakan di dalam pusat kota, maupun luar kota, seperti Cibubur dan Bekasi. Jalur pejalan kaki dan pesepeda disediakan di seluruh jaringan jalan dan di sekitar titik transit transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan. Struktur ruang kota juga dilengkapi dengan jaringan jalan arteri berbentuk radial yaitu *inner ring road*, *Outer Ring Road*, dan *Outer Ring Road 2*.

Aktivitas perkotaan dipadatkan di tengah pada bagian dalam loopline kereta api, dan dikembangkan melintang ke arah barat dan timur. Namun sentra-sentra baru juga dikembangkan untuk mempermudah setiap warga mencapai kebutuhan hariannya. Kawasan pusat kota direncanakan merupakan kawasan kompak dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Begitupun dengan rumah-rumah warga yang direncanakan berada pada sekitar titik-titik transit di seluruh wilayah kota.

Jakarta Sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

Pada 15 Februari 2022, Pemerintah bersama DPR RI menyepakati terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam undang-undang ini, Pemerintah mendapat amanat untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Dengan adanya undang-undang ini, maka kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota Negara dirasa perlu dilakukan dikarenakan hingga saat ini kegiatan perekonomian Indonesia terpusat di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu kota Nusantara dengan Keputusan Presiden (Ps. 39 (1)). Dan untuk menjamin keberlangsungan kedudukan, fungsi dan peran Jakarta maka paling lama dalam 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang IKN, maka UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sudah diubah sesuai dengan ketentuan yang baru (Ps. 41 (2)), dalam ketentuan yang baru telah disepakati bahwa tidak dinyatakan sebagai pembentukan daerah otonom baru untuk menjaga kesinambungan badan hukum Jakarta saat ini, sehingga hanya mencabut kata Ibu Kota dari DKI menjadi DK saja. Selain itu juga disepakati bahwa Jakarta diarahkan sebagai *Global City* unggulan nasional dalam bersaing dengan kota global lainnya di dunia.

Gambar 2.7 menunjukkan beberapa gambaran harapan kondisi Jakarta di masa depan dari segi pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan, kebudayaan, perhubungan/ transportasi, lingkungan dan keruangan.



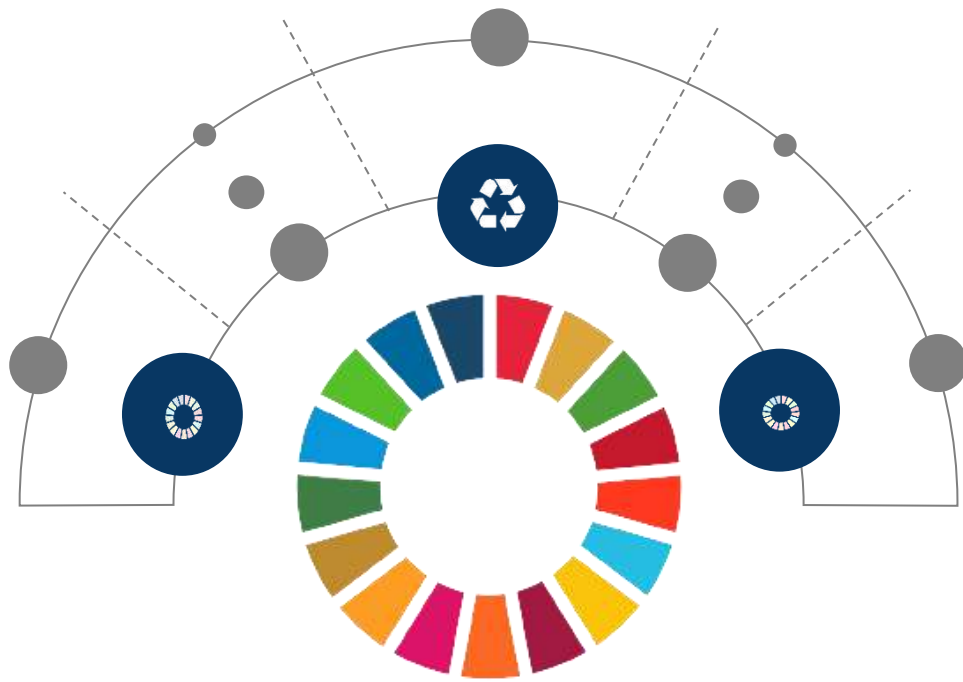
Gambar 2.7 Gambaran Jakarta di Masa Depan

Sumber: Paparan Biro Pemerintahan DKI Jakarta "Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota", 2023

Dalam sistem perkotaan Nasional sebagaimana diatur dalam PP 26 tahun 2008 jo PP 13 tahun 2017 tentang RTRWN, wilayah DKI Jakarta bersama dengan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Selain itu, berdasarkan PP 13 tahun 2017, wilayah DKI Jakarta juga termasuk salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari kepentingan ekonomi yaitu KSN Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu. Rencana Tata Ruang (RTR) KSN JABODETABEKPUNJUR yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan



Cianjur. Sebagai suatu sistem perkotaan, wilayah perencanaan sesuai lingkup RTR KSN JABODETABEKPUNJUR akan sangat mempengaruhi perencanaan tata ruang DKI Jakarta, baik secara wilayah perencanaan, konektivitas antar wilayah, dan juga kondisi lingkungan hidup. Dengan Jakarta sebagai bagian perkotaan nasional yang memiliki wilayah fungsional lebih luas tersebut membuat Jakarta sebagai pintu gerbang utama ke dunia internasional yang berskala global dan mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Walaupun sampai saat ini nilai indeks kota Jakarta masih rendah namun menunjukkan tren yang membaik dan diperkirakan akan mampu menyaingi kota-kota lain paling tidak di ASEAN dan ASIA.



BAB 3

KONDISI UMUM DAERAH

Kondisi Geografis

Kondisi Lingkungan Hidup

Gambaran Keuangan Daerah

Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

BAB 3

KONDISI UMUM DAERAH

“Bab ini berisi kondisi geografis, kondisi lingkungan hidup, gambaran keuangan daerah, dan peran pemangku kepentingan di DKI Jakarta”

3.1 Kondisi Geografis

3.1.1 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis)

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terbentang antara 106°19'30" dan 106°58'18" Bujur Timur, serta antara 5°10'00" dan 6°23'54" Lintang Selatan. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan sebesar 669,64 km², termasuk sekitar 109 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan penambahan luas daratan sekitar 7,31 km² yang berupa lahan hasil reklamasi dan perluasan daratan, serta luas lautan sebesar 6.998 km².

Wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri dibagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yaitu:

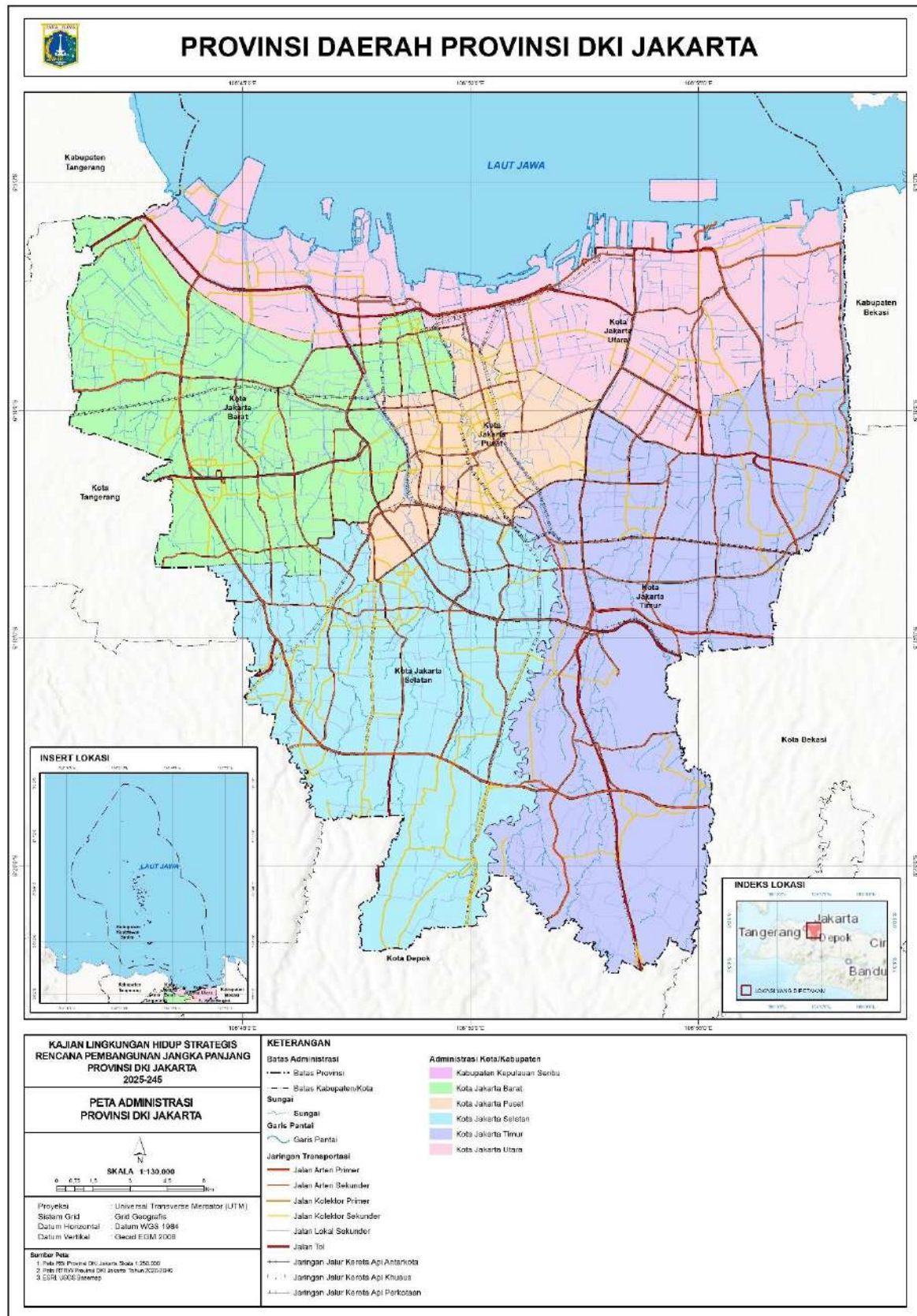
- Kota Administrasi Jakarta Pusat,
- Kota Administrasi Jakarta Utara,
- Kota Administrasi Jakarta Barat,
- Kota Administrasi Jakarta Selatan,
- Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Wilayah pesisir Provinsi DKI Jakarta terletak pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta baik wilayah daratan dan perairan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.1. Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Batas Wilayah	
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Timur	Laut Jawa, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Sebelah Selatan	Kota Depok, Kabupaten Bogor
Sebelah Barat	Perairan Provinsi Lampung, Kabupaten Tangerang

Batas wilayah administrasi DKI Jakarta dapat dilihat di Gambar berikut.



Gambar 3.1. Administrasi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW 2020-2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta



Sementara itu, luasan kabupaten dan kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Luas setiap wilayah kabupaten/kota di DKI Jakarta

Kabupaten / Kota Administrasi	Luas Daratan (km ²)
Kepulauan Seribu	8,7
Jakarta Utara	153,97
Jakarta Timur	188,03
Jakarta Pusat	48,13
Jakarta Barat	129,54
Jakarta Selatan	141,27
Total	669,64

Sumber: Keputusan Gubernur DKI Jakarta 171 /2007

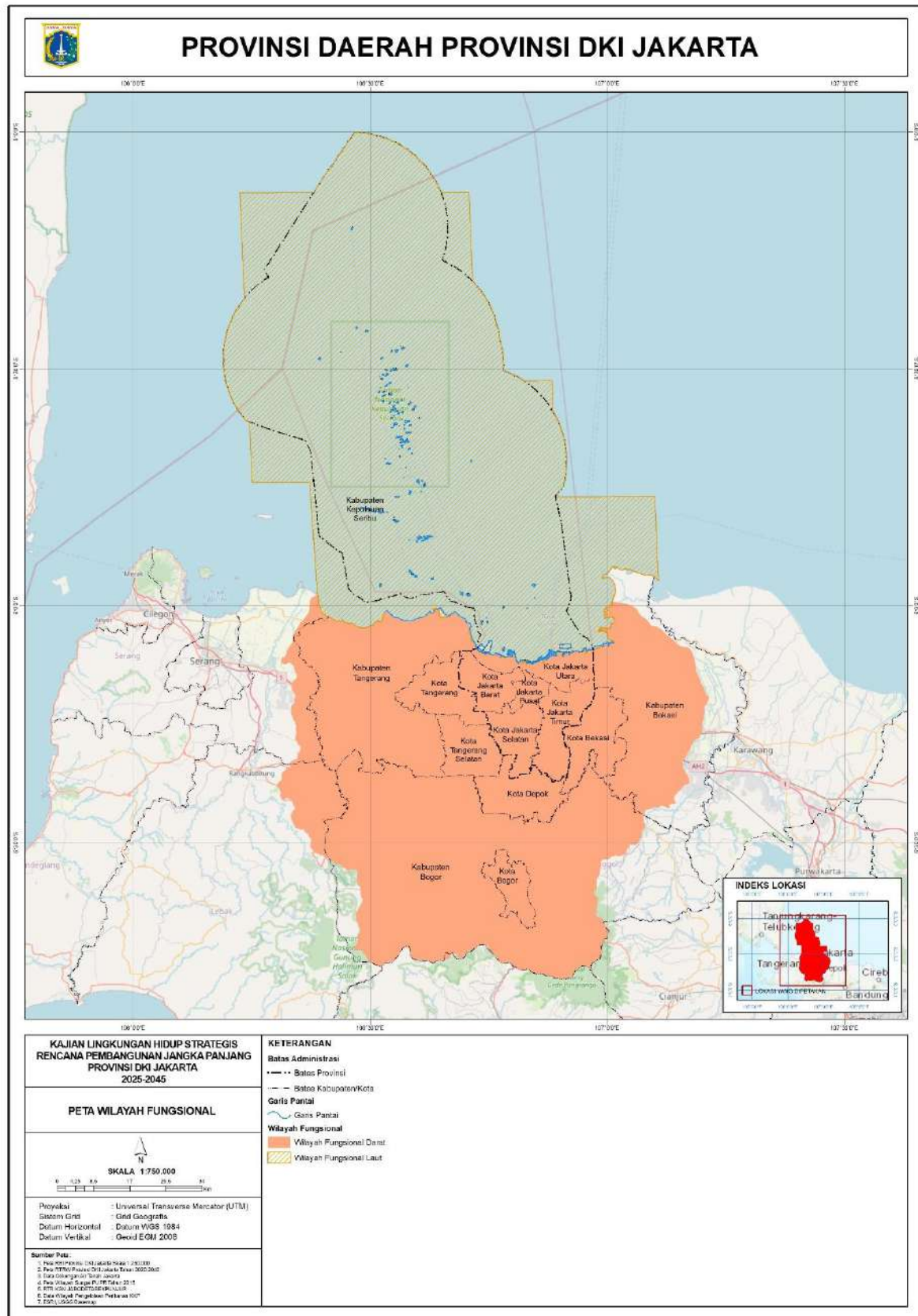
Wilayah Fungsional

Lingkup KLHS tidak hanya melihat dan mempertimbangkan wilayah administrasi tetapi juga wilayah fungsional dalam mengkaji dan melakukan analisa kondisi lingkungan hidup terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah fungsional ini didasari atas data Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT) yang mempengaruhi kondisi perairan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, wilayah fungsional juga mempertimbangkan ekoregion darat-laut, wilayah pengelolaan perikanan dan wilayah perencanaan JABODETABEKPUNJUR.

Wilayah fungsional berdasarkan batas wilayah sungai menekankan pada pendekatan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai. Penetapan wilayah sungai di Indonesia adalah menjadi dasar untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air yang baik guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan sistem wilayah sungai, DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah sungai (WS) Ciliwung-Cisadane yang terbagi dalam dua *Water District* (WD) Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd Pasar Baru. Namun demikian, berkaitan dengan fungsi DKI Jakarta sebagai ibukota, Keputusan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air di:

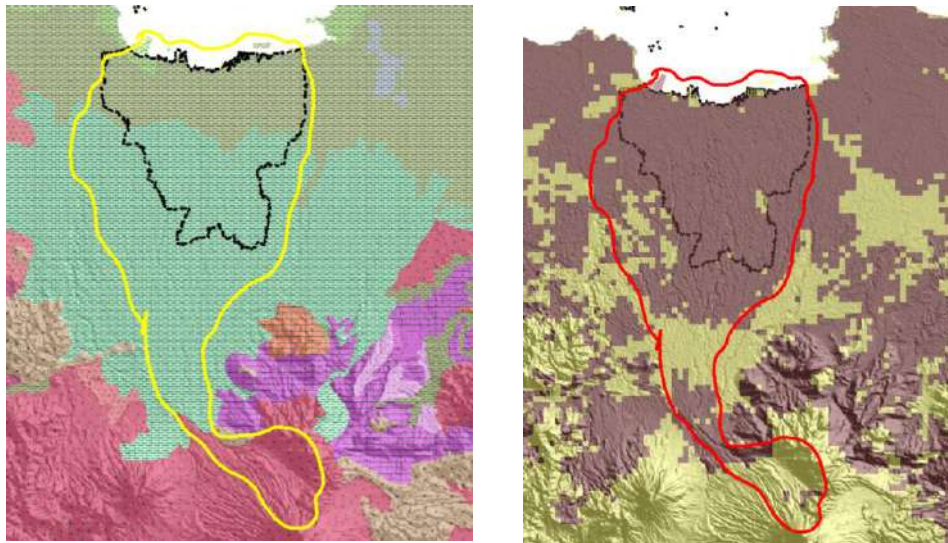
- Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung – Cidurian di Provinsi Banten dan Jawa Barat
- Wilayah Sungai Citarum di Provinsi Jawa Barat

harus tetap menjamin kebutuhan air baku wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ke dua WS tersebut juga merupakan wilayah fungsional terkait dengan penyediaan air baku. Wilayah Sungai (WS) Ciliwung – Cisadane mencakup 15 DAS (Keppres 12/2012) dan secara spasial dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan batas Wilayah Sungai
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan peta Wilayah Sungai tersebut, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang secara langsung berkaitan dengan sistem hidrologi dengan DKI Jakarta adalah 6 DAS yaitu Kali Angke Pesanggrahan, Kali Krukut, Ciliwung, Kali Sunter, Kali Buaran dan Kali Cakung. Keenam DAS tersebut bermuara di DKI Jakarta atau dengan kata lain wilayah DKI Jakarta merupakan bagian hilir dari ke enam DAS tersebut. Keenam DAS ini merupakan bagian dari Wilayah Fungsional berdasarkan batas Wilayah Sungai (Gambar 3.2). Hanya secara spesifik keenam DAS ini akan memberikan pengaruh kepada dan sebaliknya dipengaruhi oleh aktivitas dan kegiatan di wilayah DKI Jakarta terutama terkait dengan bencana hidrologis seperti banjir dan atau kekeringan maupun daya dukung dan daya tampung sumber daya air. Gambar 3.3. menunjukkan wilayah fungsional DKI Jakarta berdasarkan batas sistem hidrologi DAS.



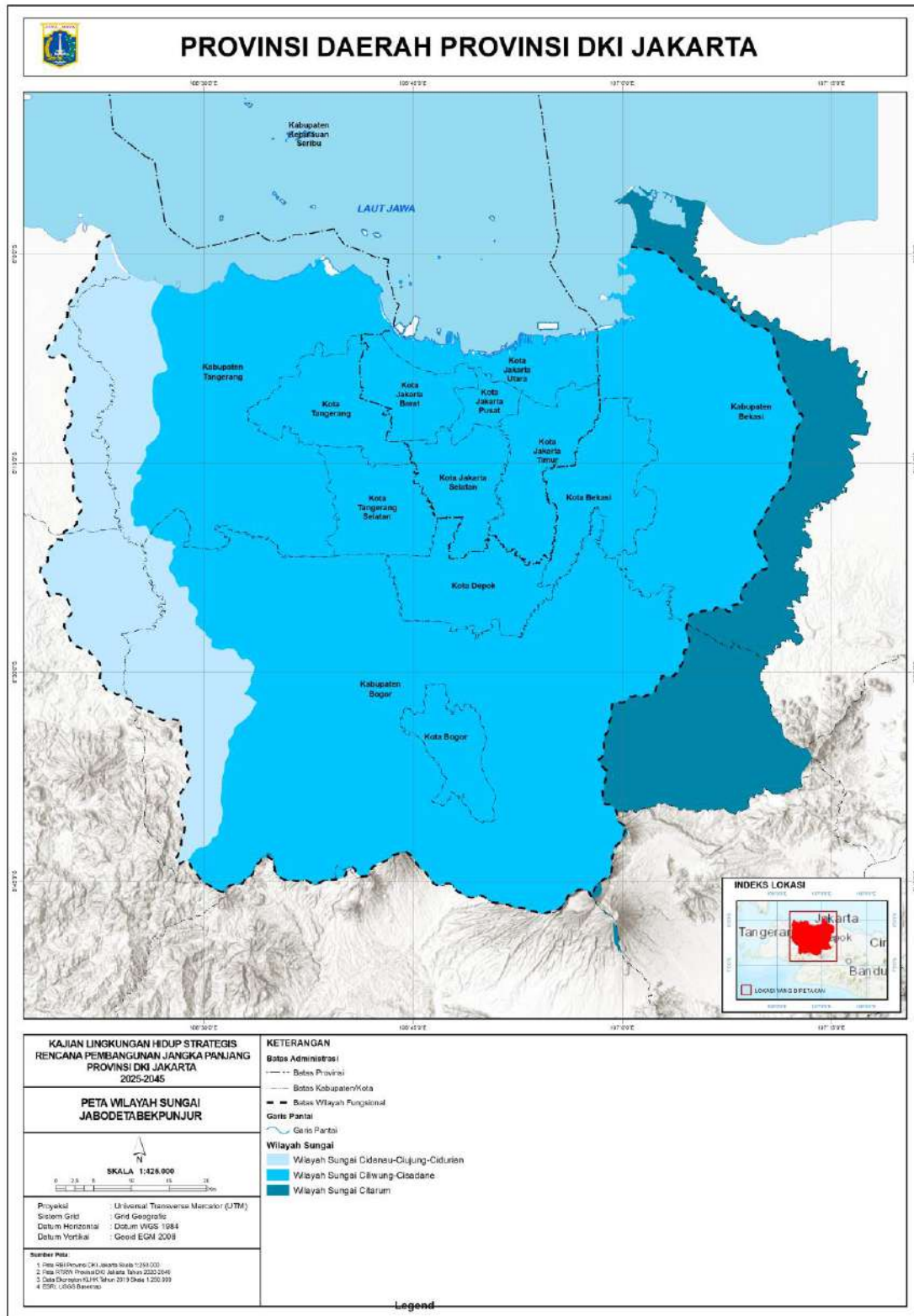
Gambar 3.3. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan Batas Sistem Hidrologi DAS

Sumber: KLHK

Untuk wilayah ekoregion, wilayah DKI Jakarta masuk ke dalam 6 kelas ekoregion yang akan sangat berpengaruh dalam menentukan kinerja jasa lingkungan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk wilayah perairan laut, DKI Jakarta masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, yang memiliki potensi perikanan tinggi serta habitat karang dan lamun yang cukup luas. Sehingga dalam penentuan wilayah fungsional perlu mempertimbangkan WPP 712 sebagai wilayah perairan provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu dalam menentukan wilayah fungsional, tidak hanya mempertimbangkan **Wilayah Sungai, DAS, CAT, Ekoregion dan WPP 712** di wilayah administrasi DKI Jakarta tetapi juga mempertimbangkan wilayah RTR JABODETABEKPUNJUR untuk wilayah darat dan laut, yang akan mempengaruhi kondisi tata ruang DKI Jakarta. Lingkup wilayah perencanaan KSN Jabodetabekpunjur berdasarkan PP 13 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan batas wilayah sungai Gambar 3.2.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian ini digunakan wilayah fungsional yang terdiri dari 7 administrasi kota dan 5 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



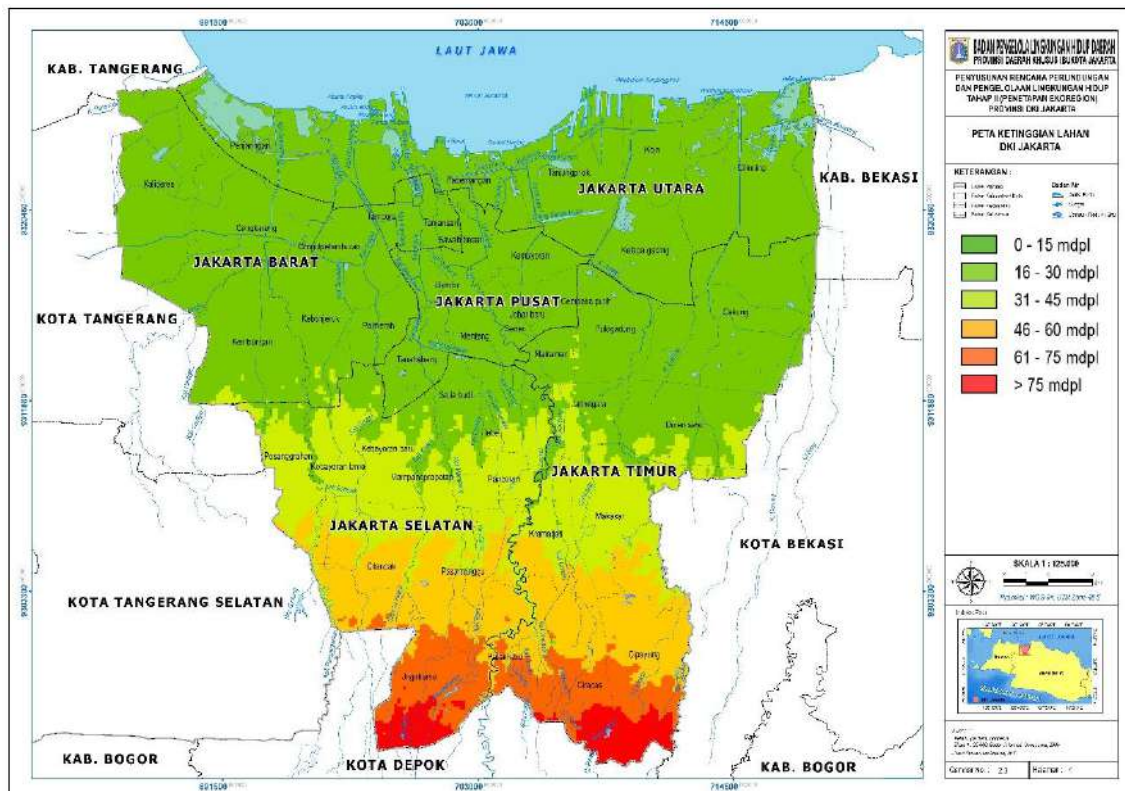
Gambar 3.4. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan Batas Wilayah Sungai JABODETABEKPUNJUR
Sumber: Kementerian PUPR dan Hasil Analisis, 2023

3.1.2 Karakteristik Wilayah

3.1.2.1 Karakteristik Biogeofisik Lingkungan

Topografi Jakarta

Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 m di atas permukaan laut. Sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 m di bawah muka laut pasang. Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satuan morfologi dengan kemiringan lereng 0-0,5% dan ketinggian kurang dari 10 meter di daerah pantai hingga 70 meter di bagian selatan Jakarta mendekati Bogor. Ragam elevasi wilayah Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada gambar di bawah.



Gambar 3.5. Ketinggian lahan wilayah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: DEMNAS

Ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta dikatakan relatif datar, akan tetapi terdapat beberapa titik wilayah yang memiliki kontur bergelombang. Kondisi ini erat kaitannya dengan potensi bencana banjir/genangan air. Wilayah-wilayah dengan kontur bergelombang tentunya memerlukan rekayasa saluran air maupun pompa air yang memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut. Beberapa titik wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilendak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan, Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan dan Cilincing).

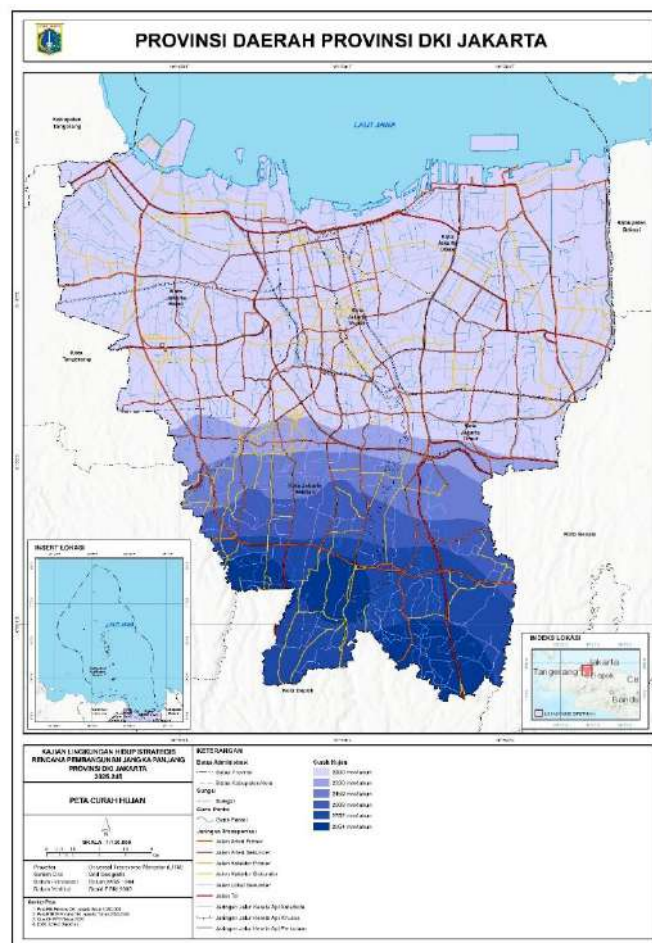
Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya dapat dilakukan dengan pendekatan batas ekoregion meskipun pelaksanaannya tetap diselenggarakan sesuai batas administrasi suatu wilayah. Memahami konsep ini, maka pada dasarnya pembahasan daya dukung dan daya tampung air di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat lepas dari peranan wilayah hulu dan hilir mencakup daerah penyangga ibukota yaitu Bodetabekjur (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur).

Fenomena perubahan iklim diproyeksikan menyebabkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem lebih tinggi dan lebih cepat terjadi. Herizal mengatakan dari pengkajian data historis curah hujan harian BMKG selama 150 tahun (1866-2015), terdapat tren semakin seringnya kejadian hujan ekstrem tahunan, peningkatan 2-3% probabilitas bila dibandingkan dengan kondisi iklim 100 tahun lalu. BNPB mencatat, curah hujan di Jakarta pada awal Januari tahun 2020 menjadi curah hujan tertinggi dalam 1,5 abad. Berdasarkan data BNPB, curah hujan mencapai 377 mm/hari. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari curah hujan tahun 2016 yang mencapai 100-150 mm/hari. Anomali perubahan curah hujan seperti terlihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta Pada Stasiun Pengamatan Kemayoran

No	Bulan	2017		2018		2019		2020	
		Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan
1	Januari	214,10	19	215,1	23	383,9	25	504	25
2	Februari	520,80	24	431,2	24	270,1	16	763,7	25
3	Maret	138,70	15	188,6	22	327,3	23	220,6	19
4	April	156,50	16	159,1	16	194,6	19	110,6	10
5	Mei	135,00	10	16,7	5	47,8	6	52,5	11
6	Juni	138,50	11	12,6	5	23,1	2	63,3	9
7	Juli	119,90	7	14,5	1	0	0	99,9	9
8	Agustus	0,80	1	33	1	0	0	77,9	5
9	September	165,80	7	62	7	1	0	131,9	8
10	Oktober	112,40	12	133,8	6	1	1	101,7	12
11	November	195,30	17	140,9	11	50,1	8	111,2	15
12	Desember	254,10	12	52,3	13	263,8	17	244,2	21

Sumber: Stasiun Pengamatan Kemayoran



Gambar 3.7 Peta Curah Hujan Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sedangkan suhu udara rata-rata harian di DKI Jakarta rata-rata berada pada 26 – 28°C, namun untuk saat ini karena pemanasan global rata-rata suhu harian bisa diatas 28°C. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil, perubahan suhu udara di kawasan Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian wilayah. Kondisi iklim di Provinsi DKI Jakarta pada saat ini sangat tidak menentu, dari tahun ke tahun cukup bervariasi.

Cuaca di DKI Jakarta juga dipengaruhi angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, dengan rata-rata temperatur terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi pada bulan Oktober dan November. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020

No	Bulan	2017			2018			2019			2020		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
1.	Januari	34,40	24,00	28,20	33,80	23,00	27,70	34,00	23,60	27,90	34,4	24	28,02
2.	Februari	32,40	23,40	27,20	32,40	23,40	27,20	34,00	24,00	28,20	34,6	24	27,72
3.	Maret	34,40	24,00	28,10	34,20	23,80	27,90	34,80	23,80	28,10	34,6	25	28,6
4.	April	34,20	24,80	28,50	34,40	24,00	28,70	35,20	24,80	28,80	34,8	25	29,08
5.	Mei	35,00	25,00	29,00	34,60	25,00	29,40	35,00	25,00	29,60	35,6	24,8	29,58
6.	Juni	35,20	24,00	28,70	35,00	24,00	28,90	34,40	24,40	29,20	35	24,4	29,49
7.	Juli	34,60	24,00	28,50	34,20	24,00	28,20	34,00	24,00	28,70	34,2	24,2	28,93
8.	Agustus	34,40	24,00	28,70	34,20	23,00	28,20	33,60	24,00	28,20	34,8	24	29,12
9.	September	35,00	24,00	28,80	35,40	24,20	28,60	35,00	24,00	28,80	35	24	29,29
10.	Oktober	34,20	23,00	28,90	35,20	24,00	29,30	35,00	24,60	29,40	34,6	24	28,83
11.	November	34,40	24,20	28,20	36,60	24,40	28,90	34,60	25,00	29,50	35,2	25	29
12.	Desember	34,80	24,00	28,20	35,40	24,40	28,70	33,80	24,80	28,40	34,8	24,2	28,15

Sumber: Data BMKG DKI Jakarta

Hidrogeologi

Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta berada dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta yang terbentang antara 106°36'32.54" dan 107°4'4.78" Bujur Timur serta antara 6°0'43.50" dan 6°26'58.23" Lintang Selatan. CAT Jakarta dengan luas wilayah 1.439 km² ini merupakan CAT yang sebarannya mencapai Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor (Permen ESDM no. 2 tahun 2017). Secara geologis, wilayah cekungan air tanah ini dibatasi oleh lapisan kedap air dari kala Miosen yang naik ke permukaan di kawasan Tangerang, Depok dan Bekasi (Delinom 2008). Gambar 3.8 menunjukkan batasan wilayah CAT Jakarta beserta batasan daerah imbuhan dan lepasannya.

CAT Jakarta terdiri dari beberapa lapisan akuifer dengan kedalaman yang berbeda-beda. Setiap lapisan akuifer dibatasi oleh lapisan akuitar yang memiliki permeabilitas air rendah. Berdasarkan satuan hidrogeologi dan kedalamannya, lapisan akuifer CAT Jakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 zona (Herlambang und Indriatmoko 2005; Tirtomihardjo 2014; Setyawan et al. 2015):

1. Kelompok akuifer dangkal/tidak tertekan dengan kedalaman sampai 40 m (zona 1). Lapisan akuifer ini disusun oleh lapisan tanah berjenis lempung, lempung pasir, pasir tufaan, pasir lempungan, pasir dan kerikil.
2. Kelompok akuifer dalam/tertekan dengan kedalaman lebih dari 40 m, yang dapat dibagi menjadi 3 zona:
 - a. Zona 2: akuifer tertekan atas yang diapit oleh dua lapisan akuitar dengan kedalaman mencapai 150 m. Lapisan akuifer ini terdiri dari 4 satuan lapisan tanah yang berbeda. Lapisan pertama dan kedua terdiri

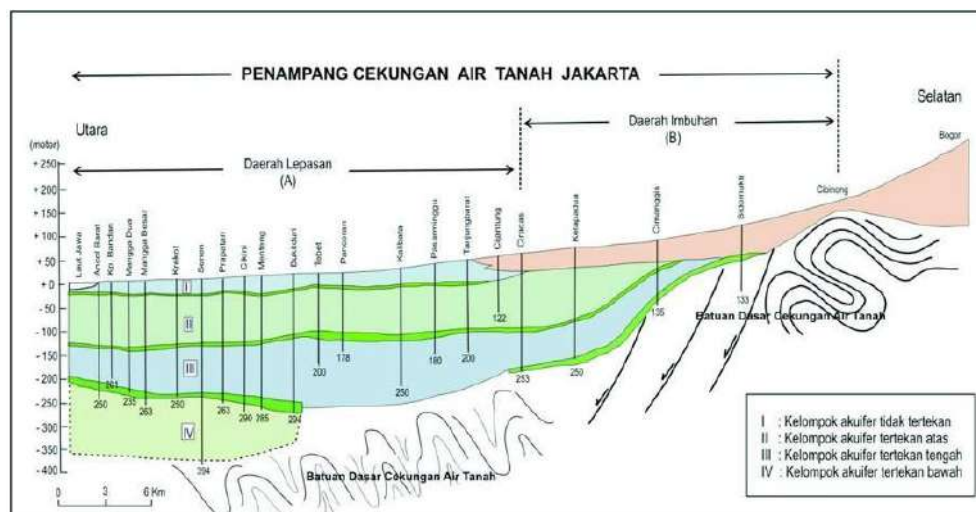
- dari lempung keras, lempung pasir, pasir, kerikil batu pasir dan konglomerat. Lapisan ketiga dan keempat terdiri dari lempung, lempung pasir, pasir kuarsa dan lempung keras.
- Zona 3: akuifer tertekan tengah yang berada di bawah kelompok akuifer tertekan atas dan juga diapit oleh dua lapisan akuitar dengan kedalaman mencapai 250 m. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasir, pasir lempungan, pasir kuarsa, kerikil dan lempung.
 - Zona 4: akuifer tertekan bawah yang diapit oleh lapisan akuitar dan lapisan batuan dasar dari kala Miosen dengan kedalaman di bawah 250 m. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasir, lempung berkerikil, dan konglomerat. Umumnya akuifer ini tidak produktif.



Gambar 3.8. Cekungan Air Tanah Jakarta (Warna Kuning)

Sumber: Permen ESDM no. 2 tahun 2017

Skema sederhana lapisan akuifer Jakarta dapat dilihat di Gambar 3.6. Lapisan-lapisan akuifer ini tidak merata tersebar di seluruh kawasan Jakarta. Kedalaman setiap lapisan pun dapat berbeda-beda, tergantung dari lapisan dan jenis tanah penampungnya.



Gambar 3.9 Skema Sederhana Penampang Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara

Sumber: <http://geomagz.geologi.esdm.go.id/air-tanah-dan-pembangunan-bawah-tanah-jakarta/>

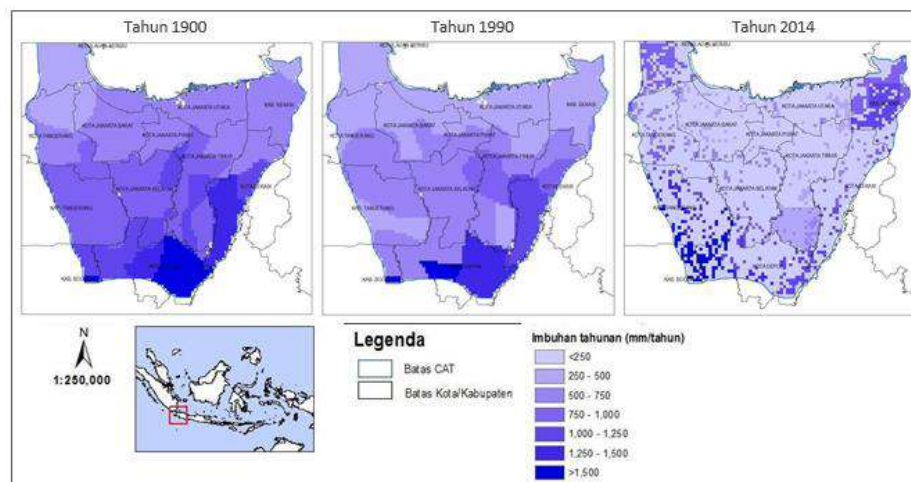
Sebagai cekungan air tanah yang terdapat di kawasan pantai, lapisan akuifer di Jakarta, terutama lapisan akuifer tidak tertekan, bersinggungan langsung dengan air laut di kawasan utara. Dalam keadaan alami, terdapat gradien hidrolik yang umumnya mengarah ke laut, sehingga air tawar dalam akuifer mengalir ke arah laut dan air laut tidak serta-merta masuk ke dalam lapisan akuifer. Hanya di daerah transisi, tempat persinggungan antara akuifer dan air laut, air tanah berubah menjadi air payau karena adanya proses pencampuran.

Potensi Air Tanah CAT Jakarta

Berdasarkan potensi tanah untuk menyimpan air, wilayah DKI Jakarta pada dasarnya memiliki potensi tinggi untuk menyimpan air tanah di akuifer dangkal. Selama pengambilan air tanah tidak melebihi tingkat regenerasinya, keberadaan air tanah dalam akuifer dangkal dapat terjaga. Namun, dengan semakin meningkatnya luas lahan yang terbangun dan yang dipadatkan, lahan yang mampu menyerap air hujan semakin sedikit sehingga tingkat regenerasi akuifer dangkal pun semakin menurun.

Menurut Seizarwati et al. (Seizarwati et al. 2017), potensi imbuhan air tanah dangkal di wilayah CAT Jakarta di tahun 2014 telah menurun drastis dibandingkan dengan kondisi tahun 1900 dan tahun 1990. Faktor utama penyebab penurunan potensi imbuhan ini adalah perubahan penggunaan lahan dari lahan tidak kedap menjadi lahan kedap. Pada tahun 1900 wilayah CAT Jakarta masih didominasi oleh lahan dengan potensi imbuhan > 750 mm/tahun, sedangkan di tahun 1990 lahan potensi imbuhan > 750 mm/tahun hanya dapat ditemukan pada kawasan timur dan selatan CAT Jakarta.

Hasil perhitungan tahun 2014 menunjukkan potensi imbuhan air tanah semakin berkurang. Hampir seluruh wilayah CAT Jakarta telah didominasi oleh lahan kedap dengan potensi imbuhan < 250 mm/tahun. Gambar 3.10 menunjukkan persebaran potensi imbuhan air tanah dangkal CAT Jakarta pada tahun 1900, 1990 dan 2014.



Gambar 3.10. Peta Potensi Imbuhan Air Tanah Dangkal CAT Jakarta Tahun 1900, 1990, 2014

Sumber: Seizarwati et al, 2017

Berbeda halnya dengan akuifer dalam, wilayah DKI Jakarta hampir secara keseluruhan merupakan daerah lepasan air tanah dalam. Penelitian yang dilakukan oleh Delinom, 2008, menunjukkan bahwa daerah imbuhan akuifer tertekan baru dapat ditemukan di batas selatan DKI Jakarta (lihat juga Gambar 3.8 dan Gambar 3.9). Adanya lapisan akuiter yang menjadi pembatas atas akuifer tertekan menyulitkan air hujan untuk bisa masuk ke lapisan akuifer tersebut. Simulasi yang dilakukan oleh Djaeni dan Schmidt et al (Djaeni et al. 1986; Schmidt et al. 1990) juga menunjukkan rendahnya tingkat regenerasi akuifer tertekan yang terjadi dalam wilayah DKI Jakarta. Konduktivitas vertikal akuifer tertekan hanya mencapai 0,02% dari konduktivitas horizontal rata-rata yang berkisar 1,3 m/hari, sehingga regenerasi air tanah dalam di kawasan DKI Jakarta dapat dikatakan hampir tidak terjadi. Sementara, regenerasi air tanah dalam dari kawasan imbuhan di selatan diperkirakan mencapai sebesar 15 juta m³/tahun (Djaeni et al. 1986; Geyh und Söfner 1989; Schmidt et al. 1990).

Hidrologi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah daratan DKI Jakarta terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane, sedangkan wilayah Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Kepulauan Seribu.

WS Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang pengelolaannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Menteri, namun dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air kawasan. Sementara WS Kepulauan Seribu merupakan wilayah sungai dalam satu kabupaten yang kewenangan pengelolaannya seharusnya jatuh kepada Bupati. Namun, karena kewenangan otonomi DKI Jakarta berada di tingkat provinsi, maka tanggung jawab pengelolaan jatuh kepada Gubernur.

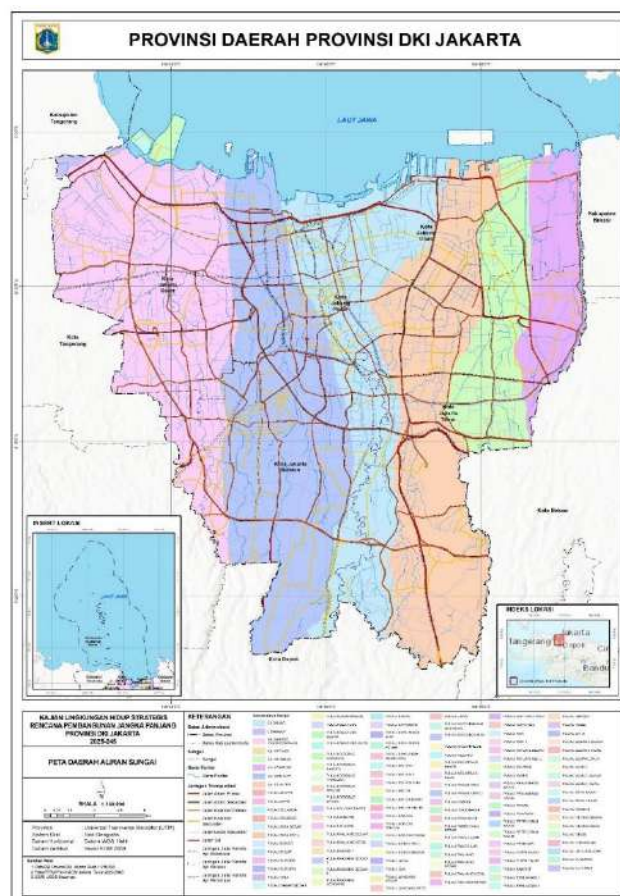
Wilayah Sungai yang termasuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi lagi menjadi beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan Data DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WS Kepulauan Seribu terbagi menjadi 106 DAS dan WS Ciliwung-Cisadane yang ada dalam wilayah daratan DKI Jakarta terbagi menjadi 9 DAS. Daerah Aliran Sungai yang terdapat dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dirinci dalam Tabel 3.5 dan Gambar 3.12. berikut.

Tabel 3.5. Nama Daerah Aliran Sungai dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta

DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Seribu			
1	Pulau Tidung Besar	54	Pulau Bokor
2	Pulau Pari	55	Pulau Pabelokan Besar
3	Pulau Sebaru Besar	56	Pulau Panggang
4	Pulau Rambut	57	Pulau Pelangi
5	Pulau Untung Jawa	58	Pulau Pantara Timur
6	Pulau Bira Besar	59	Pulau Jukung
7	Pulau Panjang Besar	60	Pulau Rengat
8	Pulau Genteng Besar	61	Pulau Melinjo
9	Pulau Damar Besar	62	Pulau Pantara Barat
10	Pulau Lancang Besar	63	Pulau Opak Besar
11	Pulau Payung Besar	64	Pulau Kelapa 2
12	Pulau Kelapa 1	65	Pulau Putri Barat
13	Pulau Penjaliran Barat	66	Pulau Tengah
14	Pulau Kotok Besar	67	Pulau Jagung
15	Pulau Pramuka	68	Pulau Bira Kecil
16	Pulau Penjaliran Timur	69	Pulau Onrus
17	Pulau Laki	70	Pulau Karya
18	Pulau Melintang Besar	71	Pulau Papatheo
19	Pulau Tidung Kecil	72	Pulau Nyamplung
20	Pulau Lancang Kecil	73	Pulau Putri Timur
21	Pulau Pamegaran	74	Pulau Melintang Kecil
22	Pulau Sebaru Kecil	75	Pulau Semut Besar
23	Pulau Satu	76	Pulau Kaliage Besar
24	Pulau Sepa Barat	77	Pulau Bidadari
25	Pulau Yu Timur	78	Pulau Anyer
26	Pulau Bunder	79	Pulau Ayer
27	Pulau Peniki	80	Pulau Macan Besar Matahari
28	Pulau Kelor Timur	81	Pulau Lipan
29	Pulau Karang Beras 2	82	Pulau Yu Barat
30	Pulau Tongkeng	83	Pulau Genteng Kecil
31	Pulau Kelapa Dua	84	Pulau Panjang
32	Pulau Cina	85	Pulau Kotak Kecil
33	Pulau Burung	86	Pulau Kayangan
34	Pulau Kongsu	87	Pulau Peteloran Barat
35	Pulau Perak	88	Pulau Opak Kecil
36	Pulau Kelor Barat	89	Pulau Tikus
37	Pulau Sepa Timur	90	Pulau Kayu Angin Bira

DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Seribu			
38	Pulau Bulat	91	Pulau Kongsu Timur
39	Pulau Gosong Rengat	92	Pulau Damar Kecil
40	Pulau Rose	93	Pulau Kayu Angin Puteri
41	Pulau Karang Bongkok	94	Pulau Semak Daun
42	Pulau Panjang Kecil	95	Pulau Semut Kecil
43	Pulau Kelor	96	Pulau Kongsu Tengah
44	Pulau Gosong Pramuka	97	Pulau Macan Kecil
45	Pulau Belanda	98	Pulau Kaliage Kecil
46	Pulau Kayuangan Melintang	99	Pulau Gosong Sekati
47	Pulau Gosong Congkak	100	Pulau Karang Beras 1
48	Pulau Gudus Tinggi	101	Pulau Semut
49	Pulau Perawan	102	Pulau Genteng
50	Pulau Macan Gundul	103	Pulau Kapas 1
51	Pulau Payung Kecil	104	Pulau Nyamuk Kecil
52	Pulau Gosong Keroya	105	Pulau Laga
53	Pulau Pari 1	106	Pulau Peteloran Timur
DAS di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane			
1	Cisadane		
2	Kali Angke Pesanggrahan		
3	Ciliwung		
4	Kali Krukut		
5	Kali Sunter		
6	Kali Cakung		
7	Kali Buaran		
8	Pulau Reklamasi 1		
9	Pulau Reklamasi 2		

Sumber: Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015 dan Data DAS KLHK



Gambar 3.11. Daerah Aliran Sungai dalam WS Kepulauan Seribu dan WS Ciliwung-Cisadane
Sumber: Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015

Terdapat 13 sungai lintas provinsi yang mengalir di wilayah Jakarta. Sungai-sungai ini membawa air dari daerah hulu ke daerah hilir di Teluk Jakarta. Ketiga belas sungai tersebut yaitu Ciliwung, Kalibaru Barat, Kalibaru Timur, Krukut, Cipinang, Sunter, Grogol, Pesanggrahan, Angke, Mookervart, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain ketiga belas sungai ini terdapat banyak anak-anak sungai yang lebih kecil dan beberapa kanal buatan yang mengalir dalam wilayah daratan Jakarta. Informasi mengenai 13 sungai besar dan beberapa saluran makro lainnya dapat dilihat dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6. Tiga Belas Sungai Lintas Provinsi Dan Beberapa Saluran Makro Yang Berada Di Wilayah DKI Jakarta

No.	Sungai/Kanal	Panjang (km)	Luas permukaan (ha)	Kedalaman (m)	Debit aliran (m ³ /set)	Peruntukan Sungai*
1	Ciliwung	46,2	115,5	2,4	28 - 62	Usaha Perkotaan
2	Kali Grogol	23,6	16,5	-	-	Perikanan
3	Sunter	37,25	108	-	-	Usaha Perkotaan
4	Krukut	28,75	17,25	1,1	4,6 - 14	Air Baku Air Minum
5	Cakung	20,7	41,4	1,1	4,6 - 14	Usaha Perkotaan
6	Kalibaru Timur	39,2	39,3	0,85	2,3 - 3,7	Usaha Perkotaan
7	Kalibaru Barat	17,7	17,7	0,45	0,02 - 2,2	Air Baku Air Minum
8	Kali Angke	12,81	53,8	2,2	7,4 - 27	Usaha Perkotaan
9	Kali Pesanggrahan	27,3	25,5	2,6	10 - 22	Perikanan
10	Cipinang	27,35	46,5	1,4	3,3 - 3,5	Usaha Perkotaan
11	Buaran	7,9	15,8	1,3	0,4 - 5,9	Usaha Perkotaan
12	Mookervart	7,3	23,4	2,34	1,3 - 2,5	Air Baku Air Minum
13	Jati Kramat	3,8	1,9	-	-	Usaha Perkotaan
14	Banjir Kanal Barat	12,85	77,1	-	-	Usaha Perkotaan
15	Banjir Kanal Timur	23	138	-	-	Perikanan
16	Cengkareng Drain	7,6	38	-	-	Usaha Perkotaan
17	Cakung Drain	11,2	67,2	-	-	Usaha Perkotaan
18	Kali Cideng	17,8	28,5	-	-	Usaha Perkotaan
19	Ancol	8,3	24,1	-	-	Usaha Perkotaan
20	Sekretaris	12,6	8,8	-	-	-

*Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 582 tahun 1995

Sumber: Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2030 (2011), BPS Jakarta Dalam Angka 2017, Dokumen IKPLHD DKI Jakarta 2016

Dari data sungai yang tersedia nampak bahwa sungai-sungai besar di Jakarta termasuk dangkal dengan kedalaman rata-rata tidak lebih dari 2,5 m. Penyebab pendangkalan utama adalah tingginya tingkat sedimentasi lumpur yang terbawa dari daerah hulu. Selain itu, sampah dan air limbah yang dibuang secara sembarangan ke dalam badan sungai juga merupakan salah satu faktor yang memperparah pendangkalan. Akibatnya, kapasitas tampung dan kapasitas aliran sungai menurun.

Dalam kondisi hujan lebat, kapasitas sungai dan kanal yang ada untuk mengalirkan air ke laut dapat terlampaui sehingga limpasan air hujan tidak cukup cepat dapat dialirkan dan sungai pun meluap. Selain sungai, Jakarta juga memiliki wadah parkir air (*retention basin*) untuk menampung limpasan air hujan dan mengurangi beban kanal dan sungai secara sementara berupa waduk, situ maupun embung, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7. Selain 58 wadah parkir air permanen ini, terdapat sekitar 23 lokasi rencana pengembangan waduk baru.



Tabel 3.7 Wadah Parkir Air Eksisting Dan Luasnya

No	Nama Waduk/Situ/Parkir Air	Luas (ha)	No	Nama Waduk/Situ/Parkir Air	Luas (ha)
Jakarta Selatan			Jakarta Utara		
1	Babakan	32	1	Cendong	
2	Bonbin Ragunan	10	2	Don Bosco	2
3	Mangga Bolong	13	3	Kemayoran	11,3
4	Pancoran / MBAU	2	4	Muara Angke	0,5
5	Pertanian	3,7	5	Pegangsaan Dua	2,1
6	Ragunan 1	11	6	Pluit	80
7	Ragunan 2	4,5	7	Rawa Kendal	27,5
8	Setiabudi Barat	4	8	Sunter Selatan	4,3
9	Setiabudi Timur	4	9	Sunter Timur 3	13
10	Sigura-gura	1	10	Sunter Timur 1 A	7
11	TMP Kalibata	0,5	11	Sunter Timur 1 B	8
12	UI	7	12	Sunter Utara	32
13	Walikota Jakarta Selatan		13	Teluk Gong	2,1
Jakarta Timur			Jakarta Pusat		
1	Aneka Elok	3,8	1	Lembang	1
2	Ceger Bambu Apus	2,1	2	Melati	3,5
3	Ceger TMII		3	Taman Ria Senayan	6
4	Cibubur Baru	8	Jakarta Barat		
5	Cilangkap 1 (Agrowisata)	4,7	1	Cengkareng	2
6	Cilangkap 2 (Kebun Bibit)	6,4	2	Grogol	2,4
7	Cimanggis	4,7	3	Hankam	1
8	Halim I	7	4	Jelambar	1,5
9	Halim II	12	5	Kalideres	2
10	Munjul	5	6	KFT	2
11	Pacuan Kuda Pulo Mas	3,1	7	Rawa Kepa	0,5
12	Rawa Badung	4,8	8	Tomang	6
13	Rawa Dongkal	12	9	Wijaya kusuma	2,5
14	Rawa Gelam	3			
15	Rawa Kelapa Dua Wetan	4,5			
16	Rawa Penggilingan				
17	Rawa TMII	3			
18	Ria Rio	9			
19	Sunter Hulu	11			
20	Taman Modern	3,1			

Sumber: Naskah Akademis RTRW DKI 2030 (2011), Materi Teknis RDTR-PZ DKI Jakarta 2014, BPS 2017

Pola Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan

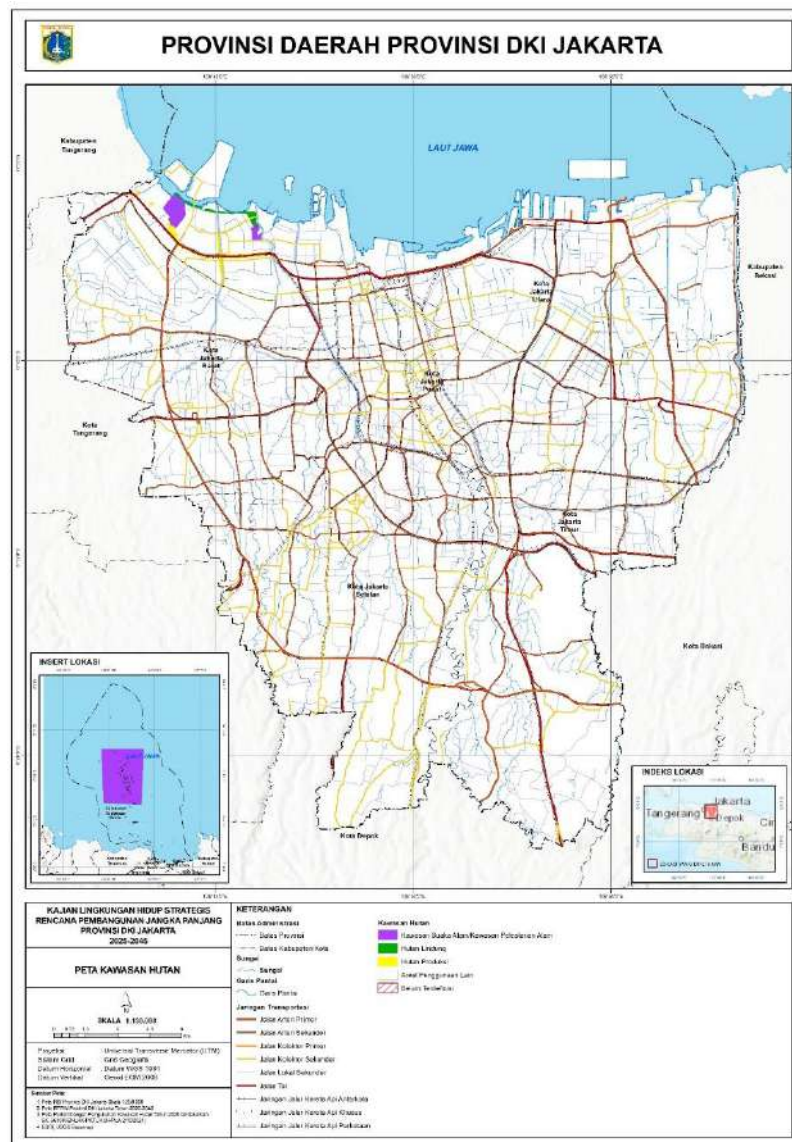
Kawasan Hutan

Melihat status dan kondisi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota metropolitan sudah dapat dilihat bahwa status kawasan, didominasi oleh Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 65.310.57 Ha. Namun luasan tersebut merupakan luas pada wilayah daratan, sedangkan DKI Jakarta juga memiliki wilayah kepulauan dan juga wilayah laut, yang sebagian besar wilayah laut dan kepulauannya memiliki status sebagai kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan luasan 104.080.96 yang menjadi luasan paling luas dalam status kawasan hutan Provinsi DKI Jakarta.

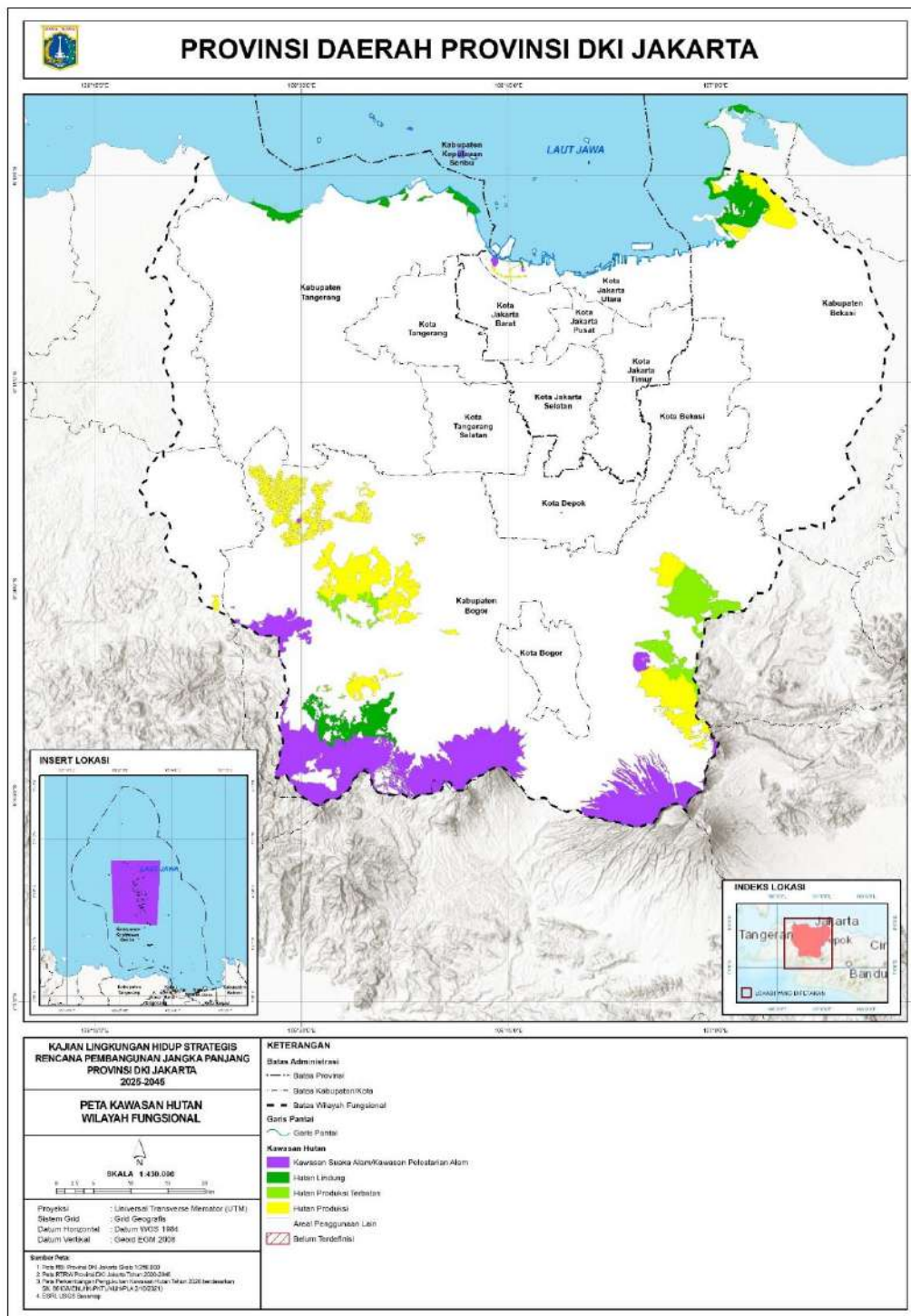
Selain itu untuk kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta, adalah Cagar Alam Pulau Bokor dengan luas 19.26 Ha, Suaka Margasatwa Muara Angke dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut dengan luasan 188.09 Ha dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan luasan 102.06 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan lain di DKI Jakarta ada hutan lindung dengan luas 51.12 Ha dan hutan produksi seluas 158.74 Ha. Secara spasial, distribusi kawasan hutan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Secara wilayah Fungsional, kondisinya juga didominasi oleh Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas dengan luas 550,862.17 Ha yang melingkupi wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi. Untuk Kawasan hutan pada wilayah fungsional terdiri dari Kawasan lindung seluas 7.964,95 Ha yang berada pada wilayah pesisir DKI Jakarta, pesisir Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Kawasan Hutan Produksi seluas 20.853,68 Ha di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 7.114,30 Ha di wilayah Kabupaten Bogor serta Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam seluas 29.177,18 Ha di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Kawasan hutan dan Kawasan konservasi tersebut dapat mendukung wilayah DKI Jakarta melalui kinerja jasa lingkungan untuk penyedia air dan pengaturan air. Untuk distribusi spasial Kawasan hutan yang berada pada wilayah fungsional dapat dilihat pada gambar 3.12 di bawah ini.



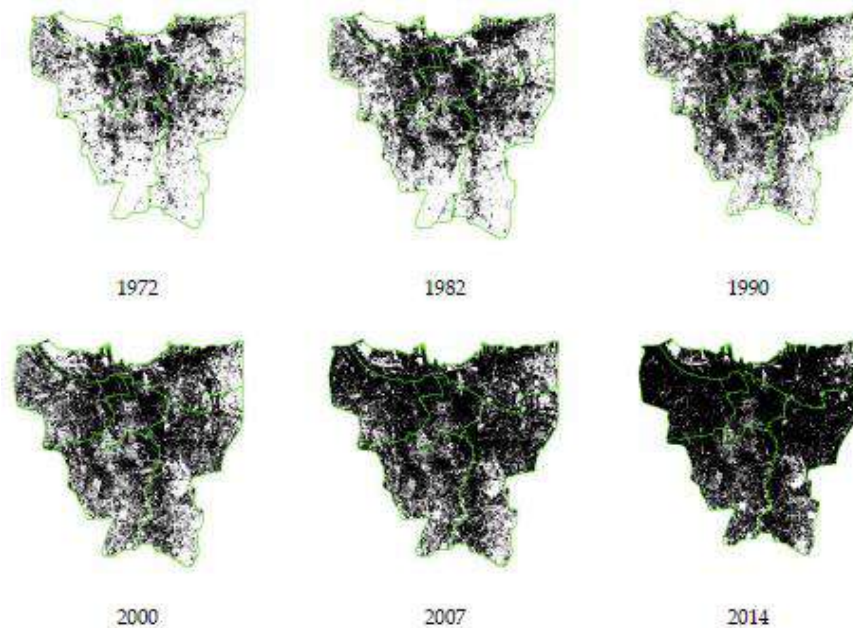
Gambar 3.12. Peta Kawasan Hutan Provinsi DKI Jakarta
Sumber: SK Menhut No. 220 Tahun 2000 dan SK MenLHK No.6610 Tahun 2021



Gambar 3.13. Peta Kawasan Hutan Wilayah Fungsional
Sumber: SK Menhut No. 220 Tahun 2000 dan SK MenLHK No.6610 Tahun 2021

Perubahan Penutupan lahan

Pesatnya perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai dengan semakin luasnya lahan terbangun. Kecenderungan tersebut mengindikasikan ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pola perubahan penggunaan lahan dilustrasikan sejak tahun 1972 hingga 2014.



Gambar 3.14. Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014

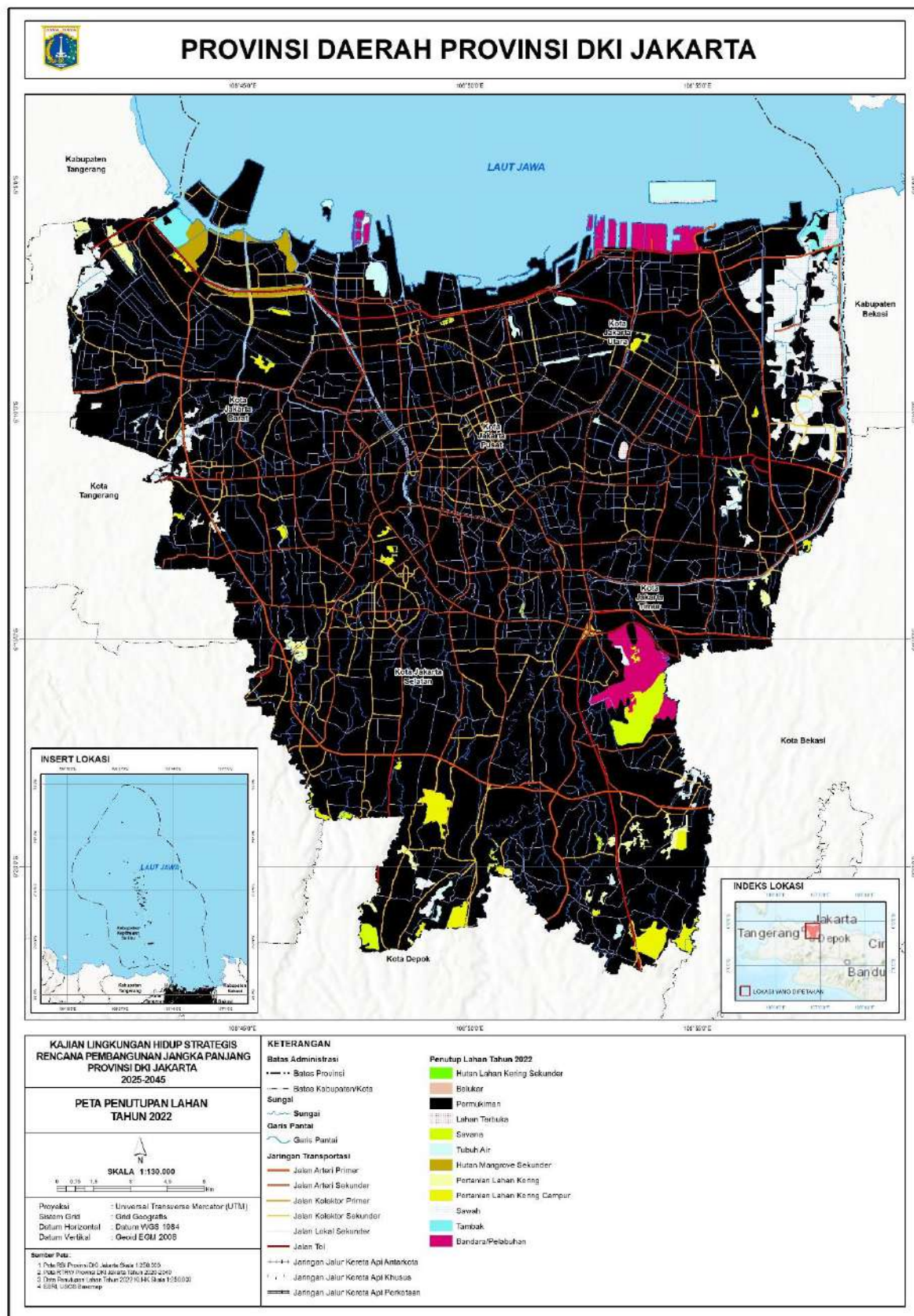
Ilustrasi pada gambar di atas, menunjukkan perluasan perkotaan (ditandai dengan warna hitam) yang cenderung semakin masif dan padat, lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Sebagai Daerah Khusus Ibukota, Jakarta memposisikan wilayahnya sebagai provinsi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Saat ini, populasi Jakarta telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta, dari hanya sekitar 3 juta pada awal 1960-an. Seiring dengan pertumbuhan ini, DKI Jakarta telah mengalami ekspansi ruang yang luas.

Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2022, pemanfaatan lahan DKI Jakarta didominasi oleh penutupan permukiman sebesar 89,27% (59.182.09Ha). Lahan hunian termasuk *guest house*, paviliun, rumah, panti dan asrama. Terlihat dari peta penutupan lahan tahun 2020, menunjukkan seluruh wilayah DKI Jakarta dipenuhi dengan warna merah hitam yang merepresentasikan peruntukan permukiman semakin padat dan luas. Penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, memanfaatkan 565 km² dari 674 km² ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83%.

Tabel 3.8 Kondisi Penutupan Lahan DKI Jakarta Tahun 2022

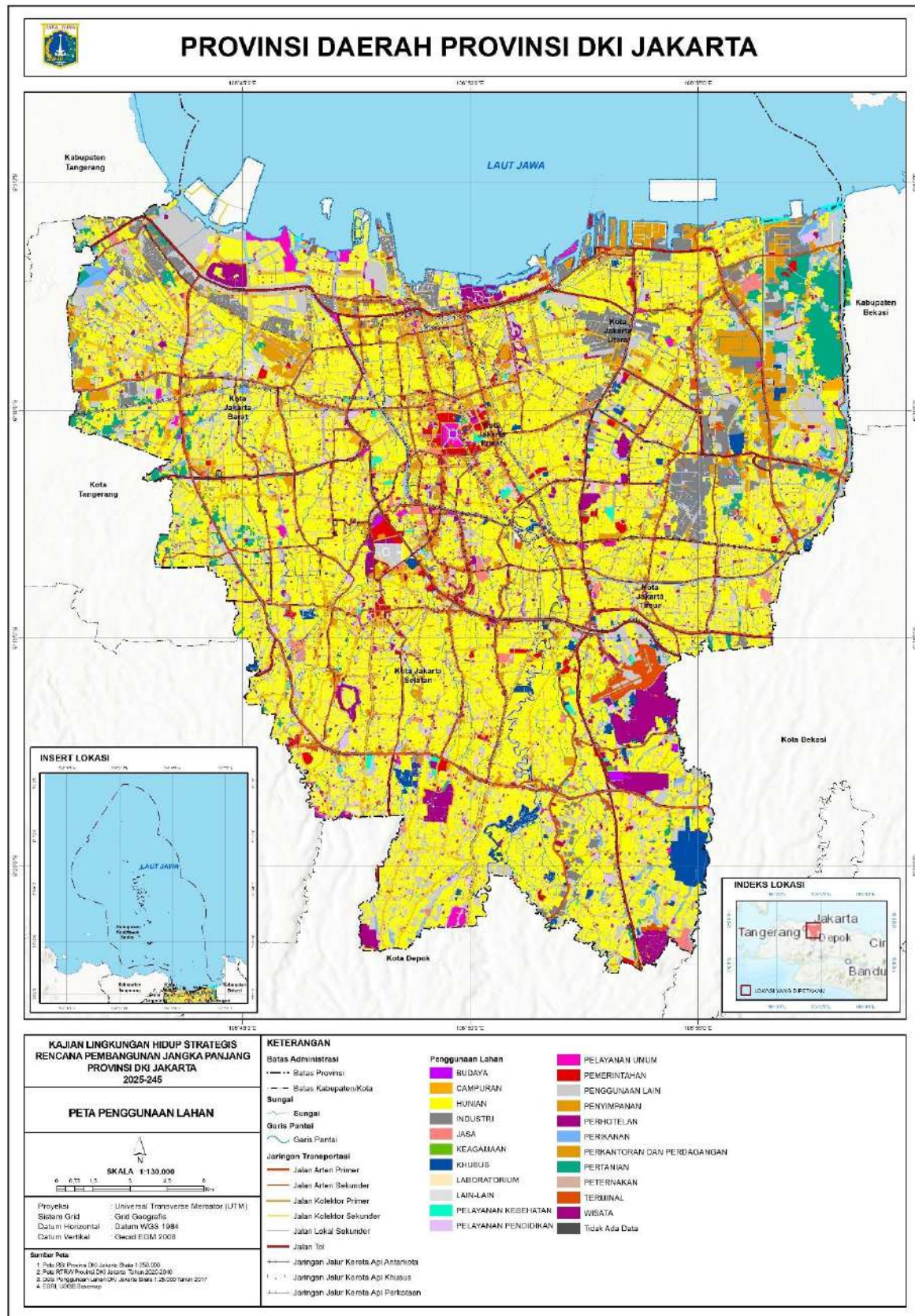
Penutupan Lahan	Luas (Ha)
Hutan Lahan Kering Sekunder	588.22
Hutan Mangrove Sekunder	544.88
Belukar	20.09
Savanna	351.83
Pertanian Lahan Kering	494.12
Pertanian Lahan Kering Campur	875.35
Sawah	2,328.80
Permukiman	188,135.92
Bandara/Pelabuhan	1,007.40
Lahan Terbuka	122.97
Tambak	299.80
Tubuh Air	568.02

Sumber: Data Penutupan Lahan KLHK Tahun 2022



Gambar 3.15. Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber: KLHK, 2022



Gambar 3.16. Peta Penggunaan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian, hampir dapat dipastikan bahwa DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan air. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (hulu-hilir) dilakukan dengan upaya kebijakan kerja sama antar daerah dan upaya rekayasa teknologi.

3.1.2.1 Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat

Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2022 sebanyak 502.040 ribu orang. Kota administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 133.73 ribu orang sedangkan Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu sebanyak 3,67 ribu orang. Namun demikian, Kepulauan Seribu dengan persentase penduduk miskin terbesar di Jakarta. Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta pada September tahun 2022 masing-masing sebesar 0,77 persen dan 0,19 persen.

Tabel 3.9. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Kep Seribu	3.67	14.11
Jakarta Selatan	81.11	3.52
Jakarta Timur	126.63	4.3
Jakarta Pusat	44.72	4.9
Jakarta Barat	112.18	4.22
Jakarta Utara	133.73	7.24
Provinsi DKI Jakarta	502.04	4.69

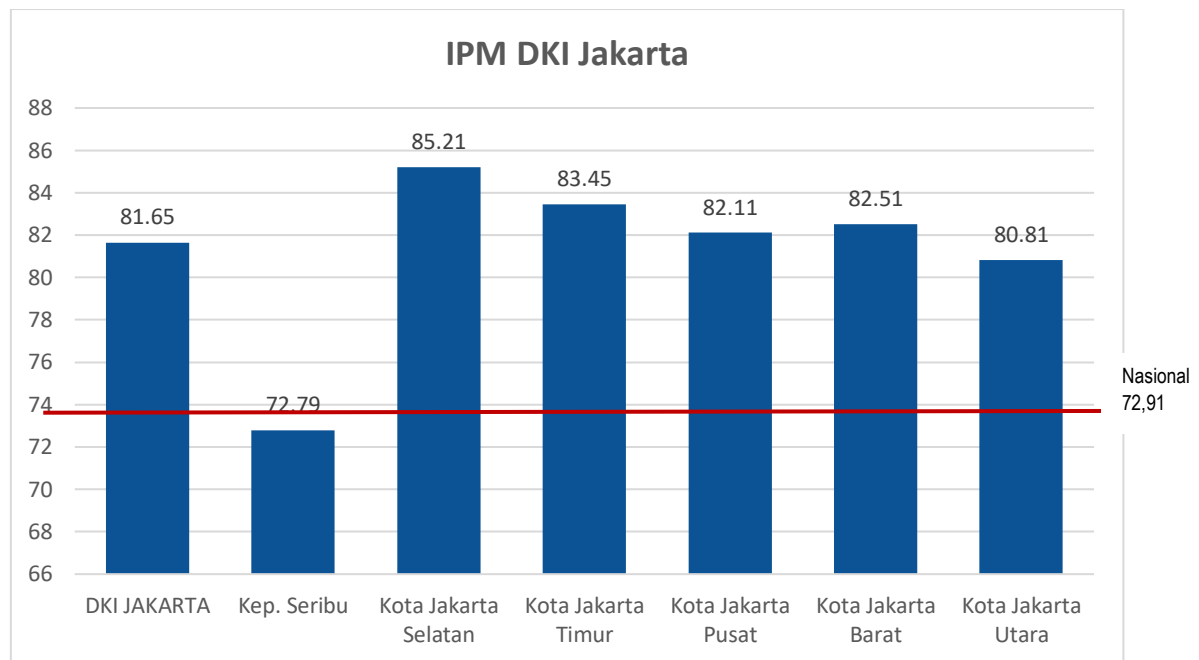


Gambar 3.17. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPS, 2021

Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 81,65 persen. DKI Jakarta masih menempati peringkat IPM tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Berikut ini disajikan IPM masing-masing Kabupaten dan kota Administratif.



Gambar 3.18. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2022
Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini DKI Jakarta berada di level 0,412 pada September 2022. Rasio gini mendekati 0 mengindikasikan semakin terjadinya pemerataan pengeluaran. Sebaliknya jika mendekati 1, maka ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah semakin besar. Rasio gini di ibu kota naik 0,01 poin dari posisi September 2021 yang masih sebesar 0,41. Nilainya juga lebih tinggi dari posisi September 2020 yang sebesar 0,40. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau Desember 2019, rasio gini di Jakarta tercatat sebesar 0,391. Turunnya daya beli serta rendahnya produktivitas di beberapa sektor seiring pemberlakuan pembatasan sosial berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat.

3.1.2.2 Karakteristik Sosial Budaya

Demografi

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.609.681 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebanyak 5.375.869 jiwa atau 50,6% dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.304.082 jiwa atau 49,4%. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki *sex ratio* sebesar 101,53 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

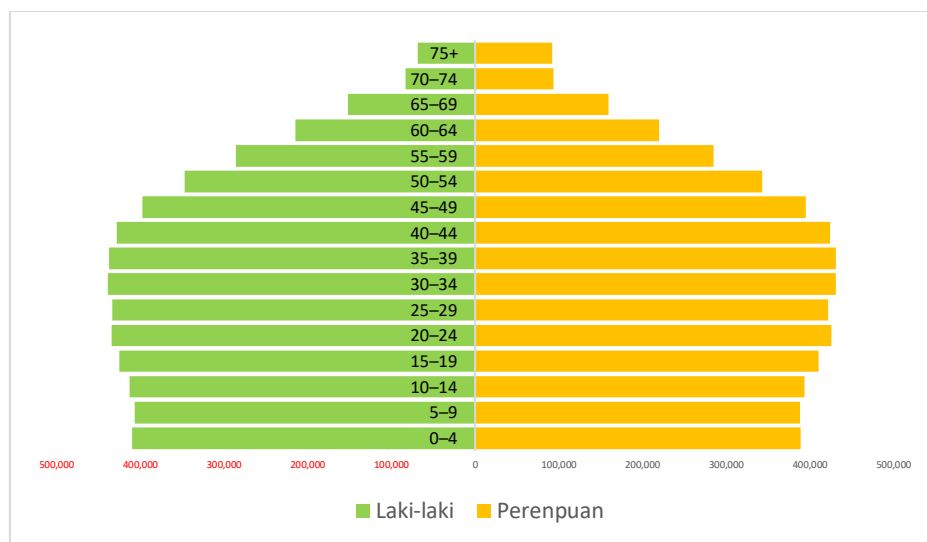
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022

No	Uraian	Tahun							
		2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki	4.870.938	5.159.683	5.202.815	5.244.690	5.285.321	5.334.781	5.349.641	5.375.869
2	Perempuan	4.736.849	5.117.945	5.171.420	5.222.939	5.272.489	5.227.307	5.260.040	5.304.082
3	Jumlah	9.607.787	10.277.628	10.374.235	10.467.629	10.557.810	10.562.088	10.679.951	10.609.681
4	Pertumbuhan	1,42%	1,07%	1,05%	1,07%	1,19%	0,92%	0,57%	0,66%
5	Densitas (ribu jiwa/km ²)	13,157	15,517	15,663	15,804	15,900	15,907	15,978	16,084
6	Sex Ratio	102,83	100,8	100,61	100,	100,24	102,06	101,53	101,3425

Sumber: BPS, 2023

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Nasional (1,17%). Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 16,084 ribu jiwa/km² di tahun 2022.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Pada tahun 2022, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.667.556 jiwa atau sebesar 72% dari total penduduk. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 40,17% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 40,1 penduduk usia tidak. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar berikut.

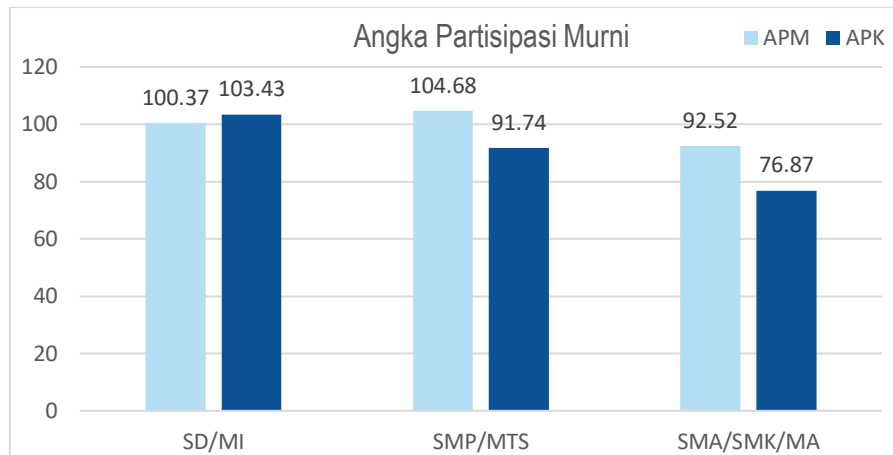


Gambar 3.19 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber: BPS DKI Jakarta

Tingkat Pendidikan dan Kesehatan

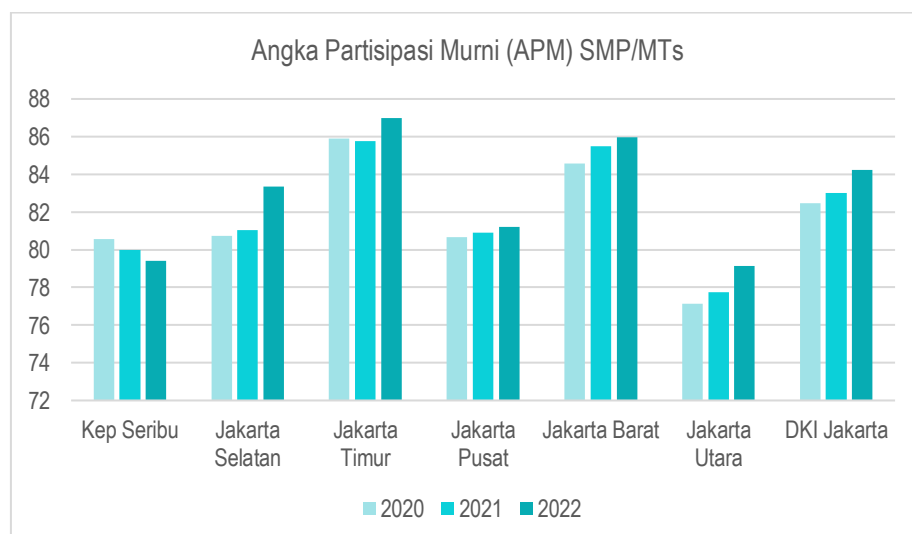
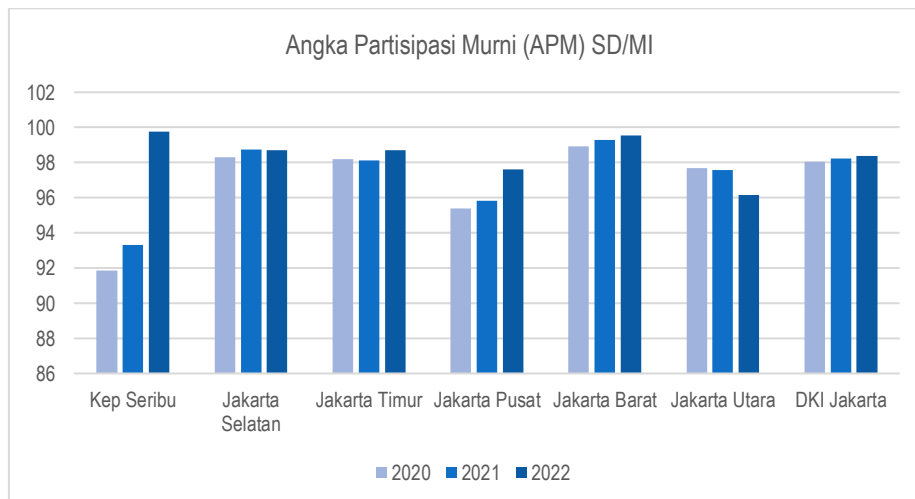
Pada tahun 2020, jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan tingkat pendidikannya dijelaskan pada Gambar 3.20 di bawah ini.

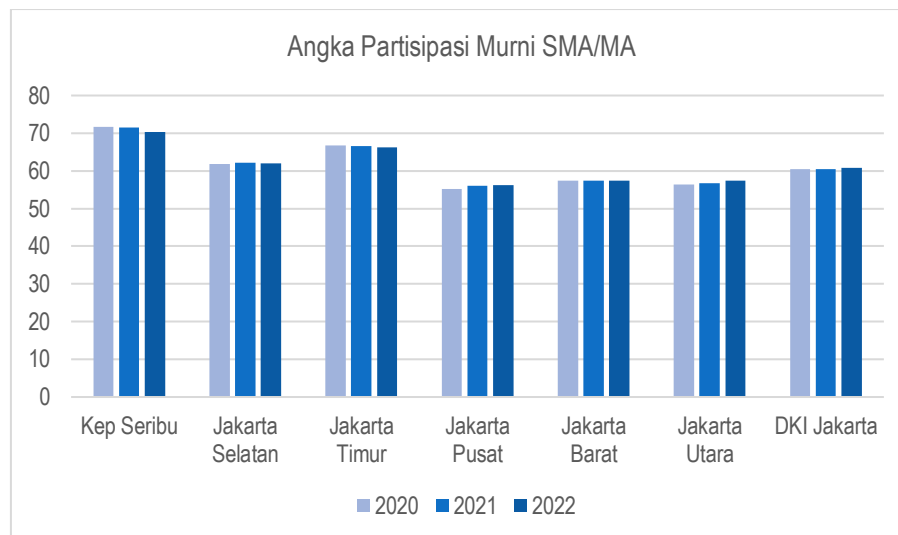


Gambar 3.20. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2020

Sumber: BPS, 2021

Secara lebih rinci perkembangan APM tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk masing-masing tingkat pendidikan di masing-masing kota/ kabupaten di DKI Jakarta adalah sebagai berikut.





Gambar 3.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi DKI Jakarta
Sumber: BPS, 2021

3.2 Kondisi Lingkungan Hidup

Ekoregion Darat

Mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, Pada wilayah fungsional terdapat 35 kelas ekoregion, dengan 19 kelas bentang lahan. Pada wilayah fungsional terdapat ekoregion dataran fluvio vulkanik yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Dengan memiliki ekoregion tersebut secara fungsi alami, wilayah fungsional DKI Jakarta memiliki kemampuan yang tinggi terhadap pengaturan air dari hulu hingga ke hilir. Namun, saat ini dengan berkembangnya jumlah penduduk dan perkotaan terutama wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, menyebabkan bentang lahan tersebut dialih fungsikan untuk pemanfaatan lahan terbangun yang berdampak pada pengurangan kinerja jasa lingkungan hidup. Selain ekoregion dataran fluvio vulkanik, ada 24 kelas ekoregion lain yang terdapat di wilayah fungsional. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.11 dan Gambar 3.22

Tabel 3.11. Ekoregion di DKI Jakarta

Bentang Lahan	Ekoregion
Dataran fluvial bermaterial aluvium	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai malar hijau
	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove
	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove monsoon
	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa monsoon
	Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat
Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi mangrove
	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau
	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau

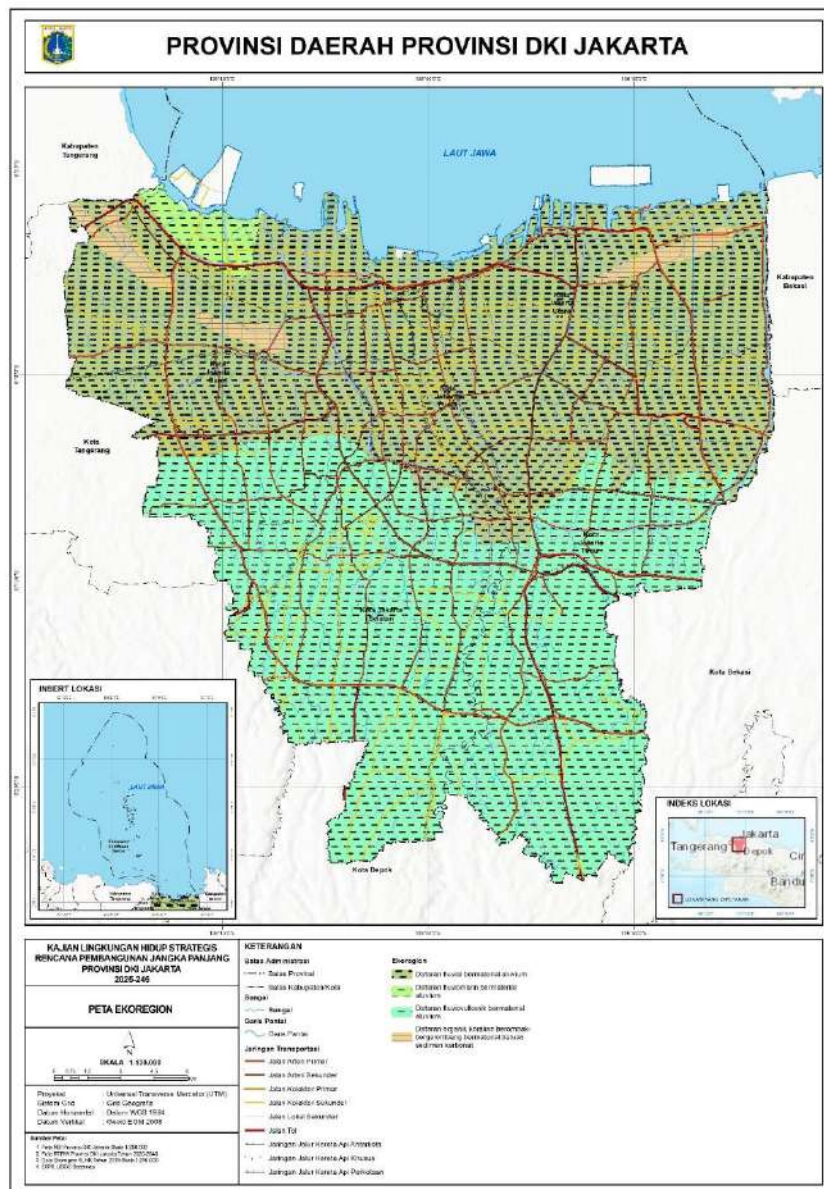


Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi terna rawa air tawar
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas
Lembah sungai bermaterial aluvium	Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan batugamping pamah
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan subalpin
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan subalpin
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi terna rawa air tawar
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021



- Dataran Fluvio - marin:** dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai). Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial.
- Dataran Fluvio - vulkanik:** dataran yang berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung.
- Dataran Fluvial:** dataran yang terbentuk dari hasil proses aliran sungai. Secara genetika material penyusun umumnya berupa aluvium dengan komposisi pasir, debu dan lempung relatif seimbang dengan sumber sangat bergantung kepada kondisi geologi daerah hulu, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan sungai.
- Dataran Organik Koralian:** Dataran yang terbentuk melalui proses penguraian materi organik dan batuan karang yang bermaterial atuan sedimen karbonat



Gambar 3.23. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian penetapan ekoregion dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap II. Ekoregion darat didelineasi berdasarkan kesamaan dalam karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim serta batas administrasi (kecamatan). Dalam kajian terdapat 6 (enam) ekoregion dalam konteks pengelolaan air permukaan, ditampilkan dalam peta di bawah ini:

- Dataran Pasang Surut Berlumpur**, berada di sebagian Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing. Dataran pasang surut berlumpur merupakan bentuk lahan (*landform*) dataran yang terbentang sepanjang garis pantai. Terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang), yaitu penarikan dan penurunan permukaan air laut (efek gravitasi bulan-matahari), diiringi dengan aliran sungai (fluvial) yang bermuara ke laut. Secara umum, dataran ini tersusun atas endapan pematang pantai dan tuf banten (BPLHD, 2013).

Kondisi hidrologi pada dataran ini dikontrol oleh aliran sungai-sungai dengan debit aliran dan beban sedimen tinggi. Karakteristik litologinya berupa endapan aluvial laut; endapan aluvial estuarin baru; lunak. Material

penyusun pada wilayah ini adalah aluvial lempung, yang membentuk jenis tanah berupa bahan induk endapan liat dan endapan liat-pasir. Sementara, pada daerah yang tersusun atas endapan pematang pantai umumnya tanah dengan tekstur pasir halus-kasar dan kurang subur. Dilihat dari vegetasi alaminya, kawasan ini terdiri dari kawasan mangrove, nipah dan jenis bakau lainnya, pandanus, rumput-rumputan, kaktus, vegetasi air masin, vegetasi air masin pamah, vegetasi monsun air pamah.

- b. **Dataran Beting-Gisik dan Lembah Antar Gisik**, Dataran beting-gisik (*beachridges*) dan lembah antar beting-gisik (*swales*) merupakan bentuk lahan (*landform*) marin. Beting-gisik terlihat sebagai timbunan pasir berbentuk punggung (beting) yang memanjang sejajar garis pantai. Punggungan ini semula terbentuk di dasar laut dangkal tepi pantai sebagai hasil deposisi dari sedimen terangkut di dasar air laut oleh arus laut sepanjang pantai (*longshore current*) dan gelombang menuju ke pantai (*littoral drift*). Punggungan-punggungan ini terbentuk berulang dan berjajar dengan pola sejajar garis pantai. Pada saat air laut turun atau daratan terangkat, maka beting ini muncul ke permukaan membentuk beting-gisik. Cekungan memanjang di antara dua beting-gisik disebut *swale*. Material yang umum menyusun beting-gisik ini adalah pasir, sedangkan pada *swale* lebih bertekstur halus karena merupakan lokasi pengendapan lokal permukaan lahan di sekitarnya (BPLHD, 2014).

Karakteristik dasar dari hidrologi, jenis tanah, dan ekosistem alaminya serupa dengan Dataran Pasang Surut Berlumpur. Hanya saja kemiringan pada wilayah ini adalah 0-3% (secara umum) dan 3-8% (beberapa titik). Vegetasi di wilayah ini tidak memiliki ekosistem hutan mangrove. Pemanfaatan lahan yang mendominasi masih sebagai peruntukan permukiman dan usaha (industri, pergudangan, perikanan, perdagangan, perkantoran, jasa, pelayanan, dan perhotelan).

Mengingat karakteristik dasar yang serupa dengan Dataran Pasang Surut Berlumpur, maka secara umum peran wilayah dan identifikasi awal jasa lingkungan hidupnya pun sama (BPLHD, 2013). Pada referensi lain mengatakan karakteristik dataran beting – gisik relatif aman dari genangan/banjir, kelembaban tanah rendah, dan sesuai untuk kawasan permukiman dan kawasan budidaya lainnya. Sementara, dataran lembah antar beting – gisik memiliki kelembaban tanah tinggi, rentan terhadap terjadinya genangan, dan sesuai untuk pertanian sawah dan tambak (BPLHD, 2014).

- c. **Dataran Rawa**, banyak ditemukan di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Cakung, dan sedikit ditemukan di kecamatan lainnya. Dataran ini terbentuk dari hasil proses deposisi fluvial (seperti banjir) yang meninggalkan suatu dataran dengan cekungan-cekungan kecil yang tersebar secara acak. Material penyusunnya berupa aluvium lempungan, dengan komposisi lempung, laman, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah yang seimbang, terbentuk akibat aktivitas pengendapan aliran sungai.

Material aluvium pada dataran ini mampu membentuk akuifer yang potensial sehingga cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial. Dataran ini berpotensi membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Cekungan-cekungan ini sesuai dengan sifatnya mudah menampung air, sehingga di dataran ini wajar banyak terdapat rawa-rawa. Material aluvium akan berkembang menjadi tanah dengan solum sangat tebal didukung dengan ketersediaan air menjadikan tanah ini sangat subur.

Vegetasi pada dataran rawa ditumbuhi oleh jenis tanaman budidaya semusim (pertanian), vegetasi monsun rawa air tawar, vegetasi rawa air tawar pamah. Habitat yang cocok untuk wilayah ini merupakan jenis fauna katak, ikan air tawar dan burung.

- d. **Dataran Banjir**, terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai) berada dalam lembah sungai (*river valley*). Dataran ini selalu tergenang banjir jika terjadi perluasan air sungai (debit meningkat) terutama di musim hujan. Kondisi hidrologi pada wilayah ini mampu membentuk akuifer potensial didukung dengan morfologi datar menyebabkan cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial.

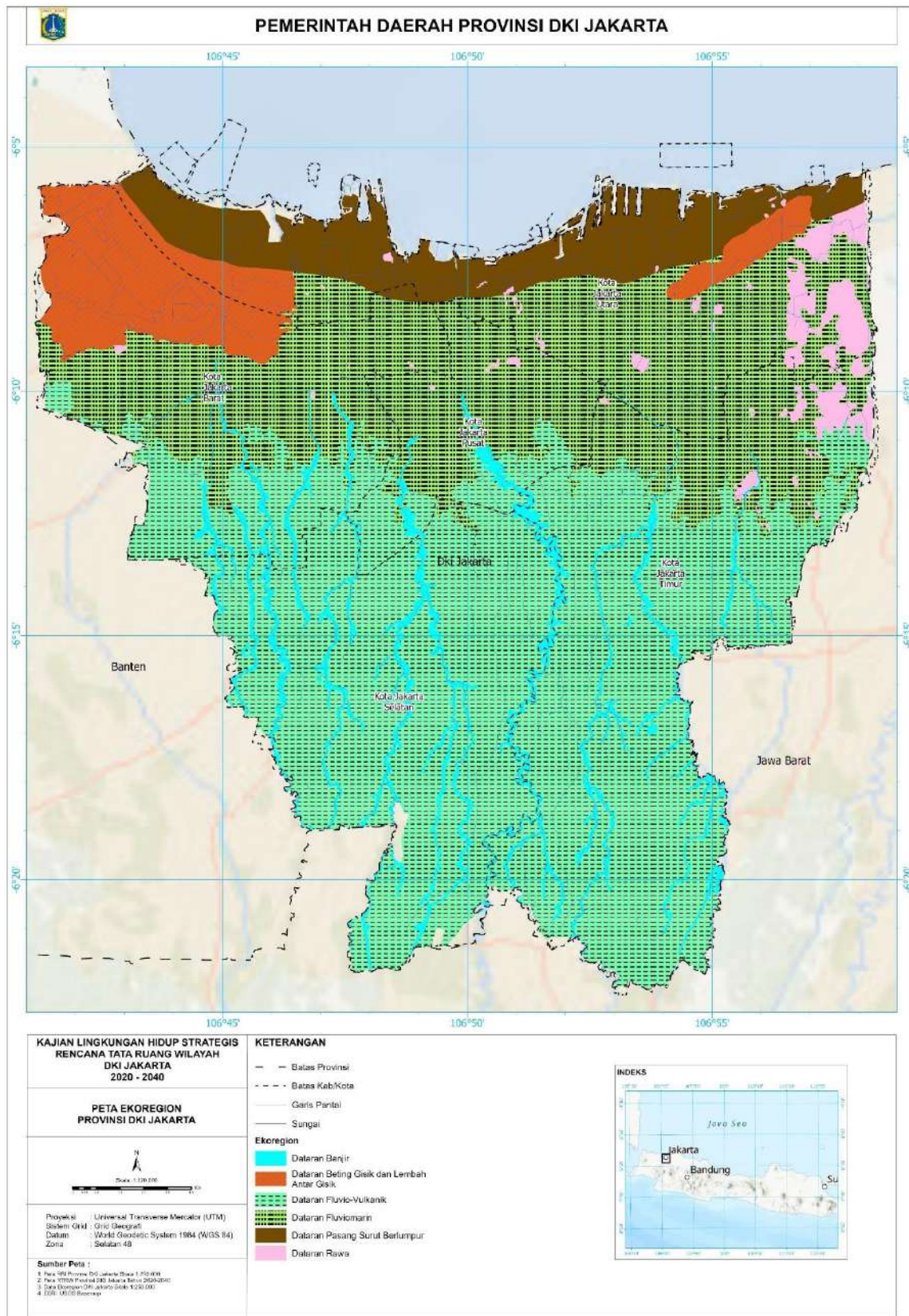
Dataran banjir tersusun dari material aluvium yang mudah mengalami pengikisan oleh aliran sungai. Aliran sungai cenderung mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar. Vegetasi yang tumbuh di area

ini berupa vegetasi monsun rawa air tawar dan vegetasi rawa air tawar pamah. Sifat tanah aluvium akan berkembang menjadi tanah dengan solum sangat tebal disertai ketersediaan air yang melimpah menjadikan tanah ini sangat subur, potensial untuk pertanian.

- e. **Dataran Fluvio-Marin**, terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin, seperti delta sungai atau dataran estuarin lain dimana terbentuknya dipengaruhi oleh dua jenis proses geomorfik, yaitu aliran sungai dan arus/gelombang laut. Lokasi dari bentuk lahan ini biasanya sedikit agak jauh dari garis pantai atau berada di belakang dataran pasang-surut berlumpur. Pengaruh proses marin pasang-surut masih dapat dirasakan, namun jika pertumbuhan garis pantai (akresi) relatif cepat, maka pengaruh pasang-surut semakin kecil.

Secara genetik, material penyusun pada dataran ini umumnya berupa aluvium lempungan, dengan komposisi lempung, laman, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah yang seimbang, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan aliran sungai. Memiliki karakteristik dasar yang sama dengan dataran rawa maupun dataran banjir. Maka, hasil identifikasi awal jasa lingkungan hidup di dataran ini pun sama dengan dataran rawa dan dataran banjir.

- f. **Dataran Fluvio-Vulkanik**, berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung.



Gambar 3.24. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2014

Tipe Vegetasi

Tipe vegetasi merupakan kondisi respon dari hasil komponen-komponen abiotik dan biotik suatu ekosistem. Tipe vegetasi sangat erat hubungannya dengan ekoregion, karena kedua kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi kinerja jasa lingkungan di DKI Jakarta. Dalam proses analisis penentuan kinerja jasa lingkungan, tipe vegetasi akan memiliki bobot skoring sesuai dengan fungsi dari masing-masing tipe vegetasi. Proses skoring dilakukan melalui *expert judgement* sebelum hasil skoring digunakan untuk menentukan kinerja jasa lingkungan. Setiap tipe vegetasi yang memiliki nilai tinggi, maka akan berkontribusi besar terhadap kinerja jasa lingkungan.

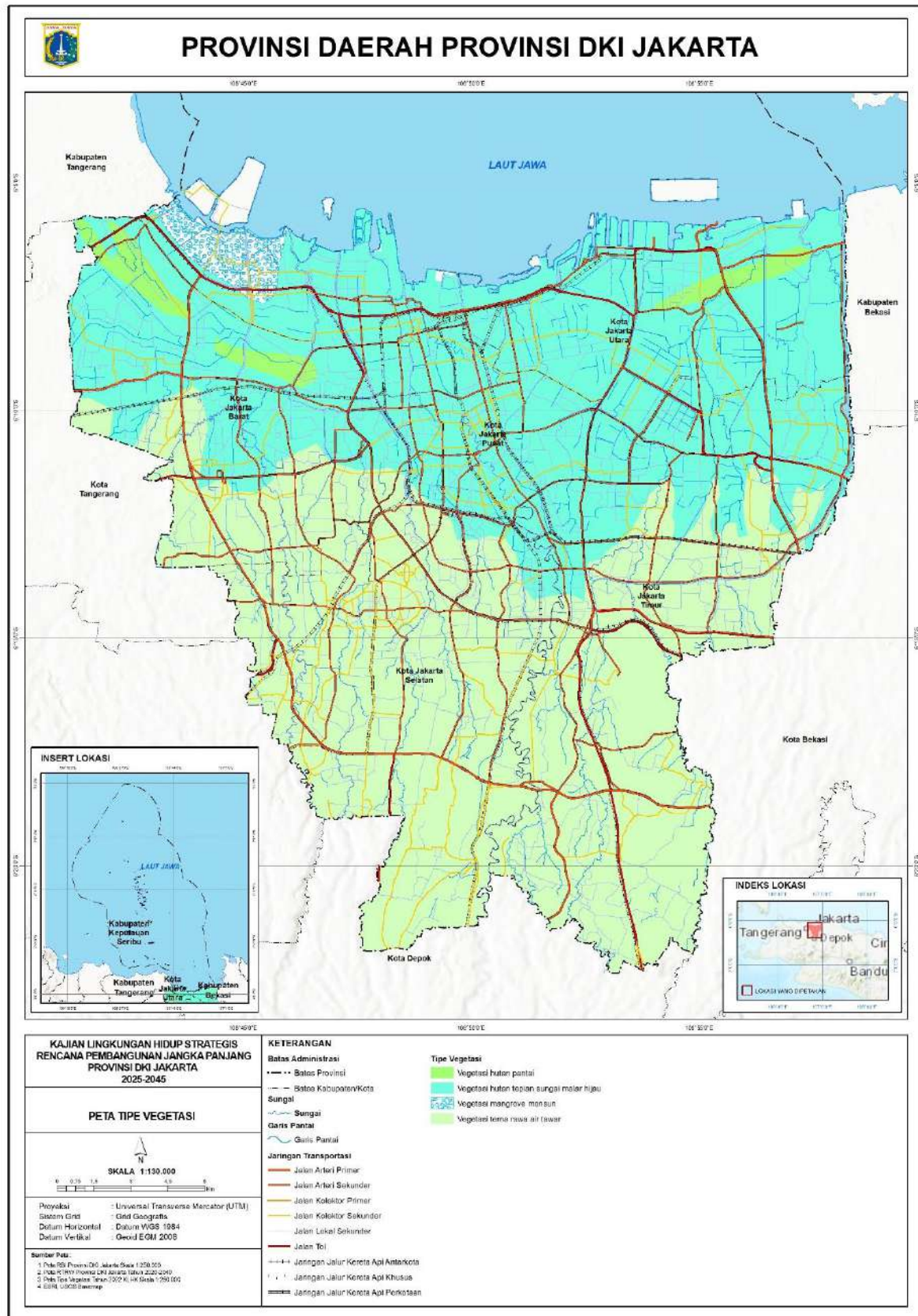
Merujuk pada data KLH tahun 2021, wilayah DKI Jakarta memiliki 4 tipe vegetasi yaitu, vegetasi hutan pantai pada wilayah Jakarta Utara dan Barat, vegetasi mangrove monsun di pesisir utara Jakarta, vegetasi hutan tepian sungai malar hijau di wilayah utara sampai dengan Jakarta Pusat serta vegetasi terna rawa air tawar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Data tipe vegetasi ini menunjukkan bahwa dominasi vegetasi berada pada tipe vegetasi terna rawa air tawar dengan luas 31,796.96 Ha dan vegetasi hutan terna sungai malar hijau dengan luasan 30,045.81 Ha.

Tabel 3.12. Tipe Vegetasi di DKI Jakarta

Bentang Alam	Tipe Vegetasi	Luas (Ha)
Dataran fluvial bermaterial aluvium	Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	30,045.82
	Vegetasi terna rawa air tawar	2,169.10
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	Vegetasi hutan pantai	1,369.99
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	Vegetasi mangrove monsun	974.27
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Vegetasi terna rawa air tawar	29,627.87
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	Vegetasi hutan pantai	23.23

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

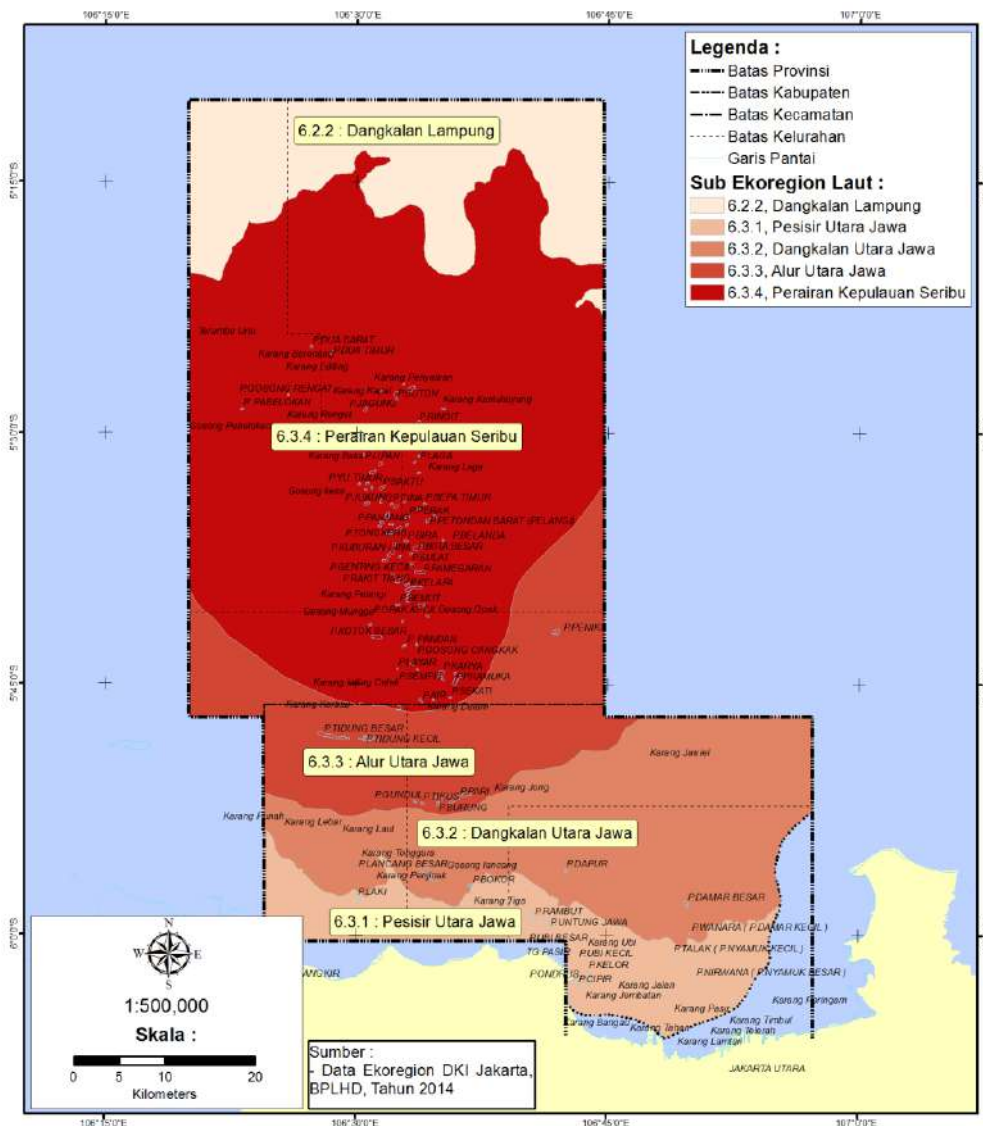
Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dataran fluvial bermaterial aluvium yang memiliki tipe vegetasi hutan tepian sungai malar hijau dan terna rawa air tawar mendominasi wilayah DKI Jakarta. Secara fungsi dataran fluvial adalah dataran yang memiliki fungsi menyerap air dengan sangat baik dan mampu mengalirkan air secara maksimal, sehingga jika melihat bagaimana tipe vegetasi pada bentang alam tersebut maka tipe vegetasi hutan tepian sungai malar hijau dan terna rawa air tawar sudah sesuai dengan fungsi alami bentang alam. Kemudian jika melihat pada fungsi dataran fluviomarin bermaterial aluvium yang berada di wilayah pesisir DKI Jakarta, juga sudah sesuai dengan keberadaan tipe vegetasi mangrove monsun pada bentang alam tersebut. Secara detail sebaran tipe vegetasi di DKI Jakarta dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 3.25. Tipe Vegetasi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

Ekoregion Laut

Berdasarkan data Ekoregion Jakarta (BPLHD, 2014), kawasan ekoregion laut DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 5, yaitu: Ekoregion Pesisir Utara Jawa, Ekoregion Dangkaln Utara Jawa, Ekoregion Alur Utara Jawa, Ekoregion Perairan Kepulauan Seribu, dan Ekoregion Dangkaln Lampung. Karakteristik masing-masing sub ekoregion tersebut diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.26 Ekoregion Laut DKI Jakarta
Sumber: BPLHD 2014

- Ekoregion Pesisir Utara Jawa**, meliputi perairan Teluk Jakarta yang mencakup Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelor, Pulau Onrus, Pulau Kayangan dan Pulau Laki. Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 – 18 m. Morfologi pantai di sepanjang Teluk Jakarta sangat beragam. Ongkosongo (1981) membagi pantai Jakarta yang terbentuk secara alami ke dalam tiga jenis pantai yakni pantai landai (kemiringan lereng 0° - 5°), pantai miring (kemiringan lereng 5° - 15°) dan pantai terjal (kemiringan lereng 15° – 90°).

Pantai landai terbentuk pada lingkungan pantai yang ditumbuhi vegetasi mangrove. Akar tumbuhan bakau dapat berfungsi menjerat material sedimen dan membentuk rata-rata lumpur. Pantai demikian dapat ditemukan di daerah Kamal dan Angke. Pantai miring dijumpai pada daerah pantai yang tersusun oleh material pasir

dengan energi gelombang yang cukup besar. Jenis pantai demikian dapat dijumpai di sepanjang pantai Marunda - Segara Makmur. Pantai terjal terjadi pada wilayah pantai yang sekarang mengalami erosi. Lereng-lereng terjal sebenarnya merupakan bekas erosi terutama pada dataran pantai yang tersusun oleh material lempung membentuk gerongan. Jenis pantai demikian dijumpai di sepanjang pantai Cilincing hingga Marunda.

2. **Ekoregion Dangkan Utara Jawa**, merupakan peralihan antara perairan pesisir utara Jawa yang dangkal dan keruh di bagian selatan dan perairan dalam alur laut utara Jawa. Berdasarkan Peta Sedimen Permukaan Dasar Laut wilayah ekoregion ini mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (63,14%) dan pasir dan lanau (36,86%) dengan kedalaman laut berkisar antara 5 – 45 m.

Ekoregion ini meliputi perairan Laut Jawa termasuk di dalamnya perairan sekitar Pulau Damar Besar, Pulau Damar Kecil, Pulau Bokor, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. Ekoregion ini terletak tepat di sebelah utara dari ekoregion Pesisir Utara Jawa hingga degradasi lingkungan serta akibatnya pun sedikit lebih kecil, meskipun masalah utamanya masih hampir sama. Beberapa pulau yang terletak di ekoregion ini tidak berpenghuni, karena berfungsi sebagai cagar alam (Pulau Bokor) atau hanya dihuni oleh petugas mercu suar (Pulau Damar Besar) hingga pengaruh kegiatan manusia pun lebih kecil. Meskipun demikian, beberapa pulau kecil di ekoregion ini dilaporkan telah lenyap atau mengalami perubahan geomorfologi yang parah.

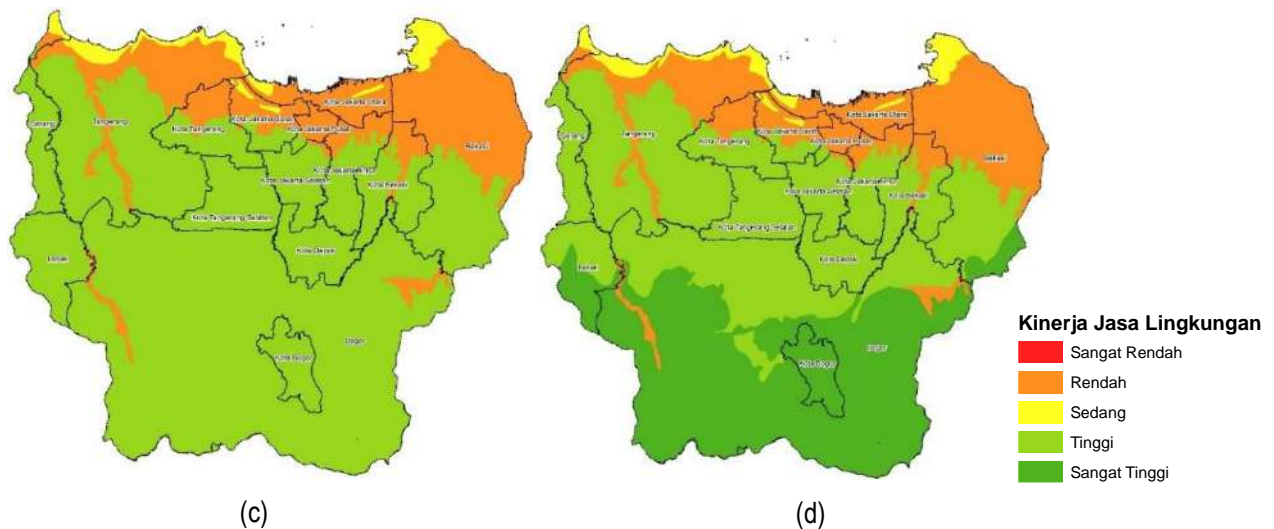
3. **Ekoregion Alur Utara Jawa**, terletak di sebelah Utara dari ekoregion Dangkan Utara Jawa. Ekoregion ini meliputi tiga pulau besar yaitu Pulau Tidung, Pulau Payung dan gugus Pulau Pari yang didelineasi berdasarkan parameter batimetri. Perairan ekoregion ini merupakan perairan dalam, berkisar antara 30 – 90 m, dan dapat dikatakan sebagai “pemisah” antara perairan pesisir Laut Jawa dengan perairan Teluk Jakarta. Ekoregion ini terletak lebih jauh ke utara dari metropolitan Jakarta, dan karenanya pula dampaknya terhadap ekoregion laut ini lebih kecil. Adanya alur laut dalam di sisi menyebabkan pengaruh daratan Jakarta hampir tidak dirasakan di ekoregion ini. Sebagai contoh, kondisi terumbu karang di wilayah ekoregion ini tidak mendapat pengaruh sedimentasi dari daratan Jakarta, dibandingkan dengan pulau Lancang (Ekoregion Dangkan Utara Jawa) dan pulau Onrust (Ekoregion Pesisir Utara Jawa) yang telah mengalami kerusakan. Pulau Tidung dan Pulau Payung, yang dipisahkan oleh perairan dalam dengan Gugus Pulau Pari, Pulau Kongsu, Pulau Tengah, dan Pulau Burung memiliki kesamaan dalam hal keragaman hayatinya.

4. **Ekoregion Perairan Kepulauan Seribu**, memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 - 40 m. Untuk kelerengan dasar laut ekoregion ini mempunyai kelerengan dasar laut berkisar antara 0,35° - 0,64° dan 0,64°-1,8°. Sebagian wilayah lain mempunyai kelerengan antara 0,06° - 0,17°, serta sebagian kecil wilayah mempunyai kelerengan antara 0° – 0,06°. Kelas lereng pada ekoregion ini sebagian berkelas datar-agak miring dan sebagian berkelas miring (Sulistyo dan Triyono, 2009). Berdasarkan Peta Sedimen Permukaan Dasar Laut wilayah ekoregion EL 6.3.3 ini mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (70,90%) dan pasir dan lanau (29,10%). Ekoregion ini memiliki pulau terbanyak yang masuk dalam zona Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) dan didelineasi berdasarkan parameter batimetri dan keanekaragaman hayati. Seperti halnya ekoregion laut lainnya, ketersediaan air tawar di pulau-pulau ini dan pencemaran antropogenik merupakan masalah tersendiri, terlebih dengan semakin pesatnya kegiatan pariwisata.

TNKS berada di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta namun pengelolaan TNKS berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kondisi ini berkontribusi timbulnya tantangan dan kendala dalam koordinasinya. Keterbatasan & kapasitas TNKS dalam melakukan kontrol wilayah mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pengawasan.

Wilayah TNKS ditetapkan melalui **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Perairan TNKS**. Pembagian zonasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan SK No 05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan TNKS (Taman Nasional Kep. Seribu, 2013).

- Ekoregion ini meliputi sebagian perairan Laut Jawa dan hanya mencakup satu pulau saja yaitu Pulau Sebir (8 ha) dengan jumlah penduduk sekitar 500 jiwa. Pulau ini merupakan bagian paling utara dari gugus Kepulauan Seribu. Pulau ini, telah berada di luar Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan bercirikan dengan adanya mercu suar yang vital untuk navigasi pelayaran. Pulau kecil dan sangat terpencil ini menyebabkan masalah lingkungan yang timbul di pulau ini juga minim. Kondisi terumbu karangnya masih dalam keadaan baik. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup



Gambar 3.27. Distribusi Spasial Jasa Lingkungan Penyedia Air (a), Pengaturan Air (b), Pengaturan Udara (c) dan Mitigasi Banjir (d) Wilayah Fungsional Tahun 2020

Sumber: Data Kinerja Jasa Lingkungan Tahun 2020

Sedangkan untuk jasa lingkungan pengaturan kualitas udara di wilayah fungsional DKI Jakarta, didominasi oleh kelas tinggi $\pm 75\%$ dari luasan total, yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup eksisting dapat membantu dalam pengaturan udara, namun dengan syarat tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merubah penutupan lahan yang ada di wilayah fungsional. Untuk jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir didominasi oleh kelas sangat tinggi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, sedangkan untuk wilayah Jakarta didominasi oleh kelas tinggi menuju rendah.

Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa wilayah Jakarta saat ini sangat bergantung pada wilayah hulu untuk memitigasi bencana banjir karena, melihat kondisi jasa lingkungan hidup di wilayah Jakarta mulai menuju ke angka rendah. Dari 4 jenis jasa lingkungan yang telah dipetakan, kinerja jasa lingkungan di wilayah fungsional dan sekitarnya dianalisis untuk mengetahui jasa lingkungan dominan di setiap wilayah sungai. Jasa lingkungan dominan dinilai dari perkalian antara luas satu unit spasial, yaitu luas wilayah sungai di wilayah fungsional dengan nilai indeks jasa lingkungan hidup. Dari hasil perkalian akan diperoleh satu nilai maksimum dari 4 jenis jasa lingkungan yang dihasilkan, dan nilai maksimum inilah yang menunjukkan jenis jasa lingkungan hidup yang dominan di setiap wilayah sungai.



Gambar 3.28. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Fungsional Tahun 2020

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat bahwa di Wilayah Sungai Cidanau Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane menunjukkan bahwa kinerja jasa lingkungan hidup yang paling dominan adalah jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir. Untuk wilayah WS Ciliwung-Cisadane memiliki nilai kinerja jasa lingkungan hidup terbesar dibandingkan dengan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, karena wilayah WS Cidanau-Ciujung-Cidurian pada wilayah fungsional, memiliki luasan yang lebih kecil dibandingkan WS Ciliwung-Cisadane. Dengan nilai kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir yang dominan di wilayah fungsional, maka diindikasikan bahwa dengan status kinerja jasa lingkungan hidup saat ini, dapat memitigasi bencana banjir melalui pengaturan air yang tersedia di wilayah fungsional, dengan syarat tidak ada gangguan atau perubahan terhadap kondisi penutupan lahan yang ada di wilayah fungsional agar tidak menurunkan kinerja jasa lingkungan hidup eksisting.

3.2.1.2 Kinerja dan Kecenderungan Jasa Lingkungan Hidup di DKI Jakarta

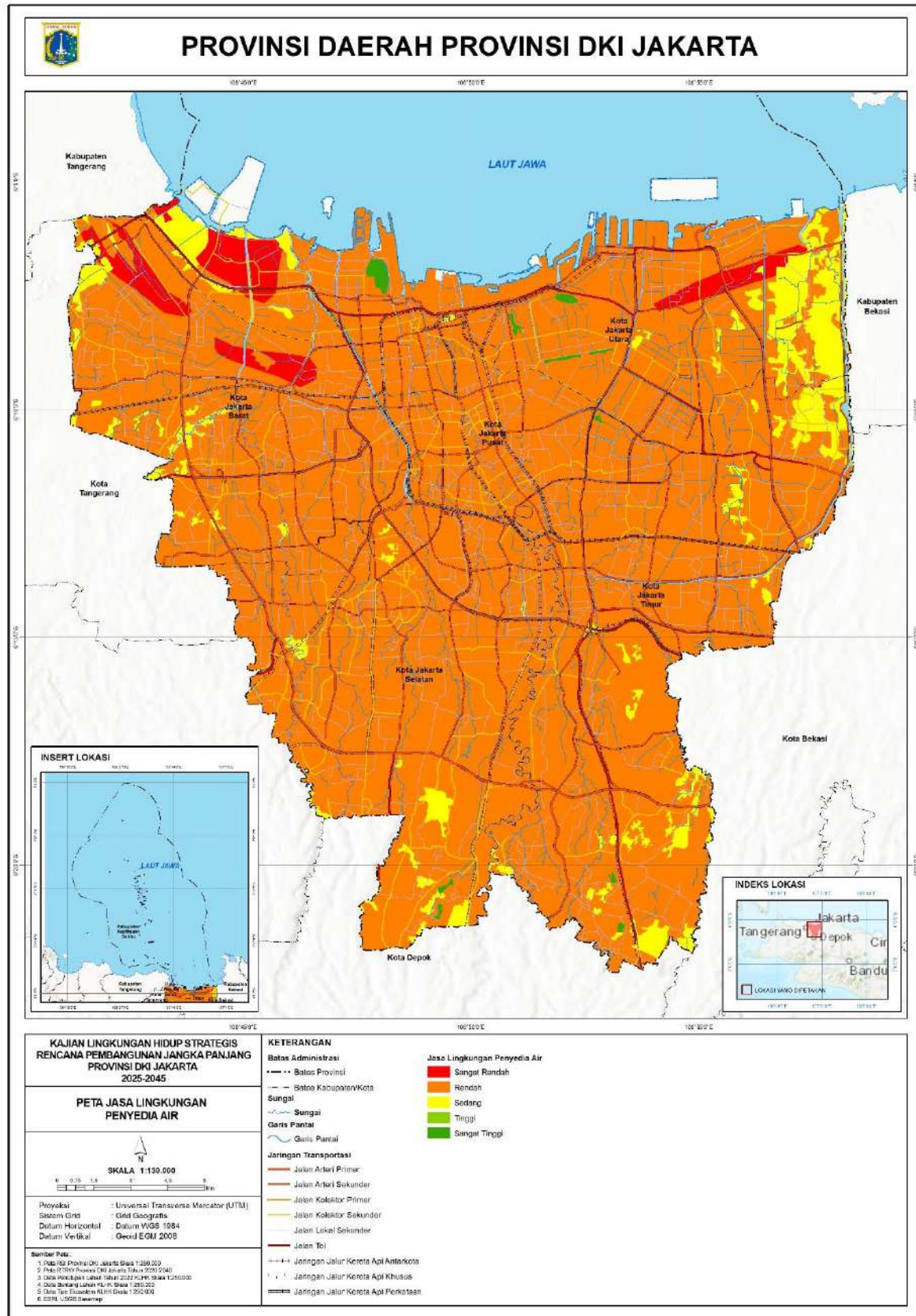
Berdasarkan analisa yang dilakukan pada tahun 2020, identifikasi kinerja jasa lingkungan di wilayah provinsi DKI Jakarta akan menitikberatkan pada 4 jasa lingkungan hidup, yaitu: Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara, dan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir. Berikut penjelasan tentang kinerja jasa lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

A. Kinerja dan Kecenderungan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

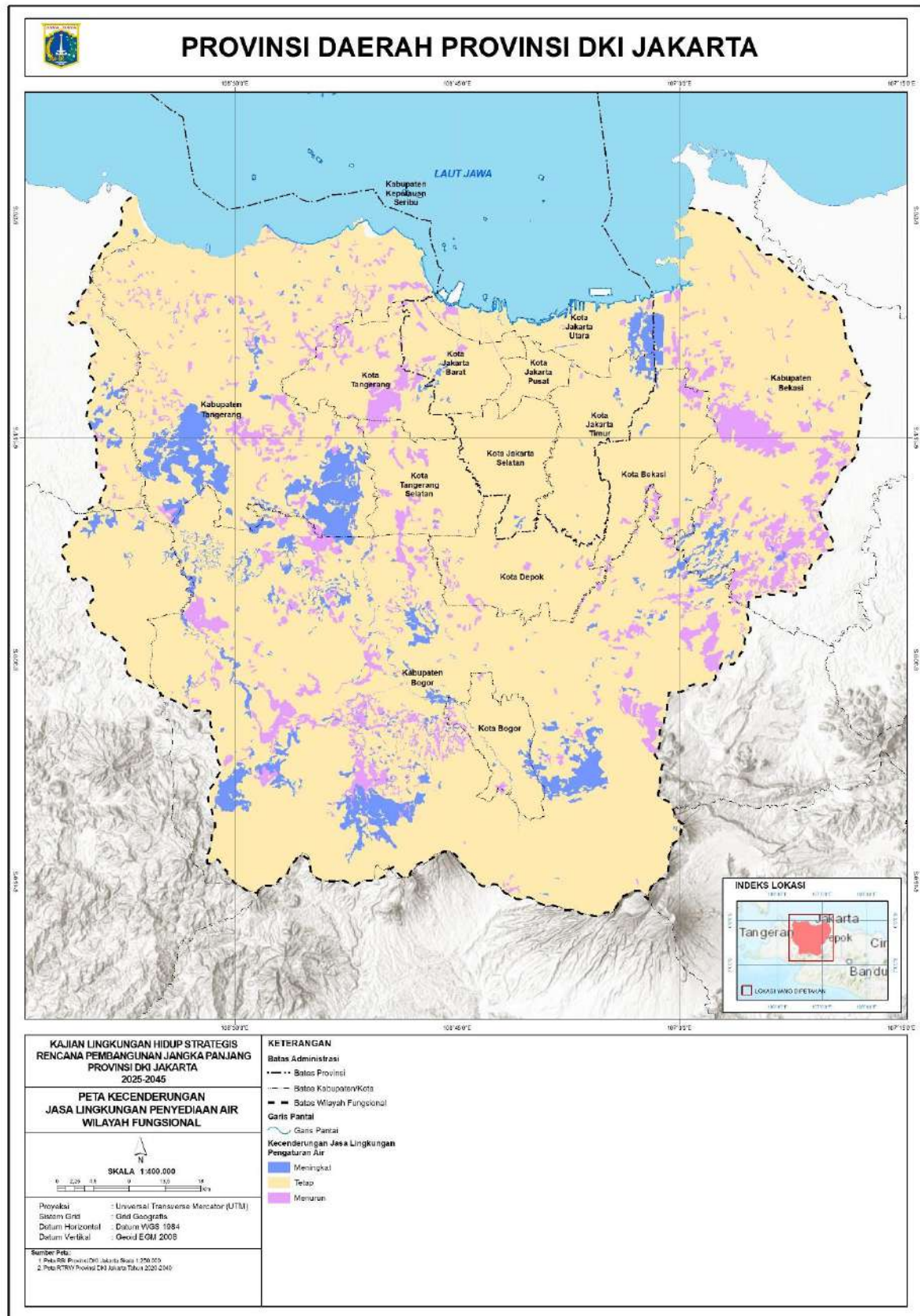
Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta menunjukkan dominasi kelas kinerja rendah (warna orange), sangat rendah (warna merah), dan sedang (warna kuning). Sebaran kinerja rendah membentang dari selatan hingga ke tengah wilayah Jakarta. Sementara, dari tengah hingga utara wilayah Jakarta didominasi oleh kinerja sangat rendah. Hal ini mengindikasikan fungsi penyediaan air di wilayah Jakarta secara keseluruhan memang sudah rendah. Wilayah yang berpotensi krisis terhadap penyediaan air berada di area utara Jakarta. Tidak lain kondisi ini terjadi diakibatkan dari besarnya alokasi penggunaan lahan berupa permukiman/ lahan terbangun. Meskipun memiliki akses air bersih, pada kenyataannya masyarakat di wilayah utara lebih memilih menggunakan air isi ulang karena kualitas air yang didistribusikan melalui perpipaan kurang memuaskan dengan debit yang terlalu kecil. Terlebih kualitas air tanahnya yang sudah tercemar berat di 9 kelurahan dalam lima kecamatan mencakup Kecamatan Cilincing, Koja, Pademangan, Tanjung Priok dan Penjaringan.

Secara sederhana, analisis kecenderungan didapat dari selisih indeks kinerja jasa lingkungan hidup berdasarkan luas wilayah fungsional. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan antara kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di tahun 1996 dan tahun 2020, menunjukkan bahwa kecenderungan di wilayah fungsional DKI Jakarta masih di dominasi dengan kelas tetap. Hal ini memiliki arti bahwa secara kinerja jasa lingkungan masih cenderung tetap dan tidak berubah. Begitu pula untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta yang masih didominasi oleh kelas tetap. Sedangkan untuk kelas menurun berada di wilayah administrasi Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok dan Untuk wilayah DKI Jakarta berada pada wilayah Kota Jakarta Barat. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Analisis kecenderungan, hanya dilakukan untuk kecenderungan jasa lingkungan pengaturan air dan penyedia air di wilayah DKI Jakarta. Hal ini selaras dengan data yang jasa lingkungan yang dipublikasikan oleh KLHK di tahun 2022.



Gambar 3.29. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: KLHK, 2022

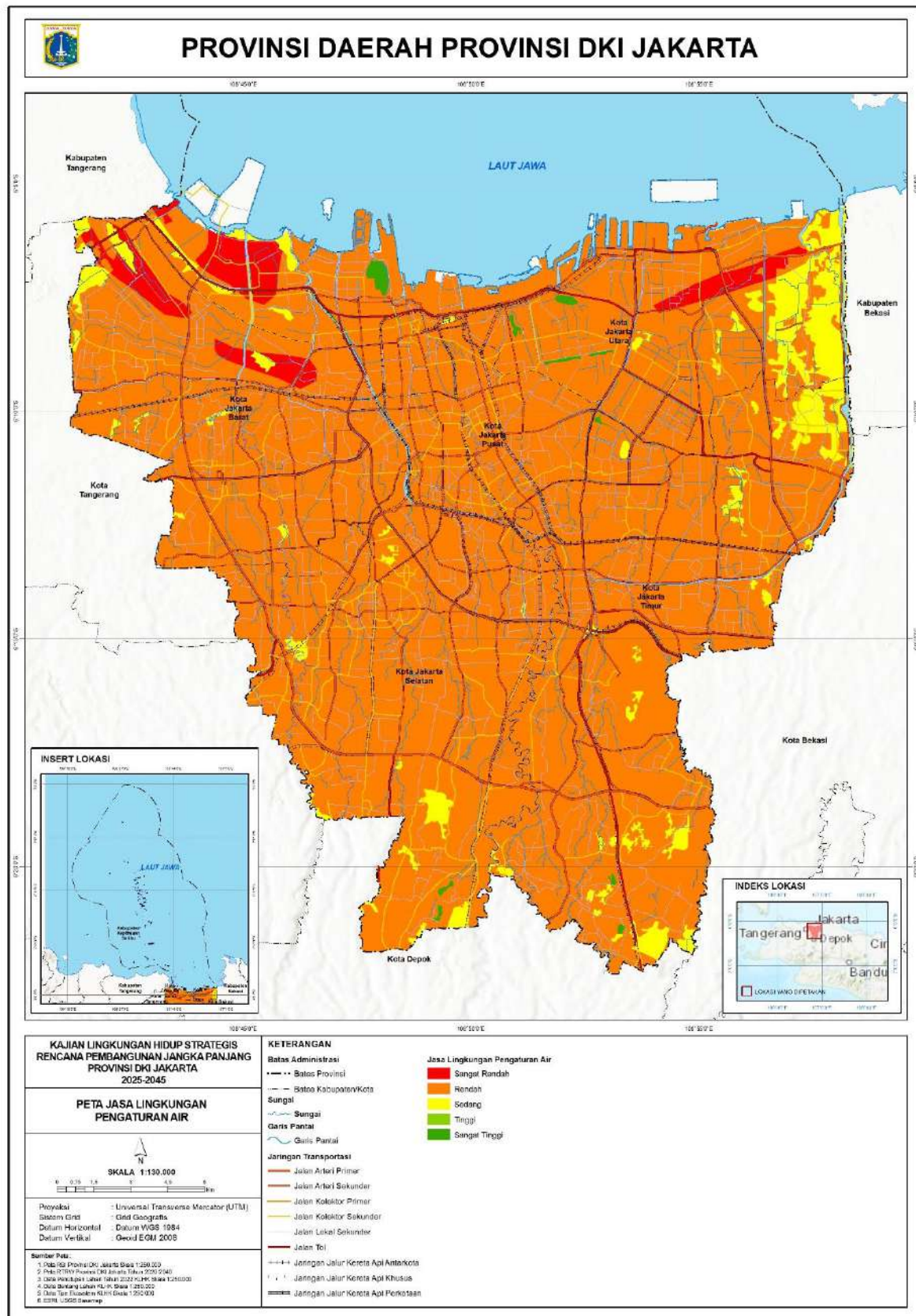


Gambar 3.30. Kecenderungan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Fungsional tahun 1996 - 2020
Sumber: KLHK, 2022

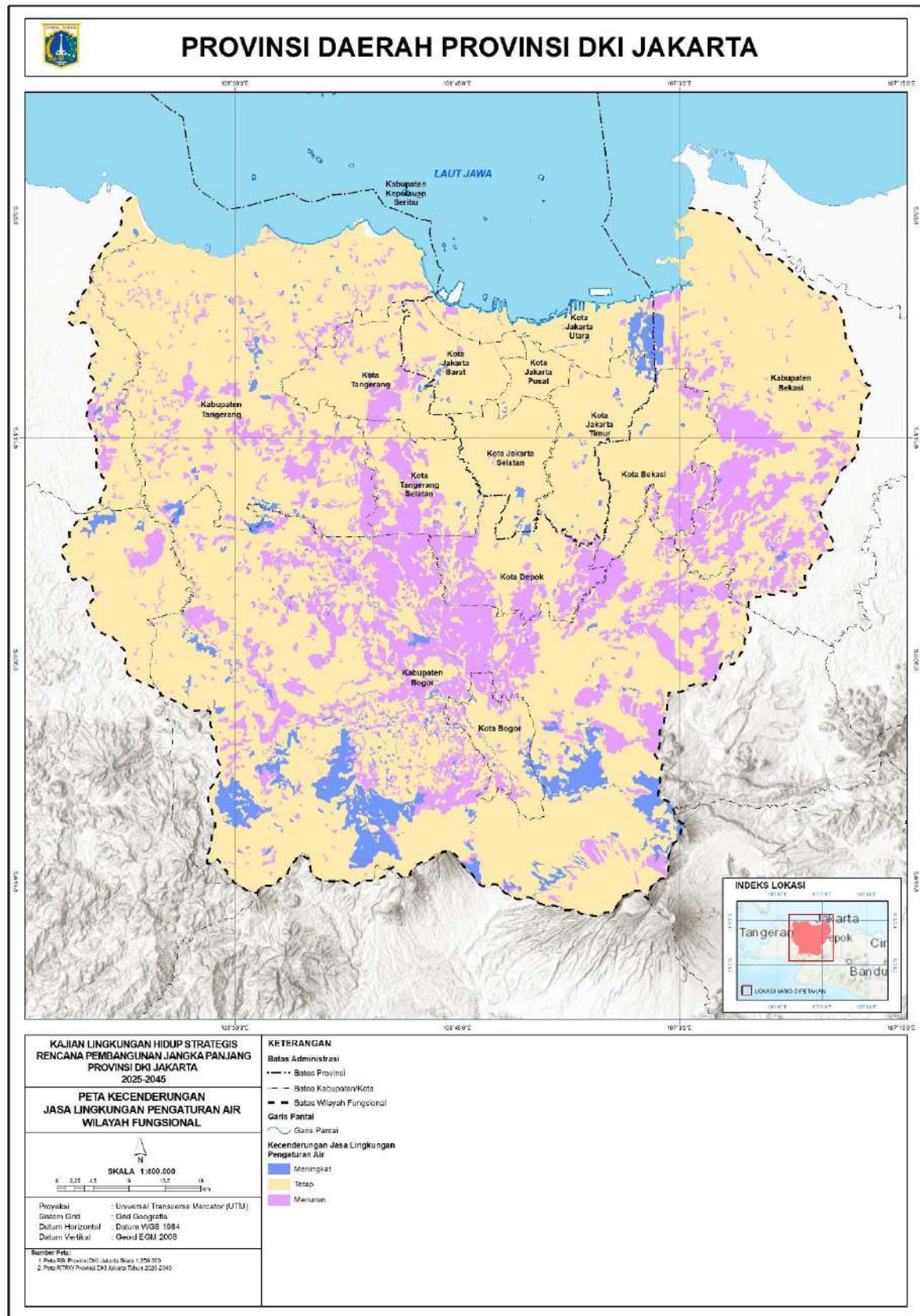
B. Kinerja dan Kecenderungan Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air kelas rendah (warna orange) mendominasi 86,17% wilayah DKI Jakarta. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air merupakan representasi fungsi tata air seperti untuk infiltrasi dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Dalam peta penggunaan lahan/pemanfaatan lahan skala detil tahun 2018, diperkirakan DKI Jakarta telah memanfaatkan 78% wilayahnya untuk pengembangan perkotaan sebagai lahan terbangun. Artinya, fungsi sebagai area resapan berkurang namun fungsi sebagai tata air melalui fasilitas drainase masih cukup baik. Meskipun sebagian besar wilayah DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai lahan terbangun, tidak serta merta membuat kinerja pengaturan airnya pada kelas sangat rendah. Sebagian wilayah di perbatasan timur Jakarta menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi karena wilayah tersebut masih berupa sawah/kebun campur. Sementara itu, area sawah/kebun campur tersebut berpotensi akan mengalami alih guna lahan mengingat pola ruang di wilayah yang sama telah dialokasikan sebagai perumahan/permukiman. Tentu hal tersebut akan memicu penurunan kelas kinerja pengaturan air yang berdampak pada fungsi sediaan air.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air di tahun 1996 dan tahun 2020, kecenderungan di wilayah fungsional DKI Jakarta masih didominasi kelas tetap. Hal ini berarti kinerja jasa lingkungan masih cenderung tetap dan tidak berubah. Kecenderungan kinerja jasa lingkungan pengaturan air untuk - kelas menurun - mendominasi luar wilayah DKI Jakarta terutama untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Jika melihat fungsi jasa lingkungan pengaturan air, maka kinerja jasa lingkungan yang cenderung menurun terutama pada wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang akan mempengaruhi kinerja jasa lingkungan pengaturan air di wilayah DKI Jakarta, walaupun kinerja jasa lingkungan masih cenderung tetap. Untuk lebih detailnya distribusi kecenderungan kinerja jasa lingkungan pengaturan air di wilayah fungsional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.31. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: KLHK, 2022



Gambar 3.32. Kecenderungan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Fungsional Tahun 1996 - 2020
Sumber: KLHK, 2022

C. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

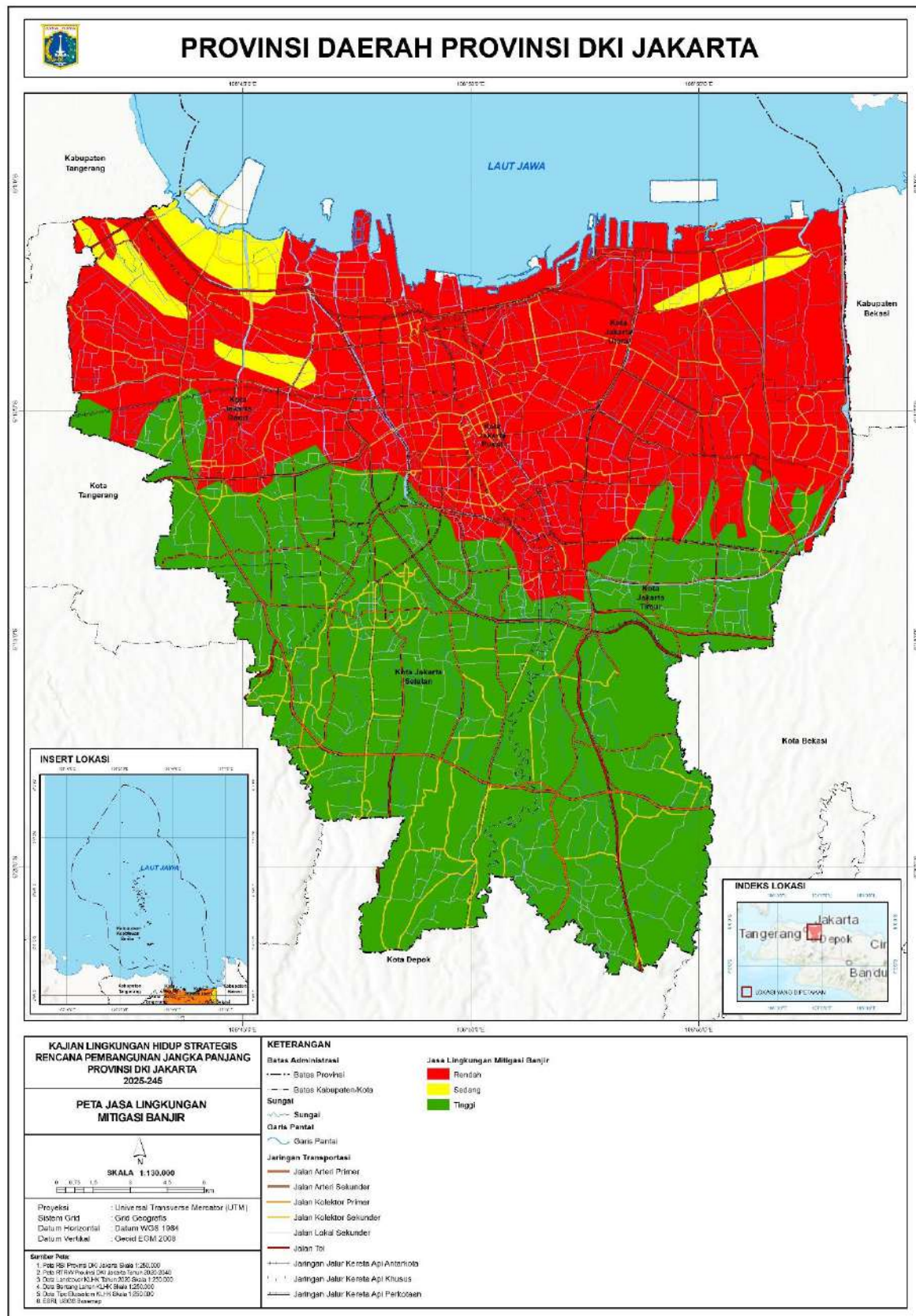
Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara sangat erat kaitannya dengan ketersediaan ruang hijau. Ruang hijau ini dimaksudkan sebagai taman, hutan kota, hutan wisata, atau fungsi lain seperti kebun binatang atau taman makam. Keberadaan ruang-ruang tersebut menjamin teralokasinya sebagian wilayah untuk pertumbuhan tanaman, dalam rangka mendukung keberlangsungan siklus pemulihan kualitas udara secara alami. Pada kenyataannya, saat ini ruang penggunaan lain yang teralokasi untuk ruang hijau, danau, kebun, rawa, situ dan lainnya hanya 14,59% dari luas wilayah DKI Jakarta. Bahkan persentase luasan tersebut berpotensi menurun ke depannya karena rencana pola ruang DKI Jakarta hanya mengalokasikan 13,55% dari luas wilayah DKI Jakarta untuk ruang penggunaan lain.

Sejalan dengan pernyataan di atas, peta di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta didominasi kelas rendah (warna merah) dan tinggi (warna hijau). Sebaran kinerja rendah membentang pada wilayah utara Jakarta. Pada dasarnya, tipologi penutup lahan di wilayah utara adalah perumahan atau lahan terbangun terutama untuk peruntukan industri di wilayah utara, menyebabkan rendahnya jasa lingkungan pengaturan kualitas udara. Namun demikian, pada wilayah selatan terlihat bahwa kondisi tinggi mendominasi karena pada wilayah Selatan masih terdapat tutupan lahan hutan lahan kering sekunder walaupun sebarannya hanya sebagian kecil pada wilayah Selatan namun sangat mempengaruhi kondisi jasa lingkungan pengaturan kualitas udara. Selain itu, keberadaan bentang alam, yang mana di bagian selatan lebih banyak berupa dataran fluviovulkanik dan fluvial juga mempengaruhi kinerja jasa lingkungan kualitas pengaturan udara.



D. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air, namun lebih condong pada peran wilayah sebagai resapan. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir di DKI Jakarta juga didominasi kelas rendah (warna merah). Sebaran kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir sangat rendah menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam. Tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluviovulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain. Sebenarnya dataran fluviovulkanik ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Sayangnya, area selatan ini sudah teralihkan hampir merata untuk perumahan/lahan terbangun. Inilah yang menyebabkan nilai kinerja pengaturan mitigasi bencana banjir menjadi rendah.



Gambar 3.34. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: KLHK, 2018

3.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

3.2.2.1 D3TLH Wilayah Fungsional (D3TLH Nasional)

Perkembangan pemanfaatan lahan Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan terhitung pada tahun 2014 penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, memanfaatkan 565 km² dari 674 km² ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83% (Garschagen, Matthias et.al, 2018). Hal ini secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan fungsi dan manfaat kepada manusia. Tentunya kondisi tersebut dapat berimbas pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah.

Oleh karena itu, memahami kondisi lingkungan hidup suatu wilayah menjadi sangat penting terutama dalam hal melakukan perencanaan pembangunan dan evaluasinya. Sejak awal, Jakarta dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia agar dapat menjadi kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Implikasi dari keputusan ini mengarahkan Jakarta sebagai sentral kegiatan nasional sehingga memiliki daya tarik migrasi masuk yang besar.

Tekanan jumlah penduduk yang besar tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim. Dalam hal ini, DKI Jakarta memiliki keterbatasan ruang dan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan. Bahkan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipandang secara politis dengan melibatkan banyak pihak dan daerah sekitarnya dalam rangka mewujudkan kesetimbangan daya dukung lingkungan hidup.

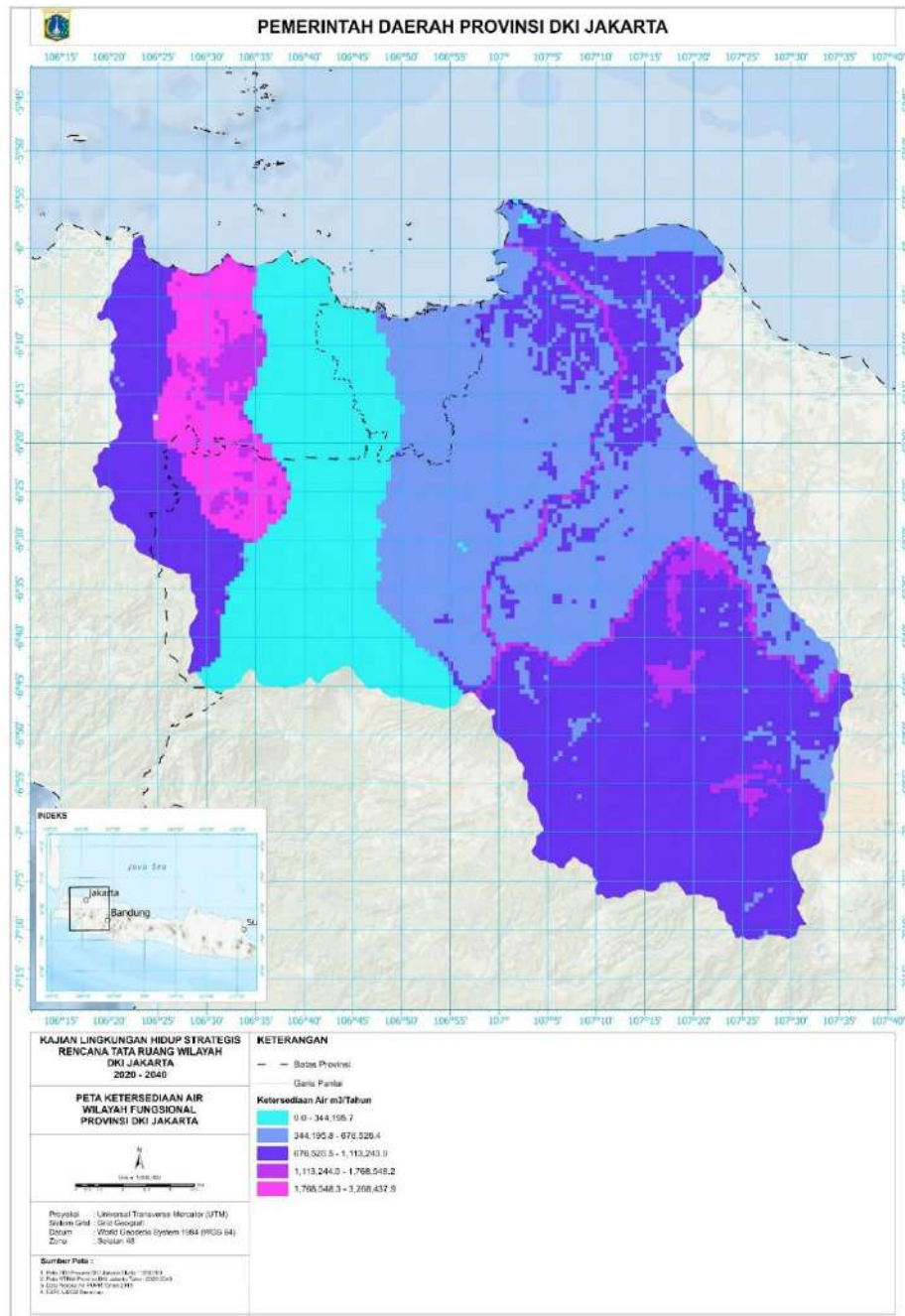
Dalam rangka melakukan analisa daya dukung lingkungan hidup terhadap penyedia air, KLHS memanfaatkan hasil-hasil studi yang tersedia untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), DKI Jakarta memiliki keterikatan ekosistem dengan wilayah Bodetabek-Punjur. Selain berkaitan dengan wilayah Bodetabek-Punjur, wilayah Provinsi DKI Jakarta juga sangat bergantung pada Wilayah Sungai Citarum, karena sebagian besar ketersediaan air di Jakarta sangat bergantung pada kondisi ketersediaan air di WS Citarum (waduk Jatiluhur). Sehingga, walaupun wilayah fungsional DKI Jakarta hanya mencakup dua wilayah sungai yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane, namun untuk melihat kondisi ketersediaan air perlu memperhitungkan kondisi ketersediaan WS Citarum, yang juga mempengaruhi ketersediaan air Jakarta.

Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi 7 WD pada 3 wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Cidanau Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum, yang mencakup lintas administrasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Lima WD meliputi WD Cidanau-Ciujung-Cidurian, WD Ciliwung-Cisadane, WD Ciliwung, WD Cisadane Hulu Bendung Pasar Baru, WD Citarum Tengah dan WD Kepulauan Seribu. Data debit air dari KemenPU pada tahun 2016 menunjukkan WD Cisadane Hilir Bendung Pasar Baru memiliki ketersediaan air permukaan paling banyak (lihat Tabel 3.13).

Tabel 3.13 Jumlah Ketersediaan Air pada wilayah fungsional DKI Jakarta Untuk Tiap WD

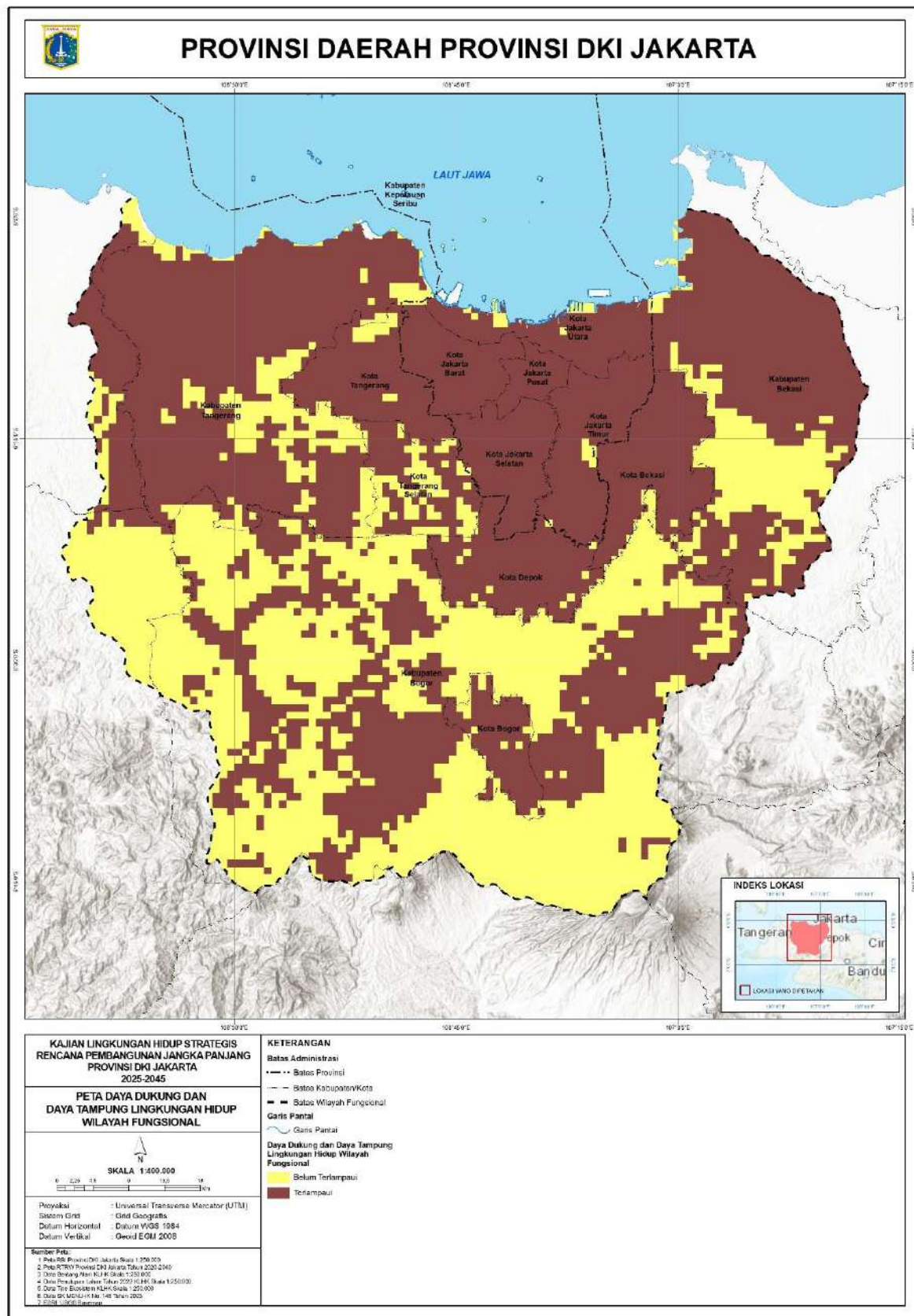
WD	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
WD Cidanau-Ciujung-Cidurian	2.065.825.816
WD Ciliwung Cisadane	1.890.981.644
WD Ciliwung	1.650.778.439
WD Cisadane Hulu Bendung Pasar Baru	432.605.843
WD Kepulauan Seribu	2.678.700
WD Citarum Tengah	3.344.259.984
WD Citarum Hilir	1.890.981.644
Total Ketersediaan Air 6 WD	10.586.690.442

Sumber: KemenPU, 2016



Gambar 3.35. Ketersediaan Air di Wilayah Fungsional berkaitan dengan Penyediaan Air Tahun 2020
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Data di atas digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air sehingga dapat diketahui dimana wilayah-wilayah yang diindikasikan telah melampaui daya dukung air. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air, diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 3.36. Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Fungsional Tahun 2023

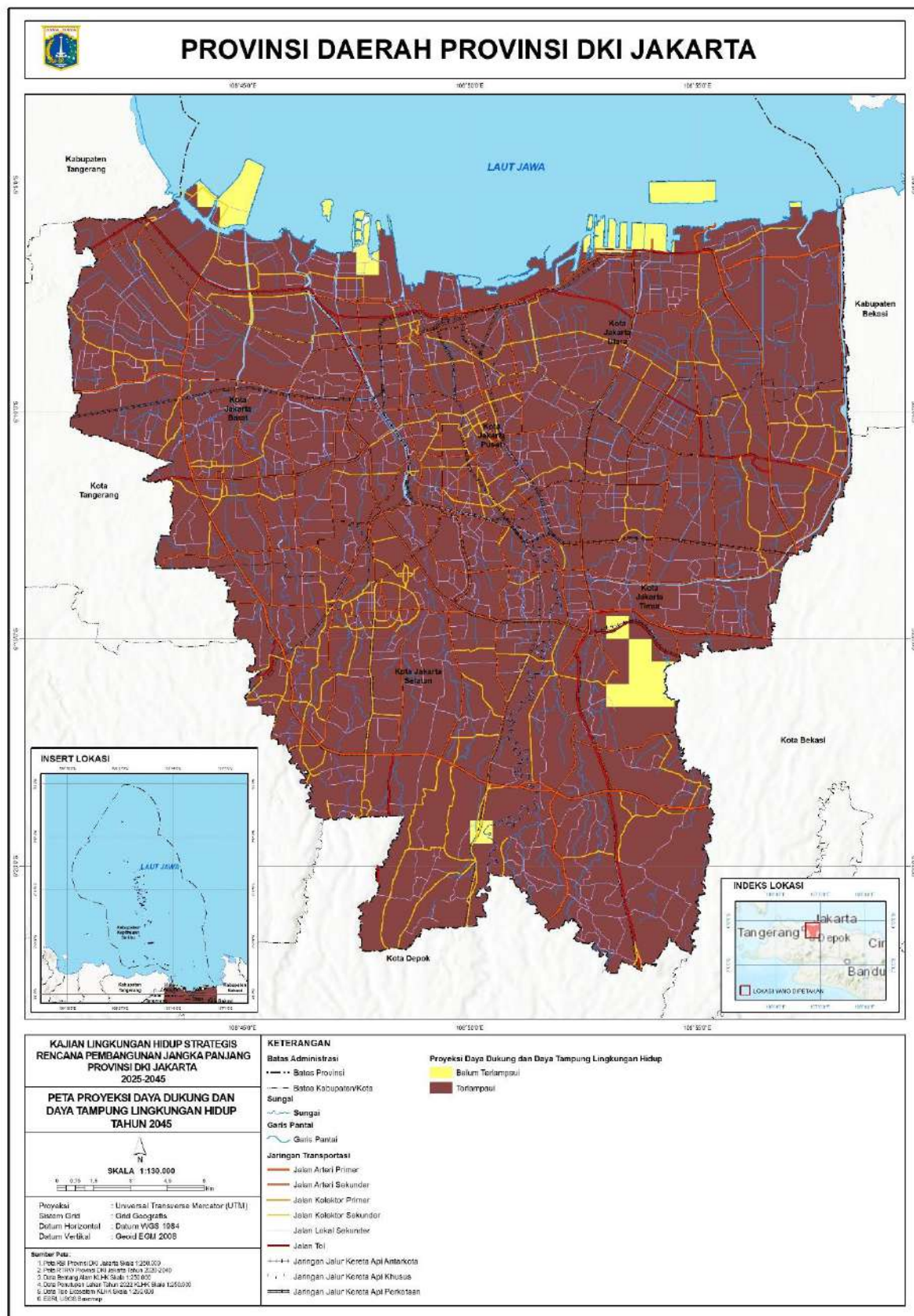
Sumber: SK MenLHK No. 146 Tahun 2023

Berdasarkan pada peta di atas menunjukkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui. Hal tersebut karena pada wilayah tersebut telah menjadi lahan terbangun ataupun wilayah pertanian. Indikasi tersebut dapat dibuktikan seperti pada contoh di wilayah Jakarta yang lebih dari 90% dari luasan total, memiliki status terlampaui akibat penggunaan lahannya merupakan lahan terbangun yang juga berbanding lurus dengan padatnya penduduk Jakarta sebagai ibu kota negara. Begitu pula di wilayah perkotaan seperti di wilayah kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor serta Kabupaten Bekasi dan Tangerang yang sebagian besar wilayahnya memiliki status daya dukung penyedia air yang telah terlampaui. Hal ini menunjukkan air permukaan pada wilayah tersebut tidak mampu menampung kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik ataupun kegiatan pertanian. Dampak dari hal ini pula yang bisa menyebabkan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan mengalami krisis air bersih.

Gambaran data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air pada wilayah fungsional diatas menunjukkan bahwa kondisi status wilayah fungsional saat ini secara keseluruhan memiliki potensi sangat kecil untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung wilayah didalamnya termasuk Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal ini masih perlu ditindaklanjuti dengan mendetailkan skala data untuk melakukan analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) terhadap penyedia air pada Provinsi DKI Jakarta. Skala data yang digunakan dalam menilai status D3TLH pada wilayah fungsional menggunakan skala 1:500.000 yang bersumber dari SK MenLHK No. 297 Tahun 2019 dan digunakan sebagai data nasional. Oleh karena itu, perlu melakukan pendetailan skala data untuk menilai kondisi D3TLH penyedia air Provinsi DKI Jakarta secara komprehensif sesuai kondisi saat ini.

3.2.2.2 D3TLH Wilayah Perencanaan

Dalam analisis D3TLH penyedia air pada wilayah fungsional menyatakan bahwa lebih dari 90% wilayah DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung air (ditandai dengan warna **merah**). Maka untuk melakukan analisa secara komprehensif terhadap D3TLH penyedia air DKI Jakarta, maka dilakukan Kembali analisa D3TLH terhadap wilayah DKI Jakarta menggunakan skala data 1:250.000 dan mempertimbangkan tekanan jumlah penduduk, ketersediaan air di wilayah DKI Jakarta serta kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik atau pertanian. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kondisi D3TLH penyedia air provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 3.37 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 2023
Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023

Status indikatif terlampaui menunjukkan bahwa kemampuan fungsi lingkungan DKI Jakarta dalam menyediakan air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik dan lahan. Jumlah ketersediaan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air DKI Jakarta. DKI Jakarta perlu melakukan distribusi air dari luar daerah untuk mendapatkan sumber air baku demi memenuhi kebutuhan air di dalam wilayah provinsi. Terlebih kondisi kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta dalam status cemar sedang dan berat sehingga kurang layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Metodologi perhitungan daya dukung air memanfaatkan pendekatan jasa lingkungan hidup penyedia air dengan bantuan distribusi spasial sistem grid 30"x30" dalam model *close system*. Indikasi daya dukung air terlampaui ditentukan berdasarkan selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air dalam satu wilayah seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Wilayah DAS – WD (wilayah fungsional)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
Cisadane Hilir Bd Psrbaru	2.065.825.816
Citarum Hilir	1.890.981.644
Ciliwung	1.650.778.439
Cisadane Hulu Bd Psrbaru	432.605.843
Kepulauan Seribu	2.678.700
Total	6.042.870.443



Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Volume (m3/Tahun)					Luas D3TLH Air (Air)		Ambang Batas (Jiwa)	Indikasi Status D3TLH Air
	Ketersediaan Air Jakarta	Kebutuhan Air			Selisih	Belum Terlampaui	Terlampaui		
		Domestik	Lahan	Kebutuhan Total					
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4,163,057.32	2,396,044.80	1,109,769.45	3,505,814.25	657,243.07	658.91	419.13	28,574	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Barat	102,105,718.45	221,240,073.60	12,756,910.02	233,996,983.62	-131,891,265.17	144.29	12,414.16	2,395,781	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Pusat	34,911,044.24	91,315,728.00	172,052.54	91,487,780.54	-56,576,736.29		4,781.08	986,176	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Selatan	118,049,489.86	203,236,560.00	3,629,945.37	206,866,505.37	-88,817,015.52	39.68	14,791.38	2,241,236	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Timur	152,307,750.72	287,173,814.40	20,180,742.05	307,354,556.45	-155,046,805.74	500.85	17,817.79	3,129,956	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Utara	138,578,941.54	154,893,340.80	38,546,111.31	193,439,452.11	-54,860,510.57	1,329.83	13,522.02	1,724,190	Terlampaui
Total	550,116,002.13	960,255,561.60	76,395,530.74	1,036,651,092.35	-486,535,090.22	2,673.56	63,745.56	10,505,913	

Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui daya dukung seluruh kota dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta diindikasikan terlampaui. Selain keterikatan ekosistem, penentuan 5 (lima) wilayah DAS sebagai wilayah fungsional mempengaruhi ketersediaan air di DKI Jakarta, yang didasarkan pada pertimbangan pengambilan sumber air baku DKI Jakarta sebagian besar dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol dan IPA Serpong.

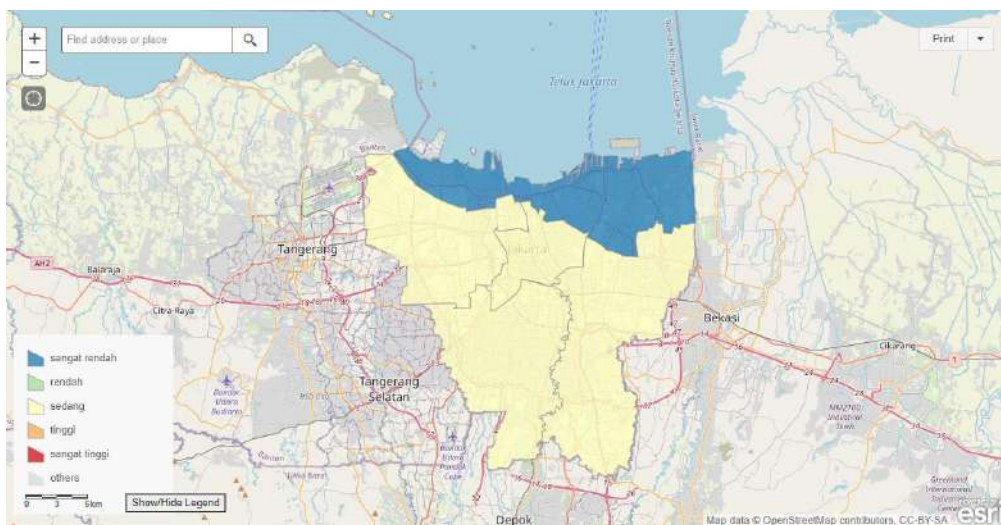
Meskipun DKI Jakarta didukung dari lima sisi wilayah DAS, tidak serta merta menjadikan wilayah dengan surplus ketersediaan air permukaan. Berdasarkan modeling spasial, dari total ketersediaan air permukaan 5 (lima) wilayah DAS sebanyak 6.042.870.443 m³/tahun hanya sekitar 4,69% atau 283.250.615 m³/tahun air yang terdistribusi ke wilayah DKI Jakarta. Sementara, kebutuhan air Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 1.650.486.049 m³/tahun dengan proporsi peruntukan 92,61% digunakan untuk memenuhi kegiatan domestik dan 7,39% digunakan untuk memenuhi kegiatan ekonomi berbasis lahan. Selisih kesetimbangan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan nilai minus, yang mengartikan bahwa air di DKI Jakarta akan terus mengalami defisit kuantitas jika dimanfaatkan tanpa melakukan upaya *recharge* ataupun alternatif lain. Selain itu, jumlah penduduk yang sudah mencapai ±10,5 juta jiwa juga diperkirakan telah melebihi daya tampung populasi yang dapat didukung oleh ketersediaan air lokal yaitu hanya ±1,94 juta jiwa. Inilah yang mendasari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung dan daya tampung air.

3.2.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Kota Jakarta termasuk pada kota delta (*delta city*) atau dapat disebut dengan kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Dampak nyata dari perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat adalah bencana banjir yang sedikit banyak terpengaruh dari adanya perubahan iklim. Di bawah ini merupakan gambaran dampak dari perubahan iklim yang

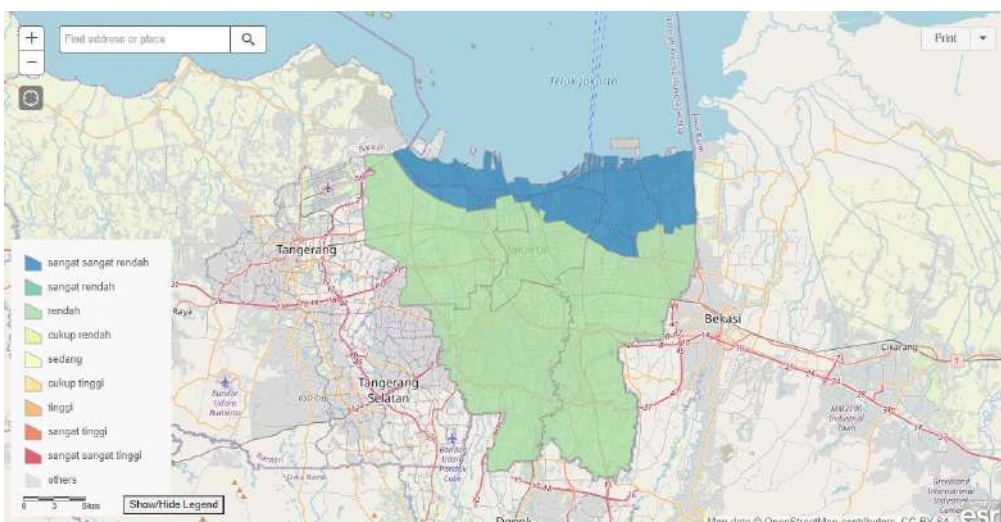
terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu pada permukaan laut dapat mengakibatkan naiknya tinggi muka air laut, sementara pengaruhnya pada daratan salah satunya adalah potensi kekeringan.

Merujuk pada data SIDIK (Sistem Informasi Data indeks Kerentanan) tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah *main land* dan Kepulauan Seribu (data skala kota/kabupaten). Provinsi DKI Jakarta memiliki risiko rendah-sedang terhadap kerentanan akibat perubahan iklim dengan nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) 0.303 – 0.498 dan nilai Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) dengan rentang nilai 0.453 – 0.664. Nilai IKA DKI Jakarta yang relatif tinggi, kerentanan perubahan iklim sangat rendah. Sedangkan indeks risiko kekeringan DKI Jakarta memiliki klasifikasi risiko sangat rendah menuju ke rendah, yang didominasi oleh kelas rendah di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Untuk kelas sangat-sangat rendah berada di Jakarta Utara. Hal ini mengindikasikan DKI Jakarta memiliki kerentanan rendah terhadap bencana kekeringan.



Gambar 3.38 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim DKI Jakarta

Sumber: Portal SIDIK KLHK



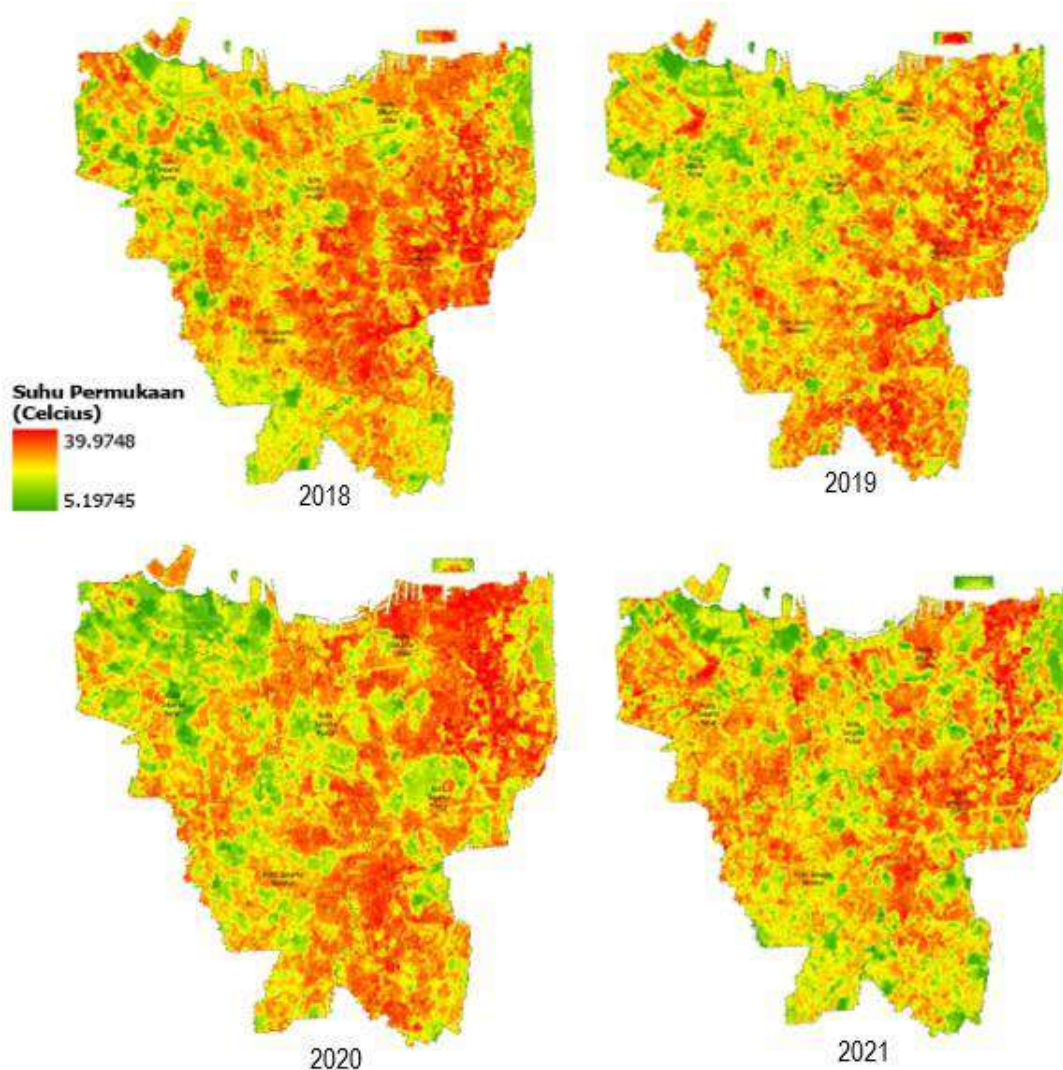
Gambar 3.39 Kerentanan Terhadap Bencana Kekeringan DKI Jakarta

Sumber: Portal SIDIK KLHK

Fenomena perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi kondisi kelembapan udara, suhu udara, serta curah hujan, tetapi juga kondisi suhu permukaan. Perubahan kondisi permukaan terjadi akibat lahan yang didominasi oleh lahan terbangun. Pada wilayah perkotaan, dimana permukaan bangunan gedung-gedung lebih banyak menyerap energi

panas daripada memantulkannya, sehingga mengakibatkan naiknya suhu di wilayah sekitar gedung. Kondisi tersebut jika terus meningkat akan menimbulkan adanya fenomena *Urban Heat Island* (UHI). UHI merupakan fenomena yang terjadi di sebuah kota atau wilayah metropolitan yang secara signifikan lebih panas dibandingkan sekitarnya, akibat dari aktivitas yang lebih besar di wilayah tersebut.

Fenomena *Urban Heat Island* tidak bisa lepas dari kondisi provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu kota dengan status kota metropolitan dengan dominasi lahan terbangun. Dengan status tersebut, maka provinsi DKI Jakarta berpotensi mengalami kenaikan suhu permukaan karena didominasi oleh lahan terbangun dan sedikit lahan bervegetasi. Berdasarkan data citra landsat 8 antara tahun 2018 – 2021 yang digunakan untuk melakukan monitoring suhu permukaan, menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan suhu permukaan di beberapa wilayah DKI Jakarta, walaupun terjadinya kenaikan tidak terlalu signifikan dari tahun awal.



Gambar 3.40 Monitoring Perubahan Suhu Permukaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Sumber: Citra Landsat 8 dan Hasil Analisis 2022

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukan bahwa suhu permukaan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada tahun 2018, beberapa lokasi pada 3 wilayah perkotaan tersebut, mengalami peningkatan suhu tertinggi mencapai 39°C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara fluktuatif, yaitu 37°C, 35°C, dan 36°C. Meningkatnya suhu permukaan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di beberapa lokasi dikarenakan faktor lahan yang didominasi oleh lahan terbangun yang

cenderung menyerap panas dibandingkan vegetasi yang memantulkan panas. Hal ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan akibat perubahan iklim dan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

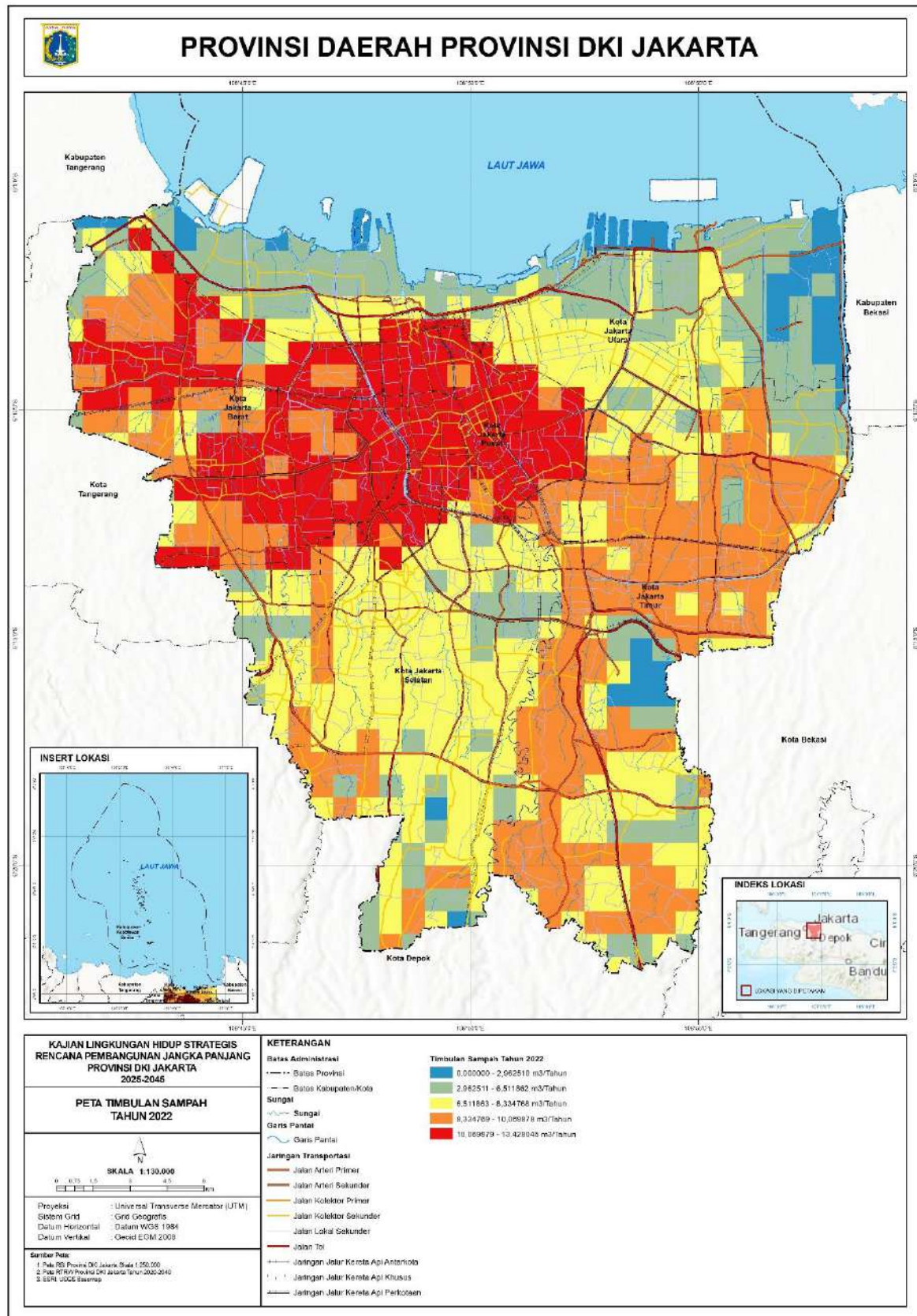
3.2.4 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tekanan penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya tekanan terhadap lingkungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko terhadap lingkungan hidup. Salah satu dampak dari tekanan ini adalah terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Analisa dilakukan untuk mengetahui potensi timbulan sampah dan beban pencemar sungai hingga 2045 sebagai dampak dari adanya tekanan penduduk.

A. Timbulan Sampah

Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas penduduk yang merupakan sampah domestik. Analisis potensi timbulan sampah dilakukan berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan keputusan no. e-0014 tahun 2023, yang menginformasikan bahwa timbulan sampah per kapita per hari di DKI Jakarta sebesar 0.76 kg/kapita/hari. Nilai rujukan tersebut digunakan untuk melakukan analisis potensi timbulan sampah berdasarkan sebaran jumlah penduduk baik tahun saat ini dan tahun proyeksi di tahun 2045.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola sebaran timbulan sampah mengikuti pola distribusi penduduk berdasarkan grid 30"x30". Timbulan sampah tinggi berada di Kota Jakarta Pusat dengan nilai 10.08 – 13.43 kg/kapita/hari. sedangkan potensi timbulan sampah kedua tertinggi berada di wilayah Kota Jakarta Barat dengan nilai 8.34 – 13.4 kg/kapita/hari. untuk nilai terendah masih berada di Jakarta Utara dengan nilai 2.97 – 8.33 kg/kapita/hari.



Gambar 3.41 Distribusi Potensi Timbunan Sampah Tahun 2023

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Adanya tekanan penduduk juga memberikan dampak pada meningkatnya tingkat aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kegiatan rumah tangga, pertanian, hingga industri yang akan menghasilkan limbah untuk lingkungan. Limbah ini akan berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Dengan menggunakan model distribusi penduduk dan tekanannya, serta dengan mempertimbangkan jenis penutup lahan yang ada di DKI Jakarta, maka potensi beban pencemar air sungai dapat didistribusikan secara spasial. Pada pemodelan potensi beban pencemar air sungai, terdapat tiga sumber dari potensi beban pencemar yang dihitung, yaitu potensi beban pencemar yang berasal dari domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun parameter yang diperhitungkan adalah parameter BOD, COD, dan TSS untuk potensi beban pencemar yang bersumber dari domestik dan pertanian, serta parameter BOD dan COD untuk potensi beban pencemar dari penggunaan lahan.

Potensi beban pencemar yang berasal dari domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduknya. Terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi nilai dari potensi beban pencemar domestik, yaitu jarak lokasi terhadap sungai, rasio ekuivalen kota, serta faktor emisi dari masing-masing parameter BOD, COD, dan TSS

Tabel 3.15 Nilai Koefisien Berdasarkan Jumlah Penduduk, Rasio Ekuivalen Wilayah dan Jarak Sungai (Parameter Domestik) Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS

Faktor Emisi		Rasio Ekuivalen Wilayah		Jarak Lokasi Terhadap Sungai	
Parameter	FE (kg/org/hari)	Jenis	Re	Jarak (m)	α
BOD	0.04	Kota	1	0 – 100	1
COD	0.055	Pinggiran Kota	0.8125	100 – 500	0.85
TSS	0.038	Pedalaman	0.625	>500	0.3

Sumber: Dharma Ina Mandiri, (2017)

Sementara itu, potensi beban pencemar yang berasal dari pertanian dan penggunaan lahan dihitung berdasarkan luasan tutupan lahan dan faktor emisi dari masing-masing zat pencemar.

Tabel 3.16 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Pertanian Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS

Parameter	Tutupan Lahan Pertanian		
	Sawah (kg/Ha/Musim Tanam)	Palawija (Kg/Ha/Musim Tanam)	Kebun/Tegalan (Kg/Ha/Musim Tanam)
BOD	255	125	32.5
COD	(BOD*1.5)	(BOD*1.5)	(BOD*1.5)
TSS	0.46	2.4	1.6

Sumber: Dharma Ina Mandiri, (2017)

Jenis tutupan lahan yang menjadi sumber dari potensi beban pencemar untuk pertanian adalah sawah, tegalan/ladang, dan kebun atau perkebunan. Untuk potensi beban pencemar penggunaan lahan, lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Potensi beban pencemar total diperoleh dari akumulasi potensi beban pencemar domestik, pertanian, dan penggunaan lahan untuk masing-masing parameter BOD, COD, dan TSS.

Tabel 3.17 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Hutan dan Lahan Terbangun Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS

Parameter	Tutupan Lahan	
	Hutan (Kg/Ha)	Lahan Terbangun (Kg/Ha)
BOD	9.32	15.34
COD	(BOD*1.5)	(BOD*1.5)

Sumber: Dharma Ina Mandiri, (2017)

Seluruh proses yang dilakukan untuk melakukan estimasi nilai beban pencemar terhadap parameter BOD, COD, dan TSS dilakukan melalui analisis spasial, berdasarkan data grid 30" x 30" dan juga distribusi penduduk untuk tiap gridnya yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hasil dari estimasi untuk setiap nilai koefisien jumlah penduduk, rasio ekuivalen wilayah, jarak dari sungai, tutupan lahan pertanian, tutupan lahan terbangun dan juga tutupan hutan, kemudian dijumlahkan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$PBP_{total} = PBP_{dom} + PBP_{pertanian} + PBP_{lahan}$$

Keterangan:

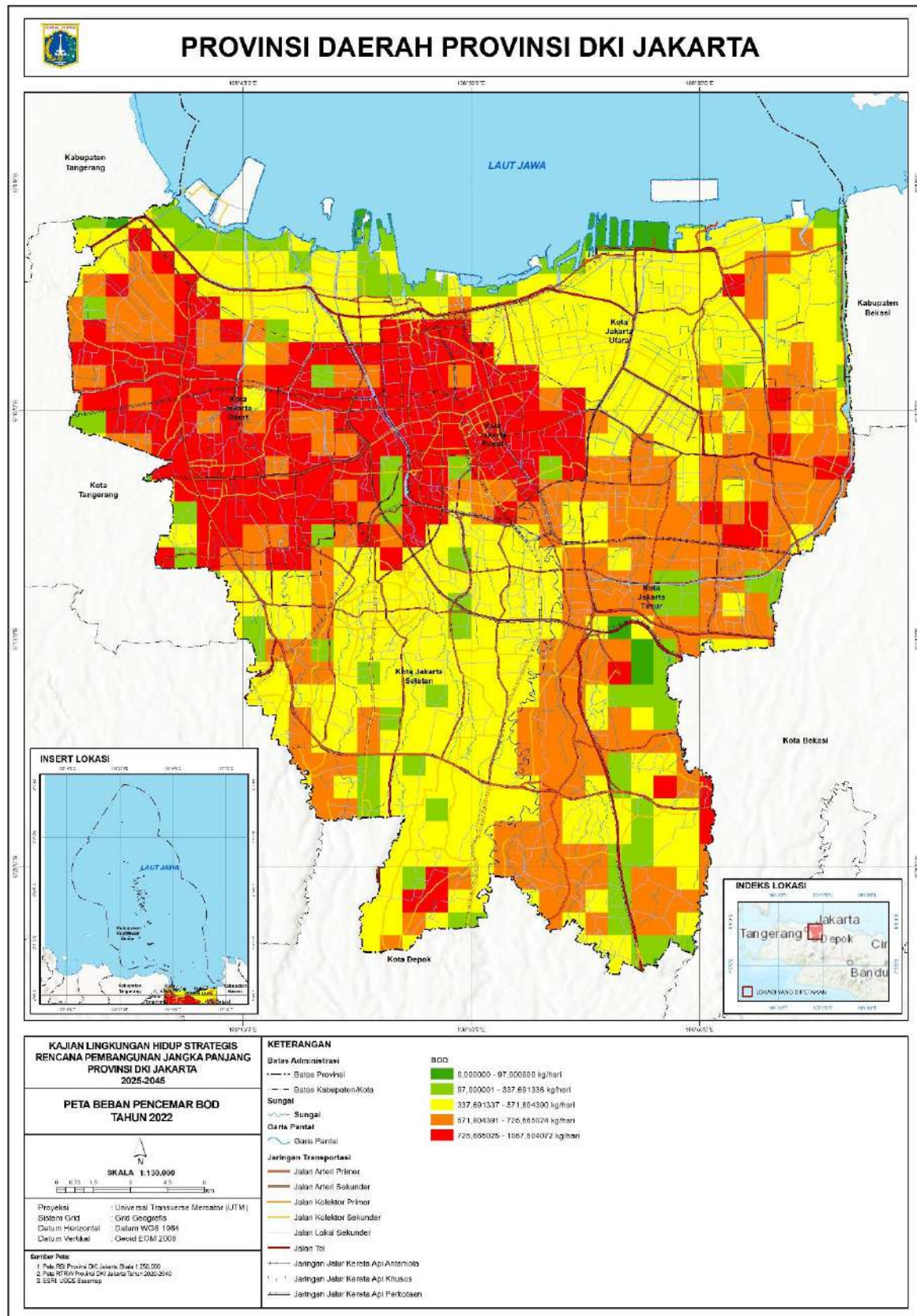
PBP_{total} : Jumlah nilai total parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien domestik, pertanian dan tutupan lahan

PBP_{dom} : Jumlah nilai parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien domestik

$PBP_{pertanian}$: Jumlah nilai parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien pertanian

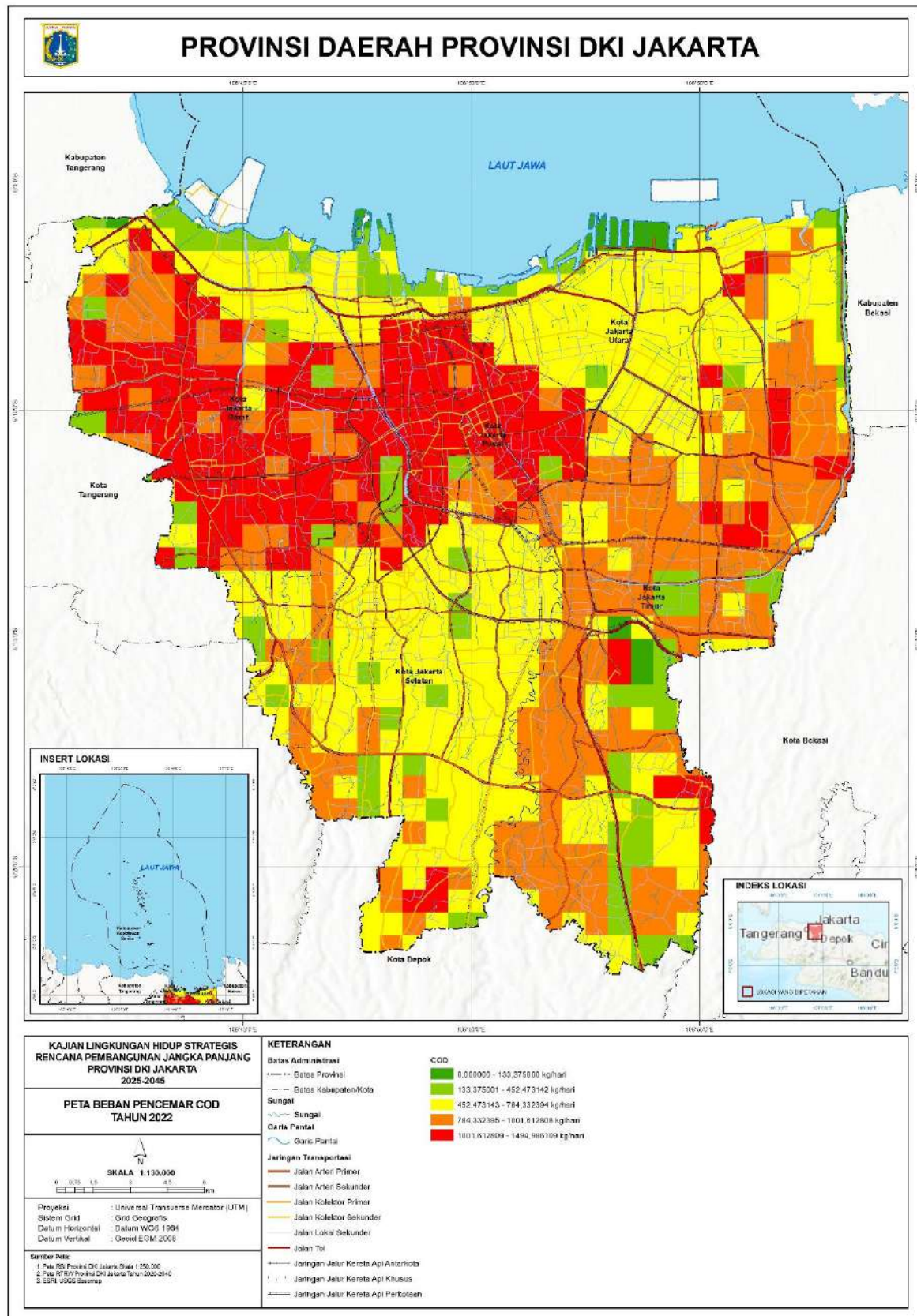
PBP_{lahan} : Jumlah nilai parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien tutupan lahan (hutan dan lahan terbangun)

Pola sebaran dari potensi beban pencemar tidak bergantung pada sebaran penduduk karena terdapat faktor potensi beban pencemar yang berasal dari lahan. Terlihat bahwa Kota Jakarta Pusat memiliki potensi beban pencemar air sungai tertinggi di DKI Jakarta, kemudian disusul dengan Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang tinggi tetapi juga ada beberapa area pertanian seperti Pertanian lahan kering/campur dan juga sawah yang mempengaruhi tingginya potensi beban pencemar air sungai.



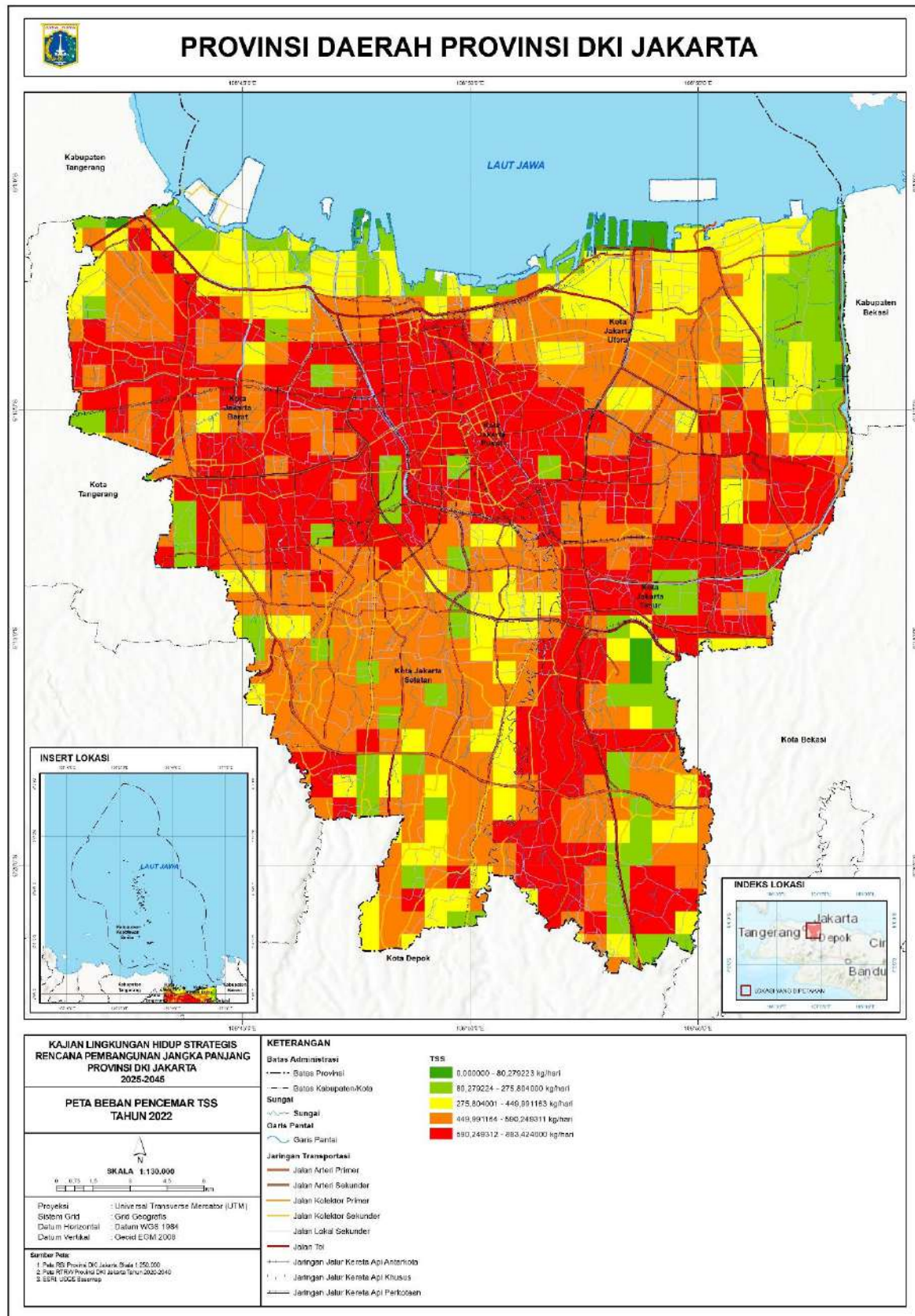
Gambar 3.42 Potensi Beban Pencemar Parameter BOD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.43 Potensi Beban Pencemar Parameter COD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.44 Potensi Beban Pencemar Parameter TSS Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.5 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di wilayah DKI Jakarta terutama terdapat di ekosistem perairan laut Kepulauan Seribu. Terdapat 2 (dua) ekosistem yang ada di wilayah dan pesisir, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem perairan laut dangkal (terumbu karang dan padang lamun).

A. Ekosistem Terumbu Karang

Kecenderungan perubahan kondisi ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu diidentifikasi berdasarkan persentase tutupan karang hidup. Data dan informasi tutupan karang disadur dari Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019 dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi tutupan karang hidup di 19 pulau dari 114 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu cenderung mengindikasikan kondisi yang memburuk. Hal ini terlihat dari penurunan tutupan karang hidup dari tahun awal yang teridentifikasi hingga tahun terakhir updating data yang tersedia, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa pulau. Dari 19 pulau, 11 diantaranya menunjukkan kecenderungan yang menurun.

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase tutupan karang hidup di 19 pulau dari tahun 2003 hingga 2019. Meskipun setiap pulau memiliki ketersediaan tahun data yang sangat beragam namun dapat disimpulkan kecenderungannya dengan melihat kondisi awal dan kondisi akhir dari data tersebut.

Tabel 3.18. Kecenderungan Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu

No	Pulau	% Tutupan Karang Hidup														Kecenderungan
		2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Gugus Pulau Pari*						40,6			20,1			30	26,3		⬇️
2	Pulau Payung Besar*	12,9	24,6	24,7							28,1			2,7		⬇️
3	Pulau Payung Kecil*	3,4	10,6	18,3							28,1		44,5	13,5		⬆️
4	Pulau Tidung*			68,2						52,7			48	32,8		⬇️
5	Pulau Pramuka*	34,7	16	34,6	31,4	9,2			39,4			47,7		25,8		⬇️
6	Gosong Pramuka*					17,6			30,7				40	40		⬆️
7	Pulau Panggang*		42,8	32,5	35,7	35,1			55,6					48,4		⬆️
8	Pulau Harapan*	42,7	26,4	48,6	38,6	63			53,7				38	26		⬇️
9	Pulau Panjang	60,5	11,9	9,4		7,5			28,5					30,3		⬇️
10	Genteng Besar							33,6							28,0	⬇️
11	Macan Besar							44,7							61,8	⬆️
12	Sepa Timur							20,5							46,2	⬆️
13	Sepa Barat							28,2							28,9	⬆️
14	Jukung							6,36							28,1	⬆️
15	Melinjo							30,5							28,9	⬇️
16	Semut Besar							20							2,61	⬇️
17	Semut Kecil							35,9							36,8	⬆️
18	Satu							16,4							7,65	⬇️
19	Lipan							72,3							20,3	⬇️

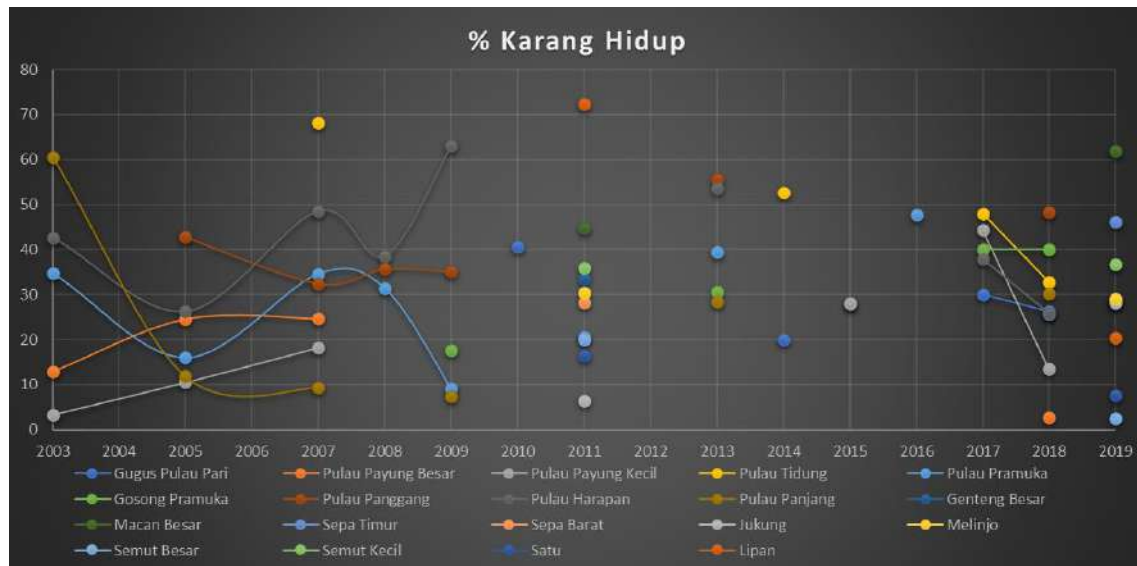
⬆️ : Membaik

⬇️ : Menurun

□ : Tidak ada data

* : Pulau Berpenghuni

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan



Gambar 3.45. Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Dari 19 pulau di atas, Pulau Panjang memiliki kecenderungan menurun yang paling besar yaitu sekitar 30,2%. Pada tahun 2003, persentase tutupan karang hidup di Pulau Panjang mencapai 60,5% sementara pada tahun 2018 mencapai 30,3%. Meskipun demikian, angka penurunan ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pulau lain yang memiliki perbedaan tahun data. Pada dasarnya, Persentase penutupan karang keras di Pulau Panjang memiliki penutupan yang cukup tinggi dan termasuk dalam kriteria sedang dengan penutupan sebesar 30,3%. Namun, melihat dari kecenderungan yang menurun dalam 15 tahun terakhir di Pulau Panjang, mengindikasikan adanya kegiatan bawah laut yang merusak tutupan karang. Penurunan karang hidup disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti pengeboman masih terjadi. Nilai Indeks Mortalitas Karang (IMK) di Pulau Panjang mendekati angka 1, yaitu 0,655, sehingga dapat diartikan bahwa perubahan karang hidup menjadi karang mati sangat berarti.

Berdasarkan data Taman Nasional Kepulauan Seribu (2019) melaporkan berbagai kajian terumbu karang. Jumlah marga (genus) karang yang pernah ditemukan di TNKpS sebanyak 67 jenis yang meliputi data hasil penelitian dari Yayasan Terangi Tahun 2005 dan 2007 serta data kegiatan Penilaian Potensi Terumbu Karang (PPTK) Balai TNKpS Tahun 2009–2019 yang dilakukan setiap 2 tahun. Jenis terumbu karang yang paling banyak ditemukan di TNKpS berasal dari suku Acroporidae (23-29%) yang meliputi Acropora, Anacropora, Astreopora, Goniopora, Montipora dan Porites, selanjutnya oleh Fungiidae (16-17 %) dan Faviidae (12-17 %) (Estradivari et al. 2007). Selain itu, disebutkan juga oleh Suharsono (2008) bahwa bentuk pertumbuhan bercabang terumbu karang di Kepulauan Seribu didominasi oleh karang dari genus Acropora dan Montipora yang masuk dalam suku Acroporidae. Hasil analisis citra landsat tahun 2018, luas terumbu karang mencapai 2.166,048 hektar dengan rata-rata persentase tutupan karang hidup sebesar 25,00-49,99 %, termasuk kategori sedang (Database Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023).

Berdasarkan data dari DKPKP, 2020, terdapat 11 pulau berpenghuni yaitu: Pulau Sabira, Pulau Harapan, Pulau Kelapa Dua, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Pari, Pulau Lancang, dan Pulau Untung Jawa. Jika melihat dari Tabel 3.18 di atas, penurunan keanekaragaman hayati cenderung menurun pada pulau-pulau yang berpenghuni (ditandai dengan *). Hal ini menandakan bahwa kegiatan manusia berpengaruh buruk bagi keberadaan terumbu karang.

Tabel 3.19. Kondisi Tutupan Karang Di Wilayah Kepulauan Seribu

Gugus	Karakteristik Terumbu Karang	Permasalahan
1. Pulau Untung Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Terumbu karang rusak karena kondisi perairan sangat subur Pulau Untung Jawa ini didominasi oleh kategori pasir, karang lunak, karang mati yang sudah ditumbuhi alga dan patahan karang Berdasarkan bentuk pertumbuhan karang (<i>coral lifeform</i>), karang keras yang banyak dijumpai di perairan pulau Untung Jawa memiliki bentuk coral massive (CM) Terdapat 8 genus karang yang berada di perairan pulau Untung Jawa; genus karang <i>Platygyra</i> merupakan genus dengan persentase tertinggi untuk jenis karang, disusul dengan genus <i>Turbinaria</i> dan <i>Goniopora</i> yang memiliki persen penutupan tergolong relatif tinggi Persen penutupan karang keras terendah berasal dari genus <i>Porites</i>, <i>Montipora</i> dan <i>Favites</i> Komunitas ikan terumbu di Pulau Untung Jawa memiliki keanekaragaman yang sedang dengan nilai 2.05 dan keseragaman yang tinggi (0.83) Kepadatan ikan terumbu mencapai 70 hingga 80 ind/100 m² 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perikanan dan penggunaan jangkar yang kurang tepat; hal tersebut semakin diperparah dengan tingkat kekeruhan dan kesuburan perairan yang tinggi akibat lokasinya dekat dengan daratan utama Jakarta. Tingginya turbiditas dan nutrisi yang tinggi pada perairan sekitar Pulau Untung Jawa mengakibatkan kompetisi ruang lebih menguntungkan bagi alga dan karang lunak untuk tumbuh dibandingkan dengan karang.
2. Pulau Lancang a. Pulau Lancang Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Penutupan substrat dasar didominasi oleh kategori pasir, diikuti oleh kategori karang mati yang telah tertutupi alga dan patahan karang; mengacu pada PerMen LH No. 41 tahun 2001 maka kondisi terumbu karang di Pulau Lancang Kecil tergolong dalam kategori rusak Didominasi dengan bentuk pertumbuhan karang massive. Terdapat 10 genus karang; genus karang <i>Porites</i> adalah genus yang paling sering ditemukan sepanjang garis pengamatan; komposisi genus karang keras jenis lain di bawah 1% Keanekaragaman ikan termasuk sedang dengan nilai 2.97, keseragaman yang tinggi (0.94) dengan tingkat dominansi rendah (0.06) 	
b. Pulau Lancang Besar	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum kondisi terumbu karang kurang baik 	



	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat lima jenis bentuk pertumbuhan terumbu karang • Terdapat 11 genus karang keras; genus yang sering ditemukan adalah Montipora dan Porites; selanjutnya genus Echinopora, Favites, Lobophyllia dan Goniopora.; beberapa jenis karang Acropora juga ditemukan dalam lokasi pengamatan meskipun dalam nilai persentase yang sangat rendah • Indeks komunitas ikan (Shannon-wiener) menunjukkan nilai keanekaragaman yang mendekati nilai tinggi (2.95), namun masih cenderung memiliki keseragaman yang tinggi 	
3. Pulau Pari	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi terumbu karang tergolong dalam kategori buruk dengan substrat dasar perairan didominasi oleh tutupan kategori patahan karang • Terdapat lima jenis bentuk pertumbuhan karang keras yang didominasi oleh karang jamur, kemudian bentuk massive • Terdapat tujuh genus karang keras yang didominasi oleh genus Fungia, kemudian disusul dengan genus Acropora dan Montipora; genus karang yang memiliki nilai persentase rendah adalah genus Favites, Lobophyllia dan Alveopora • Keanekaragaman ikan terumbu tergolong sedang, dengan nilai indeks keseragaman sebesar 2.70 yang sudah mendekati batas nilai tinggi (>3) • Kepadatan jumlah individu ikan terumbu yang tercatat pada saat pengamatan di lapangan sebanyak 120 individu dengan jumlah spesies yang teridentifikasi lebih dari 40 spesies per 100 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak mendapat tekanan dari kegiatan antropogenik selama bertahun-tahun seperti aktivitas wisata bawah air yang kurang bertanggung jawab, penggunaan jangkar yang kurang tepat, dan <i>coral mining</i>. ▪ Tutupan karang hidup di lokasi pengamatan telah terganti dengan patahan karang (<i>rubble</i>), pasir dan alga ▪ Penurunan kestabilan komunitas ikan terumbu ditandai variasi warna dalam komunitas ikan terumbu tergolong rendah.
4. Pulau Payung	<ul style="list-style-type: none"> • Substrat dasar perairan P. Payung Besar didominasi oleh kategori patahan karang, karang mati yang sudah ditumbuhi alga, makro alga, karang hidup dan pasir • memiliki bentuk pertumbuhan sebanyak delapan dengan dominasi karang bergerak; hal ini menunjukkan terumbu karang sedang mengalami pemulihan. • Genus karang yang paling sering ditemukan berasal dari genus Porites dan Montipora selain itu juga terdapat genus Acropora, Fungia, Turbinaria, Goniopora, Favites dan Oxypora walaupun tidak banyak ditemukan • Indeks shannon-wiener menunjukkan nilai yang baik dengan kondisi komunitas ikan terumbu yang stabil; komunitas ikan terumbu 	

	<p>tuing memiliki keanekaragaman yang sedang (2.90), dengan keseragaman tinggi (0.93)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan ikan terumbu pada lokasi ini sekitar tergolong tinggi (200 individu/100 m²) dan diimbangi dengan kekayaan spesies 44 jenis 	
<p>5. Pulau Tidung</p> <p>a. Pulau Tidung Kecil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutupan substrat dasar di dominasi oleh patahan karang, pasir dan karang mati yang sudah tertutupi alga. • Tutupan karang hidup hanya sebesar 7,15%, berdasarkan PerMen LH No. 41 tahun 2001 termasuk kategori rusak • Bentuk pertumbuhan karang yang ditemukan yaitu <i>coral massive</i>, <i>Acropora</i> bercabang, karang bercabang, karang menggerak, karang lembaran, karang jamur dan karang submassive, dengan dominasi oleh karang massive • Terdapat 12 genus karang karas; umumnya jenis karang yang dijumpai adalah <i>Porites</i> dengan bentuk pertumbuhan karang massive • Indeks keanekaragaman ikan terumbu menunjukkan kategori sedang • Tidak ada jenis spesies ikan yang dominan • Kepadatan ikan mencapai 140 individu/100 m², dengan 41 spesies ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir ▪ Kerusakan disebabkan oleh perikanan yang kurang bertanggungjawab dan <i>coral mining</i>
<p>b. Pulau Tidung Besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah perlindungan laut, sehingga kondisi terumbu karang relatif baik • Substrat dasar berupa pasir, patahan karang, makro alga, dan biota lainnya • Karang keras memiliki bentuk pertumbuhan yang beragam dengan dominasi karang bercabang • Karang <i>Acropora</i> merupakan genus yang paling sering ditemukan kemudian disusul dengan Genus <i>Porites</i> • Indeks keanekaragaman ikan sebesar 2,9 • Kepadatan ikan terumbu sekitar 210 individu/100 m² 	

Sumber: Database Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

B. Ekosistem Padang Lamun

Ekosistem Padang Lamun termasuk dalam ekosistem perairan laut dangkal. Padang lamun yang tumbuh rapat dengan substratnya merupakan habitat bagi alga dan hewan laut lainnya. Tempat berlindung dan habitat dari beberapa organisme merupakan peran yang penting dari padang lamun. Pada setiap bagian lamun yaitu daun, rimpang dan akar akan memiliki perbedaan keragaman biota. Hal ini akan berdampak pada peningkatan keragaman dari fauna, walaupun kenyataannya fauna tersebut tidak secara langsung memakan lamun (Azkab,2014). Lebih lanjut Kikuchi (1974) mengatakan bahwa pada padang lamun yang

kepadatannya tinggi akan memperlambat gerakan air yang diakibatkan oleh arus dan gelombang. Hal ini menyebabkan tingginya keragaman fauna mysid, hydromedusa dan juvenil ikan yang memang menyukai daerah perairan tenang. Keadaan perairan yang tenang ini juga mengakibatkan mineral dan organik terlarut mudah mengendap di padang lamun.

Manfaat dan Fungsi Padang Lamun



Gambar 3.46. Manfaat dan Fungsi Padang Lamun

Sumber: KKP, 2020 (<https://kkp.go.id/djprl/artikel/5140-manfaat-dan-fungsi-padang-lamun>)

Perairan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Kepulauan Seribu memiliki sebaran padang lamun dengan kategori jarang hingga sedang. Pengamatan kondisi padang lamun berdasarkan Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, DKPKP dilakukan untuk 66 Pulau di Kepulauan Seribu. Sebagian Pulau juga teridentifikasi tidak memiliki tutupan padang lamun seperti Pulau Panjang Besar, Panjang Kecil, Karang Baronang, Bulat, Kayu Angin Bira, Kayu Angin Genteng, Macan Kecil, Kayu Angin Putri, Kayu Angin Melintang, Dua Timur dan Pulau Sabira.

Status kondisi lamun di Kepulauan Seribu ditentukan berdasarkan KepmenLH No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. Secara umum, padang lamun di Kepulauan Seribu memiliki status miskin dengan kondisi rusak dengan persentase tutupan total lamun kurang dari $\leq 29,9\%$. Hal ini menandakan bahwa kondisi padang lamun di Kepulauan Seribu sangatlah buruk sehingga diperlukan upaya konservasi ekosistem padang lamun yang cukup intensif.

Tabel 3.20. Tutupan dan Status Kondisi Padang Lamun di Kepulauan Seribu

No	Pulau	Tutupan Total Lamun %		Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004
		2018	2019	
1	Gugus Pulau Pari*	38,95		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
2	a. Pulau Tidung Besar*	21,32		Jarang. Dengan status miskin
	b. Pulau Tidung Kecil*	22,12		Jarang. Dengan status miskin
3	Pulau Payung*	41,62		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
4	Pulau Pramuka*	34,55		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
5	Gosong Pramuka*	13,03		Jarang. Dengan status miskin
6	Pulau Karya	42,61		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
7	Pulau Panggang*	38,64		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
8	Pulau Harapan*	29,09		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
9	Pulau Kelapa	13,86		Jarang. Dengan status miskin
10	Pulau Panjang*	27,42		Jarang. Dengan status miskin
11	Pulau Panjang Besar			Tidak ditemukan padang lamun
12	Panjang Kecil			Tidak ditemukan padang lamun
13	Pamegaran		61,6	Padat. Dengan status sehat



No	Pulau	Tutupan Total Lamun %		Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004
		2018	2019	
14	Karang Baronang			Tidak ditemukan padang lamun
15	Bulat			Tidak ditemukan padang lamun
16	Bira Kecil		45,8	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
17	Kuburan Cina		12	Jarang. Dengan status miskin
18	Bira Besar		37	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
19	Kayu Angin Bira			Tidak ditemukan padang lamun
20	Kayu Angin Genteng			Tidak ditemukan padang lamun
21	Genteng Kecil		12,6	Jarang. Dengan status miskin
22	Genteng Besar		23,4	Jarang. Dengan status miskin
23	Macan Besar		20,6	Jarang. Dengan status miskin
24	Macan Kecil			Tidak ditemukan padang lamun
25	Macan Gundul		20,6	Jarang. Dengan status miskin
26	Putri Barat		33,6	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
27	Putri Timur		9,6	Jarang. Dengan status miskin
28	Tongkeng		4	Jarang. Dengan status miskin
29	Kayu Angin Putri			Tidak ditemukan padang lamun
30	Panjang		5	Jarang. Dengan status miskin
31	Melintang Kecil		15	Jarang. Dengan status miskin
32	Kayu Angin Melintang			Tidak ditemukan padang lamun
33	Melintang Besar		7,8	Jarang. Dengan status miskin
34	Sepa Timur		35,6	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
35	Sepa Barat		22,4	Jarang. Dengan status miskin
36	Papatheo		67	Padat. Dengan status sehat
37	Pelangi		2	Jarang. Dengan status miskin
38	Perak		16	Jarang. Dengan status miskin
39	Jukung		3,2	Jarang. Dengan status miskin
40	Melinjo		0,8	Jarang. Dengan status miskin
41	Cina		0,2	Jarang. Dengan status miskin
42	Semut Besar		0,2	Jarang. Dengan status miskin
43	Semut Kecil		52,5	Padat. Dengan status sehat
44	Kelor Barat		3,6	Jarang. Dengan status miskin
45	Kelor Timur		2	Jarang. Dengan status miskin
46	Satu		18,8	Jarang. Dengan status miskin
47	Yu Barat		2,8	Jarang. Dengan status miskin
48	Yu Timur		2	Jarang. Dengan status miskin
49	Karang			Jarang. Dengan status miskin
50	Pantara Barat		3,2	Jarang. Dengan status miskin
51	Pantara Timur		2,8	Jarang. Dengan status miskin
52	Bunder		2,2	Jarang. Dengan status miskin
53	Kapas		2	Jarang. Dengan status miskin
54	Lipan		1,6	Jarang. Dengan status miskin
55	Sebaru Kecil		2	Jarang. Dengan status miskin
56	Nyamplung		2,8	Jarang. Dengan status miskin
57	Sebaru Besar		30,2	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
58	Rengat		2	Jarang. Dengan status miskin
59	Jagung		5,8	Jarang. Dengan status miskin
60	Pateloran Barat		3,6	Jarang. Dengan status miskin
61	Penjaliran Barat		2	Jarang. Dengan status miskin
62	Penjaliran Timur		2,6	Jarang. Dengan status miskin



No	Pulau	Tutupan Total Lamun %		Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004
		2018	2019	
63	Pateloran Timur		3	Jarang. Dengan status miskin
64	Dua Barat		4	Jarang. Dengan status miskin
65	Dua Timur			Tidak ditemukan padang lamun
66	Pulau Sabira*			Tidak ditemukan padang lamun

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Melihat kondisi ekosistem lamun yang secara umum buruk, tentunya akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, termasuk produksi ikan dan hewan laut lainnya sebagai sumber mata pencaharian nelayan. Hal ini juga berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di wilayah perairan. Oleh karenanya, diperlukan beberapa upaya dalam mempertahankan dan memperbaiki ekosistem lamun melalui:

1. Rehabilitasi ekosistem lamun melalui metode yang sesuai, seperti pembibitan/pembenihan (seeding), sprig dengan jangkar, plug, dll..
2. Membuat Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) untuk ekosistem lamun.
3. Mengatur pemanfaatan di sekitar ekosistem lamun, seperti budidaya rumput laut, tambat kapal, karamba ikan, wisata, lalu lintas perahu, dll..

Berdasarkan database keanekaragaman hayati Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, terdapat update informasi terkini terkait kondisi padang lamun di beberapa pulau di Kepulauan Seribu dengan Indeks Kondisi Kesehatan Ekosistem Lamun (IKEL) termasuk kategori sangat buruk sampai sedang, sedangkan menurut KEPMEN LH No.200 Tahun 2004 termasuk kategori miskin sampai kaya. Berikut kondisi pada lamun di beberapa pulau di Kepulauan Seribu.

Tabel 3.21. Update Kondisi Terkini Padang Lamun di Kepulauan Seribu

Stasiun	Koordinat	Jenis Lamun	Tutupan Lamun	Status Ekosistem Lamun ^{a)}	Status Ekosistem Lamun ^{b)}
P. Untung Jawa	E:106°42'39" S: 5°58'37"	Th	6	Sangat buruk	Miskin
P. Lancang Kecil	E:106°35'29.64" S: 5°56'1.59"	Ea, Th	43	Buruk	Kurang kaya
P. Lancang Besar	E:106°35'15.79" S: 5°56'6.76"	Ea, Th, Cr, Ho, Si	72	Sedang	Kaya
P. Pari	E:106°36'47.29" S: 5°51'45.48"	Ea, Th, Cr	55	Buruk	Kurang kaya
P. Payung	E:106°33'10.63" S: 5°49'21.18"	Ea, Th, Cr, Ho	42	Buruk	Kurang kaya
P. Tidung Kecil	E:106°31'23.38" S: 5°48'15.06"	Ea, Th, Cr, Ho	45	Sedang	Kurang kaya
P. Tidung Besar	E:106°30'39.5" S: 5°48'29.93"	Ea, Th, Cr, Ho	68	Sedang	Kaya

Keterangan: ^{a)} kategori berdasarkan IKEL, ^{b)} kategori berdasarkan KEPMEN LH No. 200 Tahun 2004;

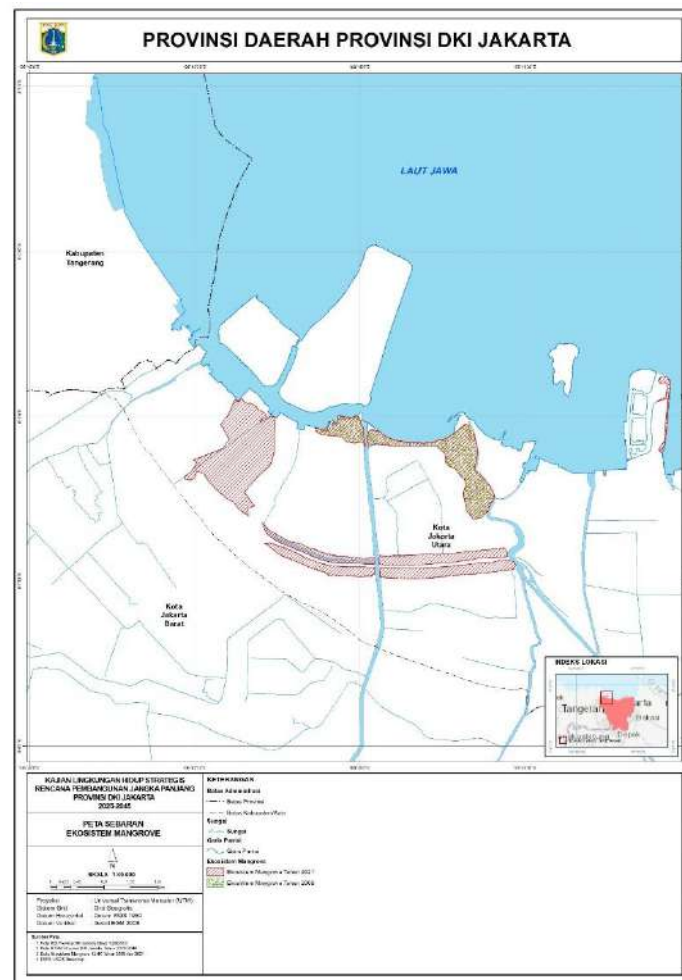
Cr = *Cymodocea rotundata*, Ea = *Enhalus acoroides*, Ho = *Halophila ovalis*, Si = *Syringodium Isoetifolium*, Th = *Thalassia hemprichii*

Sumber: Database Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

C. Ekosistem Mangrove

Ekosistem Mangrove sebagai ekosistem daratan pesisir di wilayah DKI Jakarta memegang peranan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menopang daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di wilayah ekosistem mangrove dapat dilihat dari kecenderungan

perubahan tutupan lahan hutan mangrove dalam periode waktu tertentu. Dalam analisis ini, digunakan peta penutup lahan skala 1:250.000 pada tahun 2009 dan 2021 dari KLHK untuk melihat perubahan yang terjadi pada hutan mangrove.



Gambar 3.47. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove 2009 – 2018.

Sumber: Analisis lanjutan dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019

Secara umum, sebaran tutupan hutan mangrove berada pada Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Gambar 3.47 di atas hanya menunjukkan hutan mangrove pada Kecamatan Penjaringan, karena berdasarkan peta penutup lahan yang digunakan (skala 1:250.000), karena berdasarkan skala peta, ekosistem mangrove dapat mudah dilihat pada Kecamatan Penjaringan. Berikut ini merupakan perubahan tutupan lahan hutan mangrove di DKI Jakarta.

Tabel 3.22. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove di DKI Jakarta 2009 – 2018.

Kab/Kota Administratif/ Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)	
	2009	2021
Jakarta Utara		
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	101,11	358,08
Kepulauan Seribu		
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	169,77	149,84
Total Tutupan Mangrove	270.88	507.92

Sumber: Analisis lanjutan dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019

Dalam kurun waktu 2009 – 2021, terjadi perubahan pada luasan hutan mangrove di Jakarta Utara yang cenderung naik dengan luasan 358.08 Ha. Hal ini diasumsikan terjadi reforestasi lahan mangrove sebesar 256.97 Ha. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu selama 12 tahun cenderung mengalami penurunan sebesar 19.93 Ha. Perubahan ini tentunya perlu dilihat lebih rinci mengingat bahwa peta penutup lahan yang digunakan berada pada skala besar, sementara wilayah Kepulauan Seribu dengan banyak pulau-pulau kecil memerlukan identifikasi penutup lahan yang lebih rinci untuk melihat perubahan yang terjadi. Merujuk pada data kondisi hutan mangrove tahun 2019 di Kepulauan Seribu, ekosistem hutan mangrove terbagi menjadi 3 kategori yaitu jarang, sedang dan lebat. Berdasarkan 3 kategori ini dapat dinilai bagaimana kondisi hutan mangrove yang di Kepulauan Seribu. Tabel di bawah ini menjelaskan kondisi hutan mangrove di 56 pulau yang diidentifikasi di Kepulauan Seribu.

Tabel 3.23. Luasan Kategori dan Total Mangrove Kepulauan Seribu 2019

No	Pulau	Kategori (ha)			Total Ha
		Jarang	Sedang	Lebat	
1	Pulau Panjang Besar	0,22	0,01	0,04	0,27
2	Panjang Kecil	0,02	-	-	0,02
3	Pamegaran	1,54	0,17	0,51	2,22
4	Karang Baronang	-	-	-	-
5	Bulat	0,02	0,01	0,02	0,04
6	Bira Kecil	-	-	-	-
7	Kuburan Cina	-	-	-	-
8	Bira Besar	0,03	0,02	0,03	0,08
9	Kayu Angin Bira	-	-	-	-
10	Kayu Angin Genteng	-	-	-	-
11	Genteng Kecil	-	-	-	-
12	Genteng Besar	-	-	-	-
13	Macan Besar	-	-	-	-
14	Macan Kecil	0,02	0,01	0,01	0,03
15	Macan Gundul	0,13	0,02	0,01	0,16
16	Putri Barat	1,11	0,18	0,52	1,8
17	Putri Timur	-	-	-	-
18	Tongkeng	0,36	0,02	0,01	0,39
19	Kayu Angin Putri	-	-	-	-
20	Panjang	-	-	-	-
21	Melintang Kecil	0,57	0,17	1,14	1,88
22	Kayu Angin Melintang	0,02	-	-	0,02
23	Melintang Besar	0,35	0,1	0,98	1,44
24	Sepa Timur	-	-	-	-
25	Sepa Barat	-	-	-	-
26	Papatheo	0,93	0,01	-	0,94
27	Pelangi	-	-	-	-
28	Perak	-	-	-	-
29	Jukung	-	-	-	-
30	Melinjo	0,04	-	-	0,04
31	Cina	-	-	-	-
32	Semut Besar	-	-	-	-
33	Semut Kecil	0,49	-	-	0,49
34	Kelor Barat	-	-	-	-
35	Kelor Timur	-	-	-	-
36	Satu	1,63	0,16	0,77	2,56
37	Yu Barat	0,03	0,01	0,01	0,05
38	Yu Timur	-	-	-	-
39	Karang	-	-	-	-
40	Pantara Barat	0,26	0,06	0,13	0,44
41	Pantara Timur	-	-	-	-
42	Bunder	0,17	0,09	0,01	0,26
43	Kapas	0,01	0	0	0,01

No	Pulau	Kategori (ha)			Total Ha
		Jarang	Sedang	Lebat	
44	Lipan	0,21	0	0	0,21
45	Sebaru Kecil	0,19	0,1	0,56	0,84
46	Nyemplung	0,04	0,01	0,01	0,06
47	Sebaru Besar	3,74	0,78	6,56	11,08
48	Rengat	0,43	0,02	0,03	0,48
49	Jagung	0,38	0,06	0,23	0,67
50	Pateloran Barat	0,03	0,2	0,03	0,27
51	Penjaliran Barat	1,84	0,42	5,18	7,44
52	Penjaliran Timur	3,14	0,46	3,2	6,8
53	Pateloran Timur	-	-	-	-
54	Dua Barat	0,33	0,1	0	0,43
55	Dua Timur	0,46	0,63	0,02	1,12
56	Pulau Sabira	0,13	0,23	0,39	0,75
Total		18,87	4,05	20,4	43,29
%		44%	9%	47%	100%

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pada Tabel 3.23 terlihat bahwa total tutupan mangrove pada pulau-pulau yang teridentifikasi hanya sekitar 43,29 Ha dimana kategori yang dominan adalah mangrove lebat (47%) dan jarang (44%). Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya kondisi mangrove di Kepulauan Seribu dalam kondisi yang cukup baik namun rentan terhadap kerusakan.

3.2.6 Area Bernilai Konservasi Tinggi

Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global. Sedangkan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi adalah suatu area yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT). (Konsorsium Revisi High Conservation Value Toolkit Indonesia, 2008).



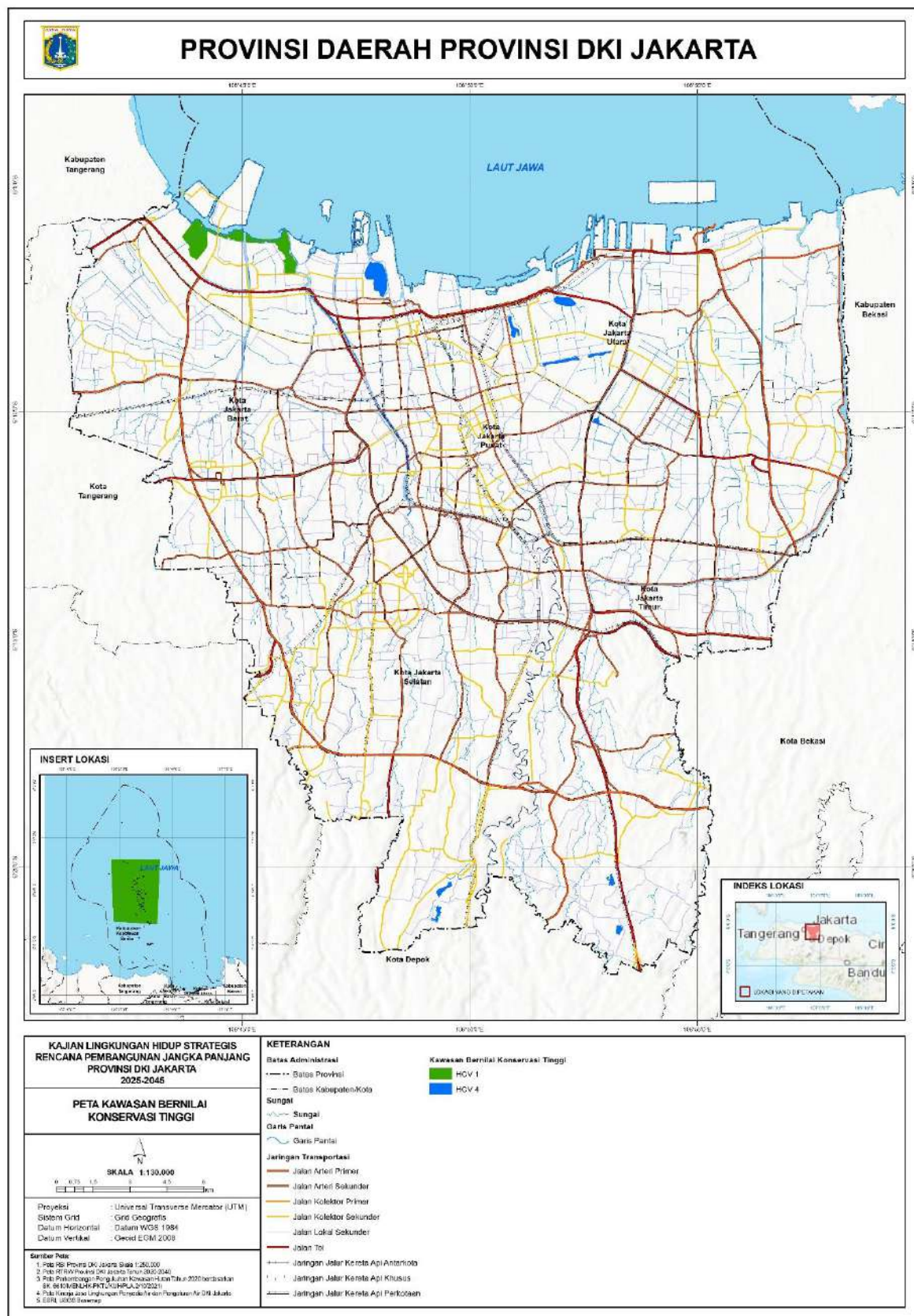
Gambar 3.48. Nilai – Nilai yang Terkandung Dalam Sebuah Kawasan dan Dianggap Sangat Penting Disebut Nilai Konservasi Tinggi.

Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan Area NKT adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Maka dari itu, pengelolaan atau manajemen yang semakin baik adalah dengan tetap mengacu pada tujuan tersebut diatas. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi yang telah diidentifikasi kemudian dikelola dan

dipelihara sehingga Nilai-Nilai Konservasi yang terdapat didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula. Dalam melakukan penilaian NKT terhadap suatu kawasan, ada enam kategori nilai yang digunakan sesuai dengan ketentuan dari *High Conservation Value Resource Network*, yaitu:

- NKT 1 Keanekaragaman hayati
- NKT 2 Ekosistem dan mosaik pada level lanskap
- NKT 3 Ekosistem dan habitat langka atau terancam punah
- NKT 4 Jasa Ekosistem
- NKT 5 Kebutuhan Masyarakat
- NKT 6 Nilai Kultural

Berdasarkan hasil analisis dari data yang tersedia, wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kawasan atau area yang bernilai konservasi tinggi. Area NKT yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah area NKT 1 yang merupakan suatu area yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan NKT 4 yang merupakan suatu area yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan yang tinggi. Pada area yang memiliki NKT 1 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki status sebagai kawasan konservasi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi baik pada ekosistem darat dan juga laut. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan luasan total 104,702.3 Ha. Sedangkan, untuk area yang memiliki NKT 4 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi terhadap penyedia dan pengaturan air, dengan luasan total 309 Ha.



Gambar 3.49. Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan data DIKPLHD tahun 2020, pada kawasan yang memiliki NKT 1 di DKI Jakarta memiliki potensi KEHATI tinggi. Potensi tersebut antara lain, memiliki spesies dengan status dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 sebanyak 71 spesies dan status dilindungi berdasarkan IUCN sebanyak 36 spesies. Selain itu, area NKT 1 juga berfungsi sebagai tempat persinggahan spesies migrasi Asia Timur – Australia dan berfungsi atau berperan sebagai koridor alami berbagai tipe ekosistem. Secara rinci potensi KEHATI pada wilayah NKT 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24 Potensi KEHATI DKI Jakarta

NO	Keterangan	Suaka Margasatwa Pulau rambut EL 6.3.1	CA P.BOKOR EL 6.3.2	Suaka Margasatwa Muara Angke	Taman wisata alam angke kapuk
A	Luas	90 ha	18 ha	22,05 ha	99,82 ha
B	Spesies endemik/ dilindungi				
1	Ramsar site	Ramsar site			
2	Status dilindungi PP 7/1999	22 spesies	5 spesies	26 spesies	16 spesies
3	IUCN	Near Threatened 24 spesies Vulnerable 1 spesies Endangered 1 spesies Critically Endangered 1 spesies	Near Threatened 5 spesies Vulnerable 2 spesies		2 spesies
4	CITES	Appendix I 3 spesies Appendix II 3 spesies	Appendix II 4 spesies	Appendix I 1 spesies Appendix II 7 spesies Appendix III 1 spesies	
C	TEMPAT PERSINGGAHAN SPECIES MIGRASI ASIA TIMUR - AUSTRALIA	16 spesies	2 spesies	15 spesies	3 spesies
D	Tipe ekosistem yang berfungsi atau berperan sebagai koridor alami berbagai	Hutan mangrove Hutan dataran rendah Hutan pantai	Hutan pantai Hutan mangrove Hutan dataran rendah	Hutan mangrove Rawa	Hutan mangrove
1	Flora	159 spesies, 31 tumbuhan eksotik	83 spesies (4 belum teridentifikasi), 10 spesies lainnya eksotik	144 spesies, 61 spesies eksotik	160 spesies, 87 eksotik
2	Fauna	91 spesies : 71 sp aves, 1 sp mamalia, 10 sp reptil, dan 9 sp biota laut	38 spesies : 34 sp aves, 1 sp primata, 2 sp reptil	142 spesies : 120 sp burung, 9 sp mamalia, 13 sp reptil dan amfibi	55 spesies : 48 sp aves, 3 sp mamalia, 4 sp reptil

Sumber: DIKPLHD, 2020

Sedangkan untuk kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu yang merupakan salah satu dari 6 Taman Nasional laut di Indonesia dan menjadi satu-satunya Taman Nasional yang terletak di Ibukota Negara, memiliki potensi KEHATI tinggi yaitu pada ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi dan memiliki konektivitas secara fisik maupun biologi. Padang lamun berfungsi sebagai penyaring polutan dari daratan sebelum masuk ke ekosistem terumbu karang. Juga menjadi habitat komoditas hasil laut bernilai ekonomi tinggi seperti ikan baronang dan rajungan. Secara fisik ekosistem mangrove berfungsi sebagai

penahan laju sedimentasi dari daratan, sehingga menjaga kejernihan air. Secara biologi, konektivitas ketiga ekosistem dapat dilihat dari habitat sebagai *nursery ground*. Hasil pengamatan Jaxion-Ham et al. (2012) menyimpulkan bahwa ikan juvenil banyak dijumpai di ekosistem lamun dan mangrove, sementara ikan dewasa berada di terumbu karang. Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki luas tutupan mangrove sebesar 51,85 Ha, padang lamun seluas 147,26 Ha dan terumbu karang seluas 321,43 Ha.

Untuk wilayah NKT 4 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup tinggi sebagai penyedia dan pengaturan air. Mengingat isu terhadap ketersediaan air bersih di Jakarta sangat tinggi, sehingga wilayah-wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi, memiliki nilai konservasi tinggi karena fungsi dan peran yang penting untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup.

3.3 Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB

3.3.1 Pertumbuhan PDRB

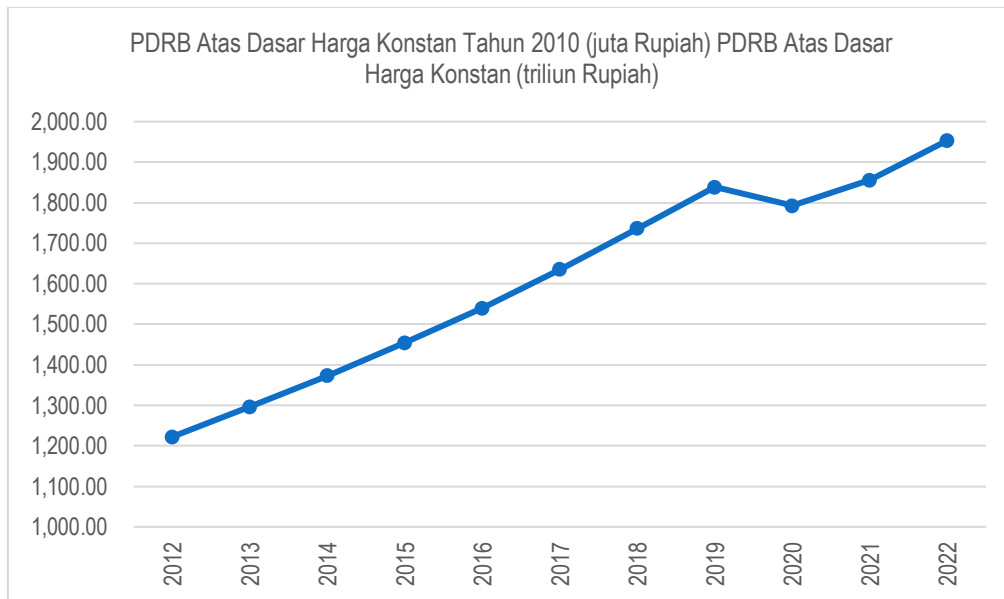
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.25 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta Rupiah)
1.	2012	1.222.527.924
2.	2013	1.296.694.573
3.	2014	1.373.389.129
4.	2015	1.454.563.847
5.	2016	1.539.916.881
6.	2017	1.635.359.147
7.	2018	1.736.291.045
8.	2019	1.838.500.708
9.	2020	1.792.794.590
10	2021	1.856.075.820
11	2022	1.953.455.850

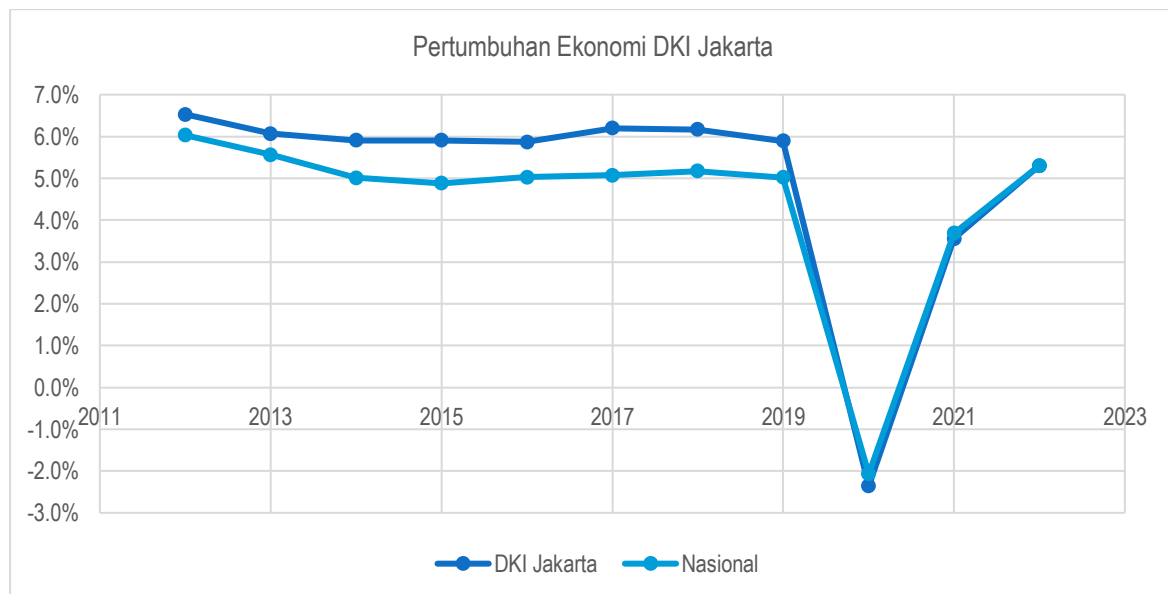
Sumber: BPS 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.222 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 1.953 triliun pada tahun 2022 (ADHK). Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun terutama pada kurun 2019-2020 akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.50. PDRB ADHK 2012 - 2022

Sejalan dengan tren PDRB, pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta yang cenderung konstan pada tahun 2012 hingga 2019 yaitu diangka 5 – 6,5%. Namun demikian terjadi penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID -19 mencapai – 2,4%. Perlahan ekonomi Jakarta mulai tumbuh dan mencapai angka pertumbuhan 5.3% pada tahun 2022.



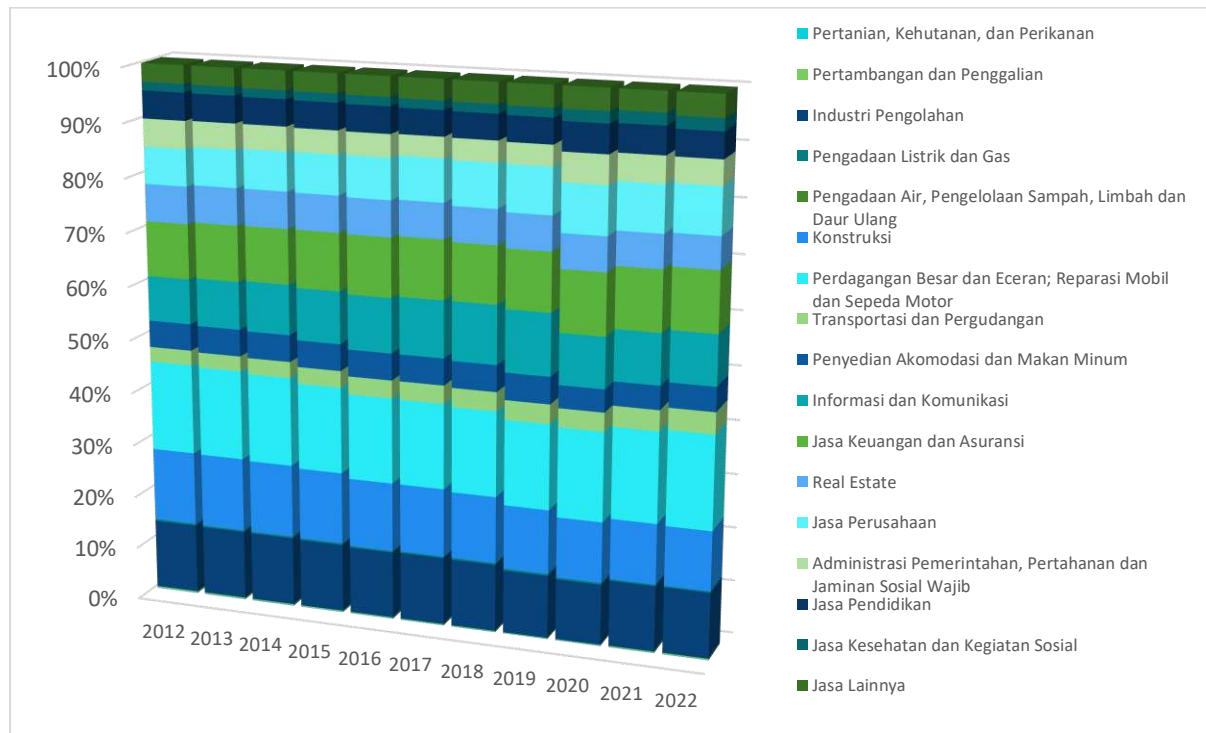
Gambar 3.51. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2012 - 2022

Sumber: Evaluasi RPJPD 2005-2025

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan 3 industri terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontribusi berada pada kisaran 16% selama periode 2012-2020. Sektor ekonomi yang mengalami tren peningkatan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari enam sektor tersebut peningkatan tren paling signifikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi.

Gambar di bawah ini juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dimana perekonomian Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; industri pengolahan, informasi

dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut.



Gambar 3.52 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPS, 2023

3.3.2 Pendapatan Daerah

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Data Pendapatan tahun 2022 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar 67,7%, Pendapatan Transfer sebesar 28% dan sisanya adalah pendapatan hibah yang merupakan salah satu pendapatan lain yang sah. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta adalah berasal dari Pajak Daerah yaitu berkisar 60%.

Berkaitan dengan kedudukannya sebagai ibukota negara, DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus tersebut memperoleh anggaran yang dianggarkan dalam APBN. Dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan ibukota negara tersebut, ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana dari APBN tersebut merupakan anggaran yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta yang dalam penyusunan RAPBN pengalokasiannya dilakukan melalui kementerian/Lembaga terkait. Dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus sebagai ibukota negara tidak akan diperoleh Pemerintah DKI Jakarta apabila fungsi khusus tersebut dicabut karena adanya pemindahan ibukota.

Tabel 3.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	2022
-------------------	------



	Anggaran	Realisasi
1	2	3
I. Pendapatan/Revenues	77.746,03	67.287,72
A. Pendapatan Asli Daerah/		
Pure Regional Income	55.612,22	45.609,75
1. Pajak Daerah/Regional Tax	45.700,00	40.273,23
2. Retribusi Daerah/		
Regional Retribution	806,88	376,98
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan/		
Profit from BUMD and Others	793,74	402,42
4. Lain-lain (PAD Yang Sah)/		
Others	8.311,60	4.557,11
B. Pendapatan Transfer/		
Transfer from Central Government	17.226,48	18.861,62
1. Bagi Hasil Pajak/ Tax Revenue	13.920,65	16.010,82
2. Bagi Hasil Sumber Daya/		
NonTax Revenue	42,49	51,27
3. Dana Alokasi Khusus	3.233,66	2.769,85
4. Dana Penyesuaian	29,68	29,68
C. Lain-lain Pendapatan yang sah	4.907,33	2.816,34
1. Pendapatan Hibah	4.907,33	2.816,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Local Government Board Fiscal Management of DKI Jakarta Province

Untuk tahun Anggaran 2023, APBD DKI Jakarta sudah disahkan senilai Rp 83,7 triliun. Alokasi anggaran akan digunakan untuk 3 (tiga) program prioritas di tahun ini adalah 1) Penanganan banjir; 2) penanganan kemacetan dan 3)antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi (resesi). Alokasi anggaran untuk ketiga program tersebut adalah berkisar 41,27 persen.

3.4 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

Pembangunan segala sektor di DKI Jakarta tidak terlepas dari peran para pihak. Identifikasi para pihak dilakukan dengan melihat kontribusinya pada pencapaian TPB, hal ini juga tercantum dalam laporan pencapaian TPB. Tabel di bawah ini menunjukkan kontribusi mitra pembangunan ke dalam indikator TPB.

Tabel 3.27 Kontribusi Mitra Pembangunan

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
1. UN Habitat	TPB 16, indikator 16.1.2.(a), TPB 11, indikator 11.7.1(a)
2. AUSAID - MAMPU	TPB 16, indikator 16.2.1.(b) TPB 5, indikator 5.2.2.* TPB 16, indikator 16.3.1.(a), 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.7.2.(a) TPB 10, indikator 10.3.1.(c)
3. MAMPU	TPB 10, indikator 10.4.1.(b) TPB 1 TPB 8, indikator 8.3.1*, 8.3.1.(c)
4. USAID - MAJU	TPB 16, indikator 16.2.1.(b) TPB 16, indikator 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.7.2.(a)



Mitra	Kontribusi Capaian TPB
	TPB 10, indikator 10.3.1.(c) TPB 5, indikator 5.2.2.*
5. European Union	TPB 16, indikator 16.6.1.(d) TPB 11, indikator 11.3.2.(a)
6. IDLO	TPB 16, indikator 16.10.1.(b)
7. LBH Apik	TPB 16, TPB 10 indikator 10.3.1.(c) TPB 5, indikator 5.2.2.* TPB 16, indikator 16.10.1.(b) TPB 5, indikator 5.2.2.*
8. Yayasan Karina	TPB 12, indikator 12.5.1.(a), TPB 11, indikator 11.6.1.(a), TPB 8, indikator 8.3.1.(b) TPB 8, indikator 8.3.1.(b) TPB 2, indikator 2.1.1* TPB 1 TPB 11, indikator 11.5.1.(b) TPB 6, indikator 6.1.1.(a), TPB 1 1.4.1 (d) TPB 6, indikator 6.2.1.(c) TPB 4, indikator 4.4.1*
9. InsWa	TPB 12, indikator 12.5.1.(a) TPB 11, indikator 11.6.1.(a)
10. UCLG	TPB 16 TPB 11, indikator 11.5.1.(b)
11. RCUS Goetheus Institute	TPB 11, indikator 11.1.1(a) TPB 11, indikator 11.3.2.(a) TPB 11, indikator 11.6.1.(a)
12. FES	TPB 11, indikator 11.1.1(a)
13. Yayasan Plan International	TPB 16, indikator 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.3.2.(a) TPB 5, indikator 5.2.1* TPB 8, indikator 8.6.1*
14. PPNI	TPB 11, indikator 11.5.1*, TPB 3, TPB 2, TPB 1
15. Platform Muria	TPB 11, TPB 6, TPB 2, TPB 1 TPB 4, indikator 4.4.1*
16. Rumah Zakat	TPB 10, indikator 10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.2.1*, TPB 1 TPB 5, indikator 5.6.1.(a), TPB 3, 3.7.1.(a), TPB 1 indikator 1.4.1.(c) TPB 4, indikator 4.1.1.(d), TPB 1 TPB 2, indikator 2.1.1.(a) TPB 1, indikator 1.4.1.(a) TPB 1, indikator 1.4.1.(b)
17. Komunitas Raksasa	TPB 8, indikator 8.2.1*
18. Armor Indonesia	TPB 8, indikator 8.2.1*
19. Accenture	TPB 8, indikator 8.6.1*
20. PAM Jaya	TPB 6, indikator 6.1.1.(a) TPB 6, indikator 6.1.1.(b) TPB 6, indikator 6.1.1.(c), TPB 1, 1.4.1.(d)
21. GIZ	TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e)
22. Jakarta Berketahanan	TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e)
23. Youth Coalition for Girls	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
24. Google	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
25. ECPAT	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
26. ICT Watch	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
27. Sejiwa	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
28. Yayasan Tunas Muda Care	TPB 4, indikator 4.1.1*, TPB 1
29. YPAC	TPB 4, indikator 4.a.1*



Mitra	Kontribusi Capaian TPB
	TPB 1
30. IGI	TPB 4, indikator 4.c.1*
31. PGRI	TPB 4, indikator 4.c.1*
32. IBI bersama masyarakat	TPB 3, indikator 3.1.1*, 3.2.2.(b) TPB 2, indikator 2.1.1.(a), 2.2.2* TPB 1
33. IPPI	TPB 3, indikator 3.3.1.(a)
34. Smoke Jakarta	TPB 3, indikator 3.3.1.(a), 3.a.1*
35. ITMI	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
36. ITMI	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
37. Yayasan Mitra Netra	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
38. YDMI & Mitra	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
39. Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)

Sumber: SDGs DKI Jakarta, 2020



BAB 4

ANALISIS ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Proses Identifikasi dan
Perumusan Isu PB

Identifikasi dan Perumusan Isu PB
dengan Pendekatan Teknokratik

Identifikasi dan Perumusan Isu PB
dengan Pendekatan Partisipatif

Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh

BAB 4

ANALISIS ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

“Bab ini berisi proses identifikasi dan perumusan isu PB, identifikasi dan perumusan isu PB dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif, serta kerangka kajian isu PB strategis dan kajian pengaruh.”

4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan pendekatan deliberatif/partisipatif yaitu melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk menjamin agar proses ini menghasilkan daftar isu-isu pembangunan yang komprehensif serta rumusan isu strategis yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Telaah literatur meliputi: (a) status pencapaian target indikator pembangunan berkelanjutan (TPB), (b) dokumen terkait kondisi lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan (c) dokumen-dokumen perencanaan strategis. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari ke tiga kategori dokumen perencanaan strategis tersebut (daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan) kemudian ditelaah dengan menggunakan metode analisis substansi (*content analysis*) untuk memperoleh daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan strategis.

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data terkait status pencapaian target dari 253 indikator pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Data status pencapaian target 253 indikator TPB ini kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang indikator-indikator yang pencapaian targetnya perlu diberi perhatian khusus untuk periode lima tahun ke depan.

Selain itu juga dilakukan upaya identifikasi isu pembangunan berkelanjutan melalui telaah kondisi lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama yang terkait dengan: (a) daya dukung dan daya tampung LH; (b) ketahanan keanekaragaman hayati; (c) dampak dan risiko LH; (d) layanan dan jasa ekosistem; (e) pemanfaatan dan efisiensi SDA; dan (f) kerentanan dan adaptasi “bencana”, termasuk perubahan iklim.

Upaya identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah menelaah dokumen-dokumen perencanaan strategis yang relevan dengan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi dokumen perencanaan strategis yang berskala nasional, regional (Jabodetabekpunjur), dan provinsi. Secara keseluruhan ada tujuh dokumen perencanaan strategis yang ditelaah. Daftar isu-isu pembangunan ini ditelaah lebih lanjut dengan mencermati perbedaan dan persamaan agar dapat disintesis menjadi daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.

Proses dan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf di atas kemudian dipaparkan dalam satu *Focus Group Discussion* (FGD) dengan undangan sebanyak 50 (lima puluh) peserta dari berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk pengayaan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan penajaman perumusan isu pembangunan strategis. Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari proses FGD ini selanjutnya divisualkan dengan menggunakan Aplikasi *Gephi* untuk memperlihatkan saling keterkaitan antar isu strategis maupun antar isu-isu pembangunan terkait lainnya.

Hasil pengayaan daftar isu dan penajaman perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari proses FGD kemudian dibawa ke forum Konsultasi Publik, dengan undangan sebanyak 100 (seratus) peserta dari berbagai kelompok kepentingan mendapatkan umpan balik dari publik. Umpan balik dan masukan dari Konsultasi Publik digunakan untuk finalisasi daftar dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis.



Gambar 4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

4.2 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Teknokratik

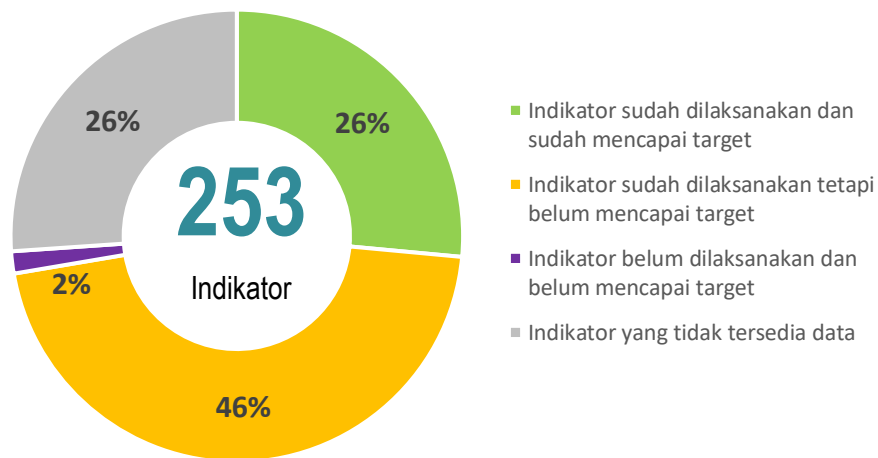
4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Gambaran Umum Capaian TPB

Dasar pemikiran utama (*layer 1*) dalam upaya mengidentifikasi isu pembangunan dari status pencapaian target indikator-indikator TPB meliputi dua pertimbangan. Pertama, indikator-indikator TPB yang jarak capaian (*gap*) terhadap target yang ditetapkan masih lebar, maka indikator-indikator tersebut dijadikan dasar dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan. Semakin lebar jarak antara capaian dengan target, maka semakin besar potensi untuk dianggap sebagai isu pembangunan berkelanjutan. Kedua, indikator-indikator TPB yang tidak ada data capaiannya dianggap merupakan indikator untuk dipertimbangkan dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan. Semakin besar persentase ketiadaan data, maka semakin besar pula potensi untuk dijadikan isu pembangunan berkelanjutan.

Sesuai arahan Permendagri No. 7/2018, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menelaah status pencapaian target indikator TPB untuk menemukan indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus agar targetnya tercapai dalam periode perencanaan berikutnya. Analisis dilakukan dengan 253 indikator TPB sesuai dengan Metadata TPB Edisi I. Pemilihan 253 indikator TPB sesuai dengan kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang secara otonom juga memiliki sebagian kewenangan Kabupaten/Kota. Data capaian diperoleh dari Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahun melakukan evaluasi capaian TPB, sebagaimana terdapat pada Lampiran 9.

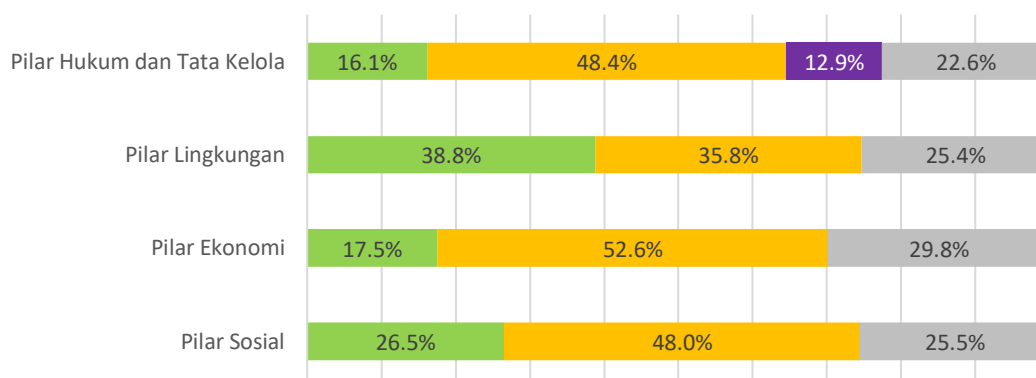
Status capaian TPB sesuai dengan Pedoman Pembuatan KLHS RPJMD dari Kemendagri 2022 dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu:

- 1) Indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target;
- 2) Indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target;
- 3) Indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target;
- 4) Indikator yang tidak tersedia data.



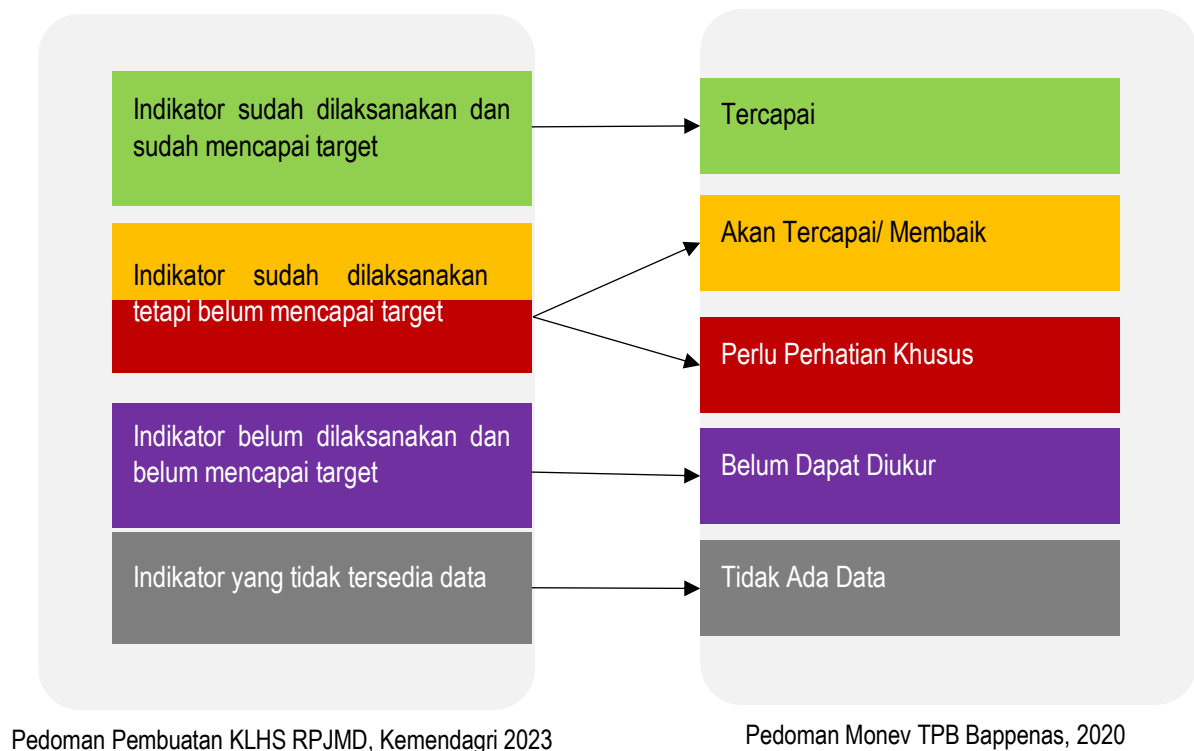
Gambar 4.2 Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta

Berdasarkan pencapaian dari masing-masing target TPB yang ditunjukkan pada diagram di atas, 26% indikator atau 67 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 46% indikator atau 116 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2% indikator atau 4 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 26% indikator atau 66 indikator tidak tersedia data. Secara umum, gambaran capaian TPB untuk setiap pilar dijabarkan pada gambar di bawah ini. Pilar lingkungan memiliki persentase indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target terbesar dibanding pilar lainnya yaitu sebesar 38,8%. Selain itu pilar hukum dan tata kelola memiliki indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 12,9%.



Gambar 4.3 Capaian Tiap Pilar

Setelah itu untuk analisis selanjutnya, dilakukan pengategorisasian capaian TPB berdasarkan Pedoman Monev TPB Bappenas yang menjadi acuan Laporan TPB provinsi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan kategori yang ada pada kedua pedoman.



Gambar 4.4. Persandingan Kategori Status Capaian TPB

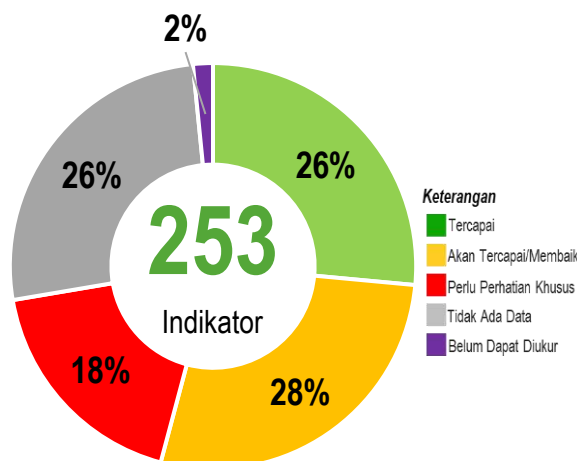
Berdasarkan persandingan di atas, status capaian TPB menurut berdasarkan Pedoman Monev TPB Bappenas terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagaimana dijelaskan berikut.

Tabel 4.1 Kategori Capaian TPB DKI Jakarta

Kategori	Deskripsi
Tercapai	Target tahun berjalan telah tercapai
Akan Tercapai/ Membaik	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target tahun berjalan
Perlu Perhatian Khusus	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai
Tidak Ada Data	Tidak tersedia data capaian
Belum Dapat Diukur	Capaian indikator belum dapat diukur karena terdapat perbedaan metode dan penghitungan capaian indikator dengan tahun sebelumnya

Sumber: Pedoman Monev TPB Bappenas

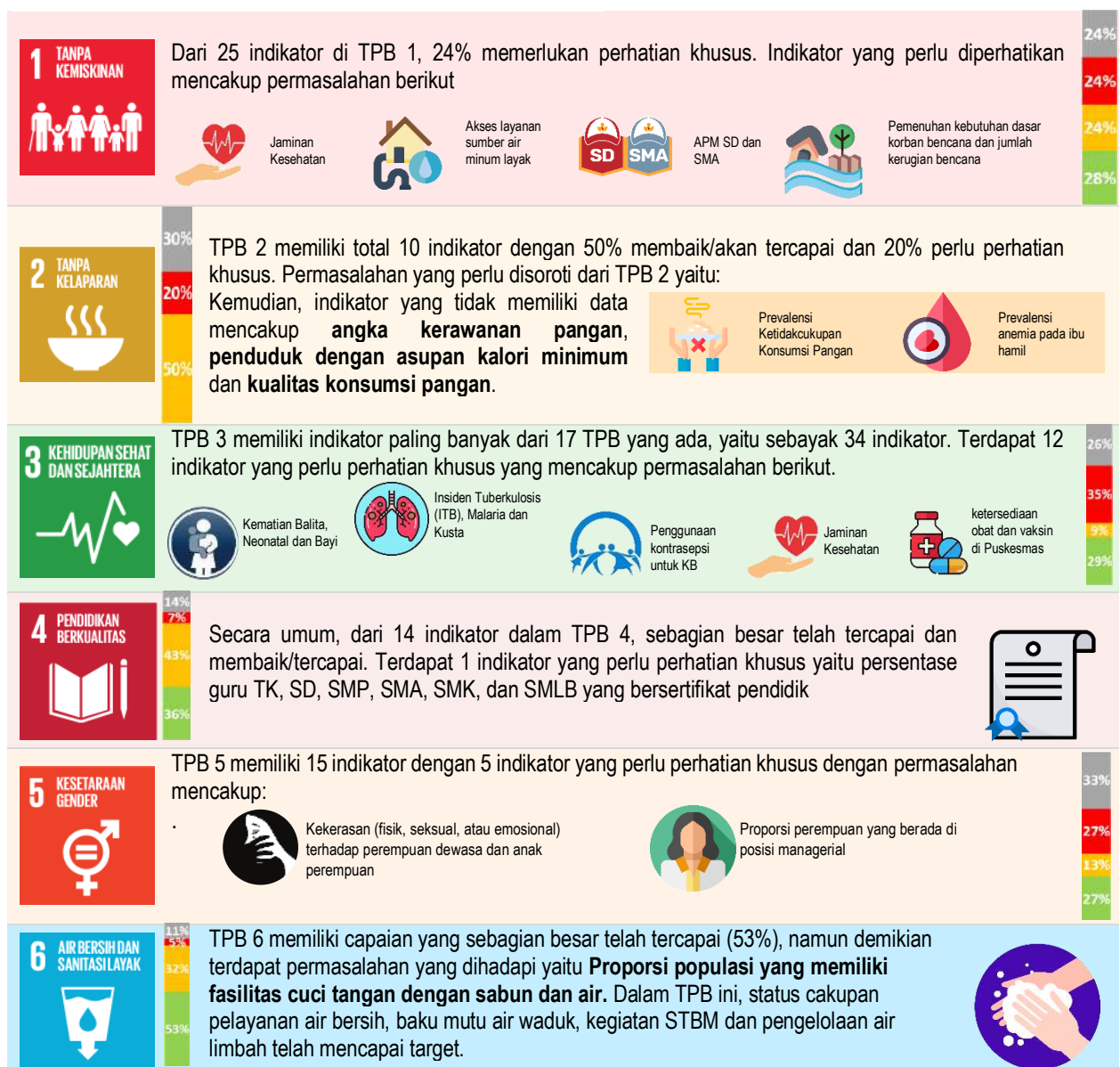
Distribusi capaian TPB 2022 ditunjukkan pada gambar di bawah.

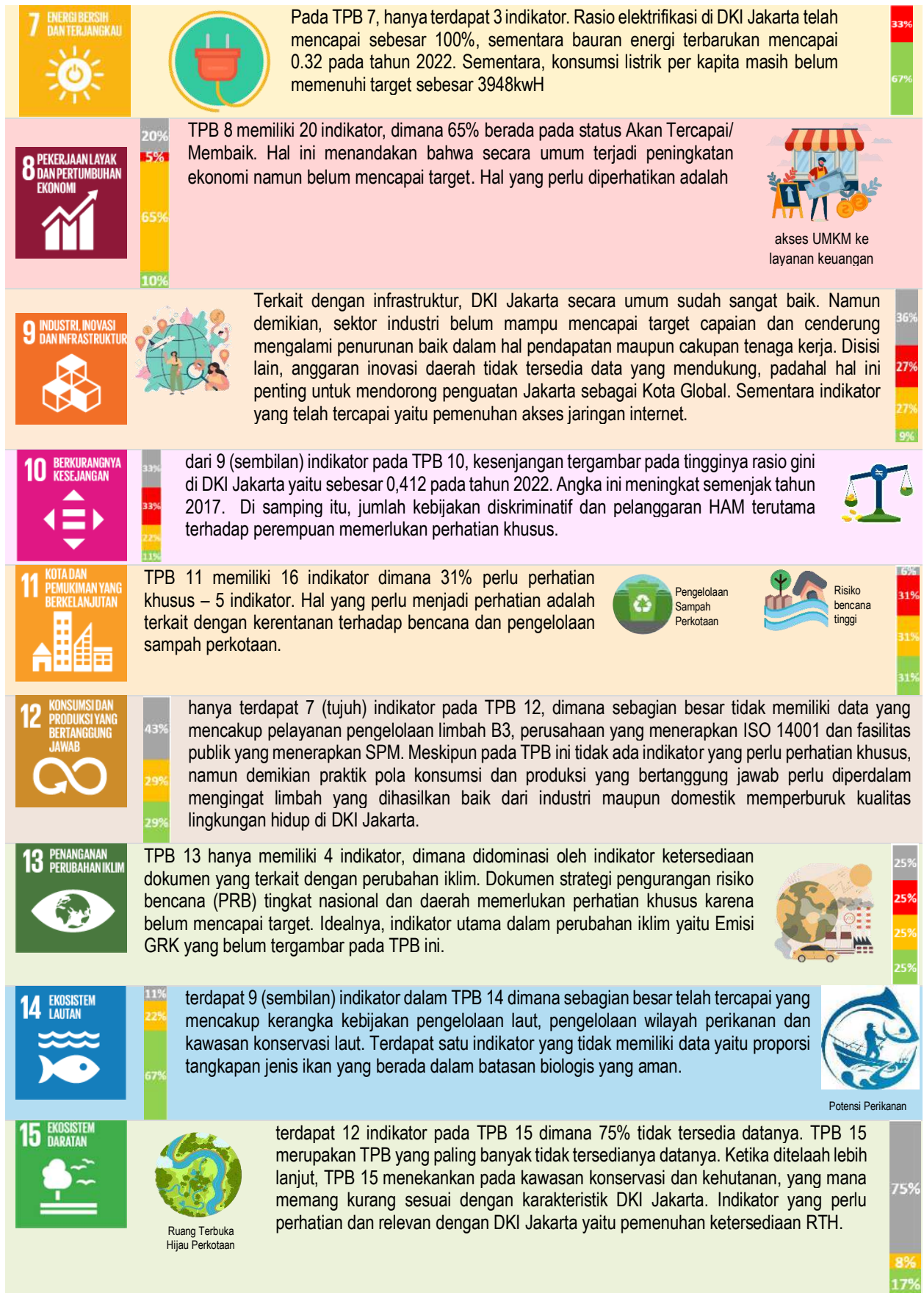


Berdasarkan data pencapaian target indikator TPB tahun 2022 per tanggal 19 Juni 2023 dari Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 26% (67 Indikator) dari 253 indikator TPB telah mencapai target. Namun demikian, terdapat 46 indikator (18%) yang memerlukan perhatian khusus dan 66 indikator (26%) yang tidak tersedia datanya, atau sejumlah 112 indikator yang berpotensi problematik. Indikator yang perlu perhatian khusus menjadi salah satu dasar identifikasi isu dari capaian TPB.

Berikut ini dijelaskan secara singkat capaian masing-masing TPB beserta permasalahannya.

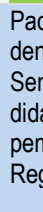
Gambar 4.5. Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta tahun 2022







dari 31 indikator yang ada di TPB 16, terdapat 4 indikator yang belum dapat diukur yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil dan Indeks Hak-hak Politik dan Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Hal ini disebabkan karena pada saat pengumpulan terdapat metode perhitungan baru yang belum dilakukan. Indikator yang perlu perhatian khusus terkait dengan tingkat kriminalitas dan keamanan masyarakat.



Pada TPB 17, terdapat 14 indikator dengan 2 indikator yang perlu perhatian khusus yang terkait dengan pemenuhan Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer di institusi pemerintahan. Sementara itu, terdapat 6 indikator yang tidak memiliki data yang mencakup Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah, Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service), Jumlah alokasi pemerintah untuk KPBU, Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) dan Persentase konsumen yang menggunakan BPS.

Pada penyusunan KLHS RPJPD, analisis berorientasi pada isu jangka panjang dan makro. Oleh karenanya, gambaran umum capaian TPB diperkaya dengan analisis keterkaitan dengan indikator makro pembangunan dan indikator RPJPN 2025-2045. Indikator makro pembangunan terdiri dari 6 (enam) indikator yang sesuai dengan SE Kemendagri No NOMOR 600.2.1/1570/SJ dalam rangka evaluasi pencapaian RPJPD. Sementara itu, pemerintah pusat telah menyusun Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 yang didalamnya terdapat arahan pembangunan jangka panjang nasional termasuk indikator-indikator yang perlu dicapai untuk mendukung hal tersebut. Terdapat 45 indikator RPJPN 2025-2045 untuk mendukung 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

- | | |
|--|---|
| 1. Transformasi Sosial | 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi |
| 2. Transformasi Ekonomi | 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas |
| 3. Transformasi Tata Kelola | 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan |
| 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan ketangguhan Diplomasi | 8. Kestinambungan Pembangunan |

Analisis keterkaitan tersebut dimaksudkan untuk agar capaian TPB setidaknya menggambarkan: (1) kesinambungan dengan penyusunan RPJPD dan (2) kontribusi terhadap target jangka panjang nasional (2045). Selain itu, analisis juga dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk melihat kontribusi TPB terhadap pelayanan wajib dasar kepada masyarakat.

Indikator TPB dan Indikator Makro Pembangunan – Evaluasi RPJPD

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator) . Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi



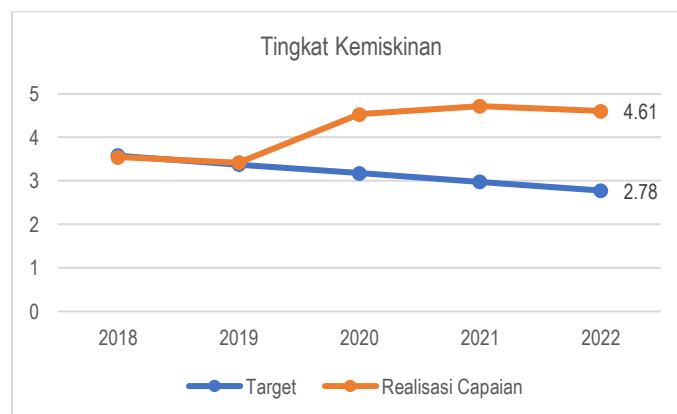
maupun sosial. Dalam SE Kemendagri No. 600.2.1/1570/SJ, disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) indikator pembangunan yang penting dalam mengevaluasi capaian RPJPD.

Dari keenam indikator makro, terdapat 5 (lima) indikator yang identik dengan indikator TPB yaitu angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan indeks gini ratio. Capaian lima indikator

TPB daerah yang identik tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Tingkat Kemiskinan

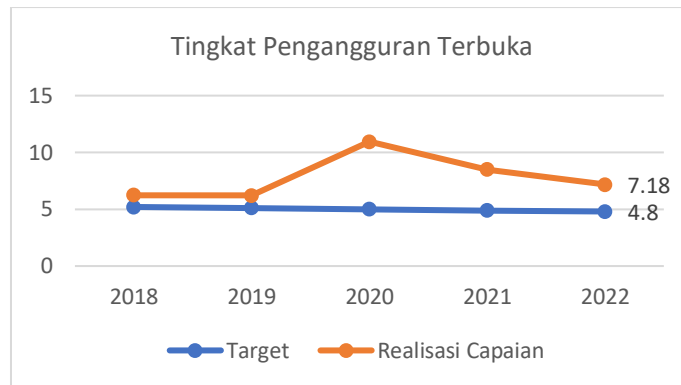
Tingkat kemiskinan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 (3,42%) ke tahun 2021 (4,72%). Akan tetapi pada tahun 2022, kemiskinan menunjukkan penurunan sebesar 0,11% menjadi 4,61. Walaupun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan belum mencapai target sebesar 2,78%, penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa indikator ini akan tercapai/ membaik.



Gambar 4.6 Target dan Capaian Tingkat Kemiskinan

2. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

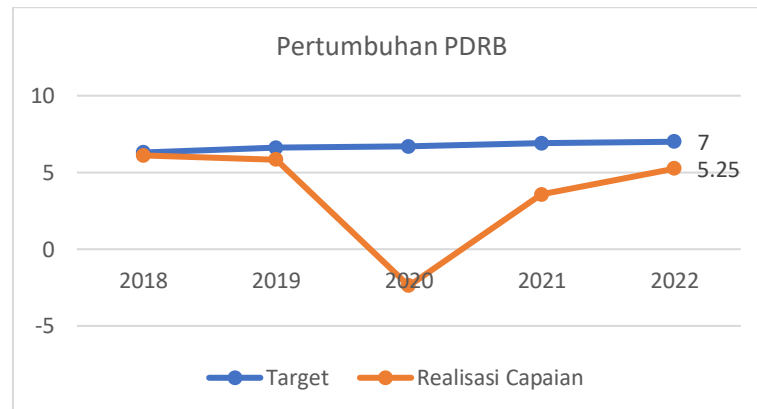
Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka meningkat hingga 10,95%. Setelah itu 2 (dua) tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan hingga mencapai 7,18. Akan tetapi jika dilihat dari target DKI Jakarta, capaian tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebesar 4,8%.



Gambar 4.7 Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Pertumbuhan PDRB

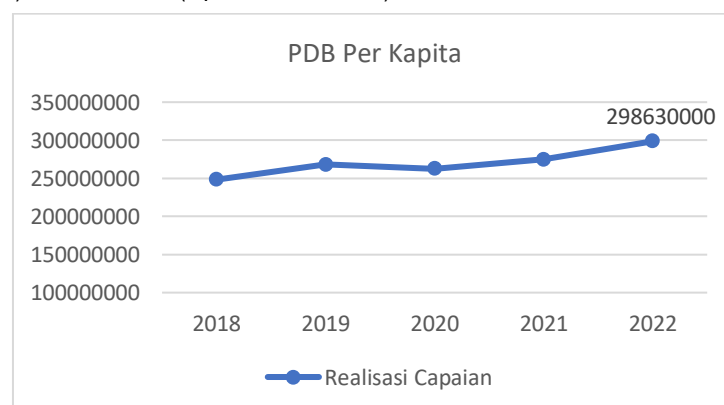
Pada tahun 2020, Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai -2,39. Salah satu penyebab penurunan ini akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun tersebut. Setelah itu 2 (dua) tahun berikutnya, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan hingga mencapai 5,25 pada tahun 2022.



Gambar 4.8 Target dan Capaian Pertumbuhan PDRB

4. PDB per Kapita

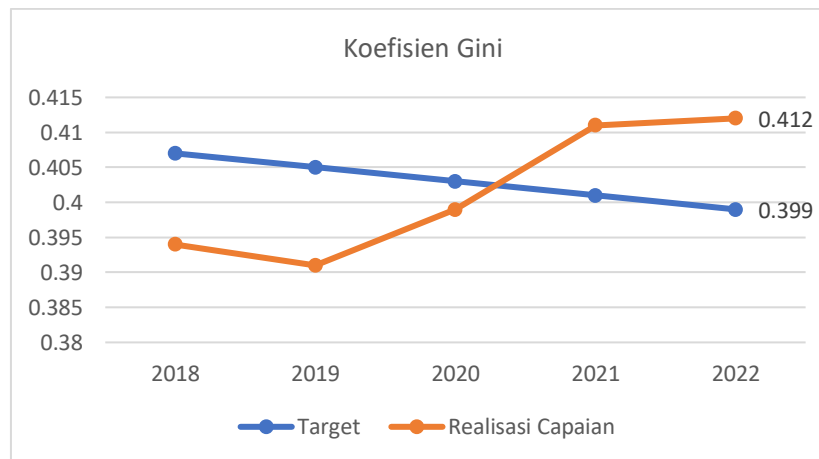
PDB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Pada DKI Jakarta, PDB per kapita secara berangsur-angsur menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 (Rp262.702.000,00) – tahun 2022 (Rp298.630.000,00).



Gambar 4.9 Target dan Capaian PDB per Kapita

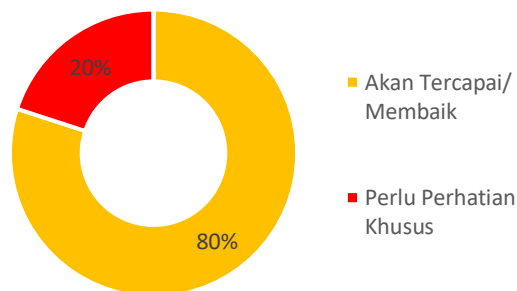
5. Koefisien Gini

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Pada DKI Jakarta, koefisien gini menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 (0,391) – 2022 (0,412). Hal ini berarti ketimpangan yang ada di DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya dan belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, indikator ini perlu perhatian khusus dari pemangku kebijakan terkait untuk merumuskan kebijakan dan strategi agar ketimpangan di DKI Jakarta dapat menurun.



Gambar 4.10 Koefisien Gini

Berdasarkan target dan capaian di atas, berikut merupakan sintesa status capaian indikator RPJPD yang identik dengan indikator TPB. Saat ini, koefisien gini merupakan satu-satunya indikator yang perlu perhatian khusus. Sedangkan empat indikator lainnya yang identik dengan TPB memiliki status capaian “akan tercapai/ membaik”.



Tabel 4.2 Status Capaian Indikator TPB – Indikator Makro RPJPD

#	Indikator TPB terkait	Status Capaian
1	1.2.1# Tingkat kemiskinan	Akan Tercapai/ Membaik
2	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Akan Tercapai/ Membaik
3	8.2.1*# Pertumbuhan PDRB	Akan Tercapai/ Membaik
4	8.1.1.(a) PDB per kapita	Akan Tercapai/ Membaik
5	10.1.1* Koefisien gini	Perlu Perhatian Khusus

Indikator TPB dan Indikator RPJPN 2025-2045

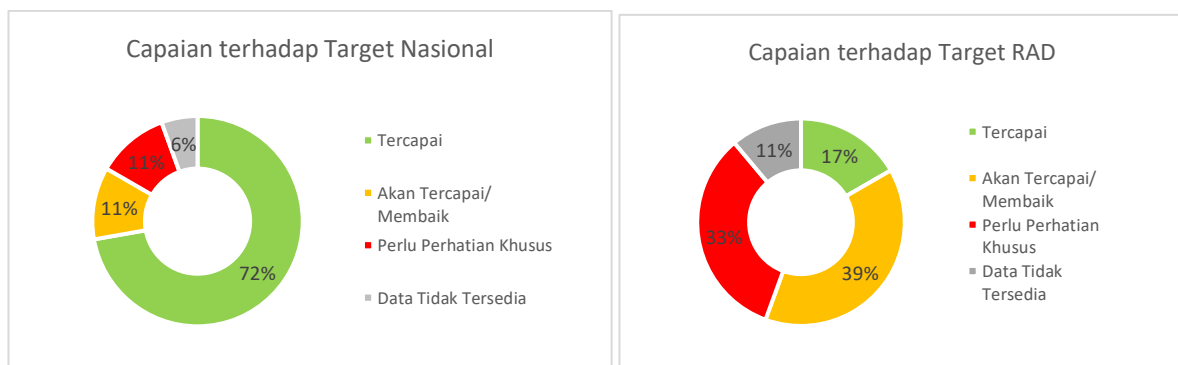
Dalam penyusunan KLHS RPJPD, perlu memperhatikan keterkaitan dengan 45 indikator ini, sehingga Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menelaah status pencapaian 15 indikator TPB metadata I yang identik dengan indikator RPJPN 2025 – 2045. Indikator TPB yang identik dengan indikator RPJPN diantaranya:

1. Prevalensi stunting pada balita
2. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
3. Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan
4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
5. Tingkat kemiskinan
6. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
7. Rasio PDB industri pengolahan
8. Rasio PDB pariwisata
9. Tingkat Pengangguran Terbuka
10. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
11. Rasio pajak terhadap PDB
12. Kualitas Lingkungan Hidup (Rumah tangga dengan akses sanitasi aman; Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah)
13. Ketahanan energi, air, dan pangan (Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita; Prevalensi ketidakcukupan pangan)
14. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
15. Persentase penurunan emisi GRK



Berdasarkan indikator di atas, berikut merupakan status capaian berdasarkan target nasional dan target RAD DKI Jakarta 2022. Jika dilihat berdasarkan target nasional pada tahun 2025 yang terdapat di Rancangan Akhir RPJPN 2025 – 2024, status capaian 72% indikator yaitu tercapai, 11% perlu perhatian khusus terkait pengangguran dan keamanan, dan 11% akan tercapai/membaik. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan target RAD, 33% indikator menunjukkan perlu perhatian

husus terkait dengan masalah kesehatan dan energi.



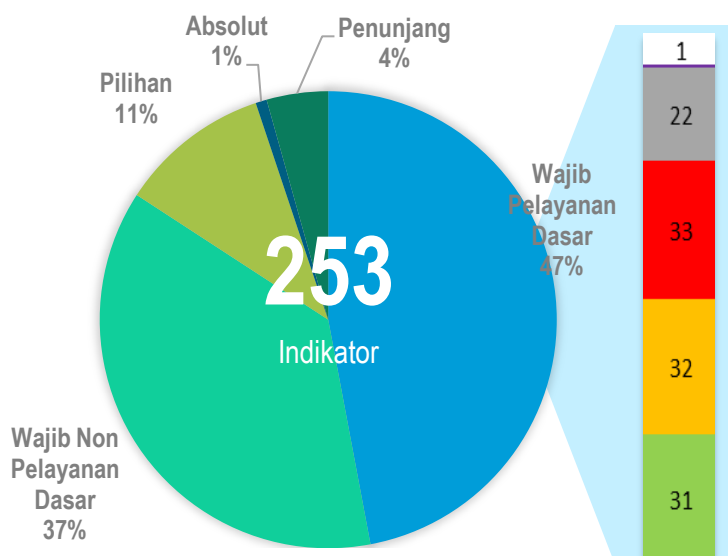
Gambar 4.11 Status Capaian Indikator TPB – Indikator RPJPN

Berikut merupakan rincian status pencapaian 15 indikator TPB terhadap target nasional (2025) dan target RAD.

Tabel 4.3 Status Capaian Indikator TPB – Indikator RPJPN

#	Indikator TPB terkait	Status Capaian	
		Target Nasional	Target RAD
1	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik
2	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
3	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
4	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik
5	1.2.1# Tingkat Kemiskinan	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik
6	1.3.1.(b) & 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tercapai	Data Tidak Tersedia
7	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Akan Tercapai/ Membaik	Akan Tercapai/ Membaik
8	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik
9	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Perlu Perhatian Khusus	Akan Tercapai/ Membaik
10	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Perlu Perhatian Khusus	Perlu Perhatian Khusus
11	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Akan Tercapai/ Membaik	Akan Tercapai/ Membaik
12	1.4.1.(e) & 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Tercapai	Tercapai
13	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (jt ton)		
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita		
	7.2.1* Bauran energi terbarukan	Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
14	1.5.2.(a) & 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
15	9.4.1.(a) Persentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Indikator TPB dan SPM

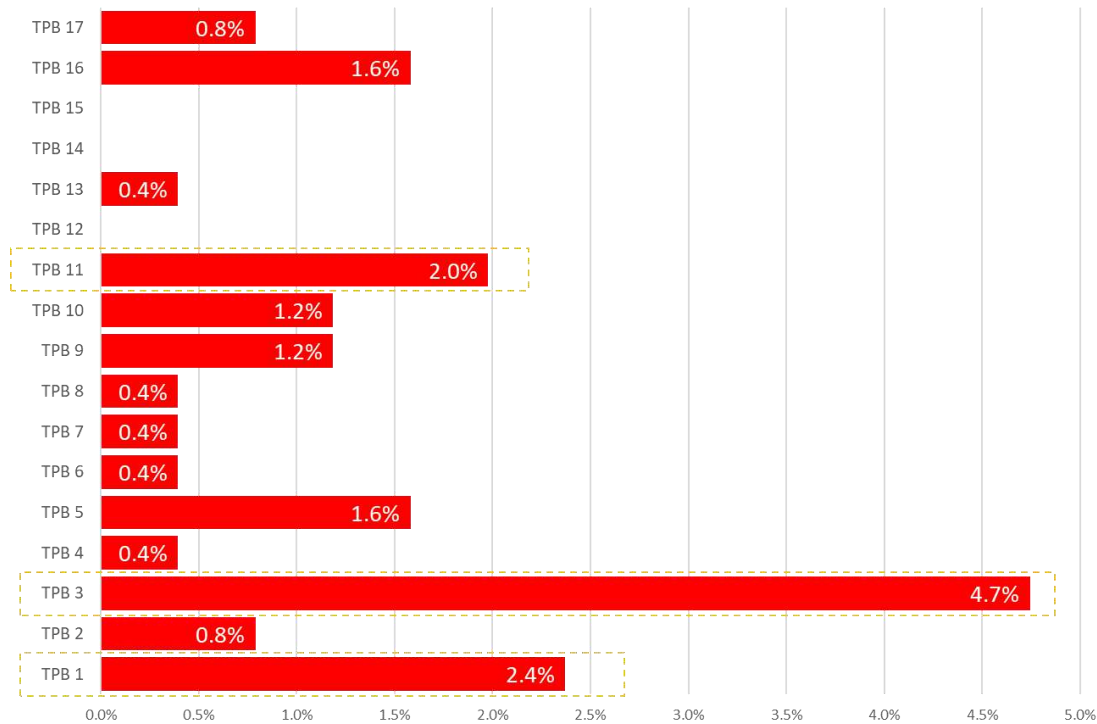


Jika ditinjau indikator TPB terhadap urusan pemerintahan (UU No.23 Tahun 2014), terdapat 47% indikator wajib pelayanan dasar, 37% wajib non pelayanan dasar, 11% pilihan, 4% penunjang, dan 1% absolut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator TPB yang termasuk wajib pelayanan dasar, 27,73% indikator perlu perhatian khusus; 26,89% akan tercapai/ membaik; 26,05% tercapai, 18,49% data tidak tersedia, dan 0,84% belum dapat diukur.

Indikator TPB

Berdasarkan 253 indikator metadata 1 yang dianalisis, TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 3 (Kesehatan Masyarakat), dan TPB 11 (Kota Berkelanjutan) memiliki indikator dengan persentase capaian perlu perhatian khusus terbanyak atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan/atau target tahun berjalan tidak tercapai.



Berikut merupakan indikator pada TPB 1, 3, dan 11 yang memiliki status capaian perlu perhatian khusus. TPB 1 yang perlu perhatian khusus berkaitan dengan kesehatan, air bersih, pendidikan, dan kebencanaan. TPB 3 berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Serta TPB 11 berkaitan hunian layak dan terjangkau, kebencanaan, dan persampahan.

Tabel 4.4 Indikator TPB 1, 3, dan 11 (Perlu Perhatian Khusus)

TPB 1: Tanpa Kemiskinan	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
TPB 3 Kesehatan Masyarakat	
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern



3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk
3.8.2.(a)#	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
TPB 11: Kota berkelanjutan	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Dari daftar indikator-indikator TPB yang memerlukan perhatian khusus seperti disajikan pada Gambar di atas, dapat disintesis menjadi 4 (empat) isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan penanggulangan bencana (TPB 1: Tanpa Kemiskinan)
2. Kualitas Kesehatan masyarakat belum sesuai target (TPB 3: Kesehatan Masyarakat)
3. Sarana dan prasarana permukiman belum mencapai target TPB Jakarta (TPB 11: Kota berkelanjutan)
4. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana belum mencapai target TPB Jakarta (TPB 11: Kota berkelanjutan)

4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Kondisi Lingkungan Hidup

Dari data dan informasi tentang kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dideskripsikan pada Sub Bab 3.2 di atas memperlihatkan empat permasalahan utama. Pertama, pemanfaatan air tanah yang berlebihan di satu pihak, dan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang masih jauh dari mencukupi di pihak lainnya. Kedua, masalah pencemaran lingkungan masih berlanjut hingga saat ini. Walaupun sudah dilakukan upaya-upaya sistem transportasi di wilayah Jabodetabek, namun pencemaran udara masih berlanjut terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan fosil dan kemacetan lalu lintas. Pencemaran air pun masih berlanjut yang bersumber dari pembuangan sampah, pembuangan limbah domestik, dan pembuangan limbah cair dari wilayah hulu. Ketiga, wilayah DKI Jakarta rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat kegiatan manusia. Jakarta terletak di pantai utara Jawa dan tidak jauh dari Anak Gunung Krakatau yang aktif dan merupakan ancaman letusan, gempa, dan tsunami. Jakarta yang terletak di dataran rendah sangat rentan terhadap ancaman banjir yang terjadi di wilayah Jakarta maupun di wilayah hulu. Banjir rob juga merupakan ancaman di wilayah pesisir akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan turunnya permukaan tanah (*land subsidence*) yang dibarengi dengan peningkatan permukaan air laut akibat dari perubahan iklim (*climate change*). Kebakaran juga menjadi ancaman kebencanaan akibat kondisi permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kemampuan serta sarana dan pra sarana pemadaman kebakaran yang belum mencukupi. Ke empat, degradasi keanekaragaman hayati yang terjadi di wilayah pesisir dan kepulauan akibat pencemaran lingkungan dan kegiatan pembangunan.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari telaah kondisi lingkungan hidup wilayah Jakarta terdapat 4 (empat) isu pembangunan berkelanjutan utama yang harus segera diatasi, yaitu:

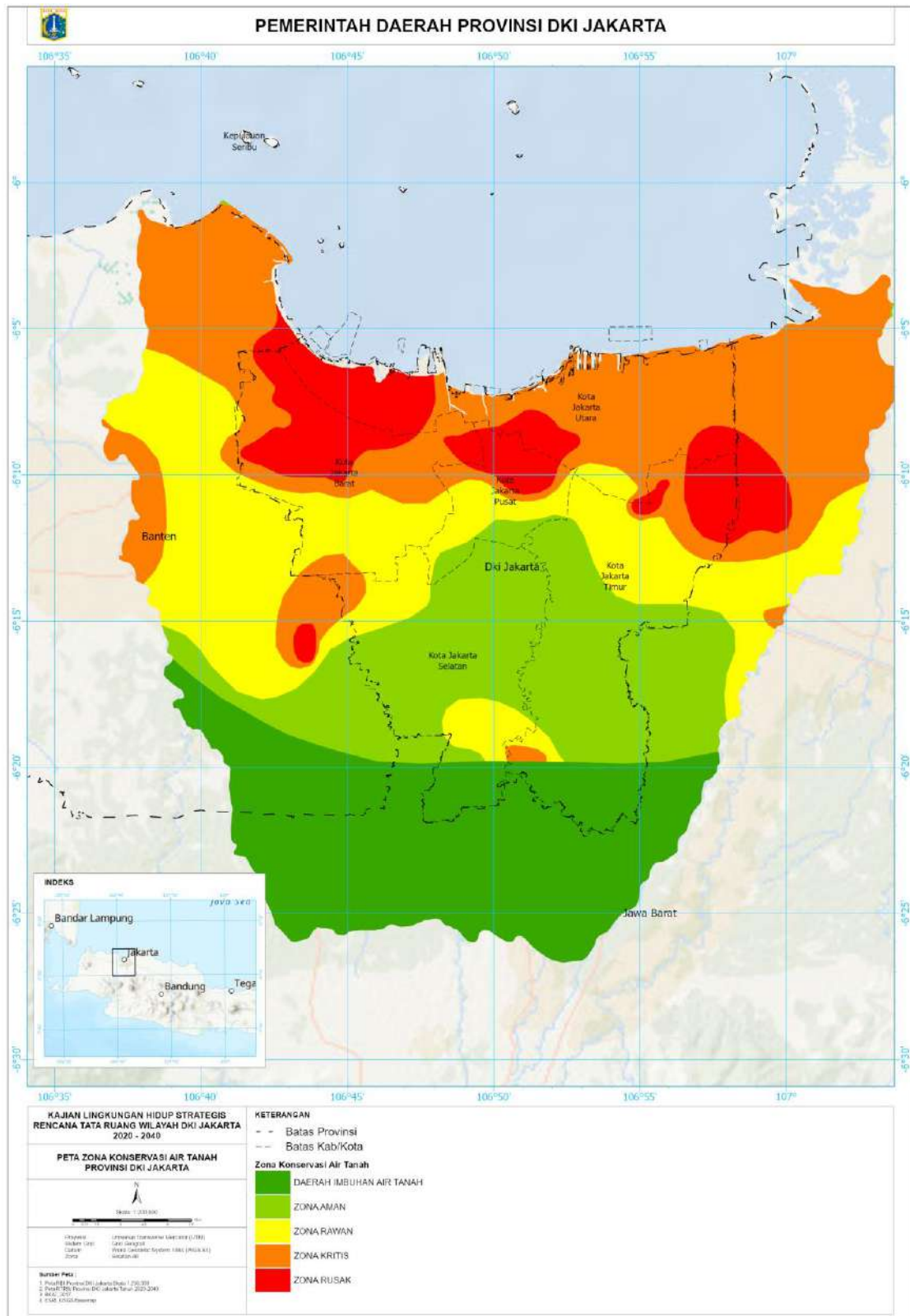
- 1) Keberlanjutan sumber daya air
- 2) Pencemaran lingkungan
- 3) Kerentanan terhadap bencana
- 4) Degradasi keanekaragaman hayati

A. Keberlanjutan Sumber Daya Air

Isu keberlanjutan sumber daya air menjadi isu yang sangat penting di DKI Jakarta saat ini mengingat, jika merujuk pada hasil analisis daya dukung dan daya tampung penyedia air menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023, daya dukung penyedia air yang belum terlampaui hanya ada di angka 4%. Hal itu tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

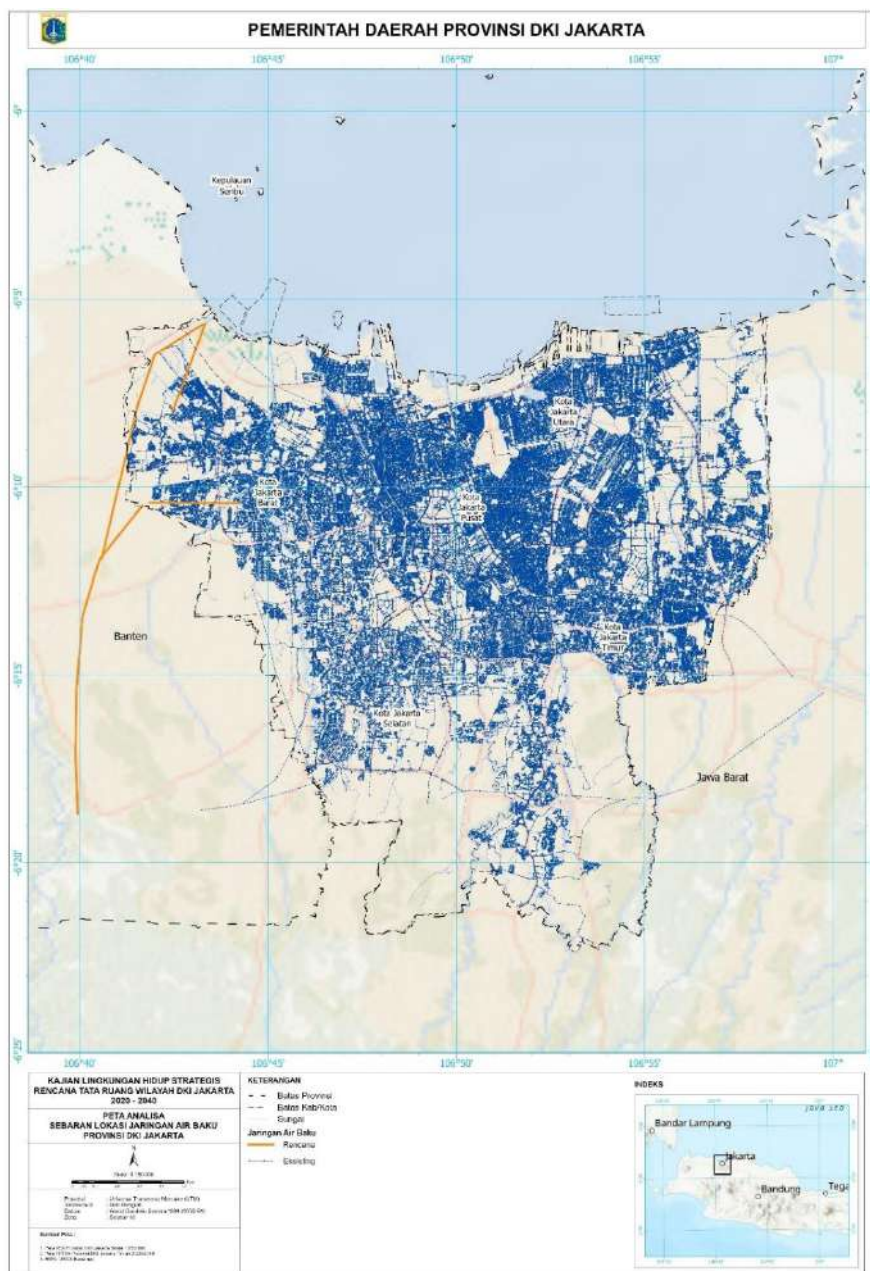
Dengan melihat kondisi saat ini dan merujuk pada kondisi daya dukung dan daya tampung, seharusnya penggunaan air tanah pun perlu dibatasi, untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat. Hal ini pun juga sejalan dengan terbitnya PERGUB no. 93 tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Pada peraturan tersebut menunjukkan zona bebas air tanah pada daerah seperti Kawasan Industri Pulo Gadung, Kawasan Mega Kuningan, Kawasan Rasuna Epicentrum, SCBD Sudirman, Kawasan Kuningan, Kawasan Medan Merdeka, Kawasan Asia Afrika, Kawasan Menteng, dan Kawasan Tanah Abang.

Kondisi sumber daya air di DKI Jakarta juga dapat dilihat berdasarkan peta zona konservasi air tanah yang diterbitkan oleh BKAT tahun 2017. Dapat dilihat bahwa kondisi air di DKI Jakarta masuk dalam kategori zona rusak pada wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Hanya wilayah Jakarta Selatan yang sebagian besar masuk dalam kategori zona aman dan zona imbuhan air.

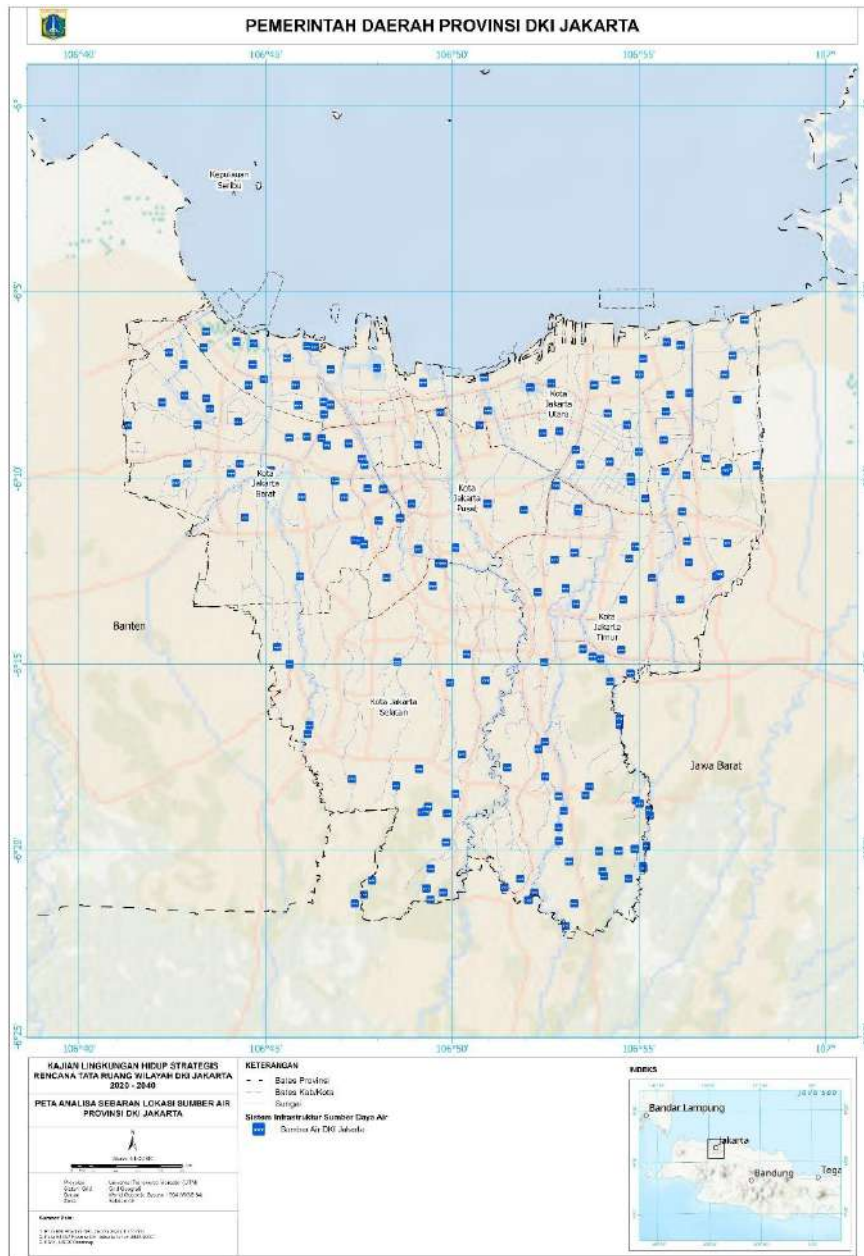


Gambar 4.12 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta
Sumber: BKAT, 2017

Sumber air baku di DKI Jakarta tidak terlepas dari keberadaan wilayah fungsional DKI Jakarta. Oleh karena itu saat ini, sumber air baku yang dimanfaatkan berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol dan IPA Serpong (KLHS RTRW DKI Jakarta). Berdasarkan data struktur ruang RTRW DKI Jakarta tahun 2022 – 2042 menunjukkan bahwa telah dibangun jaringan air baku sebanyak 235.662 jaringan dan 4 jaringan akan direncanakan untuk dibangun dalam kurun waktu kedepan, dengan saluran yang tersambung pada wilayah luar Jakarta. Dengan kondisi eksisting saat ini, seharusnya kebutuhan air minum Masyarakat bisa terpenuhi. Namun, merujuk pada data PAM Jaya pada tahun 2021, kebutuhan air masyarakat baru bisa terlayani mencapai angka 65% walaupun jaringan air baku sudah tersebar di hampir wilayah Jakarta, kecuali wilayah Kepulauan Seribu. Hal tersebut diperkuat dengan saat ini DKI Jakarta memiliki 181 sumber air baik berupa waduk, embung dan Sungai. Berdasarkan 181 sumber air yang ada, hanya 6% yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku, karena banyak sumber air yang tidak bisa dimanfaatkan karena tercemar oleh sampah atau pun zat kimia. Oleh karena itu diperlukan perbaikan kualitas sumber air permukaan yang potensial (181 titik) untuk dapat dimanfaatkan melalui pemanfaatan rekayasa inovasi teknologi yang teruji untuk memperbaiki kualitas air yang tercemar.



Gambar 4.13 Rencana Jaringan Perpipaan DKI Jakarta
Sumber: RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 - 2042



Gambar 4.14 Lokasi Sumber Air DKI Jakarta

Sumber: RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042

Hasil progres penyusunan RISPAM DKI Jakarta pun menunjukkan bahwa saat ini jumlah waduk yang belum tercemar hanya 7% yaitu Situ Hutan Kota Srengseng, Situ Pos Pengumben, Situ Lembang, dan Waduk Sunter Timur IA. Selain itu pencemaran air Sungai saat ini berada pada status tercemar berat dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas situ/waduk dan Sungai yang menjadi sumber air baku di DKI Jakarta memiliki status tercemar.

B. Pencemaran Lingkungan

Merujuk pada kondisi terkini DKI Jakarta dan berdasarkan hasil penyusunan KLHS RTRW DKI Jakarta, menunjukkan bahwa saat ini isu pencemaran lingkungan masih sangat dekat dengan DKI Jakarta, terutama karena keterbatasan pengelolaan sampah, dan keterbatasan sarana pengelolaan limbah. Selain itu juga pencemaran lingkungan terutama untuk air dan udara pun masih sangat tinggi terutama udara saat ini di DKI Jakarta. Jika melihat Indeks kualitas udara (AQI), indeks kualitas udara di DKI Jakarta sudah masuk kategori tidak

sehat¹. Akibat hal tersebut, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penyakit saluran pernapasan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Beberapa faktor penyebab tingginya polusi udara adalah karena keberadaan kawasan industri, pembangkit listrik dan yang paling utama adalah sektor transportasi. Menurut data KLHK, sektor transportasi menyumbang pencemaran terbesar di DKI Jakarta sebesar 44% dan berpotensi meningkat pada musim kemarau hingga 57%².

Kualitas lingkungan hidup yang juga dapat dilihat pada tren indeks kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan dokumen laporan akhir IKLH DKI Jakarta tahun 2022, menunjukkan angka IKLH pada tahun 2022 sebesar 56.65. Angka IKLH ini merupakan angka yang rendah jika dibandingkan dengan kondisi IKLH Nasional yang mencapai nilai 72.42.

Tabel 4.5 Kondisi Nilai IKLH DKI Jakarta Tahun 2022

Wilayah	IKU	IKA	IKAL	IKTL	IKLH	Kategori
Kota Jakarta Barat	69.21	35.52		24.28	46.70	Kurang
Kota Jakarta Selatan	72.12	42.2		27.54	51.11	Sedang
Kota Jakarta Timur	59.29	44.44		26.75	46.58	Kurang
Kota Jakarta Pusat	63.09	44.67		26.08	48.06	Kurang
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	90.02	30		85.48	66.46	Sedang
Kota Jakarta Utara	54.6	42.5		25.44	43.67	Kurang
DKI Jakarta (Provinsi)	68.06	41.17	80.08	27.07	54.65	Sedang

Sumber: Laporan Akhir IKLH DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, penduduk DKI Jakarta memiliki jumlah sebesar 10.679,951 jiwa. Dengan padatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta pun memiliki andil terhadap tingkat pencemaran lingkungan, terutama untuk potensi timbulan sampah. Timbulan sampah menjadi masalah lingkungan yang masih terus mengancam kondisi lingkungan di DKI Jakarta. Walaupun kurang lebih 90% masalah sampah telah tertangani namun dengan padatnya jumlah penduduk saat ini masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan analisa potensi timbulan sampah, pada tahun 2022, DKI Jakarta menunjukkan angka potensi 7,544 ton/kapita/hari. Penanganan sampah saat ini sesuai SIPSN hampir 100%, namun permasalahan saat ini terjadi pada pola pengelolaan sampah yang didominasi dengan aktivitas kumpul-angkut-buang, yang mengakibatkan lebih dari 90% sampah dikirim ke TPST Bantargebang, yang mengakibatkan saat ini kapasitas TPST Bantargebang sudah mendekati kapasitas maksimum.

Isu lain yang sangat berhubungan dengan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta adalah pencemaran perairan. Pencemaran perairan di DKI Jakarta saat ini dipengaruhi oleh kegiatan di darat karena jumlah penduduk dan aktivitas per harinya yang sangat tinggi dan kegiatan di perairan itu sendiri. Pencemaran darat selain dipengaruhi oleh padatnya penduduk dan kegiatan setiap harinya, juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, karena DKI Jakarta merupakan wilayah hilir yang sangat dipengaruhi oleh pengelolaan lahan di wilayah Hulu. Merujuk dari hasil potensi beban pencemar di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa potensi beban pencemar tinggi baik BOD, COD dan TSS berada pada wilayah hulu DKI Jakarta terutama pada wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan perindustrian pun juga sangat mempengaruhi kondisi perairan DKI Jakarta terutama kegiatan industri yang membuang limbah padat atau cair dengan jumlah besar. Sebagaimana dilaporkan dalam DIKPLHD 2020, pertumbuhan industri serta perumahan di DKI Jakarta sebagai imbas perkembangan ekonomi tentunya memberikan dampak pada pembuangan limbah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat memengaruhi kualitas air di DKI Jakarta.

¹ Polusi udara Jakarta sudah "sangat krisis", Pemprov DKI siapkan razia uji emisi kendaraan - BBC News Indonesia

² Mencermati Polusi Udara Jakarta - Kompas.id

C. Degradasi Keanekaragaman Hayati

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB 3, DKI Jakarta sebagai kota Metropolitan masih memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui keberadaan kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Selain itu keberadaan ekosistem terumbu karang di wilayah Kepulauan Seribu, ekosistem lamun dan ekosistem mangrove di wilayah pesisir juga menjadi indikator bahwa DKI Jakarta masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun kondisi ini bukan berarti keberadaan KEHATI tersebut tidak tanpa ancaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi DKI Jakarta sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan di darat dan juga di perairan, kemudian pencemaran lingkungan dan juga ketahanan terhadap perubahan iklim (untuk ekosistem lamun dan juga terumbu karang). Selain itu ancaman kegiatan Pembangunan pun juga turut andil terhadap keterancaman keberadaan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu keberadaan keanekaragaman hayati perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan mitigasi terjadi degradasi keanekaragaman hayati.

4.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Telaah Dokumen Perencanaan Strategis

Pokja KLHS menelaah satu dokumen perencanaan strategis nasional dan satu dokumen perencanaan strategis regional serta lima dokumen perencanaan strategis internal Provinsi DKI Jakarta yang memuat isu-isu pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk dua puluh tahun ke depan. Dokumen-dokumen perencanaan strategis tersebut yaitu:

- (1) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,
- (2) Tata Ruang Jabodetabekjur (Perpres No. 60 Tahun 2020)
- (3) Naskah Akademik RUU Daerah Istimewa Jakarta,
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta 2022-2052,
- (5) Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2022-2042,
- (6) Laporan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 2022-2042, dan
- (7) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 memuat isu-isu pembangunan yang dihadapi negara Indonesia secara nasional. Dari isu pembangunan nasional tersebut, 13 (tiga belas) di antaranya relevan dengan kondisi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. **Produktivitas masih rendah**, Rata-rata produktivitas yang tercermin dari **Total Faktor Productivity (TFP)** Indonesia selama tahun 2005-2019 **tumbuh negatif** sebesar 0,66 tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019; yang banyak disebabkan oleh keteringgalan **kualitas SDM terutama perempuan, produktivitas ekonomi yang rendah**, tertinggalnya **kapasitas iptek dan inovasi, kelembagaan** yang belum sempurna dan **kepastian hukum** yang lemah.
2. **Kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masih Rendah**, yang disebabkan oleh masih **terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas**, serta **kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah**, terjadi **perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi** serta **kebencanaan**
3. **Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan Masih Rendah**, disebabkan terbatasnya pengembangan budidaya perikanan, masih **lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut**, terbatasnya **pengembangan riset dan teknologi kelautan**, **belum berkembangnya industri pengolahan** dan **emerging sektor lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi**
4. **Kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian relatif Rendah**, walaupun menyerap tenaga kerja yang tinggi. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki **pekerja berkeahlian rendah** dan juga banyak



bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak disektor riil.

5. **Masih tingginya penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil dibandingkan dengan energi baru dan terbarukan (EBT).** Bahwa pada tahun 2022 porsi EBT hanya 12,30 persen dari bauran energi nasional, atau naik hanya 8 persen bila dibandingkan porsi EBT pada tahun 2005 yang sebesar 4,24 persen.
6. **Rendahnya pengelolaan limbah B3**, yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022, sementara regulasi tentang insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Selain itu masih ada tantangan **pemanfaatan SDA yang merusak** ekosistem, termasuk pertambangan terbuka, pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan **degradasi hutan dan deforestasi**.
7. **Rendahnya Literasi Digital**, karena jumlah pengguna internet masih 62 persen dari populasi, **jaringan 4G belum merata dan kecepatan internet masih lambat** terutama pada daerah yang **kondisi geografisnya sulit**. Selain itu masih tinggi **ketergantungan terhadap teknologi dan produk luar negeri dan tingginya serangan siber**.
8. **Konektivitas Antar Wilayah Masih Ada Kesenjangan**, dengan kondisi geografis yang kepulauan **konektivitas hinterland** masih perlu ditingkatkan, masih terbatasnya **angkutan masal perkotaan**, masih rendahnya **jangkauan serat optik**, belum meratanya **jaringan internet seluler** di pedesaan dan kawasan timur.
9. **Akses pendidikan belum merata**, terjadi karena **disparitas partisipasi pendidikan** antar wilayah dan **sosial ekonomi masyarakat**. Kualitas pendidikan juga masih rendah disebabkan oleh **sarana-prasarana pendidikan** dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah **guru profesional dengan kompetensi tinggi** masih terbatas dan belum **terdistribusi** ke seluruh daerah dan satuan pendidikan, menyebabkan **keterserapan tenaga kerja** lebih banyak di tingkat pendidikan menengah.
10. **Tingginya beban penyakit menular dan tidak menular serta kekurangan gizi mikro dan makro**, disebabkan adanya **transisi demografi** yang bersamaan dengan meningkatnya **mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat**.
11. **Belum meratanya jaminan sosial** dalam mendapatkan **pelayanan kesehatan**, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari masih rendahnya **kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan** untuk pekerja informal, dan tingkat **kepatuhan pembayaran iuran** jaminan sosial masih rendah.
12. **Tata Kelola masih harus diperbaiki**, diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang **efektif dan akuntabel** dan mampu memberikan **pelayanan publik yang berkualitas**. Tata kelola yang bermasalah diantaranya **hyper regulation** yang menyebabkan **tumpang tindih dan disharmoni regulasi** baik pusat maupun daerah yang menyebabkan **ketidakpastian hukum**. Kelembagaan dan proses bisnis pemerintah masih **terfragmentasi dan tidak adaptif**, **manajemen talenta** belum berjalan baik, rentannya **intervensi politik**, belum meratanya **kualitas pelayanan publik dan transformasi digital** masih belum berjalan lancar.
13. **Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan kehati** yang berkelanjutan, semakin **tingginya risiko bencana** terutama **hidrometeorologi**, adanya **ketidakseimbangan** antara kebutuhan dan ketersediaan **pangan, energi dan air** di berbagai wilayah.

Penelaahan berikutnya adalah penelaahan dokumen tata ruang Jabodetabekjur yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 dan merangkum isu-isu strategis yang relevan dengan isu-isu di DKI Jakarta terdiri dari:

1. Banjir
2. Ketersediaan Air
3. Sanitasi dan Persampahan

4. Kemacetan
5. Permasalahan pesisir dan pulau reklamasi
6. Pengaturan Kawasan Pulau Seribu
7. Antisipasi pemindahan IKN

Ke-7 (tujuh) isu yang ada dalam tata ruang Jabodetabekjur tersebut merupakan isu yang bersifat lintas wilayah sehingga sangat strategis dan menjadi arahan dalam upaya pengurangan permasalahan yang ada di DKI Jakarta tidak hanya oleh DKI Jakarta tetapi juga daerah lain di sekitarnya melalui kolaborasi dan pemberian insentif dan disinsentif antar wilayah administrasi.

Dalam dokumen rancangan RPPLH DKI Jakarta, dirangkumkan bahwa isu strategis dalam dokumen RPPLH DKI Jakarta adalah:

1. Keberlanjutan SDA
2. Tata Kelola SDA dan LH
3. Kebencanaan

Ketiga isu strategis ini merupakan isu yang menjadi perhatian di Jakarta, karena kondisi lingkungan hidup di Jakarta masih belum sesuai dengan yang diharapkan seperti misalnya kualitas air sungai yang masih tinggi beban pencemarnya dan pencemaran udara yang meningkat pasca Covid-19, selain itu dalam beberapa tahun terakhir mulai sering terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan genangan dan banjir di luar perkiraan sementara pembangunan fisik kota terus berjalan sementara ruang terbuka hijau, sebagai penyeimbang, tidak banyak bertambah.

Berdasarkan dokumen rancangan RTRW 2022-2042 yang sudah mengintegrasikan RZWP3K, isu-isu strategis:

1. Mobilitas Penduduk Tidak Efisien Sehingga Muncul Kemacetan dan Ekonomi Biaya Tinggi
2. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital
3. Munculnya Pertumbuhan Permukiman Bersifat *Squatter* dan *Sprawling*
4. Kurangnya Pengendalian Pembangunan Menyebabkan Masalah Lingkungan
5. Rendahnya Kualitas Lingkungan

Isu-isu strategis dalam RTRW merupakan isu yang terkait dengan penataan ruang yang terdiri dari upaya perwujudan rencana jaringan infrastruktur dan rencana pola ruang. Jaringan infrastruktur, salah satunya adalah terkait dengan upaya mengurai kemacetan melalui rencana infrastruktur dan mengoptimalkan infrastruktur untuk memperlancar perekonomian di DKI Jakarta termasuk di dalamnya mengenai infrastruktur digital. Dari pemanfaatan ruang, bahwa pertumbuhan permukiman di Jakarta yang *squatter* dan *sprawling*, menyulitkan untuk menyediakan fasilitas pendukungnya seperti jaringan pipa air, pipa gas bahkan RTH sehingga diperlukan penataan yang lebih baik. Selain itu pemanfaatan lahan yang tidak dikendalikan akan menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan yang pada akhirnya akan membebani pembiayaan perbaikan lingkungan dan penyelenggaraan kesehatan.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW yang mengiringi proses penyusunan RTRW DKI Jakarta, merumuskan isu strategis KLHS RTRW sebagai berikut:

1. Kesenjangan Penghidupan Masyarakat
2. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
3. Risiko Kebencanaan Tinggi
4. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang

Isu kesenjangan penghidupan masyarakat ini dapat dikaitkan dengan masih adanya kawasan permukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta dengan beragam permasalahan yang ada di dalamnya baik sosial budaya dan lingkungan. Sedangkan keberlanjutan sumber daya alam berkaitan dengan isu terkait pemanfaatan air, pencemaran dan penurunan kehati akibat dari pembangunan fisik di DKI Jakarta. Kebencanaan menjadi isu strategis, mengingat bahwa beberapa tahun belakang ini semakin sering terjadi



bencana akibat perubahan iklim seperti banjir dan angin kencang di luar perkiraan. Sedangkan tata kelola pemanfaatan ruang berkaitan dengan penegakan hukum atas pemanfaatan alokasi ruang yang tidak sesuai yang menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang

Di dalam dokumen RPD 2023-2026, isu strategis yang diangkat adalah:

1. Ketahanan Terhadap Bencana
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
6. Pemerataan Pembangunan

Isu ketahanan terhadap bencana muncul sebagai akibat semakin seringnya terjadi bencana akibat perubahan iklim yang menimbulkan gangguan/disrupsi kepada berbagai kegiatan masyarakat dan menimbulkan dampak ikutan yang lain dan cenderung wilayah terdampak semakin meluas. Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik merupakan salah satu target pemerintah daerah untuk menuju *good governance* dan memberikan pelayanan sesuai SPM kepada masyarakat untuk menghadapi tantangan global ke depan. Ketahanan ekonomi inklusif menjadi salah satu isu mengurangi kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta dengan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan koperasi yang mampu berdaya saing secara nasional sehingga mampu menciptakan manusia sehat, berdaya saing dan setara dalam berbagai aspek kehidupan di perkotaan.

Sehubungan dengan adanya IKN yang akan merubah status Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah merancang UU daerah Khusus Jakarta, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) isu yaitu:

1. Tata Kelola Kawasan Jabodetabekpunjur
2. Perbaikan peringkat *Global Power City Index* Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional

Perubahan status daerah khusus ibukota perlu memastikan kerja sama antar daerah dalam kerangka Jabodetabekjur tetap ada dan diharapkan mampu mendukung Jakarta sebagai sebuah kota yang mampu diperhitungkan secara global melalui perbaikan peringkat Jakarta dalam berbagai penilaian kota global.

Hasil identifikasi sejumlah isu strategis pembangunan dari ke tujuh dokumen perencanaan strategis tersebut kemudian disajikan dalam satu tabel di bawah ini untuk memudahkan melakukan *content analysis* untuk mencari kesamaan arti, maksud dan konteks dari masing-masing pernyataan isu.

Tabel 4.6 Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan yang Relevan dengan Provinsi DKI Jakarta Bersumber dari Dokumen Perencanaan Strategis

No	Isu Pembangunan	No	Isu Pembangunan
I	Isu Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yang Relevan dengan DKI	IV	Isu dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DKI 2022-2042
1.	Produktivitas Masih Rendah	1.	Kebencanaan Sumber Daya Alam
2.	Kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masih Rendah	2.	Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3.	Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan Masih Rendah	3.	Kebencanaan
4.	Kontribusi UMKM dalam Ekonomi Relatif Rendah	V	Isu Strategis RTRW 2022-2042:
5.	Masih Tingginya Penggunaan Energi Berbasis bahan bakar Fosil	1.	Mobilitas Penduduk Tidak Efisien Sehingga Muncul Kemacetan dan Ekonomi Biaya Tinggi
6.	Rendahnya Pengelolaan Limbah B3 dan pemanfaatan SDA yang merusak ekosistem	2.	Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital
7.	Rendahnya Literasi Digital	3.	Munculnya Pertumbuhan Permukiman Bersifat <i>Squatter</i> dan <i>Sprawling</i>
8.	Konektivitas Antar Wilayah Masih Ada Kesenjangan	4.	Kurangnya Pengendalian Pembangunan Menyebabkan Masalah Lingkungan

9.	Akses Pendidikan Belum Merata dan kualitas pendidikan masih rendah	5.	Rendahnya Kualitas Lingkungan
10.	Tingginya beban penyakit menular dan tidak menular serta kekurangan gizi mikro dan makro	VI	Isu Strategis KLHS RTRW 2022-2042
11.	Belum meratanya jaminan sosial	1.	Kesenjangan Penghidupan Masyarakat
12.	Tata Kelola masih harus diperbaiki	2.	Keberlanjutan Sumber Daya Alam
13.	Tingginya laju kehilangan dan rendahnya kehati	3.	Risiko Kebencanaan Tinggi
II.	Tata Ruang Jabodetabekjur (Perpres 60/2020)	4.	Tata Kelola Pemanfaatan Ruang
1.	Banjir	VII	Isu strategis RPD Tahun 2023-2026
2.	Ketersediaan air	1.	Ketahanan Terhadap Bencana
3.	Sanitasi dan persampahan	2.	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Kemacetan	3.	Ketahanan Ekonomi Inklusif
5.	Permasalahan pesisir dan pulau reklamasi	4.	Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
6.	Pengaturan Kawasan Pulau Seribu	5.	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
7.	Antisipasi pemindahan IKN	6.	Pemerataan Pembangunan
III	Isu dari Naskah Akademis RUU DKJ		
1.	Tata Kelola Kawasan Jabodetabekpunjur		
2.	Perbaikan peringkat <i>Global Power City Index</i> Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional		

Langkah selanjutnya adalah penelaahan ke empat puluh satu isu pembangunan tersebut, dengan menggunakan metode analisis substansi (*content analysis*), dengan cara mencermati intisari dari masing-masing isu pembangunan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.



Dari hasil analisis ini diperoleh sintesis sebanyak enam isu pembangunan berkelanjutan strategis sebagai berikut:

1) Tingginya Risiko Bencana

Tingginya risiko bencana di DKI Jakarta didominasi oleh adanya bencana banjir di sekitar wilayah sungai yang mengalir dari hulu di wilayah selatan menuju hilir di Laut Jawa di Utara dan banjir rob di pesisir utara DKI Jakarta. Dalam beberapa tahun belakangan, memang jumlah dan lama genangan di DKI Jakarta relatif menurun seiring dengan upaya perbaikan kawasan sekitar sungai di DKI Jakarta yang disebut

dengan normalisasi kawasan sungai begitu juga dengan upaya membangun tanggul pantai di pesisir Utara sudah nampak adanya penurunan jumlah banjir Rob.

Namun seiring dengan adanya perubahan iklim, dalam kurun waktu tersebut juga terjadi cuaca ekstrem dimana curah hujan turun dengan intensitas tinggi tidak merata dalam waktu yang singkat telah menimbulkan genangan-genangan baru terutama di jalan protokol yang menyebabkan kemacetan panjang, dan di pesisir utara jika bersamaan dengan pasang air naik, maka menimbulkan genangan yang lebih lama.

2) Belum Optimalnya Tata Kelola Berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan

Tata kelola berbasis wilayah fungsional perkotaan terkait dengan upaya tata kelola berbagai permasalahan di DKI Jakarta yang bersifat hulu hilir, dimana terkait dengan isu bencana banjir dan air bersih ada berbagai urusan yang kewenangan atau minimal pengaruhnya sangat tergantung dengan wilayah sekitar DKI Jakarta, dalam hal ini kawasan Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Dalam penyediaan air bersih DKI Jakarta masih sangat tergantung kepada wilayah DAS Citarum yang berhulu di Bandung Utara sedangkan Ciliwung belum dimanfaatkan secara optimal. Upaya dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dengan mendorong peningkatan perjalanan menggunakan transportasi umum untuk komuter masih belum meningkat, salah satunya karena integrasi dengan layanan transportasi umum di wilayah asal yang masih sangat kurang.

3) Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan,

Pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan di DKI Jakarta sangat rendah, dapat dilihat dalam Index global city bahwa peran riset dan pengembangan (R&D) dalam pembangunan perkotaan relatif sangat rendah, termasuk upaya kolaborasi dengan universitas dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan. Perlu dilihat seberapa besar pemangku kepentingan utama di Jakarta seperti pemerintah dan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan besar (holding company) dan perguruan tinggi menyediakan dana untuk kolaborasi riset dan pengembangan.

4) Kesenjangan Sosial-Ekonomi.

Kesenjangan sosial ekonomi di Jakarta dapat dilihat dengan mudah dengan masih adanya kekumuhan di Jakarta. Selain itu dapat dilihat bahwa akses terhadap pendidikan yang inklusi bagi penyandang disabilitas juga masih rendah termasuk juga akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Dengan karakter kegiatan ekonomi di DKI Jakarta yang beragam, ternyata lulusan SMA dan SMK di Jakarta masih cukup banyak yang belum dapat terserap oleh dunia kerja.

5) Degradasi Kualitas Lingkungan,

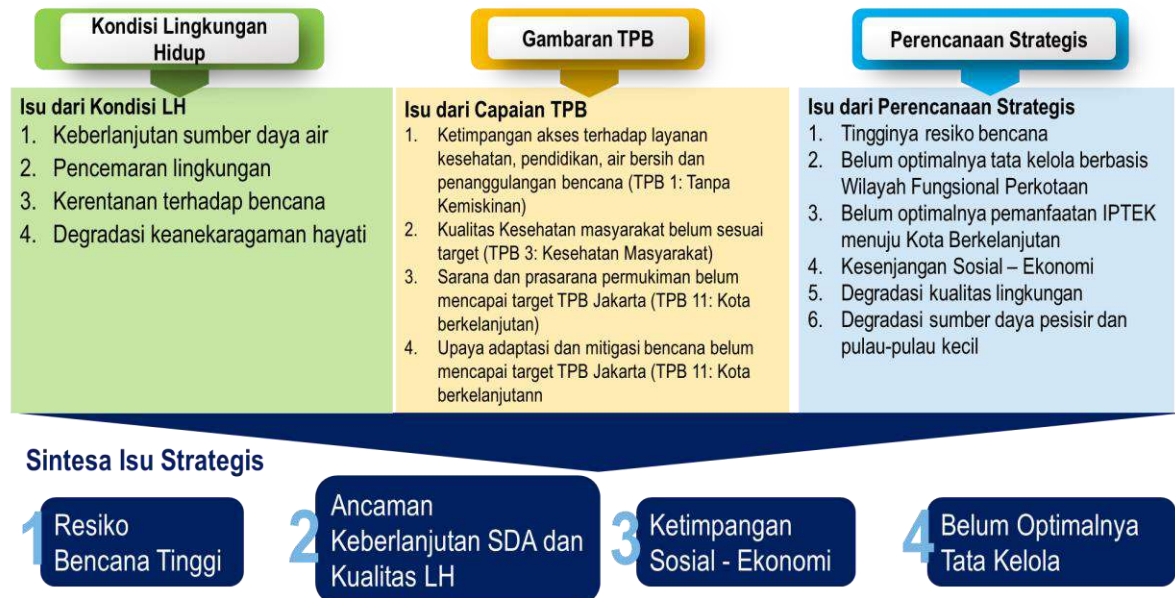
Degradasi kualitas lingkungan di DKI Jakarta masih nyata terlihat dengan adanya ketergantungan air bersih dari wilayah lain, masih tingginya produksi sampah, kualitas udara yang cenderung masih buruk terutama di saat hari dan waktu kerja, masih adanya kejadian bencana banjir, penurunan muka air tanah dan banjir rob.

6) Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Degradasi sumber daya pesisir terutama ancaman perubahan iklim dimana potensi kenaikan permukaan air laut mengancam menenggelamkan pulau-pulau kecil dan terjadinya *bleaching* di terumbu karang di Kepulauan Seribu. Selain itu masalah sampah dari daratan yang terbawa arus laut terdampar di pulau-kecil sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.2.4 Hasil Analisis Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan secara Teknokratik

Isu-isu pembangunan berkelanjutan hasil dari pendekatan teknokratik sebagaimana dijelaskan di atas dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk memperoleh daftar pendek isu pembangunan yang paling strategis. Hasilnya disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 4.15 Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pendekatan Teknokratik dan Sintesisnya

4.3 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Partisipatif

4.3.1 Focus-Group Discussion (FGD) Isu Pembangunan Berkelanjutan

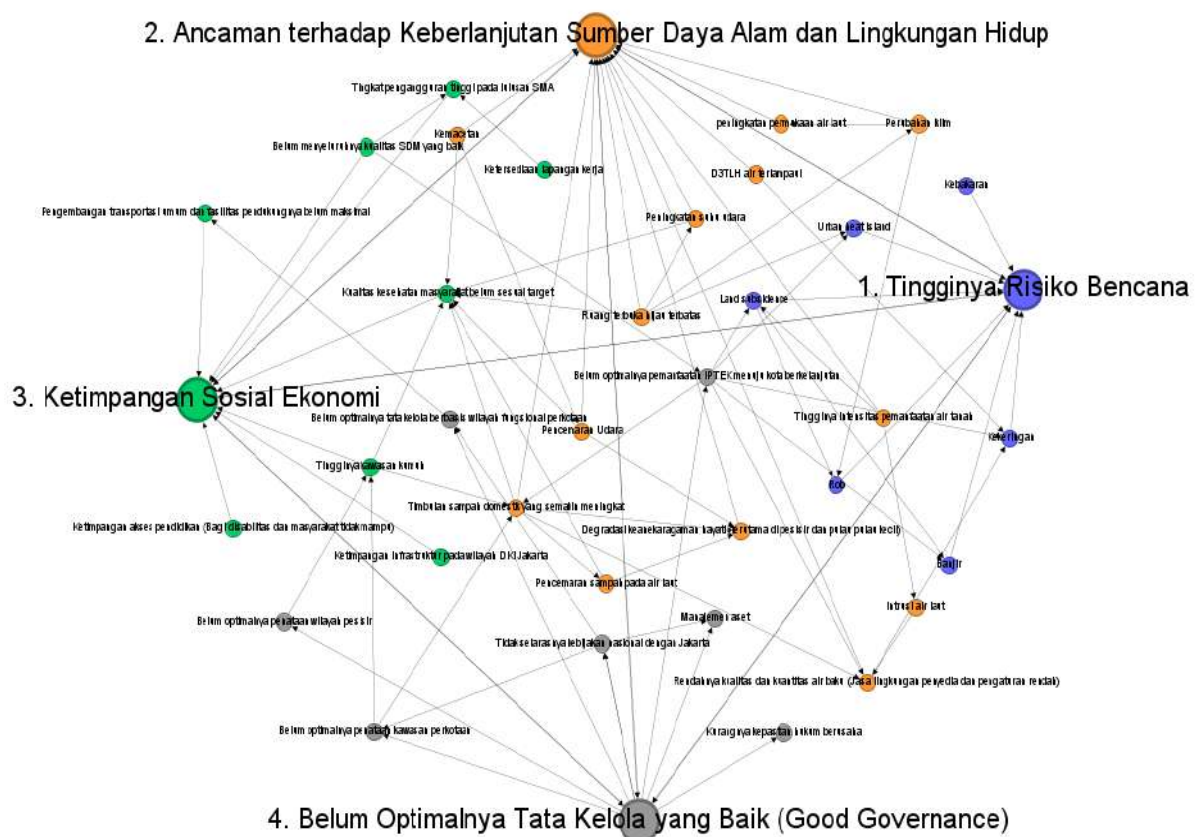
Proses dan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan pada Bagian 4.2 di atas kemudian dipaparkan dalam satu *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 27 Juni 2023, dengan undangan sebanyak 50 (lima puluh) peserta dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, untuk pengayaan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan penajaman perumusan isu pembangunan strategis. Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari proses FGD ini selanjutnya divisualkan dengan menggunakan Aplikasi *Gephi* untuk memperlihatkan saling keterkaitan antar isu strategis maupun antar isu-isu pembangunan terkait. (Untuk dokumen-dokumen terkait FGD, dapat dilihat pada). Masukan-masukan yang diperoleh dari FGD dirangkum dalam Tabel 4.7 di bawah.

Tabel 4.7 Rangkuman Masukan dari FGD Pengkayaan dan Penajaman Isu Pembangunan Strategis

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
	Risiko Bencana		Ketimpangan Sosial Ekonomi
1.	Banjir	1.	Ketimpangan Infrastruktur pada wilayah DKI Jakarta
2.	Land Subsidence	2.	Ketimpangan akses Pendidikan
3.	Urban Heat Island	3.	Belum menyeluruhnya kualitas SDM
4.	Kekeringan	4.	Tingkat Pengangguran Tinggi pada lulusan SMA
	Keberlanjutan Sumber Daya Air	5.	Pengembangan transportasi umum dan fasilitas pendukungnya belum maksimal
1.	Rendahnya kualitas dan kuantitas air baku	6.	Kualitas kesehatan masyarakat belum sesuai target
2.	Rendahnya kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan	7.	Tingginya kawasan kumuh

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
3.	Pencemaran sampah pada air laut		Tata Kelola
	Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan
1.	Pencemaran Udara	2.	Belum optimalnya tata kelola berbasis wilayah fungsional perkotaan
2.	Ruang terbuka hijau terbatas	3.	Manajemen aset
3.	Perubahan Iklim: peningkatan permukaan air laut	4.	Tidak Selarasnya Kebijakan Nasional dengan Jakarta
4.	Degradasi Keanekaragaman Hayati	5.	Kurangnya kepastian hukum berusaha
		6.	Penataan wilayah pesisir, Reklamasi
		7.	Penataan kawasan perkotaan

Masukan-masukan dari FGD sebagaimana dimuat dalam Tabel 4.7 di atas dimanfaatkan untuk memperkaya hasil identifikasi dan perumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari proses teknokratik. Kemudian, seluruh isu pembangunan strategis yang sudah diidentifikasi disimulasikan dalam Aplikasi *Gephi* untuk memvisualisasikan keterkaitan antar isu dan untuk menunjukkan isu-isu pembangunan yang paling strategis, sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.16 di bawah.



Gambar 4.16 Visualisasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Keterkaitan antara Isu
Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.3.2 Konsultasi Publik Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari pendekatan teknokratik dan partisipatif sebagaimana dijelaskan pada Butir 4.3.1 di atas kemudian dibawa dan didiskusikan di dalam forum Konsultasi Publik pada tanggal 6 Juli 2023, dengan undangan berjumlah 100 (seratus) peserta dari berbagai kelompok kepentingan, untuk masukan dari publik guna menyempurnakan hasil identifikasi dan perumusan isu

pembangunan berkelanjutan. Banyak diskusi tentang klarifikasi terkait isu-isu pembangunan. Masukan terpenting dari Konsultasi Publik ini adalah penajaman rumusan empat isu strategis yang paling strategis.

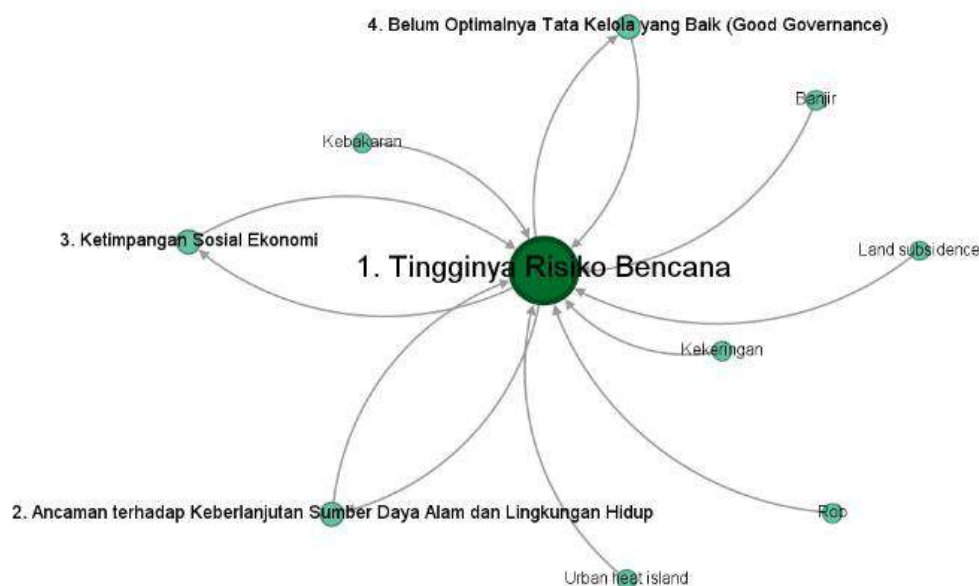
Hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan Strategis yang disepakati dalam Konsultasi Publik adalah:

1. Tingginya Risiko Bencana,
2. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kualitas Lingkungan Hidup,
3. Kesenjangan Sosial-Ekonomi, dan
4. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)

Untuk dokumen-dokumen terkait Konsultasi Publik dapat dilihat pada lampiran 4 & 5.

4.4 Kerangka Kajian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

4.4.1 Tingginya Risiko Bencana



Gambar 4.17 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Tingginya Risiko Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil visualisasi dengan Aplikasi Gephi untuk isu strategis Tingginya Risiko Bencana menunjukkan bahwa kondisi tingkat risiko bencana dipengaruhi juga oleh kondisi ketiga isu lainnya. Risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya kerusakan, akibat bahaya gempa atau bencana alam lainnya, pada suatu daerah, akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Rumus dari risiko bencana adalah:

$$Risiko (R) = Bahaya(H) \times \frac{Kerentanan (V)}{Kapasitas (C)}$$

Dari rumus di atas dapat dilihat keterkaitan isu PB strategis Tingginya Risiko Bencana di DKI Jakarta akan dipengaruhi secara positif oleh tingginya bahaya. Sementara bahaya sangat berkaitan dengan kondisi keberlanjutan Sumber daya alam dan kualitas lingkungan (isu PB strategis ke-2). Kerentanan sendiri dipengaruhi antara lain oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat (isu strategis PB ke-3) seperti kemiskinan, lingkungan yang buruk, konflik, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, anak-anak, wanita, dan lansia yang tidak terlindungi. Sedangkan kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu

dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan, dan lainnya) atau lebih terkait dengan isu strategis PB ke – 4 (Gambar 4.17).

Bencana di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi bencana alam dan bencana non alam (kebakaran, kegagalan teknologi dan wabah penyakit). Kajian ini dimaksudkan untuk merekomendasikan alternatif upaya penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK. Tingginya risiko bencana alam DKI Jakarta merupakan isu yang dimiliki dan sulit dihindari terkait dengan lokasi geografis wilayah sebagai daerah yang rawan bencana. Indikator makro yang digunakan untuk Risiko bencana alam adalah IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang merepresentasikan kriteria tingkat bencana, kerentanan bencana, kapasitas daerah termasuk pemanfaatan IPTEK. Sementara indikator makro bencana non-alam menggunakan indikator makro tingkat bahaya dengan kriteria jumlah kejadian, jumlah penduduk terdampak dan jumlah kerugian ekonomi dan kapasitas daerah dalam penanggulangan. Untuk bencana alam, nilai IRBI dapat diproyeksikan penurunannya. Sebaliknya untuk bencana non-alam tidak dapat diproyeksikan karena baik kejadian, lokasi, dan waktu atau tingkat bahaya tidak dapat atau sulit diproyeksikan. Oleh karenanya indikator makro yang digunakan dalam kajian ini adalah kapasitas daerah dan masyarakat dalam memitigasi dan menanggulangi bencana.

Di dalam Rancangan akhir RPJPN 2025-2045, indikator terkait resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim digunakan Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB dari kondisi baseline 2025 sebesar 0,14% menurun menjadi 0,11% di tahun 2045.

Berdasarkan hal di atas, berikut ini merupakan kerangka kajian isu risiko bencana tinggi.

Tabel 4.8 Kerangka Kajian Isu Risiko Bencana Tinggi

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji penurunan risiko bencana melalui upaya penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK	Tingkat bencana	<ul style="list-style-type: none"> IRBI untuk bencana alam Risiko Bencana Alam dan non Alam
	Kerentanan bencana	
	Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana)	
	Pemanfaatan IPTEK (<i>Digital Platform</i>)	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Risiko Bencana Alam - Indeks Risiko Bencana

Pada tahun 2022 Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 3 jenis bencana alam yang dominan terjadi di DKI Jakarta adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 62.58 (sedang). Angka indeks ini kian menurun dari tahun 2015 yang menunjukkan risiko bencana di DKI Jakarta semakin rendah.



ANCAMAN BENCANA:

Gempabumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrem/abrasi.

NILAI IRB 2022:
62.58
(SEDANG)

Gambar 4.18. Indeks Risiko Bencana DKI Jakarta 2015 -2022

Sumber: IRBI, 2022



a. Banjir

Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi di Jakarta. Genangan dalam jumlah besar dapat melumpuhkan Ibukota dan menimbulkan dampak yang cukup besar karena banyak kegiatan ekonomi yang terganggu. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013). Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hilir dari beberapa DAS yaitu DAS Ciliwung, DAS Pesanggrahan, DAS Angke, DAS Cakung, DAS Sunter, dan DAS Krukut Grogol. Selain itu, karakteristik ekoregion daratan DKI Jakarta hampir 50% luasnya memiliki karakteristik ekoregion rawan banjir yaitu berupa ekoregion fluvial bermaterial aluvium, fluviomarine dan dataran organik.

Kejadian banjir di wilayah DKI Jakarta yang merupakan hilir DAS ini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi di wilayah DAS bagian Hulu dan DAS bagian Tengah yang mana letaknya di luar wilayah administrasi DKI Jakarta. Oleh karenanya penanganan banjir di DKI Jakarta harus terintegrasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya.

Selain itu, permasalahan banjir tidak hanya disebabkan semata karena faktor alam. Pada umumnya, permasalahan banjir terkait dengan makin berkurangnya kemampuan wilayah meresapkan air dan/atau mengalirkan air ke laut (karena daerah hilir). Hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan banjir sangat berkaitan dengan luasan wilayah resapan air atau kondisi infrastruktur hidrologi yang ada seperti saluran drainase, situ, bangunan pengendali banjir serta kondisi sungai yang baik. Menurut Ketua Panitia Khusus Banjir (Pansus Banjir) DPRD DKI Jakarta (2020 dalam SIKPLHD Jakarta 2022) menyebutkan bahwa kapasitas sungai yang ada di DKI Jakarta dalam mengalirkan air hanya 950 m³/s, sedangkan rata-rata debit air banjir tahunan mencapai 2.100-2.650 m³/s. Terjadinya sedimentasi dan penyempitan daerah aliran sungai karena alih guna fungsi lahan juga membuat sungai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengalirkan air.

Upaya penanganan banjir di DKI Jakarta setiap tahun sudah dilaksanakan. Meskipun demikian, kejadian banjir masih terjadi hingga saat ini. Indeks risiko bencana banjir tahun 2020 - 2022 menunjukkan bahwa risiko bencana banjir berbeda antara kota administrasi yang ada. Tabel di bawah ini menunjukkan Indeks Risiko Bencana Banjir yang dikeluarkan oleh BNPB.

Tabel 4.9 Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2020 - 2022

Kota/Kabupaten	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jakarta Utara	Tinggi (27,58)	Tinggi (18,15)	Tinggi (22,54)
Jakarta Timur	Tinggi (25,74)	Tinggi (16,94)	Tinggi (21,03)
Jakarta Pusat	Tinggi (25,74)	Tinggi (16,94)	Tinggi (21,03)
Jakarta Barat	Tinggi (25,74)	Tinggi (16,94)	Tinggi (21,03)
Jakarta Selatan	Tinggi (17,16)	Sedang (11,29)	Tinggi (14,02)
Kepulauan Seribu	Tinggi (21,60)	Sedang (10,89)	Tinggi (13,52)

Sumber: BNPB, 2022

Secara umum, meskipun di tahun 2021 terdapat 2 (dua) kota/kabupaten yang memiliki indeks Sedang, risiko bencana Banjir DKI Jakarta masih dapat dikategorikan sebagai Risiko Tinggi. Sesuai dengan rumus risiko, penyebab tingginya risiko dapat dipengaruhi oleh Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas.

Ditinjau dari aspek hidrologis atau faktor alam, sumber banjir di DKI Jakarta adalah 1) hujan yang jatuh di wilayah Jabodetabek dan mengalir atau bermuara di Jakarta; 2) tingginya curah hujan yang terjadi di Jakarta dan 3) adanya pasang naik air laut di wilayah Jakarta Utara. Risiko bencana banjir tersebut diperparah oleh faktor manusia maupun tata kelola kota. Berdasarkan hasil kajian BNPBD DKI Jakarta, terdapat beberapa faktor lain yang memperparah bencana banjir:

- a. Penurunan permukaan air tanah, dipengaruhi oleh penggunaan atau eksploitasi air tanah yang berlebihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tanah, diperkirakan laju penurunan tanah sekitar 3 - 18 cm per tahun. Selain itu, wilayah Jakarta Utara berbatasan dengan laut, sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga mengakibatkan aliran air dari hulu tidak dapat terbuang atau mengalir langsung ke laut.
- b. Keberadaan jaringan drainase di Provinsi DKI Jakarta yang over atau melebihi kapasitas menampung air hujan. Hal ini dapat terlihat dari genangan air di berbagai lokasi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tidak optimalnya fungsi drainase disebabkan oleh saluran air yang ada tersumbat oleh sampah dan tertutupnya permukaan tanah yang dilapisi material yang kedap air, sehingga air tidak dapat meresap dalam tanah dengan baik.
- c. Pendangkalan dan rusaknya saluran dan tangkapan air seperti drainase, waduk, banjir kanal, dan sungai. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kapasitas dalam menampung volume air yang menyebabkan terjadinya peluapan air. Selain itu, terjadinya pendangkalan sungai-sungai yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta memicu terjadinya banjir, hal ini diperparah dengan terjadinya curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dan durasi lama di wilayah hulu (Bogor dan sekitarnya).
- d. Perubahan tutupan lahan. Dari tahun ke tahun terjadi perubahan tutupan lahan yang signifikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, seperti permukiman semakin luas dan keberadaan ruang terbuka hijau yang kecil. Kondisi tersebut memicu peluang meluapnya sungai dan jaringan drainase jika terjadi hujan lebat.
- e. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin hari kian menurun, seperti pembuangan sampah secara sembarangan dan pembangunan secara masif di sekitar bantaran sungai.

b. Kekeringan

Sedangkan untuk indeks risiko kekeringan, DKI Jakarta memiliki klasifikasi risiko sangat-sangat rendah menuju ke rendah, yang didominasi oleh kelas rendah di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Untuk kelas sangat-sangat rendah berada di Jakarta Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki kerentanan rendah terhadap bencana kekeringan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya risiko bencana alam dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) **Karakteristik wilayah**, Wilayah DKI Jakarta secara alamiah memang berpotensi terhadap bahaya bencana. Jakarta merupakan dataran rendah dan wilayah bagian hilir beberapa Daerah Aliran Sungai serta muara dari Sungai-sungai tersebut. DKI Jakarta juga memiliki pesisir yang sebagian memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, wilayah perairan laut yang luas dan pulau-pulau kecil – sedang berpenghuni.
- 2) **Kependudukan**, DKI Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk dan kepadatannya menimbulkan berbagai permasalahan berkaitan dengan kerentanan. Pada saat terjadinya bencana, jumlah penduduk yang terpapar bencana menjadi banyak. Selain itu, dari data yang ada, Masyarakat dengan umur rentan dan atau miskin yang terdampak bencana masih tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi sebagian besar terdapat di wilayah daratan DKI Jakarta. Tingginya penduduk ini menyebabkan beberapa lokasi yang telah teridentifikasi rawan bencana tetap menjadi Kawasan permukiman.
- 3) **Kapasitas Daerah**, Untuk menurunkan tingkat risiko bencana, diperlukan peningkatan kapasitas daerah. Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan Masyarakat untuk melakukan Tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana. Kapasitas daerah ditentukan menggunakan



Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Hasil kajian BNPB DKI Jakarta menunjukkan bahwa IKD DKI Jakarta masih tergolong Sedang. Penghitungan IKD didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas yaitu 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik; 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; 5) Peningkatan Efektivitas pencegahan dan Mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7) pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Tabel 4.10 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,69	0,54	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3	Pengembangan Sistem Informasi Diklat and logistik	0,63		
4	Penanganan tematik Kawasan rawan bencana	0,61		
5	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,57		
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,51		
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,44		

Sumber: BPBD, 2022

Secara umum, ketujuh prioritas tersebut perlu ditingkatkan kapasitasnya. Meskipun demikian, dari ke tujuh indeks prioritas, terdapat 3 prioritas yang masih di bawah rata-rata perlu menjadi perhatian, yaitu pengembangan sistem pemulihan bencana, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dan perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

c. Perubahan Iklim

Faktor perubahan iklim dirasakan secara global. Namun demikian, wilayah DKI Jakarta yang memang termasuk wilayah rawan terhadap bencana, akan merasakan dampak dari fenomena perubahan iklim tersebut. Dengan adanya pemanasan global tersebut mengakibatkan perubahan iklim serta kenaikan frekuensi atau intensitas cuaca yang ekstrem. Dilihat dari analisis proyeksi perubahan suhu kenaikan suhu pada daerah utara Jakarta lebih hangat $0,2^{\circ}\text{C}$ daripada wilayah selatan. Kenaikan suhu bersifat naik turun, batas bawah (rata-rata minimum suhu harian) selalu naik $0,1^{\circ}\text{C}$ hingga 1°C dari pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika suhu naik, evaporasi meningkat dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan air bersih (debit andalan sungai khususnya daerah hulu). Jika pasokan air bersih tidak terpenuhi, masyarakat akan kembali mengekstraksi air tanah. Waspada kenaikan muka air laut akibat kenaikan suhu, ditambah tren curah hujan yang meningkat 10-20 tahun yang akan datang yaitu bahaya banjir.

Fenomena perubahan iklim diproyeksikan menyebabkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem lebih tinggi dan lebih cepat terjadi. Herizal mengatakan dari pengkajian data historis curah hujan harian BMKG selama 150 tahun (1866-2015), terdapat tren semakin seringnya kejadian hujan ekstrem tahunan, peningkatan 2-3% probabilitas bila dibandingkan dengan kondisi iklim 100 tahun lalu. BNPB mencatat, curah hujan di Jakarta pada awal Januari tahun 2020 menjadi curah hujan tertinggi dalam 1,5 abad. Berdasarkan data

BNPB, curah hujan mencapai 377 mm/hari. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari curah hujan tahun 2016 yang mencapai 100-150 mm/hari.

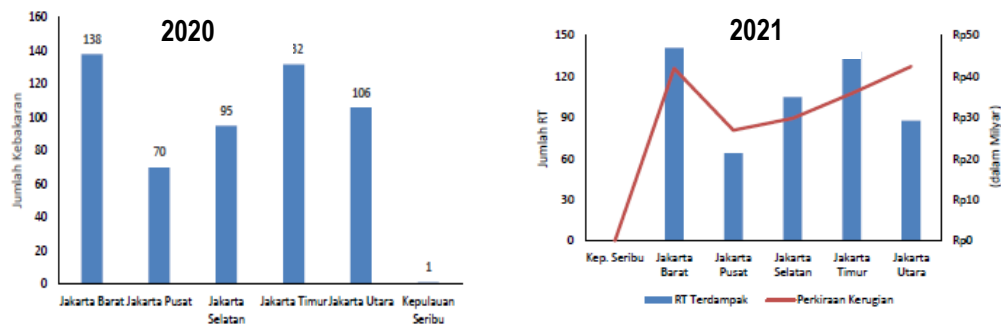
Kota Jakarta termasuk pada kota delta (*delta city*) atau dapat disebut dengan kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Dampak nyata dari perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat adalah bencana banjir yang sedikit banyak terpengaruh dari adanya perubahan iklim. Di bawah ini merupakan gambaran dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu pada permukaan laut dapat mengakibatkan naiknya tinggi muka air laut, sementara pengaruhnya pada daratan salah satunya adalah potensi kekeringan.

Merujuk pada data SIDIK (Sistem Informasi Data indeks Kerentanan) tahun 2018 seperti dijelaskan pada sub bab 3.2.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah *main land* dan Kepulauan Seribu (data skala kota/kabupaten). Fenomena perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi kondisi kelembapan udara, suhu udara, serta curah hujan, tetapi juga kondisi suhu permukaan. Perubahan kondisi permukaan terjadi akibat lahan yang didominasi oleh lahan terbangun. Pada wilayah perkotaan, dimana permukaan bangunan gedung-gedung lebih banyak menyerap energi panas daripada memantulkannya, sehingga mengakibatkan naiknya suhu di wilayah sekitar gedung. Kondisi tersebut jika terus meningkat akan menimbulkan adanya fenomena *Urban Heat Island* (UHI). UHI merupakan fenomena yang terjadi di sebuah kota atau wilayah metropolitan yang secara signifikan lebih panas dibandingkan sekitarnya, akibat dari aktivitas yang lebih besar di wilayah tersebut. Fenomena *Urban Heat Island* tidak bisa lepas dari kondisi provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu kota dengan status kota metropolitan dengan dominasi lahan terbangun. Dengan status tersebut, maka provinsi DKI Jakarta berpotensi mengalami kenaikan suhu permukaan karena didominasi oleh lahan terbangun dan sedikit lahan bervegetasi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada tahun 2018, beberapa lokasi pada 3 wilayah perkotaan tersebut, mengalami peningkatan suhu tertinggi mencapai 39°C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara fluktuatif, yaitu 37°C, 35°C, dan 36°C. Meningkatnya suhu permukaan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di beberapa lokasi dikarenakan faktor lahan yang didominasi oleh lahan terbangun yang cenderung menyerap panas dibandingkan vegetasi yang memantulkan panas. Hal ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan akibat perubahan iklim dan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

Risiko Bencana Non Alam

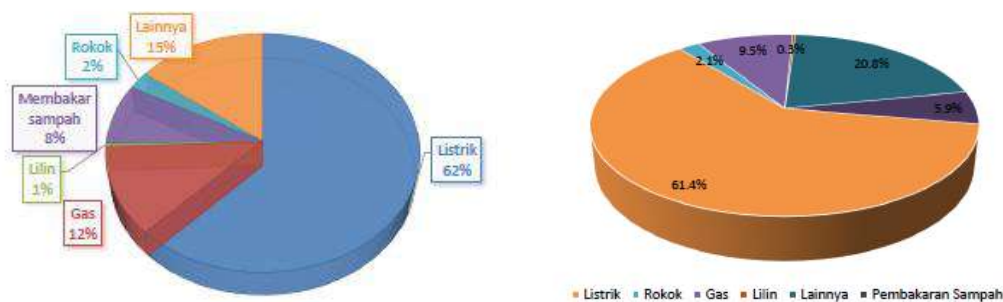
a. Kebakaran

Sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia, kejadian kebakaran muncul hampir setiap hari di DKI Jakarta. Pada tahun 2020, terjadi 5.043 kasus aksi pengendalian kebakaran dan penyelamatan. Rincian jumlah kasus tersebut terdiri atas 1.505 kasus kebakaran dan 3538 kasus penyelamatan serta tercatat kerugian materiil yang ditaksir mencapai angka ratusan juta rupiah. Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sebanyak 397 kejadian. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dan kebocoran gas, dengan bangunan tempat tinggal merupakan objek yang paling sering mengalami kebakaran dengan catatan kebakaran sebanyak 461 kasus dan disusul dengan instalasi luar gedung dengan kasus kebakaran sebanyak 438 kali.



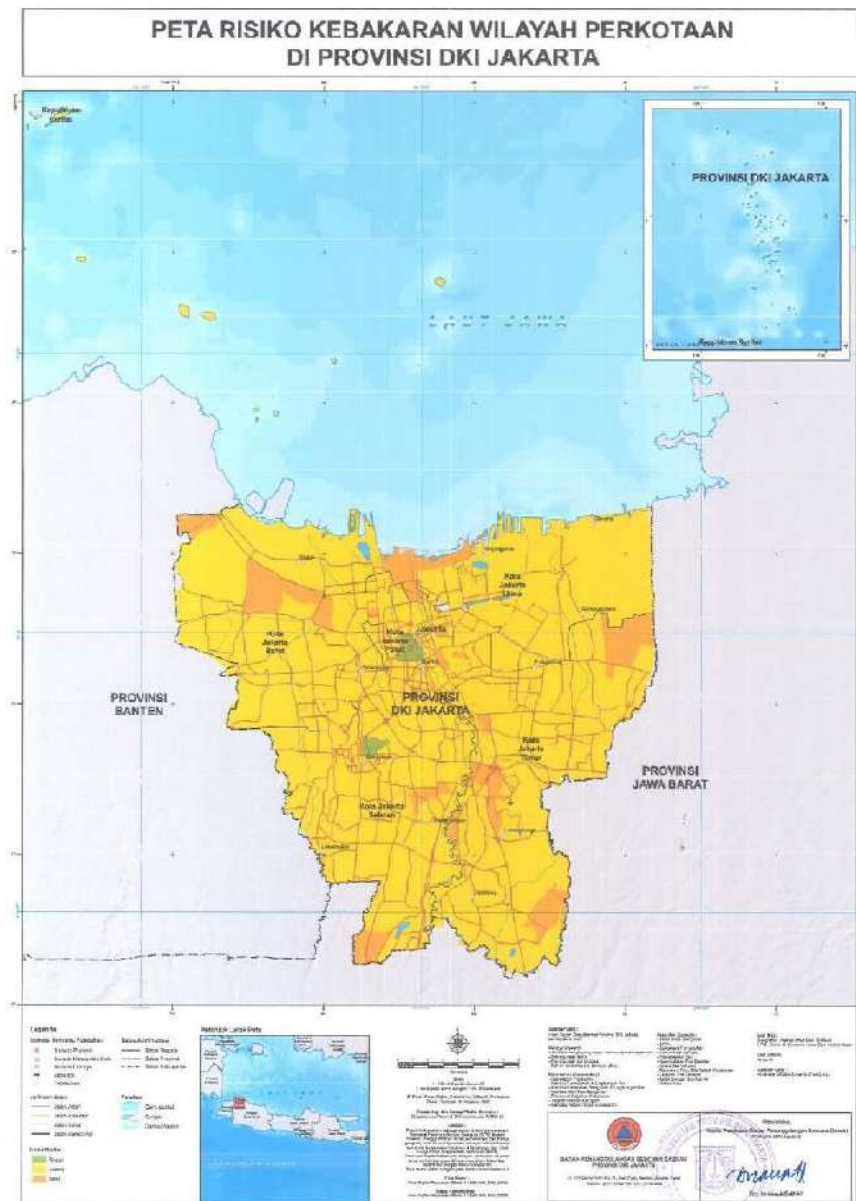
Gambar 4.19 Jumlah RT terdampak dan Perkiraan Kerugian yang dialami akibat Kebakaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Penyebab utama terjadi kebakaran adalah bersumber dari listrik. Kepadatan bangunan yang ada akan memperparah dan memperbanyak jumlah RT yang terdampak serta kerugian yang dialami. Kepadatan bangunan juga mempersulit pihak Pemadam Kebakaran untuk dapat mengendalikan kebakaran yang terjadi karena sulitnya akses menuju lokasi maupun sulitnya akses mencari sumber air.



Gambar 4.20 Sumber Bencana Kebakaran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, menunjukkan bahwa ada 62 wilayah dengan risiko kebakaran sangat tinggi, 482 wilayah dengan risiko kebakaran tinggi, 1417 wilayah dengan risiko kebakaran sedang, 605 wilayah dengan risiko kebakaran rendah, dan 142 wilayah dengan risiko kebakaran sangat rendah. Rata-rata nilai risiko kebakaran di **DKI Jakarta pada tahun 2022 secara keseluruhan** dari kompilasi skor RW dan skor FGD memiliki nilai persentase **48% dengan kategori sebagai risiko kebakaran sedang.**

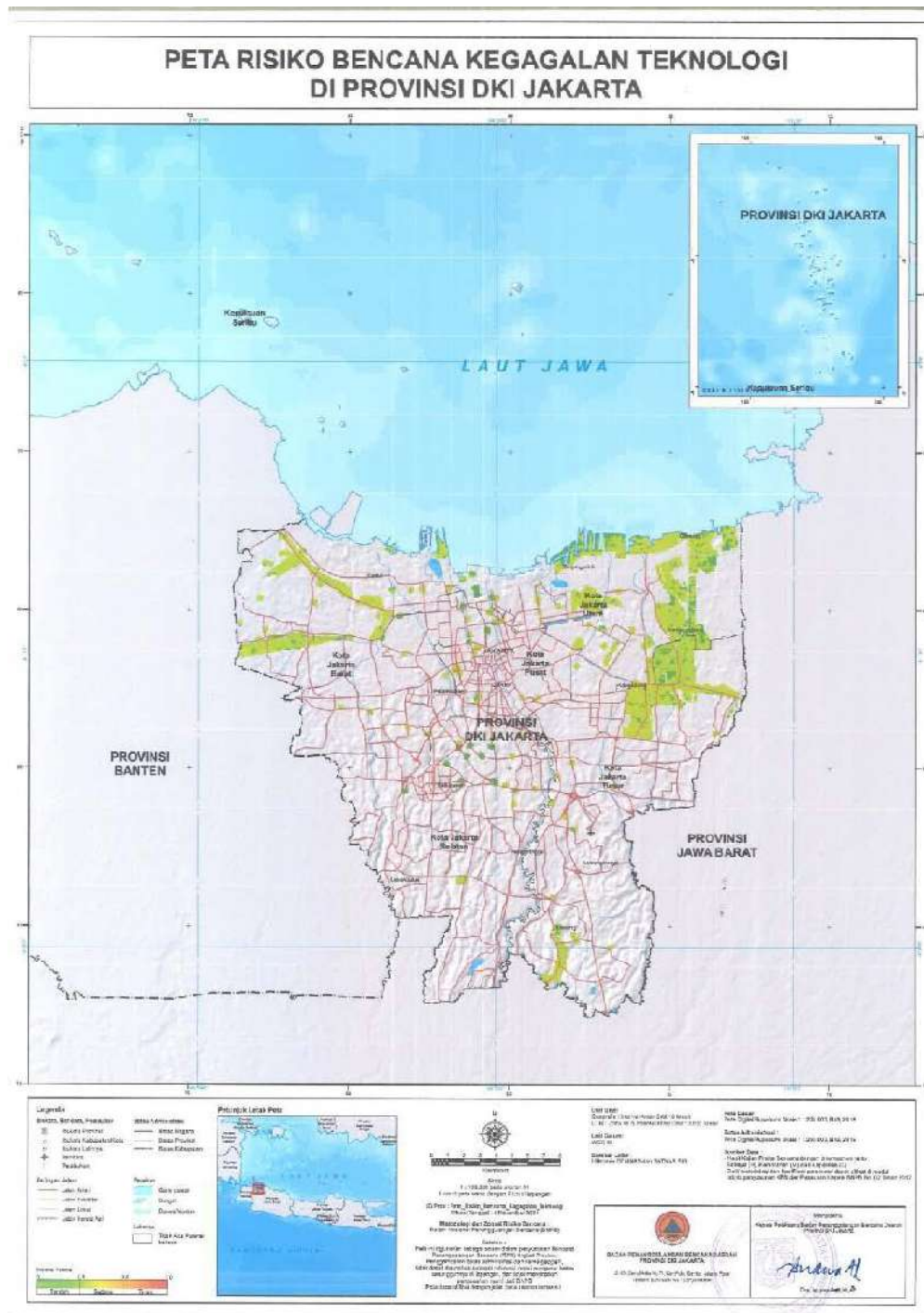


Gambar 4.21 Risiko Bencana Kebakaran Perkotaan 2022

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2022 – 2026

b. Kegagalan Teknologi

Bencana gagal teknologi merupakan jenis kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi seperti bencana kecelakaan transportasi, kecelakaan industri kegagalan konstruksi dan bangunan seperti: lereng galian/timbunan longsor, tanggul saluran jebol, situ/embung/ bendungan runtuh, dan lain sebagainya. Berdasarkan dokumen rancangan Rencana Penanggulangan Bencana tahun **2022**, risiko bencana **kegagalan teknologi** di Provinsi DKI Jakarta berada pada **kelas Sedang**.



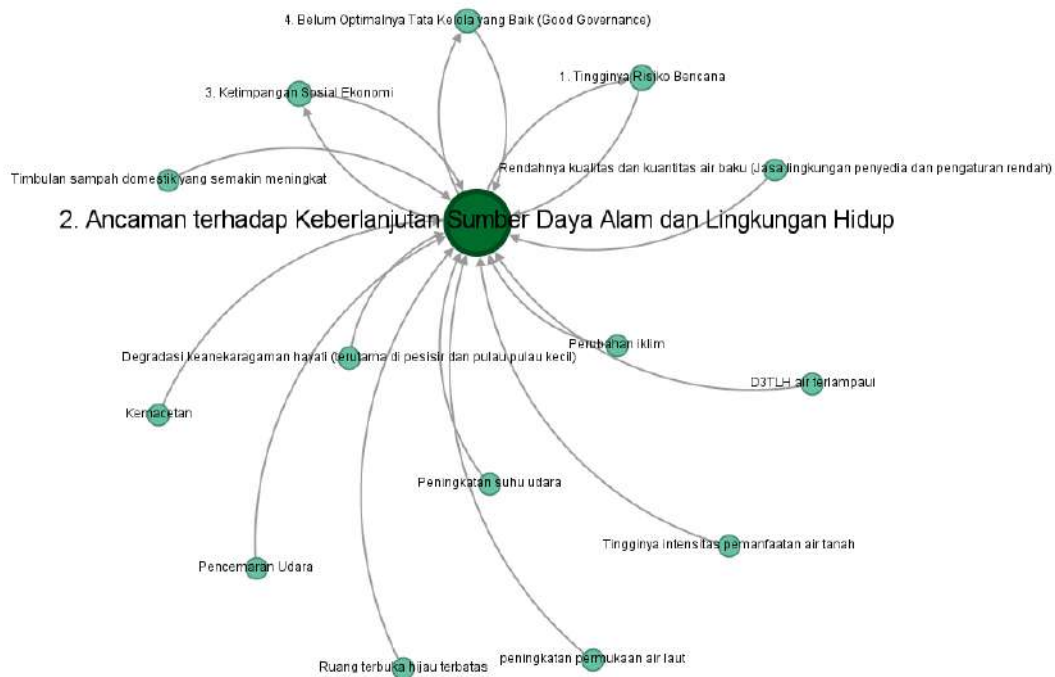
Gambar 4.22 Risiko Bencana Kegagalan Teknologi 2022
Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2022 - 2026

c. Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi adalah kondisi yang mirip dengan wabah. Keadaan dikatakan epidemi jika suatu kelompok masyarakat atau wilayah terkena penyakit menular dan kejadiannya terjadi secara cepat. Berdasarkan dokumen rancangan Rencana Penanggulangan Bencana tahun **2022**, risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta berada pada **kelas Sedang**.



4.4.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup



Gambar 4.24 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Keberlanjutan SDA dan Kualitas LH

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Isu paling strategis **Keberlanjutan Sumber Daya Alam** terdiri atas sejumlah isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi penyebab terjadinya isu keberlanjutan sumber daya alam terutama di Kawasan pesisir. Isu-isu pembangunan berkelanjutan ini meliputi permasalahan lingkungan terutama pada udara, air, dan lahan.

Berdasarkan isu di atas, tabel berikut merupakan isu ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan akan menghasilkan gambaran alternatif upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup (air, lahan dan udara) menuju tercapainya keberlanjutan sumber daya alam.

Tabel 4.11 Kerangka Kajian Isu Keberlanjutan SDA dan Kualitas LH

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup (Air, Lahan, Udara) untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	IKLH (IKA, IKU, IKTL)
		Indeks Pengelolaan Sampah
		Emisi GRK
	Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA	Daya Dukung Air
		Infrastruktur Perkotaan (Penyediaan Air Bersih, Persampahan, Sanitasi)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara garis besar kriteria yang digunakan mencakup:

1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan indikator yang digunakan adalah:
 - a. IKLH yang agregatnya yaitu IKA, IKU, IKTL.
 - b. Indeks pengelolaan sampah
 - c. Emisi GRK.

Ketiga indikator yang digunakan ini juga menjadi indikator pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu indikator tujuan pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas. Baseline IKLH tahun 2025 dengan data 2020 adalah sebesar 0,35 dan sasaran untuk 2045 adalah 0,75. Selain IKLH, Timbulan

sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga menjadi indikator lingkungan hidup berkualitas dalam RPJPN. Baseline 2025 adalah 15% terolah dan 13% terdaur ulang, sedangkan sasaran di tahun 2045 adalah 90% terolah dan sebanyak 35% terdaur ulang.

Indikator Emisi GRK menjadi indikator dalam RPJPN untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Baseline persentase penurunan emisi GRK secara kumulatif adalah 28,12 di tahun 2025 dan sasaran di tahun 2045 adalah sebesar 51,51%. Sementara baseline untuk persentase penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 32,65% dan sasaran di tahun 2045 adalah sebesar 80,98%.

2. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA dengan indikator yang digunakan adalah:
 - a. Daya dukung air. Kondisi daya dukung air DKI Jakarta menjadi masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan. Pemanfaatan dan pengelolaan air perlu diupayakan secara tepat dan cepat untuk mengatasi daya dukung air yang makin memburuk. Kondisi secara umum di Indonesia, Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, Rancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045, situasi baseline suplai air domestik pada tingkat nasional masih mampu memenuhi permintaan air keseluruhan, meski pada skala pulau, pada wilayah tertentu di tahun 2000, tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan kelangkaan termasuk di Pulau Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan air yang makin meningkat dan tinggi serta penurunan luas tutupan hutan lahan.
 - b. Ketersediaan infrastruktur perkotaan menjadi indikator pada pemanfaatan dan pengelolaan SDA karena belum terpenuhinya atau belum terkelolanya infrastruktur perkotaan dengan baik dan berbasis kondisi daya dukung lingkungan akan mempengaruhi keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Dalam Rancangan Akhir RPJPN, bahkan dinyatakan bahwa perlu adanya Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai upaya transformatif untuk landasan transformasi Indonesia. Selain itu, arah kebijakan Nasional berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung transformasi ekonomi Nasional antara lain penyediaan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut juga menjadi salah satu arah kebijakan untuk mendukung transformasi sosial Nasional.

IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan ukuran atau nilai yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada lingkup spasial dan periode tertentu. Pada periode sebelum IKLH, untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu kualitas air, udara, dan lahan. Sehingga sulit untuk masyarakat luas menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah dari waktu ke waktu secara garis besar. Salah satu cara untuk melakukan penarikan kesimpulan dari banyak data dan informasi sehingga dapat dengan mudah dipahami masyarakat luas adalah dengan mengkonsolidasikannya dalam bentuk indeks.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.12 Posisi IKLH Provinsi DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	IKA	IKU	IKTL/IKL	IKAL	IKLH
1	2016	24,62	56,4	-	-	36,41
2	2017	21,33	53,56	-	-	35,78
3	2018	31,43	66,57	24,04	-	39,02
4	2019	35,56	67,97	24,66	53,7	40,92
5	2020	41,19	66,69	25,99	59,95	51,94
6	2021	43,1	66,39	26,24	70,37	53,53
7	2022	41,17	68,06	27,07	80,08	54,65

Sumber: Laporan IKLH Provinsi DKI Jakarta 2022

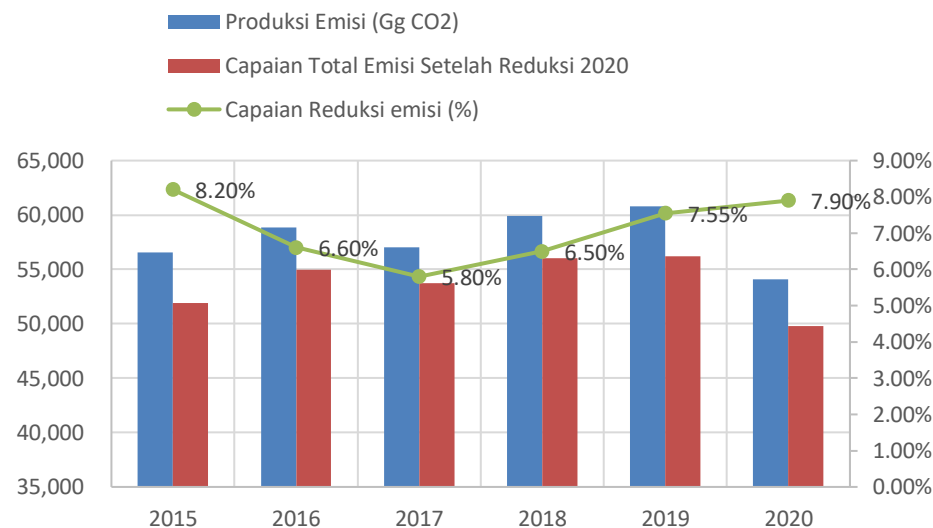
Keterangan:

Perhitungan tahun 2021 sudah menggunakan rumusan IKLH revisi $(0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$

Berdasarkan data tabel dan gambar diatas dapat dilihat IKLH Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan secara signifikan pada nilai IKLH dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 36,41 dan untuk tahun 2022 memiliki nilai 54,63. Dengan melihat peningkatan nilai IKLH Provinsi DKI Jakarta ini menunjukkan tren yang positif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang telah dikelola, sehingga diharapkan akan memberikan efek yang positif terhadap kualitas sumber daya alam yang ada dan pengendalian pencemaran yang semakin baik

Emisi GRK

Produksi emisi GRK DKI Jakarta secara umum meningkat tiap tahun kecuali pada tahun 2020, dimana terjadi penurunan produksi emisi. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan produksi emisi dari sektor energi dan emisi tidak langsung (indirect). Total produksi emisi GRK DKI Jakarta tahun 2020 sebesar 54.056 Gg CO₂e terdiri dari emisi langsung (*direct emission*) sebesar 25.253 Gg CO₂e dan emisi tidak langsung (indirect emission) dari penggunaan listrik PLN sebesar 28.804 Gg CO₂e. Pada 2020, sektor energi merupakan kontributor terbesar penghasil emisi GRK direct (90,5%), diikuti oleh sektor limbah (9,5%) dan sisanya sektor AFOLU (0,03%).

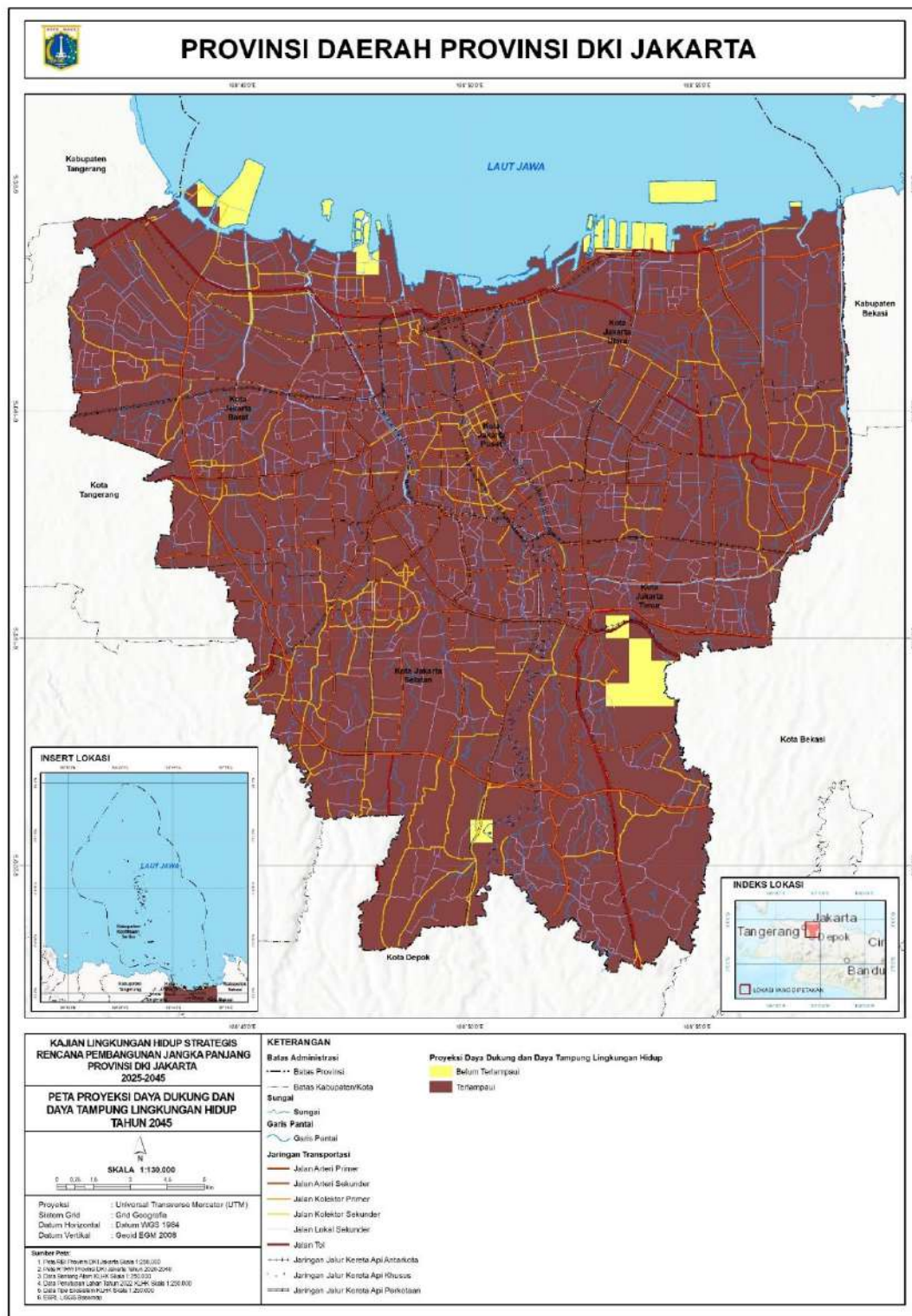


Gambar 4.25 Profil Emisi GRK dan % Reduksi Emisi 2015 - 2020

Sumber: Laporan Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta, 2021

Daya Dukung Air

Keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta berada dalam posisi yang rentan. Hal ini ditunjukkan melalui analisis daya dukung dan daya tampung air yang telah dibahas sebelumnya. Kondisi sumber daya air terutama di wilayah daratan 98% wilayahnya berada pada status telah terlampaui. Sementara di Kepulauan Seribu, secara agregat ketersediaan air juga belum mampu mencukupi kebutuhan domestik.



Gambar 4.26 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 2023

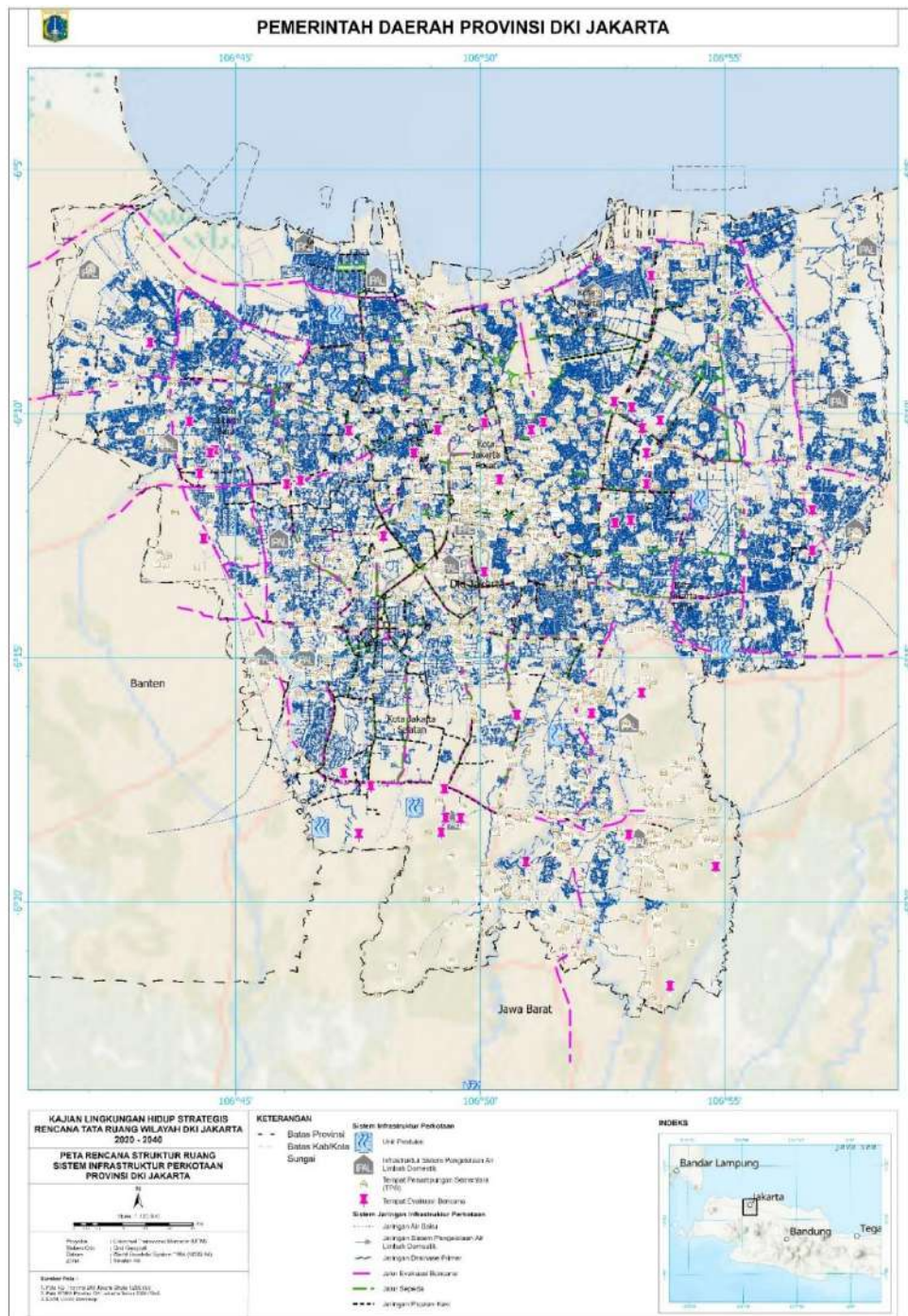
Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023

Ketersediaan air di DKI Jakarta didukung oleh wilayah lain. Sebanyak 81 persen air baku berasal dari Waduk Juanda Jatiluhur, 16 persen berasal dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang, dan 3 persen berasal dari sungai-sungai di Jakarta³. Hal ini menandakan bahwa wilayah fungsional sangat berperan penting untuk

³ <https://kilasdaerah.kompas.com/dki-jakarta/read/2019/11/09/19110001/pemprov-dki-pastikan-ketersediaan-air-bersih-bagi-warga-jakarta->

menjaga keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta. Padahal, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui.

Kerentanan sumber daya air di Jakarta diperparah dengan kondisi existing pemanfaatan air perpipaan yang masih minim. Saat ini hanya sekitar 65% daerah teraliri jaringan perpipaan. Sementara itu pemanfaatan air tanah juga masih secara masif dilakukan. Berikut ini merupakan peta jaringan perpipaan di DKI Jakarta berdasarkan rencana struktur ruang Draft RTRW DKI Jakarta 2022-2042 per tanggal Mei 2022.

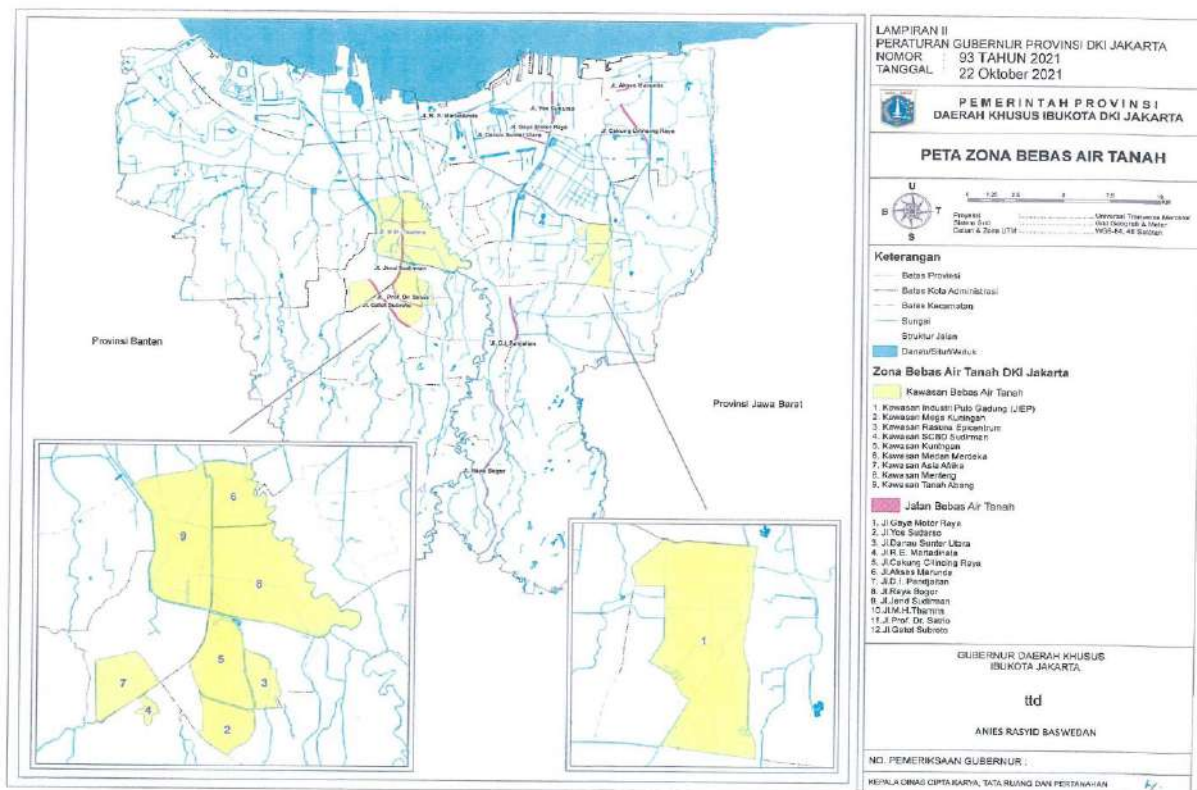


Gambar 4.27. Jaringan Perpipaan DKI Jakarta Berdasarkan Rencana Struktur Ruang

Sumber: Draft RTRW DKI Jakarta 2022-2042 per tanggal Mei 2022

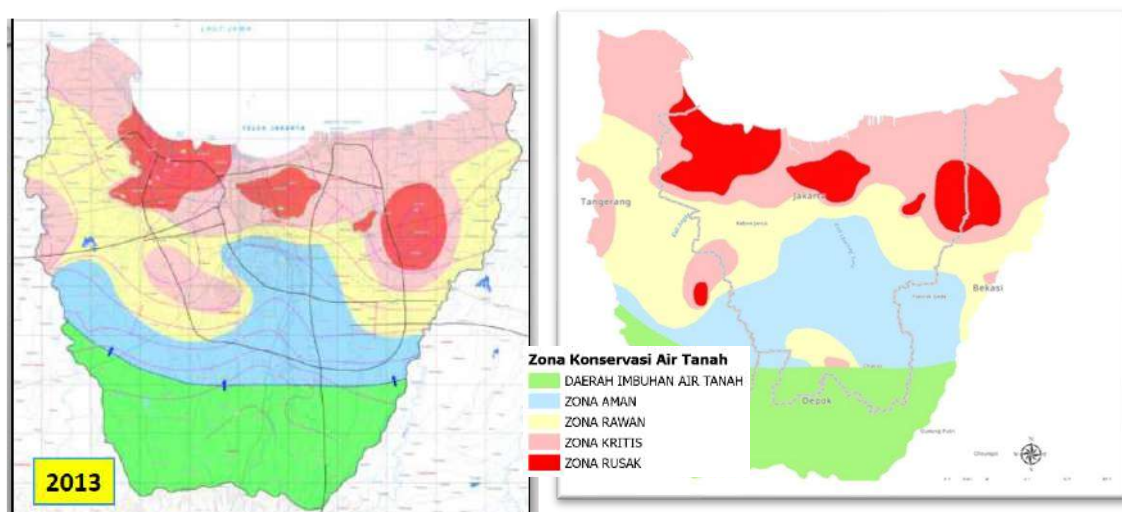
Kondisi pemanfaatan air tanah saat ini DKI Jakarta hampir menyeluruh di DKI Jakarta meskipun jaringan perpipaan telah tersedia. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya land subsidence di berbagai tempat khususnya di wilayah utara Jakarta. Serangkaian upaya dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air

tanah telah dilakukan salah satunya yaitu penetapan zona bebas air tanah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur N0. 93 tahun 2021.



Gambar 4.28. Peta Zona Bebas Air Tanah
Sumber: Peraturan Gubernur 93/2021

Data lain bersumber dari Badan Geologi menunjukkan kondisi Cekungan Air Tanah DKI Jakarta mengalami kekritisitas dan rusak. Sebagian besar wilayah Jakarta Utara mengalami perluasan dari kondisi Rawan menjadi Kritis dan wilayah yang Rusak relatif tetap. Kondisi Air Tanah yang rusak terjadi di Kecamatan Kalideres, Cilincing Cengkareng, Penjaringan, Grogol Petamburan, Tambora, Taman sari, Sawah Besar, Pademangan, Senen, Kemayoran Johar Baru, Cempaka Putih, Tanjung Priok, Cakung, Gambir dan Kelapa Gading.



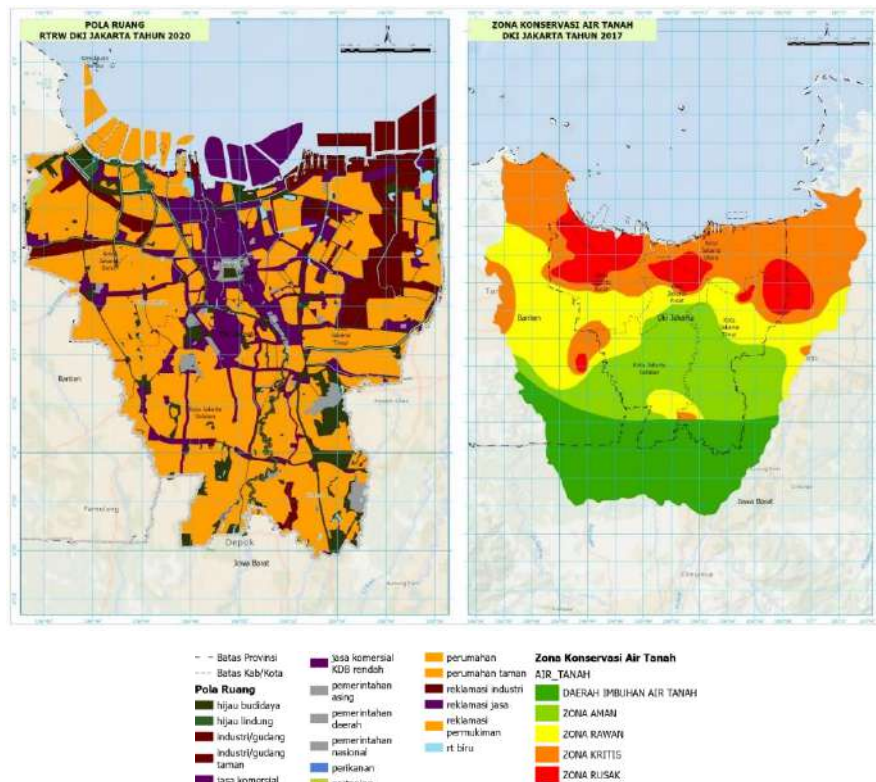
Gambar 4.29. Kondisi degradasi Air Tanah 2013 -2017 di CAT Jakarta
Sumber: BKAT

Tabel 4.13 Klasifikasi Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta Tahun 2017

Zona	Keterangan	Penggunaan	Luas
DAERAH IMBUHAN AIR TANAH	Daerah imbuhan air tanah , dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran air tanah, kecuali untuk keperluan pokok sehari-hari perorangan masih diizinkan.		32,004.16
ZONA AMAN	Zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik <40% dari kedudukan awalnya, penggunaan air tanah	Air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari perorangan dan pertanian rakyat masing2 diizinkan dengan debit maksimum 100 m3/KK	28,955.77
ZONA KRITIS	zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 60-80% dari kedudukan muka piezometrik awal dan nilai dhl 1500-500 mikromhos/cm	Air tanah baru untuk berbagai keperluan selain kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat tidak diizinkan. Untuk kebutuhan pokok maksimum 100 m3/bln/kk	38,468.74
ZONA RAWAN	zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 40-60% dari kedudukan muka piezometrik awal dan nilai dhl 1000-1500 mikromhos/cm	Air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat diizinkan dengan debit maksimum 100 m3/bulan/kk.	32,536.51
ZONA RUSAK	sub zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 80% dari kedudukan muka piezometrik awal dan nilai dhl >5000 mikromhos/cm, penurunan tanah lebih dari 100 cm/thn	Air tanah baru untuk pelbagai keperluan tidak diizinkan, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan, dbit pengambilan air tanah yang diizinkan <100 m3/bln/kk	13,950.94
TOTAL			145,916.11

Sumber: BKAT, ESDM 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada zona kritis dan zona rusak pada zona konservasi air tanah, disebutkan bahwa penggunaan air tanah di wilayah tersebut sudah tidak diizinkan untuk pemanfaatan baru dan dibatasi penggunaan air $\leq 100 \text{ m}^3/\text{bln}/\text{kk}$ untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada data zona konservasi air tanah antara tahun 2013 dan tahun 2017. Dapat dilihat pada Gambar 2-41 terjadi perubahan antara tahun 2013 dan 2017 dari zona aman menjadi zona rawan dan kritis, bahkan pada wilayah utara Jakarta pada tahun 2017 beberapa wilayah sudah masuk ke dalam zona kritis dan rusak. Perubahan tersebut diindikasikan terjadi akibat perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan kondisi air tanah.

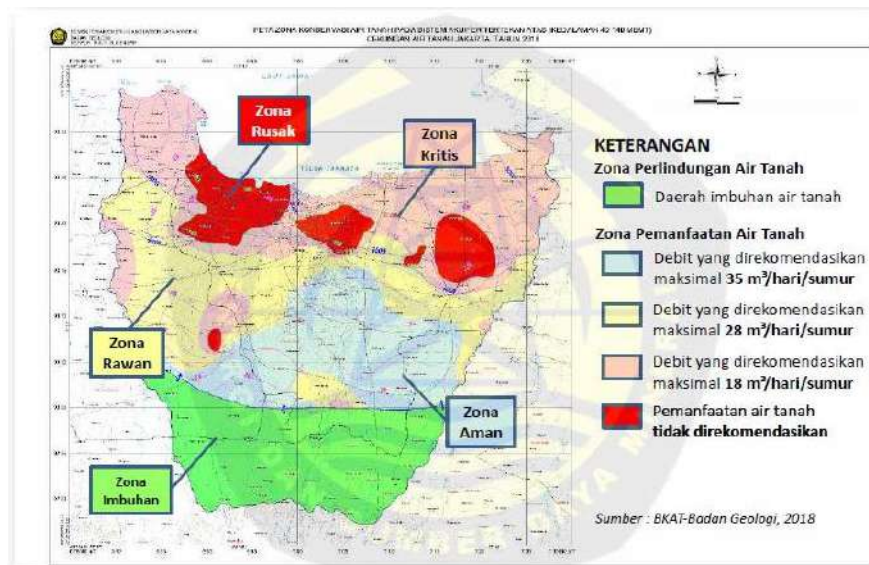


Gambar 4.30. Pola Ruang 2012 dan Kondisi Zona Konservasi Air Tanah 2017

Sumber: BKAT dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan peta diatas, menunjukkan bahwa rencana pola ruang di tahun 2012 memberikan dampak yang cukup signifikan terkait penurunan kondisi zona air tanah. Sebagian besar arahan ruang yang berdampak pada kondisi air tanah baik terhadap zona kritis dan zona rusak adalah **kawasan permukiman**. Arahan permukiman yang memberikan dampak pada penurunan kondisi zona konservasi air kearah rusak memiliki luasan sebesar 5.584.24 Ha, sedangkan arahan kawasan permukiman yang memberikan dampak terhadap penurunan kondisi zona konservasi air tanah kearah kritis memiliki luasan sebesar 6.795.09 Ha. Dengan kondisi seperti ini, pengembangan kawasan permukiman yang direncanakan diasumsikan masih memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat. Dengan asumsi penggunaan air tanah pada kawasan permukiman berdasarkan arahan rencana pola ruang tahun 2012, zona konservasi air tanah antara tahun 2013-2017 (4 tahun) berubah cukup signifikan terutama pada zona aman menjadi rawan atau kritis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 4 tahun dengan penggunaan air tanah dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan.

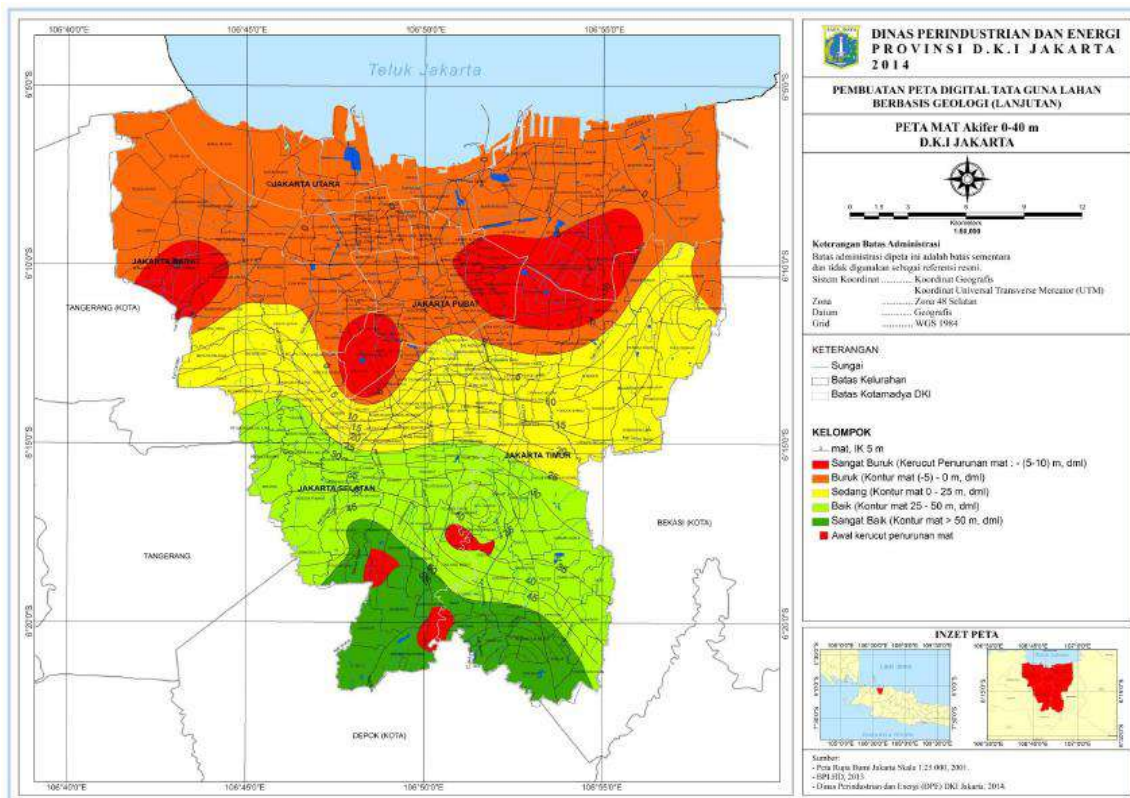
Permasalahan land subsidence dan intrusi air laut sangat terkait erat dengan pola konsumsi masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam penyediaan air bersih. Hingga saat ini penyediaan air jaringan perpipaan di DKI Jakarta masih rendah. Berdasarkan Kementerian PUPR (2020), rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 56,6% dimana salah satu sumber paling banyak dimanfaatkan adalah melalui penggunaan sumur yang memanfaatkan kapasitas air tanah. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, penggunaan air tanah di pada Januari-September tahun 2019 telah mencapai 6.693.949 m³ (DIKPLHD, 2021). Sementara itu, Kementerian ESDM mengeluarkan peta zona konservasi Air Tanah CAT Jakarta sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.31. Zona Konservasi Air Tanah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa di zona kritis tidak direkomendasikan lagi adanya pengambilan air tanah. Sebagai konsekuensi adalah penyediaan air minum jaringan perpipaan sudah menjadi suatu keharusan dan melakukan pembatasan pengambilan air tanah.

Pada tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Energi melakukan pemetaan terhadap Muka Air Tanah Akuifer 0 – 40 DKI Jakarta. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa wilayah Jakarta bagian utara mengalami penurunan air tanah sehingga membentuk kerucut penurunan 5 – 10 meter di bawah permukaan air laut. Kondisi penurunan air tanah ini menyebabkan terjadinya masalah intrusi air laut. Makin ke selatan kondisi penurunan muka air tanah makin baik.



Gambar 4.32. Peta Muka Air Tanah (MAT) Akifer 0 – 40 m DKI Jakarta

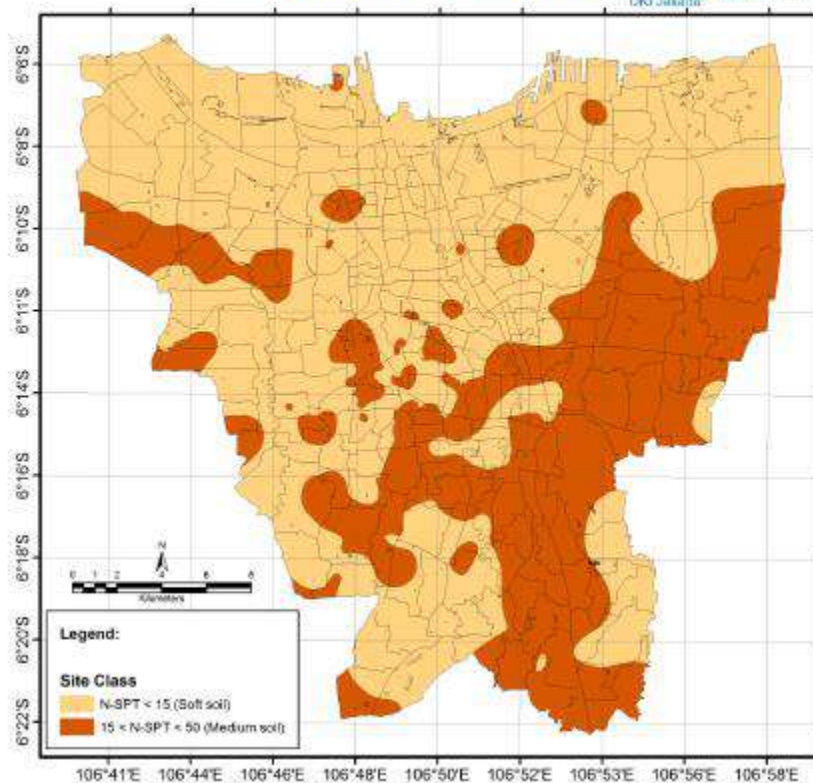
Penyebab penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Whittaker dan Reddish, 1989, diambil dari Yuwono dkk, 2013, penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh:

- Penurunan muka tanah alami karena berlangsungnya proses geologi
- Penurunan muka tanah yang disebabkan pengambilan bahan cair dalam tanah seperti air tanah atau minyak bumi
- Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh adanya beban-beban berat di atasnya seperti struktur bangunan
- Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari tanah misal aktivitas penambangan atau pembuatan konstruksi bawah tanah

Permasalahan penurunan muka tanah di DKI Jakarta tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik ekoregion terutama dikaitkan dengan kondisi N – SPT tanah atau ukuran konsistensi atau density tanah. Data dari Dinas Pertambangan dan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menunjukkan N – SPT di wilayah DKI yang relatif rendah karena batuananya terbentuk karena sedimentasi dan masih muda. Hal ini menyebabkan sifat muka tanah yang lunak dan mudah dipengaruhi oleh beban. Gambar sebaran N – SPT di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Peta sebaran klasifikasi tanah wilayah Jakarta dari 461 data titik bor.

Sumber: Pembastan, Peta Resiko
Gempa Skala Mikro (Mikrozonasi) Level 4
Tahun 2013-2014, Disusun oleh Provinsi
DKI Jakarta



Gambar 4.33. Sebaran Klasifikasi Tanah berdasarkan N – SPT

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah DKI Jakarta terutama di bagian utara merupakan *soft soil* dengan N – SPT < 15. Kondisi N-SPT ini menyebabkan tanah sangat peka terhadap beban.

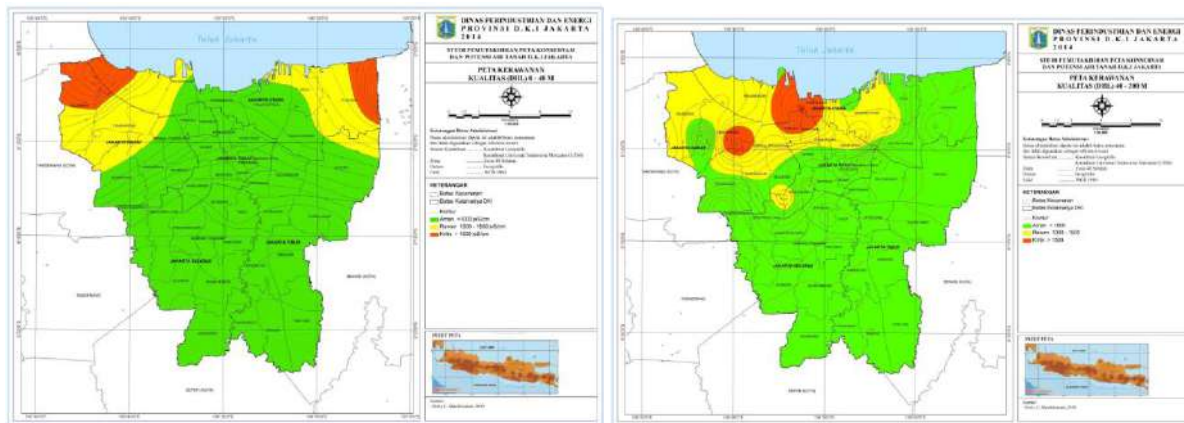
Permasalahan intrusi air laut pada air tanah dapat diidentifikasi dengan mengukur DHL (Daya Hantar Listrik). Air yang banyak mengandung garam akan mempunyai DHL tinggi. Pengukurannya dengan alat *Electric Conductivity Meter* (EC Meter), yang satuannya adalah mikromhos/cm atau $\mu\text{mhos/cm}$ atau $\mu\text{siemens/cm}$ sering ditulis $\mu\text{S/cm}$. Air tanah pada umumnya mempunyai harga 100 – 5000 μmhos . Besaran DHL dapat dikonversikan menjadi jumlah garam terlarut (mg/l), yaitu: $10 \text{ m}^3 \mu\text{mhos/cm} = 640 \text{ mg garam/l}$ atau $1 \text{ mg/l} = 1,56 \text{ } \mu\text{mhos/cm}$ ($1,56 \mu\text{S/cm}$). Dengan menggunakan klasifikasi Davis dan DeWiest, kualitas air dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Klasifikasi Air Berdasarkan Jumlah Garam Terlarut

Jumlah garam terlarut (mg/l)	Macam Air
< 1000	Tawar
1000 – 10.000	Payau (brackish)
10.000 – 100.000	Cukup asin (moderate saline)
> 100.000	Asin sekali (briny)

Sumber: Davis dan DeWiest, 1966

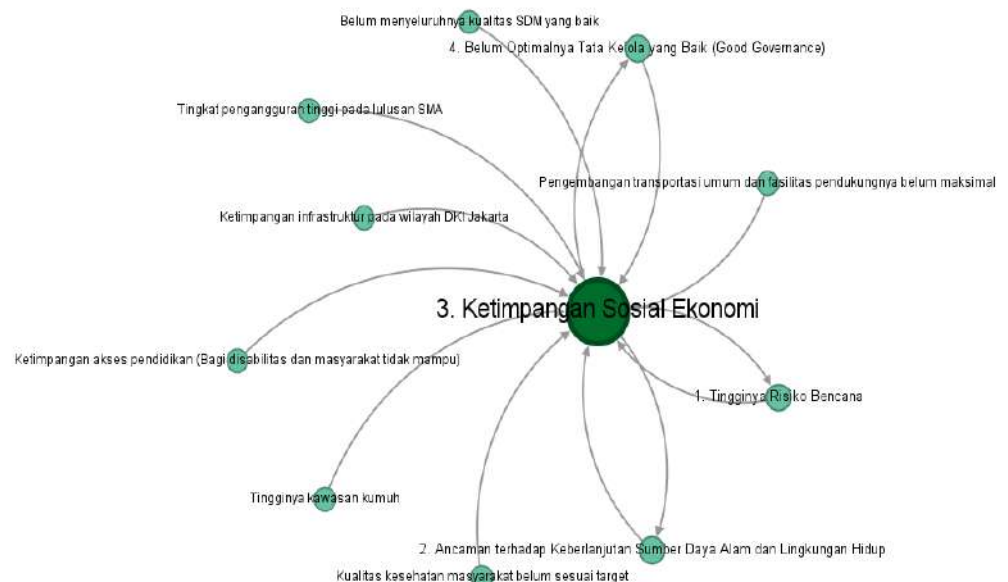
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Energi mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Daerah Aman (DHL < $1000 \mu\text{S/cm}$), Daerah Rawan (DHL 1000 – $1500 \mu\text{S/cm}$) dan Daerah Kritis (DHL > $1500 \mu\text{S/cm}$). Daerah kritis berdasarkan klasifikasi di atas sudah termasuk air payau (brackish) yang berarti telah terjadi intrusi air laut. Gambar berikut menunjukkan hasil pemetaan kondisi kualitas air tanah berdasarkan DHL pada kedalaman 0-40 m dan 40 – 300 m.



Gambar 4.34. Peta Kerawanan Kualitas Air Tanah Berdasarkan DHL pada Akuifer 0 – 40 m dan 40 – 60 m

4.4.3 Ketimpangan Sosial – Ekonomi

Isu paling strategis Ketimpangan Sosial - Ekonomi terdiri atas sejumlah isu pembangunan berkelanjutan terkait, diantaranya adalah masih adanya ketimpangan infrastruktur termasuk belum meratanya layanan transportasi publik, ketimpangan akses pendidikan, masih adanya pengangguran, kualitas kesehatan masyarakat yang masih belum mencapai target serta masih adanya RW kumuh.



Gambar 4.35 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hal di atas, tabel berikut merupakan kerangka Kajian isu strategis ketimpangan sosial ekonomi masyarakat akan menghasilkan gambaran alternatif upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalkan ketimpangan yang terjadi melalui inklusivitas akses fasilitas sosial ekonomi dan akses peningkatan kesejahteraan. Secara umum ketimpangan di DKI Jakarta adalah terjadi antara wilayah kota administrasi di wilayah daratan dan kabupaten Kepulauan Seribu yang merupakan gugusan pulau. Oleh karena prinsip inklusivitas akses menjadi landasan untuk meminimalkan ketimpangan, maka kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan. Indikator mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Rasio, Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan kepulauan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Isu terkait sosial ekonomi menjadi salah prioritas sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Terdapat 5 (lima) sasaran visi dan ada 2 (dua) yang relevan dengan kajian ini yaitu Pendapatan per kapita setara dengan negara maju dan Kemiskinan menuju nol dan menurunnya ketimpangan yang dapat digunakan sebagai indikasi target.

Tabel 4.15 Kerangka Kajian Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji upaya penurunan ketimpangan sosial ekonomi melalui inklusivitas akses fasilitas sosial ekonomi dan akses peningkatan kesejahteraan	Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan	IPM
		Gini Ratio
		Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi
		Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita
		Tingkat Kemiskinan Kepulauan
		TPT

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data 6 tahun terakhir, indeks pembangunan manusia DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan meningkat dan lebih tinggi dibanding capaian nasional yaitu 78,39 pada tahun 2014; 78,99 pada tahun 2015; 79,6 pada tahun 2016; 80,06 pada tahun 2017; 80,47 pada tahun 2018; 80,76 pada tahun 2019; 80,77 pada tahun 2020; 81,11 pada tahun 2021; hingga 81,65 pada tahun 2022.

Sedangkan IPM di Kepulauan Seribu menunjukkan capaian yang lebih rendah dari rata-rata provinsi DKI Jakarta dan capaian nasional. Akan tetapi capaian IPM Kepulauan Seribu cenderung meningkat dengan nilai IPM 68,48 pada tahun 2014 dan 72,79 pada tahun 2022.



Gambar 4.36 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta

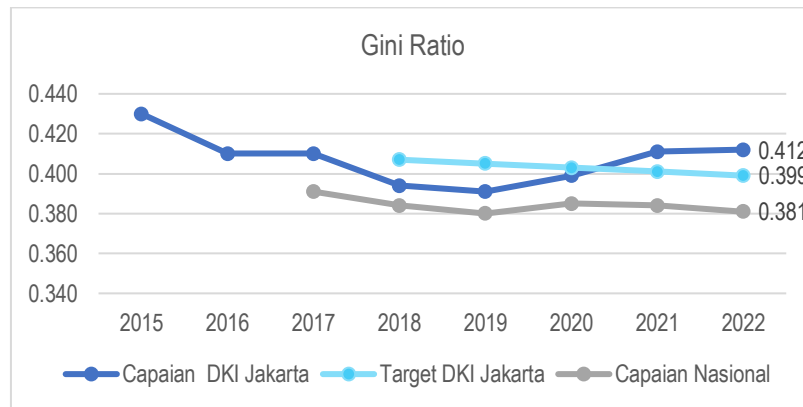
Secara lebih rinci berikut merupakan indeks pembangunan manusia secara nasional, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu.

Tabel 4.16 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta

	Capaian Nasional	Capaian DKI Jakarta	Capaian Kep. Seribu
2014	68.9	78.39	68.48
2015	69.55	78.99	68.84
2016	70.18	79.6	69.69
2017	70.81	80.06	70.11
2018	71.39	80.47	70.91
2019	71.92	80.76	71.40
2020	71.94	80.77	71.63
2021	72.29	81.11	72.10
2022	72.91	81.65	72.79

Gini Ratio

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berdasarkan data selama 8 tahun terakhir, gini ratio Jakarta menunjukkan penurunan dari tahun 2015 (0,430) – 2019 (0,391). Akan tetapi sejak 2020 – 2022, gini ratio DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang berarti tingkat ketimpangan semakin tinggi.



Gambar 4.37 Tren Gini Ratio DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan nasional, gini ratio DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Secara lebih rinci berikut merupakan nilai gini ratio secara nasional dan DKI Jakarta.

Tabel 4.17 Tren Gini Ratio DKI Jakarta

	Capaian DKI Jakarta	Target DKI Jakarta	Capaian Nasional
2015	0.430		
2016	0.410		
2017	0.410		0.391
2018	0.394	0.407	0.384
2019	0.391	0.405	0.38
2020	0.399	0.403	0.385
2021	0.411	0.401	0.384
2022	0.412	0.399	0.381

Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi

Infrastruktur Jalan

Dalam perkembangannya sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta terus mengembangkan jaringan jalan di Jakarta, baik melalui kewenangan nasional maupun kewenangan provinsi, sehingga pada tahun 2020, panjang jalan di Jakarta mencapai 6.652 Km. Namun ternyata panjang jalan Jakarta dibandingkan dengan luas wilayah baru mencapai kurang lebih 7,15 % padahal idealnya panjang jalan mencapai 11-15% dari luas wilayah. Selain itu di Jakarta pertumbuhan kendaraan bermotor pada tahun 2022 mencapai 9,3% per tahun jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pembangunan jalan yang hanya 0,1% per tahun. Anggaran infrastruktur jalan di DKI lebih banyak digunakan untuk pemantapan kualitas jalan daripada membangun infrastruktur jalan yang baru. Sehingga dalam perkembangannya konsep pengendalian kemacetan jalan dilakukan dengan membatasi akses masuk kendaraan dan memaksa masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menggunakan angkutan umum.

Infrastruktur Air Bersih

Akses air bersih di Jakarta belum merata, hingga tahun 2021 layanan perpipaan air bersih baru mencakup 65% dari kebutuhan, padahal Jakarta merupakan wilayah aluvial yang menjadi muara dari banyak sungai di DAS Ci Liwung Ci Sadane. Namun karena kualitas air permukaan yang tersedia masih di bawah baku mutu maka hingga saat ini kebutuhan air baku untuk perpipaan masih mengandalkan air dari waduk Jatiluhur. Sebagai upaya perbaikan atas jangkauan pelayanan air bersih perpipaan, maka diperlukan peningkatan debit air dari yang tersedia saat ini sebesar 21.000 liter per detik menjadi sebesar 31.875 liter per detik. Pada tahun 2022 telah mulai diupayakan pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Karian-Serpong dan SPAM Ir. H. Djuanda, sedangkan pada sisi hilir melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan jaringan baru mendukung SPAM Regional hulu dengan pembiayaan sindikasi perbankan yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Layanan Transportasi Publik

Layanan transportasi publik di Jakarta lima tahun terakhir ini sebenarnya sudah jauh membaik dari 42% menjadi 82%, karena mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik melalui JakLingko. Namun dalam diskusi beberapa permasalahan yang muncul adalah keengganan masyarakat untuk mengakses layanan publik karena memerlukan kartu elektronik dan sistem transit yang dirasa masih menyusahkan. Maka perlu dipertimbangkan manajemen pengelolaan rute layanan angkutan umum yang lebih baik, dan juga kemudahan pembayaran bagi masyarakat umum yang tidak memiliki pemahaman tentang *cashless*.

Berdasarkan survei Litbang Kompas (2022) didapatkan hasil analisis bahwa kurang lebih 96,1% penduduk DKI Jakarta atau 8,7 juta jiwa telah terlayani oleh angkutan umum. Data ini diperoleh dengan menganalisis sebaran halte/terminal/stasiun terhadap sebaran permukiman penduduk. Layanan transportasi di DKI Jakarta ternyata jauh lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, dimana Kota Depok hanya memiliki jangkauan layanan sebesar 21,5 % atau 322.000 jiwa, Kota Bekasi yang terlayani sebesar 32,9 % atau 690.000 jiwa, dan Kota Tangerang yang mampu melayani 34 % atau 497.000 jiwa. Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang tingkat pelayanan transportasi publiknya paling buruk dengan hanya melayani 4,5 % atau 70.000 jiwa.

Dari sisi komuter, Survei Komuter BPS 2014 mencatat ada 23,6 % penduduk pengguna angkutan umum dan sisanya menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Namun pada tahun 2019 jumlah komuter pengguna angkutan umum cenderung menurun, sedangkan pertumbuhan kendaraan penumpang pada tahun 2020, BPS mencatat jumlah mobil di DKI Jakarta mencapai 3,4 juta unit atau naik 30,9 % dibandingkan pada 2015, sedangkan di Bodetabek, jumlah mobil meningkat sebesar 42,5 % dari tahun 2015 menjadi 1,6 juta unit, sedangkan pertumbuhan motor di DKI Jakarta naik 16,1 juta unit atau naik 21 % dari tahun 2015 dan di wilayah Bodetabek naik 8 juta unit atau naik 7,1 %.

Sementara berdasarkan jumlah perjalanan di wilayah DKI Jakarta, pada tahun 2020 dari total 15 juta perjalanan, yang menggunakan angkutan umum hanya sebesar 8,2 % atau sebesar 1,2 juta perjalanan, sisanya menggunakan moda transportasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung menggunakan moda transportasi lain untuk melakukan perjalanan baik roda-2 atau pun roda-4.

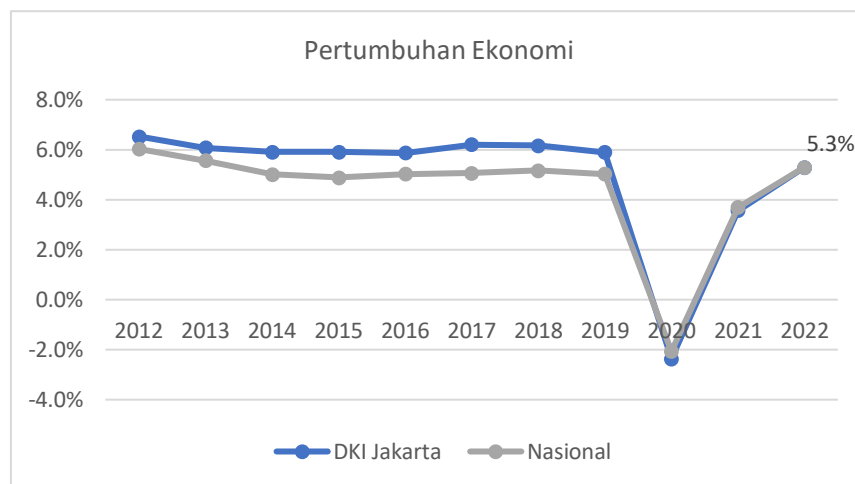
Sedangkan untuk transportasi di Kepulauan Seribu, hingga saat ini masih dirasakan sangat kurang memadai karena hingga saat ini ongkos perjalanan ke Kepulauan Seribu relatif mahal bila dibandingkan dengan ongkos transportasi di daratan yang dilayani oleh TransJakarta hanya Rp. 3.500,-. Saat ini pelayanan transportasi ke Kepulauan Seribu dilayani oleh kapal-kapal tradisional dan kapal milik Dishub Provinsi DKI Jakarta yang melayani setiap hari, namun dengan jumlah trip per hari yang terbatas karena terbatasnya jumlah kapal. Pengintegrasian layanan transportasi laut ke Kepulauan Seribu dengan TransJakarta ternyata tidak dapat dilakukan karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang TransJakarta membatasi layanan hanya untuk daratan, tidak termasuk transportasi laut sehingga diperlukan adanya *bridging policy* untuk mengatasi *gap* yang terjadi.

Perumahan Yang Layak

Perumahan layak yang menjadi perhatian di DKI Jakarta adalah upaya penanganan RW kumuh, dari 223 RW di tahun 2003 menjadi 23 RW di tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah RW kumuh tersisa 147 RW dengan segala keterbatasan dan tantangan yang terjadi akibat *re-focusing* anggaran Covid-19. RW kumuh yang menjadi prioritas perbaikan pada tahun 2020 tersebar di Kelurahan Karet Tengsin dan Menteng di Jakarta Pusat; Kelurahan Duri Kepa dan Keagungan di Jakarta Barat; Kelurahan Gandaria di Jakarta Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Rawamangun dan Rawa Bunga di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2012 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2012 sebesar 6,5% dan menurun menjadi 5,9% pada tahun 2016. Setelah itu pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 6,2%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menurun secara signifikan hingga diangka -2,4%. Setelah itu pertumbuhan ekonomi perlahan meningkat kembali pada tahun 2021 (3,6%) dan 2022 (5,3%).



Gambar 4.38 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

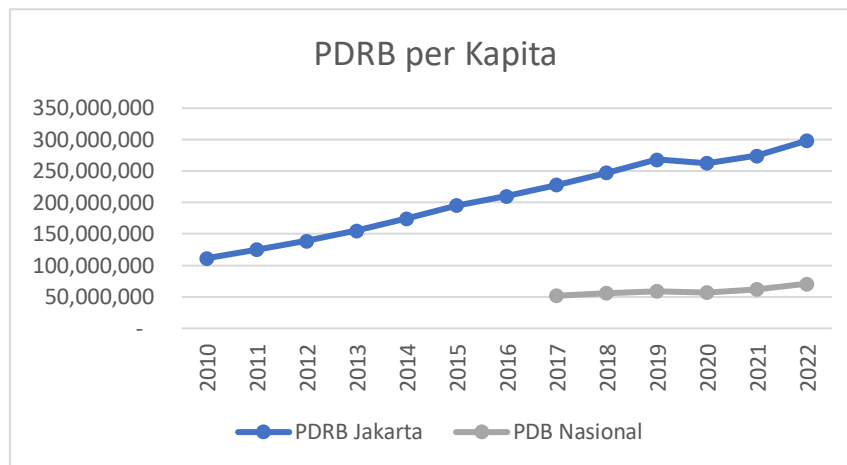
Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara lebih rinci berikut merupakan capaian DKI Jakarta dan nasional.

Tabel 4.18 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

	DKI Jakarta	Nasional
2012	6.5%	6.03%
2013	6.1%	5.56%
2014	5.9%	5.01%
2015	5.9%	4.88%
2016	5.9%	5.03%
2017	6.2%	5.07%
2018	6.2%	5.17%
2019	5.9%	5.02%
2020	-2.4%	-2.07%
2021	3.6%	3.69%
2022	5.3%	5.3%

PDRB per Kapita

PDRB per kapita DKI Jakarta terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 (Rp111.528.860) hingga tahun 2022 (Rp298.359.970). PDRB perkapita DKI Jakarta ini jauh lebih tinggi daripada PDB nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



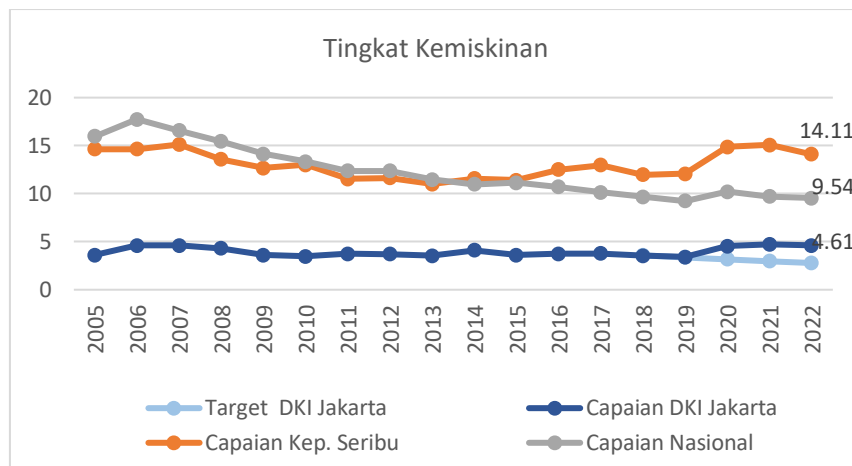
Gambar 4.39 Tren PDRB per Kapita

Tabel 4.19 Tren PDRB per Kapita

	PDRB Jakarta	PDB Nasional
2010	111,528,860	
2011	125,533,820	
2012	138,858,290	
2013	155,153,920	
2014	174,914,360	
2015	195,431,680	
2016	210,075,090	
2017	228,002,730	51,891,180
2018	247,678,490	55,992,070
2019	268,052,250	59,317,910
2020	262,615,170	57,289,590
2021	274,519,390	62,258,080
2022	298,359,970	71,030,850

Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai 3,61% dan cukup fluktuatif hingga tahun 2019 (3,42%). Pada tahun 2020 - 2021 tingkat kemiskinan cenderung meningkat yaitu mencapai 4,53% pada tahun 2020 dan 4,72% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan berkurang kembali di angka 4,61%. Data ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2022.



Gambar 4.40 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

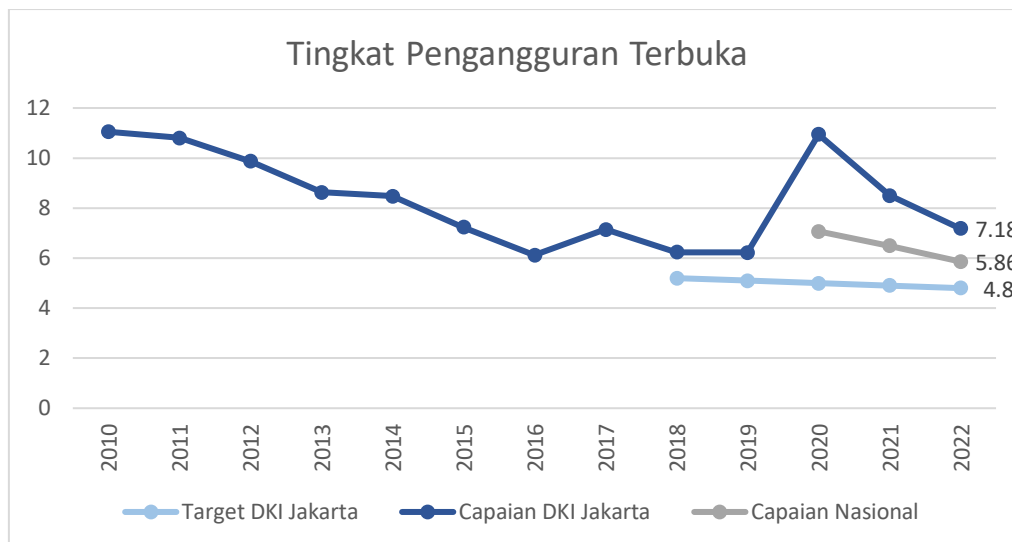
Hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu dimana angka kemiskinan jauh lebih tinggi dibanding DKI Jakarta secara keseluruhan. Hal ini berarti terdapat ketimpangan ekonomi antara kepulauan dengan daratan. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu pada tahun 2015 - 2022 juga lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan nasional. Secara lebih rinci berikut merupakan tingkat kemiskinan secara nasional, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu.

Tabel 4.20 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

	Target DKI Jakarta	Capaian DKI Jakarta	Capaian Kep. Seribu	Capaian Nasional
2005		3.61	14.64	15.97
2006		4.6	14.64	17.75
2007		4.6	15.12	16.58
2008		4.29	13.56	15.42
2009		3.62	12.66	14.15
2010		3.48	13.01	13.33
2011		3.75	11.53	12.36
2012		3.7	11.62	12.36
2013		3.55	11.01	11.46
2014		4.09	11.56	10.96
2015		3.61	11.4	11.13
2016		3.75	12.50	10.7
2017		3.78	12.98	10.12
2018	3.58	3.55	11.98	9.66
2019	3.38	3.42	12.08	9.22
2020	3.18	4.53	14.87	10.19
2021	2.98	4.72	15.06	9.71
2022	2.78	4.61	14.11	9.54

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010 – 2019 cenderung menurun yaitu 11,05 pada tahun 2010 dan 6,22 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 10,95 karena adanya Pandemi Covid-19. Setelah tahun 2020, secara berangsur-angsur tingkat pengangguran terus menurun. Data ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta.



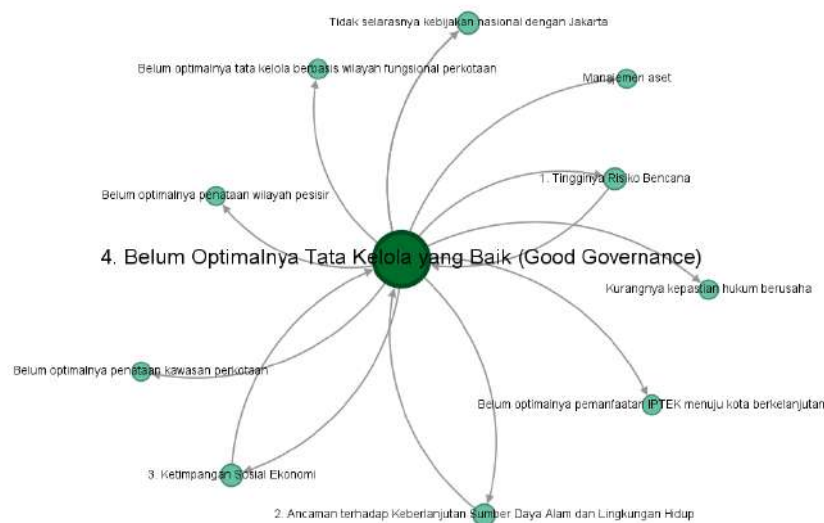
Gambar 4.41 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta

Selain itu tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2020 – 2022. Secara lebih rinci berikut merupakan tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta dan nasional.

Tabel 4.21 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta

	Target DKI Jakarta	Capaian DKI Jakarta	Capaian Nasional
2010		11.05	
2011		10.8	
2012		9.87	
2013		8.63	
2014		8.47	
2015		7.23	
2016		6.12	
2017		7.14	
2018	5.2	6.24	
2019	5.1	6.22	
2020	5	10.95	7.07
2021	4.9	8.5	6.49
2022	4.8	7.18	5.86

4.4.4 Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)



Gambar 4.42 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4.22 Kerangka Kajian Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji kapasitas kelembagaan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam menuju Jakarta sebagai <i>global city</i> yang berkelanjutan	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik
		(Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, dan SAKIP / TPB 16)
		Ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana untuk pengendalian pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan Kebijakan dan rencana
		Jumlah kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional dalam perbaikan pengelolaan SDA

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kajian di atas dimaksudkan sebagai dasar dalam merekomendasikan alternatif upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas tata kelola untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam menuju Jakarta sebagai *global city* yang berkelanjutan. Kriteria yang digunakan sebagai dasar kajian adalah kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang dinilai dari indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik, SAKIP, ketersediaan kebijakan dan dokumen perencanaan untuk pengendalian pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan, penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana serta monitoring dan evaluasi. Hampir seluruh indikator dari tata kelola dikaji secara kualitatif mengarah pada upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dalam mewujudkan *good governance*.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat, sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan pemberian pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan tercapai apabila penerima pelayanan menerima pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu cara untuk mengukur hal tersebut dengan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.23. Indeks Kepuasan Masyarakat

	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,76	84,41	86,34

AKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen penilaian evaluasi AKIP adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan predikat penilaian terdiri dari:

Tabel 4.24. Predikat Hasil Evaluasi AKIP

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA Sangat Memuaskan >90-100	<ul style="list-style-type: none"> Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A Memuaskan >80-90	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB Sangat Baik >70-80	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B Baik >60-70	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC Cukup (Memadai) >50-60	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Kurang >30-50	<ul style="list-style-type: none"> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D Sangat Kurang >0-30	<ul style="list-style-type: none"> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Sumber: www.menpan.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari MenPANRB, Provinsi DKI Jakarta pada tahun **2021 mendapat predikat A (memuaskan)**, membaik jika dibandingkan hasil evaluasi pada tahun 2020 yang mendapatkan predikat BB (Sangat Baik).

Tabel 4.25. Nilai AKIP 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
AKIP	BB	BB	BB	A

Sumber: MenPANRB

Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Rencana

Dalam penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki kebijakan dan dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan dasar rencana dalam bertindak. Kebijakan dan dokumen rencana ini berupa peraturan gubernur, peraturan daerah, keputusan gubernur, dan/ atau instruksi gubernur yang berkaitan dengan moratorium air tanah/ perluasan coverage area, keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dan sampah. Kebijakan dan dokumen perencanaan eksisting yang terdapat di DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.26. Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting

Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting	
Moratorium Air Tanah/ Perluasan coverage area	PERGUB DKI No. 93 Tahun 2021 tentang Kawasan Bebas Air Tanah RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042 Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kehati	PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 Penyelenggaraan Hutan Kota PERGUB No. 31 Tahun 2022 tentang RDTR (Pembagian zona lindung) Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2020 – 2024
Pencemaran Udara	PERDA DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara PERGUB DKI Jakarta No 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor PERGUB No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor KEGUB No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara INGUB DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara
Sampah	PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah PERDA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah PERGUB No. 108 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PERGUB No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat PERGUB No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Rukun Warga PERGUB No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah PERGUB No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah PERGUB No. 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah PERGUB No.95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah PERGUB No.102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan INGUB No. 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah

Jumlah Kerja Sama dan Kolaborasi antar Wilayah Fungsional

Kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional merupakan upaya untuk memastikan jasa layanan ekosistem terjadi antara hulu dan hilir. Hingga tahun 2022 paling tidak ada 3 (tiga) kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah tetangganya yaitu:

1. Provinsi DKI Jakarta – Kota Bekasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal peningkatan pengelolaan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi. Ruang lingkup kerja sama meliputi dana kompensasi, revisi dokumen Andal RKL/RPL, pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, jalur dan waktu pengangkutan sampah, inovasi teknologi reduksi sampah, hingga proses pengakhiran TPST Bantargebang.

Sementara untuk lingkup kompensasi, dalam kerja sama ini dicapai sejumlah kesepakatan yaitu kompensasi penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan. Kompensasi dalam bentuk lain yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dan pertanggung jawaban kematian (polis) bagi warga yang terkena dampak TPST Bantargebang.

2. Provinsi DKI Jakarta – Bodetabekjur

Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur) tentang ketahanan pangan, transportasi, dan penyediaan air bersih. Contoh kerja sama yang dilakukan yaitu (a) Ketahanan pangan, berupa pemberdayaan UMKM, (b) Transportasi, berupa pembangunan *park and ride* untuk mengurai kemacetan, (c) Penyediaan air bersih, berupa normalisasi situ, pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya.

3. Provinsi DKI Jakarta - Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Bekasi dan Tangerang Selatan dalam hal pengendalian polusi udara, salah satunya yaitu uji emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dinilai menjadi salah satu kontributor pencemaran udara untuk sumber bergerak yang mengakumulasi polutan berbahaya. Selain sumber bergerak, terdapat sumber polutan tidak bergerak seperti PLTU. Kerja sama ini dilakukan agar semua kota dapat bersinergi untuk menghasilkan kota dengan udara yang bersih.



BAB 5

ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB 5

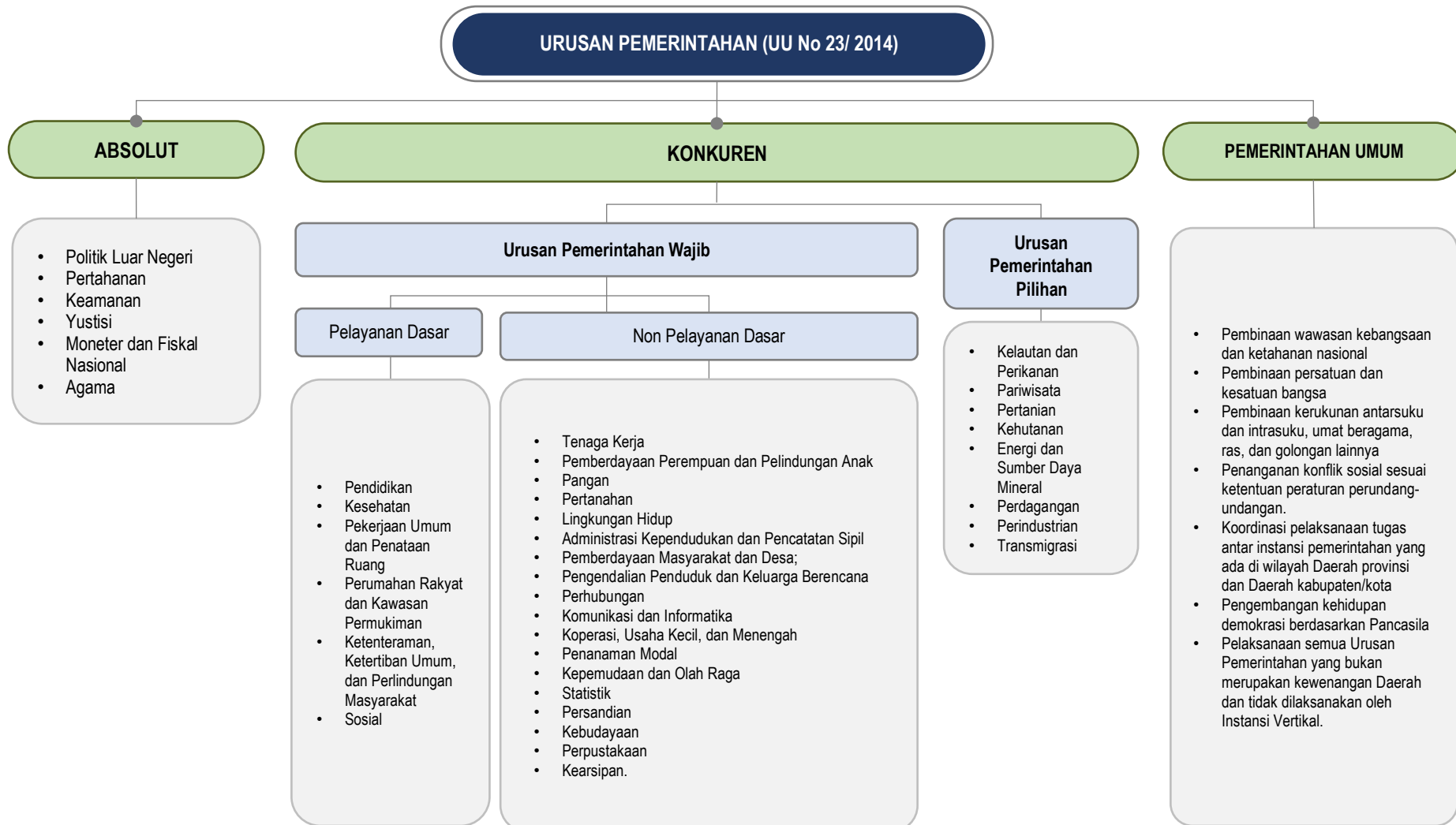
ANALISIS CAPAIAN TPB PADA OPD

Dalam KLHS RPJPD yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta dengan periode 20 (dua puluh) tahun, analisis capaian TPB terhadap organisasi perangkat daerah ditinjau berdasarkan capaian TPB pada urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan UU 23/2014, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- a. Urusan Pemerintahan Absolut
 Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (berjumlah 6 urusan)
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren
 Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:
 - Urusan pemerintahan wajib, urusan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah - berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (berjumlah 24 urusan)
 - Urusan pemerintahan pilihan, urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah (berjumlah 8 urusan)
- c. Urusan Pemerintahan Umum
 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan

Berdasarkan penjabaran di atas, telah ada pemilihan antara urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan daerah dalam sistem desentralisasi Indonesia ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.





Secara lebih rinci pembagian urusan pemerintahan menurut UU No.23 Tahun 2014 dapat dilihat pada bagan berikut.





Gambar 5.1 Urusan Pemerintahan

Sumber: UU RI No.23/ 2014

Pelaksanaan urusan pemerintah tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan **pelayanan dasar** tersebut beberapa hal yang perlu perhatian khusus yaitu:

Pendidikan 	<div> <div>29.4%</div> <div>52.9%</div> <div>17.6%</div> </div> <p>Pada jenis urusan pendidikan, 52,46% indikator termasuk ke dalam indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Indikator tersebut diantaranya: (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, (2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat, (3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat, (4) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, (5) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B, (6) Persentase Sekolah terakreditasi A, (7) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, (8) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (9) Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik</p>
Kesehatan 	<div> <div>26.1%</div> <div>52.2%</div> <div>21.7%</div> </div> <p>Pada jenis urusan kesehatan, 52,2% indikator termasuk ke dalam indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Indikator tersebut diantaranya: (1) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (2) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, (3) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita, (4) Prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun/ baduta, (5) Prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, (6) Prevalensi anemia pada ibu hamil, (7) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif, (8) Angka Kematian Ibu (AKI), (9) AKBa per 1.000 kelahiran hidup, (10) AKN per 1.000 kelahiran hidup, (11) AKB per 1.000 kelahiran hidup, (12) Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk, (13) Kejadian Malaria per 1000 orang, (14) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), (15) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta, (16) Prevalensi tekanan darah tinggi, (17) Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern, (18) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern, (19) Total Fertility Rate (TFR), (20) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk, (21) Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (22) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, (23) Unmet need KB, (24) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern</p>
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<div> <div>43.8%</div> <div>50.0%</div> <div>6.3%</div> </div> <p>Pada jenis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 50% indikator termasuk ke dalam indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Indikator tersebut diantaranya: (1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, (2) Cakupan pelayanan air bersih, (3) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, (4) Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), (5) Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah, (6) Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah, (7) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil, (8) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang</p>
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 	<div> <div>50%</div> <div>50%</div> </div> <p>Terdapat dua indikator TPB yang termasuk jenis urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Diantara indikator terdapat satu indikator yang termasuk indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</p>
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<div> <div>16%</div> <div>72%</div> <div>8%</div> <div>4%</div> </div>

	<p>Jenis urusan ini, didominasi oleh indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebesar 72%. Selain itu terdapat 4% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target.</p>
<p>Sosial</p> 	<div data-bbox="443 313 1348 347"> <div style="width: 20%; background-color: #90EE90;"></div> <div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div> <div style="width: 30%; background-color: #A9A9A9;"></div> </div> <p>Pada jenis urusan sosial, terdapat 50% yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Indikator tersebut diantaranya: (1) Tingkat kemiskinan, (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, (3) Pendampingan psikososial korban bencana sosial, dan (4) Koefisien Gini</p>

Keterangan

	<p>Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target</p>		<p>Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target</p>
	<p>Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target</p>		<p>Tidak Ada Data</p>

Sedangkan jika melihat berdasarkan urusan pemerintahan wajib **non pelayanan dasar**, urusan pemerintahan tenaga kerja memiliki indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Secara lebih rinci berikut merupakan indikator yang termasuk sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target.

<p>Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (2) Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin (3) Persentase tenaga kerja formal (4) Upah rata-rata per jam pekerja (5) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (6) Persentase setengah pengangguran (7) Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (8) Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (9) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga (10) Persentase K/L yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer (11) Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer K/L
<p>Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan (2) Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan (3) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (4) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi (5) Jumlah penanganan pengaduan HAM perempuan, terutama kekerasan perempuan (6) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (7) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi (8) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
<p>Pangan</p>	<p>Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan</p>
<p>Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah (2) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya (3) Persentase sampah perkotaan yang tertangani (4) Jumlah kolaborasi tematik quickwins program (5) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU
<p>Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (2) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
<p>Koperasi, UKM</p>	<p>Persentase akses UMKM ke layanan keuangan</p>
<p>Penanaman Modal</p>	<p>Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa</p>
<p>Statistik</p>	<p>Pertumbuhan PDRB</p>



Perhubungan	(1) Persentase Kondisi Jalan Mantap
	(2) Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima
	(3) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
Komunikasi & Informatika	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi

Secara lebih rinci berikut merupakan capaian TPB berdasarkan urusan wajib pemerintahan.



Tabel 5.1. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Urusan Wajib Pemerintahan

Indikator TPB dengan Status Capaian	Urusan Pemerintahan Wajib	
	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Dasar	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Non Dasar
Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	<p>1.3.1.(c)# Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya</p> <p>1.3.1.(d) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan</p> <p>1.4.1.(b)# Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan</p> <p>1.4.1.(c)# Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)</p> <p>1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</p> <p>3.2.2.(b)# Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</p> <p>3.3.1.(a)# Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS</p> <p>3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</p> <p>3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</p> <p>3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)</p> <p>3.4.1.(a)# Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)</p> <p>3.4.1.(c)# Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)</p> <p>3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</p> <p>3.7.1.(a)# Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)</p> <p>3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)</p> <p>4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat</p> <p>4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat</p> <p>4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</p> <p>4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</p> <p>4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ Sederajat</p> <p>6.1.1.(b)# Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku</p> <p>6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan</p> <p>6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</p> <p>6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p> <p>6.2.1.(e) Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal</p> <p>6.3.1.(a) Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>10.3.1.(a)# Indeks Demokrasi</p> <p>11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk</p> <p>11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana</p> <p>11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah</p> <p>16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir</p>	<p>1.4.1.(j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran</p> <p>5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</p> <p>5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</p> <p>5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</p> <p>5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</p> <p>6.3.2.(a)# Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku</p> <p>6.4.1.(b) Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah</p> <p>6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).</p> <p>6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk</p> <p>8.8.1.(a)# Jumlah perusahaan yang menjalankan K3</p> <p>8.9.2*# Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat</p> <p>9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet</p> <p>11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar</p> <p>11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan</p> <p>12.5.1.(a)# Persentase penurunan volume sampah di kota</p> <p>13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia</p> <p>13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</p> <p>15.1.1.(b)# 1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi</p> <p>15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati</p> <p>16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</p> <p>16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)</p> <p>16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>17.1.1*# Total pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap Belanja Daerah</p> <p>17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan Internet</p>
Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target	<p>Tren capaian naik dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target tahun berjalan</p> <p>1.2.1* Tingkat Kemiskinan</p> <p>1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat</p> <p>1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</p> <p>1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah</p> <p>1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial</p> <p>1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi</p>	<p>Tren capaian naik dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target tahun berjalan</p> <p>2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan</p> <p>4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p> <p>5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi</p> <p>6.4.1.(a)# Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah</p>



Indikator TPB dengan Status Capaian	Urusan Pemerintahan Wajib	
	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Dasar	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Non Dasar
	<p>1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah</p> <p>2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</p> <p>2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</p> <p>2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe</p> <p>2.2.2.(b)# Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif</p> <p>3.3.1* Angka Kematian Ibu (AKI)</p> <p>3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi</p> <p>3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)</p> <p>4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B</p> <p>4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B</p> <p>4.1.1.(c)# Persentase Sekolah terakreditasi A</p> <p>4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun</p> <p>4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern</p> <p>6.1.1.(a)# Cakupan pelayanan air bersih</p> <p>6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</p> <p>6.2.1.(f)# Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <p>6.3.1.(b)# Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <p>10.1.1.(a)# Tingkat Kemiskinan</p> <p>10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil</p> <p>11.5.1* Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah</p> <p>11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang</p> <p>11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi</p> <p>13.1.2* Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah</p> <p>16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk</p>	<p>6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya</p> <p>8.1.1*# Pertumbuhan PDRB</p> <p>8.1.1.(a)# Pertumbuhan PDRB</p> <p>8.2.1*# Pertumbuhan PDRB</p> <p>8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin</p> <p>8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal</p> <p>8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja</p> <p>8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p> <p>8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran</p> <p>8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)</p> <p>8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa</p> <p>9.1.1.(a)# Persentase Kondisi Jalan Mantap</p> <p>9.1.2.(b)# Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima</p> <p>11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan</p> <p>12.1.1* Jumlah kolaborasi tematik quickwins program</p> <p>12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU</p> <p>16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun</p> <p>16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi</p> <p>16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</p> <p>16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</p> <p>16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</p> <p>16.10.2* Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi</p> <p>17.19.1.(a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga</p>
	<p>Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai</p> <p>1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</p> <p>1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</p> <p>1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat</p> <p>1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat</p> <p>1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial</p> <p>1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</p> <p>2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil</p> <p>3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup</p> <p>3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup</p> <p>3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup</p> <p>3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</p> <p>3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</p>	<p>Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai</p> <p>2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</p> <p>5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir</p> <p>5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir</p> <p>5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</p> <p>9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur</p> <p>10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</p> <p>11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani</p> <p>17.19.1.(b) Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer</p>



Indikator TPB dengan Status Capaian	Urusan Pemerintahan Wajib	
	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Dasar	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Non Dasar
	<p>3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</p> <p>3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta</p> <p>3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern</p> <p>3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern</p> <p>3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk</p> <p>3.8.2.(a)# Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan</p> <p>3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas</p> <p>4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik</p> <p>5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)</p> <p>6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air</p> <p>10.1.1* Koefisien Gini (Gini Ratio)</p> <p>10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional</p> <p>11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</p> <p>11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</p> <p>11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</p> <p>11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</p> <p>13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</p> <p>16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir</p> <p>16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya</p> <p>16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi</p> <p>16.10.1.(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>17.19.2.(b) Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga</p>
Tidak Ada Data	<p>1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>1.4.1.(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</p> <p>1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</p> <p>1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</p> <p>1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan</p> <p>2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</p> <p>3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih</p> <p>3.1.2.(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</p> <p>3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri</p> <p>3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba</p> <p>3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir</p> <p>3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan</p> <p>3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan</p> <p>3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun</p> <p>3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</p>	<p>2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan</p> <p>2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari</p> <p>2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan:</p> <p>5.2.1.(a) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan</p> <p>5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama,</p> <p>5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun</p> <p>5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)</p> <p>5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi</p> <p>6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku</p> <p>6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%</p> <p>8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian</p> <p>8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)</p> <p>8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit</p> <p>12.4.2.(a)# Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001</p> <p>12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister</p>



Indikator TPB dengan Status Capaian	Urusan Pemerintahan Wajib	
	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Dasar	Indikator TPB yang termasuk dalam urusan Wajib Non Dasar
	<p>4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika</p> <p>4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)</p> <p>9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB</p> <p>10.2.1* Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas</p> <p>10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah</p> <p>10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan</p>	<p>12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister</p> <p>15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</p> <p>15.5.1* Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas</p> <p>15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi</p> <p>15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati</p> <p>15.c.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi</p> <p>16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir</p> <p>16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan</p> <p>16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</p> <p>16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</p> <p>16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</p> <p>17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p>
Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	<p>16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional</p>	<p>9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur</p> <p>9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi</p> <p>16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil</p> <p>16.7.2.(c) Indeks Hak-Hak Politik</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 6

ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tren, Proyeksi, dan Skenario

Alternatif Kebijakan

Rekomendasi Substansi Kebijakan

Usulan Integrasi

Tindak Lanjut

BAB 6 ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

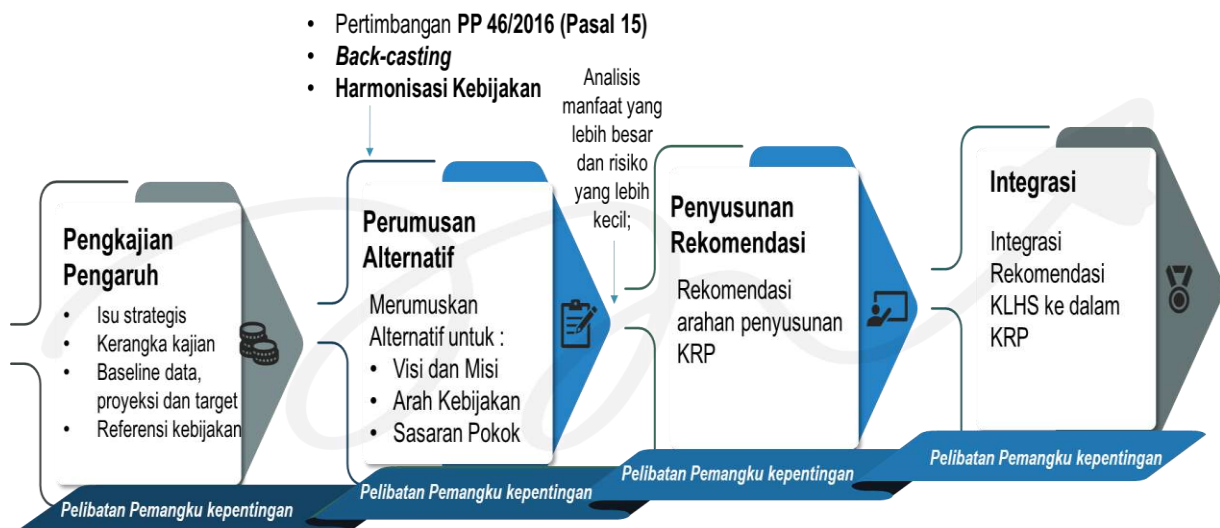
“Bab ini berisi tren, proyeksi, dan skenario indikator, alternatif kebijakan, rekomendasi substansi kebijakan, usulan integrasi, dan tindak lanjut dari KLHS RPJPD DKI Jakarta.”

Penyusunan KLHS ini dilakukan secara *ex-ante*, oleh karenanya perumusan alternatif yang dikaji dalam KLHS ini adalah untuk mengembangkan berbagai alternatif skenario yang menunjukkan target yang ingin dicapai sesuai dengan hasil kajian tren dan proyeksi terhadap indikator makro isu strategis. Skenario yang diusulkan adalah:

1. Skenario berdasarkan tren dan proyeksi Business as Usual (BAU)
2. Skenario moderate
3. Skenario akselerasi

Skenario-skenario moderate dan akselerasi tersebut dapat memiliki target yang berbeda maupun sama bergantung pada hasil proyeksi yang dilakukan dan target nasional maupun target/indikator Global City. Alternatif skenario hasil kajian akan difokuskan pada 4 (empat) isu strategis KLHS yang telah disepakati dalam Konsultasi Publik 1 tanggal 6 Juli 2023. Hasil kajian alternatif skenario ini akan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi alternatif arah kebijakan RPJP DKI Jakarta 2045 serta menjadi dasar dalam penyusunan tahapan pencapaian target 5 tahunan untuk penyusunan RPJMD melalui metode *backcasting*.

Tahapan yang dilakukan dalam perumusan alternatif kebijakan dan rekomendasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



6.1 Tren, Proyeksi, dan Skenario Indikator

Penyusunan proyeksi digunakan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya pertimbangan peningkatan penduduk hingga akhir masa perencanaan. Hal ini disebabkan sumber utama dari keempat isu strategis DKI Jakarta pada dasarnya adalah tingginya jumlah penduduk yang menghuni dan tingginya masyarakat yang hanya memanfaatkan SDA di wilayah Jakarta, seperti pekerja komuter, pendatang dan lain sebagainya. Faktor tingginya penduduk ini menimbulkan tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup yang kondisinya relatif terbatas, khususnya

keterbatasan area lahan dan sumber daya air. Oleh karena tekanan penduduk merupakan faktor penting yang melandasi kajian isu strategis maka perlu diuraikan terlebih dahulu tren dan proyeksi kependudukan di wilayah Jakarta sampai dengan tahun 2045. Berdasarkan data *time series* penduduk.

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2023, tercatat laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2021 adalah sebesar 0,57% pertahun. Peningkatan jumlah penduduk umumnya dapat mendorong terjadinya perubahan penutup lahan, terutama dari lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun. Untuk DKI Jakarta sendiri kebutuhan lahan terbangun bagi penduduk saat ini sudah didorong melalui pengembangan bangunan vertikal. Namun, dengan adanya pertambahan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi kondisi ketersediaan air di DKI Jakarta yang mana secara keseluruhan kondisi D3TLH untuk air telah terlampaui, dengan asumsi tidak ada sumber air yang diusahakan secara kreatif menjadi air tambahan. Oleh karena itu, pola tekanan penduduk digunakan untuk melihat sebaran penduduk berdasarkan lokasi secara spasial di wilayah DKI Jakarta.

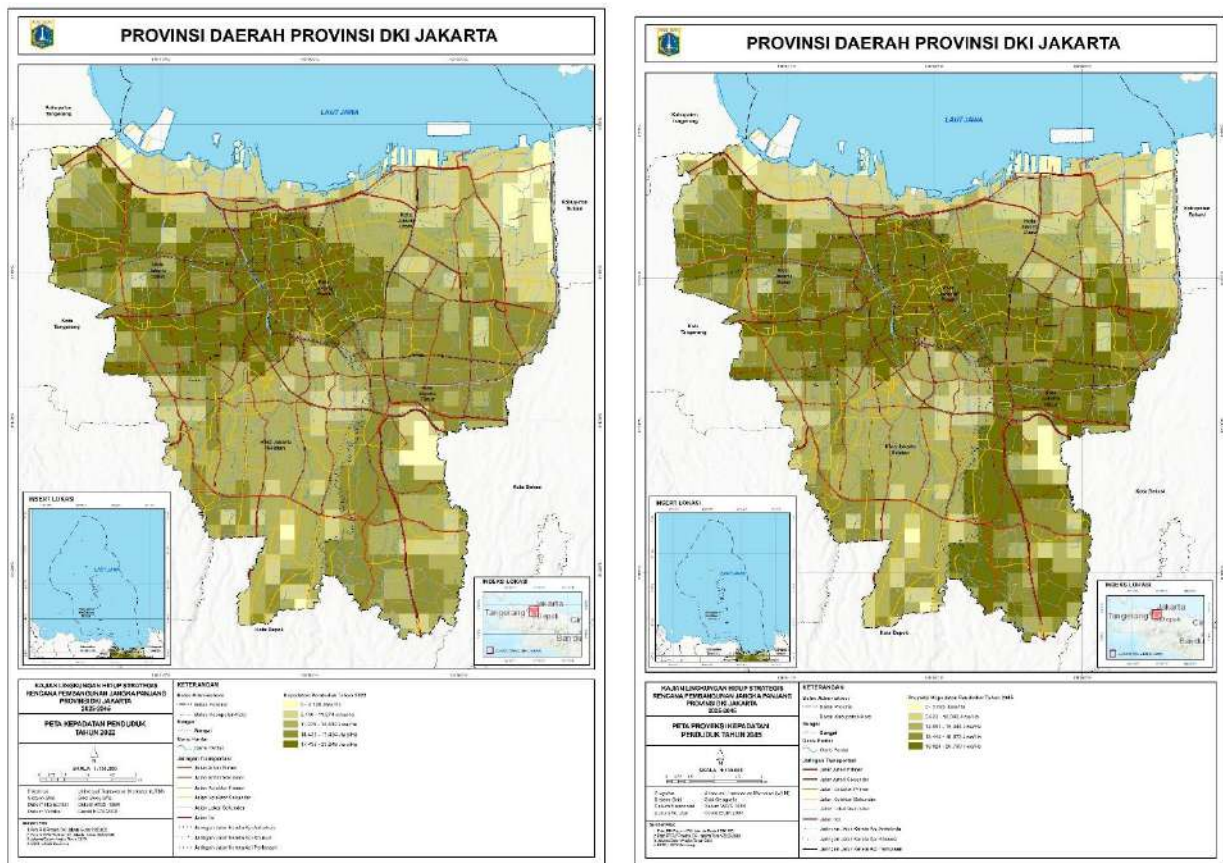
Pemodelan tekanan penduduk dilakukan di setiap grid 30"x30" diawali dengan pemodelan proyeksi penduduk ditahun yang akan datang, yaitu tahun 2023 dan 2045 pada setiap grid. Peningkatan jumlah penduduk secara statistik menjadi pertimbangan dalam pemodelan proyeksi penduduk. Pemodelan tekanan penduduk dilakukan distribusi keberadaan penutupan lahan area terbangun, area pertanian, tambak, dan keberadaan Jalan raya yang akan digunakan sebagai bobot dalam pendistribusian penduduk pada setiap grid. Model proyeksi penduduk dalam setiap grid pada prinsipnya sama dengan model distribusi penduduk namun ditambahkan dengan analisa proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045.

Tabel 6.1. Jumlah Penduduk dan Hasil Proyeksi Sampai Dengan Tahun 2045

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)					
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Kep Seribu	28,925	30,913	33,777	37,733	42,153	48,145
Jakarta Selatan	2,244,623	2,271,666	2,308,232	2,354,767	2,402,241	2,460,474
Jakarta Timur	3,083,883	3,158,490	3,260,781	3,393,316	3,531,238	3,704,163
Jakarta Pusat	1,079,995	1,117,353	1,169,183	1,237,363	1,309,519	1,401,682
Jakarta Barat	2,448,975	2,470,343	2,499,124	2,535,572	2,572,552	2,617,640
Jakarta Utara	1,793,550	1,815,701	1,845,662	1,883,810	1,922,746	1,970,533
DKI Jakarta	10,679,951	10,864,467	11,116,758	11,442,561	11,780,448	12,202,638

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan, dapat dilihat secara signifikan distribusi penduduk di DKI Jakarta terpusat pada wilayah Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Sedangkan distribusi penduduk paling kecil berada pada Kabupaten Kepulauan Seribu dan juga Kota Jakarta Utara. Kondisi ini cukup alamiah karena wilayah Jakarta Utara adalah wilayah pesisir yang sebagian besar diperuntukkan untuk aktivitas ekonomi dan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah kepulauan dengan ruang pemanfaatan yang sedikit sehingga distribusi penduduk pada wilayah tersebut tidak terlalu besar. Tekanan penduduk di wilayah DKI Jakarta ini akan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan hidup di waktu mendatang, seperti mempengaruhi penurunan D3TLH air, timbulan sampah, dan juga potensi beban pencemar. Untuk lebih jelasnya, distribusi penduduk secara spasial pada tahun 2023 dan tahun 2045 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(a) 2023

(b) 2045

Gambar 6.1 Distribusi Penduduk DKI Jakarta Pada Tahun (a) 2023 dan (b) 2045
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kriteria makro yang digunakan untuk menganalisis tren dan proyeksi untuk masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2. Kerangka Kajian Indikator

No	Isu Strategis	Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
1	Tingginya risiko Bencana	Mengkaji penurunan risiko bencana melalui upaya penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK	Tingkat bencana	<ul style="list-style-type: none"> IRBI untuk bencana alam Kapasitas daerah dan Masyarakat terkait mitigasi bencana non alam (kebakaran, kegagalan teknologi dan wabah penyakit)
			Kerentanan bencana	
			Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana)	
			Pemanfaatan IPTEK (Digital Platform)	
2	Ancaman Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Kualitas LH	Mengkaji upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup (Air, Lahan, Udara) untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	IKLH (IKA, IKU, IKTL, IKAL)
			Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA	Indeks Pengelolaan Sampah Emisi GRK Daya Dukung Air Infrastruktur Perkotaan (Penyediaan Air Bersih, Persampahan, Sanitasi)
3	Ketimpangan Sosial – Ekonomi	Mengkaji upaya penurunan ketimpangan sosial ekonomi melalui	Pemerataan akses pelayanan sosial	IPM Gini Ratio Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi



No	Isu Strategis	Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
		inklusi akses fasilitas sosial ekonomi dan akses peningkatan kesejahteraan	ekonomi di daratan dan kepulauan	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Tingkat Kemiskinan Kepulauan TPT
4	Belum Optimalnya Tata Kelola	Mengkaji kapasitas kelembagaan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam menuju Jakarta sebagai <i>global city</i> yang berkelanjutan	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, dan SAKIP / TPB 16) Ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana untuk pengendalian pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan hidup Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan Kebijakan dan rencana Jumlah kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional dalam perbaikan pengelolaan SDA

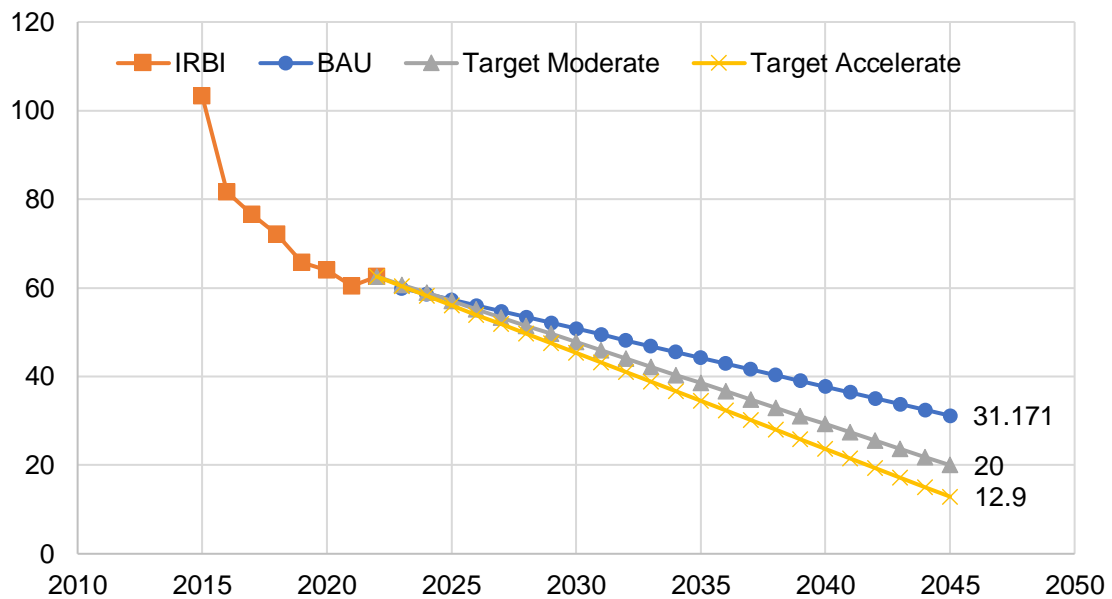
Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.1.1 Tingginya Risiko Bencana

Risiko Bencana Alam

Risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta yang terdapat dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan risiko dari nilai indeks >100 pada tahun 2015 menjadi nilai indeks 62,58 pada tahun 2022. Penurunan indeks risiko bencana ini disumbangkan dari peningkatan nilai indeks Kapasitas Daerah yang setiap tahun nampaknya terus diperkuat. Berdasarkan data IRBI berseri waktu dari tahun 2015-2022 maka dengan menjaga konsistensi nilai peningkatan kapasitas daerah pada tahun-tahun berikutnya, yang disebut sebagai Skenario BaU maka pada tahun 2045 dapat diproyeksikan bahwa nilai indeks risiko bencana akan terus menurun menuju nilai indeks 31,17.

Proyeksi nilai indeks risiko bencana pada tahun 2045 dapat diperkuat apabila adanya upaya-upaya tambahan untuk meningkatkan kapasitas daerah dengan lebih cepat tentunya dengan postur anggaran yang semakin membaik. Jika menggunakan Skenario Moderate maka diharapkan nilai indeks risiko bencana pada tahun 2045 menurun menjadi 20,00 dan jika menggunakan skenario akselerasi nilai indeks bencana pada tahun 2045 menurun menjadi 12,90. Kajian tren dan proyeksi untuk masing-masing indikator isu tingginya risiko bencana dapat dilihat pada gambar 6.4 dan tabel 6.3 di bawah ini.



Gambar 6.2 Proyeksi IRBI Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.3. Proyeksi IRBI

	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2022	62.58	62.58	62.58
2023	59.93	60.73	60.42
2024	58.62	58.88	58.26
2025	57.31	57.03	56.10
2026	56.00	55.17	53.94
2027	54.70	53.32	51.78
2028	53.39	51.47	49.62
2029	52.08	49.62	47.46
2030	50.78	47.77	45.30
2031	49.47	45.92	43.14
2032	48.16	44.07	40.98
2033	46.86	42.22	38.82
2034	45.55	40.36	36.66
2035	44.24	38.51	34.50
2036	42.93	36.66	32.34
2037	41.63	34.81	30.18
2038	40.32	32.96	28.02
2039	39.01	31.11	25.86
2040	37.71	29.26	23.70
2041	36.40	27.41	21.54
2042	35.09	25.55	19.38
2043	33.79	23.70	17.22
2044	32.48	21.85	15.06
2045	31.17	20.00	12.90

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Risiko Bencana Non Alam

Selain risiko bencana alam, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki risiko bencana non alam, seperti risiko bencana kebakaran, risiko bencana kegagalan teknologi dan risiko bencana epidemi dan wabah penyakit.

- a. **Risiko Kebakaran Perkotaan**, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, rata-rata nilai risiko kebakaran di **DKI Jakarta pada tahun 2022 secara keseluruhan** dari kompilasi skor RW dan skor FGD memiliki nilai persentase **48% dengan kategori sebagai risiko kebakaran sedang**.

Tidak tersedianya data berseri waktu tentang risiko bencana kebakaran perkotaan, menyebabkan tidak dapat melihat tren pada masa lalu dan tidak dapat membuat proyeksi ke masa depan secara kuantitatif, terlebih lagi karakteristik bencana kebakaran perkotaan yang sumber kebakarannya tidak pasti. Namun berdasarkan hasil FGD dan KP, bahwa **harapannya pada tahun 2045 risiko kebakaran di Provinsi DKI Jakarta menjadi rendah**. Dalam kajian yang dilakukan pada tahun 2022, risiko kebakaran DKI Jakarta dapat diturunkan dengan meningkatkan kapasitas: (a) layanan pencegahan kebakaran, (b) layanan penanggulangan kebakaran, layanan penyelamatan, (c) organisasi dan tata laksana, pengendalian teknis, (d) standar dan jumlah kebutuhan sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan, (e) standar K3, jumlah, kapasitas, dan suhu, (f) peran serta Masyarakat, (g) pembinaan teknis, dan (h) penyediaan hidran air di posisi rawan kebakaran.

- b. **Risiko Kegagalan Teknologi**, berdasarkan dokumen rancangan Rencana Penanggulangan Bencana tahun **2022, risiko bencana kegagalan teknologi** di Provinsi DKI Jakarta berada pada **kelas Sedang**.

Tidak tersedianya data berseri waktu tentang risiko bencana kegagalan teknologi di DKI Jakarta, menyebabkan tidak dapat melihat tren pada masa lalu dan tidak dapat membuat proyeksi ke masa depan secara kuantitatif, terlebih lagi karakteristik bencana kegagalan teknologi disebabkan oleh banyak faktor yang penuh ketidak pastian (*uncertainty*). Namun berdasarkan hasil FGD dan KP, bahwa **harapannya pada tahun 2045 risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta menjadi rendah**. Risiko bencana kegagalan teknologi menjadi **kategori rendah** dengan melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin dan berkala keadaan bangunan pabrik dan infrastruktur transportasi; peningkatan standar keselamatan di pabrik/industri dan desain peralatan; pembuatan prosedur operasi penyelamatan saat terjadi kecelakaan teknologi.

- c. **Risiko Pandemi dan Wabah Penyakit**, berdasarkan dokumen rancangan Rencana Penanggulangan Bencana tahun **2022, risiko bencana pandemi dan wabah penyakit** di Provinsi DKI Jakarta berada pada **kelas Sedang**. Tidak tersedianya data berseri waktu tentang risiko bencana pandemi dan wabah penyakit di DKI Jakarta, menyebabkan tidak dapat melihat tren pada masa lalu dan tidak dapat membuat proyeksi ke masa depan secara kuantitatif, terlebih lagi karakteristik bencana pandemi dan wabah penyakit disebabkan oleh banyak faktor yang penuh ketidak pastian (*uncertainty*). Namun berdasarkan hasil FGD dan KP, bahwa **harapannya pada tahun 2045 risiko bencana pandemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta menjadi rendah**. Risiko bencana pandemi dan wabah penyakit menjadi **kategori rendah** dengan melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pandemi dan wabah penyakit (DBD); melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan 3M Plus; melakukan pencegahan DBD secara mandiri dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran Masyarakat

Tabel 6.4. Baseline 2022 dan Proyeksi Bencana Non Alam 2045

BENCANA NON ALAM	BASELINE	PROYEKSI (2045)
Kebakaran	Risiko kebakaran DKI Jakarta sebesar 48% (risiko kebakaran sedang)	Risiko kebakaran DKI Jakarta menjadi kategori rendah dengan meningkatkan kapasitas (a) layanan pencegahan kebakaran, (b) layanan penanggulangan kebakaran, layanan penyelamatan, (c) organisasi dan tata laksana, pengendalian teknis, (d) standar dan jumlah kebutuhan sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan, (e) standar K3, jumlah, kapasitas, dan suhu, (f) peran serta Masyarakat, (g) pembinaan teknis, dan (h) ketersediaan hidran air di wilayah rawan kebakaran



BENCANA NON ALAM	BASELINE	PROYEKSI (2045)
Kegagalan Teknologi	Risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta pada indeks Sedang	Risiko bencana kegagalan teknologi menjadi kategori rendah dengan melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin dan berkala keadaan bangunan pabrik dan infrastruktur transportasi; peningkatan standar keselamatan di pabrik/industri dan desain peralatan; pembuatan prosedur operasi penyelamatan saat terjadi kecelakaan teknologi.
Kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit	Risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta pada indeks Sedang	Risiko bencana epidemi dan wabah penyakit menjadi kategori rendah dengan melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang epidemi dan wabah penyakit (DBD); melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan 3M Plus; melakukan pencegahan DBD secara mandiri dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.1.2 Ancaman Keberlanjutan SDA dan Kualitas Lingkungan

Kajian tren dan proyeksi untuk masing-masing indikator isu keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan adalah sebagai berikut:

a. IKLH dan Agregatnya

Dalam dokumen RPPLH 2022-2052 perlu ditargetkan kondisi lingkungan yang riil yang ingin dicapai. Dengan demikian IKLH ini digunakan sebagai indikator pencapaian dari keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Target peningkatan IKLH akan mencakup peningkatan kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Target yang dicapai menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta saat ini fokus untuk mengembalikan fungsi ekosistem sehingga dapat memberikan layanannya secara optimal.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu indikator Kinerja Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini merupakan baseline dan target capaian dari nilai IKLH untuk Provinsi DKI Jakarta serta Kabupaten/Kota Administrasi yang ada di DKI Jakarta, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.5 Baseline Data IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Wilayah	IKU	IKA	IKAL	IKTL	IKLH	Kategori
Kota Jakarta Barat	69.21	35.52		24.28	46.70	Kurang
Kota Jakarta Selatan	72.12	42.2		27.54	51.11	Sedang
Kota Jakarta Timur	59.29	44.44		26.75	46.58	Kurang
Kota Jakarta Pusat	63.09	44.67		26.08	48.06	Kurang
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	90.02	30		85.48	66.46	Sedang
Kota Jakarta Utara	54.6	42.5		25.44	43.67	Kurang
DKI Jakarta (Provinsi)	68.06	41.17	80.08	27.07	54.65	Sedang

Keterangan:

Perhitungan tahun 2021 dikonversi menggunakan penyesuaian rumusan IKLH revisi
 $(0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$

Hasil baseline di tahun 2022, kemudian digunakan untuk melakukan estimasi pada tahun 2045 terhadap nilai IKLH, IKA, IKU, dan IKAL. Nilai proyeksi akan menunjukkan bagaimana kondisi nilai IKLH di DKI Jakarta pada tahun 2045 dengan skenario saat ini atau skenario *Business as Usual* (BAU). Hasil proyeksi menunjukkan bahwa kondisi

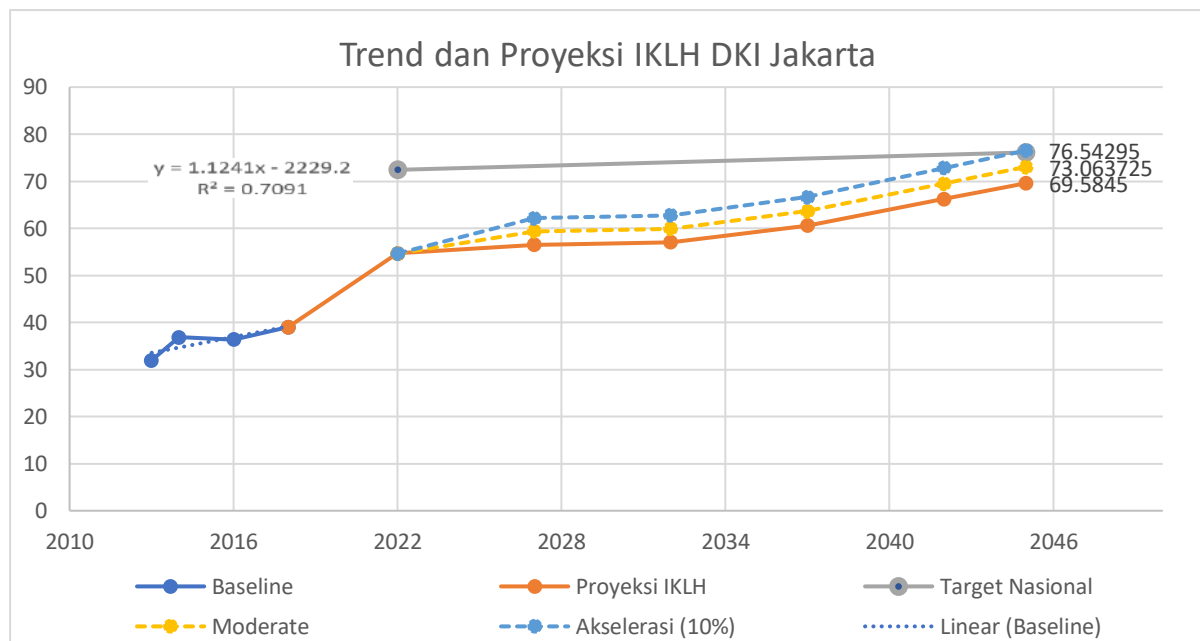
IKLH di tahun 2045 memiliki nilai 69.58. Sementara berdasarkan laporan RPPLH tahun 2022 – 2052 menunjukkan target IKLH DKI Jakarta sampai dengan tahun 2052 mencapai 59.03 yang mana target RPPLH lebih rendah dibandingkan dengan nilai BAU.

Tabel 6.6 Target dan Proyeksi IKLH DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2052

Komponen	Target Proyeksi					
	2027	2032	2037	2042	2047	2052
IKU	68.62	69.12	69.62	68.52	70.62	71.12
IKA	46.29	46.79	47.29	46.19	48.29	48.79
IKL	28.35	28.85	29.35	28.25	30.35	30.85
IKAL	77.28	77.78	78.28	77.18	79.28	79.78
IKLH	56.53	57.03	57.33	56.43	58.53	59.03

Sumber: Dokumen RPPLH Tahun 2022-2052

Sedangkan jika merujuk pada target nasional, target nilai IKLH mencapai 76.12⁴ yang mana nilai ini jauh lebih tinggi dari target DKI Jakarta tahun 2052 berdasarkan dokumen RPPLH. Hal tersebut kemudian menjadi acuan untuk melakukan proyeksi untuk meningkatkan target nilai IKLH berdasarkan skenario moderate dan akselerasi. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, diperoleh nilai 73.06 pada tahun 2045 melalui skenario moderate dan 76.54 melalui skenario akselerasi. Skenario akselerasi akan meningkatkan nilai IKLH lebih besar dari pada target nasional sebesar 0.42.

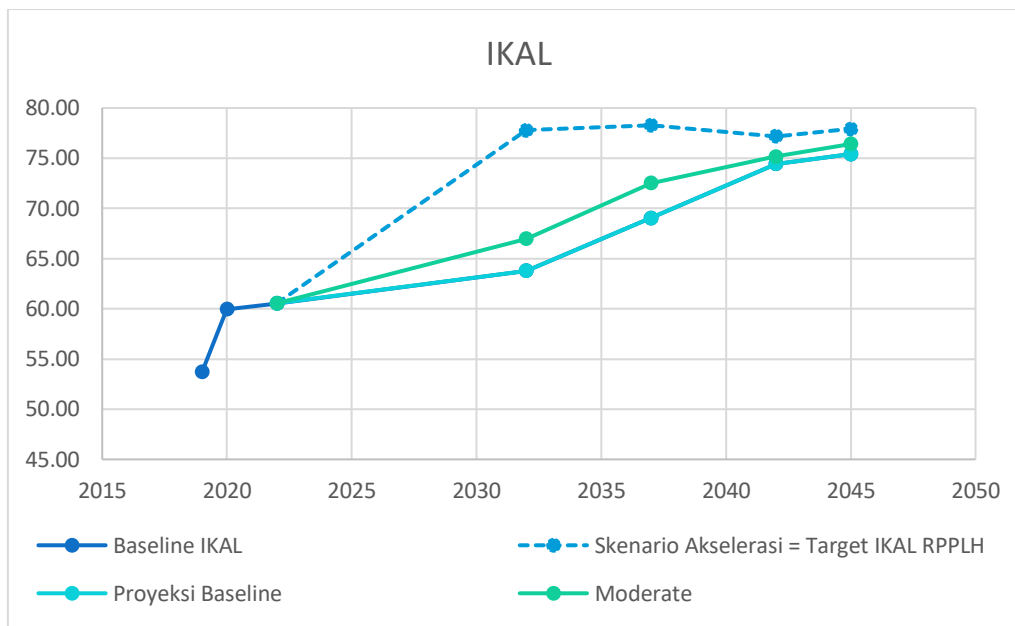


Gambar 6.3 Proyeksi Nilai IKLH Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

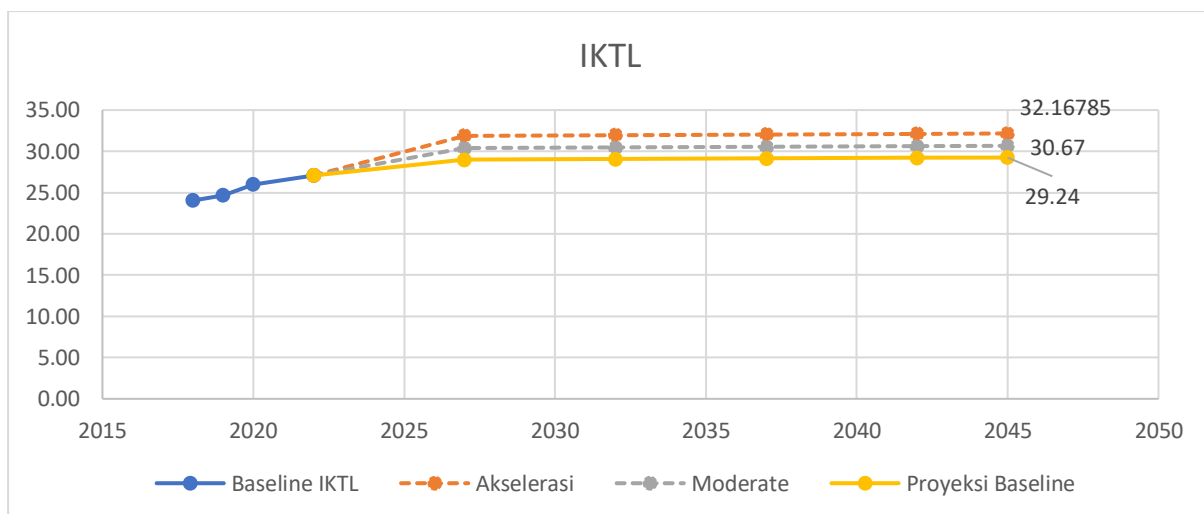
Proyeksi pun dilakukan tidak hanya pada nilai IKLH tetapi juga dengan nilai IKAL, IKU, IKTL dan IKA untuk melihat seberapa besar pengaruh saat ini terhadap nilai tersebut di tahun 2045. Proyeksi pun dilakukan dengan menggunakan skenario moderate dan akselerasi untuk melihat seberapa besar pengaruh usaha untuk meningkatkan nilai tersebut pada tahun 2045. Hasil skenario menunjukkan nilai IKAL pada tahun 2045 untuk skenario BAU adalah 75.41 sedangkan untuk skenario moderate memperoleh nilai 76.41 dan skenario akselerasi memperoleh nilai 77.91.

⁴ Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2045



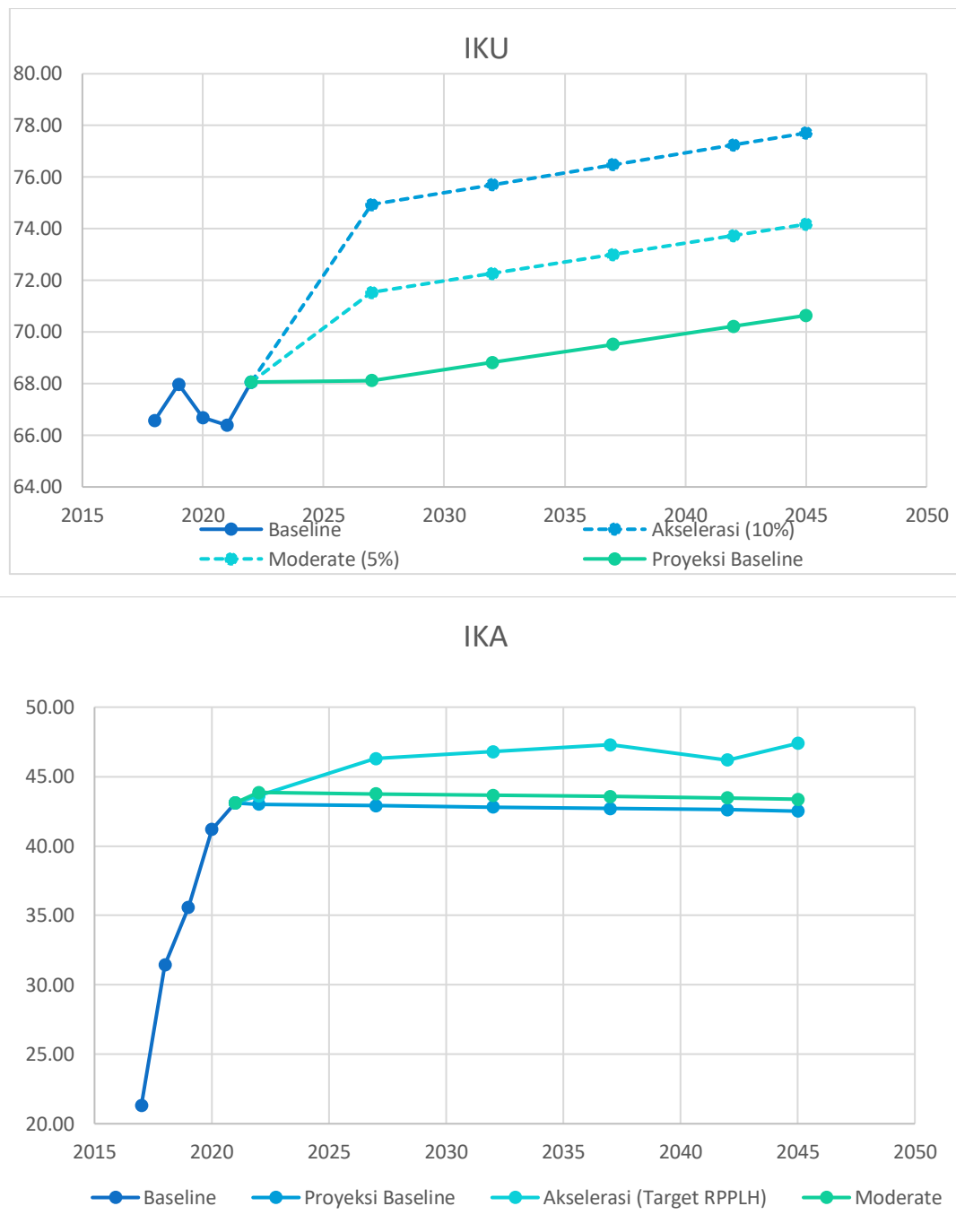
Gambar 6.4 Proyeksi Nilai IKAL Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hal yang sama pun dilakukan pada nilai IKTL dan hasil proyeksi menunjukkan nilai skenario BAU pada tahun 2045 mencapai 29.24, sedangkan untuk skenario moderate 30.67 dan skenario akselerasi memperoleh nilai 32.16.



Gambar 6.5 Proyeksi Nilai IKTL Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

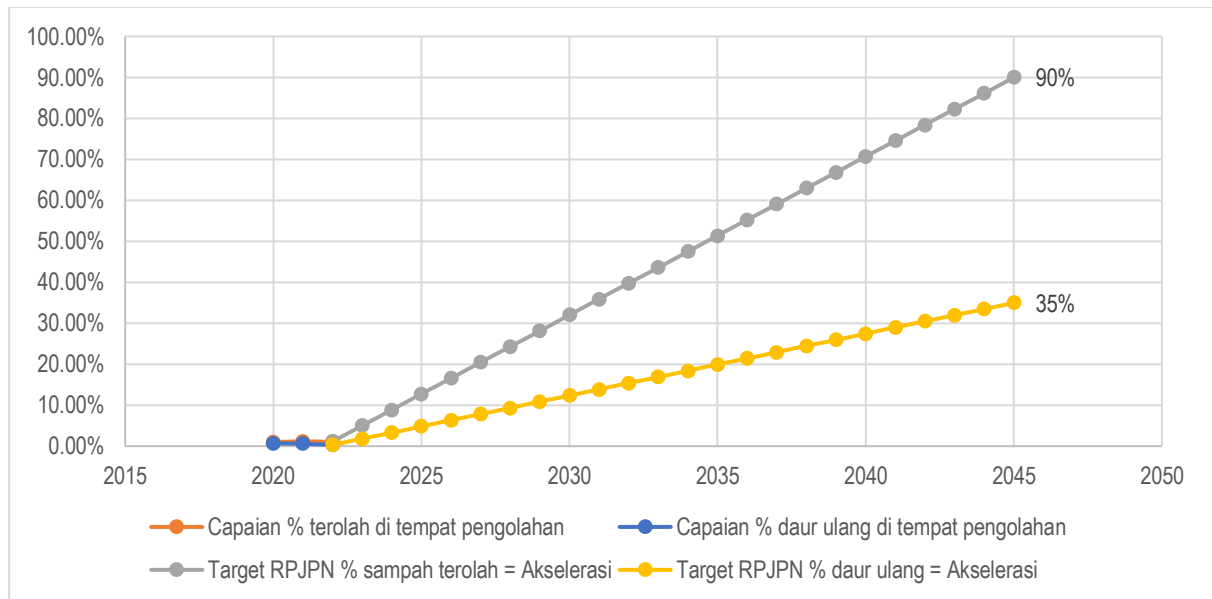
Proyeksi dilakukan untuk nilai IKU dan IKA dengan skenario BAU, Moderate dan Akselerasi. Hasilnya menunjukkan nilai IKU pada skenario BAU menunjukkan nilai 70.64 dan nilai skenario moderate dan akselerasi sebesar 74.12 dan 77.70. Sedangkan untuk nilai IKA menunjukkan hasil sebagai berikut, skenario BAU menunjukkan angka 42.51, moderate dengan angka 43.35 dan skenario akselerasi dengan nilai 47.39.



Gambar 6.6 Proyeksi Nilai IKA dan IKU Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

b. Indeks Pengelolaan Sampah

Indeks pengelolaan sampah dilihat dari pengurangan sampah ke TPA (sampah terkelola). Berdasarkan target RPJPN 2025 – 2045, diproyeksikan pada tahun 2045 sebesar 90% sampah terolah dan 35% sampah terdaur ulang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 6.7 Proyeksi Pengurangan Sampah Tahun 2045 Berdasarkan Skenario BAU, Moderate dan Akselerasi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

c. Emisi GRK

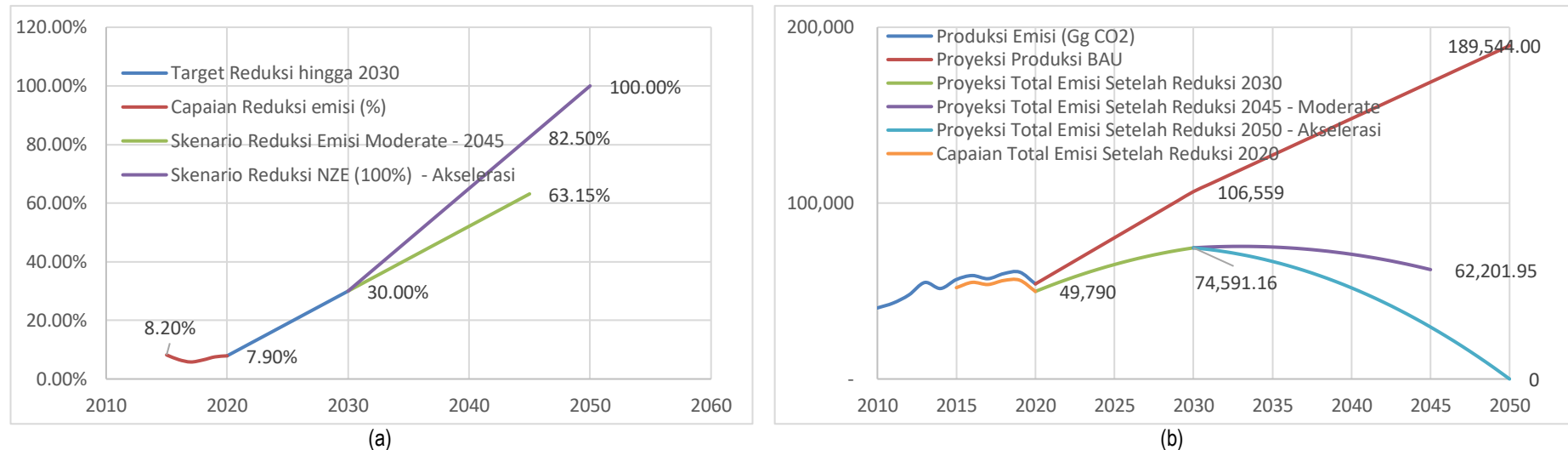
Dalam kurun waktu 2015-2020 sejumlah upaya mitigasi berhasil melakukan reduksi emisi berkisar antara 5-8% tiap tahun (Laporan Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta, 2021). Angka ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai target reduksi emisi 30% pada tahun 2030 sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 90/2021.

Berdasarkan Pergub 90/2021, upaya-upaya penurunan Emisi GRK oleh pemerintah DKI Jakarta adalah dengan menargetkan skenario penurunan Emisi GRK sebesar 30% dari tingkat emisi pada tahun 2030 serta skenario ambisius penurunan Emisi GRK sebesar 50% dari tingkat emisi langsung pada tahun 2030 dengan mempertimbangkan kesepakatan global untuk mencapai netralitas emisi (net zero emission) pada tahun 2050. Selain itu, upaya peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat dilakukan dengan menargetkan tidak adanya lagi wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi dampak bencana iklim tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2030.

Atas dasar demikian, sejumlah skenario proyeksi dilakukan untuk memberikan gambaran pengurangan emisi di DKI Jakarta.

SKENARIO MODERATE

Skenario emisi GRK diawali dengan memetakan capaian reduksi emisi hingga tahun 2020 (7,9%) dan target yang dikehendaki hingga tahun 2030 yaitu 30% (Pergub 90/2021). Dari % reduksi tersebut, didapatkan angka bahwa setidaknya setiap tahun dalam kurun waktu 2020-2030, terjadi peningkatan % reduksi emisi sekitar 2,21%. Peningkatan reduksi ini jika dilanjutkan hingga tahun 2045 (akhir masa RPJPD) maka akan terakumulasi mencapai angka reduksi sekitar 63,15%. Skenario ini disebut skenario moderate.



Gambar 6.8 Skenario Emisi GRK DKI Jakarta (a) Reduksi emisi (%) & (b) Nilai Emisi GRK (Gg CO2 emission)
Sumber: Hasil Analisis, 2023

SKENARIO AKSELERASI

Skenario moderate ternyata belum cukup untuk mencapai target NZE pada tahun 2050, sehingga diperlukan percepatan dengan menargetkan peningkatan reduksi emisi yang lebih tinggi. Untuk mencapai NZE pada tahun 2050 (100% reduksi), maka dibutuhkan peningkatan reduksi sekitar 3,5% setiap tahunnya dalam kurun waktu 2030-2050. Sehingga pada tahun 2045, akan tercapai angka reduksi 82,5%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari target Nasional dalam RPJPN 2025-2045 yaitu 80,98%

Atas hasil tersebut, skenario target untuk moderate dan akselerasi adalah sebagai berikut.

Tabel 6.7 Skenario Moderate dan Akselerasi

Tahun	Proyeksi BAU (Baseline) – Gg CO2	Skenario Moderate		Skenario Akselerasi	
		% Reduksi	Gg CO2	% Reduksi	Gg CO2
2025	80,310	18.95%	65,091	18.95%	65,091
2030	85,560	30.00%	74,591	21.16%	67,455
2035	90,809	43.26%	74,587.20	51.00%	64,412.64
2040	96,059	52.10%	70,916.62	65.00%	51,817.99
2045	101,309	63.15%	62,201.95	82.50%	29,539.60
2050	189,544.00	-	-	100.00%	0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

d. D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup)

Proses analisis dilakukan berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045. Proses analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan proyeksi terhadap ketersediaan Air di DKI Jakarta berdasarkan wilayah sungai (WS) Cidanau-Ciujung-Cidurian dan Ciliwung-Cisadane yang terbagi menjadi beberapa WD⁵. Secara total saat ini ketersediaan air di wilayah DKI Jakarta mencapai 550.116.002,13 m³/tahun. Berdasarkan ketersediaan air saat ini kemudian dilakukan analisa proyeksi secara linear untuk melihat kondisi ketersediaan air pada tahun 2045.



Gambar 6.9 Grafik Perbandingan Ketersediaan Air DKI Jakarta Tahun 2022 - 2045

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil analisis proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2045 ketersediaan air DKI Jakarta menurun sebesar 6 % dengan total ketersediaan air 478.664.821,78 m³/tahun. Hasil analisis proyeksi jumlah penduduk dan ketersediaan air DKI Jakarta, kemudian digunakan untuk melihat bagaimana kondisi D3TLH air pada tahun 2045. Analisa proyeksi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, ketersediaan air dan RTRW DKI Jakarta yang diasumsikan 100% berjalan setelah 20 tahun. Berikut hasil proyeksi D3TLH air untuk DKI Jakarta di tahun 2045:

⁵ Data Ketersediaan Air KEMEN PUPR Tahun 2016 berdasarkan wilayah sungai

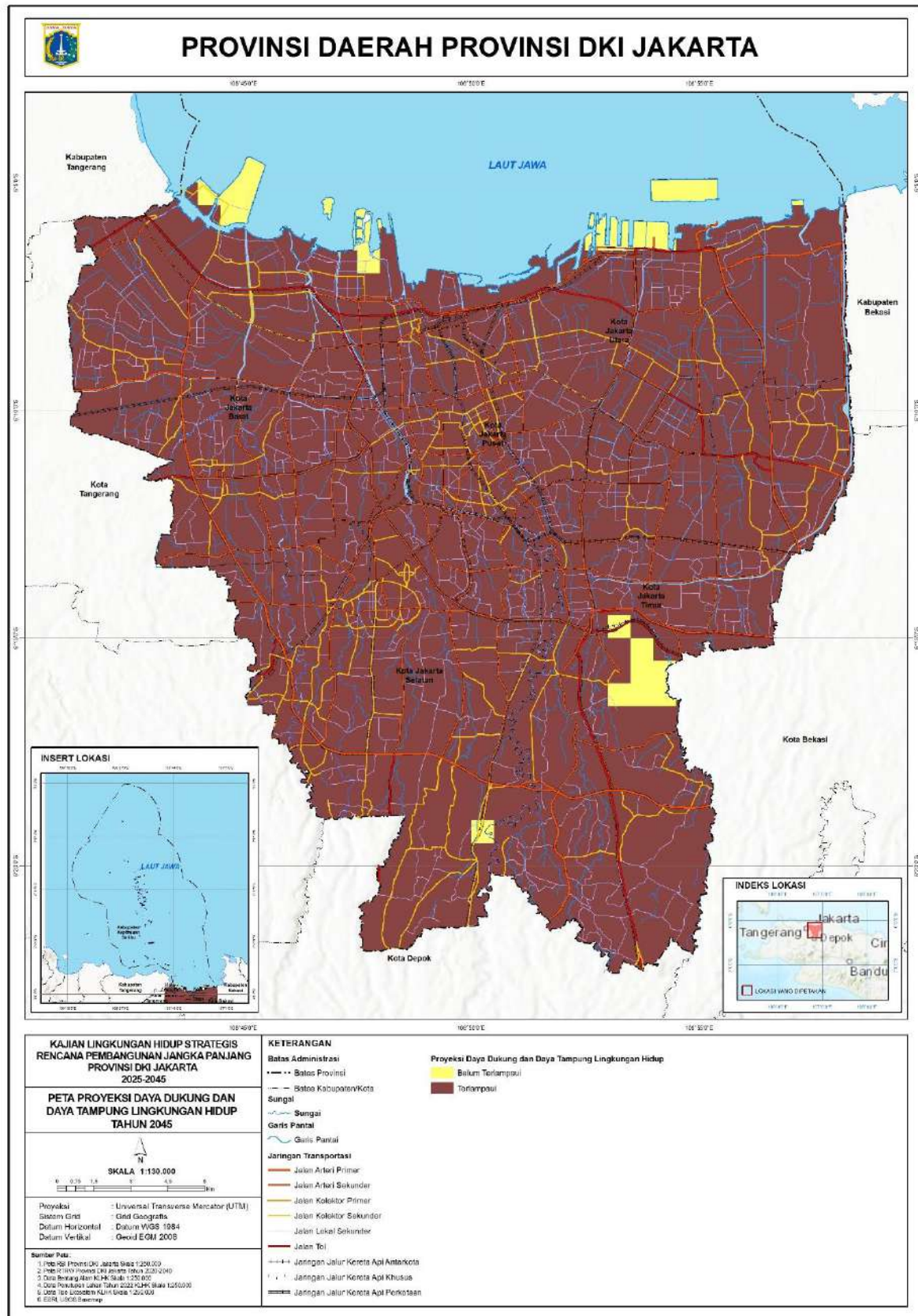
Tabel 6.8 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2045

Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air Jakarta	Volume (m ³ /Tahun)				Luas D3TLH Air (Air)		Ambang Batas (Jiwa)	Indikasi Status D3TLH Air
		Domestik	Lahan	Kebutuhan Total	Selisih	Belum Terlampaui	Terlampaui		
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4,163,057.32	2,396,044.80	1,109,769.45	3,505,814.25	657,243.07	658.91	419.13	28,574.00	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Barat	45,142,215.19	240,563,088.00	47,115,562.32	287,678,650.32	-242,536,435.13		12,508.73	2,391,587.00	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Pusat	37,480,574.36	117,308,217.60	3,698,699.78	121,006,917.38	-83,526,343.02		4,781.08	986,176.00	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Selatan	76,668,491.29	227,681,539.20	9,583,555.59	237,265,094.79	-160,596,603.49	85.35	14,745.71	2,241,236.00	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Timur	172,648,072.00	363,440,476.80	68,782,783.53	432,223,260.33	-259,575,188.33	547.91	17,770.73	3,129,956.00	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Utara	142,542,411.62	172,361,347.20	128,329,973.49	300,691,320.69	-158,148,909.07	1,165.26	13,736.30	1,728,384.00	Terlampaui
Total	474,481,764.46	1,121,354,668.80	257,510,574.70	1,378,865,243.50	-903,726,235.97	2,457.43	63,961.68	10,505,913.00	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa luas area yang terlampaui memiliki luasan sebesar 63.602,31 Ha dan area yang belum terlampaui sebesar 2.816,80 Ha. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2045 wilayah Kota Jakarta Barat dan Jakarta Pusat secara keseluruhan telah terlampaui daya dukung dan daya tampung untuk penyedia air. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Utara, masih memiliki wilayah sebesar 1.524,62 Ha untuk wilayah yang masih belum terlampaui atau paling besar diantara wilayah kota/kabupaten lain di DKI Jakarta.

Pada tahun 2045, kebutuhan air secara total juga mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk, dengan total kebutuhan sekitar 1.200.146.244,35 m³/tahun yang jika dibandingkan dengan kebutuhan ditahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 163.495.152 m³/tahun. Secara spasial distribusi status D3TLH air untuk DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.10 Proyeksi Kondisi D3TLH Air untuk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2045

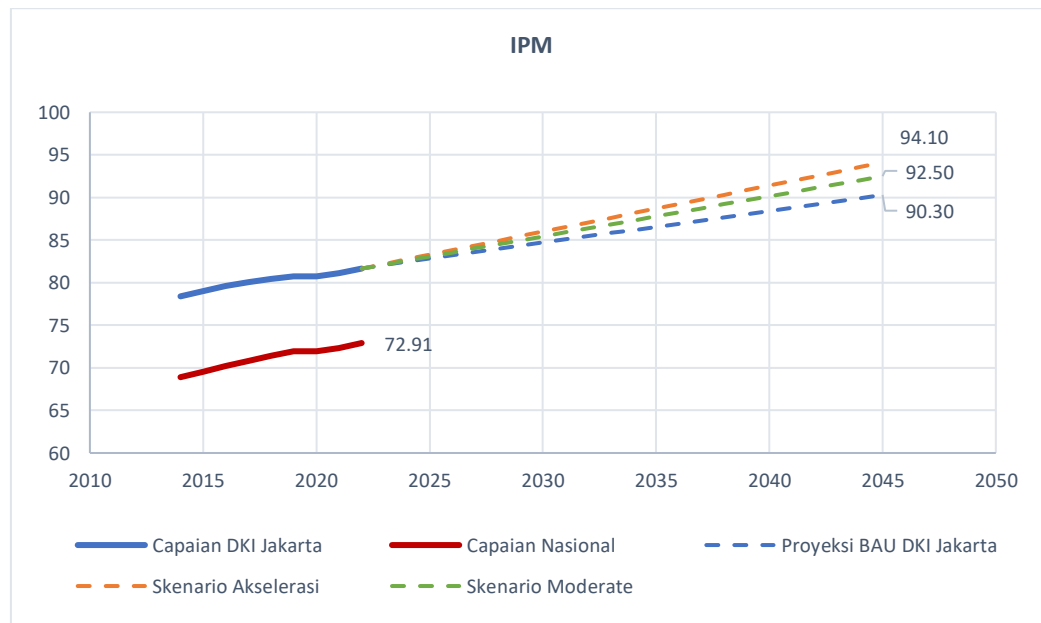
Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.1.3 Ketimpangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Kajian tren dan proyeksi untuk masing-masing indikator isu ketimpangan sosial ekonomi Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. IPM

IPM DKI Jakarta cenderung meningkat selama 9 (sembilan) tahun terakhir yaitu 78,38 pada tahun 2014 dan 81,65 pada tahun 2022. IPM Jakarta ini lebih tinggi daripada capaian nasional dan daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan tren tersebut, IPM DKI Jakarta akan mengalami peningkatan dalam 20 tahun mendatang hingga 90,30 pada tahun 2045.



Peringkat IPM 10 dunia 2021: Netherland = 94.1

Peringkat IPM 20 dunia 2021: Korsel = 92.5

Gambar 6.11 Analisis Proyeksi dan Skenario IPM

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sebagai upaya untuk mendukung Jakarta dalam bertransformasi menjadi kota global, dirancang **skenario akselerasi** dan **skenario moderate**. Skenario ini mengacu pada capaian peringkat IPM nomor 10 dan 20 dunia pada tahun 2021, yaitu Netherland dan Korea Selatan. Pada skenario akselerasi, target IPM mencapai 94,10 pada 2045. Serta pada skenario moderate, diturunkan target capaian pada tahun 2045 menjadi 92,50. Berdasarkan hal di atas, perlu adanya upaya untuk meningkatkan harapan hidup atau kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Tabel 6.9. Proyeksi IPM

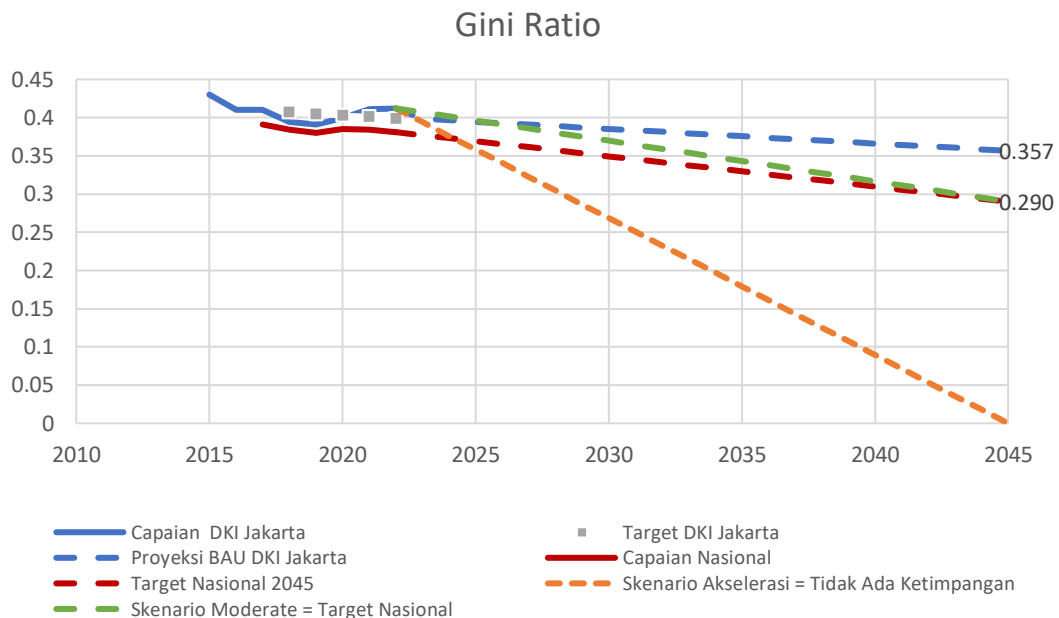
	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	82.82	83.07	83.27
2030	84.69	85.42	85.98
2035	86.56	87.78	88.69
2040	88.43	90.14	91.39
2045	90.30	92.50	94.10

Sumber: Hasil Analisis, 2023

b. Gini Ratio

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berdasarkan data selama 8 tahun terakhir, gini ratio Jakarta menunjukkan penurunan dari tahun 2015 (0,430) – 2019 (0,391). Akan tetapi sejak 2020 – 2022, gini ratio DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yaitu 0,399 pada 2020; 0,411 pada 2021; dan 0,412 pada 2022 yang berarti tingkat ketimpangan semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan nasional, gini ratio DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan nasional.



Gambar 6.12 Analisis Proyeksi dan Skenario Gini Ratio

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara BAU, proyeksi gini ratio DKI Jakarta menunjukkan penurunan menjadi 0,357 pada tahun 2045. Penurunan ini cukup baik, akan tetapi belum mencapai target nasional yaitu 0,290. Oleh karena itu dibutuhkan skenario moderate untuk mencapai target nasional. Sementara itu, untuk mencapai tidak ada ketimpangan pada tahun 2045, diperlukan upaya maksimal melalui skenario akselerasi.

Tabel 6.10. Proyeksi Gini Ratio

	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	0.395	0.396	0.358
2030	0.385	0.370	0.269
2035	0.376	0.343	0.179
2040	0.366	0.317	0.090
2045	0.357	0.290	0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

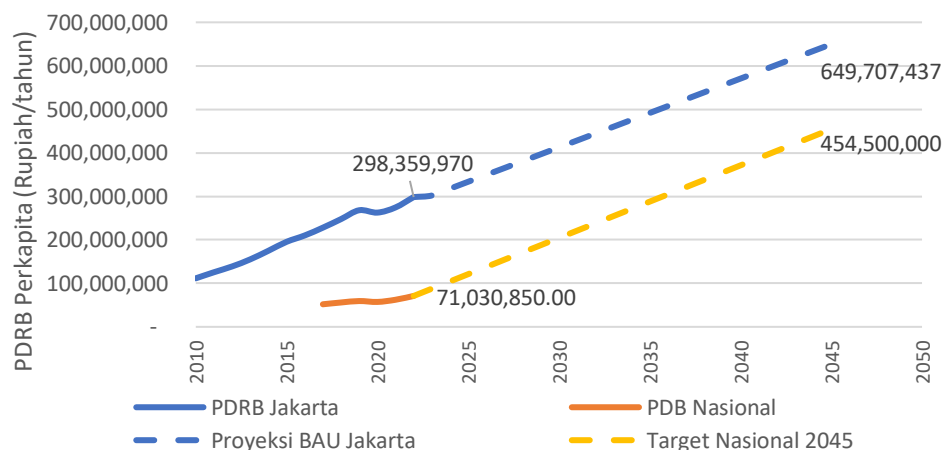
c. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita

Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada dasarnya setiap tahun relatif stabil pada kisaran 5,3 – 6,5% dalam 10 tahun terakhir kecuali pada tahun 2020. Pada tahun tersebut terjadi pertumbuhan ekonomi mencapai angka -2,4% diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Ekonomi mulai meningkat pada tahun 2021 dan kembali pulih ke posisi sebelum COVID mencapai 5,3% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta relatif sejalan dengan tren ekonomi nasional. Pada tahun 2022 ekonomi nasional perda pada posisi pertumbuhan yang sama dengan DKI Jakarta yaitu 5,3%.



Gambar 6.13 Analisis Proyeksi dan Skenario Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pemerintah pusat telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2045, dimana pada 10 (sepuluh) tahun pertama ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,1% per tahun, tahap kedua 7,8%, tahap ketiga 7,6% dan tahap terakhir 6,7% per tahun. Angka pertumbuhan ini ditetapkan untuk mencapai GDP perkapita Nasional tahun 2045 yang setara dengan negara maju sebesar USD 30.300 atau setara dengan 439jt Rupiah. Target PDB perkapita 2045 Nasional dijadikan sebagai pembanding bagaimana PDRB perkapita DKI Jakarta pada tahun 2045 sebagai berikut.



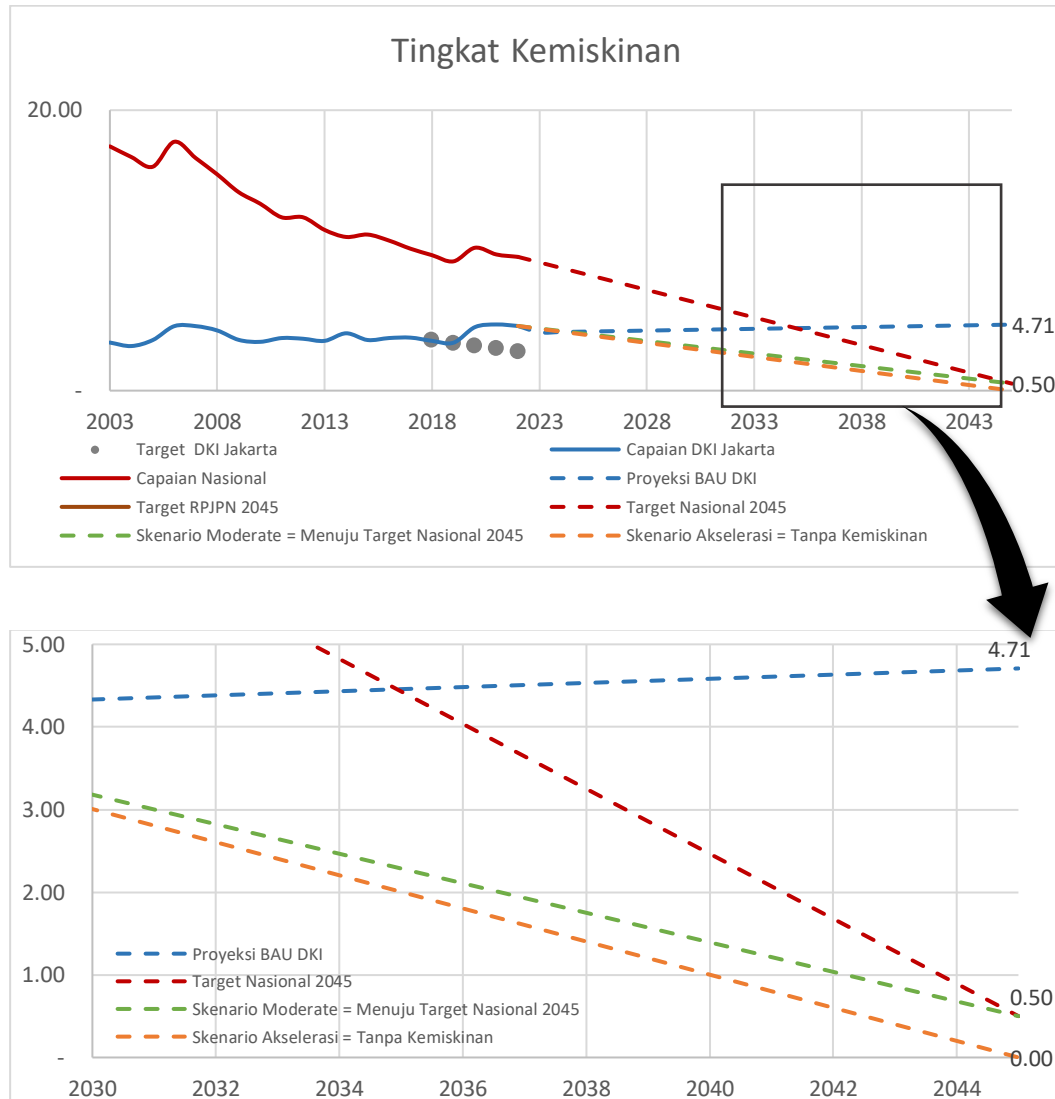
Gambar 6.14 Analisis Proyeksi dan Skenario PDRB per Kapita
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022, PDRB per Kapita DKI Jakarta mencapai angka 298jt Rupiah, sementara rata-rata nasional baru mencapai 71 juta Rupiah. Dengan melihat tren peningkatan PDRB perkapita yang cukup baik dari tahun 2010, maka secara BAU diproyeksikan PDRB perkapita DKI Jakarta pada tahun 2045 akan mencapai 649 juta Rupiah, angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional.

d. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai 3,61% dan cukup fluktuatif hingga tahun 2019 (3,42%). Selanjutnya pada tahun 2020 – 2021, tingkat kemiskinan cenderung meningkat yaitu mencapai 4,53% pada tahun 2020 dan 4,72% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan berkurang kembali di angka 4,61%. Data ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2022.

Jika melihat tren eksisting, kemiskinan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan pada tahun 2045 yaitu sekitar 4,71. Angka ini tidak mencapai target nasional pada rancangan akhir RPJPN yaitu 0,5 – 0,8. Oleh karena itu, **skenario moderate** disusun untuk mencapai target nasional. Sementara itu, skenario akselerasi disusun dengan pertimbangan DKI Jakarta pada tahun 2045 tanpa kemiskinan.



Gambar 6.15 Analisis Proyeksi dan Skenario Tingkat Kemiskinan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.11. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

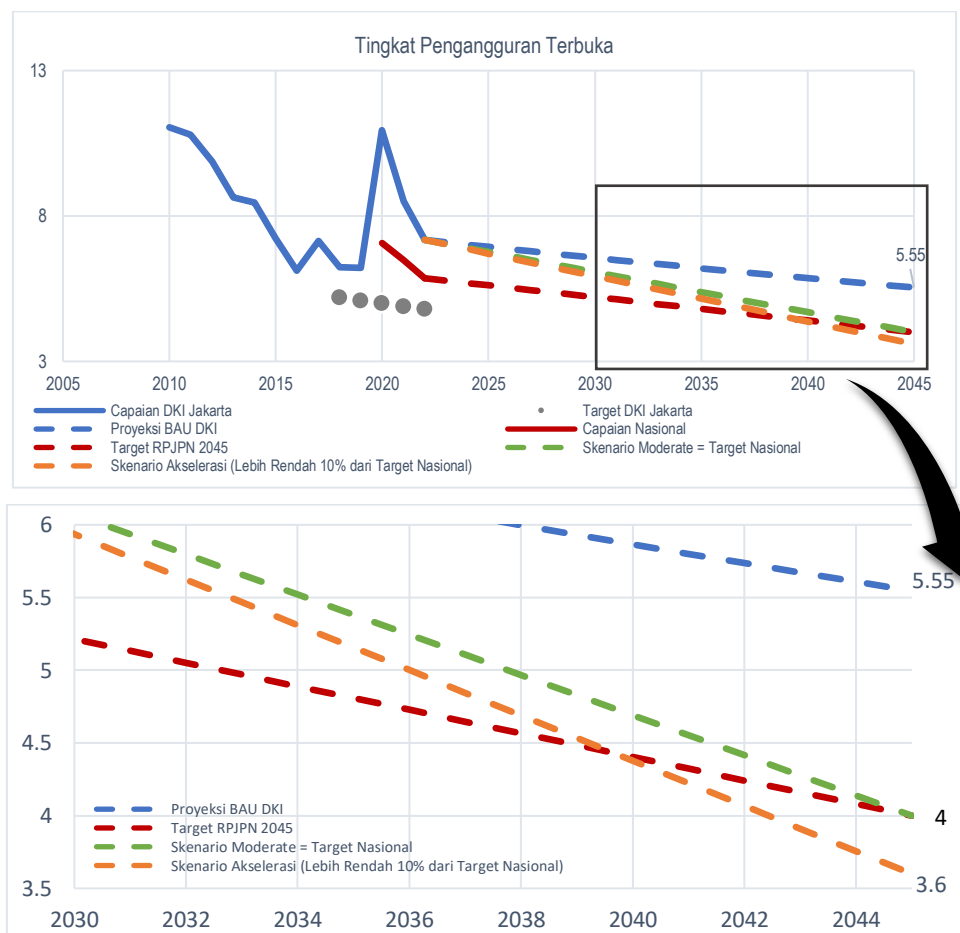
	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	4.21	4.07	4.01
2030	4.33	3.18	3.01
2035	4.46	2.29	2.00
2040	4.58	1.39	1.00
2045	4.71	0.50	0.00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

e. Tingkat Pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010 – 2019 cenderung menurun yaitu 11,05 pada tahun 2010 dan 6,22 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 10,95 karena adanya Pandemi Covid-19. Setelah tahun 2020, secara berangsur-angsur tingkat pengangguran terus menurun. Selain itu tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2020 – 2022.

Jika melihat tren eksiting, tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta menunjukkan penurunan menjadi 5,5% pada 2045. Proyeksi BaU ini lebih tinggi daripada target nasional (4%). Oleh karenanya dibutuhkan **skenario moderate** untuk mencapai target nasional. Sementara itu, **skenario akselerasi** disusun dengan pertimbangan capaian lebih rendah 10% dari target nasional.



Gambar 6.16 Analisis Proyeksi dan Skenario Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Hasil Analisis, 2023

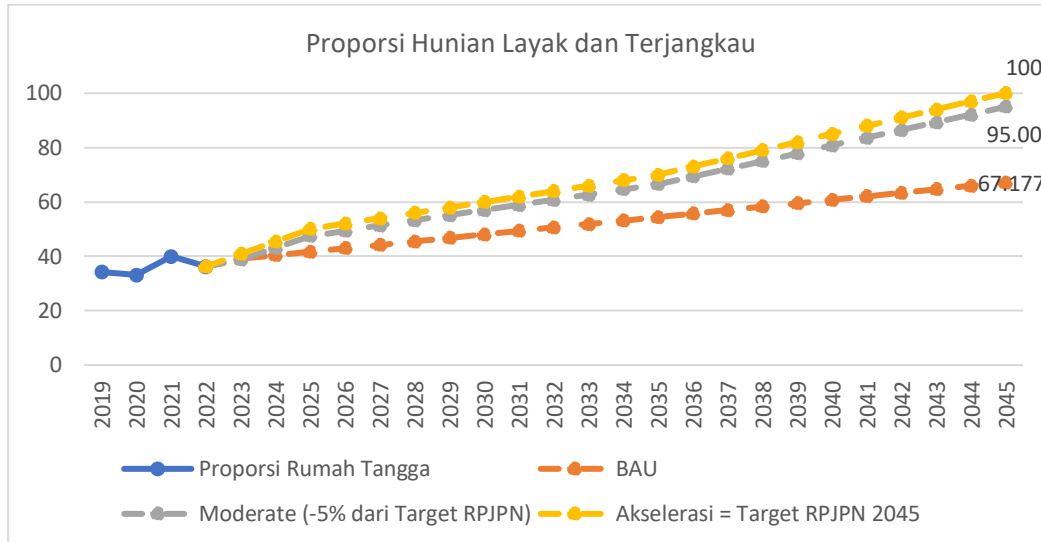
Tabel 6.12. Proyeksi TPT

	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	6.94	6.77	6.71
2030	6.56	6.07	5.93
2035	6.20	5.38	5.16
2040	5.87	4.69	4.38
2045	5.55	4	3.6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

f. Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi

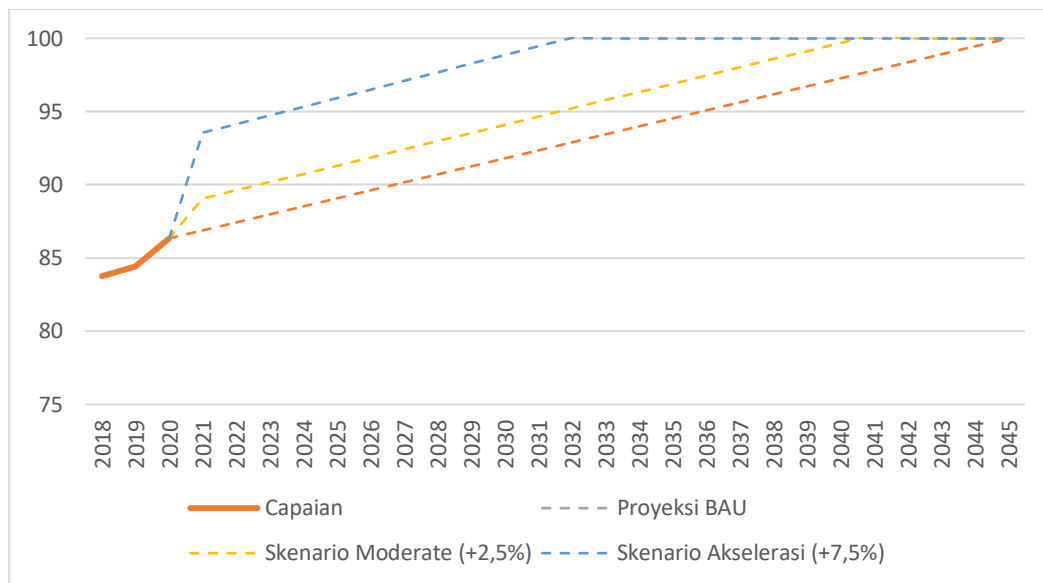
Pemenuhan fasilitas sosial ekonomi dilihat proyeksi terhadap proporsi hunian layak dan terjangkau. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, proporsi hunian layak dan terjangkau menurut Bau mencapai 67,17% pada tahun 2045. Jika melihat pada target RPJPN pada tahun 2045, proporsi hunian layak dan terjangkau yaitu 100%. Untuk mencapai target nasional tersebut, perlu digunakan skenario akselerasi.



6.1.4 Belum Optimalnya Tata Kelola

Kajian tren dan proyeksi untuk masing-masing indikator isu strategis belum optimalnya tata kelola dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik**, berdasarkan data capaian TPB Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mengalami tren membaik dari nilai 84% pada tahun 2018 membaik menjadi nilai 86% pada tahun 2020. Dengan memperhatikan tren capaian TPB, maka dengan Skenario BaU target capaian mencapai nilai 100% dapat dicapai pada tahun 2045. Namun tentunya dengan konsistensi perbaikan pelayanan yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan yang juga membaik, seharusnya capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dicapai lebih cepat. Jika dengan Skenario Moderat dengan asumsi per tahun dapat meningkatkan nilai kepuasan sebesar 2,5% maka pada tahun 2041 target capaian 100% sudah dapat tercapai. Jika menggunakan Skenario Akselerasi dengan asumsi per tahun dapat meningkatkan nilai kepuasan sebesar 7,5% maka target capaian 100% dapat dicapai pada tahun 2032. Gambaran proyeksi kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 6.17.



Gambar 6.17 Proyeksi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Sumber: Hasil Analisis, 2023

- b. **AKIP**, berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari MenPANRB, Provinsi DKI Jakarta pada tahun **2021 mendapat predikat A (memuaskan)**, membaik jika dibandingkan hasil evaluasi pada tahun 2020 yang mendapatkan predikat BB (Sangat Baik). Mengingat bahwa rentang predikat tertinggi dari evaluasi AKIP adalah AA, maka proyeksi target capaian atas evaluasi AKIP Provinsi DKI Jakarta adalah AA (Sangat Memuaskan).



Gambar 6.18 Proyeksi Target Capaian Evaluasi AKIP

Tabel 6.13. Baseline dan Proyeksi SAKIP AKIP 2045

	SAKIP DAN AKIP
Baseline (2021)	<p>Nilai A</p> <p>Instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.</p>
Proyeksi (2045)	<p>Nilai AA</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

- c. **Ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana**, ketersediaan kebijakan dan atau dokumen rencana yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta sudah cukup banyak tersedia, baik terkait dengan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk mencegah *land subsidence*, pengamanan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan sampah. Namun dengan masih banyaknya isu terkait lingkungan ini, maka diperlukan penguatan kebijakan dengan memastikan adanya program-program di OPD terkait, penguatan monitoring dan evaluasi dan penegakan hukum atas aturan



yang sanksi yang telah ada sebelumnya. Baseline dan proyeksi implementasi kebijakan dan/atau dokumen rencana dapat dilihat pada Tabel 6.14.

Tabel 6.14. Baseline 2022 dan Target Implementasi Kebijakan dan/atau Dokumen Rencana 2045

	Baseline (Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting)	Target
Moratorium Air Tanah/ Perluasan coverage area	PERGUB DKI No. 93 Tahun 2021 tentang Kawasan Bebas Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Kawasan zona bebas air tanah • Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2042, 100% wilayah Jakarta terlayani Air bersih dan pelarangan Penggunaan Air Tanah pada wilayah zona bebas air tanah • Penetapan Zona Konservasi Air Tanah di Tahun 2042 • Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan kawasan Perumahan telah memanfaatkan air bersih melalui jaringan perpipaan bukan memanfaatkan air tanah
	Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi • Memperkuat legalisasi dokumen rencana induk
Kehati	PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 Penyelenggaraan Hutan Kota	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 31 Tahun 2022 tentang RDTR (Pembagian zona lindung)	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2020 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat legalisasi Rencana Induk, • Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
Pencemaran Udara	PERDA DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB DKI Jakarta No 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	KEPGUB No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	INGUB DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
Sampah	PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERDA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 108 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi



	Baseline (Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting)	Target
	PERGUB No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Rukun Warga	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah	Pelaksanaan program serta penguatan monitoring dan evaluasi
	PERGUB No. 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah	Implementasi kebijakan di pasar rakyat, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No.95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No.102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	INGUB No. 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

- d. **Jumlah Kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional**, Kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional merupakan upaya untuk memastikan jasa layanan ekosistem terjadi antara hulu dan hilir, hingga tahun 2022 paling tidak ada 3 (tiga) kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah tetangganya yaitu dengan Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah, dengan Bodetabekjur terkait ketahanan pangan, transportasi dan penyediaan air bersih dan dengan Kota Bekasi dan Kota Tangerang tentang polusi udara. Mengingat kerja sama merupakan hal yang bersifat *uncertainty* (tidak pasti) maka proyeksi bersifat kualitatif, maka target terbaik yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama di masa mendatang untuk mendapat manfaat timbal balik.

Tabel 6.15. Target Kerja Sama Antar Daerah

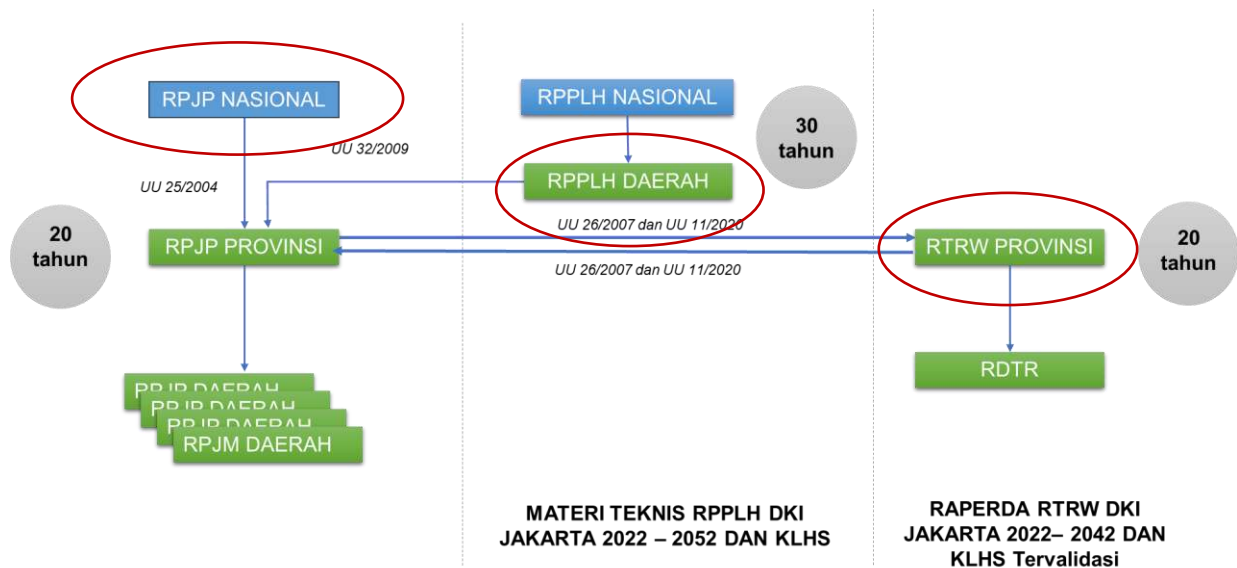
Kerja Sama Antar Daerah Eksisting	Target
1. Kota Bekasi (Pengelolaan lahan tempat pemrosesan akhir)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama dengan daerah fungsional
2. Bodetabekjur (Ketahanan Pangan, transportasi, dan penyediaan air bersih – 2018)	
3. Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi (Pengendalian Polusi Udara – 2022)	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.2 Alternatif Kebijakan

6.2.1 Harmonisasi Kebijakan sebagai Dasar Pertimbangan

Dalam merumuskan alternatif kebijakan, selain didasarkan pada hasil kajian tren, dan proyeksi terhadap indikator, juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang sudah ada terutama berkaitan dengan dokumen rencana jangka panjang lainnya yang sudah disusun atau sudah dimiliki oleh DKI Jakarta. Harmonisasi antar kebijakan tersebut perlu diwujudkan agar sasaran dan tujuan pembangunan akan menjadi lebih terarah dan mudah tercapai. Selain itu juga dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan jangka panjang nasional yang sedang disusun, dalam rangka mendukung tercapainya visi nasional.



Gambar 6.19 Harmonisasi Kebijakan sebagai Dasar Petimbangan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan alternatif kebijakan RPJPD DKI Jakarta adalah:

1. RPJP Nasional 2025-2045

RPJP Nasional wajib menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi dan KLHS-nya. Kebijakan yang tercantum dalam RPJPN 2025 – 2045 terdiri dari Visi, 5 (lima) Sasaran Visi Utama, 8 (delapan) Misi, dan 17 (tujuh belas) Arah Tujuan Pembangunan dijelaskan pada sebagai berikut.



Gambar 6.20 Visi Indonesia Emas 2045
Sumber: Bappenas, 2023

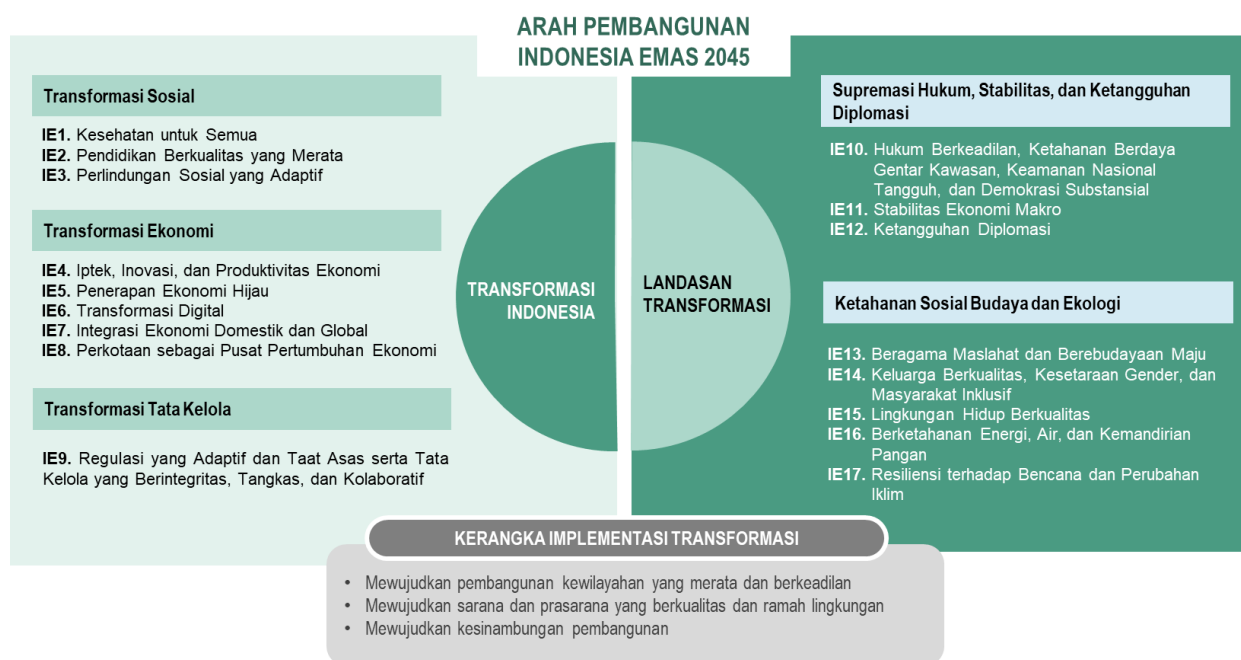
Sasaran utama Visi Indonesia Emas adalah:

- 1) Pendapatan per kapita setara negara maju dengan target US\$ 30.300
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, dengan rasio Gini di 2045 sebesar 0,290 – 0,320 dan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia mencapai 28,5%
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat dengan target peringkat 15 besar menggunakan indikator *Global Power City Index*
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat dengan target 0,73 menggunakan indikator *Human Capital Index*
- 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission* dengan target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 93,5%

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka terdapat 8 (delapan) agenda atau Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan Transformasi Sosial
- 2) Mewujudkan Transformasi ekonomi
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola
- 4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi
- 5) Menetapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
- 6) Pembangunan kewilayahan
- 7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 8) Kesenambungan Pembangunan

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan dengan 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



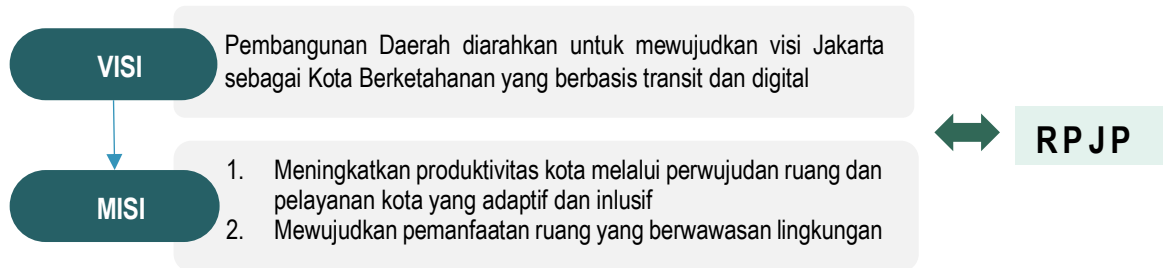
Gambar 6.21 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045

Sumber: Bappenas, 2023

2. RTRW DKI Jakarta 2022-2042

RTRW DKI Jakarta 2022 – 2042 saat ini masih dalam bentuk Ranperda yang dilengkapi dengan dokumen KLHS yang sudah tervalidasi. Dalam Ranperda RTRW terdapat visi, misi, tujuan dan kebijakan penataan ruang yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD dan KLHS nya, sebagai mana digambarkan di bawah ini.

RTRW



Kata Kunci

Berketahanan Berwawasan Lingkungan Teknologi Tinggi

Dari visi dan misi tersebut diturunkan menjadi tujuan dan kebijakan penataan ruang sebagai berikut:

- Terciptanya pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital. Untuk menciptakan pembangunan kota berorientasi transit dan digital ditetapkan kebijakan yang meliputi:
 - 1) Pemusatan kegiatan dan 70% (tujuh puluh persen) penduduk di sekitar titik transit;
 - 2) Perwujudan 55% (lima puluh lima persen) perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik; dan
 - 3) Pergeseran aktivitas kota ke arah digital dan efisiensi pola mobilitas.
- Terciptanya hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah:
 - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas hunian vertikal yang layak dan terjangkau perkotaan;
 - 2) Peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif;
 - 3) Penyediaan sarana prasarana yang terintegrasi dan utilitas yang memadai di setiap lingkungan permukiman.
- Terwujudnya ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan ke 3 ini adalah:
 - 1) Perwujudan kota hijau yang berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari basis tahun 2020;
 - 2) Perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air (water adaptif city) menuju bebas banjir dan berbasis pelestarian sumber daya air serta kerja sama antar daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
 - 3) Perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan 30% (tiga puluh persen) sampah di sumber dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah;
 - 4) Peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan lokal; dan
 - 5) Peningkatan ketahanan kota atas bencana dan penyebaran wabah penyakit.
- Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan ini adalah:
 - 1) Peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global; dan
 - 2) Pengembangan sistem logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistik regional/internasional.
- Terwujudnya pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah:
 - 1) Peningkatan konektivitas dan dukungan sarana prasarana serta utilitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu yang terintegrasi dengan daratan Jakarta;



- 2) Pengembangan dan penyediaan ruang hidup serta akses nelayan terhadap laut dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan;
 - 3) Pemulihan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - 4) Pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi biru;
 - 5) Pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan berskala global; dan
 - 6) Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM pesisir dan Kepulauan Seribu.
- f. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Untuk mewujudkan tujuan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah:
- 1) Pengembangan dan peningkatan mutu kawasan khusus untuk mendukung peran Jakarta sebagai bagian dari jaringan kota-kota internasional;
 - 2) Pelestarian dan peningkatan fungsi cagar budaya; dan
 - 3) Pengembangan pusat budaya perkotaan.

3. RPPLH DKI Jakarta

Tujuan utama penyusunan RPPLH selama 30 mendatang adalah mewujudkan Jakarta yang Berketahanan dan Berwawasan Lingkungan untuk meningkatkan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Kata kunci dari tujuan utama RPPLH adalah Berketahanan, Berwawasan Lingkungan dan Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD dan KLHS-nya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut RPPLH dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Tahap 1 (10 tahun pertama) Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
2. Tahap 2 (10 tahun kedua) Perbaikan Kualitas serta pemulihan kondisi lingkungan hidup
3. Tahap 3 (10 tahun ketiga) Pemeliharaan kualitas sumber daya alam



Dalam Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA terdapat kebijakan Penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya, dengan 4 (empat) strategi, yaitu:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang terhadap penurunan kualitas lingkungan dalam wilayah fungsional darat;
- b. Mengendalikan pemanfaatan ruang terhadap penurunan kualitas ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

- c. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup antar daerah DKI Jakarta
- d. Mengendalikan pemanfaatan ruang berdasarkan kondisi status dan kinerja daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terdapat kebijakan Perlindungan, Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan di Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Melindungi dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya air
2. Melindungi dan meningkatkan kualitas udara
3. Melestarikan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, pemulihan dan peningkatan kualitas.

Di dalam rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam terdapat Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola Pembangunan dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan dan Pendayagunaan Lingkungan Hidup, dengan 6 (enam) strategi yaitu:

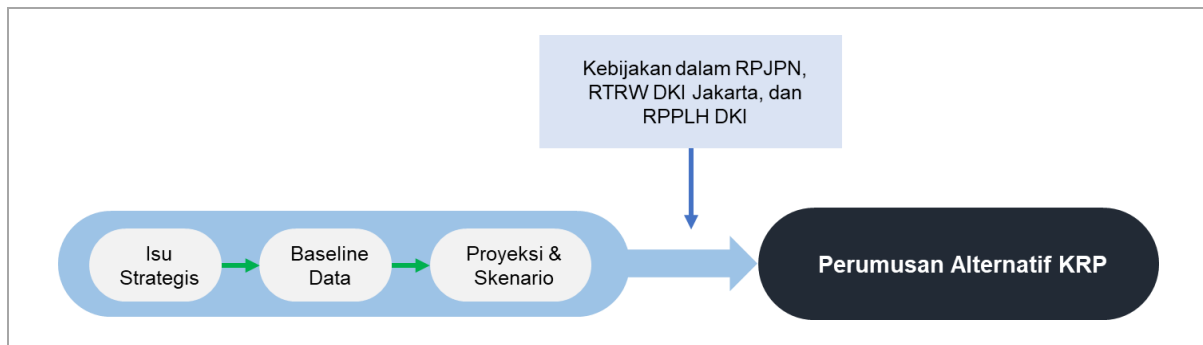
1. Mengelola sumber daya air secara berkelanjutan
2. Mengendalikan pencemaran udara
3. Meningkatkan tata kelola pengelolaan sampah dan limbah B3
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang
5. Memanfaatkan Sistem Informasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dalam Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim terdapat kebijakan Peningkatan Ketahanan dan kesiapan terhadap Risiko Bencana Iklim, dengan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Menyenggarakan pembangunan wilayah dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana iklim
2. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi risiko bencana iklim
3. Memanfaatkan sistem informasi dalam manajemen bencana.

6.2.2 Alternatif Kebijakan

Perumusan substansi alternatif arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan proses sebelumnya dari perumusan isu strategis, analisis baseline data, analisis proyeksi dan skenario serta sinergi dan harmonisasi KRP jangka panjang, sebagaimana digambarkan dalam Gambar di bawah ini. Matriks proses perumusan alternatif KRP secara lebih detil dapat dilihat pada Lampiran 10.



Gambar 6.22 Proses Perumusan Alternatif KRP

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disintesis sebagai berikut:

- Untuk isu tingginya risiko bencana, ketiga skenario baik BAU, moderate maupun akselerasi akan mampu menurunkan risiko bencana alam dari tingkat Sedang ke tingkat Rendah. Berdasarkan baseline, parameter IRBI yang relatif tidak mengalami peningkatan adalah Kapasitas. Sementara, untuk menurunkan risiko bencana non alam hanya dapat dilakukan dengan pendekatan pencegahan melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas daerah beserta masyarakatnya. Makin cepatnya laju peningkatan kapabilitas dan kapasitas resiliensi tersebut makin rendahnya risiko bencana alam dan non alam. Berdasarkan hal tersebut alternatif kebijakan untuk isu tingginya risiko bencana adalah penekanan pada akselerasi peningkatan kapasitas pemerintah dan kapasitas Masyarakat menuju *resilience society* yang mampu melakukan mitigasi bencana maupun beradaptasi dengan kondisi yang rawan bencana. Agar upaya mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan secara sinergi dan terpadu maka diperlukan acuan bersama berupa rencana mitigasi dan adaptasi bencana. Pemanfaatan digital platform diperlukan untuk mendukung percepatan.
- Untuk isu ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, sebagian besar indikator menunjukkan perlunya akselerasi kebijakan menuju target yang diinginkan yaitu sebagai kota global 10 besar dunia. Skenario akselerasi ini sangat memerlukan dukungan penggunaan teknologi modern baik untuk penghematan pemanfaatan maupun pengelolaan SDA. Skenario akselerasi perlu juga difokuskan pada upaya dari hulu ke hilir yaitu meminimalkan sisi pemanfaatan yang berdampak pada besarnya ekstraksi atau produksi cemaran dan sekaligus memaksimalkan upaya pemulihan.
- Sementara untuk isu ketimpangan sosial ekonomi, secara umum DKI Jakarta, sudah baik. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut ketimpangan yang utama yang terjadi adalah ketimpangan antara kondisi sosial ekonomi Jakarta daratan dengan kepulauan. Oleh karenanya, prioritas akselerasi untuk menurunkan ketimpangan adalah pengembangan Masyarakat kepulauan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pro UMKM, penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi serta hunian layak dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan. Terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, termasuk hunian layak, perlu diakselerasi untuk seluruh Masyarakat baik di daratan maupun kepulauan. Prinsip inklusifitas perlu ditekankan pencapaiannya di tahun 2045 untuk mampu mendukung pencapaian Jakarta sejajar dengan kota global 10 besar dunia serta memenuhi hak Masyarakat untuk mendapatkan kualitas hunian dan lingkungan yang layak. Diharapkan dengan tersedianya hal tersebut, Masyarakat akan meningkat produktivitasnya dan pada akhirnya mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Isu tata kelola yang belum optimal dalam KLHS ini difokuskan pada penanganan isu strategis lingkungan hidup lainnya yaitu tingginya risiko bencana, ancaman terhadap keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup serta ketimpangan sosial ekonomi. Kebijakan terkait tata kelola ini dapat diartikan sebagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola kota untuk peningkatan kualitas Masyarakat, SDA dan lingkungan hidup. Secara teoritis, tata kelola atau manajemen kota dilakukan dengan pendekatan *strategic system thinking* yang merangkul seluruh aspek kegiatan dalam kota sebagai hasil dari aktivitas yang bersifat sistemik dengan hasil cumulative causation. Secara lebih rinci perilaku setiap aspek atau sektor kegiatan dapat diurai dalam konsep PDCA mencakup 4 hal Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Do*), Monitoring dan



evaluasi (*Check*) dan *Act* (Tindak lanjut). Berdasar siklus PDCA tersebut, hal yang terutama dalam tata kelola adalah adanya kebijakan dan rencana yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan oleh multi pihak, dan multi sektor yang secara bersama-sama menuju pencapaian yang diinginkan. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan agar tindak lanjut dapat diidentifikasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan capaian atau target yang diinginkan.

Tata kelola berkaitan dengan pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya keterpaduan dan kerja sama dengan wilayah di sekitarnya atau wilayah fungsionalnya. Karena batasan wilayah SDA dan unsur LH lainnya tidak dapat dibatasi secara administrasi. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan tata kelola diperlukan kolaborasi dengan wilayah fungsionalnya yang mencakup keterpaduan rencana, dan pelaksanaannya. Skenario untuk isu belum optimalnya tata kelola adalah dilakukan secara 2 (dua) tahap. Secara regional (DKI dan sekitarnya), kolaborasi dengan wilayah fungsional dapat dilakukan dengan skenario akselerasi di tahap awal RPJP ini dalam rangka mempercepat perbaikan dan pemulihan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menggalang kolaborasi dengan wilayah fungsional ekonomi secara global. Dengan performa kualitas SDA dan lingkungan hidup yang baik kolaborasi secara internasional akan lebih mudah dicapai. Tahap kedua, pada kondisi ini skenario menjadi moderate yaitu dalam upaya mempertahankan performa yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, alternatif kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.16. Alternatif Substansi Arah Kebijakan

ISU STRATEGIS	ALTERNATIF SKENARIO	
	MODERATE	AKSELERASI
Tingginya Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana mitigasi dan adaptasi bencana secara tematik dan terintegrasi, multi pihak, multi sektor, dan lintas wilayah 2. Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan 	<p>Alternatif Skenario Moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana terutama berkaitan dengan sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan bencana
Ancaman Keberlanjutan SDA dan kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi 2. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air 	<p>Alternatif Skenario Moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan 4. Penurunan emisi melalui pengendalian sumber emisi (teknologi bersih, ekonomi hijau, <i>circular economy</i>) 5. Peningkatan ketersediaan air baku melalui pemanfaatan teknologi dan kerja sama antar wilayah
Ketimpangan Sosial Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan 2. Peningkatan IPM Kepulauan Seribu 3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 4. Penurunan gini ratio 5. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat 	<p>Alternatif skenario moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan 7. Penyediaan rumah layak huni 8. Pencapaian target RW kumuh 0% 9. Peningkatan PDRB perkapita sehingga berdaya saing global.
Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju <i>good governance</i> 2. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional 	<p>Alternatif Skenario Moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global 4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam tata Kelola

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.3 Rekomendasi Substansi Kebijakan

Berdasarkan rumusan substansi alternatif kebijakan dan mempertimbangkan rasionalitas skenario yang paling layak dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi daerah serta didasarkan pada hasil diskusi iteratif dengan penyusun KRP, maka dirumuskan rekomendasi substansi kebijakan untuk dapat diintegrasikan ke dalam RPJP yang sedang disusun. Rekomendasi substansi kebijakan ini memfokuskan pada rekomendasi substansi kebijakan yang terkait dengan isu-isu strategis KLHS yang nantinya akan menjadi bagian pada rumusan kebijakan dalam RPJPD. Konsultasi Publik ke 2 untuk menyepakati Rekomendasi substansi kebijakan ini telah dilakukan pada 28 Agustus 2023, sedangkan rapat koordinasi dengan penyusun KRP dilakukan secara berulang kali untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan kondisi yang ada.

Tabel di bawah menyajikan rumusan alternatif substansi kebijakan yang disintesakan menjadi rekomendasi substansi arah kebijakan.

Tabel 6.17. Alternatif dan Rekomendasi Substansi Kebijakan

ISU STRATEGIS	ALTERNATIF SKENARIO		REKOMENDASI SUBSTANSI KEBIJAKAN
	MODERATE	AKSELERASI	
Tingginya Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana mitigasi dan adaptasi bencana secara tematik dan terintegrasi, multi pihak, multi sektor, dan lintas wilayah 2. Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan 	<p>Alternatif Skenario Moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana terutama berkaitan dengan sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi <i>stakeholder</i> 2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana
Ancaman Keberlanjutan SDA dan kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi 2. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air 	<p>Alternatif Skenario Moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan 4. Penurunan emisi melalui pengendalian sumber emisi (teknologi bersih, ekonomi hijau, <i>circular economy</i>) 5. Peningkatan ketersediaan air baku melalui pemanfaatan teknologi dan kerja sama antar wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan 2. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau 3. Meningkatkan laju pemulihan kualitas lingkungan perkotaan 4. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sektor, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam
Ketimpangan Sosial Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan 2. Peningkatan IPM Kepulauan Seribu 	<p>Alternatif skenario moderate ditambah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis



ISU STRATEGIS	ALTERNATIF SKENARIO		REKOMENDASI SUBSTANSI KEBIJAKAN
	MODERATE	AKSELERASI	
	3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 4. Penurunan gini ratio 5. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat	7. Penyediaan rumah layak huni 8. Pencapaian target RW kumuh 0% 9. Peningkatan PDRB perkapita sehingga berdaya saing global.	dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) berskala internasional 3. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif (enabling condition) untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja berdaya saing global 4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif 5. Meningkatkan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni
Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	1. Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju <i>good governance</i> 2. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional	Alternatif Skenario Moderate ditambah: 3. Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global 4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam tata Kelola	1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern 2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (<i>Triple Planetary Crisis</i>) 3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian <i>good governance</i> dan <i>global city</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan rekomendasi substansi arah kebijakan tersebut maka dirumuskan rekomendasi terhadap substansi Visi dan Misi, Arah kebijakan dan sasaran pokok untuk 20 tahun dan sasaran pokok 5 tahunan yang menunjukkan tahapan pelaksanaan Pembangunan. Rumusan substansi Visi DKI Jakarta 2045 selain berpijak pada potensi dan kendala yang dihadapi, juga harus merujuk kepada Visi Nasional serta mencerminkan kontribusi DKI Jakarta dalam mendukung pencapaiannya. Apalagi mengingat, DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial bangsa serta meskipun masih dalam masa transisi sebagai ibukota negara.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. DKI Jakarta sebagai garda terdepan dari Negara Indonesia perlu menunjukkan sebagai kota/provinsi termaju di Indonesia dan memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan. Cita-cita Indonesia Emas 2045 adalah maju secara ekonomi menjadi lima terbesar di dunia. Perkembangan ekonomi di wilayah DKI Jakarta seimbang dengan Pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dan dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi terhadap substansi Visi DKI Jakarta 2045 diusulkan mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu:

- Menjadi kota yang daya saing tinggi secara global, atau menjadi kota global
- Menjadi kota yang mampu memberikan hidup dan perikehidupan yang layak bagi penduduknya
- Menjadi kota yang memegang prinsip Pembangunan berkelanjutan

Usulan substansi Visi tersebut dapat dirangkai menjadi substansi Visi RPJPD DKI Jakarta 2045 yaitu **Jakarta yang Aman, Nyaman, Sejahtera (*livable*), Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan**.

Aman-Nyaman- Sejahtera dapat diartikan sebagai berketahanan, lingkungan fisik (natural dan buatan) yang nyaman dan masyarakat sejahtera.

Berdaya saing global artinya kompetitif terhadap kota sekitarnya dan kota global lainnya. Sedangkan berkelanjutan artinya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan substansi visi tersebut dan mempertimbangkan substansi arah kebijakan yang telah teridentifikasi menjadi rekomendasi kebijakan dalam KLHS ini, maka rekomendasi substansi Misi RPJPD DKI Jakarta 2045 diusulkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk menjamin perlindungan SDA dan lingkungan hidup serta pemenuhan hak hidup masyarakat secara inklusif
2. Mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui akselerasi pemulihan kualitas lingkungan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan
3. Mewujudkan transformasi sosial ekonomi menuju masyarakat yang adaptif, inovatif, produktif, berketahanan, berdaya saing global, berbudaya dan madani (*civil society*)
4. Mewujudkan kota bisnis dan jasa yang berdaya saing global dan berbasis teknologi digital modern
5. Mewujudkan kota yang layak huni, sejahtera, aman, dan berkeadilan melalui penyediaan sarana prasarana sosial - budaya dan ekonomi.

Rekomendasi substansi misi tersebut sudah mencakup pembangunan aspek ekonomi, sosial dan budaya, fisik dan tata kelola. Substansi misi tersebut juga menjawab isu strategis dan arah kebijakan yang telah dikaji sebelumnya. Keterkaitan antara misi dan isu strategis maupun kebijakan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Secara rinci rekomendasi substansi Arah Kebijakan RPJPD DKI Jakarta 2045 adalah sebagai berikut:



1. Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan *multi stakeholder*
2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana
3. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan
4. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau
5. Meningkatkan laju pemulihan kualitas lingkungan perkotaan
6. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam
7. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* berskala internasional
9. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif (*enabling condition*) untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja berdaya saing global
10. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
11. Meningkatkan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni
12. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern
13. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*)
14. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*

Substansi Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok 5 (lima) Tahunan

Permendagri No. 86 tahun 2017 memuat ketentuan bahwa arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD perlu dijabarkan menjadi 4 tahapan perencanaan daerah 5 tahunan. 4 tahapan perencanaan ini mencerminkan prioritas dari arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Pentahapan perencanaan 5 tahunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta harus mengacu dan bersinergi kepada substansi pentahapan perencanaan 5 tahunan RPJPN yang relevan, yaitu: penguatan fondasi, akselerasi, ekspansi global dan mewujudkan *ultimate goal* 20 tahun.

Sejalan dengan pentahapan RPJPN di atas, maka untuk dapat mencapai substansi Visi RPJPD DKI Jakarta 2045 maka rekomendasi substansi tahapan perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- 1. TAHAP 1 (2025 - 2029):** Penguatan fondasi tata kelola dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana serta pemerataan pembangunan sosial-ekonomi.

Rekomendasi substansi arah kebijakan untuk tahap 1 ini adalah:



- A1. Mengimplementasikan rencana adaptasi resiliens dan mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder
 - A2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana
 - B1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan
 - B2. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau
 - B4. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam
 - C1. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global
 - C2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sector pariwisata, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) berskala internasional
 - C4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
 - C5. Meningkatkan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni
 - D1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern
 - D2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*)
 - D3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*
- Rekomendasi substansi sasaran pokok untuk tahap 1 ini adalah:
- a. Penguatan perencanaan infrastruktur dan kelembagaan kebencanaan untuk memitigasi dan mengurangi risiko bencana
 - b. Penguatan kolaborasi antar daerah di wilayah fungsional dalam rangka harmonisasi kebijakan perencanaan dan pemanfaatan SDA untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan SDA berkelanjutan
 - c. Akselerasi penyediaan hunian layak dan sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau untuk menciptakan kota dan masyarakat yang produktif
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha

2. TAHAP 2 (2030 - 2034): Akselerasi pemulihan kualitas lingkungan perkotaan dan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM

Rekomendasi substansi arah kebijakan untuk tahap 2 ini adalah:

- A1. Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder
- A2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana

- B1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan
- B2. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau
- B3. Meningkatkan laju pemulihan kualitas lingkungan perkotaan
- B4. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam
- C1. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global
- C2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) berskala internasional
- C4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
- C5. Meningkatkan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni
- D1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern
- D3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*

Dengan rekomendasi substansi sasaran pokok tahap kedua adalah:

- 1. Penyelesaian infrastruktur kebencanaan dan pelaksanaan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan
- 2. Akselerasi pemulihan kualitas lingkungan perkotaan melalui pemanfaatan teknologi, ekonomi dan infrastruktur hijau serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan
- 3. Penguatan produktivitas dan daya saing masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif dengan dukungan ketersediaan hunian layak dan sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya
- 4. Akselerasi kolaborasi regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*) dengan dukungan teknologi digital modern

3. TAHAP 3 (2035 – 2039): Penguatan kolaborasi multipihak yang berjejaring internasional menuju Jakarta sebagai Global City

Rekomendasi substansi arah kebijakan pada tahap 3 ini adalah:

- A1. Mengimplementasikan rencana adaptasi resiliens dan mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder
- B1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan
- B2. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau
- B3. Meningkatkan laju pemulihan kualitas lingkungan perkotaan
- B4. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam

- C2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) berskala internasional
- C3. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif (*enabling condition*) untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja berdaya saing global
- C4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
- D1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern
- D2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*)
- D3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*.

Dengan rekomendasi substansi sasaran pokok tahap 3 adalah:

1. Pelaksanaan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat, alam, dan lingkungan
2. Akselerasi pemulihan kualitas lingkungan perkotaan untuk mewujudkan kota dan masyarakat yang Tangguh
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi berorientasi global di sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern
4. Kelembagaan dan regulasi yang adaptif didukung SDM ASN yang berintegritas dan kompetitif, serta masyarakat sipil mandiri

4. TAHAP 4 (2040-2045): Perwujudan Jakarta sebagai Livable dan Global City

Rekomendasi substansi kebijakan untuk tahap 4 ini adalah:

- A2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana
- B2. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau
- B3. Meningkatkan laju pemulihan kualitas lingkungan perkotaan
- C4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
- D1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern
- D2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*)
- D3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*

Dengan rekomendasi substansi sasaran pokok tahap 4 adalah:

1. Kota dan masyarakat tangguh bencana
2. Kota berkelanjutan
3. Kota maju, sejahtera, dan berbudaya berskala global
4. Tata kelola kota yang berintegritas, kolaboratif, dan adaptif

6.4 Usulan Integrasi

Oleh karena pada waktu penyelesaian KLHS ini belum ada rancangan RPJPD, maka dalam KLHS ini yang dilakukan adalah menyediakan arahan atau rekomendasi pengintegrasian hasil KLHS ke dalam rancangan RPJPD DKI 2025-2045. Arahan pengintegrasian ini memuat usulan integrasi substansi rekomendasi KLHS ke rancangan RPJPD dengan memperhatikan kesesuaian sistematika dokumen.

Tabel di bawah ini menggambarkan usulan integrasi KLHS terhadap sistematika dokumen RPJPD.

Tabel 6.18. Usulan Integrasi



*Berdasarkan rancangan Perdum penyusunan RPJPD Kemendagri 2 November 2023

Terhadap keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini telah dilakukan penjaminan kualitas antara penyusun KRP dan Pokja KLHS yang telah dilakukan pada tanggal 9 November 2023. Berita acara termuat dalam lampiran 11.

6.5 Tindak Lanjut

1. Perlu dipastikan bahwa hasil KLHS diintegrasikan ke dalam rancangan KRP RPJPD untuk memastikan bahwa semua proses dan hasil KLHS membawa manfaat dalam memperkuat sistem perencanaan pemerintah daerah.
2. Hasil KLHS RPJPD wajib diacu dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD 2025-2030, agar prosesnya efisien waktu dan sumber daya, serta hasilnya harmonis dan sinergis.



BAB 7

KESIMPULAN

BAB 7

KESIMPULAN

Dari keseluruhan proses dari awal hingga akhir penyelenggaraan KLHS dan semua hasil-hasilnya serta hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh Pokja KLHS, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyusunan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dikerjakan dengan upaya optimal, baik dalam upaya memenuhi proses yang utuh maupun dalam upaya memastikan kualitas hasil kajian dan rekomendasi dan keluaran lainnya.

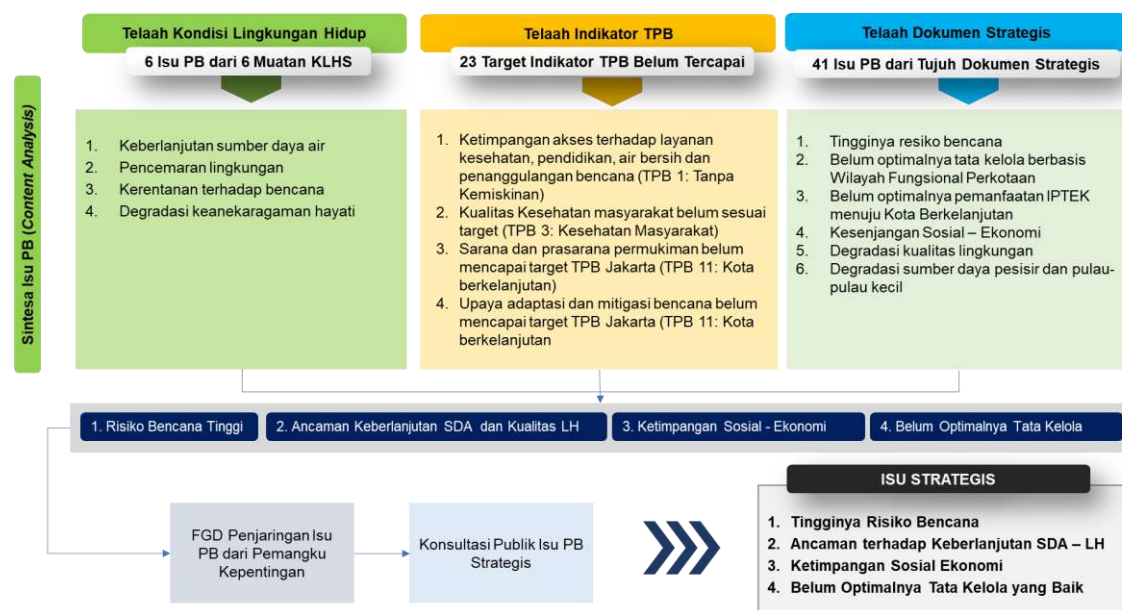
Pertama, Penyelenggaraan KLHS diupayakan sedapat mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan utama penyelenggaraan KLHS RPJPD yaitu Permendagri 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No. 46/2016 beserta dan aturan turunannya yaitu Permen LHK No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kedua, dilakukan daya upaya untuk memastikan bahwa kualitas hasil KLHS dapat terpenuhi secara memadai, termasuk deskripsi kondisi sosial ekonomi berbasis data dan informasi mutakhir, hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan arahan-arahan rekomendasi kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan nasional (RPJPN), diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang internal DKI yang termuat dalam dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan hasil KLHS dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJPD dan memberi manfaat yang nyata.

2. Daya upaya untuk melakukan proses dan hasil sebagaimana dimaksud di atas tentunya tidak mudah, memakan banyak waktu, dan menghadapi kendala. *Pertama*, aturan untuk KLHS RPJPD *mutatis mutandis* Permendagri No. 7/18 yang mengatur penyelenggaraan KLHS RPJMD. Padahal, RPJMD sangat berbeda dengan RPJPD. KLHS RPJMD difokuskan pada pengintegrasian TPB ke dalam program-program pembangunan RPJMD. Sebagian besar indikator TPB bersifat mikro sehingga mudah diintegrasikan ke dalam penyusunan program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utamanya. Sedangkan RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berisikan kebijakan makro, bukan mikro. *Kedua*, KLHS RPJPD diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang berbeda yang terdapat penggunaan nomenklatur yang berbeda untuk hal yang sama; hal ini terkadang menimbulkan kesulitan. *Ketiga*, untuk mendapatkan hasil KLHS yang berkualitas dan bermanfaat diperlukan adanya pertemuan yang cukup intensif antara Pokja KLHS dengan para perencana dan sejumlah pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini agak sulit dilakukan oleh karena kesibukan masing-masing pihak,
3. Dilakukan upaya untuk mendokumentasikan proses dan hasil KLHS RPJPD DKI 2025-2045 dari awal hingga akhir secara cermat ke dalam sebuah Laporan KLHS dengan maksud antara lain agar dapat dijadikan: (a) sebagai tolok ukur dalam menyusun KLHS RPJPD; dan (b) bahan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya peningkatan standar kualitas KLHS RPJPD.
4. Dalam penentuan isu strategis, dilakukan analisis terhadap capaian TPB. Analisis dilakukan terhadap 253 indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang secara otonomi juga memiliki sebagian kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa 26% indikator atau 67 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 46% indikator atau 116 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2% indikator atau 4 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 26% indikator atau 66 indikator tidak tersedia data. Perlu pemenuhan data terhadap indikator TPB yang saat ini belum memiliki data, sehingga dapat melihat capaian Provinsi DKI Jakarta yang sebenarnya.

5. KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 menetapkan 4 (empat) isu strategis yaitu: (1) Tingginya risiko bencana, (2) Ancaman terhadap keberlanjutan SDA dan Lingkungan Hidup, (3) Ketimpangan sosial ekonomi, dan (4) Belum optimalnya tata kelola yang baik.

Empat isu strategis tersebut merupakan hasil sintesis dari 14 isu yang diidentifikasi dari tiga sumber. Dari telaah terhadap kondisi lingkungan hidup, diidentifikasi 6 isu yang disintesis menjadi 4 isu pembangunan berkelanjutan. Dari telaah terhadap indikator TPB, diidentifikasi 23 isu yang disintesis menjadi 4 isu pembangunan berkelanjutan. Serta dari telaah terhadap dokumen strategis, diidentifikasi 41 isu yang disintesis menjadi 6 isu pembangunan berkelanjutan. Proses penetapan isu strategis tersebut disajikan pada gambar di bawah.





LAMPIRAN

KLHS RPJPD

PROVINSI DKI JAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 - 2030



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh tenaga ahli yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 215 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2030

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2030

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Sekretariat *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Perguruan Tinggi/Universitas
34. Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

- Ketua : a. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
- b. menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan yang diperlukan terkait pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
- c. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 selesai tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan
- e. menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas.



- Wakil Ketua :
- a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - b. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- Sekretaris :
- a. Menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
 - c. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Tim; dan
 - d. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Tim.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim;
 - b. menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - c. membantu Sekretaris Tim dalam menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Lampiran 2. Kerangka Acuan Kerja Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD DKI Jakarta



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Tahun : 2023

Perangkat Daerah : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan : 2.11 / Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program : 2.11.02 / Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan : 2.11.02.1.01 / Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Sub Kegiatan : 2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi

ASK : Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama Paket : Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kode RUP : 33081928

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : (Pengadaan Jasa Konsultansi) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

I. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Merujuk pada pasal 18 dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dan RPJMD mencakup penyusunan KLHS. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Permendagri 7/2018).

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari 101 daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerah telah selesai sehingga akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024. Pergantian kepala daerah diikuti dengan penyusunan RPJMD sebagai rujukan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, periodisasi RPJPD DKI Jakarta juga akan berakhir pada tahun 2025, sehingga



penyelarasan substansi dan periodisasi akan dilakukan baik pada RPJPD maupun RPJMD. Priode RPJPD DKI Jakarta yaitu 2025-2045 sementara RPJMD yaitu 2025-2030. Pada Pasal 26 Permendagri 7/2018 disebutkan bahwa KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD. Sementara itu, berdasarkan Pasal 26 Permendagri 7/2018, Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD. Artinya, secara prinsip, prosedur pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berlaku sama dengan KLHS RPJMD dengan penyesuaian substansi muatan KRP.

Sehubungan dengan Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 550/5112/Bangda Tanggal 5 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, terdapat arahan untuk menganggarkan kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan *environmental safeguard* bagi pelaksanaan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta melalui RPJPD dan RPJMD dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP tersebut sebagai dasar bagi penyusunannya.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan capaian Pembangunan Berkelanjutan dan kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.
- Menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam rancangan awal RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
- Memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. SASARAN

Sasaran penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.



**5. SUMBER
PENDANAAN**

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini adalah APBD Provinsi DKI Jakarta yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Perangkat Daerah	:	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Bidang Urusan	:	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	2.11.02 / Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	2.11.02.1.01 / Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
Sub Kegiatan	:	2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
Aktivitas SK	:	Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nama Paket	:	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kode Rekening	:	5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

**6. NAMA
ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA**

K/L/D/I	:	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja/SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
PA	:	Asep Kuswanto, S.E., M.Si. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
PPK	:	Helmy Zulhidayat, S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Lingkungan

II. DATA PENUNJANG

**7. STANDAR
TEKNIS**

-

**8. STUDI-STUDI
TERDAHULU**

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
- Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta.



9. REFERENSI HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola; dan
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

III. RUANG LINGKUP

10. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja, daftar kebutuhan data, dan persiapan lainnya untuk menginventarisasi regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD.
- b. Melakukan studi terhadap regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RPJPD dan RPJMD.
- c. Melaksanakan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD sampai dengan proses penyampaian permohonan validasi.
- d. Melakukan pengkajian pengaruh yang meliputi identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berdampak terhadap lingkungan hidup, serta analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup.

- e. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP, rekomendasi perbaikan KRP, dan integrasi KRP.
- f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS RPJPD dan RPJMD serta konsultasi publik.
- g. Membantu menyiapkan bahan untuk validasi RPJPD dan RPJMD.
- h. Membantu PPK dalam mengadakan rapat, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi publik terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan, koordinasi, komunikasi dan pengumpulan data.

**11. PERALATAN,
MATERIAL, DAN
FASILITAS DARI
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN**

-

**12. LINGKUP
KEWENANGAN
PELAKSANA
SWAKELOLA**

- Pelaksana swakelola melalui Tenaga Ahli memiliki kewenangan untuk:
- a. memberikan usulan/masukan terkait dengan materi dan konten kajian/perencanaan.
 - b. dapat melakukan pencarian data primer dan sekunder yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan serta meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk membantu dengan memberikan surat penugasan.

13. PERSONEL

A. Jenis dan Jumlah Tenaga yang Diperlukan

Agar pekerjaan ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dengan waktu dan dana yang tersedia, tenaga ahli yang diperlukan adalah sebagai berikut:

No	Tenaga Ahli	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Jumlah Personil (orang)	Durasi Penugasan (bulan)
1	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Ketua Tim)	S2 Semua Jurusan	3 tahun	1	7
2	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Wakil Ketua Tim)	S2 Semua Jurusan	3 tahun	1	7
3	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan)	S1 Semua Jurusan	8 tahun	4	7
4	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Kebijakan Publik)	S1 Semua Jurusan	8 tahun	1	7

5	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli D3TLH)	S1 Semua Jurusan	8 tahun	1	7
---	------------------------------------	------------------	---------	---	---

Keterangan:

1. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi;
2. Semua tenaga ahli memiliki pengalaman pekerjaan di bidang lingkungan hidup khususnya penyusunan KLHS yang dibuktikan dengan surat keterangan/surat referensi;
3. Membuat riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan dilampiri fotocopy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja; dan
4. Tenaga ahli wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan untuk ditugaskan untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi yang disampaikan dalam usulan teknis.

B. Uraian Tugas

No	Tenaga Ahli	Uraian Tugas
1	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Ketua Tim)	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan dan mengalokasikan pekerjaan kepada tenaga ahli, menyusun rencana kerja serta persiapan lain yang diperlukan; b. Berkoordinasi dengan pemberi pekerjaan; c. Memimpin diskusi internal tim selama proses penyusunan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD; d. Bertanggung jawab dalam penyusunan KLHS RPJPD; e. Menentukan metodologi dan sistematika penyusunan KLHS RPJPD sesuai dengan ketentuan; f. Melakukan konsultasi publik Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait; g. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; h. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJPD; i. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJPD pada visi, misi dan arahan kebijakan jangka panjang; j. Berkomunikasi dengan penyusun KRP dalam rangka pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJPD; k. Bersama dengan penyusun RPJPD melakukan penjaminan kualitas KLHS; dan l. Memandu Tim Pembuat KLHS dalam proses validasi KLHS.
2	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Wakil)	<ol style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua tim dalam memastikan berjalannya proses penyusunan KLHS

	Ketua Tim)	<p>RPJPD dan KLHS RPJMD;</p> <p>b. Bertanggung jawab dalam penyusunan KLHS RPJMD;</p> <p>c. Menentukan metodologi dan sistematika penyusunan KLHS RPJMD sesuai dengan ketentuan;</p> <p>d. Melakukan konsultasi publik Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait;</p> <p>e. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis;</p> <p>f. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJMD;</p> <p>g. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJMD untuk Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;</p> <p>h. Berkomunikasi dengan penyusun KRP dalam rangka pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJMD;</p> <p>i. Bersama dengan penyusun RPJMD melakukan penjaminan kualitas KLHS; dan</p> <p>j. Memandu Tim Pembuat KLHS dalam proses validasi KLHS.</p>
3	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan I)	<p>a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup perkembangan fungsi wilayah (dasar teori);</p> <p>b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 1-5 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis;</p> <p>c. Menganalisis pengaruh kerangka kebijakan RPJPD yang relevan terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan; dan</p> <p>d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJPD pada visi dan misi.</p>
4	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan II)	<p>a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan keuangan daerah;</p> <p>b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 6-9 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis;</p> <p>c. Menganalisis pengaruh kerangka kebijakan RPJMD yang relevan terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan; dan</p> <p>d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJMD untuk Tujuan, Sasaran dan Strategi.</p>
5	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan III)	<p>a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup kondisi lingkungan dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 10-13 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; c. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJPD; dan d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJPD pada arahan kebijakan jangka panjang.
6	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan IV)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup gambaran kondisi lingkungan hidup (profil 6 muatan); b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 14-17 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; c. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJMD; dan d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJMD untuk Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
7	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Kebijakan Publik)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Tim dalam melakukan konsultasi publik Isu Pembangunan Berkelanjutan untuk KLHS RPJPD dan RPJMD dengan pemangku kepentingan terkait; b. Menganalisis kebijakan yang relevan dan esensial terhadap perkembangan Provinsi DKI Jakarta; c. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan jangka panjang bagi penyempurnaan muatan RPJPD dan RPJMD berdasarkan kerangka kebijakan terkait; d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan KRP dan usulan pengintegrasian hasil KLHS dalam bahasa pengaturan; dan e. Berkomunikasi dengan penyusun KRP dalam rangka pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJPD dan RPJMD.
8	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli D3TLH)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perhitungan dan analisis D3TLH air melalui proyeksi pada tahun kajian berdasarkan hasil kajian D3TLH yang sudah ada; b. Melakukan proyeksi jangka panjang (20 tahun) status D3TLH air untuk KLHS RPJPD; c. Melakukan proyeksi jangka menengah (5 tahun) status D3TLH air untuk KLHS RPJMD; dan d. Melakukan analisis skenario 5 tahun untuk target TPB prioritas.

C. Jadwal Penugasan Personil

Adapun Jadwal penugasan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bulan ke-							Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	TENAGA AHLI								
1	Ketua Tim								1 orang
2	Wakil Ketua Tim								1 orang
3	Ahli Lingkungan								4 orang
4	Ahli Kebijakan Publik								1 orang
5	Ahli D3TLH								1 orang

14. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 7 (tujuh) bulan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bulan ke-						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Tahapan Persiapan							
	a. <i>Kick off meeting</i>							
	b. Pengumpulan data dan informasi							
2	Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup							
	a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan							
	b. Identifikasi muatan KRP berpengaruh							
	c. Analisis pengaruh							
3	Perumusan alternatif penyempurnaan KRP							
4	Perumusan rekomendasi perbaikan KRP							
5	Penjaminan kualitas KLHS							
6	Permohonan Validasi ke KLHK							
7	Laporan Akhir							

15. LAPORAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultasi ini berupa **Laporan Akhir** yang meliputi:

- Laporan KLHS RPJPD sebanyak 5 eksemplar, berisi hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, muatan KRP berdampak lingkungan hidup, analisis pengaruh KRP, perumusan alternatif penyempurnaan KRP, perumusan rekomendasi perbaikan KRP, serta penjaminan kualitas untuk KLHS RPJPD.
- Laporan KLHS RPJMD sebanyak 5 eksemplar, berisi hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, muatan KRP berdampak lingkungan hidup, analisis pengaruh KRP, perumusan alternatif penyempurnaan KRP, perumusan rekomendasi perbaikan KRP, serta penjaminan kualitas untuk KLHS RPJMD.



- Laporan Dokumentasi dan *executive summary* KLHS RPJPD sebanyak 5 eksemplar, berisi dokumentasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD dan ringkasan KLHS RPJPD.
- Laporan Dokumentasi dan *executive summary* KLHS RPJMD sebanyak 5 eksemplar, berisi dokumentasi kegiatan penyusunan KLHS RPJMD dan ringkasan KLHS RPJMD.

IV. METODE PENGADAAN

- | | |
|--|---|
| <p>16. METODE
PENGADAAN
DAN JENIS
KONTRAK</p> | <p>a. Metode Pengadaan
Metode pengadaan untuk Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD menggunakan Swakelola Tipe II sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.</p> <p>b. Jenis Kontrak
Jenis kontrak untuk kegiatan ini adalah kontrak Lumsum.</p> |
| <p>21. PERSYARATAN
PENYELENGGA
RA
SWAKELOLA</p> | <p>Persyaratan / kualifikasi penyelenggara swakelola yang diperlukan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.</p> <p>b. Memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diwakelolakan.</p> |

V. HAL-HAL LAIN

- | | |
|---|---|
| <p>22. PRODUKSI
DALAM
NEGERI</p> | <p>Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.</p> |
| <p>23. PEDOMAN
PENGUMPULAN
DATA
LAPANGAN</p> | <p>Pelaksana swakelola diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan.</p> |
| <p>24. ALIH
PENGETAHUAN</p> | <p>Pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK dalam bentuk rapat dan diskusi sesuai tahapan pekerjaan.</p> |



VI. PENUTUP

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksana swakelola dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub didalam KAK ini akan diteliti kembali.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Jakarta, 5 April 2023

Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Helmy Zulhidayat, S.T., M.T.
NIP 197808272010011020

Lampiran 3. Focus Group Discussion Penjaringan Isu



DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Selasa / 27 Juni 2023
PUKUL : 08.30 WIB s.d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat 1 Lantai 22 Blok G Gedung Balai Kota DKI Jakarta
ACARA : FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta

No	NAMA	INSTANSI	NO HP/EMAIL	Tanda Tangan
1	MAY MUR	SEKRETARIAT DLH		
2	Rita R	DLH	08161368455	
3	Aki Wilgama	TIM TA / DIM	0811154063	
4	Olivia	Biro KBH		
5	Noni	ITDI	0812 8022 1864 / kcs@itdibund.go.id	
6	Rahmat Wandi Petra	ITDP	0853 7512 8245 / rahmat.wandi@itdp.org	
7	Norlison Dinda K	Dinsos	08121779917 / kirsaramate@gmail.com	
8	M. CHANAN ANWAR	Asparekrup	0812 9615 9160 / anwar.cep2818@gmail.com	
9	D. Rizalman	Ku Bismantek	08138125367 / rizalman20@gmail.com	
10	Fahrudin	Bghd	081865860	
11	Nelma Dachi	Biro Kesos	085358518352	
12	Analia Desigama	Biro Kesos	081383377189 / pusker2019@gmail.com	
13	Yeni L	Bappeda	08169817914 / yeni.lindawati@gmail.com	
14	Ryari Maulana	Bappeda	085864760866 / ryari.maulana@jakarta.go.id	
15	Inte	Bappeda	08180639788 / intaprima@yahoo.com	
16	Dian Ayu	Bappeda		
17	Intan Iestari	Bappeda	0815 885 7703 / intan.iestari@jakarta.go.id	
18	Linda Angelissa	Bappeda	08151335977 / angelissalinda@gmail.com	
19	Kartini A.V.	Bagian PLTH Jakarta Timur	08568866569 / kartini.av@gmail.com	
20	Iffah Zati	UCLG ASPAC	081252460135 / zati@aspac.go.id	



No	NAMA	INSTANSI	NO HP/EMAIL	Tanda Tangan
21	Early	Dinas Perhubungan	0812866049 / carpedagumar@gmail.com	Early
22	PICUT WAG. RENDHO	UINARH	0870 8066 0982 / fabelsawag-wag@da.com	PICUT
23	HAFIDZ S. PRADANA	Bappeda	0815 666 669 / info@hafidzpradana.com	HAFIDZ
24	Alhanna Mathia A.	Bappeda	0857578340 / alhanna.mathia@gmail.com	Alhanna
25	Cara To Kurniawan	Bappeda	0821563102 / caratokurniawan@gmail.com	Cara To
26	Pradana Yogi N	Bappeda	0812988886 / pradanyogi01@gmail.com	Pradana
27	Marlo M	Den.	08979996108	Marlo
28	Benny I.	Benny P. un	081385411467	Benny
29	Leily Ikhari	Bap. PLH JB	0818761392	Leily
30	Dinaris Aris . N	Distanat	0859 29 21 6019	Dinaris
31	Dan Icah	"	08150294190	Dan
32	Pemaldy	Biro Pemerintahan	082108282866	Pemaldy
33	Mah Nur P	DPRKP		Mah Nur
34	Astri Ramadhanti	DPRKP		Astri
35	Dh Wiyon N.	DPRKP		Dh Wiyon
36	Aren Zedey R	Distan		Aren
37	Diani Harrie . J	Biro PLH	081382241895	Diani
38	Anindita I	Dishub	081321710011	Anindita
39	Marcell Sinay	WVI	082149374287	Marcell
40	OKI A	DLH	081389561979	OKI
41	Ismay	PLH JB	0821126132	Ismay
42	Vido	Dishub	081578887014	Vido
43	IMELDA M	VS	0858 822 971	IMELDA
44	Dani	DTU TG	085262856873	Dani
45	Parityono	Dinas Damkar	081298912728	Parityono

No	NAMA	INSTANSI	NO HP/EMAIL	Tanda Tangan
46	Dwi Nurcahyani	UJ	012800827	Dwi
47	DIPY	DPRKP	0813 1596 5385	DIPY
48	Rendy Prantoso	UCLG ASDAC	08978337120	Rendy
49	Si Han Baga	DIA	0811-847219	Si Han
50	Fahmi R. A	PIRA	08584138801	Fahmi
51	Olivia Sanders	IALI PPD Jakarta / PPA USAKTI	olivia.sanders@trisakti.ac.id	Olivia
52	Darsyam N	Disdik	08129630746	Darsyam
53	Muh. Salman Alkufi	Divers Clean Action	salman@diverscleanaction.org	Salman
54	Fauzi Rochman	Dinas Perhubungan	andalalin.dei@gmail.com	Fauzi
55	IG Ni Sholeh	PPPAPP	gni.stoleh@yahoo.com	IG Ni
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				

Jakarta, 2023
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Helmi

Helmy Zulhidayat
NIP 137806272010021020



Lampiran 4. Daftar Hadir Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJPD

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis / 5 Juli 2023
 PUKUL : 08.00 WIB s.d selesai
 TEMPAT : Java Ballroom Lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
 ACARA : Konsultasi Publik Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
1	ARYATI	PT PLN Indonesia Power		1
2	Pully. S	PAM JAYA	0813-3855 7572	2
3	LEAN Subawa Putra	PT PLN Indonesia Power		3
4	ENDRAWATI F	UI	0813 11233 276	4
5	Andhika Gutians or	PT. PJA	08131283162	5
6	ABE PISA-A	PT. PJA		6
7	Estoni Marindo	PT. PJA		7
8	Erison Polyanus	Wakil Kota Jakarta Timur	Erison@gmail.com / erison.simanjuntak@gmail.com	8
9	M. CHANEN ANH	Disperkeras	0819959660 / amrae-p2013@gmail.com	9
10	Hafid Zati	UCLG ASPAC	08225468755	10

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
11	MAULINA RBY W.	PT TRANSPORTASI JAKARTA	081324466412 / maulina.fidy@transjakarta.co.id	11
12	Haty Wiantie	PAM JAYA	08193414797 / haty.wiantie@pamjaya.co.id	12
13	Indra	Sarana Jaya	08123244609 / indra.sukhono@sarana-jaya.co.id	13
14	Nita Noerhayati	Dinas Dukcapri	0813 22272397 / nita.noerhayati@gmail.com	14
15	Yadi. Pong	Pam JJA	08129051129	15
16	Julia Riannisa	Dinas Pendidikan	08568730115 / sumro.didik@gmail.com	16
17	Yeni-L	Bappeda	08169817014	17
18	CHOM SYANTHAR	DPPA-PP BNU	08128746909	18
19	YOGA	JAYA AKOL	0856166 2201	19
20	Bakung Tawar Gung	Pusat IV	081274 3201	20
21	Pandu	Humas DLM	0819014122	21
22	Sri Handayani	DIM	0811-847719	22
23	Adi Wijaya	DIM	0811-15-4063	23



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN
24	Radana Yogi H	BAPPEDA	085729580854	24
25	Digang Lili A.	ANCOL	081381915141	25
26	Masrums A. W.	ANCOL	085643711022	26
27	TANDJ RAHMAT	BAPPEDA	08111866778	27
28	Joko Prima	Bappeda	081806333798	28
29	Early	DisHub	081311670283	29
30	Dinda	DisHum	089669528950	30
31	Dika Nini P	Dinas Pendidikan	0815131687044	31
32	Shandy Helmy	Tamsjabara	08111771182	32
33	Rohma S.	DLH	081318224434	33
34	Citra Ta KRAHAWAN	Bappeda	081311567107	34
35	Sally	Bappeda	08121678528	35
36	Athenta M.A.	Bappeda	085727818110	36

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN
37	Andrian Yung	CRJ Jakarta	08132601618	37
38	SWASTIKA HARIMATI	CRJ JAKARTA	08562011205	38
39	Upi R	DLH	089605740941	39
40	Dhoni J	DLH	089663063602	40
41	Lelly Hari	Bos PLH JIB	0818761372	41
42	Rebecca O	Bashid	082112626918	42
43	Christmas EM	Disbud	082116298630	43
44	LIMA A.	BAPPEDA	081513335977	44
45	Peggy	Dinas SDA	08313680046	45
46	Hendra	UCLB ASKAC	081267280136	46
47	WINARTO	JAYA ANCOL		47
48	Dian Ayu	Bappeda	087880009841	48
49	Intan Lestari	Bappeda	08153857705	49



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
50	Mukhlison	Asbang JS		50
51	R. Hazami	RCH JS		51
52	Wassili Fanny A	DH.H.	085657298015	52
53	Dwi Anini	Danku	087820249381	53
54	Diki	Damhar	08526724 2325	54
55	Eko.	Panicar		55
56	NOURAH ARIANS	WVI	081295363936	56
57	Andry	Kepalaan Sewi	0812 8744 70	57
58	Endranah	Ketua Pusat Studi Pengelolaan Perikanan Trawakti		58
59	Angada	Dikprg DKI	08226056123	59
60	Iman Fikri	Bupat DKI	08724597 211	60
61	T. Imam Gusaymah	Biro Kesos	085260303230	61
62	Indah K	B. Hukum	087888184212	62

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
63	Agus N	DPRKP	0813159462	63
64	Novianfi	DPRKP	0812 8741 7660	64
65	Rahmad Wandi Putra	ITDP	0853 7512 8743	65
66	R. Aji Eko Supriati	BABD	08128564276	66
67	Ferry Srijato	Apwido	0811832466	67
68	Irwan Ade Putra	Wali Kota Jakarta Barat (Kas. Pang)	0819 0205 1211	68
69	Hafid S. Pradana	Bapprada	0815 6161 6189	69
70	Anis- Farzan S	Histambut	08170572560	70
71	Muh. Salman Alkay	Divers Clean Action	0853 12626867	71
72	Camelia	Perumda Paljaya 9	081381266935	72
73	Fahmudi M. A.	Perumda Paljaya	087830800393	73
74	Bede Sudewa	Paljaya		74
75	Widya R.	B. Hukum		75



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP/EMAIL	TANDA TANGAN
76	NADEVAN	PT JIEP	081835211311	76
77	Taha di	JIEP	081227113706	77
78	Mandara - r	JIEP	081220822149	78
79	Heri kti - L	JIEP	0811800141	79
80	Marcell	WVI	082144374287	80
81	Septito R	Biro Perken	08993936675	81
82	M. Yusuf	DLH PSM DI	081294801166	82
83	Wawan H	DLH PSM DI		83
84	Wiwies Mugi Lestari	DKTRP	08158723329	84
85	IMAM P	bag PLH gu	081210543838	85
86	Giatmoko	PSMDI / DLH	081398190461	86
87	Yusi Iosia	Ro. PLH	081513230008	87
88	Martinyas	Ro. PLH	081202273536	88

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP/EMAIL	TANDA TANGAN
89	Fauze A	B. Hukum		89
90	Silvia	Biro Hukum	Subangpta@gmail.com	90
91	Annisa	SDGs Jakarta	anniskusuma@jakarta.go.id	91
92	Anom	BPRD		92
93	Sapudin	BPRD		93
94	Teguh Fuliastro	Dinas KKP	08118685884 / tpe-dor@yahoo.com	94
95	Cahyani	DLH	cahyani_era@yahoo.com	95
96				96
97				97
98				98

Jakarta, 2023
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Helmy Zulhidayat
NIP 197608272010011020

Lampiran 5. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJPD

**BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK ISU STRATEGIS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta 2025 - 2045
Jakarta, 6 Juli 2023**

Pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan **Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta 2025-2045**, bertempat di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta, yang dihadiri oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) 1 Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelompok Kerja (POKJA) KLHS dan Pemangku Kepentingan Terkait, sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis untuk KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045, meliputi:
 - a. Tingginya Resiko Bencana
 - b. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup
 - c. Ketimpangan Sosial – Ekonomi
 - d. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
2. Catatan pengkayaan Isu Strategis berupa:
 - a. Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan (sub-isu) dapat berupa kalimat pernyataan yang fokus pada permasalahan daerah
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) perlu dipertimbangkan dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan aspek perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang mencakup:
 - a. Akses air minum aman dalam jaringan perpipaan masuk ke dalam RPJPD,
 - b. Hunian dengan sanitasi aman
 - c. Pengelolaan sampah
 - c. *Benchmarking* dengan kota-kota besar lainnya di Dunia untuk meningkatkan peran Jakarta sebagai *Global City* dengan mendorong *public space* dan *sustainable mobility*.
 - d. Analisis kependudukan perlu diperdalam untuk menggambarkan dampak akibat tingginya tekanan penduduk terhadap permasalahan lingkungan-sosial-ekonomi, termasuk masyarakat pendatang.
 - e. Resiko bencana perlu dibagi menjadi bencana alam dan non-alam. Bencana non alam yang ada di DKI Jakarta mencakup: pandemi COVID-19, kebakaran dan kegagalan teknologi.
 - f. Sebagai input kepada Laporan KLHS, elaborasi pada masing-masing isu strategis perlu diperjelas lingkup permasalahan yang lebih spesifik.
3. Tindak lanjut kegiatan berupa:
 - a. Perlunya pelaporan progres penyusunan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri
 - b. Penyusunan Alternatif Skenario jangka panjang (20 tahun) dengan dan tanpa upaya tambahan sebagai dasar perumusan rekomendasi KLHS

Demikian Berita Acara Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025-2045 ini dibuat dan ditandatangani oleh:

1. Direktorat PDLKWS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Bpk.Hendaryanto, ST., M.Si
2. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) 1 Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Bpk Kunto Bimaji, SH., M. Si

3. POKJA KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 yang diwakili oleh Bpk. Helmy Zulhidayat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Penyusun RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 yang diwakili oleh Bpk. Fandy Rahmat dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Lembaga Swadaya Masyarakat diwakili oleh Bpk. Rahmad Wandu Putra dari ITDP
6. Mitra Pembangunan diwakili oleh Bpk. Hendra Susila Adi dari UCLG ASPAC
7. Pelaku usaha yang diwakili oleh Bpk. Ferry Sugito dari APINDO

Dokumentasi kegiatan berupa notulensi dan rekaman rapat menjadi bagian dari Berita Acara ini.


Jakarta, 6 Juli 2023

Direktorat Sinkronisasi Urusan
Pemerintah Daerah (SUPD) 1
Kementerian Dalam Negeri



(Kunto Birnaji, SH., M. Si)

Direktorat PDLKWS
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



(Hendaryanto, ST., M.Si)

POKJA KLHS RPJPD Provinsi
DKI Jakarta 2025-2045
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta



(Helmy Zulhidayat, ST., MT)

Tim Penyusun RPJPD Provinsi DKI
Jakarta 2025-2045
Badan Perencanaan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



(Fandy Rahmat)

Lembaga Swadaya Masyarakat
ITDP



(Rahmad Wandu Putra)

Perwakilan Mitra Pembangunan
UCLG ASPAC



(Hendra Susila Adi)

Pelaku usaha
APINDO



(Ferry Sugito)

Lampiran 6. Focus Group Discussion Alternatif Skenario



DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Kamis / 10 Agustus 2023
PUKUL : 09:00 WIB s.d selesai
TEMPAT : Rm 14-12 Blok 6 Gedung Balai Kota
ACARA : FGD Perumusan Alternatif Skenario KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Provinsi DKI Jakarta

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
1	Helmy Z	Pinas LTH		Helmy
2	Sri Haidary	DLH		Sri
3	OKI-A	DLH		OKI
4	Dwi Bayu	BPSD-		Dwi
5	Fandi Rahmat	Bappeda		Fandi
6	Jake Prina	Bappeda		Jake
7	Adhewita Martha	Bappeda		Adhewita
8	Heddy S. Kikina	Bappeda		Heddy
9	Citra Tri Kurniawati	Bappeda		Citra
10	Robertus P.L. Gebze	Bappeda		Robertus
11	Niswatin Farida	OSDA		Niswatin
12	Anatol	OSDA		Anatol
13	Supriyadi C	DKPIL		Supriyadi
14	Endrawati F			Endrawati
15	Yeni L	Bappeda		Yeni
16	Wiwiek Mugi Lestari	DKTRP		Wiwiek
17	Dian AS	Bappeda		Dian
18	Lina A.	Bappeda		Lina
19	Willy H	DKPR		Willy
20	Rini	-		Rini
21	Ronard	Bappeda		Ronard
22	Gilda	-		Gilda

Jakarta, 10 Agustus 2023
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Helmy Zulhiyayat
NIP 197808272010011020



Lampiran 7. Konsultasi Publik II Perumusan Skenario KLHS RPJPD

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin / 28 Agustus 2023
PUKUL : 08.00 WIB s.d selesai
TEMPAT : Burgundy Palace Lantai 2 Hotel Ashley Tanah Abang
ACARA : Konsultasi Publik II Perumusan Skenario Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
1	Rafli Firdaus	WKJB	0812-2384-6326 / rafli.firdaus@gmail.com	
2	Ericson Aditya	Bagian Riset dan Hubungan Timor	0812-8060151	
3	Betha Fianzil Azizi	Dinas Sosial	085229909509 / subbag.persan.dinasos@gmail.com	
4	Dwi Nuradhyati	T.A. UJ	0812-800827 / dwi.nuradhyati@gmail.com	
5	Muzzaki Sami	Bappenas	089677079901 / muzzaki.sami@bappenas.go.id	
6	Cemara Dinda	UCLG ASPAC	cemara.dinda@uclg-aspac.org 0852-80644600	
7	Dian Putri Noviyanti	UCLG ASPAC	081806100031 / dian.noviyanti@uclg-aspac.org	
8	Fahmi Nur Amalia	TA	085214128801 / amf@dharmainamandiri.com	

8

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
9	Maria T	BKR.PMKS Dppapp	081215907583	
10	Embay S	SPBID	0812-8696729	
11	Kurniawati	Dirjen/Perencanaan	093895011278	
12	Yosi Lusla	Ro-PLH	081513390008	
13	Martiningtyas	Ro-PLH	081282273536	
14	T. IMAM	Biro Kesos	085260303230	
15	M. Saifuddin	PT Indonesia Power Yacht	081218716155	
16	Adhesita Martha A.	Bappeda BPP	085727818110	
17	Alinda Destriyani	Pusdatin Perhubungan	081304200600	
18	B. Kristina	PLH	0812-89993917	
19	P. Hozumi	PLH JS	081290017652	

11



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
20	Agis Lantut	Dispora	perdianonwpr@gmail.com	
21	Gilane I.L.	Dispora	08112630125	
22	Pohang?	DLH	081310264439	
23	Christmes - E.M	Disbud	082116298636	
24	Novarida Hidayanti	Perumda Palbasa	081382222942	
25	Supriyadi S	DKP KP	087081880666	
26	Velma Dachi	Biro Kesos	085358518252	
27	Adi Wijana	DIM	0811-15-4063	
28	Haty Warte	PAM JAYA	081934114797	
29	Wyla SM	CAO	08138741965	
30	Daryan N	Dinas Pendidikan	08129620748	

11

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
31	Heru Ardianto	Disparabef DKI	087720875962 hr.ardianto@gmail.com	
32	Rina Suryanti	DLH	081289227300	
33	NADEVAN	PT JIE P	081375211311	
34	Ageng Dm.L	PT JIE P	08118000448	
35	Rahmahani	DBM	081511098590	
36	Eng P	Walikota Jakarta		
37	Dida Pri Prokety	Dinas Pendidikan	0851386870943	
38	Andreas S	WRP	085236602400	
39	Kritalia	Biro Pem	087825269725	
40	Fandri n.	Bappeda	08111866778	
41	Aan	Distub	08978100245	

11



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
42	HSAN. R	Disparakerag	09569544300	
43	Yurike K	DLH Prov. DKI Jkt	08158089595	
44	Syarifa Dewi A	DLH Jakarta	0852.4330.5486	
45	NIDYA H	JLEP	0851 9626673	
46	Pramanaw	JIS?	08199726077	
47	Marlin X	—	0813 8008 112	
48	Alifa	Dinas Bina Marga	087883769784	
49	Sri Handaya	DIM	0811-847719	
50	Adam R.	Biro Pemerintahan	0850-935-77475	
51	Ryan M.R	Bappeda	085864740866	
52	Hafid S. Restina	Bappeda	0813 616 6189	

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
53	DWI ARINI	Dinas Eufkormat	083890945381	
54	Citra Ter Kustawati	Bappeda PKS Jakarta	081311564104	
55	Elva Marisa	Pusdatin Pertambangan	081918355769	
56	Muhammad Rayhan	Pusdatin Pertambangan	0818 072 077	
57	DWIKA P	kepolawaran Seribu	08563905558.	
58	Inge	DLH		
59	Dhita Indriani	DLH	089655063601	
60	M. Adh A	DLH		
61	Eva Melipha V	DLH	08138876141	
62	Bungsu	DLH	0812.9100.3946	
63	Ardian Jusup	LPT Jakarta	081386612178	



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
64	Rifqi Khoirul Anam	ITDP Indonesia	rifqi.khoirul@itdp.org	
65	Pragudi Y.	APINBO DKI	081158922	
66	Asri Indiyani	Paljaya	08182257551	
67	Kasih Kurniawan	ITDP Indonesia	kasih.kurniawan@itdp.org	
68	Cahyo	Biro Rerker		
69	Shady Helu	Tranggabati	shadyhelu@tranggabati.go.id	
70	Tanaya Septorani	Bidang PSMDI	kemitraandatin.dlh@gmail.com	
71	ARE ROSADI ALWI	DINAS KEBUDHAYATAN		
72	Adri Pontianti	Perumda Paljaya	adriapaljaya.com	
73	Etni Risti	DIM/UM		
74	Enggarian	Bidang TL	08777247474	

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
75	Rita N	DLH Prov. DKI	08161368455	
76	Dwi Putri Eferia	UPS B.Air	0819-0433.1732	
77	BOUGA	SARPPEDA		
78	Litia Amisa	LRT JAKARTA	081294923532	
79	Almaruq	DLH Prov. DL		
80	Suherman	PPS	0856 9297 9980	
81	Salman Alkufy	Divers Clean Action	0853 1269 6867	
82	OKI.A	DLH		
83	Debby Elka	Dinas Sosial	081218188082	
84	Rebecca.O	Ditbud	082112676918	
85	Camelia	Perumda Paljaya	081381266935	



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN
86	I Gan Subawa Pata	PT Indonesia Power		<i>Asyati</i>
87	Julia Riannisa	Dinas Pendidikan	0856873085	<i>Julia</i>
88	MAULINA FIDY W	PT TRANSPORTASI JAKARTA	081324466412	<i>Aa</i>
89	M. CHATUL	DISKREKRAF	081299259360	<i>Chatul</i>
90	Diti	Damkar	088864242329	<i>Diti</i>

Jakarta, 28 Agustus 2023
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Helmy
Helmy Zulhidayat
NIP 197808272010011020

Lampiran 8. Kompetensi Tenaga Ahli

Adi Wiyana – Ketua Tim

Nama	Adi Wiyana			
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan mata kuliah program S3, Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Lautan, IPB Bogor, 2004. MS, Development Sociology, Cornell University, New York, USA, 1991. Drs. Teaching English as a Foreign Language (TEFL) and Minor in Linguistics, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1978. BA. Bahasa dan Sastra Inggris, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1975. 			
Pelatihan profesional	<ul style="list-style-type: none"> SEA Training of Trainers pada tahun 2010 (GTZ), Germany. Pelatihan Lingkungan Hidup: Amdal di Universitas Gajah Mada dan Environmentally-Sound Developmen Planning di Washington, D.C., USA. Perencanaan dan Pengelolaan: Project Implementation Course (USAID); Rural and Regional Development Planning, AIT, Bangkok; Performance-Based Contracting; Perencanaan Pembangunan Wilayah, UGM; dan lainnya 			
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa Asli		
	Inggris	Fasih	Fasih	Fasih
Pengalaman Profesional	Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 2017 – sekarang, PT. Dharma Ina Mandiri, Tenaga Ahli KLHS berbagai kegiatan (pool expert) 2015 – 2017, PT. Dharma Ina Mandiri dan Conservation International, Team Leader dan Tenaga Ahli KLHS. 2013 – 2014, Kemendagri, Integra Consulting dan DHI, Tenaga Ahli KLHS 2007 – 2012, Kemendagri dan DANIDA, Team Leader untuk berbagai pengembangan KLHS di daerah. 2005 – 2006, PT. Bina Marina Nusantara, Team Leader untuk pengembangan perlindungan sumber daya daerah pesisir 2002 – 2005, IRG dan CRC/URI, Advisor Kebijakan dan Kordinator Program Nasional, Management sumber daya pesisir. 1998 – 2002, International Resources Group – IRG, Deputy Chief of Party, Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam 1997 – 1998, World Bank/RSI, Rural Development and Natural Resources Advisor 1978 – 1997, USAID/Indonesia, Program Specialist; Project Manager for pollution prevention 		
Pengalaman (pilihan)	Proyek	<p>Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli Sumber daya Pesisir</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 		

	<p>Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangunan Palembang Baru)</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS / Sumber daya pesisir</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2021</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS Kepelabuhanan Tanjung Carat 2021 Kementerian Perhubungan dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p>
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, BPPT – Pemda Kabupaten Deiyai</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Kabupaten Deiyai, Papua, 2019</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS terlaksana dengan baik, berfokus pada isu strategis yang penting dan menyeluruh, berbasis fakta dan data yang valid • Menyusun laporan KLHS berkolaborasi dengan tenaga ahli lainnya dari BPPT • Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Pangkal Pinang, Juli- Desember 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS terlaksana dengan baik, berfokus pada isu strategis yang penting dan menyeluruh, berbasis fakta dan data yang valid • Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Boven Digoel, Maret – September 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS terlaksana dengan baik, sesuai dengan PermenLHK 69/2017 dan Permendagri 7/2018 • Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi
	<p>Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan Pengelolaan Dampak Dan Risiko Yang Ditimbulkan Oleh Pengelolaan Tailing PT. Freeport Indonesia Dan Pengamanan Ekosistem Sungai, Estuari, Dan Laut Yang Terkait, Kementerian LHK</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Februari –Agustus 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mengkaji kebijakan pemerintahan saat ini dan mencari gap yang ada mencakup kegiatan pengelolaan tailing PTFI dan mengidentifikasi terobosan baru, meningkatkan dan/atau memperkaya kebijakan untuk pengelolaan tailing PTFI dan mitigasi dampak/risiko lingkungan hidup terhadap ekosistem sungai, muara, laut dan masyarakat.</p>
	<p>Proyek/Pemberi : Pelatihan KLHS untuk Provinsi Aceh, WWF-MCAI</p> <p>Posisi : Fasilitator</p> <p>Lokasi/Periode : Banda Aceh, 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan materi pelatihan • Menyampaikan pelatihan

	<p>Proyek/Pemberi : Fasilitas Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, WWF-MCAI</p> <p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Dharmasraya, 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Bertanggung jawab untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLHS, memberikan pelatihan, dan mengawasi implementasi KLHS untuk Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya. Serta memastikan kualitas KLHS secara keseluruhan. Sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan memobilisasi anggota tim.</p>
	<p>Proyek/Pemberi : ESP3 Danida 1222-4 – Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman Umum dan pedoman KLHS. Backstopping Management, ESP3-DANIDA, KLHK</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Desember 2016 - April 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung KLHK, Kemendagri dan kementerian terkait lainnya dalam mencapai pemahaman bersama tentang prinsip, konsep, metodologi, alat, dan keragaman pelaksanaan KLHS dalam perencanaan, kebijakan, dan program Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan. • Dukungan untuk Direktorat KLHK KLHK untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam penyusunan pedoman KLHS • Secara langsung ikut dalam penyusunan PermenLHK 69/2017 tentang KLHS
	<p>Proyek/Pemberi : Peningkatan Kapasitas KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan melalui Penyusunan Modul Training dan Pelatihan (ToT) di tingkat Nasional dan Daerah Terpilih. ESP3-DANIDA</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Makassar, Solo, Agustus 2016 - Januari 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Menyiapkan basis program peningkatan kapasitas KLHS dan menguji serta memulai implementasi program pelatihan berjenjang dalam penerapan KLHS di tingkat daerah untuk ToT Pusat Studi Lingkungan (PSL) di 4 daerah. Kegiatannya meliputi strategi untuk membangun dan meningkatkan kapasitas PSL dalam pelaksanaan KLHS, penyusunan Modul ToT KLHS untuk pelatih dan peserta pelatihan, Ujicoba Program ToT KLHS, melaksanakan Program ToT di daerah PSL, laporan sintesis dari proses, pembelajaran, dan langkah ke depan untuk peningkatan kapasitas PSL di penjuru Indonesia.</p>
	<p>Proyek/Pemberi : ESP3 Danida 1512-1: Bantuan Teknis untuk Pemkab. Temanggung, Magelang, dan Sukoharjo mengenai Penyusunan KLHS RTRWK. Pemprov. Jateng - ESP3 DANIDA.</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS Nasional</p> <p>Lokasi/Periode : Agustus 2016 - April 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi POKJA KLHS dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS sehingga dihasilkan dokumen KLHS yang berkualitas baik • Mengikuti serangkaian FGD dan konsultasi publik di masing-masing kabupaten untuk mengarahkan POKJA KLHS dalam menentukan isu strategis, alternative dan rekomendasi sehingga secara tidak langsung berupaya meningkatkan kapasitas POKJA KLHS.
	<p>Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis untuk Kementerian Dalam Negeri dalam Pengembangan Wilayah berbasis lingkungan, ESP3-DANIDA Kemendagri</p> <p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, 2016</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu Ditjen Bangda Kemendagri untuk berkoordinasi dengan 6 POKJA KLHS di daerah dan 2 konsultan KLHS yang ditunjuk oleh ESP3 (masing-masing mendukung satu pemerintah daerah) selama pengembangan KLHS di masing-masing pemerintah daerah • mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari KLHS yang sedang berlangsung dan memberikan analisis singkat khususnya terkait dengan penerapan pedoman KLHS KLHK dan pedoman KLHS Kemendagri. • Berpartisipasi sebagai nara sumber dalam kegiatan. • Berpartisipasi dalam lokakarya nasional

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan pembelajaran dari pemerintah daerah terpilih (setidaknya 5 pemerintah daerah dari Indonesia barat, tengah dan timur) yang menyusun KLHS RPJMD • Menulis analisis tentang pembelajaran tersebut yang diambil terkait dengan proses, pengembangan kapasitas, kerangka kerja peraturan, dukungan pemerintah dan non-pemerintah terhadap pengembangan KLHS di tingkat daerah • Memastikan kualitas seluruh hasil kerja dan juga sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan memobilisasi anggota tim.
	<p>Proyek/Pemberi : Pengembangan Kapasitas dan Kesadaran mengenai pentingnya KLHS, Ditjen Bangda Kemendagri</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, 2015 – 2016</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan serangkaian lokakarya sosialisasi KLHS (di Lombok, Semarang, Yogyakarta) pada 2015 untuk staf terpilih dari 259 pemerintah daerah yang melakukan pilkada serentak pada 2015. • Memberikan serangkaian sesi pelatihan KLHS (di Medan, Yogyakarta, Jakarta) pada tahun 2016 untuk staf terpilih dari 259 pemerintah daerah yang melakukan pilkada serentak pada tahun 2015.
	<p>Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis KLHS di Kabupaten Tapanuli Utara, Conservation International Indonesia, USAID, dan Monsanto Foundation.</p> <p>Posisi : Team Leader / Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Tapanuli Utara, 2015 – 2016</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLHS untuk mengintegrasikannya dalam kerangka kerja pembangunan rendah emisi dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; • Mengembangkan kapasitas lokal di dalam pemerintah daerah (staf lembaga teknis dan anggota Pokja) dan di luar pemerintah daerah (LSM lokal) untuk melakukan KLHS, melalui kelas dan on the job training; • Membantu pemerintah daerah untuk mengkaji kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang ada, menyelaraskan berbagai KRP, dan memberikan rekomendasi tentang strategi Pembangunan Rendah Emisi (LED); • Menyediakan data dan informasi tentang sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya lokal; • Mendorong investasi dari sektor swasta dengan mendukung KRP yang telah diselaraskan dan sistem regulasi yang disederhanakan; • Memfasilitasi diskusi dengan dewan Forum Multi-Pemangku Kepentingan (MSF) dan memfasilitasi lokakarya tentang rencana penggunaan lahan alternatif; • Menyusun laporan akhir KLHS yang mendokumentasikan semua proses dan hasil KLHS.
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS untuk RPJMD di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau dan Kepulauan Riau serta di Kabupaten/Kota: Tapin (Kalsel), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Lampung Utara (Lampung), Indragiri Hilir dan Kuansing (Riau), Kemedagri dan Pemerintah Daerah terkait.</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Indonesia, 2013 – 2014</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan KLHS; • Memfasilitasi proses KLHS (pra-pelingkupan, pelingkupan dan data baseline, kajian dampak, pengembangan langkah-langkah mitigasi dan / atau alternatif, perumusan rekomendasi KLHS); • Menyusun laporan KLHS; • Melakukan penjaminan kualitas.
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS MP3EI untuk Koridor Bali-Nusa Tenggara, DANIDA-ESP3</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS - Kordinator</p> <p>Lokasi/Periode : Bali, 2013 – 2014</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pra-pelingkupan; • Memfasilitasi pelingkupan KLHS dan mengembangkan data baseline; • Melakukan kajian dan analisis, bekerja sama dengan para ahli multi disiplin;

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan laporan pra-pelingkupan, laporan pelingkupan, dan laporan akhir KLHS.
	<p>Proyek/Pemberi : ESP 2 - SEA for Capacity Building and Awareness Raising Activity, ESP3 DANIDA Kemendagri</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, 2012</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan materi untuk acara peluncuran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 67/2012 tentang KLHS; • Memberikan serangkaian pelatihan untuk pelatih KLHS yang melibatkan peserta dari berbagai provinsi; • Mengembangkan dan mendistribusikan materi penyadaran KLHS, termasuk materi visual dan cetak; • Melakukan FGD pembangunan berkelanjutan bagi pembangunan daerah; • Merevisi modul pelatihan KLHS sesuai dengan peraturan Kemendagri tentang KLHS; • Memberikan bantuan, konsultasi, dan fasilitasi berbasis permintaan untuk pelaksanaan KLHS di provinsi, kabupaten / kota; • Mengembangkan kriteria untuk pemilihan pemerintah daerah untuk menerima bantuan teknis pelaksanaan KLHS; • Membantu pemerintah daerah dalam penerapan KLHS; • Mempersiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir tentang KLHS dan implementasi konsultasi.
	<p>Proyek/Pemberi : Pilot Applications of Strategic Environmental Assessment (SEA), ESP2 – Danida</p> <p>Posisi : Team Leader/ Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : 2007 - 2011</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan modul pelatihan KLHS; • Memberikan pelatihan KLHS; • Memberikan bantuan teknis dan fasilitasi dalam pelaksanaan KLHS; • Mempersiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir. • Melakukan penjaminan kualitas laporan KLHS

Endrawati Fatimah – Wakil Ketua/ Koordinator RPJPD

Nama	Endrawati Fatimah			
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1986 Post graduate Diploma in Planning (Third World), Faculty of Architecture and Planning, Department of Geographical Sciences and Planning, University of Queensland, Australia, tahun 1991. Dinilai sama dengan ijazah negeri sebagai Spesialis Satu (SP I) berdasarkan SK Mendikbud No. 1118/Kep.Dikti/IJIN/1996. Master of Planning Studies, Faculty of Architecture and Planning, Department of Geographical Sciences and Planning, University of Queensland, Australia, tahun 1994. Dinilai sama dengan ijazah negeri sebagai Magister (Strata 2) berdasarkan SK Mendikbud No. 1118/Kep.Dikti/IJIN/1996. Doktor Ilmu Lingkungan, PS Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, tahun 2009 			
Pelatihan profesional	<ul style="list-style-type: none"> Joint Inter-Ministerial SEA Training, 2012, Danida dan KLH, Jakarta Workshop Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Perencanaan Ruang, 5 – 6 September 2012, KLH dan Universitas Trisakti, Jakarta Pelatihan SPSS, 16-19 Juni 1997, Lembaga Penelitian, Usakti Kursus AutoCAD Basic, Intermediate dan Advance Rel.13, 1997, PT Harrisma Agung Jaya, Jakarta Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 29 Januari – 9 Feb 1991, Universitas Indonesia, Jakarta <p>Sertifikat Keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahli Utama Perencana Wilayah dan Perkotaan LPJK – IAP No. 027/BSP-IAP/LPJKN/IV/2005, Jakarta, tanggal 8 April 2005 Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota LPJK – IAP No. 0866/BSP-IAP/LPJKN/IX/2009, Jakarta tanggal 1 September 2009 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota – Utama LPJKN No registrasi 1.5.502.1.088.09.1048258, Jakarta 22 Agustus 2014 			
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa asli		
	English	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Pengalaman Profesional	Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 2013 – sekarang : Wakil Dekan IV Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama FALTL, Universitas Trisakti 1996 – sekarang : Dosen Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL), Universitas Trisakti. 1995-1996: Anggota Tim Persiapan Pendirian Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti 1995 – 1996 : Dosen Jurusan Arsitektur Lansekap, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. 1988 – 1994 : Staf Bidang Fisik dan Prasarana, Bapeda Tingkat I Kalimantan Timur 		
Pengalaman (pilihan)	Proyek	<p>Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 		

	<p>Proyek/Pemberi : Penataan Kawasan Sentra Flora Fauna Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapeko Jakarta Barat</p> <p>Posisi : Ahli Perkotaan</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, September – Desember 2019</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rekomendasi penataan Kawasan Sentra Semanan yang ramah lingkungan sesuai dengan arahan sebagai salah satu Kawasan wisata • Merekomendasikan program dalam rangkapengembangan sentra semanan seperti pengembangan promosi.
	<p>Proyek/Pemberi : Pedoman Penentuan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kementerian LHK</p> <p>Posisi : Narasumber/Penyunting</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2018 – Maret 2019</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan pendekatan analisis daya dukung dan daya tampung yang implementatif bagi pelaksanaan di daerah • Memberikan rekomendasi arahan pemanfaatan daya dukung dan daya tampung bagi perencanaan di daerah, baik secara tata ruang maupun perencanaan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan secara umum.
	<p>Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta, Dinas KKKP DKI Jakarta</p> <p>Posisi : Ahli Lingkungan</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, September – Desember 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan isu strategis berdasarkan data primer dan sekunder termasuk serangkaian FGD • Menganalisis kondisi lingkungan hidup dalam lingkup wilayah zonasi • Merumuskan alternative dan strategi sebagai rekomendasi untuk RZWP3K
	<p>Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan Pengelolaan Dampak Dan Risiko Yang Ditimbulkan Oleh Pengelolaan Tailing PT. Freeport Indonesia Dan Pengamanan Ekosistem Sungai, Estuari, Dan Laut Yang Terkait, Kementerian LHK</p> <p>Posisi : Ahli Lingkungan</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Februari –Agustus 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mengkaji kebijakan pemerintahan saat ini dan mencari gap yang ada mencakup kegiatan pengelolaan tailing PTFI dan mengidentifikasi terobosan baru, meningkatkan dan/atau memperkaya kebijakan untuk pengelolaan tailing PTFI dan mitigasi dampak/risiko lingkungan hidup terhadap ekosistem sungai, muara, laut dan masyarakat.</p>
	<p>Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pegunungan Kendeng Yang Berkelanjutan Tahap I dan Tahap II</p> <p>Posisi : Ahli Daya Dukung Lingkungan</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Oktober 2016 – April 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kondisi daya dukung terutama pada sumber daya lahan dan air • Memproyeksikan dampak dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi terkait dengan terbatasnya ketersediaan lahan dan air di lokasi Kendeng • Merekomendasikan strategi pengembangan berbasis kondisi daya dukung lingkungan
	<p>Proyek/Pemberi : Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Pulau Sumatera, BPIW – Kemen PUPR PT Gafa Multi Consultant</p> <p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Juni – Des 2015</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p>
	<p>Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR Kawasan Strategis Propinsi Pantura DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta</p>

	<p>Posisi : Ahli Lingkungan</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Juli – November 2016</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan isu strategis di Kawasan Pantura • Menganalisis dampak potensial dalam usulan pengemangan • Memberikan rekomendasi dari strategi mitigasi dan adaptasi
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan Naskah akademis RPPLH dan Daya Dukung DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta</p> <p>Posisi : Ahli Lingkungan</p> <p>Lokasi/Periode : Juni – Agustus 2015</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis ekoregion DKI Jakarta • Merumuskan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Merekomendasikan infrastruktur tambahan atau infrastruktur lingkungan untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan
	<p>Proyek/Pemberi : Task 6. SEA Preparation for Green Prosperity Project Implementation, MCC Indonesia – Abt - URDI</p> <p>Posisi : Ahli Lingkungan</p> <p>Lokasi/Periode : November 2012 – Juni 2013</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan isu strategis • Menganalisis dampak yang mungkin terjadi dari Green Prosperity Project yang dilakukan di empat kabupaten (Muaro Jambi, Merangin, Mamuju dan Mamasa) • Memberikan rekomendasi
	<p>Proyek/Pemberi : Studi Pengembangan Jaringan Jalan Papua, Departemen PU, Dirjen Bina marga - PT. Margapenta</p> <p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Jayapura, Juli – Des 2009</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis potensi dampak lingkungan yang terjadi dari pengembangan jaringan jalan di Papua • Memberikan rekomendasi ruang terkait dengan lokasi yang sesuai untuk pengembangan jalan di Papua
	<p>Proyek/Pemberi : Peningkatan Kualitas Tata Ruang Melalui Penyediaan RTH di Middle Stream Jabodetabekjur, Dirjen Penataan Ruang, Wil II, Dept PU, PT. Gafa Multi Kons</p> <p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Juli-Des 2009</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan tim analisis • Menganalisis kebutuhan RTH dan isu yang terkait di Kawasan Jabodetabekjur • Merekomendasikan pengembangan kualitas dan kuantitas RTH • Memastikan kualitas laporan
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan Rencana Tata Ruang DAS Einlanden – Digul Papua, Dirjen Penataan Ruang, Wil IV, Dept PU, PT. Gafa Multi Kons</p> <p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Boven Digoel, Agustus – Des 2008</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis data untuk mengidentifikasi daerah yang sesuai untuk pengembangan dan juga wilayah rentan • Merumuskan pola ruang dan struktur ruang • Memberikan rekomendasi strategi adaptasi dan mitigasi
	<p>Proyek/Pemberi : Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dsk (Jayapura dsk), Dirjen Penataan Ruang, Wil IV, Dept PU - PT. BWK</p>

	<p>Posisi : Team Leader</p> <p>Lokasi/Periode : Jayapura, Juli – Des 2006</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Kajian ini fokus pada identifikasi dari sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dan ramah lingkungan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut</p>
	<p>Proyek/Pemberi : Model Perencanaan di Zona Penyangga dan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir di Pulau Kei, Maluku, Dept. Kelautan dan Perikanan - PT Forindo Bangun Konsultan</p> <p>Posisi : Ahli Perencanaan Wilayah</p> <p>Lokasi/Periode : Maluku, Juli 2001 – Desember 2001</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya laut dan pesisir berdasarkan daya dukung lingkungan. • Rencana yang diusulkan telah dirumuskan oleh menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif. • Hasil dari kajian ini digunakan untuk mempersiapkan program pengembangan desa perikanan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
	<p>Proyek/Pemberi : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung Bagian Hulu, Departemen Kehutanan - PT. Duta Rimba</p> <p>Posisi : Ahli Perencanaan Wilayah</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Juli 1997 – Desember 1997</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis perubahan penggunaan lahan dan dampaknya pada ketersediaan air permukaan • Mengusulkan rekomendasi untuk mengendalikan penggunaan lahan di masa yang akan datang dalam rangka mengurangi kejadian bencana banjir di dataran rendah • Mengusulkan program rehabilitasi zona hulu

Triarko Nurlambang – Ahli Kebijakan Publik

Name	Triarko Nurlambang
Contact Details	Mobile: +628129478287 Email : triarko@gmail.com
Date of Birth	January 12, 1963
Education	(2013) <i>PhD in Public Policy</i> , Social and Political Sciences Faculty, University of Indonesia (1994) <i>Master of Arts in Social Sciences (Geography)</i> in The Flinders University of South Australia, Adelaide, Australia (1992) <i>Graduate Diploma in Geography</i> in The Australian National University Graduate Diploma in Geography (1987) <i>Bachelor in Geography</i> , Mathematic and Natural Sciences Faculty, University of Indonesia
Other Training	(2007/8) <i>One year Course on Soft Skills (U-Theory)</i> , Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA
Main Position	<ul style="list-style-type: none"> Lecturer and researcher, University of Indonesia (1988 – now) Lecturer on bachelor program in Geography (FMIPA UI) Lecturer on master program in Geography (FMIPA UI), Disaster Management (SIL-UI), Environmental Science (SIL), and Oceanic Science (FMIPA UI)
Other Job Position	(2015 – 2020) Independent Director (Komisaris Independen) PT (Persero) Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) (2016 - now) Member of Research Center for Disaster Risk and Response UI (2018 – now) Coordinator of SDGs Hub UI (2018 – now) Member of ISER (Institute for Sustainable Earth and Resources) (2015 – now) Vice President of Indonesian Experts on Disaster Association Consultant/ researcher/ trainer
Membership in Professional Societies	(2014 - 2021) Vice head and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert (2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association) (2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union

Employment Record (especially for Disaster/Hazard Management and SEA/Strategic Environmental Assessment and SDGs)

Dates of employment	Name of employing organization	Positions held
2022	SDGs Hub UI and Pegadaian	Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian

2022	SDGs Hub UI and BRI	Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework
2022	SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government	SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning
2021/2022	Asian Development Bank/UCLG	National Consultant for SDGs Snapshot at Sub National Government
2021-2024	BNPB-BMKG-World Bank	Member of Technical Advisor Commission for IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project)
2021	National Standard Agency (BSN)	Member Technical Commission for Disaster Management
2021	National Board for Geospatial Information (BIG)	Consultant (National Roadmap for Geospatial Information Industry)
2021/2022	Palladium (Australia)-BNPB	Consultant (Disaster Risk Assessment in Bangli District, Bali Province)
2013/4 and 2014/5	BNPB	Researcher on Weather Extreme and Disaster Management in Indonesia
2012	UNDP-RCCC (Research Center for Climate Change) UI	Researcher on Climate Change and public health in DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali and Kalimantan Tengah.
2009	The World Bank	Expert member for Climate Resilience Cities Program
2006	Bappenas and UNDP	Team Leader and Regional Development Sp. (Aceh Tsunami Disaster Recovery)

Publications (selected)

No	Publications
1	Nurlambang, Triarko, Hafid Setiadi, dan Nurul, 2008. <i>Assessing Role and Function of Local Coordinator Board on Spatial Planning</i> , The GTZ and Ministry of Home Affairs.
2	Nurlambang, Triarko, and Jeffrey Neilson, 2010. <i>Multi-scalar environmental governance and the emergence of spatial approaches to natural resource management in Indonesia?</i> presented at SEAGA International Conference in Hanoi, Vietnam
3	Nurlambang, Triarko, 2018/19. Geographic And Institution Matters In Achieving Sustainable Development In Indonesia, a book chapter of <i>Dilemmas of regional and local development</i> , Jerzy Bański (editor), Routledge publisher
4	Nurlambang, Triarko and Rudi P. Tambunan, 2021. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam Metode dan Kajian Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, editor Prof Dr. Jatna Supriatna (2021)
5	Nurlambang, Triarko dan David Makes, 2021. Kajian Pariwisata Berkelanjutan, dalam Metode dan Kajian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan, editor Prof Dr Jatna Supriatna (2021)

Sri Handayani – Ahli Lingkungan/ Koordinator RPJMD

Nama	Sri Handayani			
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> MBA, Universitas Gajah Mada, Jakarta, 2013. ST, Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta, 1998. Diploma, Analis Kimia, Akademi Kimia Analis, Bogor, 1994. 			
Pelatihan profesional	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan lapangan ke Pabrik Biogas EnviTec AG di Saerbeck Jerman dan Kawasan Industri di Libramont, 2015 TOT Energy Management, 2013, GIZ Paklim Pelatihan Energy Management System ISO 50001, 2013, UNIDO Study Visit for Waste to Energy to Amsterdam, Sweden and Portugal, 2013, TCF – EU, TOT Leadership Essential, 2012, Centre for Creative Leadership-USA TOT Leadership Beyond Boundaries, Centre for Creative Leadership, 2012, Cambodia Gender Training: kesetaraan gender untuk meningkatkan pelayanan perpipaan air berbasis masyarakat dengan dukungan swasta, 2010, Indonesia Infrastructure Initiative AusAid ToT on Co-Processing focused on the lesson learn of PPP co-processing between GTZ & Holcim, 2009, GTZ Paklim. Pelatihan OHSAS 18001, 2009, Neville Clarke Indonesia Training on Organizational Development 1-5 Modules – 2007-2008, COMO Consulting & PRAXISS TOT Environmental Management Accounting, 2006 Bangkok Training on Results Chain Management, 2006, Germany TOT tentang Environmental Navigator Management, 2005, Germany TOT Environmental Performance Indicator, 2005, Bangkok 			
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa Asli		
	Inggris	Fasih	Fasih	Fasih
	Jerman	Baik	Baik	Baik
Pengalaman Profesional	Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 2016 – Present, PT.Dharma Ina Mandiri (DIM), as Director & Owner 2018 – 2020, USAID Lestari, as SEA Specialist for project: Assistances of SEA for Spatial Planning for 3 Regencies (Mappi, Boven Digoel, Mimika). 2019, UNDP, Preparation of the Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Stoctaking Report, as Team Leader 2017-2018, UNDP – Mol, Expert on Facilitation of Profiling GHG Emissions 2016-2018, ESP3 Danida in cooperation with MoEF and MoHA, as Environmental Expert, Capacity Building Specialist and Backstopping Management for various assignment such as Strategic Environmental Assessment (SEA) and Municipal Solid Waste Management 2017-2018, WWF- MCAI – Supporting SEA Taskforce of Dharmasraya, as Deputy Team leader 2016, GIZ PAKLIM – Weber Consulting – Ministry of Industry, as National consultant for Industrial Park & Facilitation on several workshops; 2016, UNIDO – water stewardship project, as Co-moderator on series of stakeholders' engagement; 2015-2016, CI Indonesia – USAID, as Team Leader; 2015, Ministry of Climate and Energy, The Danish Energy Agency, as Project Manager; 2015, DANIDA – HN Consultant, as Team Member of Revision Mission; 2015, PT. Herfinta Farm & Plantation, as Project Development team 2014, ICF Inc., LLC, as Team Leader & Lead Facilitator; 2014, GOPA – European Union, as Co-Trainer; 2014, The Apex Consulting, as Co-Trainer; 2014, GOPA – European Union, as Focal point of Component 6 Energy 2013, GIZ PAKLIM, as Facilitator for Energy Mapping; 2013, GOPA-European Union, as Senior Energy Associates; 2013, UNIDO, as PPG Consultant for GEF; 2013, AMC-European Union, as Project Manager for Sustainable Consumption Production – Sub Project 01; 2013, MoE and GIZ PAKLIM, Lead facilitator during Networking Meetings of DPP Adidas regarding Energy Conservation for Industries; 2013, GIZ-PROTECTS, as Lead Trainer for Tsunami Disaster Risk Reduction; 2013, PT. Herfinta Farm and Plantation, as Team Leader for Change Company Cultural; 2013, PREMANet Indonesia, as Expert Pool 2012, The Royal Danish Embassy, as Team Leader to implement Capacity Building on Strategic Environmental Assessment; 2012, The Royal Danish Embassy, as Capacity 		

	<p>building expert/Environmental Management; 2012, GIZ-RED, as appraisal team member for Regional Economic Development; 2012, Jakarta Islamic Center (JIC), Radix Training Centre, as Lead Trainer for Capacity Building on Facilitation and Communication.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2011, The Royal Danish Embassy, as Capacity Building Expert & Environmental Management for Strategic Environmental Assessment; 2011, SMEC Pty Ltd, as Backstopping on project management for Water Supply Program; 2011, UNEP-RISO-BPPT, National Consultant for the implementation of Cleaner Production • 2010-2015, PT. Dazya Ina Mandiri, as Managing Partner • 2010, GTZ-International Services (GITEWS), as Lead Trainer to encourage Local Facilitator to deliver Tsunami Disaster Risk Reduction into community • 2009, GOPA, as Coordinator Consultant • 2006, GTZ ProLH, as Capacity Building Expert for Indonesia Cleaner Production Centre • 2003, GTZ ProdukSIH, as Consultant for Indonesia Cleaner Production Centre • 2002, ASEAN Sekretariat, as Consultant • 2001, BAKORNAS PB, UNDP, OCHA, as Ass. Project Manager
Pengalaman Proyek (pilihan)	<p>Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
	<p>Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangunan Palembang Baru)</p> <p>Posisi : Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2021</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS Kepelabuhanan Tanjung Carat 2021 Kementerian Perhubungan dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p>
	<p>Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026</p> <p>Posisi : Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Merauke / 2021</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii)</p>

	<p>perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p>
	<p>Proyek : Bantuan Teknis untuk KLHS RTRW di 3 Kabupaten di Provinsi Papua (Mimika, Mappi, dan Boven Digoel), Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Mimika, Mappi, dan Boven Digoel, Provinsi Papua, 2018 - 2020 Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas Pokja KLHS • Mendukung Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS untuk Revisi RTRW • Supervisi Pokja KLHS untuk penerapan KLHS berdasarkan peraturan yang terbaru • Menyediakan penjaminan kualitas dalam laporan proyek
	<p>Proyek : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah, KLHK Posisi : Penyunting laporan KLHS Lokasi/Periode : Jakarta / 2020 Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Tujuan Penyusunan KLHS Cepat ini adalah yaitu untuk memformulasikan berbagai strategi perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program pengembangan pangan nasional di areal eks-PLG tersebut dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktifitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan lahan pangan nasional salah satunya dimaksudkan sebagai prevensi potensi krisis pangan global akibat pandemi COVID-19.</p> <p>Dalam penyusunan KLHS ini ditugaskan untuk membantu POKJA KLHS KLHK dalam penyusunan laporan KLHS mencakup perbaikan draft dokumen KLHS berdasarkan hasil kajian POKJA KLHS KLHK. Perbaikan draf mencakup reformulasi isu strategis, alternative perbaikan dan rekomendasi sehingga menjadi dokumen KLHS dengan kualitas baik.</p>
	<p>Proyek : Kajian Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara (KLHS IKN), KLHK Posisi : Penyunting Lokasi/Periode : Jakarta, Januari – Februari 2020 Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Melakukan perbaikan draft dokumen KLHS IKN berdasarkan hasil kajian POKJA KLHS IKN KLHK. Perbaikan draf mencakup reformulasi isu strategis, alternative perbaikan dan rekomendasi sehingga menjadi dokumen KLHS dengan kualitas baik.</p>
	<p>Proyek : Penyempurnaan Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. PT. Azevedoprata Consultants Posisi : Tenaga Ahli Penyusun Lokasi/Periode : Jakarta, Januari 2020 – Maret 2020 Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Penyempurnaan laporan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilaksanakan oleh PT.Azevedoprata Consultants, sehingga informasi kartografi dapat dijadikan dasar perumusan rekomendasi. Lingkup kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran profil wilayah kajian • Penyempurnaan deskripsi dan analisis kualitatif profil • jasa lingkungan hidup • Penyempurnaan deskripsi metodologi kajian & hasil • analisis spasial daya dukung air permukaan • Penyusunan rekomendasi

	<p>Proyek : KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Sintang, Agustus 2019 - Januari 2020</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Melakukan penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan, sebagai salah satu KRP yang wajib dilaksanakan KLHS mengingat luasan pemanfaatan ruang yang potensial untuk perkebunan diatas 500.000 Ha. Mengkaji kesesuaian lahan & ruang untuk lima komoditas unggulan karet, sawit, lada, kopi, dan coklat.</p>
	<p>Proyek : Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari</p> <p>Posisi : Penyusun</p> <p>Lokasi/Periode : Sintang, Desember 2019 - Januari 2020</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Melakukan perbaikan draft dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Menganalisis kondisi wilayah, komoditas perkebunan, sumberdaya manusia, kelembangaan, kawasan perkebunan, keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir, sarana dan prasarana, penanaman modal, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Menyusun skenario pengelolaan perkebunan, roadmap, kebijakan, dan mengkaji potensi pengelolaan perkebunan untuk lima komoditas unggulan (karet, sawit, lada, kopi dan coklat). Mengintegrasikan hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam Rencana Induk sebagai aspek pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan</p>
	<p>Proyek : Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Rencana Aksi Kabupaten Lombok Utara yang lebih spesifik fokus pada Pulau Gili, Provinsi NTB, Indonesia, ESP3-Danida</p> <p>Posisi : Community/Public Sp.</p> <p>Lokasi/Periode : Lombok Utara, Juli 2018 - Februari 2019</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Melakukan penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan untuk Kabupaten Lombok Utara, termasuk rencana aksi 4 tahunan dengan inisiatif tiap langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh DLHPKP, dan Rencana Aksi spesifik untuk Pulau Gili, termasuk inisiatif untuk perbaikan pengumpulan, pra-pemrosesan setempat, dan persiapan untuk daur ulang, pengangkutan sampah dari pulau, pengolahan di pulau, dan pembuangan akhir. Melaksanakan serangkaian FGD di tingkat komunitas (Kepulauan Gili) untuk mengkaji kebutuhan pengelolaan sampah yang relevan.</p>
	<p>Proyek : Penyusunan Buku Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional, KLHK</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli Penyusun</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, October 2018 – June 2019.</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan rancangan konsep buku informasi dan melakukan diskusi intensif dengan KLHK dalam proses penyusunannya • Mengembangkan konten informasi yang akan disampaikan dalam buku tersebut berdasarkan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.
	<p>Proyek : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS Cepat) untuk Terobosan Kebijakan Pengamanan atas Dampak dan Resiko yang ditimbulkan PT. Freeport Indonesia, didanai oleh Pemerintah melalui KLHK</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Mei 2018 – Oktober 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengulas kebijakan yang sudah ada dengan menganalisis data sekunder dan melaksanakan FGD terbatas dengan beberapa narasumber. • Mengulas pengumpulan data dari tim AMDAL dan bagian hukum yang melaksanakan

	<p>survei lokasi pada bulan April - Mei 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengulas literatur praktik terbaik, dokumen lingkungan, dan berbagai studi sebagai benchmarking approach. • Menyusun laporan KLHS.
	<p>Proyek : Pelatihan KLHS untuk Pokja KLHS di Provinsi Papua, WWF Indonesia</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS/Pelatih</p> <p>Lokasi/Periode : Jayapura, 7-11 Mei 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merancang metodologi pelatihan untuk Pemerintah Daerah tentang KLHS • Menyusun materi pelatihan • Menyusun rencana moderasi (rincian metodologi pelatihan, semua yang terkait penyampaian pelatihan, materi, agenda) • Memberikan pelatihan • Melakukan penjaminan mutu untuk laporan pelatihan
	<p>Proyek : Fasilitasi Pelaksanaan KLHS untuk RTRW Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat, WWF Indonesia dan MCAI USAID</p> <p>Posisi : Deputy Team Leader, pakar KLHS & Peningkatan Kapasitas.</p> <p>Lokasi/Periode : Dhamasraya, 2017 - 2018</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas untuk Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS Berpikir Strategis • Membantu Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS Revisi RTRW • Memimpin proses pelibatan pemangku kepentingan • Menghubungkan dan koordinasi secara langsung kepada klien • Memastikan progress pelaksanaan proyek sesuai jadwal • Bertanggungjawab untuk kegiatan pemantauan selama proyek • Melakukan penjaminan mutu laporan proyek
	<p>Proyek : Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman Umum dan pedoman KLHS, KLHK</p> <p>Posisi : Backstopping Management.</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2016 - April 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <p>Mendukung KLHK Direktorat PDLKWS untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam menyusun pedoman KLHS. Bersama-sama dengan KLHK di berbagai Direktorat Jenderal terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan KLHS sebagai turunan PP 46/2016 tentang Penyelenggaraan KLHS. Melaksanakan lokakarya pembahasan pedoman KLHS dengan pemangku kepentingan terkait lainnya (K/L terkait, LSM, Mitra Internasional yang menjalankan percontohan KLHS di daerah, Universitas/Akademisi, praktisi).</p>
	<p>Proyek : ToT KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan: Roll Out di Medan dan Makassar (Ambon), ESP 3- DANIDA</p> <p>Posisi : Ketua Tim dan Tenaga Ahli KLHS</p> <p>Lokasi/Periode : Ambon Dan Makassar, 2017</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan studi literatur KLHS tentang tahapan dan prosedur serta pendekatan KLHS, khususnya literatur yang ditulis oleh para ahli KLHS baik nasional maupun internasional. • Merencanakan dan mengatur kegiatan dari keseluruhan penugasan, seperti pertemuan dan pelatihan yang diperlukan. Memastikan bahwa tim Master Trainers siap berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas. • Mengembangkan modul KLHS (materi pelatihan) bekerja sama dengan Master Trainer dari ToT sebelumnya. • Melaksanakan dan mengawasi ToT untuk ERC. • Berkoordinasi dengan Direktorat PDLKWS KLHK, BKPSL dan ESP3 selama pelaksanaan kegiatan.
	<p>Proyek : Menyusun Metode Peningkatan KLHS untuk Kemendagri, didanai oleh The Royal Danish Embassy</p>

Posisi : Pakar Peningkatan Kapasitas & Pengelolaan Lingkungan

Lokasi/Periode : Jakarta, Mei – Desember 2011

Deskripsi Pekerjaan :

- Melaksanakan pelatihan untuk pelatih
- Melaksanakan FGD Pembangunan Berkelanjutan untuk Rencana Pembangunan Daerah
- Berkoordinasi dengan Team Leader terkait persiapan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi proyek KLHS.

Agista Hijri Rakhmadani – Ahli Lingkungan

Data Personal

Nama : Hijri Agista Rakhmadani
Email : gista@dharmainamandiri.com
Kontak : 081210227407

Pendidikan Formal

2007 - 2011 S1 Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang .

Bahasa

	Berbicara	Membaca	Mendengar
Indonesia	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
English	Cukup	Baik	Cukup

Training/Seminar/Workshop/Kursus

- 2021 Bimtek Pendampingan Penyusunan KLHS RPJMD, DLHK Provinsi Papua dan GGGI.
- 2013 Workshop Waste to Energy, Development of Renewable Energy and Agrowaste to Energy. EIBD (EU – Indonesia Business Dialogue). Jakarta
- Workshop Green Solution for Manufacturing Industry. Sustainable Business Dialogue – GIZ PAKLIM. Jakarta
- Executive Briefing dalam Sistem Manajemen Energi ISO 50001 dan Sistem Optimasi pada Industri. UNIDO. Jakarta.
- Pelatihan Fasilitasi, Komunikasi dan Manajemen Proyek. PT. Dazya Ina Mandiri dan DPF. Bogor. Basic Energy Mapping Training. GIZ PAKLIM – Jababeka. Bekasi
- Workshop CEO – ISO 50001 oleh TUV Rheinland
- 2012 Workshop Kerangka Logika DPF. PT Dazya Ina Mandiri dan DPF. Jakarta. Workshop Standarisasi Konsep Buku Panduan. BNPB dan AusAID. Jakarta. Adobe Design
- 2010 autoCAD 2D

Pengalaman Kerja

TAHUN	DESKRIPSI
2021	Proyek: Studi Pemetaan Program Aksi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah Plastik di DKI Jakarta, Depok, dan Bogor Posisi: Analis Data Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung. Melakukan studi literatur. Mempersiapkan materi FGD. Membantu ahli utama melakukan identifikasi potensi kolaborasi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menyusun laporan akhir studi pemetaan dan hasil workshop/FGD.
2020	Proyek: Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 DKI Jakarta Posisi: Analis Data dan Ahli Muda Lingkungan Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung Melakukan studi literatur Melakukan analisis kualitas air, air laut, dan udara Menyusun laporan akhir IKLH 2020 Proyek: Penyusunan Revisi KLHS Provinsi DKI Jakarta Posisi: Ahli Muda KLHS Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung

TAHUN	DESKRIPSI
	<p>Melakukan studi literatur</p> <p>Menyusun analisis 6 muatan KLHS berdasarkan ketersediaan data sekunder mencakup (1) analisis daya dukung lingkungan hidup, (2) analisis efisiensi sumber daya alam berdasarkan ekosistem, (3) mendeskripsikan tingkat kerentanan dan sensitifitas wilayah terhadap dampak perubahan iklim termasuk identifikasi risiko bencana, (4) identifikasi dampak lingkungan hidup, (5) identifikasi kinerja jasa ekosistem, (6) analisis tingkat kerentanan kehati.</p> <p>Proyek: Penyusunan Kajian Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta.</p> <p> Posisi: Tim Penulis – Analis Data</p> <p> Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri & PT. Azevedo</p> <p> Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Tugas:</p> <p>Mengumpulkan data-data pendukung</p> <p>Melakukan studi literatur</p> <p>Perbaikan draft kajian awal disesuaikan dengan input dari KLHK, mencakup perbaikan analisis spasial yang akan digunakan sebagai basis untuk menyusun rekomendasi bagi Provinsi DKI Jakarta. Lingkup kegiatan meliputi narasi hasil analisis spasial status daya dukung air, pengkinian data profil DKI Jakarta, analisis jasa lingkungan hidup yang dikaitkan dengan daya dukung air di Jakarta (jasa penyedia air, pengaturan air, pengaturan iklim, dan pengaturan banjir), serta penyusunan rekomendasi</p>
2019	<p>Proyek: Penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan untuk Kabupaten Sintang.</p> <p> Posisi: Ahli Muda KLHS</p> <p> Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri</p> <p> Klien: WWF Indonesia – Sintang Lestari</p> <p>Tugas:</p> <p>Mengumpulkan data-data pendukung</p> <p>Melakukan studi literatur</p> <p>Membantu Pakar KLHS untuk mengkaji kesesuaian lahan dan ruang untuk lima komoditi utama yaitu karet, kelapa sawit, lada, kopi, dan coklat.</p> <p>Melakukan analisis 6 muatan KLHS mencakup (1) analisis daya dukung lingkungan hidup, (2) analisis efisiensi sumber daya alam berdasarkan ekosistem, (3) mendeskripsikan tingkat kerentanan dan sensitifitas wilayah terhadap dampak perubahan iklim termasuk identifikasi risiko bencana, (4) identifikasi dampak lingkungan hidup termasuk status tumpang tindih lahan, (5) identifikasi kinerja jasa ekosistem, (6) analisis tingkat kerentanan kehati.</p> <p>Proyek: Penyusunan Buku Informasi Status Daya Dukung Air Nasional 2019</p> <p> Posisi: Asisten Penulis dan Desain Grafis</p> <p> Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri</p> <p> Klien: KLHK</p> <p>Tugas:</p> <p>Pengumpulan data pendukung dan mengilustrasikan data-data tersebut dalam bentuk infografis.</p> <p>Membantu penulis utama untuk mendeskripsikan tujuan penetapan daya dukung air nasional yang mencakup metodologi, langkah penyusunan daya dukung air nasional, dan pemanfaatan dari informasi tersebut.</p>
2018	<p>Proyek: ESP3 – Danida, Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan untuk Magelang Raya, DKI Jakarta</p> <p> Posisi: Technical Support – Analis Data</p> <p> Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri</p> <p> Klien: ESP3 - Danida</p> <p>Tugas:</p> <p>Pengumpulan data pendukung.</p> <p>Studi literatur dan menyusun rangkuman aspek peraturan dan kebijakan daerah implementasi pengelolaan persampahan.</p> <p>Editor untuk terminology teknis dari translasi laporan akhir.</p> <p>Asisten koordinator untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan tim.</p> <p>Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek untuk audit.</p>
2016 - 2017	<p>Proyek: Pameran Nasional KLHS Indonesia 2017</p> <p> Posisi: Exhibitor</p> <p> Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri</p> <p> Klien: ESP3 - Danida</p> <p>Tugas:</p>

TAHUN	DESKRIPSI
	<p>Menyusun materi pameran pelaksanaan pendampingan penyusunan KLHS yang dilakukan oleh perusahaan.</p> <p>Proyek: KLHS RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Posisi: Technical Support – Analis Data Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: WWF - USAID Tugas: Menyiapkan data-data pendukung. Asisten tim penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD Kab. Dharmasraya Menyusun proposal rangkaian kegiatan pendampingan KLHS dan perencanaan anggaran. Koordinator untuk update kemajuan proses KLHS. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan pelatihan KLHS dan kegiatan pendampingan.</p> <p>Proyek: ESP3 – Danida, Revisi Master Plan Pengelolaan Persampahan mempromosikan teknologi ITF, DKI Jakarta Posisi: Technical Support – Analis Data Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: ESP3 - Danida Tugas: Menyusun laporan akhir revisi master plan persampahan khususnya terkait kondisi eksisting pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan ringkasan kebijakan terkait implementasi persampahan di DKI Jakarta. Pengumpulan data sekunder dan site visit. Asisten koordinator tim dan tenaga pendukung lapangan. Observasi kegiatan fasilitasi. Menyusun laporan kegiatan pendampingan. Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.</p> <p>Proyek: ESP3 – Danida, Pedoman Umum KLHS Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: ESP3 - Danida Tugas: Asisten koordinator tim pendamping. Asisten editor laporan proyek. Asisten tenaga pendukung untuk pendampingan teknis penyusunan RapermenLHK KLHS 69/2017. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan kegiatan pendampingan. Merancang dan menyusun Katalog KLHS 2017 untuk publikasi.</p> <p>Proyek: ESP3 – Danida, Pendampingan Teknis KLHS RTRW Kabupaten Temanggung, Sukoharjo dan Magelang, Provinsi Jawa Tengah Posisi: Technical Support – Analis Data Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: ESP3 - Danida Tugas: Koordinator tim pendamping dan update kemajuan KLHS yang dilaksanakan 3 Kabupaten. Asisten editor laporan akhir KLHS RTRW 3 Kabupaten. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan pelatihan KLHS serta laporan kegiatan selama proses pendampingan Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.</p> <p>Proyek: ESP3 – Danida, Bantuan Teknis untuk Kemendagri terkait Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah Posisi: Liaison Officer Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: ESP3 - Danida Tugas: Koordinator tim pendamping dan update kemajuan KLHS yang dilaksanakan 6 Kabupaten dengan tim pendamping dari 2 perusahaan konsultan. Asisten editor laporan akhir pembelajaran KLHS 6 Kabupaten. Menyusun laporan hasil pendampingan.</p>

TAHUN	DESKRIPSI
2015	<p>Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.</p> <p>Proyek: ESP3 – Danida, Pendampingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Temanggung, Sukoharjo dan Magelang, Provinsi Jawa Tengah Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri Klien: ESP3 - Danida Tugas: Koordinator tim pendamping dan update kemajuan KLHS yang dilaksanakan 3 Kabupaten. Asisten editor laporan akhir KLHS RTRW 3 Kabupaten. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan pelatihan KLHS serta laporan kemajuan kegiatan selama proses pendampingan Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.</p> <p>Proyek: Pelatihan KLHS RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: Conservation International Tugas: Terlibat dalam penyusunan materi pelatihan KLHS RTRW. Asisten fasilitator pelatihan KLHS. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan KLHS. Menyusun laporan pelatihan KLHS.</p> <p>Proyek: Pendampingan Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: Conservation International Tugas: Asisten tim penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara. Asisten editor laporan akhir KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan KLHS. Menyusun laporan pelatihan KLHS serta laporan kemajuan kegiatan selama proses pendampingan Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.</p>
2014	<p>Proyek: Peningkatan Akses Sanitasi dan Penguatan UKM melalui Skema Kredit Mikro di Tiga Kabupaten di Provinsi Banten Posisi: Ahli Muda Sanitasi Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: IUWASH – USAID Tugas: Identifikasi dan survey potensi pasar dan potensi UKM sanitasi di wilayah pedesaan. Studi literatur dan menyusun rancangan desain sanitasi berdasarkan input dari IUWASH dan standar Dinas PU. Menyusun laporan teknis termasuk perkiraan budget konstruksi untuk akses sanitasi. Menyusun materi-materi presentasi untuk kegiatan workshop/pelatihan/fasilitasi. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun draft laporan akhir peningkatan akses sanitasi dan penguatan UKM. Editor dan layout desain laporan dan form administratif.</p> <p>Proyek: Asia LEDS Forum 2014 Posisi: Learning Management Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: USAID LEAD Tugas: Persiapan logistik forum international. Desain publikasi kit dan perlengkapan acara. Administrasi lapangan selama proses workshop. Pengolahan data peserta untuk keperluan laporan akhir. Asisten editor dan layout desain laporan akhir.</p> <p>Proyek: Studi Kelayakan Proyek SWAN Indonesia Posisi: Technical Support</p>

TAHUN	DESKRIPSI
	<p> Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: SEAMEO RECFON – ILSI Japan Tugas: Survey dan sampling sumber daya air potensial dalam rangka melakukan pemilihan lokasi percontohan. Menyusun draft laporan studi kelayakan dan laporan survey lapangan dalam rangka peningkatan sistem penyediaan air di wilayah pedesaan. Dokumentasi kegiatan</p> <p>Proyek: Pelatihan Dasar Green Jobs Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: ILO (International Labour Organization) Tugas: Penyusunan materi-materi pelatihan dan penyiapan bahan pelatihan sesuai rencana moderasi pelatihan. Notulensi kegiatan pelatihan. Membuat draft laporan akhir pelatihan. Asisten editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Pengelolaan logistik untuk kegiatan pelatihan.</p> <p>Proyek: Fasilitas Musyawarah Subak Bali – Sistem Pengelolaan Lanskap Budaya Bali Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: Stockholm Environment Institute (SEI) Tugas: Terlibat dalam penyusunan materi fasilitas MusBak Notulensi kegiatan fasilitas. Menyusun draft laporan akhir fasilitas. Asisten editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Pengelolaan logistik untuk kegiatan fasilitas.</p>
2013	<p>Proyek: Partisipasi Pelanggan PDAM Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: IUWASH - USAID Tugas: Asisten fasilitator untuk memfasilitasi pertemuan partisipasi pelanggan PDAM. Notulensi kegiatan fasilitas. Menyusun draft laporan akhir fasilitas. Editor dan layout laporan akhir fasilitas. Dokumentasi kegiatan. Asisten logistik untuk kegiatan fasilitas.</p> <p>Proyek: Pelatihan Leadership Beyond Boundaries Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: IFAD, APMAS dan AIT Tugas: Terlibat dalam penyusunan materi pelatihan Leadership Beyond Boundaries. Notulensi kegiatan pelatihan. Menyusun laporan akhir pelatihan. Editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Pengelolaan logistik untuk kegiatan pelatihan.</p> <p>Proyek: Fasilitas Pelatihan Pemetaan Energi – DPP Jababeka Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: DPP Jababeka – GIZ Paklim Tugas:</p>

TAHUN	DESKRIPSI
	<p>Asisten untuk kegiatan fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi. Menyusun laporan hasil fasilitasi.</p> <p>Proyek: Fasilitasi Networking Meeting 3 – DPP Adidas Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: DPP Adidas – GIZ Paklim Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi. Menyusun laporan hasil fasilitasi.</p> <p>Proyek: Promosi Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan pada IKM di Indonesia Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: UNIDO Tugas: Pengumpulan data-data pendukung. Asisten untuk mereview materi hitungan konsumsi energi untuk industri kecil menengah.</p> <p>Proyek: Produksi Konsumsi yang Berkelanjutan, Studi Baseline Proyek SCP di Indonesia Posisi: Technical Support – Asisten Editor Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: European Union Tugas: Pengumpulan data-data pendukung studi baseline proyek Sustainable Consumption Production (SCP). Asisten editor dan layout laporan akhir proyek.</p> <p>Proyek: Revisi Modul FaTmi dan KaTsumi Posisi: Editor dan Layout Design Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: GIZ Tugas: Terlibat dalam proses penyusunan modul Fasilitator Tsunami dan Kader Tsunami. Editor modul untuk publikasi. Desain draft layout detail modul publikasi.</p>
2012	<p>Proyek: ESP 2 – Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Daerah, Proyek Percontohan Posisi: Technical Support dan Administrasi Lapangan Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: The Royal Danish Embassy Tugas: Notulensi kegiatan pelatihan dan pertemuan/workshop tim. Asisten editor dan layout laporan akhir pendampingan KLHS dan laporan kegiatan. Asisten administrasi lapangan dan asisten logistic untuk kegiatan pelatihan/workshop/seminar Desain untuk training kit.</p> <p>Proyek: ESP 2 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Pemahaman Pemda terhadap KLHS Posisi: Technical Support, Staf Administrasi dan Desain Publikasi Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: The Royal Danish Embassy Tugas: Asisten tim penyusunan Rapermendagri KLHS RPJMD. Notulensi keseluruhan kegiatan pelatihan. Asisten editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Merancang desain untuk seluruh media publikasi dan training kit.</p>

TAHUN	DESKRIPSI
	<p>Pengelolaan logistik dan administrasi lapangan untuk kegiatan pelatihan/workshop/launching.</p> <p>Proyek: Pendekatan Pembangunan Ekonomi Hijau Posisi: Technical Support – Asisten Editor Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: GIZ Regional Economic Development Tugas: Pengumpulan data-data pendukung penyusunan laporan. Layout laporan proyek.</p> <p>Proyek: Pelatihan Spiritual dan Manajemen Budaya Perusahaan Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: Herfinta Group – Medan Tugas: Persiapan materi pelatihan. Notulensi kegiatan pelatihan. Dokumentasi seluruh kegiatan. Desain konsep video sebagai laporan akhir proyek. Editor dan layout laporan akhir proyek. Menyusun draft desain training kit dan perlengkapan. Administrasi dan pengaturan logistic untuk kegiatan fasilitasi.</p> <p>Proyek: Pelatihan Fasilitator Tsunami (FaTmi) dan Kader Tsunami (KaTsumi) Posisi: Technical Support – Asisten Editor Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: GIZ PROTECTS Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas/pemahaman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Pemerintah Daerah. Terlibat dalam penyusunan materi presentasi dan pelatihan. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Penyusunan laporan hasil pelatihan/workshop/fasilitasi. Merangkum seluruh rekomendasi untuk materi revisi modul FaTmi dan KaTsumi untuk publikasi.</p> <p>Proyek: Revisi Pendekatan dan Modul untuk Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami (ToF dan ToT) Posisi: Technical Support – Asisten Editor Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: GIZ – PROTECTS GITEWS Tugas: Asisten editor dan layout desain modul pelatihan untuk materi ujicoba pelatihan FaTmi dan KaTsumi.</p> <p>Proyek: Fasilitasi Networking Meeting 1 – DPP Adidas Posisi: Technical Support Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: DPP Adidas – GIZ Paklim Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi. Penyusunan laporan hasil fasilitasi.</p>
2011	<p>Proyek: IndII SGP Project Indonesia – Proyek Generasi Kedua Posisi: Technical Support – Internship Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri Klien: SMEC – AusAID Tugas: Pendokumentasian data lapangan.</p>

TAHUN	DESKRIPSI
	<p>Asisten editor dan layout laporan akhir pekerjaan konsultansi proyek SGP yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat.</p> <p>Editing media publikasi seperti banner dan bahan untuk input ke draft website proyek.</p> <p>Proyek: ESP 2 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Output 2.3</p> <p> Posisi: Technical Support – Internship</p> <p> Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri</p> <p> Klien: Sucofindo Jakarta dan The Royal Danish Embassy (Danida)</p> <p>Tugas:</p> <p>Asisten untuk kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas/pemahaman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Menyiapkan bahan-bahan presentasi dan pelatihan.</p> <p>Dokumentasi kegiatan.</p> <p>Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan.</p> <p>Membuat ringkasan hasil pelatihan/workshop/fasilitasi.</p> <p>Proyek: Pelatihan Manajemen dan Pelatihan untuk Pelatih</p> <p> Posisi: Technical Support - Internship</p> <p> Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri</p> <p> Klien: Jakarta Islamic Centre</p> <p>Tugas:</p> <p>Asisten selama proses kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas.</p> <p>Persiapan materi pelatihan.</p> <p>Dokumentasi kegiatan.</p> <p>Observasi secara keseluruhan kegiatan fasilitasi.</p> <p>Membuat laporan hasil pelatihan dan fasilitasi.</p>

Dwi Nurcahyadi – Ahli Lingkungan

1. Nama Personel : Dwi Nurcahyadi, S.Si
2. Pekerjaan : Peneliti/Dosen
3. Tempat / tanggal lahir : 20 Agustus 1979
4. Kontak (Telepon/email) : 081280088278 / dnugeoui@gmail.com
5. No. Identitas : 3275012008790036
6. Alamat : Jl. Hikmah Blok D No. 10 Bekasi Mede RT 011 RW 002 Kel. Bekasi Jaya,
Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Pendidikan formal : Sarjana Sains Bidang Geografi – Universitas Indonesia
8. Pendidikan non formal : Pelatihan SEA – ITC University of Twente
9. Penguasaan bahasa
 - a. Bahasa Indonesia : Baik
 - b. Bahasa Inggris : Baik
10. Pengalaman kerja :

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun	Nilai	Instansi Pengguna
1.	Bantuan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR – KSP) Kabupaten Merauke dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Papua	2019	-	WWF Indonesia
2.	KLHS RDTR Provinsi DKI Jakarta	2019	-	DTK Provinsi DKI Jakarta
2.	Kebijakan Satu Peta – Peneliti Penggunaan Lahan Berkelanjutan	2019	-	WRI Indonesia
3.	Penilaian Kebutuhan Pengguna Basis Data SDGs Provinsi Riau	2019	-	UNDP
4.	Bantuan Teknis Penyusunan KLHS PK RTRW Provinsi Papua	2018	-	WWF Indonesia
5.	Bantuan Teknis Penyusunan KLHS RTRWK Dharmasraya – Provinsi Sumatera Barat	2017	-	DIM – WWF Indonesia
6.	Bantuan Teknis Penyusunan KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah	2016	-	DIM-INTEGRA-Denmark
7.	Penyusunan KLHS MP3EI	2013	-	Integra DHI-Denmark
8.	Penyusunan KLHS RPMD Provinsi DKI Jakarta	2012	-	Bappeda Provinsi DKI Jakarta
9.	Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Cilegon	2012	-	Bappeda Kota Cilegon
10.	Penyusunan KLHS RTR Pulau Papua dan Maluku	2011	-	KLH
11.	Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Pengembangan Bandar Udara di Metropolitan Jakarta	2011	-	JICA
12.	Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Pengembangan Pelabuhan di Metropolitan Jakarta	2011	-	JICA
13.	Penyusunan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta	2010	-	Bappeda Provinsi DKI Jakarta
14.	Penyusunan KLHS Pantura Provinsi DKI Jakarta	2009	-	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

URAIAN PENGALAMAN KERJA

1. Pengguna Jasa	: WWF Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Kawasan Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR – KSP) Kabupaten Merauke dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Papua
4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perundang-undangan bersama Pokja KLHS Provinsi Papua.

5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi Papua
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2019 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: WRI Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Kebijakan Satu Peta – Peneliti Penggunaan Lahan Berkelanjutan
4. Lingkup Pekerjaan	: Memberikan masukan kepada WRI Indonesia dan Pemerintah Daerah yang ada dalam fasilitasnya dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS.
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2019 (12 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: UNDP – Kantor Riau
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Kajian Kebutuhan Basis Data SDGs Provinsi Riau
4. Lingkup Pekerjaan	: Melakukan kajian kebutuhan pengguna data SDG's Provinsi Riau untuk mendukung penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi Riau
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi Riau
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2018 (1 Bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA SIG dan Pembangunan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: WWF Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuan Teknis Penyusunan KLHS PK RTRW Provinsi Papua
4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perundang-undangan bersama Pokja KLHS Provinsi Papua.
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi Papua
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2018 (8 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: WWF Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Dharma Ina Mandiri
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuk Teknis untuk penyusunan KLHS PK RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya – Provinsi Sumatera Barat

	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perundang-undangan bersama Pokja KLHS Kabupaten Dharmasraya
4. Lingkup Pekerjaan	
5. Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Dharmasraya
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2017 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: ESP3 DANIDA Denmark
2. Nama Perusahaan	: DIM -INTEGRA
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuan Teknis dalam penyusunan KLHS RTRWK Provinsi Jawa Tengah
	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perundang-undangan bersama Pokja KLHS di Kab. Sukoharjo, Kab. Magelang dan Kab. Temanggung
4. Lingkup Pekerjaan	
5. Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sukoharjo, Magelang, dan Temanggung
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2016
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: ESP 3 DANIDA Denmark
2. Nama Perusahaan	: DHI
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS MP3EI
	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS MP3EI untuk memastikan terjaganya kualitas lingkungan koridor MP3EI
4. Lingkup Pekerjaan	
5. Lokasi Kegiatan	: Koridor Sumatera dan Jawa
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2013 (3 Bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta
	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
4. Lingkup Pekerjaan	
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi DKI Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2012 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: Bappeda, Kota Cilegon
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RTRW Kota Cilegon
	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
4. Lingkup Pekerjaan	

5. Lokasi Kegiatan	: Kota Cilegon Provinsi Banten
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2012 (3 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keuangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: KLH
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RTRW Pulau Papua & Maluku
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keuangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: JICA
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Bandara di Metoroplitan Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu pengguna jasa dan pemangku kepentingan untuk melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta Raya
6. Nilai Kontrak	: 400.000.000
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (4 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keuangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: JICA
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Pelabuhan di Metoroplitan Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu pengguna jasa dan pemangku kepentingan untuk melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta Raya
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (4 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keuangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi DKI Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -

7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: BPLHD Provinsi DKI Jakarta
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS Pantai Utara Jakarta Provinsi DKI Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi DKI Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2009 (3 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

Haditya Pradana – Ahli D3TLH

Nama	Haditya Pradana			
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Malang 2014 			
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa Asli		
	Inggris	Baik	Baik	Baik
Pengalaman Kerja Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 - 2018, WWF Indonesia Kantor Boven Digoel, Staff GIS • 2015 - 2016, WWF Indonesia Kantor Wasior, Kab. Teluk Wondama, Staff GIS • 2014 - 2015, WWF Indonesia Kantor Tambrauw, Staff GIS • 2013, Taman Nasional Bali Barat On-the-job training in West Bali National Park, Internship 			
Pengalaman Proyek (pilihan)	<p>Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli Analisis Data</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022</p> <p>Deskripsi Pekerjaan:</p> <p>Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 			
	<p>Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026</p> <p>Posisi : Tenaga Ahli KLHS / Daya Dukung dan Daya Tampung</p> <p>Lokasi/Periode : Merauke / 2021</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 			
	<p>Proyek : Perencanaan Tata Ruang untuk Papua Selatan di WWF Indonesia Kantor Merauke</p> <p>Posisi : Koordinator Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Lokasi/Periode : Merauke / 2018 - 2020</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab dalam mendukung penataan di Papua Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel. • Memastikan penataan ruang di Papua Selatan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 			
	<p>Proyek : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Merauke</p> <p>Posisi : Konsultan Tata Ruang</p> <p>Lokasi/Periode : Merauke / 2020 - 2021</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki tanggung jawab untuk mendukung analisis spasial dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Merauke. • Mempersiapkan dokumen fakta analisis wilayah dan dokumen rencana RTRW.
	<p>Proyek : Implementasi, Pengembangan dan Proses dari Aplikasi AKSARA di GIZ MRV-MMI</p> <p>Posisi : Konsultan</p> <p>Lokasi/Periode : Jakarta / 2020 - 2021</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung implementasi pengembangan AKSARA termasuk pengembangan E-learning AKSARA. • Melakukan pemutakhiran petunjuk teknis sektor lahan dan pemutakhiran teknis metodologi teknis analisis spasial untuk perubahan penutupan lahan dan penggunaan lahan.
	<p>Proyek : Analisis Spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air di Kota Cilegon</p> <p>Posisi : Konsultan Pendukung Analisis Spasial di PT. Dharma Ina Mandiri</p> <p>Lokasi/Periode : Cilegon / 2020</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab untuk membantu dalam analisis spasial daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air di Kota Cilegon. • Menyusun metodologi perhitungan dan dokumen teknis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air di Kota Cilegon.
	<p>Proyek : Perencanaan Tata Ruang untuk Papua Selatan di WWF Indonesia Kantor Merauke</p> <p>Posisi : Koordinator Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Lokasi/Periode : Merauke / 2018 - 2020</p> <p>Deskripsi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab dalam mendukung penataan di Papua Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel. • Memastikan penataan ruang di Papua Selatan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Elida Rizki Muta'alya – Ahli Lingkungan

Nama	Elida Rizki Muta'alya			
Detail Kontak	elida@dharmainamandiri.com			
Tanggal lahir	11/05/1992			
Kebangsaan	bahasa Indonesia			
Status penduduk	Penduduk			
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi, STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 2013 			
Pelatihan/seminar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Bersertifikat Perpajakan Terapan Brevet A & B, IAI Yogyakarta Bersertifikat ERP SAP Akuntansi Keuangan Perangkat Lunak Dasar ERP SAP Bersertifikat Perangkat Lunak Akuntansi MYOB Bersertifikat 			
Kualifikasi Profesional	Pengalaman di bidang lingkungan dalam menganalisis data, terutama data kependudukan, keuangan dan perpajakan serta audit keuangan untuk proyek-proyek yang didanai oleh lembaga internasional dan nasional; berpengalaman dalam menggunakan aplikasi kuantitatif, pengaturan logistik dan administrasi;			
Bahasa & Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa pertama	Bahasa pertama	Bahasa pertama
	Bahasa inggris	Bagus	Bagus	Bagus
Keanggotaan dalam Masyarakat Profesional				
Pengalaman Kerja Profesional	<ul style="list-style-type: none"> 2017 – Sekarang, PT. Dharma Ina Mandiri, Staf Keuangan 2016, PT. Solusi UKM, Ibu Konsultan Junior Dynamic AX 2014-2016, PT. Mitrasolusi Binadaya, Konsultan Aplikasi ERP 2013-2014, PT. Unitekindo Inti Sarana, Staf Keuangan 			
Pengalaman (pilihan)	Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS – PT. Dharma Ina Mandiri Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022 Deskripsi Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> Mendukung dan membantu tenaga ahli dan POKJA KLHS RTRW Jakarta 2040 dalam melaksanakan KLHS dalam hal inventarisasi data, administrasi dan pengelolaan kegiatan. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan SDGs Hub UI dalam pengelolaan kegiatan. 			
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangunan Palembang Baru) Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS – PT. Dharma Ina Mandiri Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 Deskripsi Pekerjaan : Mendukung dan membantu tenaga ahli dan POKJA KLHS Kepelabuhanan Tanjung Carat dalam melaksanakan KLHS dalam hal inventarisasi data, administrasi dan pengelolaan kegiatan. Berkordinasi dengan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan kegiatan.			
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026 Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Merauke / 2021 Deskripsi Pekerjaan : Mendukung dan membantu tenaga ahli dan POKJA KLHS RPJMD RPJMD Kabupaten Merauke dalam melaksanakan KLHS dalam hal pengelolaan dan analisis data lingkungan, administrasi dan pengelolaan kegiatan.			
	Proyek/Pemberi Kerja: Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah kota dan rencana aksi untuk Kabupaten Lombok Utara dengan fokus khusus di Kepulauan Gili, provinsi Nusa Tenggara Barat / ESP3-DANIDA Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli			

	<p>Lokasi : Jakarta, Indonesia</p> <p>Tahun/durasi : 2018- 2019</p> <p>Deskripsi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Penyusunan Laporan • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara • Penataan administrasi dan logistik
	<p>Proyek/Pemberi Kerja: Penyusunan masterplan pengelolaan sampah kota antardaerah untuk Magelang Raya (Kota Magelang dan Kabupaten Magelang), Provinsi Jawa Tengah, Indonesia/ ESP3-DANIDA</p> <p>Posisi dipertahankan : Anggota Tim Tenaga Ahli</p> <p>Lokasi : Magelang, Indonesia</p> <p>Tahun/durasi : 2018</p> <p>Deskripsi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Penyusunan Laporan • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Magelang • Penataan administrasi dan logistik
	<p>Proyek/Pemberi Kerja: Revisi Rencana Induk Pengelolaan Sampah, DKI Jakarta – Indonesia/ ESP3-DANIDA, DIM</p> <p>Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli</p> <p>Lokasi : Jakarta, Indonesia</p> <p>Tahun/durasi : 2017 - 2018</p> <p>Deskripsi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Penyusunan Laporan • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta • Penataan administrasi dan logistik
	<p>Proyek/Pemberi Kerja: Fasilitasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat / WWF-Indonesia dan MCAI, DIM</p> <p>Posisi dipertahankan : Anggota Tim Tenaga Ahli</p> <p>Lokasi : Jakarta, Riau, Padang, Indonesia</p> <p>Tahun/durasi : 2017-2018</p> <p>Deskripsi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Melakukan analisis kajian pengaruh pada KLHS • Penyusunan Laporan Kegiatan • Notulensi • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya • Pengorganisasian Kegiatan
	<p>Proyek/Pemberi Kerja: Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia/ ESP3-DANIDA, DIM</p> <p>Posisi dipertahankan : Anggota Tim Tenaga Ahli</p> <p>Lokasi : Kabupaten Batang, Indonesia</p> <p>Tahun/durasi : 2017-2018</p> <p>Deskripsi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan acara untuk fasilitasi, konsultasi publik dan beberapa pertemuan. • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Melakukan analisis kajian pengaruh pada KLHS • Penyusunan Laporan Kegiatan • Notulensi • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian Kegiatan
	<p>Proyek/Pemberi Kerja: Training of Trainers (ToT) KLHS untuk Balai Penelitian Lingkungan Hidup: Peluncuran di Medan dan Makassar (Ambon)/ ESP3-DANIDA, DIM</p> <p>Posisi dipertahankan : Anggota Tim Tenaga Ahli</p> <p>Lokasi : Medan dan Ambon, Indonesia</p> <p>Tahun/durasi : 2017</p> <p>Deskripsi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan acara untuk fasilitasi, konsultasi publik dan beberapa pertemuan. • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Melakukan analisis kajian pengaruh pada KLHS • Penyusunan Laporan Kegiatan • Notulensi • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

Lampiran 9. Capaian TPB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan																
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.																
1.2.1*	Tingkat Kemiskinan	BPS	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	3,55	3,42	4,53 (Maret)	4,72 (Maret)	4,61 (September)	Dinas Sosial	Akan Tercapai/ Membaik
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	98	98,03	97,7	98,39	98,21	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	100	100	100	100	100	NA	150,05	103,19	112,04 (semester I)		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Data Tidak Tersedia
				2. Informal : NA	10	10	10	10	10	NA	26,85	8,83	20,25 (semester I)			
1.3.1.(c)#	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	Bab 6 RPJMD	%	4,8 (tahun 2017)	14,9	38,7	64,5	75	85,4	25,05	87,27	92,24	69,82	95,29	Dinas Sosial	Tercapai
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Rumah Tangga	61022	65918	65918	65918	65918	65918	65368	NA	102.345 Terdiri dari : Kep. Seribu 1.001 Jakbar 20.603 Jakpus 14.356 Jaksel 17.640 Jaktim 25.242 Jakut 23.361	90.345 Terdiri dari : Kep. Seribu 936 Jakbar 17.547 Jakpus 12.924 Jaksel 16.712 Jaktim 22.062 Jakut 20.837	127.379 Terdiri dari : Kep. Seribu 1.362 Jakbar 22.454 Jakpus 19.221 Jaksel 30.267 Jaktim 26.658 Jakut 27.417	Dinas Sosial	Tercapai
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	97,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	96,04	98,81	99,15	99,26	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
1.4.1.(b)#	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan	SDKI BKKBN dan BPS	%	47 (tahun 2017)	50	53	55	60	60	111	95,7	68,7	91,9	97,2	Dinas Kesehatan	Tercapai
1.4.1.(c)#	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Bab 8 RPJMD	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59,1	57,34	NA	59,51	60,32 (SR 2021)	59,16% (Data Rutin) ket: mCPR	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	85,88 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	88,39	99,82	99,84	99,86	97,93	Dinas Sumber Daya Air	Perlu Perhatian Khusus
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	83,48 (tahun 2016)	85,15	86,85	88,59	90,36	92,17	90,73	92,89	93,04	95,17	92,79	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Susenas BPS	%	15,18 (tahun 2016)	12,14	9,72	7,77	6,22	4,97	14,36	NA	NA			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data Tidak Tersedia
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	96,06 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	95,39	93,44	NA	95,4	94,97	Dinas Pendidikan	Perlu Perhatian Khusus
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	83,27 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	81,86	83,25	NA --> 82,47	83,01	88,07	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	71,87 (tahun 2016) 76,83 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	79,94	86,6	NA		79,55	Dinas Pendidikan	Perlu Perhatian Khusus
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Susenas BPS	%	96,36 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	96,23 (data update dari BPS)	97,01 (data update dari BPS)	97,39	96,40	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Susenas BPS	%	100 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	100	NA	100	100(semester I)	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.																
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Jiwa per 100.000 orang (meninggal dan hilang)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,25	317,00	NA	1,21778	0.5545	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
			Jiwa per 100.000 orang (terluka)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,76	2,63	NA	1,74222	2.406	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jiwa per 100.000 orang (menderita dan mengungsi)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	211,29	154,73	NA	220,57 (semester I)	115.7613	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Lokasi	34 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	76 (sekolah 50 lokasi; kelurahan 20 lokasi; rumah sakit dan pasar 1 lokasi; serta gedung pemerintah 5 lokasi)	200 (sekolah 44 lokasi; kelurahan 20 lokasi; gedung swasta 79 lokasi; dan gedung pemerintah 57 lokasi)	1.750 orang (7 kegiatan di fasilitas publik/gedung, 4 kegiatan relawan dan potensi masyarakat, 6 kegiatan kampung tangguh)		139 (Rumah ibadah 54; Gedung Sekolah 11; Kantor RW 13; Kretariat RT 1; RPTRA 6; Kantor Lurah 2; Lapangan 2;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
														Majelis Taklim 7; Lainnya 43		
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Jiwa	NA	8970 kk, 3644 7 jiwa (untuk semua jenis bencana)	11667 kk, 38706 jiwa + 8 orang meninggal (untuk semua jenis bencana)	321.586 Jiwa	147.923 Jiwa		8970 kk, 36447 jiwa (untuk semua jenis bencana)	11667 kk, 38706 jiwa + 8 orang meninggal (untuk semua jenis bencana)	NA	307767	110.748 Jiwa (pemberian permakanaan), 131.500 (pemberian sandang)	Dinas Sosial	Perlu Perhatian Khusus
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Jiwa	NA	0	1182 (untuk semua jenis bencana)	NA	856 Jiwa		0	1182 (untuk semua jenis bencana)	NA	300	6,387	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Indeks Risiko	Jakarta Pusat 70,6; Jakarta Utara 89,7; Jakarta Barat 88,2; Jakarta Selatan 64,8; Jakarta Timur 93,2; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Jakarta Pusat 58,6; Jakarta Utara 74,4; Jakarta Barat 73,2; Jakarta Selatan 53,8; Jakarta Timur 77,4; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2018)	Jakarta Keseluruhan 67,04; Jakarta Pusat 59; Jakarta Utara 74; Jakarta Barat 73; Jakarta Selatan 54; Jakarta Timur 77; dan Kepulauan Seribu 65 (2020)	Jakarta Keseluruhan 64,02; Jakarta Pusat 56,90; Jakarta Utara 72,25; Jakarta Barat 71,07; Jakarta Selatan 52,18; Jakarta Timur 75,08; dan Kepulauan Seribu 56,66 (per Juni 2021)		"Jakarta Keseluruhan 60,43; Jakarta Pusat 54,41; Jakarta Utara 69,08; Jakarta Barat 67,95; Jakarta Selatan 49,89; Jakarta Timur 71,79; dan Kepulauan Seribu 49,46"	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Disgulkarmat (realisasi capaian)	Rupiah	475.218.955.000 (kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	1.80271E+11	4.77977E+11	2.3322E+11	1.77183E+11	215.700.900.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (realisasi capaian)	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019; Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019; Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2	2	#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	TKPK Provinsi	Triliun Rupiah	11,42 (tahun 2017)	9,59	PM	PM	PM	PM	9,59	10,78	NA		#REF!	Dinas Sosial	Data Tidak Tersedia
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	APBD	Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	7.180,97 (tahun 2017)	7,96 5,44	7.742,92	PM	PM	PM	Fungsi Kesehatan, Rp 7.855 Miliar	Fungsi Kesehatan, Rp 7.743 Miliar	Fungsi Kesehatan, Rp 7.240 Miliar	Fungsi Kesehatan, Rp10.758.157.780.139	Dibawah Koordinasi Dinas Kesehatan 10.301.311.006.484	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan																
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Susenas BPS; Riskesdas Kementerian Kesehatan; BKP; FAO/WHO/UNU	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Belum diperoleh data disagregasi level provinsi	1,43	1,94	2,2	3,42	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Perlu Perhatian Khusus
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	14 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	14,3	NA	NA	4,49	2,88	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6,86	NA	NA		3,77	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Susenas BPS	%	35,43 (tahun 2015)	34,33	33,03	31,79	30,59	29,44	7,05	NA	NA		NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	27,5 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	17,7	11	5,9	9,2 (semester I)	3,58	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,0	6,9	6,5	4,49 (semester I)	2,88	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10,2	5,1	4,1	4 (semester I)	2,33	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11,5	11,4	8,33	6,27 (semester I)	8,36	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
2.2.2.(b)#	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif	Bab 6 Renstra	%	49,25 (tahun 2015)	70	75	80	85	90	81,90	70,22 (Dinkes)	70,86 (Susenas 2020) dan 65,41 (Dinkes)	80,45	81,63	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan:	Laporan Kementerian Pertanian													Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
	1. Angka Konsumsi Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	kg/kapita /tahun	35,5 (tahun 2017)	0	37	38,5	40	41.5	39,62	49,6	NA		NA		
	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	skor	80,5 (tahun 2017)	0	82	83	84	85	80,4	88,2	86,3		NA		
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera																
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	kematian per 100.000 kelahiran hidup	44 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	55,1	57,48	70,09	76,49	74.80	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas BPS	%	99,59 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	99,72	NA	100		NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	97,86 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	97,19	NA	NA		NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.																
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	3,72	3,09	2,94	1,9	4.84	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)		2 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	2,14	1,89	1,79	1,33	3.85	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)												Perlu Perhatian Khusus
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	3,13	2,63	2,54	1,64	4,37	Dinas Kesehatan	
3.2.2.(b)#	Persentase Keluarahan Universal Child Immunization (UCI)	Bab 6 Renstra	%	100 (2017)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
3.3.1.(a)#	Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS	Bab 6 Renstra	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	94,67	113,07	118,74	105,16	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,42	3,65	180	94(semester I)	389	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0		0,01	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100(semester I)	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	39	0	Kasus kusta baru 265 s.d tw 3		349	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Kemenkes	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	5 (semester I)	5	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6 (semester I)	6	Dinas Kesehatan	Tercapai
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																
3.4.1.(a)#	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	30	40	50	60	70	100	100	100	96,88	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesmas dan Sirkesnas	%	20 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	33,43	NA	NA	33,43(semester I)	33,43	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
3.4.1.(c)#	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	21,87	33,68	28,18	99,15	100	Dinas Kesehatan	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)															
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Sistem Registrasi Sampel	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kemenkes	Kabupaten/kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6(semester1)	6	Dinas Kesehatan	Tercapai
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.																
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Laporan BNN	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pelajar 4%; Pekerja 1,5%	NA	NA		NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Tidak Tersedia
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Risikodas (realisasi pencapaian)	%	2,7 (tahun 2007)	NA	NA	NA	NA	NA	3 (penduduk Umur >10 Tahun yang mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam 1 Bulan Terakhir)	NA	NA		NA	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Tidak Tersedia
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40,7	51,2	NA	60,32 (SR 2021)	59,16% (Data Rutin) ket: mCPR	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
3.7.1.(a)#	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Bab 8 RPJMD	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59,1	57,34	NA	59,51	60,32 (SR 2021)	59,16% (Data Rutin) ket: mCPR	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	34,86 (tahun 2015)	35,15	35,45	35,75	36,05	36,6	29,38	32,9	35,92	36,02 (SR 2021)	30,52	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Per 1000	20 (tahun 2012) 20 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	25	25		23,2 (IKU 2020)	19,3% (CARIK Jakarta)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	SUPAS (realisasi capaian)	Nilai	2,20 (tahun 2017)	2,18	2,15	2,13	2,12	2,11	2,36	2,45		2,49 (IKU 2020)	2,22 (Carik Jakarta)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Susenas BPS	%	3,56 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	3,20	2,81	3,93	2,61	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	38,26 (tahun 2015)	56,82	84,37	100	100,00	100,00	98,00	98,03	97,7	98,59	98,21	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.8.2.(a)#	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Bab 6 RPJMD	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95	100	98,00	98,03	97,7	98,39	98,21	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.																
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	Sistem Registrasi Sampel	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.																
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	%	24,72 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	30,77	26,04	25,75	24,44	#REF!	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.																
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	98,7	98,58	99,89	98,36 (semester I)	98	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.																
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6,33	6,09	6,63			Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas																
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	membaca: 48,3 matematika: 47,9	NA		#REF!	Dinas Pendidikan	Data Tidak Tersedia
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96,43	97,54	97,71		98,32	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96,75	98,07	96,9		98,01	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
4.1.1.(c)#	Persentase Sekolah terakreditasi A	Bab 6 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	62,19	72,54	72,19	72,18	72,63	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	104,97 (tahun 2017)	104,2	105,1	105,9	106,76	107,61	103,63	105,5	102,94	101,02	100,65	Dinas Pendidikan	Tercapai
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	108,19 (tahun 2016) 105,4 (tahun 2017)	94,21	94,53	94,86	95,18	95,51	104,33	104,52	104,98	102,22	105,26	Dinas Pendidikan	Tercapai
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103,69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85,33	104,03	104,55	104,82	101,89	101,49	Dinas Pendidikan	Tercapai
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	Tahun	10,97 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	11,06	11,11	11,17	11,20	11,31	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.																
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	63,62 (tahun 2016) 66,32 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	24,9	43,08	39,44	36,68	37,25	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.																
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103,69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85,33	104,03	104,55	104,82	101,89	101,49	Dinas Pendidikan	Tercapai
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.																
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas BPS	%	Tahun 2015: 80,01 (usia 15 – 24); 53,3 (usia 15 – 59) Tahun 2016: 82,53 (usia 15-24 tahun) Tahun 2017: 89,93 (usia 15-24 tahun)	87,87 (usia 15 – 25); 64,55 (usia 15 – 59)	96,5 (usia 15 – 25); 78,25 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	92,15 (usia 15-24 tahun)	95,41 (usia 15-24 tahun) 85,17 (usia 15-59 tahun)	95,85 (usia 15-24 tahun) 88,08 (usia 15-59 tahun)	98,37 (usia 15-24 tahun) 91,79 (usia 15-24 tahun)	97,37 (Usia 15-24 tahun) 92,36 (Usia 15-59 tahun)	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.																
4.5.1*	1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di:														Dinas Pendidikan	Tercapai
	a. SD/MI/ sederajat	Susenas BPS	%	99,87 (tahun 2017)	52,36	53,41	54,47	55,56	56,68	99,09	99,66	100,37	100,77	99,26		
	b. SMP/MTs/ sederajat			98,16 (tahun 2017)	44,84	47,26	49,81	52,5	55,33	94,93	100,98	104,68	94,14	103,32		
	c. SMA/SMK/MA/ sederajat			86,06 (tahun 2017)	27,98	29,07	30,20	31,38	32,61	103,12	100,19	92,52	97,66	101,01		
	2. Rasio APK perempuan/laki-laki di PT			91,22 (tahun 2017)	13,60	14,46	15,37	16,35	17,38	94,42	NA	NA		145,56		
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua																
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,23	NA		N/A	Dinas Pendidikan	Data Tidak Tersedia
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.																
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	93,33 (tahun 2015)	96,06	98,86	100	100	100	55,94	49,94	47,14	40,24 (semester I)	37,79	Dinas Pendidikan	Perlu Perhatian Khusus
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender																
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.																
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Kebijakan	2	PM	PM	PM	PM	2	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya																
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,1	0,0000832 dan 0,0000576	282/3759839	494/3774569	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	pasangan dalam 12 bulan terakhir	(realisasi capaian)														
5.2.1.(a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	SKIA BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,4	0,0000277 dan 0,0000181	134/3759839	155/3774569	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.																
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama,	Susenas BPS										NA	NA		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
	- sebelum umur 15 tahun		%	0,11 (tahun 2015)	0	0	0	0	0	0,01	NA	NA	NA		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	
	- sebelum umur 18 tahun		%	3,18 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	4,06	3,12	1,45	4,68		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Tahun	23,09 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	22,6	21	NA	NA		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Per 1000	20 (tahun 2012) 20 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	16	25		23.2 (IKU 2020)		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103,69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85,33	104,03	104,55	104,82	101,89	101,49	Dinas Pendidikan	Tercapai
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.																
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	18,87 (tahun 2017)	19,81	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	19,81	21,7	21,7	21,7	21,7	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BKN; Sakernas BPS	%	12,5 (tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	30,16	35,96	34,19	46,10	46,1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.																
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	SDKI BKKBN dan BPS	%	84,80 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,32	14,7	NA	9,85 (SR 2021)	11,73 (Carik Jakarta)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	20,1 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	27	19,8	NA	59,4 (IKU 2020)	65,9 (SKAP 2022)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemhukham; BKKBN; Kementerian Kesehatan; KPPPA; Kemdikbud	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014. Kesehatan Reproduksi	Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014. Kesehatan Reproduksi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi yang layak																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.																
6.1.1.(a)#	Cakupan pelayanan air bersih	Bab 5 RPJMD	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79.61	60,38	63.16	64,24	65,3	65.41	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.1.1.(b)#	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	-	2.78	0	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	7,41	7.41 (terdapat 8 waduk, Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan, Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan 2)	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	88,93 (tahun 2017)	94,17	94,95	95,73	96,52	97.32	89,59	99,82	99,84	99,86	97.93	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.																
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas Kor, BPS	%	68,96 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	73,45	73,18	76,83	79,52	79.13	-	Perlu perhatian khusus
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	83,48 (tahun 2016) 90,37 (tahun 2017)	85,15	86,85	88,59	90,36	92.17	90,73	92,89	93,04	95,17	92.79	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kementerian Kesehatan - Bab 6 Renstra	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	229	251	251	267	267	Dinas Kesehatan	Tercapai
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kelurahan	5 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	21	26	27	34	45	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	-	-	Tercapai
6.2.1.(f)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	15,73	16,73	17,75	18,19	20.595	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.																
6.3.1.(a)	Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	-	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Perumahan Rakyat														
6.3.1.(b)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26,44	15,73	16,73	17,75	18,19	20,595	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.3.2.(a)#	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	0	2,78	0	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	7,41 (terdapat 8 waduk, Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan, Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan 2)	7,41 (terdapat 8 waduk, Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan, Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan 2)	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 31,41 poin	Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 35,56 poin	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air	Data Tidak Tersedia
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.																
6.4.1.(a)#	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	Bab 8 RPJMD	%	50 (tahun 2017)	80	85	90	95	100	80,17	NA	90,54	99,31	99,68	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	jdh.jakarta.go.id	Dokumen (Peraturan)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.																
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)	Badan Perencanaan Pembangunan	RPDAST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n Daerah (realisasi capaian)													Pembangunan Daerah	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wilayah sungai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	1	1		Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.																
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	DSDA (realisasi pencapaian)	Waduk/Situ/Embung	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	7 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	7 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air	Data Tidak Tersedia
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau																
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Statistik PLN	%	99,98 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Statistik PLN	kWh	2997 (tahun 2015)	3347	3468	3594	3767	3948	3132	3256	3021	3307	3237.68	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Perlu Perhatian Khusus
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global																
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	- (tahun 2017)	-	0,03	0,07	0,09	0,11	0	0,04	0,12	0,04	0,32	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi																
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.																
8.1.1*#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	6,11	5,83	-2,39	3,56	5,25	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
8.1.1.(a)#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	6,11	5,83	-2,39	3,56	5,25	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.																
8.2.1*#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	6,11	5,83	-2,39	3,56	5,25	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.																
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-	BPS (Sakernas)	%	26,9 (tahun 2015)	24,74	22,71	20,85	19,14	17,57	30,12	30,12	37,49	38,16	36,82	Dinas Tenaga Kerja,	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	pertanian, berdasarkan jenis kelamin														Transmigrasi dan Energi	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (Sakernas)	%	71,55 (tahun 2017)	69,82	70	70	70	70	69,82	68,45	61,78	61,74	63,12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (Sakernas)	%	0,13 (tahun 2017)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,21	0,95	47	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Data Tidak Tersedia
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,5 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 136 UMKM dari total 9071 peserta yang mendapatkan perizinan)	3,78 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 575 UMKM dari total 15200 peserta yang mendapatkan perizinan)	3,41 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 905 UMKM dari total 26515 peserta yang mendapatkan perizinan UMKM)	3,30 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 1216 UMKM dari total 36893 peserta yang mendapatkan perizinan UMKM)	1,49 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 910 UKM dari total 60746 peserta yang mendapatkan perizinan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (Sakernas)	Rupiah	23.596 (tahun 2017)	25248	30609	40874	54579	72881	25238	25236	28420	30662	32000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (Sakernas)	%	7,14 (tahun 2017)	5,20	5,10	5,00	4,90	4,8	6,24	6,22	10,95	8,50	7,18	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (Sakernas)	%	18,8 (tahun 2015) 11,17 (tahun 2017)	18,1	17,42	16,77	16,14	15,53	12,84	11,53	21,82	23,11	18,19	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.																
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (Sakernas)	%	13,49 (tahun 2017)	13	13	13	13	13	16,98	15,41	20,13	20,47	17,19	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.																
8.8.1.(a)#	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Perusahaan	1180 (tahun 2017)	1380	1380	1380	1380	1380	NA	3155	2843	2233	2453	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,78	4,81	4,13	4,37	13,14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	2.600.000 (tahun 2017)	2.800.000	2.940.000	3.087.000	3.241.350	3.403.417	2.811.974	2.455.427	39.324	122.299	935,182	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akan Tercapai/ Membaik
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	33.000.000 (tahun 2017)	36.000.000	38.520.000	40.496.000	44.298.000	50.172.000	34.192.577	41.640.800	6.140.019	5.499.040	18.556,888	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akan Tercapai/ Membaik
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS (Statistik Pariwisata)	Triliun rupiah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,73 (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 1,74 Triliun; Pajak Restoran Rp 3,15 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 8,33 Miliar)	6,24 (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 1,76 Triliun; Pajak Restoran Rp 3,61 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 8,60 Miliar)	2,6 (Realisasi 8 Desember) (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 678,56 miliar; Pajak Restoran Rp 1,76 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 213,6 Miliar)	3,11 (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 871,53 miliar; Pajak Restoran Rp 2,16 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 86,94 Miliar)	#REF!	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Data Tidak Tersedia
8.9.2*#	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	49,07 (tahun 2017)	58	75	85	95	100	59,80	75,30	78,10	88	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tercapai
Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.																
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1. Kantor Bank: 7,01 2. ATM: 247,29	1. Kantor Bank = 6,29 2. ATM = 230,23	1. Kantor Bank = 5,56 2. ATM = 219,79	1. Kantor Bank = 5,94 2. ATM = 186,67	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (Podes)	km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,83	0,77	1,45	#REF!	Biro Perekonomian	Data Tidak Tersedia
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Data UMKM)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,40	5,33	5,13	4,74	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Data Tidak Tersedia
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur																
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.																
9.1.1.(a)#	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Bab 8 RPJMD	%	96 (tahun 2017)	0	96,5	97	97,5	98	96,16	NA	NA	96,77	97,19	Dinas Bina Marga	Akan Tercapai/ Membaik
9.1.2.(b)#	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Bab 8 RPJMD	Terminal Penumpang	- (tahun 2017)	-	-	-	1	3	NA	NA	NA	1	1	Dinas Perhubungan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.																
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	BPS	%	13,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	12,66	11,82	10,86	11,64	11,72	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Akan Tercapai/ Membaik
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	BPS	%	7,41	NA	NA	NA	NA	NA	5,68	-1,22	(10,34)	11,06	5,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
															Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	%	14,37 (tahun 2015) 13,2 (tahun 2017)	15,62	16,98	18,46	20,08	21,83	13,04	12,3	11,01	11,47	10,26	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.																
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS diolah Ditjen IKM Kementerian Perindustrian	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Data Tidak Tersedia
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,41 (IMKM yang mendapatkan modal 169 IMKM dari total 2009 peserta yang telah mendapatkan perizinan IMKM)	0,78 (IMKM yang mendapatkan modal 75 IMKM dari total 9564 peserta yang telah mendapatkan perizinan IMKM)	1,56 (IMKM yang mendapatkan modal 161 IMKM dari total 10.308 peserta yang telah mendapatkan perizinan IMKM)	3,15 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 577 IMKM dari total 18313 peserta yang mendapatkan perizinan IMKM)	1,49 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 227 IKM dari total 15187 peserta yang mendapatkan perizinan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus
Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.																
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	Pusat Penelitian dan Pengembangan an Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	RPJMN 2015-2019	%	3,30	NA	NA	NA	NA	NA	3,55	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negaranegara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.																
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	APBD	%	0,00013 (2017)	PM	PM	PM	PM	PM	0,00013	0,000145	0.0000721	0,0001245		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.																
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Susenas Kor BPS	%	46,63 (tahun 2015) 60,65 (tahun 2017)	47,65	53,23	59,47	66,43	74,21	65,89	63,83	77,61	85,55	84,65	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Tercapai
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan																
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
10.1.1*	Koefisien Gini (Gini Ratio)	BPS	Nilai	0,409 (tahun 2017)	0,407	0,405	0,403	0,401	0,399	0,394	0,391	0,399	0,411	0,412	Biro Perekonomian	Perlu Perhatian Khusus
10.1.1.(a)#	Tingkat Kemiskinan	Bab 8 RPJMD	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	3,55	3,42	4,69	4,67	4,61 (September)	Dinas Sosial	Akan Tercapai/ Membaik
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.																
10.2.1*	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpecah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang disabilitas	Susenas	%	13,82 (tahun 2015)	12,42	11,16	10,03	9,02	8,11	NA	NA	NA	0,18	#REF!	Biro Perekonomian	Data Tidak Tersedia
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																
10.3.1.(a)#	Indeks Demokrasi	BPS	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	85,08	88,29	89,21	82,08 (Metode Baru)	82,08 (Metode Baru)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM - Ditjen HAM - (Kemenkumham)	Berkas pengaduan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	126 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	52 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	70 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta. Data Komnas HAM: 46, Kanwil Kemenkumham: 24)	30 Pengaduan	Biro Hukum	Akan Tercapai/ Membaik
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	859	529	510	357	687	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan / dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	24 Aduan	Biro Hukum	Perlu Perhatian Khusus
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.																
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	APBD	%	7,23 (tahun 2017)	7,7	NA	NA	NA	NA	8,84	9,15	9,92		#REF!	Dinas Sosial	Data Tidak Tersedia
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	100	100	100	100	100	NA	150,05	103,19	116,17	#REF!	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Data Tidak Tersedia
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan																
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.																
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses	Kementerian Pekerjaan	%	71,7 (tahun 2015)	72,24	72,81	73,38	73,96	74,54	99,36	34,25	33,18	40	36,23	Dinas Perumahan	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Umum dan Perumahan Rakyat		99,49 (tahun 2017)											Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.																
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	%	18 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	15	21,7	8,2	14,76	18,45	Dinas Perhubungan	Akan Tercapai/ Membaik
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	Kota Besar	0 (tahun 2017)	0	3	3	3	3	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	Dinas Perhubungan	Tercapai
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.																
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Kementerian PPN/Bappenas	Institusi	44 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2017)	45	45	45	45	45	52 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2018)	52 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2019)	NA			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.																
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kota Pusaka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.																
11.5.1.#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	5,69	6,16	5,9	6,72	7,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Indeks Risiko	Jakpus 70,6; Jakut 89,7; Jakbar 88,2; Jaksel 64,8; Jaktim 93,2; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Jakpus 58,6; Jakut 74,4; Jakbar 73,2; Jaksel 53,8; Jaktim 77,4; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2018)	NA	Jakarta Keseluruhan 67,04; Jakarta Pusat 59; Jakarta Utara 74; Jakarta Barat 73; Jakarta Selatan 54; Jakarta Timur 77; dan Kepulauan Seribu 65 (2020)	60,43	62,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Dokumen Strategi Ketahanan Jakarta	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Peringatan Dini	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	24	24	24	23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Disgulkarmat	rupiah	475.218.955.000 (kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	180.270.965.000	#####	#####	177.183.200.000	215.700.900.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.																
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH (realisasi capaian)	%	83 (tahun 2015)	83,03	83,06	83,09	83,12	83,15	87,6	100	75	75,15%	73,68%	Dinas Lingkungan Hidup	Perlu Perhatian Khusus
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Kota Hijau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.																
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,01	4,24	5,1	5,1	5,182	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Akan Tercapai/ Membaik
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Statistik Kriminal (BPS)	%	33,73 (tahun 2017)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	35,93	Disagregasi data di tingkat nasional	Disagregasi data di tingkat nasional	49,65	54,08	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.																
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan an Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Target 12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.																
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kolaborasi tematik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	3 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	4 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	Dinas Lingkungan Hidup	Akan Tercapai/ Membaik
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.																
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peserta Proper	75 (tahun 2015)	77	79	81	83	85	NA	NA	53	53 Biru + 6 Hijau + 1 Emas	- 68 perusahaan peringkat Biru - 6 perusahaan peringkat Hijau - 1 perusahaan peringkat Emas	Dinas Lingkungan Hidup	Akan Tercapai/ Membaik
12.4.2.(a)#	Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Bab 8 RPJMD	%	- (tahun 2017)	10	-	-	-	-	18,35	NA	NA	NA		Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.																
12.5.1.(a)#	Persentase penurunan volume sampah di kota	Bab 5 RPJMD	%	11 (tahun 2017)	14	17	20	23	26	12,40	17,06	22	24,44	26.11%	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.																
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	perusahaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 12.7. Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.																
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk ramah lingkungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.																
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Fasilitas Publik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim																
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.																
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012	2 terdiri dari: Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana	2 terdiri dari: Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
										Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	an Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021		
13.1.2*#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	5,69	6,16	5,9	6,72	7,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.																
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018)	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019)	(dokumen Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 tengah disusun)	1 Laporan		Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018)	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019)	(dokumen Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 tengah disusun)	1 Laporan		Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Tujuan 14 - Ekosistem Lautan																
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.																
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	jdi.h.jakarta.go.id	Dokumen (PP)	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Keppub Nomor 601 Tahun 2019			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
										Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)	Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)	tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)				
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	WPP	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	NA	1	1			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.																
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	%	ikan pelagis kecil E = 0,38, ikan demersal E = 0,83, kepiting E= 0,70, Cumi cumi E=2,02 (tahun 2017)	1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 2	NA	NA	NA			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.																
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Ha	140,9 (tahun 2017)	141,6	142,3	143	143,7	144,4	160,25	170,46	180,86	196,2	213,82	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.																
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Kementerian Kelautan dan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	79,45	70,77	70,93	95,68	Dinas Ketahanan Pangan,	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		Perikanan (KKP)													Kelautan dan Pertanian	
Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.																
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Regulasi/ kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1. Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan 2. Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan 2. Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan 2. Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 (terdiri dari Kabupaten Kep. Seribu dan Kota Jakarta Utara)	2 (terdiri dari Kabupaten Kep. Seribu dan Kota Jakarta Utara)	2 (terdiri dari Kabupaten Kep. Seribu dan Kota Jakarta Utara)			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindung.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3123	3258	3258	3258	4426	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".																
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (PP)	1	1	1	1	1	1	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
										Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)	Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)					
Tujuan 15 - Ekosistem Daratan																
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.																
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	+/- 80 (Mangrove)	2,48	3,93	4,19	5.1	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Akan Tercapai/ Membaik
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.																
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hektar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	360,36	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPA	1 (data tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPHK; KPHL; KPHP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.																
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	171,88 (Luas lahan hutan kota yang sudah di hijaukan)	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.																
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Kementerian Lingkungan Hidup dan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		-	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		Kehutanan (KLHK)														
Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.																
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Belum ada pidana			Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
15.7.1.(b)#	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Fauna	2.132 (tahun 2017)	2142	2152	2162	2172	2182	Taman Margasatwa Ragunan (2.171 ekor)	Taman Margasatwa Ragunan (2.286 ekor)	Taman Margasatwa Ragunan (2.296 ekor)	2.298	2275	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Tercapai
	2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Flora	52.733 (tahun 2017)	52753	52773	52793	52813	52833	total flora 52.795 tanaman	total flora 64.814 tanaman	total flora 64.994 tanaman	64.893	64884	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasive prioritas																
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen Karantina Hewan; Dokumen Karantina Tumbuhan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.																
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)	1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)	1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)	dokumen dibuat pada tahun 2018 dan pada tahun ini tidak ada kegiatan terkait keanekaragaman hayati		Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.																
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Belum ada pidana			Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh																
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.																
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Statistik Kriminal (BPS)	Kasus	76 (mencakup seluruh wilayah)	65	58	51	44	36	75	36	32	77	Belum rilis	Satuan Polisi Pamong Praja	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				kerja Polda Metro Jaya yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan/ KP3)												
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Data Rekapitulasi Aksi Anarkis Tawuran Antar Warga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kematian per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,11	0,11	0,07	0,08	0,02	Bakesbangpol Satuan Polisi Pamong Praja	Akan Tercapai/ Membaik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik Kriminal (BPS)	%	1,38 (tahun 2016)	1,28	1,18	1,08	0,98	0,88	0,12	0,11	0,07	0,05	Belum rilis	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik Kriminal (BPS)	%	50,57 (2017)	50,57	51,0	51,50	52,0	51,5	Data Susenas BPS per tiga tahun	Data Susenas BPS per tiga tahun	41,17	Data Susenas BPS per tiga tahun	Data Susenas BPS per tiga tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Perlu Perhatian Khusus
Target 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.																
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	910	650	787	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		(realisasi capaian)														
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	472	312	0,00002	0.000043	0.00021	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Target 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.																
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	BPS (Statistik Kriminal)	%	33,73 (tahun 2017)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	35,93	14,76	73,26	49,65	54,08	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.218 orang (litigasi: 975 orang dan Non Litigasi: 243 orang)	1.079 orang (Litigasi: 970 orang Non litigasi: 109 orang)	749 orang (litigasi: 702 orang dan non litigasi: 47 orang)	655 orang (litigasi: 502 orang dan non litigasi: 153 orang)	Biro Hukum	Perlu Perhatian Khusus
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.																
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Statistik Kriminal (BPS)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Inspektorat	Data Tidak Tersedia
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.																
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82,77	83,88 (unaudited)	75,11% (per 10 Desember 2020, data sebelum APBD-P)			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Tidak Tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum rilis	-	Tercapai
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat	B (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	BB	BB	BB	A	Belum rilis	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Data di bawah koordinasi BPPBJ)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89	95%	47,4% (refocusing anggaran COVID-19)	67,90 (refocusing anggaran COVID-19)	97,29%	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70,92	74,57	76,54	78,88	78,98	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.6.2.(a)#	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	Bab 5 RPJMD	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,0	88.5	83,76	84,41	86,34			Biro ORB	Data Tidak Tersedia
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.																
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	19,81	19,81	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan, mengikuti siklus 5 tahun pemilu	21,7	Tidak ada pengukuran tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada pengukuran tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada pengukuran tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKN; Sakernas BPS	%	17	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	14,86	18,6	26	20	26.19	Badan Kepegawaian Daerah/ Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	87,12 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	87,82	91,89	90,86	NA	NA	-	Belum dapat diukur
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	87,73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	95,09	91,01	93,27	NA	NA	-	Belum dapat diukur
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	80,86 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	75,43	83,86	84,95	NA	NA	-	Belum dapat diukur
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.																
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (realisasi capaian)	%	94,78 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	96,78	98,23	98,92 (data per 14 Desember 2020)	99,59	100	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial)	%	96,36 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	95,85	NA	NA	NA	NA	-	Data Tidak Tersedia
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,95	90,09	95,15 (data per 14 Desember 2020)	98,72	100	-	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		(realisasi capaian)														
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.																
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM)	Berkas Pengaduan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	126 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	52 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	70 Pengaduan (Data Komnas HAM: 46, Kanwil Kemenkumham: 24)	30 Pengaduan	Biro Hukum	Perlu Perhatian Khusus
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	859	529	510	518	687	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan Lembaga Penelitian, Komisi Informasi Pusat	Peraturan	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	NA	NA	NA	NA	NA	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Akan Tercapai/ Membaik
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	1	1	1	1	1	1	1,47	1,55	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Tercapai
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	61,5 (total dari 26 sengketa - 6 kasus register 2019, 20 kasus register 2020)	total 27 sengketa - 20 kasus register 2020 dan 7 kasus register 2021	16 kasus yang register pada 2022	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi,	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	(PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan														Infomatika & Statistik	
Target 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.																
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan/dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	24 Aduan	Biro Hukum	Belum dapat diukur
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan																
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.																
17.1.1*#	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	35,36 (tahun 2017)	38,13	39,97	43,35	47,2	51,25	38,13	40,29 (unaudited)	29,02	34,51	40,28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Miliar Rupiah	680,15 (tahun 2017)	689,9	704,76	715,453	733,77	749,83	671,49	587,91 (unaudited)	468,14	383,43	376,98	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	2.1 Jumlah Pendapatan Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	62,52 (tahun 2017)	67,67	79,99	87,45	97,06	101,47	65,81	62,3 (unaudited)	51,71	65,60	67,29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	2.2 Jumlah Belanja Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	61,82 (tahun 2017)	78,48	82,30	90,80537	98,40	108,86	75,09	65,05 (unaudited)	44,51	61,35	64,84	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	3. Total pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap Belanja Daerah	BPKD (realisasi capaian)	%	125,64 (tahun 2017)	86,24	97,20	96,31	98,64	93,20	87,64	95,78 (unaudited)	116,16	106,93	103,78	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapai
17.1.1.(a)#	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah	%	1,49 (tahun 2017)	1,55	1,69	1,73	1,78	1,85	1,47	1,43	1,05	1,19	1,26	Badan Pendapatan Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
17.1.2*#	Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	%	57,20 (tahun 2017)	47,10	51,38	52,72	52,79	53,520	50,77	57,21	153,38	44,52		Badan Pendapatan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 17.4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berat untuk mengurangi tekanan utang.																
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	LKJP dan APBD	%	0,167	NA	NA	NA	NA	NA	0,0048	0,0068 (unaudited)	NA	0,12	#REF!	Biro Perencanaan	Data Tidak Tersedia
Target 17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.																
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS Susenas KOR	%	42,7 (tahun 2015)	47,65	53,23	59,47	66,43	74,21	65,90	NA	77,61	85,55	84,65	Dinas Komunikasi, Infomatika & Statistik	Tercapai
Target 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
17.11.1.(a)#	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	Bab 8 RPJMD	USD	4.043.918.198 (tahun 2017)	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	#####	8.103.915.445	5.963.633.981	8.775.826.509	38.966.277.236	7.335.159.641,53	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tercapai
Target 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.																
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	- Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenkeu; BAPPENAS; Kementerian PU & PR; Kemenhub; Kementerian ESDM; Kementerian Kominfo; BKPM; Pemerintah Daerah - RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen berisi daftar proyek KPBU	NA	NA	4	4	4	4	NA	4	4	4	#REF!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapai
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alokasi (Rp)	NA	NA	6.178.773.560	2.000.000.000	2.000.000.000	#####	NA	906.154.000	498.000.000	638.000.000	#REF!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Tidak Tersedia
Target 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.																
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Badan Pusat Statistik	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.																
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah	Pegawai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17 Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian	17 Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke	18 Statistisi sebanyak 0 (nol), Pranata Komputer 18 orang (yang terdistribusi ke BKD 2 dan Diskominfo 16)	44 Statistisi sebanyak 1 (satu) orang pada Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah	49 Pranata Komputer sebanyak 49 orang yang terdistribusi ke : a. Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
										Daerah sebanyak 2 orang dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang	Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang		(BPBUMD), Pranata Komputer sebanyak 43 orang yang terdistribusi ke : a. Badan Kepegawaian Daerah 2 orang b. Badan Pendapatan Daerah 2 orang c. Dinas Kebudayaan 1 orang d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 orang e. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 34 orang f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 orang g. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 1 orang h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5 orang			
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer	Badan Kepegawaian Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50 (Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang (target 5 orang) dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang (target 69 orang))	50 (Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang (target 5 orang) dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang (target 69 orang))	50 (Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang (target 69 orang))	100 (Statistisi sebanyak 1 (satu) orang dan Pranata Komputer 43 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertamanan dan Hutan	50 Statistisi sebanyak 0 (Nol) orang dan Pranata Komputer 49 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertamanan dan Hutan	Badan Kepegawaian Daerah	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
													dan Kearsipan	Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Perlu Perhatian Khusus
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28,57 (meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015)	28,57 (meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015)	28,57 (meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015)	70	33.33	Badan Kepegawaian Daerah	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri	Data Registrasi	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Tidak Tersedia
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	%	10,8 (tahun 2017)	1. Perencanaan (22, 73)	48	48	48	48	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia



Lampiran 10. Lembar Kerja Keterkaitan Isu Strategis, Skenario, dan Proyeksi

No	Isu Strategis	Kriteria	Indikator	Skenario			Proyeksi capaian di tahun 2045			Uraian
				BAU	Moderate	Akselerasi	BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi	
1	Tingginya Resiko Bencana	Tingkat bencana	IRBI untuk bencana alam	Penurunan 3%	Penurunan 5%	Penurunan 10%	31.17	20.00	12.90	Ke 3 skenario dapat menurunkan risiko bencana dari Sedang ke Rendah.
		Kerentanan bencana								
		Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana)	Kapasitas daerah dan Masyarakat terkait mitigasi bencana non alam	Kapasitas relatif stagnan di angka 52	Ada Peningkatan dengan percepatan kapasitas daerah	Akselerasi peningkatan dengan pelibatan multi aktor berbasis IPTEK	-	Memaksimal-kan Penanggulan-g-an dan Pemulihan	Memaksimal-kan Mitigasi serta Penanggulan-g-an dan Pemulihan	Bencana non alam diproyeksikan secara kualitatif. Skenario berkaitan dengan percepatan /akselerasi peningkatan kapasitas daerah dan kapasitas resiliensi masyarakat, terutama di daerah potensi bahaya (banjir, kebakaran, dan kegagalan teknologi). Selain itu juga perlu ditingkatkan mutu ketersediaan peralatan kebencanaan, terutama di daerah rawan bahaya
		Pemanfaatan IPTEK (<i>Digital Platform</i>)								
2	Ancaman Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Kualitas LH	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	IKLH (IKA, IKU, IKTL, IKAL)	1.5%	5% (laporan IKLH Jakarta, 2022)	10% (laporan IKLH Jakarta, 2022)	69.58	73.06	76.54	Target IKLH Nasional 76.12. DKI Jakarta perlu mendukung pencapaiannya dengan Skenario Moderate.
			Indeks Pengelolaan Sampah – Recycling Rate	3%	4.5% (Neraca Sampah Jakstrada Jakarta, 2022)	5% (Neraca sampah Jakstrada Jakarta, 2022)	66.5	71.83	80.16	Target Nasional Timbulan Sampah Terolah di Fas. Pengolahan Sampah 90% dan 35% terdaur ulang. Skenario yang perlu dilakukan adalah Skenario Akselerasi.
			Emisi GRK	4.7%	30% (PerGub 90/2021)	50% (PerGub 90/2021)	168.80 ribu (tCO ₂ e)	110 ribu (tCO ₂ e)	60 ribu (tCO ₂ e)	Skenario Akselerasi perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission Nasional tahun 2060. Untuk DKI lebih tepat prioritas pada pengurangan emisi dari sumber.
			Daya Dukung Air	Menurun	Terkendali/tetap	Meningkat	Belum Terlampaui 3%	Belum terlampaui 4%	Belum Terlampaui 5%	Perlu dilakukan Skenario Akselerasi
		Pemanfaatan dan	Infrastruktur Perkotaan (Penyediaan Air	Laju pemenuhan < laju kebutuhan	Laju pemenuhan = laju kebutuhan	Laju Pemenuhan > laju	Beberapa indikator belum	Pemenuhan sesuai SPM	Tersedia dan Terlayani secara inklusif	Skenario yang perlu dilakukan adalah Skenario Akselerasi

No	Isu Strategis	Kriteria	Indikator	Skenario			Proyeksi capaian di tahun 2045			Uraian
				BAU	Moderate	Akselerasi	BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi	
		Pengelolaan SDA	Bersih, Persampahan, Sanitasi)			kebutuhan dan didukung peningkatan kualitas pelayanan dengan teknologi modern	sesuai SPM		serta dengan kualitas setingkat kota global	
3	Ketimpangan Sosial – Ekonomi	Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan	IPM		Skenario merujuk pada capaian peringkat 20 dunia (data tahun 2021)	Skenario merujuk pada capaian peringkat 10 dunia (data tahun 2021)	90.30	92.50	94.10	Permasalahan adalah ketimpangan IPM daratan dan Kepulauan. IPM kepulauan lebih rendah IPM rata-rata Nasional. Skenario Akselerasi di Kepulauan.
			Gini Ratio	-	Skenario target nasional	Tidak ada ketimpangan	0.357	0.290	0	Skenario yang perlu dilakukan adalah Skenario Akselerasi
			Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi	Laju pemenuhan < laju kebutuhan	Laju pemenuhan = laju kebutuhan	Laju Pemenuhan > laju kebutuhan dan didukung peningkatan kualitas setara kota global	Belum inklusif, dan terjangkau oleh seluruh warga	Inklusif dan terjangkau	Tersedia dan Terlayani secara inklusif serta dengan kualitas setara kota global	Skenario yang perlu dilakukan adalah Skenario Akselerasi
			Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita	Tren pertumbuhan PDRB DKI Jakarta (2012-2022) 5%	Skenario target Nasional per 5 tahun adalah 6,1%; 7,8%; 7,6% dan 6,7%	Skenario Nasional dengan baseline 2022	5%	7.1%	8.1%	Perlu dilakukan skenario akselerasi untuk mencapai Jakarta setara kota global
			Tingkat Kemiskinan Kepulauan	Tren tingkat kemiskinan 2003 – 2023	Skenario target nasional	Skenario Target DKI Jakarta tanpa kemiskinan	4.71	0.5	0	Perlu dilakukan akselerasi pengentasan kemiskinan di kepulauan
			TPT	5.5%	Skenario Nasional (4%)	10% lebih rendah dari target nasional	5.55	4	3.6	Skenario moderate untuk mendukung pencapaian target nasional

No	Isu Strategis	Kriteria	Indikator	Skenario			Proyeksi capaian di tahun 2045			Uraian
				BAU	Moderate	Akselerasi	BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi	
4	Belum Optimalnya Tata Kelola	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, dan SAKIP / TPB 16)	Mencapai 100% pada tahun 2045	Mencapai 100% pada tahun 2041	Mencapai 100% pada tahun 2032	100%	100%	100%	Skenario akselerasi perlu dilakukan untuk mendukung tercapainya TPB 162030
			Ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana untuk pengendalian pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan kebijakan dan dokumen rencana yang ada sesuai kewenangannya	Mengisi kekosongan hukum dan dokumen rencana, merevisi, menyempurnakan dan harmonisasi kebijakan/ dokumen rencana serta pelaksanaannya	Penyederhanaan kebijakan untuk efisiensi tata kelola dan/atau mengisi kekosongan hukum dan dokumen rencana terpadu, harmonis dan sinergi serta pelaksanaan sesuai rencana sehingga terwujud kualitas SDA dan lingkungan yang optimal	Evaluasi AKIP A	Evaluasi AKIP AA	Evaluasi AKIP AA	Skenario moderate dapat dilakukan
			Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan Kebijakan dan rencana	Monitoring dan evaluasi sesuai kewenangannya	Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi digital	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi digital dan terintegrasi multi sektor/pihak	Sistem monitoring manual	Tersedia sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital di masing-masing OPD	Tersedia sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital terpadu	Skenario moderate dapat dilakukan

No	Isu Strategis	Kriteria	Indikator	Skenario			Proyeksi capaian di tahun 2045			Uraian
				BAU	Moderate	Akselerasi	BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi	
			Jumlah kerjasama dan kolaborasi antar wilayah fungsional dalam perbaikan pengelolaan SDA	Mempertahankan kerjasama dan kolaborasi yang telah ada	Memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan pelibatan multi pihak, pembiayaan yang memadai, pelaksanaan meningkat, namun bersifat sektoral	Memperkuat dan memperluas kerjasama dan kolaborasi strategis dengan multipihak dengan output penyelesaian masalah SDA dan lingkungan	Kerjasama / kolaborasi tetap dan terlaksana	Meningkatnya intensitas aktifitas kerjasama/ kolaborasi dengan output bersifat parsial, sektoral dan insidental	Meningkatnya jumlah dan intensitas kerjasama dan kolaborasi dengan output kualitas pengelolaan SDA secara menyeluruh optimal	Skenario akselerasi perlu dilakukan untuk mewujudkan Kota Global yang Liveable dan berkelanjutan

Lampiran 11. Penjaminan Kualitas



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA

PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025–2045

NOMOR 12 TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (9-11-2023) bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta, telah dilakukan penjaminan kualitas secara mandiri yang dilakukan oleh Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2030, bersama dengan penyusun Kebijakan, Rencana, Program (KRP).

Dalam menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS, Gubernur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Penjaminan kualitas secara mandiri ini dilakukan sesuai dengan Lampiran VIII Tata Cara Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan rincian penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045.

Jakarta, 28 Desember 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

FORM PENJAMINAN KUALITAS
KLHS RPJPD PROVINSI DKI JAKARTA 2025—2045
TAHUN 2023

Penilaian: Desain Proses KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila “Ya” lanjutkan ke c - Bila “Tidak” lanjutkan ke a, lalu b dan c	Tidak	KLHS ini disusun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 KLHS ini dilakukan secara <i>Ex-Ante</i> , terpisah dengan proses penyusunan KRP.
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?	Ya	a. Penyusun KRP berperan serta secara intensif sejak perumusan isu strategis hingga perumusan alternatif dan rekomendasi secara iteratif dalam berbagai FGD/Konsultasi Publik (KP) dan pertemuan terbatas yang telah didokumentasikan pada lampiran 3 s.d 7. b. Telah dilakukan sebanyak 15 FGD dan 2 kali KP yang dapat menjadi indikasi proses komunikasi dan pertukaran data informasi telah terjalin dengan sangat baik antar penyusun KRP maupun POKJA KLHS dengan didampingi oleh Tenaga Ahli. Komunikasi yang terjadi secara iteratif sejak awal diharapkan berkontribusi terhadap terintegrasikannya hasil KLHS ke dalam rancangan KRP.
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?		
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	c. POKJA KLHS ditetapkan sebagaimana SK Gubernur DKI Jakarta No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030, dan di dalamnya terdapat perwakilan dari perencana KRP. Pokja KLHS juga didampingi oleh Tenaga Ahli dari Universitas Indonesia melalui kegiatan Swakelola Tipe 2. Kompetensi tenaga ahli pendamping ada dalam Lampiran 8
Ringkasan Kesimpulan: Penyusunan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dilakukan terpisah dengan proses penyusunan KRP dan disusun oleh POKJA KLHS yang dikukuhkan dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030. Pokja KLHS diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kewenangan tertinggi di pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan para Perangkat Daerah (PD), sehingga mempermudah koordinasi antar PD dalam mengambil keputusan strategis dan didampingi oleh Wakil Ketua dari DLH selaku penanggung jawab penyusunan KLHS dan dari Bappeda selaku penanggung jawab penyusunan RPJPD. Pokja KLHS juga didampingi oleh tim Tenaga Ahli KLHS.		

Penilaian: Laporan KLHS			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
Apakah Laporan KLHS telah memuat :		X	Belum lengkap
		√	Lengkap
		TS	Terpenuhi sebagian
		TR	Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan)
1.	Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	√	Terdapat pada sub bab 1.1. latar belakang dan 1.2. dasar hukum penyusunan KLHS
2.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	√	Kerangka kajian pengaruh telah dilakukan terhadap seluruh isu strategis yang dihasilkan dari studi literatur, FGD, dan hasil konsultasi publik 1. Metodologi yang digunakan telah dijelaskan tiap tahapannya secara rinci pada sub bab 1.5 yang telah mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Metodologi Penyusunan, hasil pengkajian pengaruh dapat dilihat pada Bab 4. Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB). Dan Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan KLHS RPJPD DKI 2025-2045 telah mengacu pada PP 46 tahun 2016, PermenLHK No.69 Tahun 2017, dan Permendagri No. 7 Tahun 2018. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dilakukan secara <i>Ex-Ante</i> terhadap rancangan KRP (RPJPD DKI).
3.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	√	Metode, teknik dan rangkaian langkah-langkah perumusan alternatif berdasarkan analisis proyeksi dan skenario pada kerangka kajian. Skenario moderate dan akselerasi disusun sebagai opsi pencapaian target indikator pada masing-masing isu strategis di akhir tahun perencanaan (2045). Target yang digunakan pada analisis proyeksi dan skenario sebagian diambil dari Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 untuk indikator yang relevan. Sementara, target lainnya ditelaah dari berbagai dokumen KRP yang ada baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Detil tahapan serta hasil perumusan alternatif KRP dapat dilihat pada Bab 6. Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan, Sub Bab 6.2. Alternatif Kebijakan.
4.	Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	√	Rekomendasi perbaikan KRP dirumuskan berdasarkan Isu PB Paling Strategis dan melalui serangkaian diskusi antara POKJA KLHS dan penyusun KRP walaupun rancangan KRP belum tersedia. Rekomendasi KLHS disusun dengan mempertimbangkan struktur RPJPD yang terdiri dari Visi, Misi, Arahan Kebijakan dan Sasaran Pokok termasuk pentahapan pembangunan. Proses perumusan dan hasil rekomendasi KLHS dijelaskan pada Bab 6 Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan, Sub Bab 6.3 Rekomendasi Kebijakan
5.	Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	√	Hingga akhir penyusunan KLHS, rancangan KRP belum tersedia (sifat pelaksanaan KLHS <i>Ex-Ante</i>), namun Pokja KLHS sudah berkomunikasi erat dengan Tim penyusun KRP untuk membahas rekomendasi KLHS dan gambaran mengenai integrasinya nanti dalam KRP. Perumusan usulan pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP dijelaskan pada Bab 6 Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan, Sub Bab 6.4. Usulan Intearasi

6.	Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	√	Pada beberapa tahapan proses KLHS telah dilakukan Konsultasi Publik 1 untuk menetapkan isu strategis KLHS pada 6 Juli 2023 dan Konsultasi Publik 2 untuk merumuskan alternatif dan rekomendasi KLHS pada 28 Agustus 2023 yang terdokumentasikan pada Lampiran 4, 5, dan 7. Hasil KLHS akan dipublikasikan melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7.	Hasil penjaminan kualitas KLHS	√	Hasil penjaminan kualitas ditunjukkan melalui Berita Acara sebagaimana terdapat pada Lampiran 10
8.	Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas.	√	Ringkasan eksekutif telah menjadi bagian dari laporan KLHS

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
Nilai: <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 			
Apakah identifikasi dan perumusan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang merupakan akar masalah melibatkan pemangku kepentingan?		Sudah	Perumusan isu PB paling strategis dilakukan melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) penjaringan isu pada 27 Juni 2023 dan Konsultasi Publik 1 untuk menetapkan isu strategis KLHS pada 6 Juli 2023 bersama-sama dengan POKJA KLHS dan para pemangku kepentingan, dimana disepakati Isu PB Paling Strategis yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Risiko Bencana 2. Ancaman Terhadap Keberlanjutan SDA dan LH 3. Kesenjangan Sosial-Ekonomi 4. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik Isu PB Paling Strategis dirumuskan berdasarkan keterkaitan isu menggunakan <i>mind-map</i> sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 4.3. Identifikasi dan Perumusan Isu PB dengan Pendekatan Partisipatif.
Apakah hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:		Sudah	Identifikasi Isu PB didapatkan dari sejumlah pertimbangan terkait yang meliputi:
1.	Karakteristik wilayah		1. Hasil Analisis Capaian TPB Provinsi DKI Jakarta
2.	Tingkat pentingnya potensi dampak		2. Isu pembangunan berkelanjutan dari kondisi lingkungan hidup yaitu (1) kualitas air, (2) pencemaran lingkungan dan (3) degradasi keanekaragaman hayati
3.	Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan		3. Isu pembangunan berkelanjutan dari dokumen perencanaan strategis, yaitu (1) Rancangan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, (2) Tata Ruang Jabodetabekpunjur (Perpres No. 60 Tahun 2020), (3) Naskah Akademik RUU Daerah Khusus Jakarta, (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta 2022-2052, (5) Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2022-2042, (6) Laporan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 2022-2042, dan (7) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.
4.	Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program		4. Isu PB Paling strategis dirumuskan berdasarkan keterkaitan antar isu menggunakan instrument <i>mind-map</i> sebagaimana dijelaskan pada sub bab 4.3. Identifikasi dan Perumusan Isu PB dengan Pendekatan Partisipatif
5.	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau		5. Proses pelaksanaan KLHS dilakukan secara <i>ex-ante</i>
6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.		

Apakah rumusan isu prioritas sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:		Sudah	Perumusan isu PB paling strategis telah mempertimbangkan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) aspek tersebut yang dapat dilihat di Bab 3 Gambaran Umum Wilayah dan Bab 4 Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan. Aspek ke-10 tidak terdapat di Provinsi DKI Jakarta.
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.		
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup		
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.		
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.		
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.		
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.		
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.		
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.		
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau		
10	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.		
Apakah lingkup geografis diidentifikasi dengan jelas?		Sudah	Lingkup geografis dijelaskan dengan jelas, tidak hanya sebatas wilayah administrasi provinsi DKI Jakarta saja tetapi juga melalui batas wilayah fungsional seperti dalam pembahasan mengenai sumber daya air, hutan dan ekoregion yang mencakup hulu hilir dan dijelaskan pada Sub Bab 3.1.1. Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional dan Sub Bab 3.1.2. Karakteristik Wilayah
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Sudah	Wilayah fungsional mencakup pula wilayah hulu dan hilir mencakup wilayah administrasi Jabodetabekpunjur sebagaimana dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.1. Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional dan Sub Bab 3.1.2. Karakteristik Wilayah
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?		Sudah	Pada penjelasan Isu PB Paling strategis, telah dijelaskan cakupan wilayah terdampak sebagaimana dapat dilihat pada Sub Bab 4.4 Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
<p>Keterangan Tambahan:</p> <p>Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui serangkaian analisis isu pembangunan berkelanjutan dari capaian TPB, analisis berdasarkan kondisi lingkungan hidup, dan analisis terhadap dokumen perencanaan strategis. Hasil analisis tersebut kemudian dianalisis kembali dengan analisis konten untuk mendapatkan isu PB paling strategis. Isu PB paling strategis kemudian diuji dengan pelibatan pemangku kepentingan dalam FGD dan Konsultasi Publik 1.</p>			

Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	Penjelasan kondisi terkini dari isu PB prioritas dan strategis dapat dilihat pada Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Ya	Status daya dukung dan daya tampung lingkungan dijelaskan pada Sub Bab 3.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Tidak	Pada saat disusunnya KLHS RPJPD DKI Jakarta, proses penyusunan KRP masih dalam tahap persiapan sehingga belum ada dokumen KRP dan tidak dapat dilakukan analisis dampak KRP-nya
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Tidak	
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Tidak	
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh: isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi	Tidak	

Penilaian: Pengkajian		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Hasil analisis memuat kajian:		
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Ya	Analisis daya dukung dan daya tampung dijelaskan pada Sub Bab 3.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ya	Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup dapat dilihat pada Sub Bab 3.2. Kondisi Lingkungan Hidup
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Ya	Kinerja Jasa Lingkungan hidup dijelaskan pada sub bab 3.2.1.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Ya	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi bagian dari penjelasan isu PB prioritas dan strategis ancaman terhadap keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup yang ada pada Sub Bab 4.4.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Ya	Kerentanan perubahan iklim menjadi salah satu bagian pembahasan dalam isu PB prioritas dan strategis tingginya risiko bencana pada Sub Bab 4.4.1 Tingginya Risiko Bencana
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Ya	Potensi keanekaragaman hayati dijelaskan pada Sub Bab 3.2.3 dan area bernilai konservasi tinggi pada Sub Bab 3.2.4
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?	Ya	Pengkajian yang bersifat kuantitatif didasarkan pada data/informasi dan hasil kajian resmi yang sudah ada seperti analisis spasial daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja jasa lingkungan, zona konservasi air tanah, dsb. Analisis spasial menjabarkan besaran luasan atas hasil kajian.
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/ referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?	Ya	Pengkajian dilakukan dengan landasan hukum yang terkait dan berdasarkan tata cara penyelenggaraan KLHS RPJPD sebagaimana diatur dalam PP 46/2016 dan PermenLHK 69/2017 (sub bab 1.3) dan Permendagri 7/2018. Selain itu juga menggunakan tata cara baku kajian bidang ilmu terkait.
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?	Ya	Analisis dilakukan secara spasial dengan peta-peta yang tersebar dalam Laporan KLHS
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?	Ya	KLHS RPJPD dilakukan tidak bersamaan dengan proses penyusunan KRP (<i>Ex-Ante</i>)

Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?	Ya	Analisis dampak dan risiko terhadap isu prioritas dan strategis merupakan bagian dari deskripsi isu PB strategis pada Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup berdasarkan ketersediaan data dan digambarkan dengan <i>mind map</i>
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?		
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?		
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ya	Dilakukan perkiraan target capaian indikator berdasarkan skenario <i>Business as Usual</i> (BaU), Moderate dan Akselerasi yang dijelaskan pada Sub Bab 6.1. Tren, Proyeksi dan Skenario Indikator
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Ya	Dampak dan resiko dijelaskan secara spasial jika data spasial yang diperlukan tersedia
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Ya	Rumusan alternatif dan rekomendasi kebijakan disusun dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini:		
1. Perubahan tujuan atau target	Ya	Dalam KLHS RPJPD sesuai dengan karakteristik KRP maka dirumuskan alternatif dan rekomendasi penyempurnaan KRP dalam bentuk rumusan usulan substansi visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok berdasarkan isu PB strategis pada Bab 6 Sub Bab 6.3. Rekomendasi Kebijakan. Sedangkan perubahan target yang diusulkan, berupa target capaian indikator yang relevan berdasarkan skenario BaU, Moderate dan Akselerasi pada Bab 6 Sub Bab 6.1. Tren, Proyeksi dan Skenario Indikator, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan KRP
2. Perubahan strategi pencapaian target	Ya	Rekomendasi perubahan strategi dituangkan dalam rekomendasi arah kebijakan dan sasaran pokok yang dapat dilihat pada Bab 6 Sub Bab 6.3. Rekomendasi Kebijakan
3. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	Tidak	Tidak ada usulan perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi
4. Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ya	Diuraikan pada rumusan usulan alternatif dan rekomendasi yang salah satunya mempertimbangkan teknologi hijau dan digitalisasi, pada Bab 6 Sub Bab 6.2. Alternatif Kebijakan dan Sub Bab 6.3. Rekomendasi Kebijakan
5. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	Tidak	Tidak relevan dengan sistematika dokumen KRP RPJPD
6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	Ya	Menekankan arahan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional untuk mempertahankan/ meningkatkan fungsi ekosistem dalam Sub Bab 6.3 Rekomendasi Kebijakan

7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ya	Menekankan arahan untuk memitigasi dan mengurangi risiko bencana dalam Sub Bab 6.3 Rekomendasi Kebijakan
	Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?	Ya	Menyusun dan merumuskan alternatif disusun menggunakan bantuan matriks kerangka kajian pada Bab 6 Sub Bab 6.2 Alternatif Kebijakan dan melalui pelibatan pemangku kepentingan melalui Konsultasi Publik 2 pada 28 Agustus 2023
	Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?	Ya	RPJPD memuat kebijakan, sehingga langkah pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dirumuskan dengan mempertimbangan : a. Sinergi dan harmonisasi dengan KRP strategis yang sudah ada (RPJPN, RPPLH, RTRW) b. Cara terbaik dalam mengatasi isu strategis
	Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin masih akan muncul?		
	Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?	Ya	Pada perumusan usulan arah kebijakan berdasarkan isu strategis keberlanjutan SDA dan LH dapat dilihat rumusan yang mempertimbangkan perbaikan kualitas lingkungan dan upaya perlindungan SDA pada Bab 6 Sub Bab 6.2. Alternatif Kebijakan dan Sub Bab 6.3. Rekomendasi Kebijakan
	Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian dan penyusunan alternatif?	Ya	Hasil rekomendasi telah dilakukan secara runut dan sistematis sejak penetapan isu PB paling strategis, hasil kerangka kajian dan perumusan alternatif yang telah diidentifikasi sebelumnya
	Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Ya	Rekomendasi KLHS RPJPD harus dijadikan acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD

Penilaian: Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Pemenuhan	Keterangan
Apakah telah terpenuhi :	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 	
1. Data pendukung proses dan hasil konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	Sudah	Dokumentasi keseluruhan kegiatan terdapat pada Lampiran 3 s/d 7
2. Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Tidak	Dokumen rancangan awal KRP hingga akhir pelaksanaan KLHS belum tersedia, karena pelaksanaan KLHS bersifat <i>Ex-Ante</i>
3. Dokumen penjaminan kualitas	Sudah	Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat pada Lampiran 11
4. Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	Sudah	Terdapat pada Lampiran 8. Kompetensi Tenaga Ahli
5. SK Kelompok Kerja KLHS	Sudah	SK POKJA KLHS terdapat pada Lampiran 1

Penilaian: Pengintegrasian Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	Pemenuhan	Keterangan
Apakah telah terpenuhi:		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP	Belum	Dokumen rancangan awal KRP hingga akhir pelaksanaan KLHS belum tersedia. Rekomendasi diikuti dengan usulan integrasi ke dalam rancangan awal RPJPD dalam waktu dekat. Proses integrasi perlu dikawal hingga akhir penetapan RPJPD.
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP		

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP		
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)		
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	Tidak	Tidak Relevan
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Sudah	Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS dituangkan dalam Sub Bab 6.5
Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Tidak	KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta berada pada tataran strategis, bukan teknis.

Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Pada proses KLHS telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) penjarangan isu pada 27 Juni 2023, Konsultasi Publik 1 untuk menetapkan isu strategis KLHS pada 6 Juli 2023 dan Konsultasi Publik 2 untuk merumuskan alternatif dan rekomendasi KLHS pada 28 Agustus 2023
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Terdapat daftar hadir dalam setiap pertemuan sebagaimana didokumentasikan pada Lampiran 4
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Pemangku kepentingan yang diundang berdasarkan kebutuhan dari setiap FGD/KP luring, jika ada pemangku kepentingan yang tidak hadir dalam FGD/KP namun informasi sangat diperlukan dalam kajian, maka dilakukan FGD secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dapat dilihat pada notulensi pertemuan pada Lampiran 3
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	Dokumen dapat diakses oleh publik melalui POKJA KLHS (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)

Lampiran 12. Berita Acara Asistensi Validasi KLHS RPJPD



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 6, Wing C, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBAHASAN DALAM RANGKA ASISTENSI VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025 – 2045**

Jum'at, 17 November 2023

Nomor : BA.30/PDLKWS/KLHS/11/2023

Pada hari ini, Jum'at, 17 November Tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendaryanto, ST., M.Si (Kepala Sub Direktorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai Pimpinan Rapat;
2. Helmy Zulhidayat, ST, MT (Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
3. Fandy Rahmat, ST., MM (Ketua Sub Kelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Bappeda Provinsi DKI Jakarta)

telah melaksanakan rapat secara daring dalam rangka pembahasan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta secara umum telah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2016, Permendagri No. 7 Tahun 2018 dan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, namun perlu disempurnakan sebagaimana masukan secara lisan dan tulisan;
2. Penyempurnaan Laporan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 sebagaimana dimaksud pada butir 1, agar dilakukan pendetailan kembali masing-masing proses penyusunan KLHS sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan

- Menambahkan dasar hukum lain yang relevan

BAB II Dasar Teori

- Tidak ada masukan

BAB III Kondisi Umum Daerah

- Memperbaiki penyajian kondisi umum daerah sesuai dengan bahan paparan yang disampaikan oleh Muhammad Aziz, Subdit. KLHS, Direktorat PDLKWS

BAB IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Menjelaskan proses penapisan indikator TPB yang menjadi kewenangan provinsi dan relevan dengan Provinsi DKI Jakarta
- Menjelaskan proses dan dasar pengelompokan capaian indikator dari 4 kategori sebagaimana pada juknis menjadi 5 kategori sebagaimana pada Rancangan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta

- Menambahkan narasi yang menjelaskan bahwa capaian TPB untuk setiap indikator dapat dilihat pada lampiran
- Melakukan analisis perubahan tutupan lahan dengan unit ekoregion untuk memperkuat justifikasi isu PB berdasarkan Kondisi Lingkungan Hidup

BAB V Analisis Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Organisasi Perangkat Daerah

- Tidak ada masukan

BAB VI Alternatif Skenario dan Rekomendasi

- Menyajikan bentuk alternatif skenario dengan upaya tambahan untuk skenario *moderate* dan skenario *accelerate*

3. Validasi KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 dapat diproses setelah dilakukan penyempurnaan sebagaimana butir-butir tersebut di atas dan Laporan KLHS beserta persyaratan validasi dinyatakan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 November 2023

Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Helmy Zulhidayat, ST, MT
NIP. 19780827 201001 1 020

Ketua Sub Kelompok
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang,
Bappeda Provinsi DKI Jakarta



Fandy Rahmat, ST., MM
NIP. 19850304 201001 1 023

Pimpinan Rapat,
Kepala Sub Direktorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Hendaryanto, ST., M.Si
NIP. 19680121 199503 1 001

Lampiran 13. Surat Permohonan Validasi KLHS RPJPD



**GUVERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 782/LH.00.00
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Permohonan Validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

28 Desember 2023

Kepada

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

di

Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kami sampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045 beserta bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk melakukan proses validasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RPJPD 2025 - 2045 Provinsi DKI Jakarta

TA 2023

